

PROCEEDING

SEMINAR NASIONAL BUSINESS, GOVERNMENT, AND THE PUBLIC: OPTIMALISASI GOVERNANSI-BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs) DI ERA DISRUPTIF DAN GOVERNANSI DIGITAL UNTUK MEWUJUD- KAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN



Editor

Dr. Ulber Silalahi, MA.

Dr. Banowati Talim, M.Si.

Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA.

28 November 2018

**Centre for Public Policy and Management Studies
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Parahyangan**

ISSN: 2655 - 2582

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

**BUSINESS, GOVERNMENT, AND THE PUBLIC:
OPTIMALISASI GOVERNMENT-BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs) di ERA DISRUPTIF DAN
GOVERNANSI DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL BERKELANJUTAN**

Editor:

Dr. Ulber Silalahi, MA.

Dr. Banowati Talim, M.Si.

Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA.

CENTRE FOR PUBLIC POLICY AND MANAGEMENT STUDIES

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Judul:

PROSIDING SEMINAR NASIONAL:
BUSINESS, GOVERNMENT, AND THE PUBLIC: OPTIMALISASI GOVERNMENT-BUSINESS
PARTNERSHIP (GBPs) di ERA DISRUPTIF DAN GOVERNANSI DIGITAL UNTUK
MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL BERKELANJUTAN

Editor:

Dr. Ulber Silalahi, MA.

Dr. Banowati Talim, M.Si.

Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA.

Sampul dan Tata Letak Isi:

William Tandi Wijaya

Laras Ambarsari

ISSN: 2655 - 2582

Penerbit:

Cetakan I : 2018

PENGANTAR EDITOR

BUSINESS, GOVERNMENT AND THE PUBLIC: OPTIMALISASI *GOVERNMENT-BUSINESS PARTNERSHIP* (GBPs) UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

Paradoks sudah terjadi di berbagai aspek kehidupan saat ini. Bertumbuh bersama dengan mitra yang dahulu disebut dengan pesaing, sudah menjadi hal umum, bahkan menjadi kunci sukses bertumbuhnya bisnis. Bermitra dengan pemerintah yang dianggap sebagai penguasa, dahulu merupakan sebuah absurd, namun sekarang justru menjadi sebuah keharusan untuk terciptanya pertumbuhan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, trend dunia saat ini justru menunjukkan bahwa kemitraan bisnis dengan publik dan masyarakat justru akan menjadi penentu keberhasilan bisnis itu sendiri. Masyarakat semakin tersentuh dengan berbagai cerita di balik produk, terlebih jika menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat yang tersingkirkan (*marginal*).

Sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (Bisnis) tidak lagi dapat bertumbuh hanya dengan mengandalkan *resource* yang ada, kompetensi yang dimiliki. Dunia bisnis sudah berubah, kemitraan dengan publik justru sangat diperlukan. Kajian mengenai situasi sosial masyarakat, kajian mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat, menjadi dasar untuk penentuan arah pengembangan bisnis. Dengan demikian, produk atau jasa yang dihasilkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang sekaligus menjadi pemakai atau pengguna. Masyarakat sekarang ini lebih tertarik dengan pendekatan yang halus, berempati.

Kemitraan Bisnis, Pemerintah, dan publik sangat nyata terlihat, misalnya dalam upaya pengembangan UMKM. Publik melalui berbagai asosiasi pemerhati UMKM, bergandengan tangan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, bersama-sama melakukan berbagai program pembinaan dan membuka pintu jaringan (*networking*), bahkan sampai ke luar negeri. Kerjasama Pemerintah dalam menangani banjir, bersama dengan akademisi peneliti, perusahaan, dan masyarakat setempat bergandengan tangan, sehingga dapat mengatasi masalah dengan lebih tepat guna.

Kajian, penelitian, seminar, konferensi mengenai kemitraan ini memunculkan berbagai model, pendekatan, yang sekarang semakin disoroti. Seperti *Government–Business Partnership* (GBPs) atau kemitraan antara pemerintah dan bisnis (KPB); *Public-Private Partnership* (PPPs) atau Kemitraan Publik dan Swasta (KPS).

Prosiding ini disusun sebagai bentuk kontribusi civitas akademik dalam memperkaya referensi dalam GBPs, PPPs, dan SDGs. Hasil studi, kajian, dengan berbagai kasus, menunjukkan bagaimana kemitraan bisnis, pemerintah dan publik, menjadi sebuah keharusan, untuk pembangunan yang berkelanjutan. Melalui kemitraan ini, baik antara pemerintah dan bisnis (KPB), maupun kemitraan sektor publik dan sektor swasta (KPS) dapat saling berbagi berbagai sumber daya, kompetensi, peluang; yang jika ini berhasil dengan baik, akan dapat menghasilkan berbagai keputusan inovatif yang memberikan manfaat positif pada berbagai stakeholder. Ujungnya, pertumbuhan berkelanjutan menjadi buah manis yang dapat dinikmati masyarakat.

Aspek kontekstual kemitraan KPB dan KPS ini diantarkan melalui 3 tulisan utama, dimulai oleh paparan Eko Prasajo yang mengetengahkan peran administrasi dan kebijakan publik untuk pembangunan sosial ekonomi masyarakat dalam era global dan digital. Disambung dengan tulisan Kusdi Raharjo yang secara khusus menyoroti rantai pasok integratif sebagai wujud kemitraan bisnis-pemerintah-publik. Tulisan ketiga dari Ulber Silalahi membahas tentang kerja kemitraan antara pemerintah dan bisnis dari perspektif *good public governance*.

Secara khusus, pembahasan implementasi GBPs ini dalam berbagai sektor dibahas dalam bab 2, mulai dari sektor perhubungan dengan kasus pada pelabuhan internasional Patimban Subang. Di sektor pariwisata dikemukakan implementasi kemitraan dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang. Selain itu, disoroti pula wujud kemitraan dalam upaya revitalisasi sungai Citarum. Kemitraan institusi pendidikan dengan pemerintah ditunjukkan melalui implementasi program pendidikan dan pelatihan Kepala Sekolah di Gowa. Sektor bisnis berbasis financial technology yang saat ini sedang bertumbuh, menjadi salah satu model bisnis yang dikembangkan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); selain itu, kemitraan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat juga sudah dikembangkan dalam bentuk Program Toko Milik Masyarakat (TOMIRA) di Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah. Program Genre di Yogyakarta secara khusus mengidentifikasi peran *stakeholders* dalam *collaborative governance*. Di sektor perhutanan, kemitraan administrasi publik dan bisnis dipaparkan dalam kasus di Riau, untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Model kemitraan dikemukakan oleh Wawan Risnawan dan Ahmad Juliarso, dapat dijadikan sebagai referensi bagi penentu kebijakan baik di publik, maupun swasta. Di sektor kesehatan, kemitraan disoroti untuk kasus penanggulangan HIV/AIDS di Sumedang. Sektor bisnis umkm di Banyuwangi dan Jember menjadi kasus dalam pengembangan model akselerasi inovasi, networking, dan promosi.

Pada bagian terakhir, dilengkapi dengan berbagai hasil riset yang dapat memperkaya kajian baik dalam sektor bisnis maupun publik. Berbagai tulisan tersebut memberikan pemahaman mengenai peran aplikasi teknologi, peningkatan kompetensi SDM, *branding* yang tidak hanya perlu dilakukan sektor swasta namun juga publik, manajemen proses serta penegakan aturan melalui revitalisasi peran negara dalam mendorong terciptanya kolaborasi yang baik antara sektor bisnis, publik dan pemerintah.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak tiada karya yang sempurna, semoga prosiding ini dapat memberikan nilai tambah referensi baik bagi pengambil keputusan di lingkungan publik, maupun bisnis, dan masyarakat umumnya serta sebagai acuan bagi para peneliti.

Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti.

Bandung, 17 Desember 2018

Editor

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR	i
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN 1 ASPEK KONTEKSTUAL KEMITRAAN	
PERAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DALAM ERA GLOBAL DAN DIGITAL (Prof. Dr. Eko Prasajo, Ketua Indonesia Association for Public Administration).....	1
PENINGKATAN HASIL USAHA PERTANIAN MELALUI PENDEKATAN RANTAI PASOK INTEGRATIF (Dr. Kusdi Raharjo, DEA, Ketua Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia)	10
KERJA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAN BISNIS DARI PERSPEKTIF <i>GOOD PUBLIC GOVERNANCE</i> (Dr. Ulber Silalahi, MA, Program Studi Administrasi Publik Fisip Unpar Bandung, Ketua Centre for Public Policy and Management Studies).....	20
BAGIAN II HASIL RISET TENTANG KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAN BISNIS	
MODEL AKSELERASI INOVASI DAN NETWORKING SEBAGAI BASIS PENGUATAN DAYA SAING USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI BANYUWANGI (Edy Wahyudi, Kaprodi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Jember)	41
IDENTIFIKASI PERAN STAKEHOLDERS DALAM <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> PELAKSANAAN PROGRAM GENRE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Nur Fitri Mutmainah, S.IP., M.PA, Gerry Katon Mahendra, S.IP., M.I.P, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta)	56
KEMITRAAN PEMERINTAH, SEKTOR BISNIS DAN PUBLIK DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN; STUDI KASUS REVITALISASI SUNGAI CITARUM (Dewi Wijayanti dan Dissa Erianti, Mahasiswa Program Magister Ilmu Sosial-UNPAR Bandung)	67
GBPs DALAM PELAYAN PUBLIK YANG BERKUALITAS PADA ERA OTONOM DAERAH (Nanang Suparman, Engkus, Fadjar <u>Trisakti</u> , Asep Hidayat), Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung).....	82
KAPASITAS GOVERNMENT-BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs) DALAM PEMBANGUNAN PELABUHAN INTERNASIONAL PATIMBAN SUBANG (Dr. H. Iwan Henri Kusnadi,S.Sos,M.Si Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang)	93
DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA SEMARANG (Tri Yuniningsih GOVERNMENT - BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs) , Neni Sriwahyuni, Departemen Administrasi Publik, FISIP-UNDIP, Jawa Tengah)	112
KEMITRAAN UNM DAN PEMERINTAH LOKAL DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEPALA SEKOLAH (Dr. Andi Cudai Nur, M.Si, Prodi Ilmu Adminsitrasi Publik, Universitas Negeri Makassar)	122
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERBASIS <i>FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)</i> SEBAGAI SARANA OPTIMALISASI <i>GOVERNMENT-BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs)</i> DI	

INDONESIA (Budi Rustandi Kartawinata, S.E., M.M, Prodi Admistrasi Bisnis Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom).....	146
POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH, SWASTA DAN MASYARAKATDALAM PROGRAM TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI KABUPATEN KULON PROGO (Eti Henriyani Lina Marliani FISIP Universitas Galuh Ciamis).....	156
HARMONISASI ADMINISTRASI PUBLIK DAN BISNIS, MENINGKATKAN PERANAN ADMINISTRASI DALAM PEMANFAATAN HUTAN DAN LAHAN MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN” PENGALAMAN DI RIAU (Dr. Ahmad Tarmizi Yusa; Lilis Suryani; Rosmayani, Universitas Islam Riau)	163
MODEL KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SEKTOR SWASTA DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA (Wawan Risnawan, Ahmad Juliarso, Universitas Galuh Ciamis).....	193
 BAGIAN III HASIL RISET LAINNYA DI SEKTOR PUBLIK DAN BISNIS	
STRATEGI PROMOSI PARIWISATA KREATIF JEMBER FASHION CARNAVAL (JFC) (Selfi Budi Helpiasuti, Dina Suryawati, FISIP Universitas Jember).....	212
PENGARUH KOORDINASI KPA DENGAN KADER WPA TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAPAIAN PROGRAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN SUMEDANG (Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si, Dhesti Widya Nurhasanah Ningrum, S.Sos., M.Si. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang)	228
PENGUATAN <i>BRAND COMMITMENT</i> PADA PERGURUAN TINGGI: ANALISIS <i>BRAND ORIENTATION</i> DAN <i>BRAND INVOLVEMENT</i> BERDASARKAN <i>CAREER STAGE</i> (STUDI PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) “VETERAN” JAWA TIMUR) (Siti Ning Farida, Nurul Azizah Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur)	244
ANALISIS PENJUALAN DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP LABA BERSIH PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA (Soedarmanto, STIA dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati).....	258
<i>RINGKASAN</i> PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS HASIL PRODUKSI ROTI PLEMBEN, OPAK GAPIT DAN KRIPIK PISANG PADA “UKM NIKMAT” & “UKM HAFIZ” DI DESA BARENG, KEC. BARENG DAN DESA WONOSALAM, KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR (Sri Andayani, Administrasi Bisnis Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya)	275
PROGRAM SENTRA WISATA KULINER SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SURABAYA (Sri Wibawani, Ertien Rining Nawangsari, Annora Aneriah, Ilmu Adm. Negara, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur).	286
KEBIJAKAN PEMERINTAH MENJAWAB TANTANGAN PERANG KEAMANAN CYBER NASIONAL (Andriansyah dan Taufiqurokhman FISIP-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan, Evi Satispi FISIP-Universitas Muhammadiyah Jakarta).....	292
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN SUMEDANG (Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si, Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang)	317

MENGUKUR DAMPAK STIMULUS PEMASARAN DAN STIMULUS LAINNYA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN RAJUTAN BINONG JATI BANDUNG (Thia Ekawati Liansyah Fauzan Aziz, Program Studi S1 Administrasi Bisnis, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Indonesia)	332
BIAYA OPERASI DAN DISTRIBUSI PETIKEMAS DOMESTIK TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA DI BJTI PORT (Indriana Kristiawati, STIA dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati Surabaya).....	357
PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK (Muhammad Hilman Fikri Mahasiswa Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).	379

PERAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DALAM ERA GLOBAL DAN DIGITAL

Oleh: Eko Prasajo¹

Pendahuluan

Pemerintahan saat ini dihadapkan pada perubahan dunia yang bersifat eksponensial ganda (*double exponential*). Perubahan ini telah memporakporandakan kemampuan pemerintahan untuk mengejar dan merespon tingkat harapan juga kebutuhan masyarakat yang sangat cepat. *George Vielmetter* and *Yvone Sell* dalam bukunya *Leadership 2030* (2014) menyampaikan 6 megatrends 2030 yang akan mengubah wajah pemerintahan secara dramatis dan radikal. *Pertama*, Globalisasi 2.0 yaitu Bergeraknya pusat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dari timur ke barat. China dan India akan mengambil peran kepemimpinan tersebut. *Kedua*, krisis energi and kerusakan lingkungan yang massif yang menyebabkan terjadinya potensi perang di berbagai belahan dunia untuk memperebutkan sumber daya energi. *Ketiga*, perubahan demografi kependudukan menuju kepada populasi yang menua (*aging society*). *Keempat* perkembangan massif teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan era digital, era dimana masyarakat selalu mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintah (*people always on*). *Kelima*, konvergensi atau bersatunya perkembangan berbagai teknologi baru seperti nano, bio, robotic dan IT akan menyebabkan sebuah era baru yang akan merombak tatanan struktural, kultural dan sosial masyarakat serta bangsa secara global. Dan *keenam*, menguatnya gejala individualisme dan pluralisme yang lahir dari masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi (*higher income society* dari generasi milenial).

Indonesia di tengah Globalisasi

Untuk konteks Indonesia, dalam berbagai studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional, Indonesia dan beberapa negara di Asia diprediksi memiliki pertumbuhan ekonomi dan potensi pertumbuhan yang sangat mengagumkan pada masa depan. Asian Development Bank (ADB) dalam publikasinya tahun 2011 yang berjudul “*ASIA 2050: Realizing the Asian Century*” menyebutkan bahwa negara-negara Asia yaitu Cina, India, Indonesia, Thailand, dan Malaysia sedang menuju kemakmuran dengan dengan GDP per kapita setara dengan negara Eropa dan Amerika. ADB memperkirakan pada tahun 2050, *Gross Domestic Products* (GDP) negara-negara tersebut mencapai USD\$ 174 Triliun atau 90 Persen dari GDP Asia. Bahkan sejak krisis ekonomi berat tahun 1997-1998, Indonesia berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan, sehingga tahun 2012 menjadi negara dalam urutan 16 dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1,139 Miliar Dolar Amerika (*CIA, World Factbook, 2013*). Indonesia bahkan diperkirakan akan menjadi negara terbesar ketujuh dalam pembangunan ekonomi pada tahun 2030 sebagaimana terdapat pada laporan yang berjudul *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesian’s Potential*. (*McKinsey Global Institute, 2012*).

¹ Dekan dan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia; Ketua Umum Indonesia Association for Public Administration (IAPA); Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN)

Selain pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia juga memiliki faktor pertumbuhan demografi (bonus demografi) yang menguntungkan. Pada tahun 2010 penduduk Indonesia yang berusia produktif (15-64 tahun) mencapai 67 persen. Diperkirakan pada tahun 2030 penduduk produktif tersebut bahkan akan mencapai 192,1 juta atau 70 persen dengan tingkat ketergantungan penduduk yang menjadi tanggungan paling rendah yaitu 46 tanggungan untuk 100 orang yang bekerja.

Berbagai prediksi tersebut sejatinya seperti sekeping uang yang memiliki dua sisi. Hal tersebut tentunya merupakan kesempatan emas yang harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Jika tidak, maka sebaliknya Indonesia akan terperangkap dalam jebakan negara-negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*) atau mungkin kembali berpenghasilan rendah. Bila kualitas pendidikan, kesehatan dan pembangunan tidak kita tingkatkan maka bonus demografi yang kita miliki bahkan akan berbalik menjadi malapetaka bagi negeri dan bangsa ini. Dimana penduduk produktif dalam jumlah yang sangat besar akan menjadi beban bagi negara karena tingkat pendidikan dan kesehatan mereka yang rendah, dan tidak mampu berkompetisi dengan penduduk produktif dari negara-negara lainnya.

Hasil studi lembaga-lembaga internasional lainnya terhadap Indonesia justru menunjukkan lambatnya perubahan aspek governansi sebagai ekosistem pembangunan. *Survey Global Competitiveness Index* oleh World Bank menunjukkan kinerja pemerintahan (*governance*) yang tidak cenderung membaik sejak tahun 2008 sampai tahun 2017. Indikator efektivitas pemerintahan (*government effectiveness*) mengalami kenaikan secara tidak signifikan dari tahun 2008 ke tahun 2017. Demikian juga kontrol dan pemberantasan korupsi masih berjalan sangat lamban. Bahkan dalam lima tahun terakhir dua faktor utama sebagai penghambat investasi di Indonesia adalah korupsi yang masih tinggi dan birokrasi yang tidak efisien (*The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, 2017*). Memang rangking *doing bussiness* Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016 (rangking 41), menjadi rangking 36 pada tahun 2017, akan tetapi berbagai faktor yang mempengaruhinya tidak mengalami perubahan dan serta kenaikan indeks yang sangat kecil (dari 4.52 ke 4.68). Demikian pula indeks efektivitas pemerintahan di Indonesia, mengalami kenaikan tetapi sangat lambat. Tahun 2016 indeks efektivitas pemerintahan Indonesia adalah 46 berada pada rangking 113 (World Bank 2017). Indeks ini berada di bawah negara negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (55), Phillipina (58) dan Thailand (66).

Efektivitas pemerintahan dan kontrol terhadap korupsi merupakan faktor kritikal dan stratejik yang akan menentukan prediksi berbagai lembaga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2030. Pembangunan ekonomi tanpa disertai dengan reformasi governansi dan institusional (*governance and institutional reform*) sangat sulit diwujudkan.

Tantangan Baru Admistrasi Publik: Transformasi Digital

Di berbagai sektor kehidupan, perubahan operasi dan interaksi antar berbagai hal saat ini mengalami perubahan yang sangat radikal. Struktur industri global misalnya, mengalami perubahan yang radikal dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan massif. Hampir semua informasi dapat diperoleh secara cepat dan instan, serta dengan mudah dapat dianalisis dengan mempergunakan Intelegensi Buatan (Artificial Intelegent). Industri yang tidak bisa

memanfaatkan kemajuan teknologi digital sudah dan dapat dipastikan akan mengalami kemunduran atau mungkin kepunahan. Perusahaan retail besar seperti UNIQLO Jepang telah mengembangkan *digital consumer* dan akan segera menutup secara bertahap outlet tradisional yang ada di gedung gedung pertokoan dan mal, serta menggantinya dengan aplikasi pembelian online. Demikian pula, kita bisa melihat di Indonesia berbagai toko dan outlet tradisional di mall dan gedung gedung pusat perbelanjaan, termasuk di mangga dua dan mangga besar mulai kehilangan pelanggan, sebagian bahkan telat tutup. Taksi taksi tradisional sudah mulai kehilangan pelanggan dan tergantikan oleh berbagai perusahaan besar taxi seperti *uber* dan *grab* yang sebenarnya tidak memiliki taksi sendiri. Disrupsi Digital ini memiliki dua sisi, sebagai peluang untuk perubahan yang menguntungkan sekaligus ancaman yang bisa mematikan berbagai perusahaan, tidak terkecuali pemerintahan.

Pemerintah di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sangat luar biasa dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi; tantangan baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pekerjaan manual dan rutin manusia akan segera digantikan dengan intelegensia buatan (*artificial intelegent*). Berbagai aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik akan segera digantikan oleh fungsi fungsi artificial intelegent. Saatnya pemerintah memikirkan bagaimana mempergunakan teknologi secara fundamental untuk melakukan transformasi sektor publik. Berbagai keputusan dan kebijakan pemerintahan tidak lagi dapat mengandalkan data parsial, tetapi kebutuhan data besar (*big data*) yang terintegrasi (*integrated big data*). Masyarakat tidak siap lagi menunggu memperoleh pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel dan secara online. Ketidakmampuan pemerintah untuk memanfaatkan perkembangan digitalisasi akan meningkatkan keterlambatan dan ketidakakuratan dalam proses pengambilan kebijakan, dan pada akhirnya hal ini akan menyebabkan ketidakpercayaan publik yang semakin besar kepada pemerintah.

Pemanfaatan kemajuan digital selain akan meningkatkan efisiensi pemerintahan juga akan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Kantor kantor pemerintahan di berbagai negara sudah mulai melakukan transformasi struktural dengan memanfaatkan kemajuan digital, bukan hanya sekadar pemanfaatan untuk pelayanan publik, tetapi untuk memperkuat pengambilan kebijakan dan keputusan pemerintahan secara cepat dan tepat. Corak, wajah dan interaksi antar unit pemerintahan maupun antara masyarakat dan pemerintah sudah dan akan mengalami perubahan yang sangat cepat. Berbagai kebijakan pemerintah harus segera disiapkan untuk mengantisipasi perkembangan interaksi sosial yang sama sekali berbeda dan perubahan berbagai rantai produksi global yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Tuntutan transformasi digital ini membutuhkan berbagai kesiapan: *Pertama*, peningkatan kompetensi SDM yang dapat menggunakan dan berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi (*e-literasi*). *Kedua*, perubahan mental model dan budaya baru untuk berbagi data dan informasi (*shared culture readiness*) antar unit organisasi maupun antara pemerintah dan masyarakat. *Ketiga*, perangkat teknologi informasi yang memiliki kompatibilitas dan interoperabilitas berbagai unit organisasi.

Karakteristik utama era digital dan virtual adalah fleksibilitas/fluiditas pekerjaan dan tempat kerja. Pelayanan oleh pemerintah akan bercorak *everything and everywhere*. Dalam situasi seperti ini kantor dan tempat kerja tidak lagi mutlak diperlukan, dan para pegawai tidak harus melakukan perjalanan ke kantor atau tempat rapat untuk melakukan pekerjaan. Seperti telah kita lihat dalam

perkembangan terbaru, restoran atau kafe tanpa awak telah dikembangkan oleh pengusaha besar China, *Jack Ma*. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi trends baru ini akan terjadi dalam berbagai pelayanan publik. Berbagai pekerjaan manusia/pegawai ASN akan tergantikan oleh kecerdasan buatan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini memberikan penguatan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menuntut perubahan etika, perilaku dan integritas para pegawai ASN. Janji, ucapan, perbuatan, sikap dan keputusan pegawai/pejabat ASN akan dengan mudah diketahui dan dapat diketahui kembali (*recall*) bahkan untuk waktu yang sudah lama berlalu.

Memperkuat Kapabilitas Kebijakan Publik berbasis Bukti

Berbagai upaya untuk melakukan perubahan kualitas pemerintahan dalam era global dan digital pada dasarnya di dasarkan pada suatu kenyataan, bahwa pada abad ke 21 tantangan yang dihadapi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat adalah semakin terbukanya ekonomi internasional dan semakin terkaitnya antara sektor privat dan sektor publik. Tuntutan masyarakat semakin bervariasi dan semakin tinggi, sementara pada sisi lainnya kemampuan pemerintah untuk menghadapi masalah-masalah sosial semakin dipertanyakan. Lingkungan kebijakan yang dihadapi oleh pemerintah semakin cepat berubah, tidak pasti dan kadangkala sangat chaotis. Data dan informasi sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan keputusan publik menjadi sangat cepat usang, sehingga diperlukan pendekatan dan cara baru dalam proses pembuatan kebijakan publik yang lebih dinamis, antisipatif dan adaptif.

Hal ini seperti disampaikan oleh *Neo dan Chen (2007)* dalam bukunya *Dynamic Governance*, bahwa kemajuan Singapore dalam pembangunan ekonomi sangat didukung oleh kemampuan pemerintah dan birokrasi untuk menyusun kebijakan yang adaptif sesuai dengan perubahan lingkungan strategis -termasuk globalisasi, tingkat harapan masyarakat yang semakin tinggi serta perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemampuan untuk membuat kebijakan publik ini menjadi tuntutan dan keniscayaan untuk membangun dan mempertahankan daya saing bangsa dalam *global governance* dan *global competition*.

Kemampuan pemerintah untuk menyusun dan membuat kebijakan publik yang berkualitas tentu saja merupakan fungsi dari kualitas para pegawai dan pejabat birokrasi pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa sistem sumber daya manusia di birokrasi pemerintahan juga akan membentuk kemampuan para birokrat untuk membuat dan menyusun kebijakan. Kualitas kebijakan pada umumnya akan menentukan pula kualitas pemerintahan secara keseluruhan (*the quality of government*). Paling tidak ada 4 faktor yang akan membentuk kualitas dari kebijakan publik suatu negara: *Pertama*, Sistem dan manajemen sumber daya manusia (*Human Ressource System and Management*) yang memberikan dasar fondasi terbentuknya kapabilitas (*expertise and capacity*), karakter etis, integritas dan pemahaman yang baik atas nilai publik yang akan diperjuangkan dalam kebijakan publik (*public value*) (*Benington and Moore, 2010*).

Kedua, Sistem politik dan pemerintahan yang baik (*good political system and governance*) menjadi dasar bagi berkembangnya kebijakan publik yang berpihak kepada tujuan dan kepentingan konstitusi/nasional, serta terintegrasinya berbagai kebijakan pemerintah/negara secara horizontal maupun secara vertikal. *Ketiga*, Sistem dan proses penyusunan kebijakan publik berbasis pengetahuan

dan informasi faktual (*knowledge based public policy*) yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan publik (*Peter and Pierre, 2006*). Keempat, Linkage antara lembaga penyediaan informasi (*evidence provider*) seperti perguruan tinggi dan Litbang dengan pembuat kebijakan (*policy maker*) yang memberikan dasar bagi terhubungnya berbagai hasil penelitian dalam proses penmbuatan kebijakan publik.

Kebijakan publik yang adaptif hanya dibuat oleh para pejabat birokrasi memiliki kemampuan untuk menggunakan pengetahuan (*knowledge*) dan data/informasi yang faktual (*factual information*) dalam proses kebijakan. Dua dasar utama ini, yaitu pengetahuan dan informasi merupakan komponen yang fundamental dalam membuat kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*). Kemampuan menyusun kebijakan berbasis bukti ini merupakan keniscayaan bagi para pejabat birokrasi dan pemerintahan untuk menghadapi tuntutan globalisasi dan harapan masyarakat yang semakin tinggi. Hal ini seperti dijelaskan oleh *Guy Peters* “*policy formulation is based upon two interacting factors – how much factual information is available to the formulator and how well he or she understands the problem causes*”.

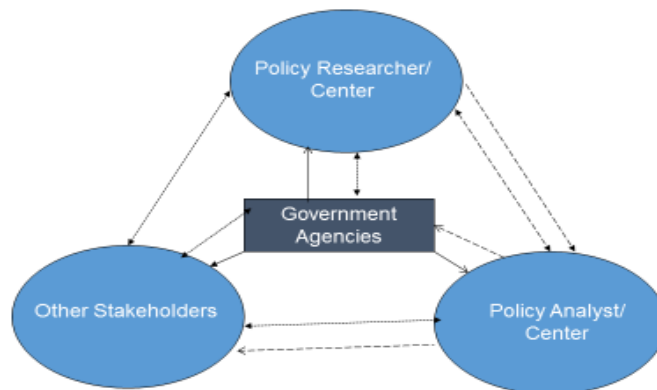
	High Knowledge of causation	Low Knowledge of causation
High Information	Routine	Conditional
Low Information	Craftsmen	Creative

Peters’s Formulation Models

Dalam prakteknya, proses pengambilan kebijakan di pemerintahan memiliki empat tipologi seperti dijelaskan oleh *Guy Peters*: (1) *Routine*, yaitu kebijakan yang diambil dengan dasar pengetahuan yang tinggi dan informasi yang lengkap, (2) *Conditional*, yaitu kebijakan yang diambil dengan dasar pengetahuan yang rendah tetapi memiliki informasi yang lengkap, (3) *Craftsmen*, yaitu kebijakan yang diambil dengan pengetahuan yang tinggi tetapi informasi yang terbatas, dan (4) *Creative*, kebijakan yang diambil dengan dasar pengetahuan yang rendah dan informasi yang lengkap.

Untuk membangun Kebijakan berbasis Bukti (KBB), sangat diperlukan pemahaman dan kemampuan pejabat birokrasi dan pemerintahan untuk memperoleh dan memanfaatkan data dan informasi baik dari *tacit knowledge*, *explicit knowledge* maupun dari berbagai hasil penelitian. Seringkali terjadi bahwa proses pembuatan kebijakan tidak memiliki data dan informasi empirik, sehingga kualitas kebijakan sangat buruk dan tidak mencapai kinerja (*outcome atau impact*) yang diharapkan. Kebijakan publik merupakan aktivitas intelektual yang terjadi dalam proses politik (*the intellectual activities in political process*). Meskipun dalam proses politik akhirnya seringkali sangat mempertimbangkan ideologi dan filosofi negara maupun kepentingan partai politik yang berkuasa, kebijakan publik yang baik harus mempergunakan data dan informasi empirik untuk membuat sejumlah pilihan dan rekomendasi kebijakan. Jika hal ini diabaikan, maka akibat yang dapat terjadi antara lain adalah (1) resistensi dari kelompok penerima kebijakan, (2) tidak tercapainya tujuan kebijakan, (3) perubahan kebijakan yang sangat sering dilakukan, (4) inefisiensi anggaran, (5) disharmoni antar kebijakan, serta (6) delegitimasi pemerintahan yang berkuasa berupa ketidakpercayaan masyarakat.

Public Policy Community



Untuk membangun KBB diperlukan relasi antara berbagai Komunitas Kebijakan Publik (*Public Policy Community*) yang terdiri dari: (1) Pembuat Kebijakan (*Policy Maker*), (2) peneliti kebijakan dan analisis kebijakan (*Policy/Reseracher and policy Analys*), dan Pemangku Kepentingan lainnya seperti Media, LSM, dan lembaga sosial kemasyarakatan. Para peneliti kebijakan, terutama para pengajar kebijakan publik dan pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun KBB. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen di Lembaga Penelitian/Pengembangan dan Perguruan Tinggi memiliki peran dan manfaat penting sebagai sumber informasi dan data empirik untuk menjadi dasar dalam proses pembuatan kebijakan. Seringkali terjadi dalam prakteknya kesenjangan antara hasil penelitian dengan kebutuhan informasi dan data yang dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan. Hal ini disebabkan oleh: (1) hasil penelitian yang kurang bermutu, (2) hasil penelitian yang tidak memiliki relevansi terhadap isu kekikinan dalam kebijakan, dan (3) kurang pemahannya para pembuat kebijakan tentang KBB. Dalam kesempatan ini saya mengusulkan agar ke depan pemerintah dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan Litbang dalam rangka mempergunakan hasil hasil penelitian yang dilakukan para dosen, mahasiswa dan peneliti untuk proses pembuatan kebijakan publik. Setiap tahun kurang lebih 16.000 mahasiswa Universitas Indonesia (UI) melakukan penelitian skripsi, tesis dan disertasi. Jika semua penelitian ini dapat ditulis dalam rekomendasi kebijakan (*policy brief*) dan terhimpun dalam sebuah simpanan pengetahuan (*knowledge repocitory*) yang terus menerus diperbaiki, maka hal ini akan menjadi informasi dan data yang sangat bermanfaat bagi pemerintah.

Meskipun demikian, membangun kebijakan berbasis bukti tidaklah mudah. Ada berbagai hambatan yang harus diselesaikan (*Stoker and Evans, 2016*). *Pertama*, hambatan struktural/konstruksional seperti pathology atau penyakit berpikir jangka pendek yang dihidap oleh pejabat birokrasi/pemerintah dan politisi, kompetisi dan konflik antara politik dan birokrasi yang merefleksikan budaya *anti-evidence*, kepentingan unit dan kementerian yang menonjol, dan lemahnya methodology dan hasil penelitian. *Kedua*, hambatan institusional, seperti ketiadaan peran dan tanggungjawab yang jelas para pembuat kebijakan, peran dominan dari para penasihat kebijakan dengan agenda settingnya masing-masing, serta rendahnya kapasitas para pembuat kebijakan. *Ketiga*, hambatan lingkungan kebijakan, seperti sindrom 24/7 siklus media, terlalu banyak kebijakan yang harus diproduksi pada saat yang saat bersamaan, harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap

perubahan yang cepat, berbagai masalah *multi level governance* dalam pembuatan kebijakan, serta lemahnya koordinasi dan harmoni antar berbagai sektor/kementerian dan unit. *Keempat*, hambatan sistem, seperti lemahnya dukungan para politisi, siklus anggaran dan perencanaan yang singkat, tekanan untuk pelayanan dan prosedur administrasi yang panjang, rendahnya reward dan incentive serta kapabilitas yang rendah dalam kesadaran politik secara keseluruhan dalam proses pemerintahan.

Penutup: Menjembatani Defisit Tuntutan Era Gobal dan Digital

Pembangunan ekonomi, sosial, dan politik dalam era global dan digital membutuhkan institusi negara yang kuat. Dalam konteks pembangunan ini, Francis Fukuyama misalnya membagi kekuatan negara dalam dua hal yaitu: (1) sejauh mana lingkup fungsi yang dijalankan oleh negara dan (2) kemampuan negara merumuskan, menjalankan dan menegakkan berbagai kebijakan yang dibuat (*Fukuyama, 2004*). Dalam lingkup fungsi, pertanyaan dasar yang diajukan adalah apakah negara harus menjalankan sendiri semua fungsi negara yang kompleks, mulai dari menyiapkan keteraturan publik, sampai pada regulasi industri dan redistribusi kekayaan. Sedangkan dalam dimensi kekuatan/kemampuan negara, pertanyaan dasar yang diajukan adalah apakah negara memiliki kemampuan untuk merumuskan dan menegakkan berbagai kebijakan secara konsisten, menjalankan administrasi negara secara efisien dan efektif dengan birokrasi yang minimal, mengontrol korupsi, kolusi dan nepotisme, memelihara transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintah, dan yang paling utama adalah menegakkan hukum.

Tantangan Indonesia untuk menjadi negara ketujuh terkuat dalam pembangunan ekonomi pada tahun 2030 sebagaimana diprediksi oleh McKinsey Global Institute adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kuat untuk mengakselerasi berbagai potensi *comparative* maupun *competitive advantage* yang kita miliki. Tata kelola pemerintahan yang tidak saja demokratis tetapi juga dinamis (*democratic and dynamic governance*) untuk pembangunan (*Neo dan Chen, 2011*). Sebuah tatanan pemerintahan yang memiliki kapabilitas visioner, mampu membandingkan dan menelaah tantangan dan peluang yang ada, berkemampuan membuat kebijakan yang adaptif dan antisipatif serta berpikir terus menerus untuk perbaikan kemajuan bangsa. Tatanan pemerintahan yang didasari oleh nilai dan budaya yang kuat untuk tidak melakukan korupsi, berorientasi pada pertumbuhan, serta memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk bangsa dan negara.

Target perubahan sistem administrasi pemerintahan yang demikian itu, harus dicapai melalui berbagai tahapan. Beberapa tahun ke depan Indonesia harus pindah dari birokrasi yang sangat mengedepankan peraturan (*rule based*) kepada birokrasi yang berbasis kinerja (*performance based*). Pada tahun 2025 Indonesia harus bisa mencapai birokrasi yang dinamis. Untuk sampai pada kedua tahapan tersebut, berbagai rencana dan kebijakan telah ditetapkan untuk membangun *able people, agile process, positive culture* dan *adaptive policies*.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 tahun 2014) yang ditetapkan tanggal 15 Januari 2014 menjadi landasan hukum dalam perubahan Sumber Daya Manusia. Indonesia akan memasuki babak baru kebijakan dan manajemen SDM Aparatur dari *Closed Career System* menuju *Open Career System*. Pengisian jabatan dalam birokrasi akan dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS berdasarkan kompetensi dan kinerja. Dengan persetujuan Presiden, jabatan jabatan

tinggi ASN dapat pula diisi oleh kalangan Non-PNS. Sistem kepegawaian baru akan diisi melalui dua jalur yaitu jalur PNS dan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jabatan jabatan pimpinan tinggi (setara eselon 1 dan 2) hanya dapat diduduki maksimal lima tahun dan hanya dapat diperpanjang berdasarkan pelamaran kembali dan peninjauan kompetensi serta kinerja. Bahkan di dalam UU ASN ini, PNS dapat diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan. Berbagai perubahan ini dimaksudkan tidak saja untuk memperbaiki struktur dan proses, tetapi juga untuk merubah kultur, sikap mental dan pola pikir aparatur sipil negara.

Daftar Literatur

- Asian Development Bank. 2012. Asia 2050: Realizing The Asian Century. www.adb.org/sites/default/files/asia2050-executive-summary.pdf
- Caiden, Gerald. 1991. Administrative Reform Comes of Age. New York.
- CIA, World Factbook, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>
- Fukuyama, Francis. 2004. State in Building. Governance and World Order in the 21st Century.
- Kim, Pan Suk. 2002. Civil Service Reform in Japan and Korea. Toward competitiveness and competency in: International of Administrative Science, Volume 68.
- McKinsey Global Institute. 2012. The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential. www.mackinsey.com.
- Neo Boon Siong and Geraldine Chen. 2011. Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities, and Change in Singapore. New York. Westview.
- Pollitt, Christopher and Geert Bouckaert. 2000. Public Management Reform: A Comparative Analysis, Oxford: Oxford University Press
- Stoker, Gerry and Mark Evans (ed.), 2016. Evidence-based Policy Making in the Social Sciences. Methods that Matter. Policy Press Bristol and Chicago.
- Vielmetter, Georg and Yvonne Sell. 2014. Leadership 2030. The Six Megatrends. Amacom. New York.
- World Economic Forum. 2017. Global Competitiveness Report.

STRATEGI PENINGKATAN HASIL USAHA PERTANIAN MELALUI PENDEKATAN RANTAI PASOK INTEGRATIF

Oleh: Kusdi Raharjo*

1. Pendahuluan

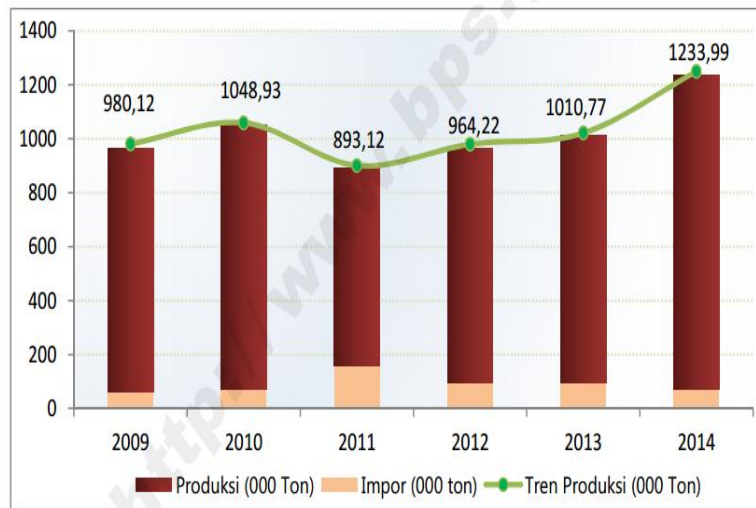
Tren globalisasi saat ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan daya saing mereka. Peningkatan daya saing penting agar perusahaan tidak hanya mampu mempertahankan kelangsungan hidup tapi juga dapat berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Oleh sebab itu perusahaan perlu memiliki strategi yang tepat untuk mempertahankan daya saingnya.

Era post-modern memandang organisasi sebagai tempelan/collage (Marry Jo Hatch, 1997). Konsep post-modern dalam organisasi mengadopsi konsep yang dikembangkan pada studi arsitektur, di mana aliran ini dalam arsitektur adalah mendekonstruksi obyek yang ada (modern) dan membangun obyek yang sama sekali baru, berbeda dari obyek yang ada dan jauh lebih baik. Dalam organisasi, implementasi perspektif post-modern melihat organisasi sebagai kumpulan fungsi terbaik yang diambilkan dari perusahaan lain melalui system alih daya. Peran operator pada perusahaan post-modern dialihkan ke perusahaan konvensional (modern) sehingga menghasilkan rancangan struktur jaringan atau virtual. Industri otomotif, elektronik, IT, online shop adalah beberapa contoh yang telah mengimplementasikan konsep organisasi post-modern dengan baik.

Implementasi perspektif organisasi post-modern menuntut strategi yang berbeda dibandingkan dengan strategi organisasi modern. Menurut pandangan strategi berbasis sumberdaya atau "*resource based views (RBV)*" yang berkembang pada era modern, daya saing berkelanjutan perusahaan dibangun dengan menggunakan sumberdaya yang unik, langka, tidak dapat ditiru, dan bernilai tinggi bagi perusahaan. Untuk mewujudkannya, perusahaan menggunakan strategi integrasi vertikal dan horizontal agar dapat menjamin ketersediaan sumberdaya yang diperlukan. Dengan strategi integrasi, perusahaan melakukan akuisisi atau investasi pada perusahaan yang memasok material yang dibutuhkan. Strategi ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan ketidak-pastian atas pasokan material, namun dibutuhkan sumberdaya yang besar baik berupa sumberdaya finansial, teknologi maupun sumberdaya manusia untuk diinvestasikan pada anak perusahaan pemasok bahan baku. Strategi seperti ini tidak relevan lagi bagi perusahaan post-modern dan digantikan oleh strategi yang menggunakan system rantai pasok untuk membangun keunggulan daya saing.

Bawang Merah merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi (*high value commodity*). Komoditas bawang merah menjadi sumber pendapatan, sumber kesempatan kerja serta memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perkembangan ekonomi wilayah terutama di daerah sentra produksi.

* Ketua Umum Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia dan Ketua Program Studi Magister Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang



Sumber: BPS (2015)

Gambar 1. Perkembangan Produksi Bawang Merah (ribu ton) Indonesia dan Kontribusi Impor Selama Kurun Waktu 2009 – 2014

Gambar 1 menunjukkan total produksi bawang merah dari tahun 2009 hingga tahun 2014 yang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0.09 % tiap tahunnya. Namun seperti layaknya komoditas pertanian yang lain, bawang merah juga sangat sensitive terhadap iklim sehingga produksinya sangat fluktuatif. Total jumlah produksi bawang merah di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 1,01 juta ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 1,23 juta ton atau sebesar 21,48 persen. Meskipun terjadi peningkatan produksi, belum menyelesaikan permasalahan mendasar bagi tata niaga bawang merah. Permintaan bawang merah pada waktu-waktu tertentu seringkali belum terpenuhi sesuai harapan sehingga lonjakan harga bawang merah tidak bisa dihindari. Fluktuasi harga bawang merah ini selalu menjadi permasalahan pasar bawang merah lokal (Widodo dan Rembulan 2010). Salah satu penyebabnya adalah puncak produksi bawang merah yang terjadi pada bulan-bulan tertentu sementara konsumsi bawang merah cenderung merata setiap saat. Adanya fluktuasi harga tersebut menjadikan bawang merah sebagai penyumbang inflasi nasional (Bappenas 2013). Periode 2010 – 2014 inflasi tertinggi terjadi pada Juli 2013 di mana bawang merah menyumbang sebesar 0,48% (BPS,2014). Penyebabnya adalah volatilitas harga yang sangat tinggi.

Sistem rantai pasok bawang merah mencakup 4 aktor utama, yaitu petani – pengepul/tengkulak – pedagang besar terus disalurkan ke pengecer untuk melayani konsumen individual atau dari pedagang besar ke perusahaan pengolah makanan (Raharjo, 2017). Penerapan sistem ini menjadikan pasar bawang merah dikendalikan oleh pengepul, pedagang besar dan pengecer karena mereka memiliki informasi lebih tentang pasar dibandingkan petani. Asimetri informasi menjadi sumber terjadinya distorsi pasar bawang merah. Paper ini memfokuskan pembahasannya pada implementasi sistem rantai pasok integratif untuk mengatasi distorsi pasar bawang merah agar stabilitas harga terwujud.

1. SISTEM RANTAI PASOK SEBAGAI STRATEGI MEMBANGUN DAYA SAING

a. Strategi berbasis sumberdaya (*Resource based View*)

Perusahaan yang menggunakan sumberdaya sebagai dasar untuk menyusun strategi (RBV) memandang bahwa sumberdaya yang berharga, langka, tak ada bandingannya dan tidak dapat disubstitusi dapat digunakan perusahaan untuk membangun keunggulan daya saing (Grant, 1991). Di awal perkembangannya teori ini fokus pada bagaimana memperoleh sumberdaya yang unggul tersebut. Seiring perjalanan waktu, para ahli menyadari bahwa memperoleh sumberdaya yang unggul belum/tidak menjamin dicapainya keunggulan daya saing. Teori RBV memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan kekuatan. Penggunaan sumberdaya atau kombinasi berbagai sumberdaya yang dimiliki secara tepat yang dapat menciptakan keunggulan perusahaan. RBV difokuskan pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kombinasi sumber daya yang tidak dapat dimiliki atau dibangun dengan cara yang sama oleh pesaing. Perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Asumsi RBV yaitu bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sesuai dengan kemampuan perusahaan. Teori RBV menyatakan bahwa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bertumpu pada sumber daya organisasi yang sangat berharga (*valuable*), langka (*rare*), tidak dapat ditiru (*in-imitable*) dan sulit digantikan (*nonsubstitutable*) (VRIN) dalam pengaturan organisasi yang memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengeksploitasi sumber daya (Barney, 1991; Barney & Clark, 2007; Knott, 2003; Kraaijenbrink, Spender, & Groen, 2010). Kerangka kerja dan platform RBV seperti kompetensi inti (Hamel & Prahalad, 1994), kemampuan dinamis (Helfat & Peteraf, 2003; Teece, Pisano, & Shuen, 1997) dan pandangan berbasis pengetahuan (Grant, 1991) dapat menciptakan keunggulan daya saing. Sumberdaya yang unik tersebut dapat menciptakan keunggulan daya saing jika digunakan secara effective (Teece, Pisano, & Shuen, 1997).

RBV merupakan kerangka teoritis untuk menjelaskan bagaimana perusahaan mencapai keunggulan kompetitif melalui sumber daya intra-organisasi dan kompetensi di mana perusahaan mampu menciptakan nilai yang unik dan sulit bagi pesaing untuk menirunya (Barney, 1991). Keunggulan sebagai hasil dari keterampilan dan sumber daya yang unggul di mana keterampilan yang unggul mewakili "kemampuan khas dari personel yang membedakan mereka dari personel perusahaan pesaing". Keterampilan dan sumber daya yang superior dapat diintegrasikan sehingga menghasilkan kompetensi yang khas.

b. Sumberdaya perusahaan sebagai sumber kapabilitas unik perusahaan

Sumberdaya perusahaan meliputi baik yang berwujud seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan maupun yang tidak berwujud berupa pengetahuan, hubungan, reputasi. Kapabilitas perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kapabilitas operasional dan kapabilitas dinamis. Yang pertama merupakan kemampuan perusahaan untuk menjalankan fungsi dasar guna menjaga kelangsungan hidupnya. Sedangkan kemampuan dinamis mencerminkan kemampuan perusahaan untuk merespon perubahan lingkungan yang begitu cepat.

Menurut Sampurno (2010) *dynamic* merujuk pada kapasitas untuk memperbarui kompetensi terkait jika terjadi perubahan lingkungan bisnis, melakukan respons inovatif jika diperlukan karena adanya tuntutan waktu dan kecepatan masuk pasar, perubahan teknologi yang cepat, persaingan masa

depan dan determinasi pasar yang sulit. Sedangkan capabilitas menekankan pada peran kunci dari manajemen strategis dalam adaptasi yang tepat, integrasi dan rekonfigurasi internal dan skill organisasional, sumber daya dan kompetensi fungsional sehingga terjadi kesesuaian (match) dengan perubahan lingkungan.

Dalam dekade terakhir ini makin banyak pemikiran dari para pakar strategi dan manajemen yang menyatakan bahwa kapabilitas dinamis merupakan jantung strategi perusahaan, penciptaan nilai dan keunggulan bersaing (misalnya Teece, 2009; Eisenhardt dan Martin, 2000; Winter, 2003; Helfat et al., 2007). Strategi menurut Teece dan Pisano (1997) adalah kemampuan perusahaan yang harus diarahkan pada kebutuhan pengguna (konsumen), bersifat unik sehingga produk dan jasa yang dihasilkan dihargai tanpa banyak melihat pada pesaing, sulit ditiru sehingga keuntungan dapat ditentukan dengan mengabaikan adanya pesaing. Keunggulan daya saing perusahaan menurut Teece dan Pisano (1997) berasal dari kemampuan dinamik yang berakar didalam kegiatan rutin perusahaan tersebut, melekat dalam proses-proses kegiatan perusahaan, dan terkondisikan selama beroperasinya atau berdirinya perusahaan

Adapun yang dimaksud dengan dynamic capabilities adalah kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan, membangun, dan merekonfigurasi kompetensi internal dan eksternal untuk menghadapi lingkungan yang berubah cepat (Teece, 2009). Secara konseptual penelitian-penelitian mengenai kapabilitas dinamik didasarkan pada konsep resource-base view (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Peteraf, 1993; Amit & Shoemaker, 1993). Suatu perspektif yang menyimpulkan bahwa keunggulan bersaing perusahaan-perusahaan dibangun melalui sumber daya-sumber daya baik yang *tangible* maupun *intangible*.

Kombinasi dan penggunaan yang tepat atas kedua jenis sumberdaya tersebut dapat menciptakan kemampuan (kapabilitas) yang tidak dapat ditiru oleh para pesaingnya. Dengan demikian bila kita meminjam teori system “masukan – proses – keluaran”, asset yang unik baik berwujud maupun tak berwujud merupakan sumberdaya masukan yang diproses melalui mekanisme di internal perusahaan agar menghasilkan keluaran (kapabilitas) yang unik dan diperlukan untuk menciptakan keunggulan daya saing.

2. MODAL SOSIAL SEBAGAI SUMBER KEUNGGULAN PERUSAHAAN

a. Konsep Modal Sosial

1) Modal Kognitif, Relasional dan Struktural Sebagai Antecedent Integrasi Rantai Pasok

Rantai pasok integratif merupakan kapabilitas strategis organisasi yang dapat menjadi keunggulan daya saing perusahaan menghadapi persaingan global, pengalihan kegiatan non inti ke negara-negara berkembang, dan pemampatan waktu rantai pasok (Andersen dan Skjoett-Larsen, 2009; Bhattacharyya, 2010). Rantai pasok integratif didefinisikan sebagai sejauh mana semua kegiatan dalam suatu organisasi dan kegiatan dari pemasok, pelanggan, dan anggota rantai pasok lainnya terintegrasi (Flynn et al., 2010). Rantai pasok integratif menghubungkan perusahaan dengan pelanggan, pemasok, dan anggota saluran lainnya dengan mengintegrasikan hubungan, aktivitas, fungsi, proses, dan lokasi (Kim dan Narasimhan, 2002). Rantai pasok integratif menggabungkan integrasi informasi, integrasi logistik, integrasi distribusi, integrasi pembelian, integrasi internal, integrasi pemasok,

integrasi pelanggan, integrasi proses dan integrasi produk (Das et al., 2006). Hal ini membutuhkan tingkat interdependensi yang tinggi dimana mitra rantai pasokan mengoordinasikan berbagai proses pertukaran dan produksi untuk memecahkan masalah bersama (Huang et al., 2014).

Faktor kunci untuk keberhasilan rantai pasokan integratif adalah hubungan kerjasama antara mitra yang berbeda dalam rantai pasokan, khususnya, kepercayaan dan komitmen hubungan (Handfield dan Bechtel, 2002; Beth et al., 2003; Kwon dan Suh, 2005). Zhao et al. (2011) menemukan bahwa komitmen hubungan pabrikan terhadap pemasok dapat memiliki efek positif pada integrasi dengan pemasok. Rantai pasok integratif dalam "model petani perusahaan mengacu pada praktik di mana petani dan pembeli (perusahaan) mengintegrasikan strategi, proses, praktik dan perilaku. Kerjasama menghasilkan kegiatan yang disinkronisasi dan konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akhir (Zhao et al, 2008a, 2008b; Flynn et al, 2010); ini merupakan bagian penting dari rantai pasokan integratif.

Modal social telah banyak diaplikasikan dalam berbagai penelitian tentang manajemen operasi dan area manajemen rantai pasokan (Krause, et.al, 2007; Matthews dan Marzec, 2012), manajemen sumber daya manusia (Koulikoff-Souviron dan Harrison, 2008), dan inovasi (Tsai dan Ghosal, 1998). Namun sisi lain belum banyak yang meneliti hubungan antara modal social dengan rantai pasok integrative.

Modal sosial sebagai agregat sumberdaya aktual maupun potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang awet (*durable*) sehingga menginstitusionalisasikan hubungan persahabatan (*acquaintance*) yang saling menguntungkan (Bourdieu & Wacquant, 1992). Jaringan sosial tidaklah alami melainkan dikonstruksi melalui strategi investasi yang berorientasi pada pelembagaan hubungan – hubungan kelompok, yang dapat dipakai sebagai sumber terpercaya untuk meraih keuntungan (*benefits*). Nahapiet & Ghoshal (1998) membagi modal sosial menjadi 3 dimensi, yaitu: kognitif, relational, dan structural.

Pertama, modal kognitif, merujuk pada persamaan – persamaan yang dimiliki oleh berbagai pihak dalam modal sosial. Persamaan tersebut meliputi nilai, filosofi bisnis, tujuan dan visi. Nilai yang sama dan saling memahami adalah aspek penting dari dimensi ini. Nilai bersama antar aktor dapat diartikan sebagai kesamaan norma perilaku dan nilai diantara berbagai pihak (Inkpen & Tsang, 2005). Kesamaan nilai mendorong pihak – pihak untuk memperjuangkan kepentingan bersama ketimbang kepentingan individu (Coleman, 1988).

Kedua adalah modal relasional, yaitu merupakan kepercayaan, pertemanan, rasa hormat, dan interaksi yang dibangun oleh para aktor. Pertemanan, rasa hormat, dan hubungan timbal balik dikembangkan melalui keberhasilan interaksi yang terus berulang dan transaksi yang berulang (Kale, Singh, & Perlmutter, 2000). Interaksi yang berulang tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap kontrak formal dan peraturan (Granovetter, 1992) (Zaheer & Venkatraman, 1995) (Gelderman, Cees J., Semeijin, & Parique, 2016).

Terakhir modal structural, modal ini merujuk pada pola komunikasi antar pihak dalam interaksi sosial (Gelderman, Cees J., Semeijin, & Parique, 2016). Berbeda dengan hubungan relasional, dimensi struktural terkait dengan hubungan impersonal dalam jaringan sosial

(Nahapiet & Ghoshal, 1998). Selain sumber daya dan kompetensi intra-organisasi, perusahaan juga dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan berhubungan dengan perusahaan lain dengan cara yang menciptakan rantai nilai interorganisasional yang unik (Porter, 1991).

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa terdapat hubungan secara langsung antara modal sosial dengan supply chain, yang disebabkan oleh terbentuknya modal sosial pada proses aktifitas-aktifitas antara supplier dan buyer sepanjang jalur supply chain yang bersifat mutual dan secara kontinyu (Mentzer, et al., 2011). Ketika terdapat *trust* yang merupakan salah satu dimensi dari social capital pada sebuah hubungan yang bersifat mutual, maka akan menyebabkan hubungan semakin kuat dan kecenderungan untuk terus berusaha mempertahankannya dan mereka akan memiliki kecenderungan berkeinginan yang kuat untuk membagi sumberdaya yang dimiliki tanpa ada rasa takut adanya *opportunistic behavior from the other* (Mentzer, et al., 2011). Dalam hal ini berarti bahwa setiap individu yang berperan dalam sepanjang jalur *supply chain* dapat mempengaruhi *supply chain integration*.

3. BUKTI EMPIRIS HUBUNGAN MODAL SOSIAL – RANTAI PASOK INTEGRATIF – KINERJA USAHA

Penelitian dilakukan di 4 (empat) kabupaten di Jawa Timur yang dikenal sebagai sentra bawang merah, yaitu Kabupaten Nganjuk, Kediri, Malang dan Probolinggo. Besaran sampel 200 ditentukan berdasarkan rumus Roscoe (Sugiyono, 2010). Skala pengukuran yang digunakan adalah menggunakan skala likert, dengan rentang 1 (satu) untuk jawaban sangat tidak setuju, hingga 5 (lima) untuk jawaban sangat setuju. Variabel modal kognitif, relasional, dan struktural diukur berdasarkan indikator-indikator yang digunakan oleh penelitian Villena, Revilla dan Choi (2011). Sedangkan variabel rantai pasok integratif diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang digunakan oleh penelitian Huo et al. (2014).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terstruktur yang dipandu dengan pedoman wawancara. Pengolahan data menggunakan PLS.

Uji validitas (menggunakan nilai *Alpha Cronbach*) dan reliabilitas (menggunakan nilai *pearson correlation*) terhadap instrument penelitian menunjukkan bahwa semua instrument sahih dan handal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal relasional dan struktural berpengaruh positif signifikan terhadap rantai pasok integratif. Sedangkan modal kognitif berpengaruh tidak signifikan terhadap rantai pasok integratif. Namun modal kognitif dan juga relasional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal kognitif berpengaruh tidak signifikan terhadap rantai pasok integratif. Modal kognitif ditunjukkan oleh indikator nilai bersama, filosofi bersama, tujuan bersama, visi bersama berpengaruh tidak signifikan terhadap supply chain integration. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa modal sosial kognitif memfasilitasi pertukaran sumber daya karena pembeli dan pemasok melihat nilai potensial dari

integrasi dan penggabungan sumber daya mereka (Nahapiet dan Ghoshal, 1998). Hal ini memberikan kerangka acuan norma perilaku dan pemahaman umum tentang tujuan bersama demi meningkatkan komitmen untuk mengeksploitasi sinergi dan mengurangi kemungkinan konflik (Gulati et al., 2000; Inkpen dan Tsang, 2005; Jap dan Anderson, 2003; Rossetti dan Choi, 2005). Penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa tujuan bersama-sama meningkatkan kinerja operasional dan strategis perihal rantai pasok integratif diantaranya waktu siklus operasional yang baik (Hult et al., 2004), biaya, kualitas, pengiriman, dan fleksibilitas yang baik (Krause et al., 2007).

Keperbedaan ini mengindikasikan bahwa petani dan mitra belum memiliki visi bersama untuk kepentingan bersama dalam meningkatkan rantai pasok integratif atau dengan kata lain petani dan mitra belum memiliki tingkat modal kognitif yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama dalam rantai pasok integratif. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Vivena *et al.*, (2011) yang menjelaskan modal sosial kognitif berpengaruh tidak signifikan terhadap kolaborasi pembeli dan penjual (dapat disebut juga rantai pasok integratif). Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya kekhawatiran adanya pihak-pihak yang mengambil peluang pribadi suatu kelompok tertentu (oportunistik) dan dikenal dengan istilah *the dark side relationships* (sisi gelap suatu hubungan). Atas dasar hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian ini petani dan mitra belum memiliki tingkat modal kognitif yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama dalam rantai pasok integratif.

Relational capital menjadi kunci dalam setiap aktivitas lain dalam supply chain integration (Yim, & Leem, 2013; Ferrer, Santa, Hyland, & Bretherton, 2010). Hal ini berdasarkan pada teori distribusi (Foresster, 1958) yang menekankan pada pentingnya integrasi atau Inter-relasi yang berkaitan dengan arus informasi, arus barang/jasa, arus tenaga kerja, arus keuangan dan arus barang modal antar *stakeholder*, yang kemudian diadopsi ke dalam teori rantai pasok integratif. Kemudian Mentzer *et al.* (2001) menjelaskan bahwa rantai pasok integratif merupakan aktivitas koordinasi yang sistemis dan strategis antara berbagai fungsi bisnis pelaku usaha dalam rantai pasokan, yang bertujuan meningkatkan kinerja secara individual dan kinerja rantai pasok sebagai satu kesatuan. Dengan demikian hal pokok dari aktivitas rantai pasok integratif dapat terangkum dalam dua aktivitas utama yaitu *integrasi* dan *koordinasi*. Merujuk dari teori integrasi (Khan dan Mentzer, 1996) serta teori koordinasi (Malone dan Crowston, 1994), keduanya dibentuk oleh satu kegiatan yang sama yaitu berbagi informasi.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Modal relasional dan struktural berpengaruh positif signifikan terhadap rantai pasok integratif. Para petani yang tinggal di pedesaan masih menjunjung tinggi nilai kekerabatan dan kegotongroyongan sehingga memiliki modal relasional dan structural yang tinggi. Namun untuk bisa dikapitalisasi menjadi asset yang bernilai dan agar memiliki posisi tawar yang lebih besar, mereka sebaiknya tidak bertindak secara individual melainkan bergabung dalam suatu wadah, yaitu kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Lembaga inilah yang akan mewakili petani dalam sistem rantai pasok integratif yang posisi tawarnya relatif sebanding dengan aktor lain dalam system.
2. Modal kognitif berpengaruh tidak signifikan terhadap rantai pasok integratif. Variabel yang diukur dengan kesamaan nilai, visi, tujuan menunjukkan adanya signifikansi yang rendah pengaruhnya terhadap rantai pasok integratif. Para petani nampaknya belum memiliki nilai, visi dan tujuan yang sama. Untuk meningkatkan modal ini perlu dilakukan secara intensif sosialisasi atas nilai-nilai, visi, tujuan yang harus diadopsi oleh para petani.
3. Variabel rantai pasok integratif berpengaruh signifikan terhadap hasil usaha. Informasi merupakan satu diantara obyek rantai pasok yang paling menentukan efektifitas dan efisiensi system. Melalui rantai pasok integratif akan tercipta aliran informasi yang baik antar aktor yang terlibat dalam system rantai pasok. Dengan demikian melalui rantai pasok integratif, koordinasi dalam sistem dapat dilakukan dengan baik sehingga berdampak pada peningkatan hasil usaha petani. Namun demikian untuk membangun sistem rantai pasok integratif tidak cukup mengandalkan asset tak berwujud seperti modal kognitif, relasional dan structural. Asset berwujud seperti infrastruktur TI sangat diperlukan untuk mewujudkannya. Dengan demikian peran pemerintah diperlukan untuk membantu menyediakan infrastruktur TI yang diperlukan untuk membangun system rantai pasok integrative.

Daftar Pustaka

- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of management*, 99-120.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. (1992). *An invitation to reflexive sociology*. Chicago: University of Chicago.
- Bowersox, D., & Closs, D. (1996). *Logistic Management: The Integrated Supply Chain Process*. McGraw-Hill Companies.
- Coleman, J. (1988). Social capital in the cretaion of human capital. *the American Journal of Sociology*, Vol 94.
- Dyer, J., & Chu, W. (2003). The role of trustworthiness in reducing transaction cost and improving performance: empirical evidence from United States, Japan and Korea. *Organization Science*, Vol. 14, No.1.
- Dyer, J., & Chu, W. (t.thn.). The role of trustworthiness in reducing transaction cost and improving performance: empirical evidence from the United States, Japan, and Korea.
- Flynn, B., Huo, B., & Zhao, X. (2010). The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach. *Journal of Operations Management*, Vol 8, 58-71.
- Frohlich, Markham, Westbrook, & Roy. (2001). Arcs of integration: An international study of supply chain strategies . *Journal of Operations Management*, 185-200.
- Gelderman, Cees J., Semeijin, J., & Parique, J. (2016). The impact of social capital and technological uncertainty on strategic performance: The supplier perspective. *Journal of Purchasing and Supply Management*.
- Granovetter, M. (1992). Economic institutions as social capital construction: a framework for analysis. *Acta Sociologica*, Vol 35, Issue 1, 3-11.
- Grant, R. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: Implication fro strategy formulation. *Sage Journals*, 114-135.
- Green Jr, K., Zelbst, P., Meacham, J., & Bhadauria, V. (2012). Green supply chain management practices: impact on performance. *supply chain management: an international journal*, Vol 17, Issue 3, 290 - 305.
- Huo, B., Qi, Y., Wang, Z., & Zhao, X. (2014). The impact of supply chain integration on firm performance: The moderating role of competitive strategy. *Supply Chain Management: An International Journal*, Vol 19, Issue 4, 369-384.
- Inkpen, A., & Tsang, E. (2005). Social capital, network, and knowledge transfer. *Academis of Managemnet Review*, Vol. 30, Issue 1, 156-165.
- Kale, P., Singh, H., & Perlmutter, H. (2000). Learning and protection of proprietary assets in strategic alliances: building relational capital. *Strategic Management Journal*, Vol. 21, Issue 2, 217-228.
- Mentzer, J., DeWitt, W., Keebler, J., Min, S., Nix, N., & Smith, C. (2011). Defining Supply Chain Management. *Journal of Business Logistics*, Vol 22, Issue 2, 1-25.
- Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intelectual capital, and the organizational advantage. *Academy of Management Review*, Vol. 3, Issue 2, 242-266.

- Narasimham, R., & Kim, S. W. (2001). Effect of supply chain integration on the relationship between diversification and performance: evidence from Japanese and Korean firms. *Journal of Operation Management*, Vol 20, Issue 3, 303-323.
- Ondersteijn, C., Wijnands, J., Huirne, R., & Kooten, O. (2006). *Quantifying the Agri-Food Supply Chain*. Springer Netherlands.
- Porter, M. (1991). Towards a dynamic theory of strategy. *Strategic Management Journal*, Vol 12, Issue S2.
- Sporleder, T., & Wu, S. (2006). Social capital and vertical ties in agrifood supply chains. *Journal on Chain and Network Science*, Vol 6, 1-7.
- Teece, D., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic management journal*, Vol 18, No. 7, 509-533.
- Trkman, P., & Groznik, A. (2006). Measurement of supply chain integration benefits. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, Vol. 1, 37-45.
- Villena, V., Revilla, E., & Choi, T. (2011). The dark side of buyer-supplier relationships: A social capital perspective. *Journal of Operations Management*, Vol 29, Issue 6, 561-576.
- Yim, B., & Leem, B. (2013). The effect of supply chain social capital. *Industrial Management and Data System*, 324-349.
- Zaheer, A., & Venkatraman, N. (1995). Relational governance as an interorganizational strategy: an empirical test of the role of trust in economic exchange. *Strategic Management Journal*, Vol; 16, 373-392.

KERJA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAN BISNIS DARI PERSPEKTIF GOOD PUBLIC GOVERNANCE¹

Dr. Ulber Silalahi MA

(Prodi Administrasi Publik Fisip Unpar Bandung)

ABSTRAK

Mengapresiasi era demokratisasi dan menghadapi era disrupsi dan untuk memperbaiki sektor publik yang tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah maka dibutuhkan kemitraan antara sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta (bisnis) bahkan juga dengan sektor masyarakat sipil. Sektor pemerintah dan sektor swasta bersama dengan sektor masyarakat sipil merupakan tiga pilar yang harus bermitra untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemberian pelayanan publik berkualitas. Kemitraan pemerintah-bisnis sangat bermanfaat bagi pemerintah, bisnis dan masyarakat. Dalam bermitra dengan sektor swasta (bisnis), pemerintah memilih beberapa tipologi kemitraan seperti *sectoral basis*, *relationship basis*, *economic basis* dan *policy area*, *scope* dan bentuk kemitraan seperti kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, kontrak sewa, kontrak konsesi dan kontrak lepas. Kemitraan berlangsung dengan baik berdasarkan partisipasi, transparansi, responsif, akuntabel, efektif dan efisien, kepastian hukum, konsensus dan kesetaraan dan inklusif. Di samping itu kemitraan efektif dalam kondisi ada kepercayaan, keterbukaan, pembelajaran, profitabel, komunikasi, dan memiliki visi dan tujuan bersama.

Kata kunci: *demokratisasi, disrupsi, kemitraan pemerintah-bisnis, sektor publik, pelayanan publik.*

LATAR BELAKANG

Dua fenomena menarik dalam studi administrasi publik (*public administration*) maupun administrasi bisnis (*business administration*) di Indonesia memasuki abad 21 atau milenium ketiga ialah demokratisasi dan disrupsi. Fenomena ini mewarnai pola hubungan pemerintah dan pemerintah dan bisnis (kajian administrasi publik) serta hubungan bisnis dan pemerintah (kajian administrasi bisnis).

Demokratisasi dalam sektor publik tidak dapat dielakkan (Harmon and Mayer, 1986: 218), sehingga demokratisasi menjadi isu penting di sektor publik abad 21 (Eva Etzioni-Halevy. 1985; Ulbert Silalahi. 1995). Demokrasi menuntut penyelenggaraan pemerintahan berbasis *governance*. Pemerintahan demokratis sebagai pemerintahan berbasis *governance* mengasumsikan satu hubungan khusus harus ada antara birokrasi pemerintah, institusi bisnis, dan masyarakat sipil (Frederickson and Hart, 1985: 548). Tiga pilar ini harus berperan secara sinergis agar mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan warga (Osborne and Plastrik, 1996), dan melayani atau menyenangkan warganya (Osborne and Gaebler, 1992: 166).

¹ Disampaikan dalam seminar nasional "Government, Business and the Public: Optimalisasi Hubungan Pemerintah-Bisnis dalam Menunjang Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan yang diselenggarakan Oleh Prodi Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Fisip Unpar Bandung pada 28 Nopember 2018.

Pemerintah dan perusahaan kini menyadari pembangunan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan warga dan perbaikan pelayanan publik, mulai dari infrastruktur hingga non-infrastruktur memerlukan kolaborasi, bukan konflik, antara publik, swasta dan sektor ketiga atau masyarakat sipil. Kelambanan pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya menyerukan bagi sektor swasta dan masyarakat sipil untuk bekerja bersama dengan pemerintah untuk mempercepat laju pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik di komunitas tempat mereka beroperasi. Institusi bisnis, misalnya, sebagai pilar penting dalam *governance*, diberi peran yang memadai untuk menangani sektor publik. Dalam memainkan peran masing-masing, pemerintah dan bisnis perlu menjalin hubungan sinergi. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis *governance* memungkinkan efektif dan efisien jika terjadi hubungan konstruktif dan sinergi antara pilar pemerintah dan pilar bisnis atau dunia usaha.

Secara khusus, *governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol dan *checks and balances* antara pemerintah dan bisnis. Kalau ada kecenderungan yang satu menjadi terlalu kuat, akan ditekan dan ditarik oleh yang lain sehingga kemudian tercapai keseimbangan kembali (Tascheereau dan Compos dalam UNDP, 1997). Bahkan kadang perlu bisnis harus dikedepankan dan pemerintah hanya sebagai fasilitator saja (Idrus, dalam Miftah Thoha, penyunting. 1999: 32). Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dengan menciptakan lingkungan politik, hukum dan administratif yang kondusif, sedangkan sektor swasta atau bisnis mendorong terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sementara demokratisasi bertransformasi ke sektor publik, pada saat yang sama terjadi era disrupsi. Pemerintah, bisnis dan masyarakat sedang menghadapi era disrupsi (*disruption era*) yaitu pergeseran ke era digital dengan inovasi-inovasi yang membuat segalanya menjadi mudah. Era disrupsi ini merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata, ke dunia maya. Fenomena disrupsi berkembang pada perubahan pola layanan, misalnya, di sektor bisnis dan sektor publik di tingkat lokal dan global (<https://www.google.com/search?>). Disrupsi itu terjadi seiring perkembangan teknologi digital yang membuat sektor publik dan sektor bisnis atau layanan publik dan layanan bisnis lebih efektif dan efisien dan berkualitas karena menjadi serba murah, serba mudah, serba cepat dan serba hemat.

Oleh perkembangan teknologi informasi digital maka disrupsi terjadi semakin banyak dan cepat *Disruption* terjadi dan akan terjadi secara meluas di segala bidang dan aktivitas baik pemerintahan dan bisnis, politik dan ekonomi, utamanya dalam bidang pelayanan dan lain-lain. *Disruption* adalah masa lalu / hari kemarin, masa kini / hari ini dan akan semakin intens pada masa akan datang / hari esok. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, *disrupsi* ditandai dengan empat indikator lebih: lebih mudah (*simpler*), lebih murah (*cheaper*), lebih terjangkau (*accessible*), dan lebih cepat (*faster*) sebagaimana diharapkan dalam pelayanan publik

(<https://www.kompasiana.com/andreyandoko/5a96c728ab12ae5d19200622/datangnya-era-inovasi-disruptif>). Berbagai macam cara dilakukan oleh pemerintah dan bisnis untuk menghadapi era disrupsi. Salah satu cara yang dilakukan untuk beradaptasi dengan disrupsi ialah kemitraan (*partnership*) (Nurdin Hidayah, 2018).

Jadi, baik demokratisasi maupun disrupsi menghendaki kemitraan dalam mengelola negara yaitu kemitraan antara sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta (bisnis) dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi negara untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan kemitraan membuat tiap sektor (sektor publik dan sektor bisnis dan sektor ketiga) tidak saling menghancurkan, melainkan menjalin hubungan baik untuk saling mendukung, bersinergi dan terus berkembang dan berinovasi tinggi.

PERMASALAHAN

Di era orde baru sangat jelas tidak ada kemitraan dan kolaborasi. Yang ada adalah eksploitasi dan persekongkolan antara pemerintah dan bisnis karena berbagai kegiatan dilakukan dan dimonopoli oleh pemerintah yang bersekongkol dengan mitranya. Bisnis yang dekat dengan kekuasaan bersekongkol dengan penguasa sehingga mampu menghadapi setiap perubahan dibandingkan dengan bisnis yang tidak masuk ke kekuasaan. Demokratisasi dan disrupsi membutuhkan kemitraan antara pemerintah dan bisnis karena. Namun membangun kemitraan bukanlah hal yang mudah. Berdasarkan hal itu maka pertanyaan dalam perspektif administrasi publik adalah:

1. Mengapa kemitraan pemerintah-bisnis dibutuhkan?
2. Apa manfaat kemitraan pemerintah-bisnis?
3. Bagaimana kemitraan dari perspektif governance
4. Bagaimana pola kemitraan pemerintah-bisnis?
5. Apa kondisi untuk kemitraan efektif?

PEMBAHASAN

***Good Governance* di Sektor Publik dan Sektor Bisnis**

Governance adalah proses di mana masyarakat atau organisasi membuat keputusan penting, menentukan siapa yang mereka libatkan dan bagaimana mereka membuat laporan (Canadian Institute on Governance dalam Elke Loffler dalam Tony Bovaird and Elke Loffler, editor. 2009: 216). *Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem nilai, kebijakan, dan institusi di mana masyarakat mengelola urusan ekonomi, sosial, dan politiknya melalui interaksi di dalam dan di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Jadi, dalam *governance* ada tiga pilar atau aktor utama yang memiliki kepentingan dalam urusan negara, yaitu pemerintah, pebisnis / pelaku usaha dan masyarakat sipil. Penerapan *Governance* telah menjadi hal yang mendesak untuk semua organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi privat atau bisnis.

Terkait dengan terminologi *governance*, ada tiga konsep yang perlu didefinisikan terkait dengan topik pembahasan yaitu: *public governance*, *corporate (business) governance* dan *good governance*.

Public governance. *Governance* berlangsung disektor publik yang disebut *public governance* atau governansi publik. Governansi publik adalah bagaimana suatu organisasi bekerja dengan mitra, pemangku kepentingan, dan jaringannya untuk memengaruhi keluaran kebijakan publik (Bovaird and Loffler; Governance International, UK; dalam Elke Loffler dalam Tony Bovaird and Elke Loffler, editor. 2009: 6, 216). Penerapan GPG atau Tatakelola Pemerintahan Baik meyakini bahwa pemerintah bukan satu-satunya aktor dalam mengelola kepentingan publik, tetapi juga pebisnis atau swasta dan NGO. Pada sektor publik, kemitraan mengacu pada situasi saling memberi dukungan antar organisasi

pemerintah, bisnis dan masyarakat dalam pelayanan publik. Untuk mengujudkan GPG maka pengelolaan didasarkan atas prinsip yang meliputi: partisipasi, transparansi, responsif, akuntabel, efektif dan efisien, kepastian hukum, konsensus dan kesetaraan dan inklusif.

Corporate governance. *Governance* bukanlah monopoli sektor publik tetapi juga berlangsung disektor swasta atau korporasi yang disebut *corporate governance* atau governansi korporasi. Governansi korporasi hampir seusia dengan governansi di sektor publik, diperkenalkan di tahun 1992. Dari beberapa pendapat (Cadbury Committee, 1992; Syakhroza, 2002; Parkinson, 1994 dalam Solomon et al, 2002; Forum of Corporate Governance for Indonesia-FCGI, 2001 dalam Jojok Dwiridotjahjono. 2009), *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pengelolaan sumber daya organisasi bisnis secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan prinsip-prinsip transparent, accountable, responsible, independent, dan fairness sehingga tercipta tata hubungan yang baik di antara stakeholder dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan corporate governance adalah untuk meningkatkan dan menciptakan value added bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Good governance. *Good governance* memiliki delapan karakteristik utama. Itu adalah partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific dalam Bovaird and Loffler, editor. 2009: 217). Di sektor publik disebut *Good Public Governance* (GPG), dan di sektor swasta atau bisnis disebut *Good Corporate Governance* (GCG).

Pelaksanaan GCG adalah mutlak diperlukan baik untuk sektor bisnis maupun sektor publik. Untuk sektor publik / pemerintah, GCG mutlak diperlukan guna pembenahan secara internal dan struktural untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, manipulasi dan nepotisme. Untuk sektor bisnis, GCG juga dapat meminimalkan pelanggaran etika dan moral, peningkatan kinerja organisasi baik eksternal maupun internal. Penerapan GCG atau Tatakelola Perusahaan yang baik adalah suatu subjek yang mengakui bahwa selain pemegang saham ada pihak penting lain sebagai aktor yang menentukan yaitu, karyawan dan masyarakat. Mereka disebut sebagai stakeholder. Kepedulian terhadap kepentingan stakeholder (tidak hanya shareholder ialah pemilik modal yang sering mengesampingkan kepentingan stakeholder di lingkungan bisnis tersebut) akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut dalam menjalankan bisnisnya.

Untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan stakeholder, GCG didasarkan pada prinsip-prinsip TARIK:

- **Transparansi:** untuk menjaga objektivitas dalam bisnis
- **Akuntabilitas:** untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan.
- **Responsibilitas:** melaksanakan tanggung jawab dengan mematuhi aturan dan tanggungjawab sosial.
- **Independensi:** dikelola secara independen dan bebas dari intervensi pihak lain
- **Kesetaraan dan Kewajaran:** harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

Prinsip-prinsip GG dalam bidang bisnis telah banyak diterapkan. Sebuah organisasi internasional bernama Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menetapkan beberapa prinsip GG untuk dunia bisnis agar dapat menumbuhkan iklim investasi yang kondusif. Prinsip-prinsip GG yang ditetapkan oleh OECD mencakup hal-hal: landasan hukum, hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan, perlakuan adil terhadap pemilik saham, peranan stakeholder dalam penerapan GG, prinsip transparansi dalam pengungkapan informasi mengenai perusahaan dan tanggungjawab manajemen perusahaan (Rindaasyuti, 2008).

Kemitraan Pemerintah-Bisnis dan *Good Public Governance*

Kegiatan kolaboratif telah menjadi lebih menonjol dan luas di semua sektor dari banyak bangsa dalam 25 tahun terakhir, menghasilkan “perubahan evolusioner yang menakjubkan dalam bentuk kelembagaan dari governansi” sejak tahun 1980-an. Kolaborasi dalam literatur ini didefinisikan sebagai "pengaturan sosial sementara di mana dua atau lebih banyak aktor sosial bekerja bersama menuju satu tujuan bersama yang membutuhkan transmudasi bahan, ide, dan / atau hubungan social untuk mencapai tujuan akhir itu”. Para mitra berniat untuk mempertahankan otonomi organisasi saat bergabung dengan kekuatan untuk menangani suatu masalah sosial bersama (John W. Selsky & Barbara Parker. 2005).

Satu jenis keterlibatan kolaboratif adalah kemitraan di antara bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil - tiga sektor masyarakat utama - yang membahas masalah dan penyebab sosial (Loffler dalam Bouvard dan Loffler. 2009: 225). Kemitraan pemerintah-bisnis (*government-business partnership, GBPs*) menjadi keharusan untuk mengapresiasi demokratisasi dalam pemerintahan dan menghadapi era disrupsi. Kemitraan pemerintah-bisnis merupakan kontrak pemerintah dengan bisnis untuk menjalankan tugas (tugas dan fungsi) pemerintah di sektor publik, untuk mana institusi bisnis menerima kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut, langsung atau tidak langsung; dan bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari melakukan fungsi tersebut. Kemitraan pemerintah-bisnis secara sederhana dapat berarti pengaturan kerja berdasarkan komitmen bersama atau timbalbalik (*mutual commitment*) (tersirat dalam kontrak) antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor bisnis di luar dari sektor publik (Bovaird, 2004: 200). Kemitraan Publik-Swasta didefinisikan sebagai pengaturan apa pun antara pemerintah dan sektor swasta di mana sebagian atau secara tradisional kegiatan publik dilakukan oleh sektor swasta (Savas. 2000: 3-4).

Bermitra antara pemerintah dan bisnis berarti menghindari dominasi pemerintah dan dominasi pasar. Dominasi pemerintah akan menciptakan ketergantungan dan meminimasi inovasi serta posisi tawar warga terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Sementara dominasi pasar berakibat monopoli eksploitatif dan meminimasi akses masyarakat untuk mengontrol pelayanan publik berkualitas. Bermitra dalam bidang sektor publik bukan saja mempercepat kuantitas tetapi juga kualitas penyediaan pelayanan publik. Namun demikian pemerintah memegang peranan penting dalam kemitraan pemerintah-bisnis sehingga pemerintah harus mengambil prakarsa paling tidak untuk menciptakan iklim yang mendorong bagi usaha kemitraan yang berguna bagi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berpengaruh sangat besar terhadap bisnis sehari-hari melalui tindakan-tindakan seperti penyediaan infrastruktur fisik, sosial, kebijakan-kebijakan fiskal dan keuangan, kebijakan investasi, kebijakan industri, dan sebagainya.

Sementara peran sektor swasta atau institusi bisnis semakin besar sejalan dengan peran pemerintah yang semakin surut dalam era demokratisasi. Peran ini lebih besar lagi bila dipahami bahwa dalam persaingan yang menuntut keunggulan daya saing global sekarang pemeran utamanya adalah dunia usaha. Dengan peran dan posisinya yang semakin kuat menyebabkan dunia usaha menjadi salah satu *power center* yang tawar menawarnya semakin besar. Semakin besar dan kuatnya dunia usaha maka langsung atau tidak langsung dunia usaha telah mengambil bagian yang menentukan dalam penetapan kebijakan-kebijakan publik. Sebaliknya, pemerintah semakin memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan dan pentingnya peran dunia usaha (M. Idrus, dalam Miftah Thoha, 1999: 36-37). Maju dan mundurnya suatu negara sangat berkorelasi dengan maju mundurnya dunia usaha.

Kemitraan antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat atau sektor ketiga terjadi hanya jika penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan pelayanan publik berbasis *good governance* (Osborn dan Gaebler. 1996:49-51). *Good public governance* atau governansi publik yang baik mengubah secara mendasar praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh dunia. Perubahan meliputi dimensi *struktural* dan *funksional*. Perubahan struktural menyangkut perubahan pelaku dalam governansi yang mensyaratkan tiga pilar utama: pemerintah (*government*), dunia swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*) ikut ambil bagian dalam sektor publik. Tiga sektor dalam 'Governance' yaitu sektor publik (Pemerintah), sektor Privat (Bisnis/korporasi), dan sektor Masyarakat (organisasi nonprofit) seharusnya mempunyai pembagian hak dan tanggungjawab bersama yang jelas yang biasanya diatur dalam kontrak-kontrak (legal-formal, sosial, ekonomi dan politik), dimana kontrak-kontrak ini merupakan hasil produk pengaturan bersama yang melibatkan ketiga sektor tersebut. Kontrak-kontrak berisi norma-norma yang mengatur pola hubungan antar pelaku-pelaku dari ketiga sektor tersebut dan menjadi acuan untuk pelaksanaan akuntabilitas (tanggung gugat) mereka (Andy Fefta Wijaya, 2018).

Perubahan fungsional menyangkut perubahan peranan pemerintah dari *service provider towards co-producer: co-design* layanan dan kebijakan mereka bersama dengan pengguna mereka dan stakeholder utama lain; *co-manage* sumberdaya mereka dengan mitra lain; *co-deliver* layanan mereka dengan pengguna dan komunitas mereka; *co-assess* layanan mereka dengan stakeholder utama mereka (Loffler dalam Bovard dan Loffler. 2009: 225).

Menurut Elke Loffler (dalam Bovard and Loffler, editor. 2009: 219), *networks as a specific mode of public governance*. Satu bentuk *network* adalah kemitraan dengan *partner* ialah *stakeholders*. Adapun *stakeholders* utama dalam governansi publik dapat berupa kelompok orang, organisasi atau individu-individu. Secara tipikal, isu governansi publik menurut Elke Loffler dalam Bovard and Loffler, editor (2009: 219) meliputi *stakeholders* inti berikut (diantara yang penting):

- *Citizens;*
- *Community organizations that are loosely organized;*
- *Non-profit organizations (including charities and major Non-Governmental Organization);*
- *Business;*
- *Media;*
- *Public agencies (e.g. different levels of government/Parliamet, including international levels);*
- *Elected politicians;*
- *Trade unions.*

Untuk beberapa akademisi, *public governance* menunjuk pada “inter-organization networks” (Rhode, 1997 seperti dikutip oleh Bovaird dan Loffler. 2009: 222). Bermitra yang berarti membangun jaringan kerja telah menjadi satu aspek *public governance* secara meningkat penting, namun itu adalah hanya satu mode spesifik dari *public governance*. Kerja bermitra dalam domain publik secara khusus adalah antara organisasi sektor publik dan sektor privat atau antara pemerintah dan bisnis. Dewasa ini, setiap orang / siapapun ingin untuk bekerja dalam kemitraan (Bovaird dan Tizard dalam Bovaird dan Loffler. 2009: 233).

Alasan Melakukan Kemitraan Pemerintah-Bisnis

Mengapa kemitraan dilakukan? Alasan utama perlunya pola kemitraan pemerintah-swasta adalah karena kesadaran bahwa persoalan-persoalan di bidang sektor publik tidak dapat lagi dilihat hanya dari kepentingan dan tanggung jawab pemerintah. Membenahi sektor publik sebagai ‘kerja patungan’ dari pemerintah dan stakeholder. Kemitraan dengan pihak-pihak lain harus dilakukan karena tidak mungkin pemerintah mengerjakan semua urusan publik karena keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten untuk menyediakan pelayanan publik.

Kemitraan juga dilakukan agar kualitas pelayanan publik dapat dipenuhi sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagaimana yang mereka terima di sektor swasta. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik sementara tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat maka melakukan kemitraan adalah satu strategi yang dapat dilakukan. Namun, kemitraan baik dilakukan bila memenuhi alasan lain berikut ini:

1. Pihak swasta dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan bila diberikan oleh pemerintah;
2. Pihak swasta dapat menjamin bahwa pelayanan dapat diberikan lebih cepat dibandingkan bila disediakan oleh pemerintah;
3. Ada dukungan dari pengguna jasa untuk melibatkan pihak swasta sebagai penyedia pelayanan;
4. Ada peluang kompetisi di antara para calon mitra swasta;
5. Tidak ada ketentuan perundang-undangan yang melarang pelibatan pihak swasta dalam penyediaan jasa pelayanan;
6. Keluaran dari pelayanan dapat dengan mudah diukur dan ditetapkan tarifnya dengan rasional;
7. Biaya pelayanan dapat diperoleh kembali melalui penetapan tarif penggunaan jasa layanan;
8. Ada peluang inovasi dalam penyediaan pelayanan;

9. Ada rekam jejak atau pengalaman kemitraan yang baik antara pemerintah dan swasta yang sudah dilakukan sebelumnya;
10. Ada peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemitraan tersebut.

Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka kemitraan pemerintah-bisnis (juga dengan pihak ketiga atau NGO) kurang memberikan manfaat. Jika salah satu dari alasan-alasan tersebut tidak terpenuhi, maka model kemitraan sebaiknya tidak diterapkan karena model tersebut rentan dengan risiko-risiko finansial maupun politis yang dapat membebani masyarakat pengguna jasa layanan di kemudian hari.

Walaupun kemitraan merupakan mode spesifik dari governansi publik tetapi bermitra dapat menjadi hal yang disukai tetapi juga hal yang tidak disukai. Mengapa orang suka kemitraan dan mengapa lainnya tidak. Kotak 1 menunjukkan sejumlah alasan mengapa banyak orang antusias tentang potensi untuk kemitraan, atau sebab kemitraan disukai oleh organisasi, sedangkan Kotak 2 menunjukkan sejumlah argumen tandingan atau berlawanan sebab kemitraan mungkin dilihat tak menyenangkan / tak diinginkan.

Kotak 1: Partnerships are liked by organizations because....

- They help organizations to tackle 'wicked problems' they could not address successfully their own.
- They allow sharing of expertise and other resources.
- They allow gaps to be filled in the services on offer to users.
- They allow joint risk-taking and experimentation, so that organizations can learn what works and what doesn't.
- Working with partners, especially from other sectors, may give access to organizational cultures and experiences that encourage learning in ways not otherwise available.

Sumber: Bovaird and Tizard dalam Bovaird dan Loffler. 2009: 234.

Kotak 2: Partnerships may be see undesirable because....

- They may lead to fragmentation of structures and processes;
- ... and this may lead to blurred responsibilities and accountabilities.
- Staff may lose their jobs or experience worse conditions of service within the new partnership.
- Politicians may fear losing control over policy-making and service decisions.
- Service users and citizens may fear becoming objects of a profit-making calculus rather than a public service ethos.
- Voluntary organizations and NGOs may be reluctant to swop their independence and critical roles, just to become public service providers.

Sumber: Bovaird dan Tizard, dalam Bovaird dan Loffler, 2009: 235.

Manfaat Kemitraan Pemerintah-Bisnis

Kemitraan antara pemerintah dan bisnis dilakukan karena mendapat manfaat untuk pihak-pihak yang bermitra. Manfaat kemitraan adalah

1. Meningkatkan produktivitas organisasi. Produktivitas ditingkatkan dengan mengurangi faktor input.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat meningkat melalui ragam pelayanan yang diberikan atas dasar kemitraan.
3. Menghasilkan efisiensi dan efektifitas. Efisiensi terjadi bila output tertentu dapat dicapai dengan input yg minimum. Efektifitas berarti mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan dengan menghemat waktu melalui teknologi yang dimiliki bersama. Sektor swasta memang terkondisikan untuk bekerja secara efektif dan efisien dengan struktur organisasi dan personil yang tidak kaku, dimana hal tersebut tidak ditemukan dalam lingkungan pemerintah.
4. Jaminan kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Kualitas pelayanan menjadi lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif karena produk akhir ditentukan oleh pihak yang bermitra.
5. Berbagi resiko dan profit. Resiko dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama; di samping *profit sharing*, melekat juga *risk sharing*.
6. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Masuknya sektor swasta di sektor publik membuat persaingan akan lebih tumbuh, pelayanan akan lebih baik dan dapat lebih bervariasi.
7. Optimalisasi akses dan sumberdaya, teknologi dan pasar. Kemitraan memungkinkan pemerintah memperoleh fleksibilitas tambahan karena telah berbagi dengan bisnis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sektor publik.
8. Menyatukan kekuatan. Bermitra memungkinkan pemerintah memperoleh fleksibilitas tambahan dengan tidak perlu melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan sektor publik; sementara bisnis mendapat lahan tambahan di luar sektor bisnis.

Kemitraan dari Perspektif Governance

Menurut Bovaird and Tizard (dalam Bovaird dan Loffler. 2009: 242), kemitraan tidak hanya membantu menyampaikan objektif dari sektor publik dan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, akan tetapi kinerja mereka harus berbasis pada prinsip *Good Governance* yang meliputi:

1. *Citizen engagement*;
2. *Transparency*;
3. *Accountability*;
4. *Equalities and social inclusion*;
5. *Ethical and honest behaviour*;
6. *Equity (fair procedures and due process)*;
7. *Willingness and ability to collaborate*;
8. *Ability to compete*;
9. *Leadership*;
10. *Sustainability*.

Pada Tabel 4 menunjukkan perbedaan-perbedaan dari perspektif *governance*, yang mana bisa kita lihat antara kemitraan kolaboratif (antara organisasi dan sektor manapun) dan hubungan-hubungan yang secara sederhana mengikutsertakan partner yang menghormati kontrak untuk mana mereka berkomitmen secara legal. Tentu saja penekanan dari kriteria penilaian *good governance* itu berbeda-beda diantara kemitraan yang satu dan yang lainnya. Kriteria yang ditampilkan di Tabel 4 adalah kriteria denominator yang paling umum yang diadvokasi oleh agensi internasional dan multinasional besar akhir-akhir ini.

Tabel 4: Partnerships from a governance perspective

Governance principles	Transactional contractual relationships	Collaborative partnerships
Citizen engagement	Consultation with citizens and other stakeholders	Participation of citizens and other stakeholders in decision-making
Transparency	Limited to areas where stakeholders have a 'need to know' in order to monitor the contract – and, even then, limited by 'commercial confidentiality'	Open book working in respect of all partners (including user and citizen representatives, where appropriate) as a critical element of building trust
Accountability	The contractor must account to the purchaser in line with all performance reporting procedures agreed in the contract, particularly in relation to budgetary and cost control	Partners must be prepared to account to each other for their actions and performance on all issues that arise – and must be prepared to account to other stakeholders for the overall performance of the partnership
Equalities and social inclusion	These issues will only be considered in so far as they are included in the contract specification (although some firms may, independently, be committed to improving their record of corporate social responsibility)	Accepted as core values in the working of the partnership – partners are expected actively to seek innovative ways of improving performance against these principles
Ethical and honest behaviour	Staff must act legally and within professional codes of conduct	Accepted as core values in the working of the partnership – partners must actively seek innovative ways of improving performance against these principles
Equity (fair procedures and due process)	Staff must act within organizational procedures, which must ensure consistent treatment of all individuals within any group and must accord priority to different groups as set out in the contract	Accepted as core values in the working of the partnership – partners must continuously seek innovative ways of improving performance against this principle
Willingness and ability to collaborate	Valuable but not essential characteristic of relationships with other organizations	Critical success factor for all partners
Ability to compete	Critical success factor for the provider in the contract (incorporating both cost consciousness and customer focus)	Critical success factor for the partnership as a whole (incorporating both cost consciousness and customer focus)
Leadership	Necessary in each organization to ensure good contract management – timely, accurate and efficient meeting of contract specification	Necessary at all levels of the partnership as a whole, in each of its constituent organizations and in the communities that it serves
Sustainability	The contractor must demonstrate conformity with all sustainability criteria set out in the contract	Partners must continuously seek improved ways of increasing the sustainability of policies and activities

Sumber: Bovaird and Tizard dalam Bovaird dan Loffler. 2009: 242.

Pola Kemitraan Pemerintah-Bisnis

Tipologi Kemitraan Pemerintah-Bisnis

Keterlibatan sektor bisnis atau swasta sudah tentu membantu fungsi pemerintah sebagai motor pelaksana pembangunan. Namun perlu diingat, hubungan yang terjalin antara pemerintah dan sektor swasta haruslah memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan harus diikat dalam suatu kontrak untuk jangka waktu tertentu. Untuk itu pola kemitraan tidak bisa diperlakukan secara seragam antara satu daerah dengan daerah lain, antara pemerintah dengan swasta dan sektor ketiga. Perlu dicari pola-pola kemitraan yang paling tepat dengan daerah yang bersangkutan dan dengan kegiatan yang dimitrakan. Perbedaan pola kemitraan tentu akan membedakan mekanisme sharing yang bisa dilakukan baik sharing modal maupun sharing keuntungan dan kerugian. Menurut Tony Bovaird (2004: 202), ada sejumlah tipologi yang berbeda yang dapat di terapkan pada KPB. Mereka termasuk:

- *Sectoral basis* — kemitraan dengan organisasi sektor ketiga dan asosiasi masyarakat sipil, dengan bisnis swasta, dengan bisnis dan sektor ketiga;
- *Relationship basis* — jaringan yang jelas, kolaboratif, pembagian kekuasaan, kontraktual;

- *Economic basis* — kemitraan sisi penawaran, sisi-permintaan atau campuran sisi permintaan / penawaran;
- *Policy area* — tujuan kebijakan kemitraan (mis. mempromosikan produktivitas ekonomi, memberdayakan klien dan yang kurang beruntung, menangani inklusi sosial);
- *Scope* — kemitraan vertikal, horizontal, dan campuran.

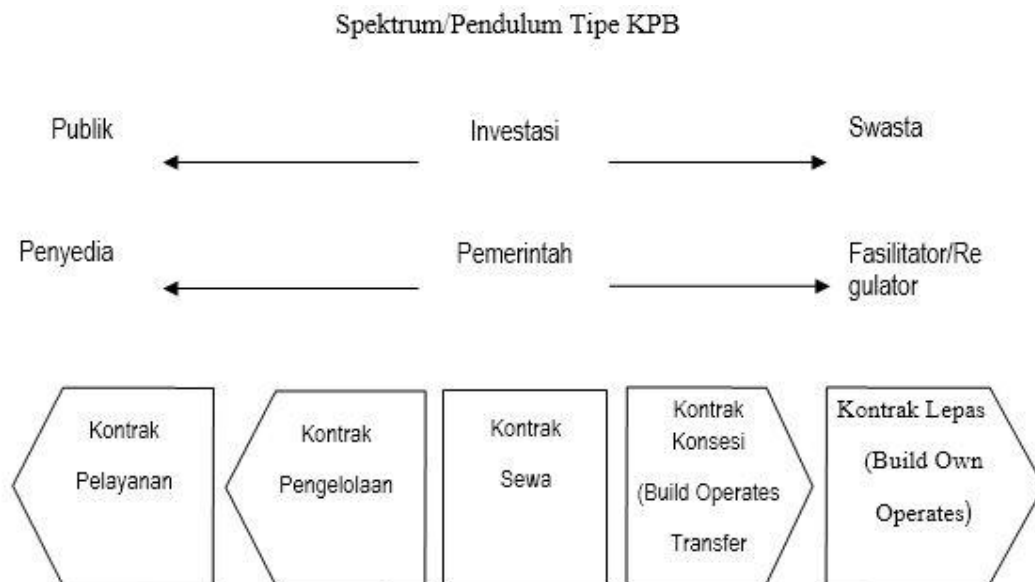
Bentuk Kemitraan Pemerintah-Bisnis

Meningkatnya kontrak untuk pelayanan yang diberikan secara langsung oleh organisasi sektor publik merefleksikan satu jalan pergerakan parsial dari bentuk dominan dari pemberian pelayanan melalui internal birokrasi ke bentuk alternatif dari pelayanan. Sementara proses kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan pihak swasta dapat dilakukan dalam beberapa tipe bentuk alternatif (Nyimas Latifah Letty Azi, 2016; <http://dhenov.blogspot.com/2007/10/bentuk-bentuk-kerja-sama-pemerintah.html>; Rahajeng, Mardatilla Septiani dan Asnawi Manaf. 2015; Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda; Mahmudi. 2007) antara lain (Bagan 1):

- kontrak pelayanan (*Service Contract*),
- kontrak pengelolaan (*management contract*),
- kontrak sewa (*lease contract*),
- kontrak konsesi (*concession contract*) atau *Build Operation Transfer*,
- kontrak lepas (*Built Own Operates* atau *Build Transfer Operates*).

Mana yang dipilih oleh pemerintah adalah bentuk kemitraan yang lebih menunjukkan keunggulan daripada kelemahan bagi sektor publik atau yang pro warga..

Bagan 1 Tipe-Tipe Government-Business Partnership



Sumber: Berdasarkan Kumar dan Prasad, 2004 seperti dikutip Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda.

Bagan diatas menunjukkan 5 tipe umum dari model kemitraan yang klasifikasi berdasarkan pendulum atau spektrum investasi dan peran pemerintah. Tipe kontrak pelayanan (*service contract*)

merupakan bentuk kemitraan yang pendulumnya lebih banyak investasi dan penyediaan layanan pada sektor publik. Sebaliknya, model *build own operates* atau kontrak secara lepas merupakan bentuk kemitraan yang menitikberatkan investasi dan penyediaan pelayanan pada sektor swasta. Dalam bentuk kemitraan ini, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator. Secara lebih rinci bentuk kemitraan dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. **Service Contract** atau kontrak pelayanan

Dalam kontrak pelayanan pemerintah memberikan wewenang kepada swasta dalam kegiatan operasional, perawatan dan kontrak pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dengan harga dan standar performance yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kontrak pelayanan ini antara lain dalam sektor air bersih, pengumpulan sampah, produksi dan distribusi kontainer sampah, pelayanan pembersihan di jalan, perawatan kendaraan (truk-truk), pengerukan kali hingga perawatan pipa air, tagihan air dan listrik. Contoh: penerapan program CSR oleh PT HM Sampoerna Tbk di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. (Magya Ramadhania Putri dan Isnaini Rodiyah, 2016).

b. **Management Contract** atau kontrak pengelolaan.

Dalam kontrak pengelolaan, pihak swasta adalah sebagai pemilik asset, investor, dan bertanggung jawab atas risiko finansial dalam batasan minimal. Contoh, pengelolaan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, tempat parkir).

c. **Lease Contract** atau kontrak sewa.

Dalam kontrak sewa pemilik modal adalah sektor publik (pemerintah) namun pihak swasta (bisnis) turut menanggung risiko keuangan. Contoh: pengelolaan taman hiburan, bandara, dan armada bis, dan sebagainya.

d. **Build Operate Transfer (BOT)** atau Bangun Operasi Serah, kadang disebut **konsesi**. Dalam kontrak BOT, pembiayaannya dari pihak swasta sementara pemerintah menyediakan lahan. Swasta mengoperasikan fasilitas dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian diserahkan kepada dan menjadi milik pemerintah. Contohnya adalah pembangunan jalan tol, pelabuhan laut dan udara, rumah sakit, stadion olahraga, dan sebagainya. Contoh BOT nyata adalah Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Pekot-Sama Sentral Swasemdaya) di Banjar Baru; Pembangunan Pasar Antasari (Pekot-Giri Jaladhi Wana) di Banjarmasin; Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Palaran (Pekot-Pelindo-Samudera Indonesia) di Samarinda.

e. **Build Own Operate (BOO)** atau Bangun Miliki Operasi.

Dalam BOO atau BTO (*Build Transfer Operate*), swasta merupakan aktor dominan. Swasta membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas. Pemerintah tidak memberikan pendanaan langsung dalam model ini, tetapi pemerintah dapat menyediakan lahan atau menawarkan insentif keuangan lainnya seperti status bebas pajak atau berperan dan berfungsi sebagai regulator (Magya Ramadhania Putri dan Isnaini Rodiyah, 2016). Swasta memiliki dan mengoperasikan fasilitas secara mandiri dan selamanya dengan mengembalikan biaya investasi dan operasional melalui pendapatan dari retribusi, uang sewa, atau biaya layanan dalam jangka waktu kontrak yang terbatas. Contoh: Pengelolaan Sampah melalui kemitraan Pekot-Gikoko Kogyo Indonesia dengan BOO 21 tahun di Pontianak.

Tabel 1: Contoh praktek kemitraan

Bidang Kegiatan	Bentuk Kemitraan	Peran Pemerintah	Peran Mitra
Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Palaran (Pemkot-Pelindo-Samudera Indonesia) Samarinda	BOT 50 tahun; Bagi hasil Pemkot 25% net profit	Penyedia Lokasi Regulator Dukungan akses	<i>Captive market</i> (Pelindo) Investor (swasta) Pengelola melalui <i>Special Purpose Company</i> yang dibentuk investor
Perkebunan & Pabrik Minyak Kelapa Sawit (Pemkot-Agricinal), Samarinda	<i>Joint venture</i> membentuk perusahaan inti Agri Mitra Bantuas	Investor Dukungan akses	Investor Pengelola
Pengelolaan Parkir (Pemkot-Tribuana Selatan Raya) Tarakan;	Bagi hasil, <i>fixed income</i> Pemkot Rp 10jt/bln	Penyedia lahan Regulator Dukungan akses	Investor Pengelola area Operasional (pemungutan)
Pengelolaan Sampah (Pemkot-Tidung bangun Perkasa & Sabar Utama) Tarakan;	Sistem kontrak waktu tertentu	sda	Operasional (pengangkutan) Pemeliharaan sarana dan prasarana
Pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I (Pemkot-Camfilo) Tarakan;	Sistem kontrak 3 tahun; Bagi hasil, <i>fixed income</i> Pemkot Rp 25 jt/bln	Pemilik aset Regulator	Operasional pengelolaan Pemeliharaan
Pembangunan Pasar Antasari (Pemkot-Giri Jaladhi Wana) Banjarmasin	BOT 50 tahun; Bagi hasil Pemkot,	Penyedia lahan Regulator Dukungan akses dan	Investor Pengelola

		perijinan	
Taman Kota Banjarmasin	BOT 50 tahun; Bagi hasil Pemkot, <i>fixed income</i> Rp14M	sda	sda
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Pemkot-Sama Sentral Swasemdaya) Banjarbaru	BOT 7 tahun	Penyedia lahan Regulator & Pengawas Dukungan akses dan perijinan	Investor Pengelola
Pembangunan Palangkaraya Mal (Pemkot-Satriakahayan multitama) Palangkaraya;	BOT 30 tahun; Bagi hasil, <i>fixed income</i> Pemkot Rp 82,79 jt/thn	Penyedia lahan Dukungan akses dan perijinan Investor Pengelola operasional	Investor Pengelola operasional
Pembangunan Citra Mal (Pemkot-Agrabudi Karyamarga) Palangkaraya;	BOT 20 tahun; Bagi hasil, <i>fixed income</i> Pemkot Rp 505 jt 10 tahun pertama, Rp 200jt 10 tahun kedua	sda	sda
Renovasi dan pengelolaan pasar (Pemkot-Mutiara Mas Putih) Pontianak;	BOT 30 tahun; Bagi hasil Pemkot 10%	Penyedia lahan Dukungan akses & Perijinan	Investor Pengelola
Pengelolaan Sampah Implementasi protokol Kyoto (Pemkot-Gikoko Kogyo Indonesia) Pontianak;	BOO 21 tahun	Penyedia lahan Dukungan akses & perijinan	Investor Operasional pengelolaan Pemeliharaan

		Regulator Pengangkutan sampah	
--	--	-------------------------------------	--

Sumber: Diolah dari Tim Kajian PKP2A III LAN, 2008

Dari temuan Tim Kajian PKP2A III LAN (2008) tentang praktek kemitraan yang diterapkan di beberapa daerah di Kalimantan tersebut, terlihat keragaman bidang yang dimitrakan dengan swasta dan juga model-model yang diterapkan. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa kemitraan yang dilakukan masih terbatas pada jenis layanan infra struktur, sarana, barang dan jasa, sedangkan jenis layanan administratif belum diterapkan. Belum ada inovasi dari daerah yang menerapkan kemitraan dalam bidang pelayanan administratif, yang diterapkan masih terbatas pada 2 (dua) jenis pekerjaan yaitu pembangunan dan pengelolaan. Pembangunan yang dimitrakan dalam hal ini merupakan pengadaan barang atau fasilitas publik. Sedangkan pengelolaan merupakan pelaksanaan atau operasionalisasi proyek yang dimitrakan. Contoh potensi kemitraan dalam pelayanan publik kelompok administratif yang bisa diterapkan di daerah tampak dalam bidang-bidang kegiatan sektor publik, berbagai bidang pekerjaan pada dinas, kantor atau badan, yang mungkin dapat dimitrakan seperti dalam tabel berikut.

Tabel 2: Contoh bidang kegiatan administratif dan pelayanan publik serta peluang kemitraan

Bidang Kegiatan (Kementerian / Kedinasan)	Bentuk Kemitraan	Kegiatan yang dilakukan
Kependudukan (Pusat dan Daerah)	Kontrak kerja	Input data, pengolahan dan penyajian data kependudukan
Kebakaran (Pusat dan Daerah)	Kontrak kerja	Pengujian bahan-bahan yang berhubungan dengan penang-gulangan kebakaran
Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (Pusat dan Daerah)	Kontrak kerja dengan perguruan tinggi atau swasta atau asosiasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyuluhan ▪ Percobaan untuk percontohan ▪ Pemanfaatan lahan (kebun percobaan) ▪ Penelitian/pemeriksaan lab. hasil-hasil pertanian dan peternakan ▪ Sertifikasi mutu produk
Perkebunan, kehutanan, pertamanan (Pusat dan Daerah)	BOT / BOO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percobaan untuk percontohan ▪ Pemanfaatan lahan perkebunan ▪ Penelitian/pemeriksaan laboratorium hasil perkebunan dan hutan
Pariwisata (Pusat dan Daerah)	Kerjasama Operasi atau Kontrak kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan dan pelatihan tenaga kepariwisataan ▪ Pengembangan/promosi pariwisata

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan kegiatan pariwisata ▪ Penelitian, pendokumentasian, dan pemeliharaan seni budaya
Pendidikan (Pusat dan Daerah)	Kontrak kerja atau kerjasama operasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelenggaraan kursus-kursus ▪ Pendidikan formal ▪ Penelitian
Tenaga Kerja	Kontrak kerja atau kerjasama operasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan ▪ Pengiriman ▪ Penelitian
Pemuda & Olah Raga (Pusat dan Daerah)	BOO/BOT	Pemanfaatan fasilitas olah raga
Perpajakan / Pendapatan / Retribusi / Parkir / BPKD (Pusat dan Daerah)	BOO/BOT	Penghitung potensi, pelatihan, pembangunan jaringan on line system perpajakan, pendataan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
Perhubungan	BOO	Uji Kendaraan bermotor oleh bengkel teruji

Sumber: Berdasarkan Mahmudi, 2009.

Kondisi untuk Kemitraan Efektif

Kolaborasi / kemitraan tidak datang secara alami untuk sebagian besar karyawan, terutama mereka yang lahir sebelum millennial. Generasi sebelumnya diajarkan bahwa persaingan itu baik, dan kerja keras individu itu akan dihargai dengan kemajuan karier yang stabil. Akan tetapi sifat pekerjaan telah berubah, bagaimanapun, dan manajemen dan pengetahuan yang diciptakan pada abad ke-20 tidak lagi dapat dipertahankan hari ini jika organisasi ingin berhasil. Kemitraan sebagai satu bentuk kolaborasi membantu memecah kesulitan sehingga organisasi dapat menjadi kreatif, fleksibel, dan siap untuk memenuhi perubahan, menuntut kebutuhan bisnis saat ini (Kip Kelly & Alan Schaefer, 2015).

Untuk hal itu ada beberapa kondisi yang harus hidup di dalam diri pemimpin dan individu yang bermitra yang berkontribusi untuk memastikan bahwa kemitraan adalah bagian dari budaya organisasi. Kondisi yang dimaksud adalah:

- kebutuhan,
- kepercayaan,
- keterbukaan,
- pembelajaran,
- profitabel,
- komunikasi, dan
- visi serta tujuan bersama.

Kebutuhan. Agar satu negara menjadi maju, maka pemerintah butuh kerjasama dengan bisnis. Pemerintah memiliki keterbatasan, sementara kegiatan-kegiatan di sektor publik dapat dilakukan oleh sektor non pemerintah lebih efisien dan efektif. Pemerintah perlu bermitra dengan bisnis karena keduanya saling membutuhkan. Pemerintah perlu bekerja dengan bisnis untuk meningkatkan pangsa sumber daya dunia yang tersedia bagi suatu negara atau wilayah. Pemerintah yang kompetitif harus jauh lebih proaktif dalam bekerja dengan bisnis untuk mencapai daya saing nasional daripada model tradisional pemerintah (Cullen dan Cushman mengatakan. 2000: 6). Karena pemerintah dan bisnis saling membutuhkan maka keduanya memiliki hubungan kadar kooperasi yang tinggi. Keduanya memiliki kooperasi secara intensif untuk jangka panjang. Hubungan sinergi antara sektor publik dan sektor swasta (dunia usaha) akan menghasilkan keluaran transaksional (*transactional output*) yang lebih efisien dari kegiatan masyarakat. (Cullen and Cushman. 2000: 6).

Kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi kemitraan yang efektif. Ada banyak sisi untuk dipercaya, tetapi kerentanan adalah aspek yang paling mempengaruhi proses kolaboratif. Tanpa kerentanan, orang tidak akan sepenuhnya berinvestasi sendiri atau ide mereka dalam upaya kolektif. Dalam proses kolaboratif, kepercayaan berarti menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat secara terbuka mengungkapkan kekhawatiran, ketakutan, dan perbedaan pendapat (yaitu, rentan) tanpa takut akan penolakan, agresi, atau pembalasan. Ketika kerentanan terancam, perilaku yang menghambat kreativitas dan inovasi mengambil alih. Lebih jauh lagi, ketika orang merasa diremehkan dan melihat kontribusi mereka menjadi tidak dikenal dan tidak dihargai, mereka melepaskan diri dan mencari tempat lain untuk kesempatan berkontribusi. Kepercayaan dan rasa hormat adalah fondasi kolaborasi dan merupakan kunci untuk membangun komitmen terhadap tujuan bersama.

Keterbukaan. Memantapkan mekanisme komunikasi yang lancar dan transparan, dan dalam kaitannya dengan tingkat partisipasi. Maka sejak tahap awal mekanisme kemitraan yang transparan harus dikembangkan dan dimantapkan. Penunjukan proyek infrastruktur secara langsung tidak lagi diperbolehkan. Persaingan melalui tender telah diwajibkan untuk semua proyek KPS. Proses-proses dan faktor-faktor yang harus dilakukan dan dipertimbangkan dalam tender yang kompetitif telah diatur didalam peraturan KPS dan sejumlah peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksana.

Pembelajaran. Untuk optimasi nilai kompetitif di sektor bisnis dan sektor publik, maka bisnis perlu belajar dari sektor publik dan sebaliknya sektor publik belajar dari bisnis. Apa yang bisa dipelajari bisnis dari sektor publik? Sepertinya sektor bisnis dapat belajar banyak tentang bagaimana mengelola kinerja dalam situasi yang kompleks di mana kekuatan pasar normal tidak efektif. Ia dapat belajar bagaimana mengembangkan kebijakan di mana berbagai masalah dan tindakan dapat diatasi, ia dapat belajar bagaimana mengembangkan konsensus untuk mendukung pengambilan keputusan dan akhirnya dapat belajar bagaimana menghindari mengambil beberapa risiko yang tidak perlu. Kemudian apa yang bisa dipelajari sektor publik dari bisnis? Sepertinya sektor publik dapat belajar bagaimana menghubungkan input ke output dan bagaimana mengelola pengiriman output, dapat belajar bagaimana fokus pada klien sebagai misi utama organisasi dan bukan sumber masalah. Akhirnya, dapat belajar untuk mengelola risiko dan menerima kesalahan sebagai bagian dari proses itu (Ronald B. Cullen and Donald P. Cushman, 2000: 37). Dalam usaha bisnis belajar dari sektor publik dan usaha sektor publik belajar dari sektor bisnis memerlukan komunikasi pemerintah-bisnis agar mereka bekerja secara bersama-sama untuk meningkatkan daya saing nasional. Bisnis dan pemerintah sering bicara tetapi jarang berkomunikasi secara efektif. Ada banyak hambatan untuk

komunikasi efektif antara manajer dalam bisnis dan pemerintah yang mengurangi lingkup untuk tiap sektor untuk belajar dari yang lain.

Profitabel. Adanya keterlibatan pihak swasta untuk mendukung kegiatan sektor publik adalah untuk mendapat profitabel untuk kedua pihak. Insstitusi bisnis harus mendapat profit namun profit yang didapat oleh pihak swasta tidak merugikan sektor publik. Untuk itu perlu pengawasan dari pemerintah dan pembatasan waktu.

Komunikasi. Tidak ada kolaborasi tanpa komunikasi yang efektif. Pemimpin harus mengomunikasikan mengapa kolaborasi itu penting bagi keberhasilan organisasi dan harus menguraikan strategi dan peta jalan untuk bagaimana organisasi akan bekerja secara kolaboratif. Baik karyawan maupun pemimpin harus berbagi dan membangun ide, mengkritik secara konstruktif, dan memberikan umpan balik. Komunikasi yang efektif membutuhkan tingkat kesadaran diri yang substansial. Karyawan harus memahami preferensi mereka sendiri tentang bagaimana mereka mendekati situasi kolaboratif. Mereka juga harus memahami gaya komunikasi dan kolaborasi yang mungkin disukai karyawan lain. Kesadaran inilah yang memungkinkan karyawan untuk mengenali gaya komunikasi dan kolaborasi / kemitraan yang berbeda dan untuk meningkatkannya. Lebih dari itu, setiap karyawan harus bisa berbicara bahasa kolaboratif/kemitraan yang sama.

Visi dan Tujuan Bersama. Dua atau lebih pihak yang bermitra harus memiliki visi dan tujuan bersama dan berkontribusi pada visi dan tujuan bersama tersebut. Ini adalah tentang meluangkan waktu untuk mengartikulasikan "mengapa" untuk semua orang yang terlibat dalam proses kemitraan pada proyek atau inisiatif tertentu. Semua pihak yang bermitra harus memahami bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada tujuan dibentuknya kemitraan dan organisasi dan bagaimana kemitraan akan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Ketika para pihak yang bermitra memahami tujuan mereka yang lebih luas, mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi tim mereka.

Penutup

Kemitraan pemerintah dan bisnis tidak dapat dielakkan bahkan menjadi kebutuhan di era penyelenggaraan pemerintahan berbasis *good governance*. Kemitraan pemerintah dengan bisnis, dua pilar penting dalam *good public governance*, merupakan langkah strategis untuk mensinergikan stakeholders dalam perbaikan sektor publik yang menjadi domain pemerintah. Masalah di sektor publik tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh pemerintah dengan hanya mengandalkan kemampuan dan anggaran pemerintah.

Kemitraan dibutuhkan karena dapat memberikan hasil yang lebih berkualitas dalam pemberian layanan publik daripada agensi bekerja sendirian. Untuk itu pemerintah membentuk kemitraan dengan pemerintah yang bermanfaat bagi kedua pihak terutama bagi warga dengan berasaskan: partisipasi, transparansi, responsif, akuntabel, efektif dan efisien, kepastian hukum, konsensus dan kesetaraan dan inklusif.

Ada berbagai pola kemitraan yang dapat digunakan oleh pemerintah. Dari tipologi dapat dilakukan dengan basis: *sectoral basis, relationship basis, economic basis, policy area, scope*. Berdasarkan bentuk dapat dilakukan melalui berbagai kontrak, seperti: kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, kontrak sewa, kontrak konsesi, kontrak lepas.

Agar kemitraan efektif, maka pihak yang bermitra menciptakan kondisi yang saling membutuhkan, saling percaya, saling terbuka, saling belajar, saling profitabel, saling komunikasi, dan memiliki visi serta tujuan bersama.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Cullen, Ronald B. and Donald P. Cushman. 2000. *Transitions to Competitive Government: Speed, Consensus, and Performance*. New York: State University of New York Press.
- Etzioni-Halevy, Eva. 1985. *Bureaucracy and Democracy: A Political Dilemma*. Revised Edition. London: Routledge & Kegan Paul;
- Frederickson, H. George and David K. Hart. 1985. The Public Service and the Patriotism of Benevolence. *Public Administration Review*. September/October.
- Harmon, Michael M. and Richard T. Mayer. 1986. *Organization Theory For Public Administration*. Boston: Little, Brown and Company.
- Idrus, M., Sistem Pengawasan dan Perimbangan Untuk Mewujudkan Good Governance, dalam Miftah Thoha, penyunting. 1999. *Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Loffler, Elke dalam Tony Bovaird and Elke Loffler, editor. 2009. *Public Management and Governance*. Second Edition. Routledge: New York, p. 216)
- Kotler, Philip, Somkid Jatusripitak, dan Suvit Maesincee 1998. *Pemasaran Keunggulan Bangsa (The Marketing of Nations)*. Alih Bahasa oleh Aldi Jenie. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- McCraw, Thomas K., The Public and Private Spheres in Historical Perspective, dalam Richard J. Stillman II. Editor. 1992. *Public Administration: Concepts and Case*. Fifth Edition. Boston:
- McKevitt, David and Alan Lawton, (ed). *Public Sector Management: Theory, Critique and Practice*. London: SAGE Publications.
- Naisbit, John. 1994. *Global Paradox*, alih bahasa Budijanto. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Nugroho, Rianto. 2000. *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi: Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Osborne and Plastrik, 1996
- Silalahi, Ulbert, 1995. "Demokratisasi Administrasi". Peper disajikan pada Orasi Dies Natalis Fisip Unpar pada tahun 1995 di Bandung.
- Walters, Stephen J. 1998. *Enterprise, Government, and The Public*. New York: McGraw-Hill, Inc.

Online

- Ansell, Chris & Alison Gash, Collaborative Governance in Theory and Practice. *JPART* 18:543–571. Tersedia di <http://jpart.oxfordjournals.org/>
- Azi, Nyimas Latifah Letty, 2016, Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Tersedia di <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama-pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia>
- Bovaird, Tony, "Public-private partnerships: from contested concepts to prevalent practice. Dalam *International Review of Administrative Sciences* 70(2). Copyright © 2004 IAS, SAGE Publications (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi). Vol 70(2):199–215 [DOI:10.1177/0020852304044250]. Tersedia di <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0020852304044250>

- Dwiridotjahjono, Jogyakarta, Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis* (2009), Vol.5, No.2: hal. 101–112, (ISSN:0216–1249). Tersedia di <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/view/2108>
- Kelly, Kip & Alan Schaefer, 2015, People Together Creating a Collaborative Organizational Culture. UNC Kenan-Flagler Business School. Tersedia di <https://www.kenan-flagler.unc.edu/~media/Files/documents/executive-development/unc-white-paper-creating-a-collaborative-organizational-culture.pdf>
- Magya Ramadhania Putri dan Isnaini Rodiyah, Kemitraan Pemerintah-Swasta Dalam Program *Corporate Social Responsibility* Di Kabupaten Pasuruan. Dalam *JKMP (ISSN. 2338-445X dan E-ISSN. 2527 9246)*, Vol. 4, No. 2, September 2016, 117-234
- Mahmudi. Kemitraan pemerintah daerah dan efektivitas pelayanan public. Dalam *Kajian Bisnis Dan Manajemen* Vol. 9 No. 1, Januari 2007 Hal. 53 – 67. Tersedia di <http://journal.uui.ac.id/Sinergi/article/view/230/226>
- Perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) [http://sendhynugraha.blogspot.com /2012/11/perjanjian-build-operate-and-transfer.html](http://sendhynugraha.blogspot.com/2012/11/perjanjian-build-operate-and-transfer.html)
- Rahajeng, Mardatilla Septiani dan Asnawi Manaf. 2015. Bentuk-Bentuk Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Upaya Keberlanjutan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Kabupaten Kendal Dan Kota Pekalongan). *Jurnal Pengembangan Kota* (2015) Volume 3 No. 2 (112–119). Tersedia online di: <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>
- Rindaasyuti, Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dalam Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Pemerintah. Tersedia di <https://rindaasyuti.wordpress.com/2008/05/21/pengaruh-penerapan-good-corporate-governance-dalam-bisnis-dan-implikasinya-terhadap-akuntabilitas-pemerintah/>
- Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda, Kemitraan Antara Pemerintah Kota dengan Swasta dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan [https://media.neliti.com/ media/publications/52389-ID-kemitraan-antara-pemerintah-kota-dengan.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/52389-ID-kemitraan-antara-pemerintah-kota-dengan.pdf)
- <https://pemasaranpariwisata.com/2018/03/09/cara-menghadapi-era-disrupsi/>
- [https://www.kompasiana.com/andreyandoko/ 5a96c728ab12ae5d19200622/datangnya-era-inovasi-disruptif](https://www.kompasiana.com/andreyandoko/5a96c728ab12ae5d19200622/datangnya-era-inovasi-disruptif)
- [http://dhenov.blogspot.com/2007/10/ bentuk-bentuk-kerja-sama-pemerintah.html](http://dhenov.blogspot.com/2007/10/bentuk-bentuk-kerja-sama-pemerintah.html)
- <https://media.neliti.com/media/publications/73688-ID-penerapan-good-corporate-governance-manf.pdf>
- <https://media.neliti.com/media/publications/36057-ID-penerapan-prinsip-prinsip-good-corporate-governance-pada-perusahaan-keluarga-stu.pdf>

MODEL AKSELERASI INOVASI DAN NETWORKING SEBAGAI BASIS PENGUATAN DAYA SAING USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI BANYUWANGI¹

Edy Wahyudi²

Abstrak

Usaha kecil Menengah (UKM) seringkali lemah ketika dituntut untuk melakukan inovasi berkelanjutan. Proses inovasi seringkali terhambat karena tidak disertai dengan penelitian dari berbagai aspek, respon pasar yang rendah terhadap hasil inovasi, keterbatasan dana, dan motivasi pelaku usaha yang rendah dalam berinovasi. Diferensiasi produk dan inovasi pemasaran membutuhkan suatu proses kerjasama baik dengan pemerintah daerah, pelaku usaha yang lebih besar, ataupun dengan sesama pelaku usaha sejenis. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model akselerasi inovasi dan aspek networking usaha kecil Menengah. Penelitian ini mengurai upaya usaha kecil melakukan akselerasi inovasi dan fokus mengurai dari perspektif mekanisme dalam proses *networking*, elemen kekuatan dan ketergantungan *networking*, dan beberapa karakteristik unik yang menyertainya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk dapat melihat kondisi nyata bagaimana pelaku UKM melakukan inovasi, *networking* dan meningkatkan daya saingnya. Lokasi Penelitian ini adalah di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi menjadi lokasi yang menarik untuk diteliti karena perkembangan ekonominya yang pesat, yang ditopang oleh tiga program unggulan yaitu pariwisata, pertanian, dan usaha kecil. Hal ini menarik, karena sebetulnya sudah banyak konsep tentang keunggulan bersaing usaha kecil, namun tidak banyak daerah yang mampu meningkatkan daya saingnya dari tiga hal tersebut.

Key word: inovasi, networking, usaha kecil, Banyuwangi

Pendahuluan

Akhir tahun 2010 pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mengalami peningkatan 6,67%. Besarnya pertumbuhan ini melebihi nasional yang hanya 6,10% pada 2010. Jawa Timur saat ini menduduki posisi kedua penyumbang Produk Domestik Regional Bruto sebesar 15,41% pada 2010 setelah DKI Jakarta sebesar 17,81%.

Jatim juga memiliki jumlah industri kecil yang sangat dominan 97,80%, sementara industri menengah 2,09 dan usaha besar 0,10%. Dominasi industri kecil ini ternyata juga mampu menyerap tenaga kerja 60,12%, sementara industri menengah 31,73% dan industri besar hanya 8,15%.

Pengembangan industri unggulan di Jawa Timur dilakukan dengan pengembangan kompetensi daerah, OVOP (*One Village One Product*), industri kreatif dan industri agro. Berdasarkan data potensi produk unggulan kabupaten/ kota se-Jawa Timur, nampak bahwa semua daerah memiliki produk

¹ Di presentasikan call for paper pada Seminar Nasional Business, Government, and The Public. 28 November 2018 di FISIP Unpar. Bandung

² Kaprodi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Jember. Email: edydata75@gmail.com CP.

unggulan dan industri kreatif yang dikembangkan. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, nampak bahwa hanya beberapa daerah yang memiliki industri kreatif yang unik dan ditunjang dengan sektor kepariwisataan yang juga unik. Keberadaan sektor industri kreatif dan kepariwisataan memiliki sinergisitas yang kuat, sehingga dibutuhkan akselerasi inovasi untuk dapat mengoptimalkan kedua hal tersebut.

Meskipun usaha kecil tersebut menggunakan teknologi rendah, namun kunci kesuksesan usaha kecil tersebut adalah kreativitas, baik dalam hal menghasilkan kreasi produk, teknologi tepat guna yang sederhana, citarasa dan *packaging* yang khas (mamin khas), dan kreativitas dalam memasarkan produk mereka (Wahyudi, 2014)

Wahyudi (2014) menambahkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, beberapa pelaku usaha menggunakan teknologi tinggi dalam proses produksi dan pemasaran produk mereka. Penggunaan teknologi tinggi itu ditandai dengan menggunakan mesin otomatis, yang mampu mengontrol kualitas mulai dari tingkat presisi ukuran produk, kualitas rasa (jika itu terkait dengan mamin), dan juga dari produktivitas (kecepatan) produksi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan bahwa pelaku usaha yang menggunakan teknologi tinggi adalah perusahaan yang mampu secara kontinyu melakukan produksi dan melayani permintaan pasar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Wahyudi (2015) faktor *market pull* dan *technology push* masih menjadi faktor kunci dalam mengembangkan pasar dan melakukan inovasi. Pelaku usaha tidak gegabah melakukan *market created* tanpa melakukan penelitian pasar. Penelitian pasar tersebut bukan seperti yang dilakukan perusahaan besar, namun setidaknya pelaku usaha melakukan inovasi dengan melakukan produk baru, harus dilandasi dengan pertimbangan yang matang, seperti kestabilan permintaan produk yang sudah ada secara kontinyu. Artinya, inovasi produk yang dilakukan tidak akan berdampak terhadap pesanan yang sudah ada, sehingga walaupun inovasi produk baru tersebut gagal, tidak berdampak pada pesanan produk yang sudah berjalan sebelumnya.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa karakteristik usaha kecil yang unik membuat penelitian terkait pemberdayaan dan daya saing tiada habisnya untuk di eksplorasi. Problematika peningkatan daya saing ini akan terus ada, ketika preferensi keinginan konsumen senantiasa berubah dan berkembang, peta persaingan yang terus meningkat, dan berkembangnya teknologi informasi. Berangkat dari fakta inilah, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, karena berupaya meneliti usaha kecil dalam melakukan *innovation network* dan meningkatkan daya saingnya.

Meskipun berdasarkan data data yang ada peran UMKM dalam meningkatkan APBN cukup tinggi, beberapa kendala terkait dengan kemampuan daya saing UMKM senantiasa menjadi permasalahan. Banyak pelaku usaha yang merasa tidak didampingi, tidak difasilitasi, dan kurang didekati pemerintah dalam menjalankan usahanya. Penelitian ini akan mengidentifikasi proses *networking*, dan elemen kekuatan dan kelemahan *networking*.

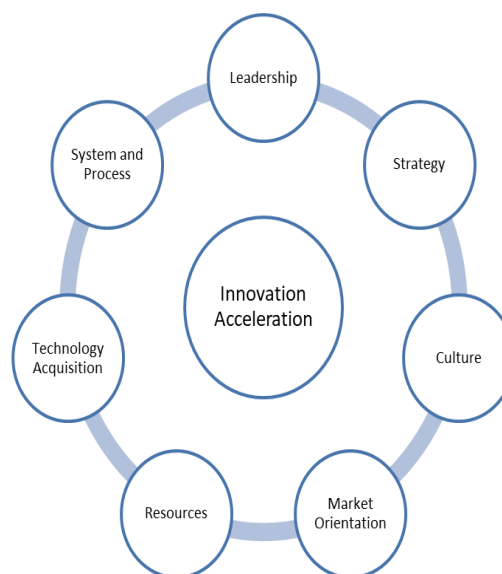
Harapan dari penelitian ini adalah dapat mengurai model daya saing usaha kecil dengan menekankan pada aspek akselerasi inovasi dan *networking* agar dapat menciptakan inovasi berkelanjutan. Sebenarnya, *networking* usaha kecil dapat dilakukan lebih terbuka terhadap inovasi (*open innovation*) dengan menjalin *networking* dengan universitas terkait riset dan pengembangan,

perusahaan besar terkait dengan *partnership* produk dan standardisasi kualitas produk, antar usaha kecil sendiri dalam berkolaborasi untuk dapat mereduksi biaya pengadaan bahan baku atau melayani permintaan yang lebih luas, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat atau kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat lainnya. *Networking* yang dilakukan harus disertai dengan strategi pengembangan kapabilitas yang jelas, sehingga *networking* yang dilakukan dapat lebih *sustainable* dan meningkatkan daya saing usaha kecil itu sendiri (Wahyudi, 2014). Kabupaten Banyuwangi memiliki produk unggulan berupa batik, tari gandrung, kaos, olahan buah dan wisata pantai yang ada di berbagai tempat di Banyuwangi. Penelitian ini menetapkan Kabupaten Banyuwangi, dengan pertimbangan memiliki potensi usaha kecil produk unggulan bervariasi pengembangan kepariwisataan dan market place yang masih memungkinkan untuk dilakukan akselerasi.

Kerangka Teoritik

Akselerasi Inovasi

Akselerasi inovasi secara konseptual sangat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah kepemimpinan (*leadership*), strategi, budaya, sumberdaya, teknologi yang digunakan, proses dan sistem dan orientasi pasar (Goyal and Pitt, 2007).



Gambar 1. Daya dukung inovasi (Goyal and Pitt, 2007)

Quaye and Mensah (2018) mengatakan bahwa inovasi pemasaran dan orientasi pasar yang jelas akan memberikan kemampuan daya saing bagi usaha kecil. Gardet and Mothe menegaskan bahwa faktor trust dan berbagi manfaat menjadi fondasi dasar *networking* dan ekosistem inovasi. Kerjasama eksternal dapat meningkatkan pengembangan pengetahuan usaha kecil, sehingga pengetahuan dapat di transfer dan mendukung inovasi. Keunggulan bersaing terkait dengan kemampuan perusahaan belajar dari pengalaman yang diperolehnya. Hal ini membutuhkan konsentrasi penciptaan dan keberlanjutan kemampuan usaha kecil agar mampu selalu di depan

(Jones, 2003). Faktor eksternal seperti kolaborasi *interfirm* mempengaruhi kemampuan meningkatkan daya saing usaha kecil, atau dipengaruhi oleh berbagai kondisi lainnya.

Innovation Network Usaha Kecil

Kemampuan usaha kecil menyerap (*absorptive capacity*) penting untuk memperoleh nilai dari informasi baru, berproses (*assimilate*) dan mengaplikasikan untuk di komersialisasikan. Pembelajaran teknologi menjadi hal penting dalam keberhasilan inovasi, namun tidak mudah ditengah keterbatasan usaha kecil. Sumber pembelajaran teknologi adalah dengan meningkatkan *networking*. *Networking* memungkinkan usaha kecil berinteraksi dengan perusahaan lain yang lebih bervariasi dan berkelanjutan. Interaksi dengan *supplier* ataupun konsumen, dan juga infrastruktur teknologi adalah kunci mengelola inovasi sebagai proses pembelajaran sosial. *Networking* dalam konteks ini adalah adanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan secara kelembagaan, dan bukan secara individu. Tingkatan dari kerjasama ini dapat secara non formal ataupun formal. Penguatan *network* dapat mengembangkan *market linkage* yang lebih luas, diantaranya jumlah pelanggan dan *supplier*.

Networking usaha kecil dapat dilakukan dengan melakukan interaksi antara perusahaan, kerjasama bisnis, *vendors*, *supplier* dan konsumen, atau dalam bahasa lain *stakeholders*. Melalui *network* ini, perusahaan dapat bertukar, berkolaborasi berbagi pengetahuan, informasi dan komunikasi.

Wahyudi (2013) mengatakan bahwa *networking* juga berbagi risiko, mendapatkan teknologi dan pasar baru, produk lebih cepat sampai ketangan konsumen, dan saling melengkapi keahlian. *Networking* membuka akses pengetahuan eksternal yang lebih luas meliputi *vendors*, *partner*, pesaing dan teknologi.

Fierro (2011) mengatakan bahwa proses kerjasama bisnis ataupun inovasi memungkinkan munculnya *innovation network*, baik berupa inovasi produk, inovasi pemasaran ataupun meningkatnya proses kerjasama antar pengusaha sendiri sehingga meningkatkan skala produksi. *Networking* dan kolaborasi juga memungkinkan pengembangan investasi, fleksibilitas organisasi dan meningkatnya kinerja secara keseluruhan.

Kesuksesan dalam *networking* tidak cukup hanya karena dua organisasi melakukan pekerjaan yang sama. Burdon (2015) menekankan beberapa tahapan dalam proses *networking* dan kolaborasi usaha kecil, yaitu fase tradisional, dimana proses kerjasama yang dilakukan hanya pada menjalankan aktivitas bersama atau secara *outsourcing*, kemudian berlanjut kepada kepercayaan melakukan kolaborasi dan kerjasama, dan terakhir pada peningkatan kerjasama strategik. Belajar dari beberapa kasus, Burdon (2015) mencatat bahwa 1) kesuksesan *networking* dalam meningkatkan inovasi tidak semudah yang dibayangkan karena melibatkan kerjasama dua organisasi. Harus ada dukungan visi dan proses dan meningkatkan keunggulan inter organisasional dalam kolaborasi. 2) responden mengatakan berdasarkan *innovating experience environment* bahwa proses detail kontrak justru membuat mereka merasa terhambat dalam melakukan inovasi. 3) pelaku usaha mengingatkan perubahan radikal ketika inovasi dilakukan dari staf, sumberdaya perusahaan, perencanaan, sistem

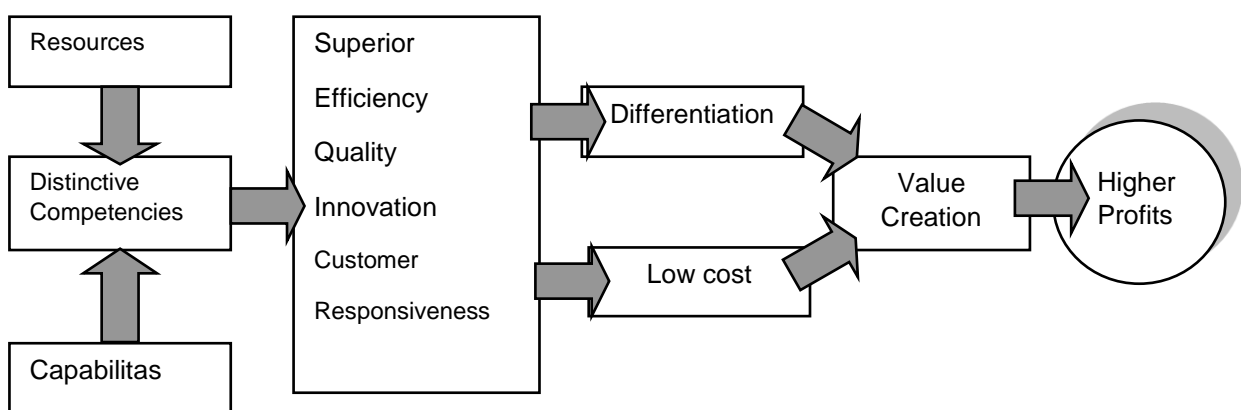
manajemen untuk menghadapi tantangan. 4) *symmetric partnership* dimana dukungan informasi dibutuhkan untuk menyamakan orientasi pengembangan inovasi yang sama.

Peningkatan Daya Saing UKM

Liu and Zhang (2012) mengatakan bahwa lingkungan yang bergejolak atau dikenal dengan istilah *hyper competitive environment* digambarkan sebagai kondisi dimana tingkat persaingan semakin pesat yaitu suatu kondisi yang mencakup pertarungan posisi antara harga dan kualitas, penciptaan ilmu baru, dan pengembangan manfaat sebagai pioner (*first mover advantage*). Apabila diperbandingkan dengan usaha besar, usaha kecil mampu mengimplementasikan secara baik manajemen praktis seperti fleksibilitas promosi, contohnya mendapatkan subkontrak kerja, menggunakan tenaga kerja paruh waktu, dan pembuatan regulasi pekerja sesuai dengan kemampuan usaha kecil tersebut (Ruigrok *et al.*, 1999)

Inovasi merupakan faktor penting sebagai upaya perusahaan untuk mendiferensikan produk, sehingga inovasi harus dikelola dengan lebih baik daripada pesaingnya (Kotler dan Armstrong, 2009). Menurut Drucker (1991) inovasi adalah cara-cara yang digunakan pengusaha untuk menciptakan sumber daya baru yang memproduksi kekayaan atau mendayagunakan sumber daya yang sudah ada dan merupakan sumber kompetitif dalam perekonomian global, dan daya saing strategis perusahaan. Menurut Gilbert, 2003 (dalam Elitan dan Anatan, 2009) inovasi adalah perubahan yang dilakukan dalam organisasi yang didalamnya mencakup kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses baru. Menurut Ellitan dan Anatan (2009) produk baru sering dilihat sebagai *cutting edge of innovation* di pasar, proses inovasi berperan sebagai *strategic role*. Sehingga keberhasilan membuat sesuatu lebih baik dari pesaingnya, hal tersebut merupakan sumber keunggulan yang penting.

Hill and Jones (1998) menjelaskan langkah-langkah sistematis menuju keunggulan kompetitif (*the roots of competitive advantage*) yang dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Sumber : Hill and Jones (1998) *The Roots of Competitive Advantage*

Suatu perusahaan dapat saja memiliki banyak kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan para pesaingnya, tetapi ada dua tipe dasar keunggulan bersaing yang dapat dimilikinya: biaya rendah (*low cost*) atau diferensiasi (*defferentiation*) (Porter, 1985).

Perusahaan memilih satu atau beberapa atribut yang oleh banyak pembeli dalam industri ini dipandang penting, dan menempatkan dirinya secara unik untuk memenuhi kebutuhan ini. Karena posisi yang unik (khas) itu, perusahaan yang layak untuk menetapkan harga premium (*premium price*).

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif, untuk dapat mendeskripsikan proses akselerasi inovasi dan networking yang dilakukan usaha kecil di Banyuwangi. Objek penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah yang memproduksi berbagai jenis produk yang sudah melakukan kerjasama kemitraan (*partnership*) atau membuat jaringan (*network*) dan kolaborasi dengan berbagai sektor, baik dengan sesama pengusaha, perusahaan yang lebih besar, perusahaan yang lebih kecil, buyer, pemerintah, saluran distribusi ataupun pemasaran. Varian produk UKM tersebut meliputi makanan dan minuman khas (*mamin khas*), logam, konveksi, batik dan kerajinan (*craft*). Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan akselerasi inovasi dan networking usaha kecil dalam meningkatkan daya saingnya. Penelitian ini akan menelaah elemen kekuatan dan ketergantungan networking, dan beberapa karakteristik unik yang menyertainya. Proses kedalaman informasi didapatkan peneliti melalui *indepth interview* dengan key informan kepala dinas UMKM atau yang relevan di instansi pemerintahan terkait dan pemilik perusahaan untuk mendapatkan data primer. Peneliti juga melakukan observasi dan penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan langsung proses inovasi yang dilakukan, kerjasama kerjasama yang dilakukan, inovasi teknologi yang digunakan, dan mencermati akses pasar dan pemasaran di lapangan.

Berdasarkan data, terdapat 241 UKM binaan dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi dimana terbanyak adalah usaha kecil makanan dan minuman (*mamin*) sebanyak 108 usaha, kerajinan/ *craft* 96 usaha, konveksi dan kaos sebanyak 17 usaha, dan batik 20 usaha. Penelitian ini dibatasi pada usaha yang sudah berdiri selama lebih dari 5 tahun, memiliki lebih dari 10 karyawan, dan memiliki kontinuitas dalam berproduksi. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti melakukan survey dengan melakukan wawancara (*indepht interview*) kepada informan untuk mendapatkan data primer. Terdapat 15 pelaku usaha dari berbagai jenis, yang memenuhi kriteria dan berhasil di wawancarai. Peneliti juga melakukan wawancara dan mendapatkan data sekunder kepada dinas terkait seperti dinas Koperasi dan UMKM dan BAPEDA. Proses triangulasi dilakukan secara bergantian saat Focus Group Discussion (FGD) berlangsung, yang melibatkan dinas pemerintah dan pelaku usaha.

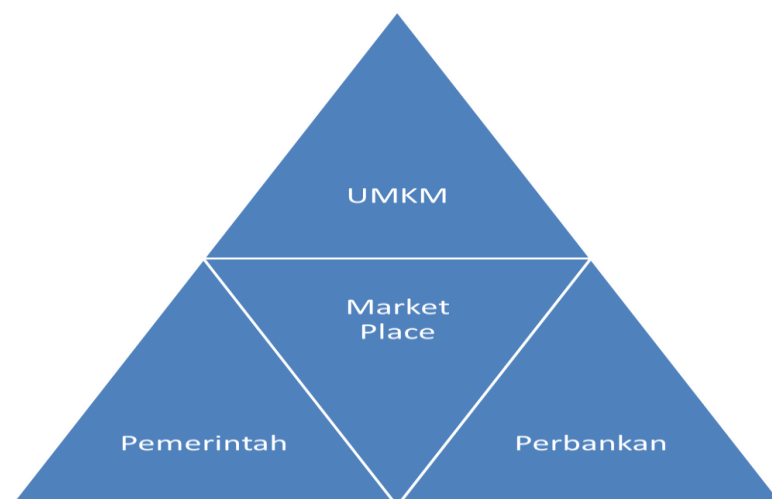
Pembahasan

Kolaborasi Antar SKPD sebagai Daya Dukung UKM di Banyuwangi

Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi memang di fokuskan ke pengembangan pariwisata, dengan ditopang oleh UMKM dan pertanian. Ketiga aspek ini melibatkan beberapa sektor yang harus bekerjasama, diantaranya adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pertanian dan disperindagtam dan dinkop UKM. Ke empat sektor SKPD ini menjadi tulang punggung paling depan dalam pembangunan Banyuwangi. Kerjasama kolaboratif antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi faktor penting majunya perkembangan UKM dan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.

Jumlah UMKM Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sebesar 131.866, maka dari jumlah penduduk Banyuwangi yang berjumlah mencapai 1.554.997 jiwa, menghasilkan rasio 8,48% dari kemampuan penyerapan tenaga kerja masyarakat Banyuwangi. Kemampuan tersebut memiliki potensi besar untuk mendapatkan perhatian dan pengembangan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bentuk dukungan tersebut adalah pengembangan UMKM menjadi cara untuk meningkatkan nilai hasil produksi sektor pertanian, sektor pariwisata, dan sektor perikanan. Selain sektor pertanian dan UMKM, Kabupaten Banyuwangi mempunyai potensi dan peluang pada sektor pariwisata yang cukup besar, hal tersebut dapat dilihat pada Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang sangat beragam. Ketiga sektor tersebut (sektor pertanian, UMKM dan pariwisata) diharapkan dapat terorganisir dengan baik guna meningkatkan perekonomian masyarakat, pendapatan daerah dan kontribusi dalam PDRB.

Permasalahan UMKM berdasarkan penuturan kepala Dinas Koperasi dan UMKM adalah kesulitan dalam pemasaran, kurangnya teknis produksi dan keahlian, kurangnya ketrampilan manajerial termasuk keuangan, dan kurangnya permodalan. Namun Pemerintah daerah membuat program solutif pemberdayaan UKM dengan membuat market place yang keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan akses pasar dan daya saing UKM. Market place tersebut di kelola rumah kreatif bentukan Pemda Banyuwangi bekerja sama dengan perbankan dan UKM. Sinergisitas tiga peran ini menjadi penting dalam pengelolaan market place. Pemerintah daerah dan Bank BUMN melalui Rumah Kreatif berperan untuk meningkatkan kapabilitas UMKM, membantu pengelolaan produk, manajemen *market place*. Bank berperan dalam hal mempersiapkan infrastruktur market place, menyediakan sistem pembayaran, menyediakan solusi finansial termasuk pembiayaan UMKM. Peran UMKM dalam hal ini adalah menyediakan barang atau jasa yang berkualitas, pemenuhan pemesanan tepat waktu



Gambar 1.1. Pola Peran dan hubungan sinergisitas Market Place

Banyuwangi membuat market place ini di khususkan untuk peningkatan daya saing UMKM di banyuwangi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bapeda Banyuwangi, logika pembangunan marketplace itu antara lain adalah bahwa marketplace ini dibuat khusus dibuat untuk UMKM, dimana Pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam menentukan konsep dari *market place* (*branding*), yang kedua Ikatan emosional daerah, ketiga skema *pricing* yang menarik, hal ini akan

diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi UMKM dimana jangkauan pemasaran yang luas, akses pasar lebih internasional, dan akses kemudahan dari aspek pembiayaan KUR

Saat ini sudah banyak yang berpartisipasi aktif dalam marketplace tersebut, diantaranya adalah UKM batik (Canting Mustika, Osing Nigrat, Batik Srikandi, Nozzah, Tatsaka Batik, Batik Tropikal, Sekar Kedaton. UKM makanan olahan (Berkah Jaya Profita, Astri, Srimulto, Anisa, Beras Organik). UKM Handy craft (Das Paper Collection, Nagud, Marking Tshirt Floking, Kejaya Handicraft, Rahmat Jaya, Widya Handicraft, Berkah Alam, Hijabox, Sidodadi, Puncak Makmur Jaya, Java tektona. UKM tour, travel dan perikanan seperti (Pesona ijen Travel, Karya Mandiri, Sumber Asia, Mina Bahari). Saat ini sudah menampung 46 usaha UKM dengan 170 produk.

Upaya inovasi berkelanjutan dilakukan pemerintah dengan menyiapkan secara akademik dan sumberdaya, antara lain dengan 1) mengenalkan batik sejak dini kepada anak Sekolah Dasar, menjadi bagian kegiatan ekstra kurikuler di sekolah; 2) Langkah konkrit pemda adalah dengan mendirikan SMK jurusan Batik, agar dapat mengoptimalkan potensi lokal yang di miliki masyarakat Banyuwangi, dan tentunya adalah menumbuhkan ekonomi lokal Batik; 3)fasilitasi pemerintah dengan penggunaan pewarna batik dari bahan alami. Warna alami saat ini menjadi booming karena menggunakan bahan yang ramah lingkungan, meskipun warnanya tidak secerah pewarna buatan. Justru penggunaan bahan alami akan meningkatkan nilai jual, sehingga edukasi kepada para pengusaha batik dilakukan agar mampu meningkatkan daya saing; 4) pelatihan batik kepada warga lokal dan kalangan pelajar agar memiliki keahlian membatik. Hal ini diharapkan jika UKM batik mampu meningkatkan daya saingnya, kebutuhan sumberdaya/ tenaga kerja yang memiliki kompetensi batik dapat diambil dari lokal Banyuwangi.

Pelatihan untuk UMKM tidak hanya difokuskan ke batik, namun juga ke para nelayan, khususnya ibu ibu yang ada dirumah ketika suaminya menjadi nelayan. Pemberdayaan ibu ibu dilakukan dengan memberikan pelatihan pengolahan hasil laut agar berdaya jual tinggi. Selama ini ikan yang tidak terjual akan diolah menjadi ikan asin saja, sehingga daya jualnya rendah. Pelatihan pengolahan seperti nugget ikan, abon, krupuk, dan olahan lainnya.

Pemda juga dengan giat meningkatkan kreatifitas warga dan penumbuhan usaha baru dengan membuat video kreatif kategori layanan publik dan produk unggulan desa pada tahun 2018, dimana setiap desa dapat membuat video yang menampilkan produk unggulan desa misalkan pertanian, perkebunan, perikanan ataupun handycraft. Program program layanan publik juga dapat di dokumentasikan. Kompetisi ini diharapkan dapat menginspirasi dalam membuat produk layanan yang kreatif dan juga mengenalkan produk unggulan desa dan memperluas akses pasar. Pada tahun 2016, lomba video kreatif masih diikuti 50 desa, namun pada tahun 2017 sudah meningkat dengan di ikuti oleh 140 desa.

Untuk melindungi sektor UKM perkebunan, Bupati melarang mewajibkan menggunakan buah lokal dalam setiap acara acara yang diselenggarakan pemerintah, di tiap SKPD hingga ke level RT. Hal ini berorientasi untuk menghidupkan aktivitas ekonomi produk buah lokal dan kebanggaan terhadap produk lokal.

Untuk meningkatkan ekonomi kreatif dan entrepreneurship di kalangan anak muda, pemerintah mengadakan pelatihan internet marketing agar terjadi penguatan e commerce dan melahirkan entrepreneur muda berbasis digital. Terdapat 1500 peserta anak muda yang aktif dalam kegiatan ini untuk membuat website personal.

Tahun 2018 banyuwangimall.com menambah jaringan menjadi 103 UKM yang terlibat dalam marketplace dan mengusung 535 produk UMKM yang dipasarkan. Pendampingan pelaku usaha dilakukan di rumah kreatif banyuwangimall dengan memberikan 3 jenis pelatihan yaitu: peningkatan kualitas produk, internet marketing dan pelatihan kemasan yang diikuti 150 pelaku usaha. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Quaye and Mensah (2018) dimana kapabilitas sumberdaya dan kompetensi pemasaran akan membuat inovasi desain produk, inovasi harga, inovasi retail dan inovasi promosi dapat dilakukan agar dapat menciptakan keunggulan bersaing.

Saat ini ada 3 desa binaan sebagai pilot project pengembangan desa kreatif berbasis desa, yaitu 1) desa Sumberbulu kecamatan Songgon, dalam mengelola rafting dan daya dukung rafting seperti wisata kuliner dan potensi desa yang ada; 2) Desa Gintangan kecamatan Rogojampi, dengan Bamboo handycraft, dimana desa ini memiliki 12 UKM pengrajin bambu, yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti alat dapur, upacara adat, tikar, dinding bambu, hingga mebel. Kendala pengembangan kerajinan bambu ini adalah keterbatasan SDM yang trampil, manajemen usaha yang masih belum tertata, akses pasar yang lemah, dan minimnya bahan baku. 3) desa Tamansari, Kecamatan Licin, dimana desa ini memiliki UKM yang bergerak di usaha Penghasil madu, Bunga dan Belerang.

Prinsip sinergitas pariwisata, UKM dan pertanian yang dilakukan pemda Banyuwangi lebih serius bekerjasama dengan BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif). Program pendampingan selama 4 bulan ini fokus pada ekonomi kreatif yang dinamakan dengan program Inovatif dan Kreatif melalui Kolaborasi Nusantara (Ikkon). Tim BEKRAF pusat melatih selama 4 bulan mulai dari fashion, desain produk, grafis, tekstil, manajemen bisnis dan video maker. Lebih luas, pendampingan pengemasan produk dan model promosi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing UKM dan menumbuhkan ekonomi usaha kecil baru. Domain dinkop adalah bagaimana meningkatkan daya saing UKM dengan program unggulan diantaranya: penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, fasilitasi pemasaran, fasilitas permodalan dan fasilitas pemanfaatan IT. Pada tahapan implementasi, Dinkop melakukan pelatihan peningkatan kualitas produk dan bimbingan penerapan manajemen usaha. Pada tataran implementasi kebijakan, Dinkop aktif mengikuti pameran dan promosi produk, baik di dalam maupun luar negeri. Yang kedua, adalah bersinergi dengan teknologi digital, dengan mendirikan banyuwangimall.com sebagai marketplace.

Inisiasi Innovation Network

Proses innovation network masih dalam tahapan inisiasi. Tidak semua pelaku usaha menganggap penting melakukan innovation network. Innovation network dalam proses yang paling mendasar seperti melakukan kolaborasi saja, masih banyak pelaku usaha yang enggan melakukannya. Berdasarkan hasil penelitian, banyak UKM yang tidak melakukan kolaborasi. Ada banyak alasan mengapa pelaku usaha enggan untuk melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha lain. 1) perusahaan

menganggap tidak ada alasan mendesak melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain, karena merasa telah memiliki semua kapabilitas dan semua sumberdaya untuk melakukan pengembangan atau inovasi. 2) perusahaan khawatir lepasnya penguasaan teknologi mereka, jika mereka melakukan kolaborasi. Penggunaan teknologi yang digunakan ingin dikuasai secara eksklusif, sehingga dengan berkolaborasi, teknologi yang digunakan akan dengan mudah di tiru. 3) keengganan melakukan kolaborasi juga disebabkan mereka yakin bahwa inovasi yang dihasilkan dari kekuatan sendiri adalah bagian dari proses perusahaan dalam mengembangkan dirinya. Beberapa pelaku usaha dilokasi penelitian menunjukkan hal tersebut. Banyak pelaku usaha yang menggunakan teknologi hasil rekayasa mereka sendiri, sehingga tidak semua orang dapat masuk kelokasi perusahaan, karena itu merupakan kunci efisiensi proses produksi yang mereka lakukan. Ada juga perusahaan yang dengan prinsipnya memandang bahwa lebih baik berjalan dengan kekuatan sendiri. Hal ini senada dengan temuan dari Wahyudi (2013) dan Wahyudi dan Djulianto (2013) yang mengatakan bahwa usaha kecil tidak mau ribet dengan urusan yang mengganggu proses keseharian produksi mereka, jangankan melakukan kolaborasi, mengikuti program pelatihan dari pemerintah saja mereka enggan karena akan mengganggu produktifitas mereka dalam bekerja.

Fakta bahwa berkolaborasi menguntungkan dari berbagai sisi, Schilling (2015) mengatakan keuntungan berkolaborasi diantaranya: 1) berkolaborasi dapat memampukan sebuah perusahaan memperoleh keahlian atau sumber daya yang diperlukan secara lebih cepat dibanding dengan melakukan pengembangan sendirian. 2) memperoleh sebagian dari kapabilitas dan sumberdaya yang diperlukan dari mitra, sehingga dapat menghemat penggunaan aset dan meningkatkan fleksibilitasnya. 3) menjadi sumber pembelajaran penting bagi perusahaan, transfer pengetahuan, dan mengembangkan sumberdaya dan kapabilitas secara lebih cepat, 4) berbagi biaya pengembangan dan akses pasar 5) menciptakan standar bersama terkait produk baru. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kolaborasi yang ada masih sebatas mengadakan pameran bersama, karena memang Kabupaten Banyuwangi dalam setiap event (tahun 2018 sebanyak 73 event) selalu melibatkan usaha kecil dalam memasarkan produknya melalui pameran. Pameran yang diselenggarakan diharapkan mampu meningkatkan akses pasar dan networking. Banyak pelaku usaha yang enggan berkolaborasi karena para pelaku usaha sejenis memiliki orientasi individu yang berbeda dalam melihat pasar dan mengembangkan usahanya. Keengganan tersebut dapat disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah 1) adanya persaingan yang tidak sehat, karena ada anggapan bahwa pasar yang di targetkan sama, 2) keengganan mencoba hal hal baru yang belum pasti, 3) tidak suka mengambil risiko (*take a risk*).

Koordinasi *innovation network* yang dilakukan UKM di Banyuwangi masih tradisional dimana proses kerjasama yang dilakukan masih sebatas bekerja bersama menjalankan aktivitas bersama atau secara outsourcing, kemudian berlanjut kepada kepercayaan melakukan kolaborasi dan kerjasama. Orientasi kearah kerjasama strategik dengan menghasilkan inovasi masih belum dilakukan. Konsep Gardet and Mothe (2012) mengatakan bahwa koordinasi inter organisational relationship dapat dilakukan dengan mekanisme 1) *type of exchange*, 2) *trust*, 3) *sharing of benefits*, 4) *guarantees*, 5) *conflict resolution* tidak mudah dilakukan karena karakteristik UKM yang ada masih dikelola dengan manajerial tradisional. Mekanisme proses networking lebih didasari faktor kepercayaan, berbagi keuntungan dan jaminan kualitas produk. Survey kebeberapa pelaku usaha di lokasi penelitian menemukan hal tersebut. Beberapa pengusaha batik seperti Nozzah Batik milik Pak Amrin yang memiliki akses pasar di Bali mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan masih sangat tradisional,

hanya berdasarkan kepercayaan saja, karena memang selama ini proses kerjasama tersebut tidak menimbulkan masalah. Pak Amrin mengatakan bahwa sebetulnya Bali hanya sebagai transit saja, karena produknya dikirim ke luar negeri. Namun demikian, proses keluar negeri masih dilakukan pihak ketiga, diluar kontrol Pak Amrin.

Networking yang ada cukup bervariasi, meskipun masih tradisional dan seringkali informal, sudah ada kerjasama antar pengusaha sejenis, perusahaan yang lebih besar, perusahaan yang lebih kecil, buyer, pemerintah, jaringan distribusi dan pemasaran. Berbeda dengan *networking* level dalam negeri, untuk produk orientasi ekspor, UKM tetap harus sesuai prosedur ekspor.

Networking dan Kolaborasi Usaha Kecil

Networking pelaku usaha meskipun masih dalam level tradisional memberikan kekuatan bertahan hidup bahkan dapat meningkatkan daya saing usaha kecil mereka. Kelancaran dalam proses produksi dan efisiensi bahan baku membuat pelaku usaha dapat menciptakan inovasi produk baru. Beberapa perusahaan craft seringkali kesulitan mendapatkan bahan baku secara kontinyu, seringkali jika banjir order, keluhannya adalah keterbatasan bahan baku. Networking dengan supplier bahan baku menjadi penting dilakukan. Kekuatan *networking* dalam skala ini seringkali juga memaksa pelaku usaha melakukan inovasi berdasarkan pesanan (*innovation by order*). Seperti yang terjadi pada perusahaan konveksi dan kaos dimana terjadi peluang pasar yang bagus di industri kaos, maka tumbuhlah usaha kaos di Banyuwangi. Proses imitasi tersebut wajar terjadi karena memang peluang pasar yang cukup terbuka. *Innovation by order* terjadi pada usaha konveksi dan usaha logam dimana seringkali pelaku usaha membuat produk baru sesuai dengan pesanan yang masuk.

Networking dan *partnership* yang dilakukan usaha kecil menciptakan ketergantungan di beberapa aspek. Gardet and Mothe (2012) mengatakan bahwa ketergantungan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, 1) *partner size*, biasanya semakin besar partner mempunyai kecenderungan kekuatan negosiasi yang lebih besar. 2) *partner resources*, kerjasama dilakukan dengan penyedia sumberdaya, baik dari aspek *tangible* seperti *finance*, keahlian dan kepakaran maupun dari aspek *intangible* seperti reputasi dan *network relation*. 3) kepentingan strategis proyek, dimana semakin tinggi proses bisnis yang melibatkan *innovation network*, semakin tinggi ketergantungan dengan anggota lain. Hal ini merupakan kelemahan karena tingkat ketergantungan yang semakin tinggi membuat kekuatan kemandirian usaha kecil semakin rendah. 4) ketidakpastian, kekuatan kerjasama jangan diliputi ketidakpastian. Hal ini sering terjadi pada pola *networking* ketika perilaku partner sulit diketahui perilakunya. 5) urgensi dari kerjasama, dimana faktor waktu kehadiran menjadi faktor penting dalam keberlanjutan kerjasama. Kehadiran saat proses produksi ataupun hal lain sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi, sehingga dapat dikomunikasikan secara langsung. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa ketergantungan yang timbul dari proses *networking* itu adalah dari sisi *partner resources* dan ketidakpastian (*uncertainty*).

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan finansial seringkali membuat kemampuan memproduksi mereka terbatas, karena keterbatasan modal yang dimiliki, juga gagal memberikan kepercayaan kepada bank untuk memberikan kredit lebih besar. Sementara untuk pengelolaan sumberdaya manusia, pola kerjasama *outsourcing* biasanya dilakukan dengan memberikan pekerjaan

kepada karyawan untuk dapat dikerjakan dirumah. Outsourcing ini sebenarnya lebih tepat dengan istilah karyawan yang bekerja borongan. Karyawan model ini dapat mengerjakan tugas perusahaan di rumah dan menyetorkan kepada perusahaan disaat tertentu dan mendapatkan gaji setiap minggu berdasarkan hasil kerjanya. Hal tersebut terjadi pada usaha kecil konveksi, craft di mana karyawan dapat mengerjakan proses produksinya di rumah mereka masing masing. Pola kerja sistem ini sebenarnya menciptakan sinergisitas produktivitas dan efisiensi disaat yang bersamaan, karena pelaku usaha tidak perlu menyediakan tempat usaha yang luas. Risiko ketergantungannya adalah dengan sistem ini kontrol terhadap kualitas harus dilakukan, karena tentu lebih sulit mengawasi kualitas kerja karyawan karena mereka mengerjakannya diluar areal perusahaan. Risiko lainnya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap karyawan apabila mereka keluar dari perusahaan karena alasan pindah keperusahaan pesaing ataupun mendirikan usaha sendiri. Hal tersebut rentan terjadi karena rata rata pelaku usaha yang sukses saat ini juga berawal dari karyawan biasa.

Risiko ketidakpastian juga sering terjadi karena pelaku usaha tidak memiliki kekuatan dari aspek legal formal berupa kesepakatan tertulis. Kesepakatan kerjasama sering terjadi secara informal karena didasari rasa saling percaya. Pelaku usaha mengatakan bahwa mereka tidak terlalu memperlumahkan proses kerjasama informal seperti ini, meskipun beberapa pelaku usaha pernah di tipu atau kemudian order dibatalkan sepihak, namun mereka hanya menyadari bahwa itu bagian dari risiko bisnis yang mereka jalankan.

Innovation Network sebagai Basis Penguatan Daya Saing

Innovation network yang ada pada usaha kecil di Banyuwangi masih terbatas pada efisiensi produksi dan akses pasar. Network yang dilakukan masih belum pada taraf kolaborasi menghasilkan inovasi baru baik inovasi produk, proses maupun inovasi teknologi. Dinas/ instansi terkait sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran pemberdayaan melalui pelatihan pelatihan dan fasilitasi, namun dirasakan pelaku usaha belum mampu membuat *innovation network*. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara intensif mengajak pelaku usaha kecil mempromosikan produknya melalui gelar pameran dan marketplace di banyuwangimall.com. Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki kalender kegiatan selama setahun yang berkaitan dengan kepariwisataan dan selalu melibatkan usaha kecil dalam even tersebut. Network yang sudah dilakukan menjadi inisiasi proses *innovation network* yang potensial, beberapa sektor sudah mulai berhasil ekspor seperti kerajinan craft, perikanan dan perkebunan. Upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mempromosikan daerah dan melibatkan UKM menjadi *trigger* proses *innovation network*.

Berdasarkan hasil penelitian, sebenarnya peran pemerintah diharapkan dapat mendorong adanya *innovation network*. Pemerintah dapat mendorong berbagai elemen mulai dari pelaku usaha, perbankan, perguruan tinggi, dan perusahaan besar untuk bersinergi membuat *pilot project innovation network*. Peran pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati perlu memberikan dorongan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk membuat program sinergi agar ada UKM unggulan sebagai contoh membentuk *innovation network*.

Adanya teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini sebenarnya memudahkan dalam mempromosikan dan meningkatkan akses pasar. Peran pemerintah dalam memfasilitasi promosi dan akses pasar harus dilakukan, karena tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan mengadopsi teknologi internet dalam pemasaran mereka.

Simpulan

Tidak semua pelaku usaha menganggap penting melakukan *innovation network*, dalam proses yang paling mendasar seperti melakukan kolaborasi saja, masih banyak pelaku usaha yang enggan melakukannya. Beberapa pelaku usaha dalam proses *networking* lebih didasari faktor kepercayaan, berbagi keuntungan dan jaminan kualitas produk. *Networking* pelaku usaha meskipun masih dalam level tradisional memberikan kekuatan bertahan hidup bahkan dapat meningkatkan daya saing usaha kecil mereka. Kelancaran dalam proses produksi dan efisiensi bahan baku membuat pelaku usaha dapat menciptakan inovasi produk baru. Kekuatan *networking* dalam skala ini seringkali juga memaksa pelaku usaha melakukan inovasi berdasarkan pesanan (*innovation by order*). Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Banyuwangi intensif mengajak pelaku usaha kecil mempromosikan produknya baik melalui pameran dalam setiap even yang digelar, maupun melalui market place di rumah kreatif yang dinamakan banyuwangimall.com. Network yang sudah dilakukan menjadi inisiasi proses *innovation network* yang potensial, meskipun saat ini proses tersebut belum banyak memberikan hasil, upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mempromosikan daerah dan melibatkan UKM menjadi *trigger* proses *innovation network*.

Daftar Pustaka

- Burdon, S., Grant Richard, M and Kilidar, H. 2015. Navigating service sector innovation using co-creation partnerships *Journal of Service Theory and Practice* Vol. 25 No. 3. pp. 285-303. Emerald Group Publishing Limited
- Drucker, P. F. 1991. *Inovasi dan Kewiraswastaan, Praktek dan dasar-dasar*. Penerbit Erlangga
- Ellitan, L. dan Anatan, L. 2009. *Manajemen Inovasi*. Bandung : Alfabeta
- Fierro, J.C., Florin J., Perez L., Whitelock J. 2011. Inter-firm market orientation as antecedent of knowledge transfer, innovation and value creation in networks. *Management Decision*. Vol. 49 No. 3, pp. 444-467. Emerald Group Publishing Limited 0025-1747
- Gardet, E. and Mothe, C. 2012. SME dependence and coordination in innovation networks. *Journal of Small Business and Enterprise Development*. Vol. 19 No. 2. pp. 263-280. Emerald Group Publishing Limited
- Goyal , S. And Pitt, M. 2007. Determining The Role Of Innovation Management In Facilities Management. *Facilities*, Vol. 25. No. 1/ 2, Pp. 48-60
- Hill, C.W. and Jones, G.L. 1998. *Strategic Management: an Integrated Approach*. New York: Houghton Mifflin Company.
- Jones, O. 2003. Competitive Advantage in SMEs: towards a conceptual frame work, in Jones, O. and Tilley, F (Eds), *Competitive Advantage in SMEs*, Willey, chichester, pp. 15-33.
- Kotler, P. & Armstrong, G. 2009. *Prinsip Prinsip Pemasaran Jilid 1*. Indonesia : PT Dian Rakyat.
- Liu, M., Li, M., And Zhang, T. 2012. Empirical Research On China Smes Technology Innovation Engineering Strategy. *System Engineering Procedia* 5, Pp. 372-378
- Porter, M. E. 1985. *Keunggulan Bersaing, Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Quaye, D., Mensah, I. (2018) "Marketing innovation and sustainable competitive advantage of manufacturing SMEs in Ghana", *Management Decision*, <https://doi.org/10.1108/MD-08-2017-0784>
- Ruigrok, W.A. Pettigrew, S. Peck and R. Whittington. 1999. Corporate Restructuring and New Forms Europe. *Management International Review*. Vol. 39, pp. 41-46.
- Schilling, M. A., 2015. *Manajemen Strategis Inovasi Teknologi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Wahyudi, E Dan Julianto, D. E. 2013. *Model Sistemik Inovasi Berkelanjutan Dan Kapabilitas Daya Saing Usaha Kecil Teknologi Rendah (Non high tech) Di Jawa Timur*. Tahun ke dua. Hibah Strategis Nasional. Dikti, DP2M
- Wahyudi, Edy. 2013. Model akselerasi Inovasi dan Daya Saing Usaha Kecil *Non high tech* (Kajian Empiris Usaha Kecil di Jawa Timur). Seminar Nasional "Networking dan Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Mikro Berbasis Kreativitas". FISIP, Universitas Jember
- Wahyudi, Edy. 2014. Improving Competitiveness And Innovation Capability Of Small Businesses On The Basis Of High Tech Versus Non-High Tech. *Forum Tahunan Pengembangan Iptek Dan Inovasi Nasional Iv, Tahun 2014. Prosiding*. Jakarta.

Wahyudi, Edy. 2015. Innovation Acceleration Model For Creative Industries In East Java. *Forum Tahunan Pengembangan Iptek Dan Inovasi Nasional V, Tahun 2015.*

**IDENTIFIKASI PERAN STAKEHOLDERS DALAM *COLLABORATIVE GOVERNANCE*
PELAKSANAAN PROGRAM GENRE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh :

Nur Fitri Mutmainah, S.IP.,M.PA

nurfitri.mutmainah1@gmail.com

Gerry Katon Mahendra, S.IP.,M.I.P

gerrykatonvw@gmail.com

Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pihak mana saja yang berkolaborasi dalam optimalisasi Program GenRe di Daerah istimewa Yogyakarta (DIY). Metode penelitian yang akan dipergunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan mempergunakan teori *Collaborative Governance* dan Stakeholders. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara secara mendalam digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh keterangan mengenai proses kolaborasi yang terjadi dan pihak-pihak mana saja yang terlibat pada Program GenRe di DIY. Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Berdasarkan identifikasi stakeholders dalam pelaksanaan program GenRe dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam otoritas lembaga yang saling berkolaborasi, mulai dari Gubernur hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Secara umum, pelaksanaan kolaborasi antar stakeholders dalam pelaksanaan Program GenRe berada sudah berjalan dengan cukup baik. Upaya yang perlu ditingkatkan dalam proses pelaksanaan kolaborasi ini adalah peningkatan peran Biro Kesra Setda DIY karena posisinya yang strategis yakni sebagai koordinator Forum FK2PKRR. Salah satu kunci suksesnya kolaborasi dalam pelaksanaan program GenRe adalah peran Biro Kesra Setda sebagai koordinator Forum FK2PKRR. oleh karena itu, penulis menyarankan agar Biro Kesra Setda DIY dapat lebih aktif mengkoordinir komponen yang terlibat, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, GenRe, Pemerintah DIY

Abstract

This study aims to identify which parties collaborate in optimizing the GenRe Program in Yogyakarta. The research method that will be used is descriptive qualitative method using the theory of Collaborative Governance and Stakeholders. Data collection by interviews and documentation. In-depth interviews were used in this study to find out and obtain information about the collaboration process that occurred and which parties were involved in the GenRe Program in DIY. Based on the implementation of the research that has been carried out, the results that identify stakeholders in the implementation of the GenRe program can be concluded that there are various kinds of collaborative collaborative institutions, ranging from Governors to Non-Governmental Organizations (NGOs). The implementation of collaboration among stakeholders in the implementation of the GenRe Program is already running quite well. The effort that needs to be improved in the process of implementing this collaboration is the increase in the role of the Public Secretariat of the Regional Secretariat because of its strategic position as the FK2PKRR Forum coordinator. One of the keys to the success of collaboration in the implementation of the GenRe program is the role of the Public Welfare Bureau as the coordinator of the FK2PKRR Forum. therefore, the authors suggest that the DIY Secretariat Public Welfare Bureau be more active in coordinating the components involved, from the government to the community

Keywords : Collaborative Governance, GenRe, Regional Government

PENDAHULUAN

Indonesia sampai saat ini masih menjadi salah satu dari 5 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Berturut-turut dibawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, Indonesia berada diperingkat 4 dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Jumlah tersebut masih ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang berada pada kisaran 1.49% (empat juta penduduk per tahun).

Sampai saat ini, masih banyak perempuan usia 15-19 tahun yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan melahirkan dari adanya perilaku seksual berisiko dalam status pernikahan ataupun di luar pernikahan. Menurut studi kualitatif yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 2017, sebagian besar remaja perempuan muda belum menikah yang mengalami KTD akan memilih untuk : (1) Menikah, (2) Kabur dari Rumah dan (3) Aborsi (pkbi.or.id).

Dalam upaya menanggulangi dan meminimalisir hal tersebut, pemerintah berinisiatif untuk membuat program yang berfokus pada edukasi secara preventif melalui peluncuran program GenRe (Generasi Berencana) secara nasional pada 2009 yang kemudian diimplementasikan pada tiap wilayah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Secara umum, program GenRe berfokus pada para remaja rentang usia 10-24 tahun yang belum menikah, keluarga dan masyarakat yang memiliki kepedulian kepada remaja yang nantinya diharapkan mampu mempromosikan penundaan usia pernikahan, menyediakan informasi kesehatan reproduksi secara luas kepada para remaja sehingga nantinya mereka mengetahui secara jelas dan

mampu melangsungkan jenjang pendidikan dan karir secara terencana, serta menikah dengan perencanaan yang matang sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Secara khusus, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengimplimentasikan Program GenRe terhitung sejak tahun 2012. Pada pelaksanaannya, pemerintah DIY berkolaborasi dengan *stakeholders* lain, diantaranya perguruan tinggi, sekolah menengah pertama/atas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi dan edukasi yang terkait dengan kesehatan reproduksi, keluarga berencana (KB) diberbagai tempat terkait melalui Pusat Informasi Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK R/M). Program GenRe di DIY telah menggandeng kurang lebih 13 Universitas untuk membentuk Pusat Informasi Konseling (Triwardani dan Hendariningrum, 2014).

Meskipun sudah berlangsung selama kurang lebih enam tahun, implementasi Program GenRe di DIY dinilai masih belum maksimal. Implementasi yang belum maksimal terjadi diantaranya karena ruang kolaborasi antar *stakeholders* dinilai masih lemah. Kolaborasi dalam implementasi kebijakan dinilai sangat penting dan bermanfaat, sebagaimana dinyatakan Ansell dan Gash (2007) *collaborative governance* sangat penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang kerap muncul, diantaranya: 1) kegagalan implementasi kebijakan di lapangan; 2) ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan re-im-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan; 3) mobilisasi kelompok kepentingan; dan 4) tingginya biaya dan politisasi regulasi. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Triwardani dan Hendariningrum (2014) terdapat temuan dan masukan dalam implementasi program GenRe di DIY, diantaranya adalah : 1) sosialisasi GenRe yang belum efektif karena selama ini BKKBN hanya membentuk PIK dan bekerjasama dengan Universitas yang memiliki *concern* di bidang kesehatan, sehingga program ini belum terdiseminasi merata ke seluruh remaja/ mahasiswa di DIY; 2) lemahnya komitmen pemerintah terhadap program GenRe yang ditandai dengan kurangnya sumber daya baik berupa finansial maupun sumber daya manusia, terutama kurangnya konsuler PIK yang berakibat pada tidak meratanya sosialisasi kepada remaja di DIY; 3) kurangnya koordinasi antar divisi dan lembaga yang bertanggung jawab pada implementasi Program GenRe.

Dari temuan-temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan implementasi kebijakan adalah dengan memaksimalkan kerjasama dan koordinasi dalam wadah kolaborasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melihat dan menganalisis *collaborative governance* yang diterapkan dalam optimalisasi program GenRe di DIY. Tujuan dari riset ini adalah agar didapatkan situasi terkini *collaborative governance* yang dilakukan dalam implementasi program GenRe yang dapat diberikan masukan perbaikan sehingga berimbas pada keberhasilan implementasi kebijakan program GenRe dimasa yang akan datang. Batasan dan fokus dalam penelitian ini melihat dan menganalisis kolaborasi yang dilakukan dengan mengidentifikasi peran *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan Program GenRe di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan matriks *crowd, context setter, subject, dan players*.

TINJAUAN PUSTAKA

Collaborative Governance

Konsep *Collaborative Governance (CG)* baru-baru ini menjadi alternatif baru dalam rangka memaksimalkan kinerja kebijakan pemerintah. Penerapan CG yang juga dianggap sebagai inovasi dalam upaya tata kelola pemerintahan sudah patut selalu diterapkan sebagai respon dari semakin tingginya tuntutan masyarakat akan implementasi kebijakan yang maksimal dan tepat sasaran serta mampu merespon beragam permasalahan dalam masyarakat/publik. Paradigma para pelaku tata kelola pemerintahan sudah saatnya dirubah, dimana sebelumnya selalu menempatkan pemerintah sebagai aktor tunggal dan dalam perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik, bergeser menjadi mekanisme *collective decision making* dalam rangka pemecahan permasalahan publik (*public problem*) yang semakin kompleks. Hal ini berarti bahwa, pemerintah harus melibatkan stakeholders lain dalam setiap perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.

Secara teori, menurut Robert & Choi (Kumorotomo, 2013) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substantive dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholders memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. *Collaborative Governance (CG)* merupakan sebuah proses dan struktur dari manajemen dan kebijakan publik yang mengikutsertakan masyarakat secara konstruktif, melewati batasan kelembagaan publik, tingkatan pemerintah, dan/atau ruang pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan tujuan publik (*public purpose*) yang tidak dapat diselesaikan sendiri (Emerson, Kirk, et all, 2011).

Konsep yang lainnya juga menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* secara luas sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan orang-orang secara konstruktif dengan melintasi batas-batas Lembaga public, tingkat pemerintahan, dan atau masyarakat, lingkungan swasta dan sipil dalam rangka untuk melaksanakan kepentingan umum yang sebelumnya tidak bisa dicapai (Emerson, Nabatchi & Balogh 2013).

Berdasarkan konsep teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan konsep alternatif yang dapat dijalankan oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah guna memaksimalkan stakeholders yang tersedia agar kebijakan dan program yang diimplementasikan dapat berjalan lebih maksimal. Pelibatan stakeholders ini meliputi dua pihak, pertama instansi pemerintah lainnya selain pembuat kebijakan dan lembaga swasta yang memiliki perhatian terhadap konteks kebijakan yang diterbitkan.

Stakeholders

Freeman dalam solihin (2009) mendefinisikan stakeholders sebagai berikut :

“setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan.”/pemerintah. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa stakeholder merupakan kelompok ataupun individu yang memiliki peran dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pemerintah. Dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat pengklasifikasian pengelompokkan peran stakeholders sebagai berikut :

- a. Stakeholders primer, yang mempunyai kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan program atau proyek.
- b. Stakeholders sekunder, yang mempunyai kepentingan secara tidak langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan atau kebijakan.
- c. Stakeholders kunci, yang mempunyai wewenang secara legal dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, terdapat pendekatan yang berfungsi untuk menilai peranan dan kekuatan masing-masing stakeholders untuk meningkatkan kolaborasi :

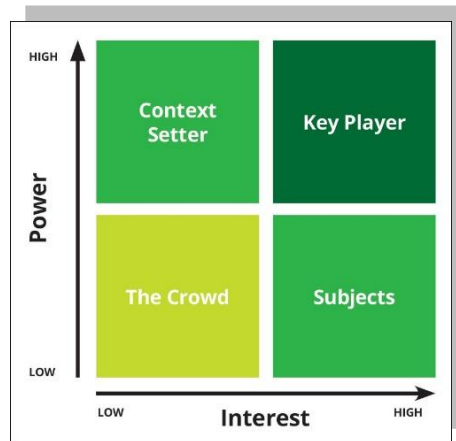
Pendekatan stakeholders dalam kerangka 4Rs

Right	Responsibilities
Relationship	Revenue

- *Right* (hak)
- *Responsibilities* (tanggung jawab)
- *Revenue* (pendapatan)
- *Relationship* (hubungan antar peran)

Konsep 4Rs digunakan untuk sebagai analisis perbandingan hasil dari identifikasi antar aktor sehingga dapat digunakan untuk menganalisis situasi dan menganalisis permasalahan yang timbul. Model ini berkaitan dengan klasifikasi *power and interest* yang dipopulerkan oleh Ackerman dan Eden (2011). Ackerman dan Eden mengkategorisasikan stakeholders berdasarkan *power and interest* untuk menentukan klasifikasi stakeholders berdasarkan hubungan antara kekuatan dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholders.

Matriks *Power and Interest*



Penjelasannya :

- *Crowd* merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh rendah terhadap kegiatan organisasi. Dalam artian lainnya, kelompok ini tidak terlalu signifikan bagi organisasi tersebut;
- *Context Setter* merupakan pihak yang memiliki kepentingan yang relatif rendah namun memiliki pengaruh yang tinggi. *Context Setter* memiliki kekuasaan besar dalam mempengaruhi kegiatan dan kebijakan organisasi.
- *Key Players* merupakan pihak yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh yang kuat. Mereka memiliki kepentingan dan kekuasaan yang tinggi untuk mempengaruhi kegiatan dan kebijakan organisasi. Sekaligus memiliki kedudukan yang strategis dalam upaya mobilisasi sumberdaya dalam mendukung kegiatan organisasi.
- *Subject* merupakan pihak yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh yang relatif rendah. Mereka cenderung tidak memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi kegiatan dan kebijakan organisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa matriks tersebut membagi stakeholders kedalam kapasitas dan pengaruhnya masing-masing, dimana setiap posisi memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam upaya memengaruhi kegiatan dan kebijakan organisasi lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2007) metode penelitian kualitatif merupakan metode yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini akan berfokus pada peran masing-masing stakeholders dalam proses kolaborasi dan dinamika *collaborative governance* adalah proses pelaksanaan Program GenRe yang menekankan keterkaitan aspek *engagement* (keterlibatan), *motivation* (motivasi), dan *capacity* (kapasitas untuk ikut dalam aksi). Teknik pengumpulan data kualitatif menurut Sugiyono (2009) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles dalam Idrus (2009) yang mengajukan model analisis data yang disebut dengan model interaktif. Model interaktif terdiri dari tiga hal utama, yaitu reduksi data; penyajian data (*display*); dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Peran Stakeholders dalam Program GenRe

Urgensi pelaksanaan *Collaborative Governance (CG)* dalam pelaksanaan program GenRe merupakan bentuk kesadaran pemerintah bahwa sudah saatnya partisipasi aktif stakeholders mendapatkan perhatian dan diimplementasikan secara nyata. CG dapat dijadikan solusi agar kebijakan yang dijalankan dalam lebih optimal. Guna mencapai hal tersebut, hal penting yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi dan analisis mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam proses CG tersebut. Adapun analisis identifikasi stakeholders mempergunakan matriks *power vs interest* dapat disajikan pada gambar berikut :

Matriks *Power vs Interest* dalam pelaksanaan Program GenRe di DIY

I N T E R E S T	<i>SUBJECT</i>	<i>PLAYERS</i>
	<i>Low power, high interest</i>	<i>High power, high interest</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Organisasi remaja peduli kesehatan reproduksi ✓ Organisasi keagamaan ✓ PKBI DIY ✓ SAPDA 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gubernur DIY ✓ BPPM DIY ✓ Dinas Dikpora DIY ✓ Dinas Sosial DIY ✓ Dinas Kesehatan DIY ✓ Perwakilan BKKBN DIY
	<i>CROWD</i>	<i>CONTEXT SETTER</i>
	<i>Low power, low interest</i>	<i>High power, low interest</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Biro Kesra Setda DIY 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DPRD DIY ✓ Bappeda DIY
	POWER	

Identifikasi analisisnya adalah sebagai berikut :

Subject dalam pelaksanaan program GenRe di DIY adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada upaya pemenuhan hak-hak kesehatan seksual, reproduksi, dan pendidikan kesehatan reproduksi anak dan remaja. Selanjutnya terdapat LSM Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) yang berfokus pada disabilitas dan kesehatan reproduksi remaja penyandang disabilitas. Selain itu terdapat organisasi remaja peduli kesehatan reproduksi seperti Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK-M) dan juga organisasi keagamaan (remaja Islam Masjid) yang juga memiliki perhatian terhadap remaja beserta pergaulannya.

Players atau actor yang memiliki kepentingan dan kekuasaan tinggi dimiliki oleh Gubernur DIY. Gubernur DIY memiliki kepentingan dan kekuasaan tinggi secara normatif dalam pelaksanaan Program GenRe. Hal tersebut dilegitimasi melalui Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi pada pasal 6. Pada aturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab menyelenggarakan dan memfasilitasi pelayanan, program, bimbingan dan melakukan koordinasi berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang dalam pelaksanaannya melingkupi wilayah Provinsi.

Gubernur memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan serta penyalahgunaan

NAPZA. Kekuasaan dan kepentingan Gubernur DIY diterjemahkan melalui beberapa peraturan berikut ini :

- Peraturan Gubernur No 109 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dimana pelaksanaan KRR melalui jalur masyarakat menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah DIY melalui BPPM DIY.
- Peraturan Gubernur No 109 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan KRR mempunyai tugas dan fungsi salah satunya mengembangkan dan memfasilitasi materi berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja yang kemudian hal ini menjadi tanggung jawab dari Dinas Dikpora DIY.
- Peraturan Gubernur No 109 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan KRR memiliki fungsi antara lain pelaksanaan kebijakan pendidikan berkaitan dengan kesehatan reproduksi terhadap komunitas remaja yang menjadi tugas Dinas Sosial DIY.
- Peraturan Gubernur No 109 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan KRR juga berperan dalam penyediaan layanan kesehatan bagi remaja berkaitan dengan kesehatan reproduksi melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Puskesmas sebagai bagian dari pelayanan preventif dalam penanganan masalah kesehatan remaja yang wajib disediakan oleh Dinas Kesehatan DIY.

Selain Gubernur, *player* atau *actor* lainnya adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY dengan landasan normatif Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ayat 1 (b) yang menyatakan bahwa “Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga”. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut BKKBN memiliki kewajiban dalam upaya peningkatan kualitas hidup remaja melalui pelaksanaan Program GenRe yang dapat menjadi acuan remaja dalam menentukan rencana masa depan hingga terwujudnya keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera.

Crowd dalam hasil identifikasi ini adalah Biro Kesra Setda DIY sebagai koordinator Forum Koordinasi Penyelenggara Program Kesehatan Reproduksi Remaja (FP2KRR) yang berkorelasi dalam penyiapan perumusan kebijakan program GenRe, namun tidak terlibat secara langsung dalam proses implementasi program GenRe di DIY. Berdasarkan hal itu pula, Biro Kesra Setda DIY belum dapat memprioritaskan anggaran dan pelaksanaan yang berkaitan dengan program Genre sehingga dikategorisasikan kekuasaan rendah.

Context Setter dalam hasil identifikasi ini adalah DPRD DIY, khususnya komisi D yang berfokus dalam bidang pendidikan. DPRD DIY sebagai lembaga legislatif daerah memiliki kekuasaan untuk memonitoring atau bahkan mengintervensi kebijakan program GenRe, namun memang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap program tersebut. selain itu, instansi lain yang memiliki kekuasaan terhadap kebijakan program GenRe adalah Bappeda DIY sebagai institusi yang punya kekuasaan dalam merencanakan arah pembangunan di wilayah DIY.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan identifikasi stakeholders dalam pelaksanaan program GenRe dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam otoritas lembaga yang saling berkolaborasi, mulai dari Gubernur hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Secara umum, pelaksanaan kolaborasi antar stakeholders dalam pelaksanaan Program GenRe berada sudah berjalan dengan cukup baik. Upaya yang perlu ditingkatkan dalam proses pelaksanaan kolaborasi ini adalah peningkatan peran Biro Kesra Setda DIY karena posisinya yang strategis yakni sebagai koordinator Forum FK2PKRR.

SARAN

Salah satu kunci suksesnya kolaborasi dalam pelaksanaan program GenRe adalah peran Biro Kesra Setda sebagai koordinator Forum FK2PKRR . oleh karena itu, penulis menyarankan agar Biro Kesra Setda DIY dapat lebih aktif mengkoordinir komponen yang terlibat, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial ,Pendekatan Kualitatif Dan. Kuantitatif Edisi Kedua*. Jakarta : Erlangga.
- Kumorotomo,Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa pada masa transisi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Ackerman, Fran and Eden, C. 2011. *Strategic Management of Stakeholders : Theory and Practice*. Elsevier
- Ansell, Chris dan Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 18(4). 534-571
- Emerson Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 22 : 1-29
- Emmerson, K, Nabatchi, T dan Balogh, S, 2011, An Integrative Framework for.
- Triwardani, Reny dan Retno Hendariningrum. 2014. *Communicating GenReto the Youth: Indonesia and the Youth Family Planning Program Based in Daerah Istimewa Yogyakarta Province*. E-Proceeding of the World Conference on Integration of Knowledge (WCIK 2014), 15-16 September 2014
- <https://pkbi.or.id/keterlibatan-remaja-untuk-turunkan-angka-kehamilan-dan-kelahiran-usia-15-19-tahun/>

KEMITRAAN PEMERINTAH, SEKTOR BISNIS DAN PUBLIK DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN; STUDI KASUS REVITALISASI SUNGAI CITARUM

Oleh:

Dewi Wijayanti, S.AP

Dissa Erianti, S.AP

Program Magister Ilmu Sosial-UNPAR Bandung

ABSTRAK

Sungai Citarum yang terpanjang dan terbesar di Jawa Barat, dijuluki sungai yang paling tercemar sedunia. Pencemaran terjadi karena peran sosial dan ekonomi yang penting, yang menyangga keberlangsungan hidup jutaan orang yang tinggal di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Di sepanjang sungai berdiri sekitar 500 pabrik, tiga waduk pembangkit listrik tenaga air (PLTA), selain menjadi pemasok air minum untuk sebagian penduduk Jakarta. Citarum juga menjadi sumber aliran irigasi di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi. Aktivitas sosial-ekonomi di provinsi terpadat di Indonesia ini menyebabkan beralihnya fungsi lahan untuk perumahan dan industrialisasi, dan pesatnya penggundulan hutan di wilayah hulu. Banjir di Bandung Selatan dan beberapa kota yang dilalui Citarum berlangsung pada setiap musim hujan. Pencemaran lingkungan terjadi sejak akhir 1980-an, ketika industrialisasi berlangsung pesat, mengakibatkan penumpukan limbah buangan pabrik yang tidak dikelola secara profesional. Berbagai program perbaikan kualitas air sungai dan penataan lingkungan, seperti Citarum Bestari, tidak membawa hasil karena tidak didukung perubahan perilaku masyarakat. Meskipun program telah didukung dana yang besar dari pemerintah maupun lembaga-lembaga internasional, program “Citarum Bestari” untuk revitalisasi dan pengembalian fungsi tidak membawa hasil nyata. Terbukti sampai tahun 2018, kondisi sungai tidak mengalami perbaikan. Tulisan ini bertujuan menganalisis program Citarum Bestari, dengan meninjau peran pemerintah, kelompok bisnis, dan publik melalui pendekatan SWAA (*Strength, Weakness, Advocates, Adversaries*). Metoda penelitian deskriptif analisis dipergunakan, dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah, kelompok bisnis, dan masyarakat, ditambah dengan observasi langsung di DAS Citarum. Hasil penelitian terutama ditujukan kepada pemerintah sebagai bahan masukan peneglolaan program pengelolaan lingkungan yang lebih terkoordinir dan terkoordinasi.

Kata kunci : Citarum, Analisis SWAA, lingkungan, Daerah Aliran Sungai.

A. Latar Belakang

Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat yang mengalir pada wilayah sepanjang 12.000 kilometer persegi. Sungai Citarum berawal dari Gunung Wayang sebelah selatan Kota Bandung dan mengalir ke utara Laut Jawa. Sungai Citarum juga menjangkau dua provinsi yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta. Ia melintasi sembilan wilayah administrasi yakni Kabupaten Cianjur, Bogor, Karawang Bekasi, Purwakarta, Subang Sumedang, Bandung dan Kodya Bandung. Ada tiga bendungan penting yang mendapat pasokan air dari Sungai Citarum yakni Ir. Djuanda/Jatiluhur (1963), Saguling (1986) dan Cirata (1988) dengan daya listrik yang dihasilkan 1.400 megawatt. Sungai Citarum mengairi sawah seluas 420.000 hektar. Sungai ini memberi manfaat kepada kurang lebih 25 juta jiwa dengan perincian 15 juta jiwa untuk Jawa Barat dan 10 juta jiwa untuk DKI Jakarta.¹ Karena sebagian besar wilayah Sungai Citarum berada di sekitar Jawa Barat, maka Gubernur Jawa Barat yang memiliki tanggung jawab terbesar dalam menjamin kebersihan Sungai Citarum. Selama kurun waktu dua periode masa kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan tidak banyak solusi diberikan terhadap kondisi Sungai Citarum. Sejak tahun 2016, Gubernur Jawa Barat mencanangkan program Citarum Bestari (Bersih, sehat, indah, dan lestari). Program ini merupakan salah satu janji kampanye saat pemilihan gubernur pada 2013. Gubernur berjanji pada 2018 air Sungai Citarum dapat diminum langsung.² Pada kenyataannya, hasil yang diharapkan masih jauh dari kenyataan, karena hanya sekitar 50% air Sungai Citarum yang berhasil dibersihkan. Sedangkan untuk mencapai status dapat diminum membutuhkan lebih banyak lagi upaya yang harus dijalankan.³

Program – program yang berkaitan dengan permasalahan Sungai Citarum, penelitian ini menggunakan konsep SWAA untuk menganalisis kebijakan – kebijakan. SWAA (Strengths, Weakness, Advocates, Adversaries) merupakan konsep strategi untuk mengetahui faktor internal dan eksternal pada suatu aktivitas.⁴ Dengan mengetahui faktor – faktor tersebut aktivitas yang dilakukan akan lebih berkembang dan berkelanjutan. Strengths menganalisis keunggulan – keunggulan dari potensi sumber daya oleh organisasi yang dimungkinkan dapat memuaskan pelanggan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk dsb. Weaknesses merupakan daftar kelemahan organisasi yang harus diidentifikasi secara obyektif/jujur dan optimalkan daftarnya. Advocates merupakan faktor – faktor yang menjadi kekuatan dari luar organisasi. Adversaries merupakan faktor – faktor yang menghambat organisasi. Seperti program – program yang dibuat untuk Citarum bersih, terdapat kekuatan dan kelemahan internal dan eksternal yang membuat Sungai Citarum masih belum menghadapi masalah yang belum terselesaikan.

Pada tahun 2017, Tim Survey Kodam III Siliwangi mencatat sebanyak 20.462 ton sampah organik dan anorganik dibuang ke Sungai Citarum, serta 35,5 ton per hari buangan tinja manusia dan 56 ton per hari kotoran ternak. Sungai Citarum secara langsung telah berubah menjadi toilet raksasa, yang kotor, dan beracun akibat berbagai zat berbahaya dalam kandungan air dan ikan yang hidup di

¹ Basuki, Yohanes dkk, 2013, *Tatanan Permukiman Sepanjang Sungai sebagai Perwujudan Ekologi Masyarakat*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan, hal.2

² Puspa Permatasari, "Setelah Janji Tak Lagi Bestari", *Tempo*, 6 Mei 2018, hlm.64.

³ Solehudin, Mochamad, 2017 "DLH Jabar: Citarum Bestari Berhasil Kurangi Sampah Sungai 50 Persen", <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3565168/dlh-jabar-citarum-bestari-berhasil-kurangi-sampah-sungai-50-persen>, (Diakses pada 13 Mei 2018 WIB)

⁴ Montanari & Bracker, 1986, "The Strategic Management Process at The Public Planning Unit Level", *Strategic Management Journal*, Vol 7, page 251 - 265

Sungai Citarum. Zat-zat tersebut sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia, yang pada kenyataannya air sungai Citarum dikonsumsi oleh sekitar 27,5 juta penduduk di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sebagian besar air minum masyarakat Jakarta bersumber dari sungai Citarum, kemudian ikan yang dikembangbiakkan di Citarum juga dipasarkan ke berbagai daerah, khususnya Bandung dan Jakarta. Zat-zat ini berasal dari limbah pabrik yang dibuang tanpa melalui proses pengelolaan air limbah. Selain itu, BBWSC (Balai Besar Wilayah Sungai Citarum) menemukan limbah medis yang dibuang di Sungai Citarum antara lain berupa kantong darah HIV/AIDS, potongan tubuh manusia, dan alat medis bekas pakai.¹

Tahun 2014, media Inggris menayangkan laporan dokumenter soal pencemaran Sungai Citarum yang berjudul '*Unreported World, The World's Dirtiest River*'. Reportase yang ditayangkan Kamis 10 April 2014 memaparkan betapa tercemarnya Sungai Citarum.² Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan yang dijawab dalam tulisan ini adalah :

1. Apa faktor – faktor penyebab tercemarnya Sungai Citarum ?
2. Bagaimana analisis SWAA dalam pengelolaan Sungai Citarum ?

A. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan kabar lingkungan berjudul *Analisis Cemar Logam Berat Merkuri Pada Air dan Udara di Sungai Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak* oleh Linda Triana, dkk yang dimuat dalam jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia pada tahun 2012. Artikel ini membahas bahwa tidak hanya sungai Citarum yang mengalami pencemaran, di Indonesia tetapi juga Sungai Mandor di Pulau Kalimantan. Sungai Mandor rusak secara lingkungan dan berbahaya bagi manusia akibat maraknya berbagai aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah pedalaman. Sebagian besar penambang emas menggunakan merkuri untuk memurnikan emas dan memisahkannya dari logam lainnya dengan memakai air sungai. Dalam proses ini, ratusan ribu liter air terkontaminasi merkuri dan kembali memasuki aliran-aliran utama sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat di sepanjang Sungai Mandor. Logam-logam yang tersebar tidak hanya mengganggu lingkungan namun juga mengganggu kehidupan biota Sungai Mandor, dan pencemaran air berpengaruh terhadap kesehatan manusia walaupun dalam jangka waktu yang lama.³

Artikel kedua oleh Dinarjati Eka Puspitasari berjudul *Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus: Sungai Code di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)* membahas limbah rumah-rumah warga sekitar sungai yang sangat tidak kondusif, seperti toilet di setiap rumah yang tidak dilengkapi dengan *septictank*. Pencemaran sama dengan kebiasaan

¹ Saputra, Yuli, 2018, *Misi Besar Mengatasi Pencemaran di Sungai Citarum*, <https://www.rappler.com/indonesia/berita/194162-misi-besar-atasi-pencemaran-sungai-citarum> (Diakses pada tanggal 8 Februari 2018 Pukul 00.20 WIB)

² Putra Wisma, 2017, *Horor Sampah di Sungai Citarum Masih Menghantui* <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3563781/horor-sampah-di-sungai-citarum-masih-menghantui> (Diakses pada tanggal 7 Februari 2018 Pukul 20.52 WIB), Detik News

³ Linda Triana, dkk, 2012, *Analisis Cemar Logam Berat Merkuri Pada Air dan Udara di Sungai Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 11, No. 2, Oktober 2012

warga daerah aliran sungai Citarum yang menganggap sungai sebagai toilet raksasa. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan di Sungai Code Yogyakarta menyebutkan bahwa secara fisik air sungai berwarna keruh, berasa dan berbau. Banyak sampah yang terbawa aliran sungai yang berasal dari aktivitas beberapa warga yang membuang sampah sembarangan di sungai. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan juga ditemukan bahwa warga di sekitar sungai Code, khususnya di wilayah Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan, memanfaatkan fasilitas WC umum, karena tidak adanya fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) pribadi.¹

Artikel Ina Yuliana dalam Jurnal Sosiologi Universitas Mulawarman yang berjudul *Studi tentang Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kondisi Lingkungan Pemukiman Penduduk di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Bandara Samarinda*. Laporan penelitian ini memaparkan bahwa masyarakat sebenarnya telah mengetahui bahwa sungai Karang Mumus telah mengalami pencemaran dikarenakan sampah dari masyarakat yang tinggal dibantaran sungai selain air sungai untuk kegiatan sehari-hari.²

Artikel selanjutnya berjudul *Kajian Kualitas Air Sungai Condong yang Terkena Buangan Limbah Cair Industri Batik Trusmi Cirebon*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kondisi kualitas fisik, kimia, dan biologi air Sungai Condong tercemar karena mutu air yang tidak memenuhi syarat untuk irigasi pertanian, pembudidayaan ikan air tawar dan prasarana/sarana rekreasi air. Pencemaran dipengaruhi oleh limbah cair batik dari Trusmi yang banyak terdapat di daerah tersebut. Proses pembuatan batik identik dengan proses pembuatan motif dan pewarnaan kain. Pewarna sintetis yang umum digunakan pengrajin batik karena mudah didapat juga menghasilkan warna-warna yang lebih cerah. Dampak pencemaran air sungai terasa setelah beberapa puluh tahun terutama ancaman kanker atau gangguan pencernaan akibat akumulasi zat-zat berbahaya.³

Penelitian tentang sungai-sungai di Indonesia membuktikan bahwa di Indonesia hampir semua sungai tercemar walaupun masing-masing memiliki kadar yang berbeda, Namun demikian belum terdapat penelitian yang membahas tentang pencemaran di Sungai Citarum. Sehingga tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya penanganan pencemaran sungai tersebut agar dapat meminimalisir kegagalan program di masa yang akan datang sebelum dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia semakin bertambah.

¹ Dinarjati, Puspitasari, 2009, *Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus: Sungai Code di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)*, Jurnal Hukum, Vol. 21, No.1, Februari 2009, Hal. 23-24

² Ina, Yuliana, 2013, *Studi tentang Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kondisi Lingkungan Pemukiman Penduduk di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Bandara Samarinda*, Jurnal Sosiologi Unmul, Vol. 1, No. 1, 2013, Hal. 20-30

³ Pipin, Supenah, 2015, *Kajian Kualitas Air Sungai Condong yang Terkena Buangan Limbah Cair Industri Batik Trusmi Cirebon*, Jurnal Biosfera, Vol. 32, No. 2, Mei 2015, Hal. 110-118

B. Pembahasan

1. Faktor – Faktor Penyebab Pencemaran Sungai Citarum

Salah satu faktor penyebab Sungai Citarum adalah sampah dilaporkan oleh Detiknews sebagai berikut : “Sampah plastik, botol, barang-barang bekas, limbah rumah warga, masih berserakan, menggunduk terbawa aliran Sungai Citarum yang melambat.”¹

Survei oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum tahun 2013 menyebutkan sampah yang dihasilkan sebanyak 500 ribu meter kubik dalam setahun. Sampah sudah berkurang 50 % jika dilihat berdasarkan kasat mata dulu itu ada titik-titik tertentu yang timbunan sampahnya luar biasa, bahkan orang bisa berdiri di atas aliran air sekarang tidak ada lagi. Dengan mengasumsikan 1 meter kubik sampah setara dengan 1 ton. Volume sampah 500 ribu ton sampah setahun itu berarti sekitar 1.300 ton per hari dibuang ke Citarum. Jumlah sampah itu menyerupai rata-rata sampah yang dibuang per hari ke Tempat Pembuangan dan Pemerosesan Akhir Sampah Sarimukti.² Berdasarkan data diatas, membuktikan bahwa gelar Sungai Citarum adalah sungai yang paling tercemar di dunia memang terbukti.

Pencemaran lainnya disebabkan oleh limbah pabrik dan limbah domestik. Daerah aliran sungai (DAS) Citarum telah mengalami tekanan yang sangat kuat akibat pemanfaatan yang melebihi daya dukung. Aktifitas di DAS antara lain pertanian/perkebunan, pemukiman, industri, perikanan dan pembangkit listrik. Setiap kegiatan memerlukan air, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Namun kondisi kuantitas dan kualitas. Sungai Citarum begitu besar oleh setiap aspek seperti pertanian, perkebunan sehingga mengalami kerusakan dan pencemaran berat. Limbah yang mencemari Sungai Citarum begitu beragam dan menyebabkan kualitas air semakin buruk.

Salah satu faktor penyebab pencemaran Sungai Citarum adalah budaya masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Citarum, Bandung yang dilalui beberapa sungai terutama Sungai Citarum menyimpan persoalan pelik salah satunya adalah banjir. Berbagai upaya dilakukan namun dari tahun ketahun banjir akibat luapan Sungai Citarum tetap terjadi di musim penghujan dan kekeruhan air yang parah di usim kemarau. Warga masyarakat penghuni bantaran Sungai Citarum dari masa ke masa senantiasa menyesuaikan diri dengan ritme sungai ini. Bila musim hujan maka warga penghuni bantaran bersiap untuk menghadapi bahaya banjir sedangkan pada musim kemarau mereka bersiap untuk mencium bau busuk sungai. Dengan modal sosial yang kecil kelompok masyarakat ini umumnya tidak mempunyai Banyak pilihan. Mereka tidak sanggup berpindah mencari tempat agar terhindar dari banjir. Mereka melihat banjir sebagai bencana, yang diatasi dengan berbagai cara sambil tetap bertahan di rumahnya.”³ Terancamnya DAS Citarum didasarkan penjelasan diatas bahwa

¹ Putra Wisma,2017, *Horor Sampah di Sungai Citarum Masih Menghantui*

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3563781/horor-sampah-di-sungai-citarum-masih-menghantui>(Diakses pada tanggal 7 Februari 2018 Pukul 22.28 WIB), Detik News

² Husodo, 2017, Jumlah Sampah Konon Berkurang, Sungai Citarum Tetap Tercemar <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/10/10/jumlah-sampah-konon-berkurang-sungai-citarum-tetap-tercemar-berat-411260> (Diakses pada tanggal 5 Mei 2018 pukul 13.02 WIB)

³ Doweng Andreas, dkk, 2012, *POTRET KEBUDAYAAN MASYARAKAT PENGHUNI BANTARAN SUNGAI CITARUM: STUDI KASUS DI DESA CITEREUP-KEC. DAYEUHKOLOT*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan, hal iii

masyarakat tidak mau dipindah tempat tinggal karena sudah menjadi budaya agraris dimana adanya keterikatan dengan tanah air yang erat.

2. Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sungai Citarum

a. Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum

Masyarakat sekitaran Sungai Citarum membuat program dengan memanfaatkan limbah plastik sebagai salah satu mata pencaharian yang menghasilkan suatu kreatifitas masyarakat setempat seperti membuat tas, vas bunga, keranjang dari limbah plastik atau botol air mineral bekas yang merupakan sampah terbanyak di Sungai Citarum.

Pada tahun 2016 Gubernur Ahmad Heryawan merancang program “Citarum Bestari” yang melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Masyarakat dididik untuk mengolah sampah rumah tangganya sehingga tidak ada lagi sampah yang dibuang ke sungai. Program ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 6,36 miliar. Program ini melibatkan beberapa Dinas, seperti Dinas Perikanan, Peternakan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Peternakan memberikan bantuan pakan ternak dan usaha ternak bagi masyarakat di bantaran Sungai Citarum, Dinas Kesehatan memberi stimulan bantuan pengadaan jamban, Dinas Pertanian menyiapkan penanaman pohon. Dinas Lingkungan Hidup menyediakan dump truck dan motor sampah untuk mengangkut limbah.¹

Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan biaya sebesar Rp 110 Miliar untuk penataan fisik Sungai Citarum. Anggaran disebar ke lima instansi yaitu, Dinas Lingkungan dan Kebersihan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Pertamanan, Dinas Tata Ruang, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Dana diberikan dengan tujuan untuk penataan anak sungai Citarum di wilayah Kota Bandung. Pemkot Bandung akan mengadakan program yang dijalankan diantaranya pemeliharaan pembangunan sarana dan prasarana air. Selain itu juga dilakukan penyediaan dan pengelolaan sanitasi. Pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan sumber daya air, pendidikan dan pengembangan kesiswaan di sekolah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga melakukan pemasangan jaring sampah yang diikuti pengangkutan sampahnya oleh PD Kebersihan Sampah Kota Bandung.²

Pemkab Bandung telah mengalokasikan dana APBD 2018 sebesar Rp. 98 miliar untuk program Citarum Harum yang berada di Kabupaten Bandung. Dana ditujukan untuk membangun *septitank* komunal berdaya tampung 200 rumah sebanyak 20 unit dan daya tampung untuk lima rumah sebanyak 300 unit untuk masyarakat sehingga masyarakat tidak membuang kotoran ke sungai. Dana juga dipakai untuk membangun embung atau danau retensi untuk mengurangi banjir dengan tanah seluas 3 hektar dan revitalisasi situ di Kertasari serta perbaikan danau di Kamojoang,

¹Liputan 6, “Citarum Bestari, Jurus Aher Atasi Masalah Sungai di Jabar” di akses di (<https://www.liputan6.com/news/read/3015885/citarum-bestari-jurus-aher-atasi-masalah-sungai-di-jabar>) pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 13.58 WIB

² Pikiran Rakyat, “Pemkot Bandung Kucurkan Rp110 Miliar untuk Penataan Fisik Sungai Citarum” di akses di (<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/01/18/pemkot-bandung-kucurkan-rp110-miliar-untuk-penataan-fisik-sungai-citarum>) Pada tanggal 4 Mei 2018, Pukul 19.30 WIB

selain itu dilakukan pemasangan jaring sampah di enam titik sungai dan anak sungai. Bupati Bandung telah memberikan dana ke tiap desa sebanyak Rp 50 juta untuk membangun tempat pembuangan sampah sementara. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung mendukung dengan membangun pojok edukasi sampah dan mewajibkan Pegawai Negeri Sipil menanam pohon serta membayar uang pemeliharaan Rp 50 ribu per dua pohon.¹

Pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program “Citarum Harum” mengajak masyarakat melakukan penanaman 1000 Pohon di Situ Cisanti. Proses rehabilitasi sudah mulai dan dilakukan sejak 1 Februari 2018, termasuk melalui rehabilitasi lahan, limbah dan polusi industri.² Citarum mendapatkan dana sebesar Rp. 200 triliun dari *Asian Development Bank* yang digunakan untuk merevitalisasi sungai citarum.³

Yayasan Artha Graha Perduli melaksanakan program rehabilitasi di hulu sungai yaitu Situ Citsanti di Desa Tarumajaya, kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung.⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan Rp. 1,6 triliun untuk normalisasi sungai Citarum, khususnya hulu sungai. Anggaran tersebut digunakan untuk pengerukan sampah, pembangunan terowongan Nanjung, normalisasi Sungai Cisangkuy, Cienteung Baleendah, Gede Bage, dan anak-anak sungai di Hulu Sungai Citarum. Anggran diberikan untuk lima tahun kedepan.⁵

b. Relokasi tempat tinggal

Untuk meningkatkan pegertian masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari rumah tinggal di sekitaran Sungai Citarum diadakan pelatihan untuk meyakinkan warga untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah Provinsi juga membangun 360 unit rumah untuk relokasi dipersiapkan untuk warga yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Citarum. Masyarakat yang direlokasi sebelumnya tinggal di wilayah bantaran sungai di Tarumajaya dan Cibereum, Kertasari Bandung. Ratusan rumah tersebut dibangun di atas lahan seluas empat hingga enam hektar. Per unit rumah tersebut berukuran 36 meter persegi atau 6 meter x 6 meter, rumah tersebut terbuat dari bahan beton dan *fiber* yang ringan namun kuat dan tahan lama. Harga satu unit rumah yang dibangun sebesar Rp 130 juta dan akan diberikan secara gratis kepada setiap masyarakat yang

¹ Tribun Jabar, “Pemkab Bandung Alokasikan Dana Rp 95 Miliar untuk Mendukung Program Citarum Harum”, di akses di (<http://jabar.tribunnews.com/2018/02/21/pemkab-bandung-alokasikan-dana-rp-95-miliar-untuk-mendukung-program-citarum-harum>) pada tanggal 4 Mei 2018, Pukul 19.45 WIB

² Trubus, “Atasi Pencemaran Sungai Citarum, Jokowi Tanam 1000 Pohon di Situ Cisanti” di akses di (<https://news.trubus.id/post/atasi-pencemaran-sungai-citarum-jokowi-tanam-1000-pohon-di-situ-cisanti-7361>) pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 18.00 WIB

³ Jawa Pos, “Ada Uang Rp 200 Triliun Loh untuk Benahi Citarum, Ini Pemasok Dananya!” diakses di (<https://www.jawapos.com/read/2018/01/12/180918/ada-uang-rp-200-triliun-loh-untuk-benahi-citarum-ini-pemasok-dananya>) pada tanggal 5 Mei 2018, pukul 20.20 WIB

⁴ Republika, “AGP Berdayakan Warga Rehabilitasi Sungai Citarum” di akses di (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/22/p4jvpv319-agp-berdayakan-warga-sekitar-rehabilitasi-sungai-citarum>) pada tanggal 5 Mei 2018 pukul 21.10 WIB

⁵ Republika, “Rp 1,6 Triliun untuk Revitalisasi Sungai Citarum” di akses pada (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/25/p64th0383-rp-16-triliun-untuk-revitalisasi-sungai-citarum>) pada tanggal 5 Mei 2018 pukul 21.30

direlokasi. Satu unit rumah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi dengan sistem sanitasi dan *septic tank*. 360 rumah ini berasal dari dana APBN siap dibangun di lahan seluas 4 hingga 6 hektar yang berada tidak jauh dari sekitar lokasi sebelumnya. Area bantaran sungai yang harus steril dari bangunan yaitu berjarak 10-15 meter dari bibir sungai. Rumah tersebut sudah sesuai standar rumah subsidi yang langsung diberikan Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian PUPR.¹

3. Analisis Program SWAA

Analisis SWAA merupakan konsep strategi untuk mengetahui faktor internal dan eksternal pada suatu aktivitas. Dengan mengetahui faktor – faktor tersebut aktivitas yang dilakukan akan lebih berkembang dan berkelanjutan. Faktor internal (dalam) dan faktor luar (eksternal) yaitu: SWAA (*Strengths, Weakness, Advocates, Adversaries*). Analisis SWAA terdiri dari 4 faktor, yaitu:

- a. *Strengths* (kekuatan), merupakan keunggulan – keunggulan dari potensi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dimungkinkan dapat memuaskan pelanggan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk, dsb dan sebagainya.
- b. *Weaknesss* (kelemahan), merupakan kelemahan organisasi yang harus diidentifikasi secara obyektif/jujur.
- c. *Advocates* (dukungan), merupakan faktor – faktor yang menjadi kekuatan dari luar organisasi
- d. *Adversaries* (Ancaman) merupakan faktor – faktor yang menjadi penghambat organisasi atau kondisi yang mengancam dari luar.

Program-program pengendalian lingkungan yang telah dilakukan dari tahun ke tahun untuk Sungai Citarum tidak berjalan dengan baik. Ketidakberhasilan program diakibatkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, berikut analisis ketidakberhasilan program dengan menggunakan analisis SWAA.

***Strengths* (Kekuatan)**

Pemerintah pusat telah mencanangkan program baru untuk menggantikan program sebelumnya yaitu program “Citarum Bestari” tahun 2016 sayangnya program tersebut tidak terlaksana dengan baik. Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa Beliau tak bisa memimpin penanganan Sungai Citarum karena banyak lembaga serta aktor yang terlibat di dalamnya. Impian bahwa pada 2018 air Sungai Citarum dapat diminum sulit diwujudkan. Aktor-aktor yang dimaksud tersebut tampil sebagai pihak-pihak yang mengambil kesempatan bukan untuk memperbaiki keadaan lingkungan Sungai Citarum melainkan untuk mengeruk keuntungan ekonomi dan politik.² Dana yang dikeluarkan oleh program-program pengendalian lingkungan di Sungai Citarum berjumlah sangat besar, serta dialokasikan menjadi utang negara terhadap lembaga keuangan internasional seperti *Asian Development Bank*.

¹ Tribun Jabar, “Ratusan Unit Rumah Disiapkan untuk Relokasi Warga yang Tinggal di Bantaran Sungai Citarum” di akses di (<http://jabar.tribunnews.com/2018/01/27/ratusan-unit-rumah-disiapkan-untuk-relokasi-warga-yang-tinggal-di-bantaran-sungai-citarum>) pada tanggal 5 Mei 2018, pukul 21.40 WIB

² Tempo, Prima Mulia, 6 Mei 2018, “Citarum Bukan Wewenang Saya” Hal. 70

Dana-dana yang diberikan tidak dapat menghasilkan program-program yang efektif yang dapat setidaknya sedikit mengurangi permasalahan. *World Bank* belum memberikan pinjaman dana karena melihat program-program yang selama ini tidak membuahkan hasil yang nyata terhadap keberlangsungan kebersihan sungai Citarum.¹

Februari 2018 Presiden Jokowi meninjau Situ Cisanti di Kertasari.² Jokowi berharap revitalisasi Citarum rampung dalam 7 tahun. tidak hanya revitalisasi dilakuakn juga hal yang lebih serius dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan citarum pada 15 maret 2018. Program yang direncanakan kemungkinan besar dapat berhasil jika pihak-pihak yang terlibat memiliki pengalaman atau kemampuan serta tujuan yang benar yaitu ingin membuat Citarum menjadi lebih baik. Sejak awal Desember Kodam Siliwangi telah mengerahkan sebanyak 200 prajurit TNI. Para prajurit difokuskan memperbaiki kawasan hulu Sungai Citarum yang selama ini rusak. Berbagai cara telah dilakukan prajurit Siliwangi di Danau Cisanti, salah satunya sebagai langkah awal, para Prajurit membersihkan sampah yang memang menumpuk. Selain itu guna mencegah menambahnya sedimentasi, prajurit melakukan penanaman tanaman vetiver.

Tanaman yang memilii akar banyak dan kuat yang dianggap mampu menahan tanah turun yang menyebabkan munculnya sedimentasi. Para prajurit mengubah kawasan perbukitan di Cisanti yang selama ini beralih fungsi menjadi area perkebunan warga, juga membuka lahan untuk proses pembibitan pohon, 125 juta pohon ditargetkan tertanam.³

Program-program yang didukung oleh Kodam Siliwangi tersebut merupakan kekuatan mereka yang terlibat dan terjun langsung dalam hal ini merupakan pihak-pihak yan berpengalaman, serta memiliki tujuan, dan kemampuan untuk merubah Citarum menjadi lebih baik tidak hanya melalui orasi-orasi, janji-janji, program-program yang disampaikan dengan kata-kata kemudian dilupakan, tetapi dibuktikan dengan tindakan nyata.

Pemerintah pusat pada dasarnya telah membuat aturan untuk keberlangsungan kebersihan Sungai Citarum yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 20 ayat 3 mengatakan bahwa setiap orang diperbolehkan membuang limbah dengan persyaratan memenuhi baku mutu selain itu lingkungan hidup mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati-walikota, sesuai kewenangannya. pasal 60 mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan kemediia lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 69 ayat 1 huruf F, setiap orang dilarang membuang B3 (bahan beracun dan berbahaya.) dan limbah media

¹ Berita Data, "Gandeng IMF- Bank Dunia, Pemerintah Atasi Pencemaran Sungai Citarum" Diakses di

(<https://katadata.co.id/berita/2017/10/18/gandeng-imf-bank-dunia-pemerintah-atasi-pencemaran-sungai-citarum>)

Pada tanggal 17 Mei 2018, pukul 16.40 WIB

² Sindo News, 23 Februari 2018, "Presidn Jokowi Akan Rutin Kunjungi Situ Cisanti" Diakses di

(<https://nasional.sindonews.com/read/1284424/15/presiden-jokowi-akan-rutin-kunjungi-situ-cisanti-1519322076>)

Pada tanggal 12 Juni 2018, Pukul 14.50 WITA

³ Detik News, "Cara Prajurit Kodam Siliwangi Bikin Hulu Sungai Citarum Jadi Asri" Diakses di (<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3834504/cara-prajurit-kodam-siliwangi-bikin-hulu-sungai-citarum-jadiasri>)

Pada tanggal 5 Mei 2018, pukul 22.20 WIB

B3 kelengkapan publik. Aturan-aturan tersebut diikuti oleh sanksi yaitu pasal 100 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar. Pasal 104 setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan kemedialingkungan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar. pasal 106 yaitu setiap orang yang memsukan limbah B3 kedalam wilayah NKRI dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 5 miliar dan paling banyak Rp 15 miliar.¹

Aturan dan sanksi ini seharusnya dapat menjadi dasar bagi para pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas kepada setiap aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan Sungai Citarum, yaitu pabrik-pabrik yang terdapat disekitaran daerah aliran sungai citarum yang teus saja membuang limbahnya ke Sungai Citarum tanpa mendapatkan sanksi yang tegas. Tidak semua pabrik yang terdapat disekitaran daerah aliran Sungai Citarum memiliki izin banyak pabrik-pabrik ilegal yang masih berdiri, pabrik-pabrik ilegal tersebut memanfaatkan keadaan dengan sengaja mempekerjakan masyarakat Citarum sehingga masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya pabrik-pabrik ilegal tersebut tanpa memikirkan dampak negatif yang akan mereka terima dimasa yang akan datang.

Weakness (Kelemahan)

Program-program pengendalian lingkungan oleh berbagai pihak tidak berjalan dengan seharusnya, Citarum masih belum membawa perubahan yang signifikan. Keinginan beberapa pihak untuk menjadikan Citarum menjadi sungai yang airnya dapat diminum beberapa tahun kedepan sepertinya masih sulit untuk diwujudkan karena masih terdapat kelemahan baik dari pihak-pihak maupun dari pelaksanaan program. Kurang terbinaanya komunikasi antar pihak dapat menjadi faktor kelemahan yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan program-program. Tidak hanya komunikasi antar-pihak penyedia program ataupun pemberi dana melainkan juga pihak dengan masyarakat setempat. Seperti pada program relokasi rumah. Pemerintah Daerah menyediakan 360 unit rumah layak huni, walaupun telah disediakan rumah gratis yang memiliki standar huni yang layak dibandingkan rumah tinggal yang mereka huni di sekitar aliran sungai, namun tidak banyak masyarakat yang mau meninggalkan hunian lama salah satunya sistem kekerabatan yang dimiliki oleh masyarakat Sunda menganut sistem bilateral atau menghormati kebudayaan serta turunan tidak hanya dari pihak ayah, maupun pihak ibu.

Warisan dari turun temurun tidak dapat ditinggalkan begitu saja, mereka menganggap bahwa semakin dekat dengan keluarga semakin tinggi rasa saling menghormati dan menghargai kebudayaan maupun adat istiadat. Meskipun pada kenyataannya apa yang mereka lakukan memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan. Hal ini merupakan salah satu faktor kurangnya interaksi antar pihak yang terlibat untuk dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih dalam

¹ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kepada masyarakat agar dapat mengubah cara pandang terhadap kehidupan yang lebih baik, tanpa harus melanggar kebudayaan maupun adat istiadat yang mereka miliki.

Begitupula komunikasi pihak penyandang dana, kelemahan terbesar adalah ketika para pemberi dana tidak mengevaluasi dana yang telah dikeluarkan apakah digunakan dengan baik atau tidak, seperti beberapa program yang telah dilakukan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun setelah dana tersebut diberikan, program-program yang telah dijanjikan sebelumnya justru tidak membuahkan hasil yang maksimal, dana yang diberikan bahkan tidak sebanding dengan program. Dana-dana yang diberikan pun tidak semuanya merupakan sumbangan, tapi juga merupakan pinjaman yang harus dikembalikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jika pinjaman dana yang diberikan tersebut dihabiskan dengan program-program yang tidak sepadan maka hanya akan merugikan negara, serta tidak membawa dampak yang nyata untuk mengendalikan lingkungan di Sungai Citarum.

Citarum seringkali dijadikan komoditas politik oleh para politikus maupun pengusaha. Banyaknya kepentingan serta keinginan-keinginan pribadi dari para pihak-pihak yang terlibat hanya membuat tujuan awal untuk Citarum menjadi bersih merupakan isapan jempol belaka. Kepentingan masyarakat tidak lagi dijadikan tujuan utama dalam pelaksanaan program. Program-program yang dicanangkan hanya bertujuan untuk kepuasan pihak-pihak tertentu. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah menjadi hal yang dianggap wajar karena banyaknya kepentingan dari berbagai pihak. Bahkan Gubernur Jawa Barat yang pernah berjanji membersihkan Citarum hingga airnya bisa diminum, sudah menyerah. Karena jabatan yang hampir rampung membuat Aher mengatakan bahwa membersihkan Sungai Citarum bukan lagi wewenang Gubernur Jawa Barat Beliau juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi hanya sebagai koordinator.

Program Citarum Bestari sejak 2016 dengan anggaran Rp 100 miliar pertahun tidak bisa mengubah sungai tersebut menjadi lebih baik. Selaku Gubernur Jawa Barat tidak seharusnya melepaskan tanggung jawabnya terhadap Citarum begitu saja. Tidak sedikit dana yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan program-program pada masa jabatannya berlangsung. Alasan Beliau yang mengatakan bahwa kendalanya adalah tiap lembaga bekerja sendiri seakan tidak mau tau terhadap apa yang terjadi dilapangan.¹ Bencananya antar kepentingan yang terdapat dalam pelaksanaan program disungai Citarum yang membuat sampai saat ini Citarum masih mendapat predikat sebagai sungai terpolusi di dunia.

Advocates (Dukungan)

Dukungan dari pihak eksternal yang terkait untuk pelaksanaan-pelaksanaan program penanganan sungai Citarum tidak sedikit. Seperti dari *Asian Development Bank* (ADB), ADB memberikan dana sebesar Rp 200 triliun diberi dalam bentuk pinjaman.² Dana tersebut diharapkan dapat membantu menangani permasalahan pencemaran di sungai Citarum. Dana revitalisasi Sungai Citarum pada kenyataannya tidak digunakan semaksimal mungkin. Bantuan bahkan tidak hanya datang

¹ Tempo, Prima Mulia, 6 Mei 2018, "Citarum Bukan Wewenang Saya" Hal. 70

² Kompas, 16 Januari 2018, " Benahi Sungai Citarum, ADB Tawarkan Pinjaman Rp 200 Triliun" Diakses di

(<https://regional.kompas.com/read/2018/01/16/14315561/benahi-sungai-citarum-adb-tawarkan-pinjaman-rp-200-triliun>) Pada tanggal 26 Mei 2018, Pukul 11:27 WIB

dari lembaga asing melainkan juga dari pemerintahan, dan lembaga-lembaga sosial peduli lingkungan lainnya yang juga tidak sedikit jumlahnya. Dukungan materi yang diberikan seharusnya dapat membuat dan menjadikan sungai Citarum menjadi bersih walaupun tidak dengan instan namun tetap memberikan kepastian perubahan, sehingga pihak-pihak asing maupun lokal yang memberikan dukungan dapat melihat bukti keseriusan Pemda dalam komitmen untuk pemulihan sungai Citarum. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan dukungan dari *World Bank* namun belum disetujui, karena belum melihat perubahan signifikan. Predikat sungai yang paling tercemar semakin meyakinkan *World Bank* bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya berhasil melakukan penanganan terhadap sungai Citarum.

Adversaries (Ancaman)

Citarum merupakan gambaran rusaknya birokrasi. Sungai Citarum yang kotor dan menjadi tempat pembuangan limbah pabrik-pabrik disekitarnya sudah terjadi sejak 30 tahun yang lalu. sampai saat ini tidak terdapat penanganan serius untuk kasus tersebut. bahkan mejalah tempo edisi 18 juli 1981 menulis artikel yang berisi reportase kotornya Sungai Citarum akibat limbah pabrik. Puluhan masyarakat di daerah sekitar Sungai Citarum bahkan menderita penyakit kulit karena menjadikan air sungai menjadi sumber air minum. 30 tahun berlalu permasalahan itu tidak kunjung terpecahkan kebiasaan tersebut telah menjadi budaya masyarakat Sungai Citarum hingga saat ini.¹ Masyarakat daerah Sungai Citarum bahkan mengaku sudah lupa dengan warna air untuk mencuci pakaian dan alat rumah tangga. Terbiasa menggunakan air sungai yang coklat. Sejak november 2017 ribuan tentara yang dikomando oleh 22 kolonel terjun ke Citarum untuk membersihkan sungai dari sampah. Sejak tentara berpatroli, penduduk desa membuang sampah diam diam pada malam hari. Mereka bahkan tidak takut dengan ancaman denda Rp 250ribu hingga Rp 5juta melalui peraturan daerah tentang larangan membuang sampah kesungai. Tidak hanya dari penduduk, limbah yang terdapat di Citarum juga berasal dari peternakan, bahkan limbah medis.

Di Desa Tarumajaya di Kertasari penduduk desa mengubah hutan milik perhutani yang menjadi rumah mata air menjadi kebun. Akibatnya, tanah yang tak lagi memiliki pijakan ke akar akar pohon itu turun kesungai dan terbawa arus. Perhutani tidak sanggup membendung tindakan masyarakat terhadap hutan tersebut. Walaupun sudah dilarang, mereka tetap datang untuk menanam palawija.² Penduduk disepanjang Citarum memanfaatkan masalah sungai itu menjadi mata pencaharian. Tindakan masyarakat bukan mendukung tindakan pemerintah melainkan sebaliknya, membuat pemerintah kewalahan untuk merubah budaya masyarakat terhadap Citarum dalam mewujudkan Citarum yang lebih baik. Budaya masyarakat seperti inilah yang dapat menjadi ancaman dikemudian hari.³

Semakin banyak program maka semakin besar kemungkinan kegagalan. Pelaksanaan program yang terkadang tidak sinkron antar lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Masing-masing menonjolkan ego dan kepentingan sehingga sulit bekerjasama. Beberapa program yang tidak

¹ Tempo Store, 18 Juli 1981, "Citarum Tak Pernah Tersentuh" Diakses di (<https://stire.tempo.co/majalah/detail/MC201301020038/hati-hati-sekolah-ke-luar-negeri-universitas-luar-negeri>)

² Tempo, Prima Mulia, 6 Mei 2018. "Bernapas Dalam Lumpur"

³ Cita Citarum, 30 November 2009, "Citarum, Tercemar Sejak dari Hulu" Diakses di (<http://citarum.org/info-citarum/berita-artikel/558-citarum-tercemar-sejak-dari-hulu.html>) Pada tanggal 26 Juni 2018, Pukul 15.15 WIB

terlaksana merupakan salah satu contoh ancaman karena telah dicanangkan sejak dulu namun tetap tidak membuahkan hasil maksimal. Otonomi daerah memberikan kewenangan izin bisnis ke pemerintah kabupaten sehingga seharusnya mengawasi pelaksanaannya. Namun budaya politik telah mengakar dengan tidak terdapat tindakan tegas oleh pemerintah terhadap perusahaan yang mendapatkan izin. Puluhan tahun pabrik-pabrik perusahaan itu leluasa membuang limbah ke sungai tanpa sanksi yang tegas yang dapat membuat pabrik-pabrik tersebut jera. Sehingga timbul pemikiran bahwa terdapat tindakan korupsi, karena bukan tidak mungkin ada sogok kepada aparat pemerintah dan penegak hukum.

Dinas lingkungan hidup Jawa Barat menemukan hampir sebagian besar pabrik tidak memiliki izin. Sejauh ini berbagai upaya tidak membuahkan hasil maksimal. Citarum Bestari atau Citarum harum yang dicanangkan oleh Gubernur Jabar dan Kodam Siliwangi hanya merupakan bagian kecil dari program penanganan Citarum. Namun jika setiap program antar lembaga baik asing maupun lokal tidak sinkron maka akan terbengkalai. Hal-hal tersebut merupakan ancaman-ancaman yang tidak diperhatikan namun sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sungai Citarum kedepannya. peraturan-peraturan berupa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah juga disertai oleh sanksi seharusnya dapat dibenahi terlebih dahulu agar dapat digunakan sebagai dasar untuk menindak lanjuti pabrik-pabrik tekstil yang tidak memiliki IPAL. Sehingga, pabrik-pabrik tersebut tidak dapat lagi merusak Citarum dengan limbahnya begitu pula dengan aparat pemerintah maupun penegak hukum yang terlibat dengan pabrik-pabrik tersebut.

C. Kesimpulan

Temuan – temuan tersebut mendukung bahwa budaya masyarakat sekitar daerah Sungai Citarum tidak bisa menjaga lingkungan. Tidak hanya itu faktor lain dari pengusaha dan pemerintah pun sama – sama sulit untuk menjaga Sungai Citarum agar tetap bersih. Maka dapat memperoleh kesimpulan melalui analisis SWAA (*Strength, Weakness, Advocates, Adversaries*). *Strength*, pemerintah berwenang membuat kebijakan untuk Citarum lebih baik. *Weakness*, adanya bentrok kepentingan antara pemerintah dan sektor swasta di DAS Citarum dan kurangnya sanksi untuk pelanggar kebijakan. *Advocates*, terdapat bantuan luar dari ADB dan World Bank. *Adversaries*, lebih kepada budaya politik yang menimbulkan adanya korupsi dan faktor – faktor yang membuat Sungai Citarum tercemar adanya korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Puspa Permatasari, "Setelah Janji Tak Lagi Bestari, *Tempo*, 6 Mei 2018.

KARYA ILMIAH

Basuki, Yohanes dkk, 2013, *Tatanan Permukiman Sepanjang Sungai sebagai Perwujudan Ekologi Masyarakat*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan.

Dinarjati, Puspitasari, 2009, *Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus: Sungai Code di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)*, Jurnal Hukum, Vol. 21, No.1, Februari 2009.

Doweng Andreas, dkk, 2012, *POTRET KEBUDAYAAN MASYARAKAT PENGHUNI BANTARAN SUNGAI CITARUM: STUDI KASUS DI DESA CITEREUP-KEC. DAYEUHKOLOT*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan.

Irna, Yuliana, 2013, *Studi tentang Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kondisi Lingkungan Pemukiman Penduduk di Bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Bandara Samarinda*, Jurnal Sosiologi Universitas Mulawarman, Vol. 1, No. 1, 2013.

Linda Triana, dkk, 2012, *Analisis Cemar Logam Berat Merkuri Pada Air dan Udang di Sungai Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 11, No. 2, Oktober 2012

Montanari & Bracker, 1986, "The Strategic Management Process at The Public Planning Unit Level", Strategic Management Journal, Vol 7.

Pipin, Supenah, 2015, *Kajian Kualitas Air Sungai Condong yang Terkena Buangan Limbah Cair Industri Batik Trusmi Cirebon*, Jurnal Biosfera, Vol. 32, No. 2, Mei 2015.

Saputra, Yuli, 2018, Misi Besar Mengatasi Pencemaran di Sungai Citarum, <https://www.rappler.com/indonesia/berita/194162-misi-besar-atasi-pencemaran-sungai-citarum>

Solehudin, Mochamad, 2017 "DLH Jabar: Citarum Bestari Berhasil Kurangi Sampah Sungai 50 Persen" <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3565168/dlh-jabar-citarum-bestari-berhasil-kurangi-sampah-sungai-50-persen>

DOKUMEN PEMERINTAH

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

SUMBER INTERNET

Berita Data, "Gandeng IMF- Bank Dunia, Pemerintah Atasi Pencemaran Sungai Citarum" (<https://katadata.co.id/berita/2017/10/18/gandeng-imf-bank-dunia-pemerintah-atasi-pencemaran-sungai-citarum>)

Detik News, "Cara Prajurit Kodam Siliwangi Bikin Hulu Sungai Citarum Jadi Asri" (<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3834504/cara-prajurit-kodam-siliwangi-bikin-hulu-sungai-citarum-jadi-asri>)

Husodo, 2017, Jumlah Sampah Konon Berkurang, Sungai Citarum Tetap Tercemar
<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/10/10/jumlah-sampah-konon-berkurang-sungai-citarum-tetap-tercemar-berat-411260>

Jawa Pos, “Ada Uang Rp 200 Triliun Loh untuk Benahi Citarum, Ini Pemasok Dananya!”

(<https://www.jawapos.com/read/2018/01/12/180918/ada-uang-rp-200-triliun-loh-untuk-benahi-citarum-ini-pemasok-dananya>)

Liputan 6, “Citarum Bestari, Jurus Aher Atasi Masalah Sungai di Jabar”

(<https://www.liputan6.com/news/read/3015885/citarum-bestari-jurus-aher-atasi-masalah-sungai-di-jabar>)

Pikiran Rakyat, “Pemkot Bandung Kucurkan Rp110 Miliar untuk Penataan Fisik Sungai Citarum”

(<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/01/18/pemkot-bandung-kucurkan-rp110-miliar-untuk-penataan-fisik-sungai-citarum>)

Putra Wisma, 2017, *Horor Sampah di Sungai Citarum Masih Menghantui*

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3563781/horor-sampah-di-sungai-citarummasih-menghantui>

Republika, “AGP Berdayakan Warga Rehabilitasi Sungai Citarum”

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/22/p4jvpv319-agp-berdayakan-warga-sekitar-rehabilitasi-sungai-citarum>)

Republika, “Rp 1,6 Triliun untuk Revitalisasi Sungai Citarum”

(<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/25/p64th0383-rp-16-triliun-untuk-revitalisasi-sungai-citarum>)

Tempo, Prima Mulia, 6 Mei 2018, “Citarum Bukan Wewenang Saya”.

Tempo Store, 18 Juli 1981, “Citarum Tak Pernah Tersentuh”

(<https://stire.tempo.co/majalah/detail/MC201301020038/hati-hati-sekolah-ke-luar-negeri-universitas-luar-negeri>)

Tribun Jabar, “Pemkab Bandung Alokasikan Dana Rp 95 Miliar untuk Mendukung Program

Citarum Harum”, (<http://jabar.tribunnews.com/2018/02/21/pemkab-bandung-alokasikan-dana-rp-95miliar-untuk-mendukung-program-citarum-harum>)

Tribun Jabar, “Ratusan Unit Rumah Disiapkan untuk Relokasi Warga yang Tinggal di Bantaran

Sungai Citarum” (<http://jabar.tribunnews.com/2018/01/27/ratusan-unit-rumah-disiapkan-untuk-relokasi-warga-yang-tinggal-di-bantaran-sungai-citarum>)

Trubus, “Atasi Pencemaran Sungai Citarum, Jokowi Tanam 1000 Pohon di Situ Cisanti”

(<https://news.trubus.id/post/atasi-pencemaran-sungai-citarum-jokowi-tanam-1000-pohon-di-situ-cisanti-7361>)

GBPs DALAM PELAYAN PUBLIK YANG BERKUALITAS PADA ERA OTONOM DAERAH

Oleh:

Nanang Suparman¹, Engkus², Fadjar Trisakti³, Asep Hidayat⁴,

^{1,2,3,4}Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung,

Jln. A.H. Nasution 105 Bandung 40614

No Tlp/ HP : ¹087722594013, ²08221666677, ³081802041668,

⁴081322491989,

E-mail: ¹n.suparman69@gmail.com, ²ekustyana16@gmail.com

³fajr3sakti@gmail.com, ⁴dr.asephi62@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan dalam makalah ini merupakan kajian teoretis yang membahas tentang pelayanan berkualitas hasil *partnership* antara sektor publik dan sektor *private* pada Era Otonomi Daerah. Dalam artikel ini menelaah mengenai pentingnya pelayanan publik dalam perbaikan konten dan konteksnya dengan sistem desentralisasi. Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya *partnership* sesungguhnya daerah diberikan peluang untuk meraih *benefits* untuk memajukan daerahnya. Dengan otonomi diharapkan akan tercipta partisipasi masyarakat yang tumbuh atas dasar inisiatif/prakarsa sendiri, sehingga akan melahirkan masyarakat yang kreatif –inovatif tanpa ada kekangan dari pemerintah pusat. Dalam era otonomi daerah, kemitraan sangat diperlukan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyediaan pelayanan publik (*public services*). Dalam implementasi *public services* yang dilaksanakan oleh dinas-dinas daerah (SKPD), Badan, Kantor, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) hasil *partnership* yang diberikan dituntut untuk berkualitas dan memuaskan publik penerima.

Kata kunci: Otonomi Daerah; Partnership; Pelayanan Publik; kualitas.

GBPs IN QUALITY PUBLIC SERVICES IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY

Abstract

This paper is a theoretical study that discusses the quality of partnership services between the public sector and the private sector in the Regional Autonomy Era. This article examines the importance of public services in improving content and context with a decentralized system. The granting of regional autonomy as a manifestation of decentralization essentially gives authority to the regions to regulate and manage the interests of local communities according to their own initiative based on the aspirations of the people (Law Number 22 of 1999). With the existence of a real partnership the area is given the opportunity to achieve the benefits to advance its area. With autonomy, it is hoped that community participation will grow on the basis of initiatives / initiatives themselves, so that it will create a creative, innovative society without any restraints from the central government. In the era of regional autonomy, partnerships are needed to provide welfare to the regional community by providing public services (public services). In the implementation of public services carried out by regional agencies (SKPD), Agencies, Offices, BUMDs (Regional Owned Enterprises) the results of the partnership provided are required to be of quality and to satisfy the recipient public.

Keywords: Regional Autonomy; Partnership; Public service; quality.

PENDAHULUAN

Pemerintah selaku pelaksana (eksekutor) pengelolaan negara dan sebagai organisasi publik telah banyak menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan sebagai instrumen perundangan dan landasan dalam berinteraksi dengan publik dimana dalam perspektif bernegara mempunyai tujuan yang sama yakni kemajuan dan kemakmuran warga negara. Kebijakan publik adalah media untuk mencapai tujuan publik, tujuan kolektif warga negara dan dalam pandangan sebagian besar penyelenggara negara dan pihak lainnya cenderung meyakini kebijakan publik sangat krusial keberadaannya dan terkadang melupakan esensi dasarnya. Masyarakat adalah subyek yang akan dilayani oleh sebuah kebijakan yang telah ditetapkan, pada kondisi dimana kebijakan publik belum dalam bentuk terbaiknya dan masih mengandung banyak problematika meskipun secara substansi relatif baik dibanding dengan kebijakan sejenis, maka keadaan demikian akan berpengaruh terhadap bentuk dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Pelayanan publik dengan kondisi yang masih memprihatinkan merupakan cerminan dari kebijakan publik yang belum berkualitas yang menjadi dasar operasionalnya. Kebijakan publik menjadi salah satu indikator berhasil tidaknya sebuah pelayanan publik, namun demikian hal tersebut tidak menjadi tolak ukur mutlak. Mungkin saja sebuah kebijakan publik yang relatif umum namun dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik disebabkan oleh daya dukung aparatur pelaksanaannya dan tersedia dukungan sumber daya tidak langsung lainnya secara memadai. Secara empirik banyak kita temukan produk undang-undang yang sudah sangat lama

dibuat juga belum disempurnakan dan diberlakukan hingga saat ini namun masih dapat dipergunakan sebagai acuan kebijakan publik dengan baik dan efektif pemberlakuannya. Kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta dalam pelayanan public atas dasar saling membutuhkan. Sektor swasta berperan penting dalam memproduksi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga sudah dianggap sebagai barang public yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkannya. Pemerintah sebagai pemegang anggaran negara yang cenderung terbatas dapat mewujudkan pelayan public dengan berbagai bentuk kemitraan dengan swasta yang dilengkapi dengan teknologi dan sumber daya finansial yang memadai. Di era sekarang kecenderungan kerjasama pemerintah-swasta kian menguat seiring dengan tantangan pemerintah dan dunia swasta dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik yang membutuhkan sumber daya yang besar dan beragam.

Dalam konteks pelaksanaan *good governance*, sektor swasta jelas memiliki peran yang sangat besar dan strategis, karena tanpa adanya keterlibatan pihak swasta, agaknya sulit bagi pemerintah bahkan tidak mungkin untuk dapat melaksanakan konsep *good governance* secara optimal. Salah satu peran penting sektor swasta dalam mendukung terwujudnya konsep *good governance* adalah keterlibatan dalam sektor ekonomi, tentu saja dengan tidak mengabaikan sektor-sektor lainnya, seperti lingkungan hidup, sektor sosial, budaya dan lain-laain. Namun, pendekatan ekonomi ini tampaknya merupakan salah satu pilar penting bagi pemerintah (Negara) dalam mendorong pembangunan ekonomi bangsa, baik menyangkut investasi, pemasaran, maupun produksi, sehingga pada akhirnya diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi secara nasional, Abdal, et_al (2018).

Konsep Pelayanan Berkualitas

Hadirnya sebuah pelayanan publik yang berkualitas adalah harapan semua pihak, bukan hanya dari pihak masyarakat yang menerima layanan, tetapi juga dari pihak pemerintah yang memberi layanan. Kepuasan pelayanan adalah proses yang kontinum dan dinamis, yang melibatkan berbagai aspek dan memerlukan sejumlah kriteria untuk mengukurnya. Dalam kaitan ini pemerintah pusat senantiasa berusaha memberikan sejumlah kriteria yang harus menjadi acuan penyelenggara pelayanan agar tercipta standar pelayanan yang baik dan berkualitas yang ujungnya bisa memberikan kepuasan pada masyarakat. Diantaranya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 1995 tentang Pedoman Penganugerahan Piala Abdi Satya Bhakti Bagi Unit Kerja/Kantor Pelayanan Percontohan, diatur mengenai kriteria pelayanan masyarakat yang baik dan berkualitas. Sejumlah kriteria tersebut antara lain berupa: (a). Kesederhanaan; bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tetap, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. (b). Kejelasan dan kepastian; mengenai: 1). Prosedur atau tata cara pelayanan 2). Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif. 3). Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pemberian pelayanan. 4). Besarnya rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya. 5). Jangka waktu penyelesaian pelayanan. (c). Keamanan; memberi rasa aman, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. (d). Keterbukaan; bahwa proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah

diketahui dan dipahami oleh masyarakat.(e). Efisien; bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan.(f). Ekonomis; bahwa pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan; 1). nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya terlalu tinggi di luar kewajaran.2). kondisi kemampuan masyarakat untuk membayar 3. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (g). Keadilan yang merata; bahwa cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.(h). Ketepatan waktu; bahwa pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Sementara itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pemerintah juga berusaha memberikan acuan atau pedoman dalam proses penyelenggaraan pelayanan yang baik dan berkualitas sesuai dengan kewenangannya. Sejumlah kriteria dari Keputusan Menpan ini pada dasarnya kurang lebih sama dengan kriteria yang diajukan sebelumnya. Begitu juga tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan. Dalam keputusan ini juga dinyatakan bahwa secara umum sistem pelayanan perijinan dan non perizinan terdiri dari empat sistem: (a). Pelayanan Unit Instansi Teknis Merupakan sistem layanan yang paling konvensional, di mana tidak ada keuntungan yang didapat oleh masyarakat bila pemerintah daerah menerapkan sistem ini.(b). Pelayanan Satu Atap Merupakan layanan yang menyatukan berbagai unit teknis dalam satu atap dan satu gedung. Masing-masing unit teknis memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Tidak ada keterkaitan dan koordinasi antara unit teknis satu dengan unit teknis lainnya.(c). Pelayanan Satu Pintu Merupakan sistem pelayanan di mana masyarakat hanya dilayani dan hanya berhubungan dengan *customer service*, tidak berhubungan dengan yang memproses perizinan (*back office*). Pada pelayanan satu pintu umumnya proses perijinan dan perizinan transparan dalam hal prosedur, waktu penyelesaian, biaya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. d. Pelayanan Satu Pintu dan Satu Atap (*one stop service; OSS*) Merupakan sistem yang paling ideal dengan banyak kelebihan. Melalui satu pintu dan satu atap, seperti halnya pada pelayanan satu pintu, proses perijinan dan non perijinan melalui sistem ini transparan dalam hal prosedur, waktu penyelesaian, biaya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Semua kriteria yang diberikan pemerintah sebagai acuan itu tidak terlepas dari usulan serupa yang dilakukan para prosedur sederhana dan dapat dipastikan waktu penyelesaiannya

Sementara Salam (2004:110) mengatakan bahwa : Dimensi penerima layanan publik harus memiliki pemahaman dan reaktif terhadap penyimpangan atau layanan tak berkualitas yang muncul dalam praktik penyelenggaraan layanan publik. Keterlibatan aktif masyarakat baik dalam mengawasi dan menyampaikan keluhan terhadap praktik penyelenggaraan layanan publik menjadi faktor penting umpan balik bagi perbaikan kualitas layanan publik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sejumlah kriteria tersebut bisa digunakan sebagai

acuan dan sekaligus standar untuk mewujudkan sebuah pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Dalam bahasa Tjiptono pelayanan berkualitas itu adalah *service excellence* atau pelayanan prima yaitu suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan (Tjiptono, 1998 : 68). Pada dasarnya semua organisasi penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan minimal yang harus dilakukan. Sementara keberadaan standar pelayanan ini harus dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Keberadaan sejumlah standar pelayanan tersebut merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan harus ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan minimal ini menurut LAN (2003:74) antara lain mencakup sejumlah indikator terkait: (a) Prosedur pelayanan; dibakukan untuk pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. (b) Waktu penyelesaian; ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan. (c). Biaya pelayanan; biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. (c) Produk pelayanan; hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. (d) Sarana dan prasarana; disediakan oleh penyelenggara pelayanan dan harus memadai. (e) Kompetensi petugas pemberi pelayanan; harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Aspek lain terkait standar pelayanan yang harus diperhatikan adalah aspek etika pelayanan. Aspek ini merupakan panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Adapun indikator-indikator etika pelayanan ini bisa diukur dengan melihat pola perilaku, seperti sopan santun dan komitmen aparatur penyelenggara layanan.

Kemudian, Goetsch David dalam Zulian Yamit (2002 : 8), kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan. Lebih lanjut, Ibrahim, dalam Hardiyansyah, (2011 : 40), menyatakan kualitas pelayanan publik adalah :

“Kualitas pelayanan publik adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut”.

Jadi dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan suatu penilaian atau tingkatan baik buruknya proses pelayanan, fasilitas pelayanan, maupun cara pemberian pelayanan itu sendiri, dengan menggunakan ukuran penilaian tertentu.

Kondisi Pelayanan Publik Saat ini.

Tugas pokok aparatur negara sebagai abdi negara dan sebagai abdi masyarakat tercermin dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dalam era reformasi dan globalisasi dewasa ini, tuntutan masyarakat dan dunia usaha terhadap peningkatan kualitas pelayanan semakin kuat, untuk itu perlu terciptanya iklim usaha yang kondusif, yang ditandai dengan kondisi pelayanan yang cepat, tepat, pasti aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik tercermin dalam segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat, sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Bentuk aktivitas pelayanan dapat bersifat kegiatan

administrasi, kegiatan berupa penyediaan barang maupun penyediaan jasa. Namun pada kenyataannya dalam realitas keseharian kondisi pelayanan publik yang ada di Indonesia masih terdapat banyak kelemahan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan dan belum sesuai dengan keinginan masyarakat, misalnya mengenai prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian waktu dan tarif pelayanan, kurang | transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain sebagainya. Contoh kasus pelayanan pembuatan e-KTP yang memakan waktu sangat lama dan praktek pemungutan biaya sangat kontras dengan tujuan yang sebenarnya.

Harapan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang berkualitas di tingkat unit layanan khususnya bidang perizinan, bidang administrasi, dan layanan rumah tangga merupakan tantangan yang harus segera diwujudkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar yang didelegasikan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah, maka menerbitkan harapan besar bagi terwujudnya program-program pelayanan publik yang lebih baik, responsif dan akuntabel. Salah satu pelayanan publik yang memiliki citra buruk di mata masyarakat adalah pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan dianggap salah satu faktor penghambat masuknya investasi. Hal ini terlihat dari banyaknya tahap-tahap yang harus dilalui sebelum memulai bisnis di Indonesia yaitu sebanyak 12 tahapan, sementara waktu yang dibutuhkan untuk memulai bisnis mencapai 151 hari atau yang terlama kedua di Asia. Hasil survey Kompas mengenai kualitas pelayanan pada birokrasi perizinan tersebut menegaskan akan kebenaran dari teori Zeithaml, et_al. yaitu dalam konteks praktek-praktek pelayanan kepada konsumen (masyarakat) yang diberikan oleh perusahaan (sektor publik/pemerintah) masih adanya kesenjangan, yaitu keadaan yang bertolak belakang. Harapan masyarakat (*public expectation*) tentunya berkeinginan proses pentahapan dalam pengajuan perizinan apapun tidak banyak yang harus dilalui. Demikian pula pada alokasi waktu yang dibutuhkan untuk segera memulai usaha melalui penerbitan izin gangguan dapat direalisasikan sesegera mungkin. Namun pada kenyataan realisasi sebenarnya, persepsi atau apa yang dipikirkan oleh pejabat publik secara umum masih menganut *mind set* atau pola pikir sebagai penguasa (*pangreh praja*) bukan sebagai pelayan masyarakat (*pamong praja*), sehingga para pegawainya bersikap kaku, arogan, komitmen servisnya rendah, tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Taufik Effendi dan Agus Dwiyanto (2008:56) bahwa birokrasi kita lebih mencerminkan *mind set* mengontrol masyarakat, bukan melayani masyarakat. Tidak diragukan lagi pada era keterbukaan sekarang ini para pejabat publik di sektor pelayanan publik dituntut untuk menghadirkan kualitas pelayanan yang prima, yaitu sebagaimana yang diharapkan dan diidamkan masyarakat pengguna jasa. Pada umumnya para pejabat publik di sektor layanan publik termasuk bidang perizinan telah mengetahui dan menyadari akan tuntutan tersebut. Namun secara teoretik diperlukan tindakan nyata, tidak sebatas pemahaman untuk menyediakan pelayanan prima tersebut.

Kesenjangan kualitas pelayanan dimungkinkan terjadi dengan sebab-sebab pengabaian pada monitoring persepsi pengguna jasa tentang kualitas pelayanan yang mereka harapkan, ketidakmampuan mengidentifikasi penyebab kegagalan pelayanan prima dan yang juga penting seharusnya para pejabat pelayanan publik mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan itu tidak dilakukan.

Mengapa pemerintah bekerjasama dengan swasta?

Ketertarikan kerjasama pemerintah-swasta telah muncul secara signifikan di sejumlah negara di dunia dengan alasan yang beragam. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebenarnya mempunyai sumber-sumber anggaran yang bisa dimanfaatkan dalam tugas fungsi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Namun keadaan yang ada pemerintah selalu deficit dalam anggaran terutama untuk membiayai pelayanan dasar infrastruktur di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur transportasi, komunikasi dan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan. Ketidakpuasan masyarakat atas kualitas dan sebaran layanan pemerintah ini telah mendorong pemerintah membentuk kerjasama dengan sector privat (bisnis). Pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan presiden Joko Widodo yang masif sesungguhnya perwujudan dari GBP's dalam posisi saling menguntungkan. Jaringan internet yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri, layanan satelit yang memungkinkan layanan mesin *Automted Teller Machine* (ATM) seluruh pelosok kecamatan dan desa di seluruh Indonesia merupakan contoh kemitraan yang lainnya.

Bagaimana pemerintah dan swasta bekerjasama?

Cara-cara umum yang lazim ditempuh dalam kerjasama pemerintah-swasta antara lain melalui apa yang disebut dengan kontrak kerja penyediaan layanan fasilitas manajemen, pembiayaan proyek yang bersifat co-ownership atau co-financing, penyusunan pola kerjasama build-operate-transfer, kerjasama informal dan sukarela antara pemerintah dan swasta, dan pembiayaan secara terbatas oleh pemerintah atas layanan jasa yang disediakan swasta.

METODE

Analisis tentang GBPs Dalam Pelayanan Publik Yang Berkualitas Pada Era Otonomi Daerah memerlukan identifikasi dan pemahaman yang mendalam untuk melihat konteks GBPs yang melingkupi permasalahan penelitian dan proses yang terjadi dalam pelayanan yang berkualitas tersebut. Oleh karenanya, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sebagaimana dikemukakan oleh Maxwell (1996:17-19), penelitian kualitatif antara lain ditujukan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terantisipasi, serta memahami proses.

Analisis ini bertujuan mengidentifikasi dan memahami persoalan yang muncul dalam konteks GBPs Dalam Pelayanan Publik Yang Berkualitas Pada Era Otonomi Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan publik oleh pemerintah Dalam era otonomi daerah, dituntut peranan pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyediaan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan.

Pergeseran paradigma dari *good government* menuju *good governance (local governance)*, akan melibatkan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam kegiatan/urusan pemerintahan. Dalam *good governance* harus ada keseimbangan antara publik, privat dan sosial/ masyarakat. Dengan demikian desentralisasi/otonomi tidak hanya berupa penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga penyerahan wewenang kepada masyarakat (J.B. Kristiadi :1994). Berkaitan dengan ini, bagaimana posisi pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik yang melibatkan partisipasi privat dan masyarakat.

Desentralisasi melahirkan *local government*. Konsep *local government* dapat mengandung tiga arti : (B. Hoessein,2000). Pertama, penggunaan istilah *local government* sering kali saling dipertukarkan dengan istilah *local authority*. Namun kedua istilah tersebut mengacu pada *council* (DPRD) dan *major* (KDH) yang *rekrutment* pejabatnya atas dasar pemilihan. Kedua, *local government* berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal (mengacu pada fungsi). Ketiga, *local government* berarti daerah otonom. *Local government* memiliki otonomi (lokal), dalam arti *self government*. Di Indonesia istilah *local government* berarti pemerintah daerah yang memiliki otonomi daerah. Pemerintah daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah (KDH) selaku penyelenggara pemerintahan tertinggi. Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KDH melaksanakan fungsi *policy making* dan sekaligus melakukan fungsi *policy executing* dengan menggunakan instrumen perangkat birokrasi lokal (*local burcaucracy*). Dalam hal yang menyangkut pelayanan publik dilaksanakan oleh dinas-dinas daerah, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pelayanan publik (*public service*) memiliki karakteristik sebagaimana dikemukakan oleh Olive Holtham (Leslie Willcocks dan Jenny Harraw : 1992). (1). *Generally cannot choose customer* (2). *Roles limited by legislation* (3). *Politics institutionalizes conflict* (4). *Complex Accountability* (5). *Very open to security* (6). *Action must be justified* (7). *Objectives-Outputs Difficult to State /Measure*. Dengan karakteristik tersebut, pelayanan publik memerlukan organisasi yang berbeda dengan organisasi yang dapat memilih konsumennya secara selektif. Setiap terjadi kenaikan harga atas suatu *public services* harus dibicarakan atau harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak legislatif (Achmad Nurmadi :1999). Terdapat jenis *public service* seperti penyediaan air bersih, listrik, infrastruktur dan sebagainya tidak sepenuhnya dapat diserahkan berdasarkan mekanisme pasar. Ada kelompok masyarakat yang tidak dapat menikmati *public service* tertentu (ini berkaitan dengan aspek pemerataan), jika ditangani oleh sistem pasar/privat. Gejala ini disebut kegagalan pasar (*market failure*). Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah dengan penyediaan barang-barang publik (*public goods*). *Public goods* dicirikan oleh dua karakteristik yaitu (1) “*non-excludability*” dan (2) *non-rivalry consumption*”. Karakteristik *non-excludability* barang publik diartikan bahwa orang-orang yang membayar agar dapat mengkonsumsi barang itu tidak dapat dipisahkan dari orang-orang yang tidak membayar tetapi dapat mengkonsumsinya juga. Sedangkan karakteristik *non rivalry consumption* diartikan bahwa bila seseorang mengkonsumsi barang itu, orang lainpun mempunyai kesempatan mengkonsumsinya pula. Oleh karena pihak swasta tidak bersedia menghasilkan barang publik (murni), maka pemerintahanlah yang harus menyediakannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan (Nurdjaman Arsjad, dkk :1992).

Intervensi pemerintah akan lebih menonjol dilakukan oleh pemerintah daerah yang bercirikan pedesaan (*rural*). Ini disebabkan tuntutan masyarakat di perkotaan lebih mendesak daripada di pedesaan. Kenyataan yang tidak dihindari adalah terjadinya pergeseran barang/jasa privat berubah menjadi barang/jasa publik (dan sebaliknya), misal pemadam kebakaran. Di pedesaan pemadam kebakaran bersifat barang/jasa privat sehingga tidak diperlukan Dinas Pemadam Kebakaran, tetapi di Perkotaan berubah menjadi barang /jasa publik. Konsekuensinya adalah bila semakin banyak barang/jasa privat yang tidak dapat dihindari berubah sifat menjadi barang /jasa publik, maka beban pemerintah akan semakin tinggi. Hal ini sering dikatakan sebagai fenomena *government growth* (Sudarsono H:1997). Pertumbuhan beban pemerintah ini akan semakin berlebihan bukan hanya karena berubahnya barang privat menjadi barang publik saja, tetapi terutama juga jika pemerintah tidak secara selektif menentukan batas-batas pekerjaannya. Adakalanya barang/jasa yang sebenarnya bercirikan barang/jasa privat masih diproduksi atau subsidi oleh pemerintah kecenderungan munculnya beban tambahan pemerintah yang tidak dapat dihindari, maka efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan sendirinya semakin menjadi kebutuhan. Itulah sebabnya di banyak negara dikembangkan paradigma *reinventing government*. (Sudarsono H : 1997) Dalam penyediaan *public services* oleh pemerintah, tidak tertutup kemungkinan terjadinya *government failure*. Dalam hal ini intervensi sektor privat dapat dimungkinkan. Beberapa alasan keterlibatan sektor privat/swasta dalam pelayanan publik : (Hendroprono Susilo dan John L Taylor : 1995). (1) meningkatnya penduduk di perkotaan sementara sumber keuangan pemerintah terbatas. (2) pelayanan yang diberikan sektor privat/swasta dianggap lebih efisien.(3). banyak bidang pelayanan (antara lain penyehatan lingkungan dan persampahan) tidak ditangani pemerintah sehingga sektor privat/swasta dapat memenuhi kebutuhan yang belum tertangani tanpa mengambil alih tanggung jawab pemerintah.(4). akan terjadi persaingan dan mendorong pendekatan yang bersifat kewiraswastaan dalam pembangunan nasional.

Di beberapa daerah di Indonesia, misalnya Pemerintahan kabupaten/kota di wilayah Bandung Metropolitan Bandung telah melaksanakan kegiatan GBPs ini, selama beberapa dekade terakhir ini yakni pelaksanaan kemitraan dengan pihak swasta dalam pembangunan pasar tradisional dengan model BOT (*Build Operation Transfer*) atau dengan model *Build Transfer Operation* (BTO),sekalipun secara kualitas pelayanan perlu dioptimalkan, karena komitmen Dinas-Dinas di wilayah Metropolitan Bandung di bidang pembangunan pasar tradisional masih rendah,(Engkus, 2016).

Pada era modern sekarang ini program apapun yang berdimensi pelayanan masyarakat dituntut untuk berkualitas. Sedangkan Suparman (2017) menyebutkan bahwa pelayanan publik sejatinya diharapkan oleh masyarakat pengguna layanan dalam bentuk dan *delivery* yang prima dalam arti pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan aman ditandai oleh pelayanan yang tidak berbelit-belit, pelayanan yang well-informed, responsive,akomodatif,konsisten, dan adanya kepastian (waktu,biaya,hukum) dan tidak dijumpai pungutan tidak resmi.itulah diantaranya penerapan prinsip pelayanan prima dalam metode dan prosedur yang erat dengan kebijakan publik (*public policy*).

Turner dan Hulme dalam Engkus, (2013), berpendapat lain, dalam tataran implementasi terdapat 5 (lima) hal penting yakni: 1).*Devolusi*, 2).*Incrementalism*, 3).*Centralization*, 4).*Irrelevance*, dan Kontingensi. Dalam kajian administrasi publik bahwa desentralisasi akan mendorong keputusan yang lebih baik dan karenanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan argumen: Perencanaan berbasis kebutuhan lokal, koordinasi antar organisasi tingkat lokal, memacu inovasi lokal, meningkatkan motivasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pengurangan beban kerja pemerintah pusat dalam tataran implementasi.

SIMPULAN

Perkembangan zaman saat ini memberi dampak terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan. Masyarakat semakin kritis, sehingga organisasi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk tanggap dan bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, organisasi yang dibutuhkan pada saat ini adalah organisasi yang bersifat dinamis yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan agar dapat bertahan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Selain itu, organisasi pelayanan publik tersebut juga harus menjalin perhatian serta kedekatan yang intensif kepada masyarakat selaku pelanggan. Dalam mewujudkan Pelayanan dengan keterbatasan anggaran maka dengan cara pendekatan yang adaptif berupa *Government and Business Partnerships (GBP's)* dimana terdapat sharing pembiayaan pelayanan publik antara pemerintah-swasta. *GBP's* dapat menjadi jalan keluar dari kondisi ketertekanan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. *GBP's* dan bentuk kerjasama lainnya dapat menjadi instrument berharga bagi penggalian (*leveraging*) berbagai sumberdaya baik sektor publik (pemerintah) maupun sector privat (bisnis) dan meningkatkan kapabilitas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal1,Et_al.(2018). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Swasta Dalam Pelayanan Publik.Bandung.Unpas Press.
- Arsyad, Nurdjaman. Et_al.(1992).Keuangan Negara. Jakarta : Intermedia.
- Bhenyamin, Hoesein. (2000).Hubungan Penyelenggara Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Demokrasi*.01(1),hlm.25-43.
- Engkus, Engkus. (2013). DESENTRALISASI (Teori yang Baik Dengan Praktek yang buruk), *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.- 3(1),pp. 1-16.
- Engkus, Engkus. (2016). Komitmen Pembangunan Pasar Tradisional Di Wilayah Metropolitan Bandung Provinsi Jawa Barat.*Jurnal Ilmiah Politea*.16(8),hlm.1-25.
- Hardiyansyah. (2011).Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta :Gava Media.
- Leach, Steve. Et_al. (1994). *The Changing Organization and Management of Local government*. London : Macmillan Press Ltd.
- Maxwell, J. A. (1996). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. California: SAGE Publications
- Nana Rukmana.Et_al.(1995).Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan. Ed. Jakarta LP3ES.
- Nurmadi, Achmad. (1999). *Manajemen Perkotaan Yogyakarta : Lingkaran Bangsa*.
- Osborne, David dan Ted Gaebler.(1996). *Mewirusahaakan Birokrasi : Menstransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*, terj. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Savas, E.S. (1987). *Privatisation : The Key To Better Government*. New Jersey. Sidney : The Free Press A Division of Macmillan, Inc. Zeithaml, Valarie A., Mary jo Bitnet. (2004).*Service Marketing : Integrating Customer Focus Across The firm*, 3rd Ed., New York : McGraw-Hill.
- Smith, B.C. (1985).*Decentralization : The Territorial Dimension of the State*.
- Sudarsono. (2007). “Pelayanan Prima Sektor Swasta Dalam Mendukung Daya Saing : Model Alternatif Bagi Sektor Publik.
- Suparman, Nanang. (2017). Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur.*Borneo Administrator*,13(1),1-88.
- Willock, Leslie.Et_al. (1992).*Rediscovering Public Services Managemet*. Ed. London : McGraw-Hill.
- Yamit, Zulian. (2002). *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Zeitaml, Valarie A., Parasuraman, A., and Berry, Leonard L. (1990). *Delivering Quality Service (Balancing Customer Perceptions and Expectations)*.New York Oxford.

KAPASITAS GOVERNMENT-BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs) DALAM PEMBANGUNAN PELABUHAN INTERNASIONAL PATIMBAN SUBANG

Oleh :

Dr. H. Iwan Henri Kusnadi,S.Sos,M.Si

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Email : iwanhenri01@gmail.com

ABSTRAK

Fungsi pemerintah sangatlah vital terhadap roda perekonomian di Indonesia. Kebijakan *makro* yang dijalankan oleh pemerintah, tentu akan sangat mempengaruhi perekonomian *mikro* yang dijalankan oleh rakyat. Kerjasama pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat merupakan strategi yang selalu diperhitungkan dalam membangun Negara termasuk dalam investasi bisnis. Pengalaman *best practice* dari beberapa negara menunjukkan bahwa semakin maju tingkat pembangunan ekonomi suatu negara maka semakin terbuka terhadap investasi asing.

Salah satu peran pemerintah dalam kerjasama bisnis strategis di Indonesia yakni kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, pembinaan teknis dan pembinaan manajemen pengoperasian pelabuhan serta pembinaan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan lingkungan dengan kebijakan Pelabuhan Internasional Patimban yang berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Persoalan yang paling mendasar dalam hal ini adalah bagaimana birokrasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu menciptakan suatu nilai GBPs dan daya saing yang didayagunakan untuk kesejahteraan publik baik pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat lokal atau daerah. Untuk itulah arah pemerintahan dalam membangun kerjasama dengan swasta tetap harus ditunjang oleh pembangunan administrasi (*Development of Administration*). Peran pengatur adalah peran pemerintah sebagai penyelenggara negara di bidang investasi. Karena strategisnya fungsi pemerintah sebagai penyelenggara negara, pemerintah perlu menetapkan prioritas yang jelas dan konsisten mengenai: investasi yang diperbolehkan, investasi apa yang dianjurkan, investasi yang dilarang, investasi yang dapat dilakukan asing, investasi yang hanya boleh untuk UKM dan koperasi, investasi yang hanya boleh untuk BUMN, investasi yang harus ada kemitraan dengan usaha lokal atau negara, dan seterusnya. Berbagai keluaran dari peran pengaturan ini perlu ditinjau secara berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional. Tujuan peninjauan ini semata-mata untuk kepentingan nasional, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di negara tersebut. Peran pengarah adalah tugas pemerintah dalam mengalokasikan atau mengarahkan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Peran pengarah ini diwujudkan dalam bentuk pengarahannya untuk: mengelompokkan investasi apa saja yang perlu dilindungi (*protected*) oleh negara dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional, investasi mana saja yang perlu dibantu (*assisted*) oleh negara dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat tertentu demi keadilan dan pemerataan pembangunan nasional, sehingga negara perlu menyediakan sarana atau

prasarananya, investasi mana saja yang perlu didorong (*promoted*) pengembangannya, karena memberikan dampak (*multiplier effect*) positif yang besar bagi ekonomi nasional.

A. Pendahuluan

Pemerintah menetapkan proyek Pelabuhan Patimbang di Subang, Jawa Barat, sebagai proyek strategis nasional. Ini menggantikan proyek Pelabuhan Cilamaya di Karawang yang batal digarap karena lokasinya bersinggungan dengan jalur pipa minyak dan gas bawah laut. Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pelabuhan di wilayah Jawa Barat, pemerintah memandang perlu membangun Pelabuhan Patimban. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan pembangunannya, pemerintah memandang perlu menetapkan Pelabuhan Patimban ini sebagai proyek strategis nasional. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden pada 25 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sebagai Proyek Strategis Nasional.

Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional," bunyi Pasal 1 Perpres tersebut. Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban sebagai proyek strategis nasional itu, menurut Perpres ini, meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengusaha, pembinaan teknis dan pembinaan manajemen pengoperasian pelabuhan serta pembinaan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan lingkungan.

Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban sebagai proyek strategis nasional itu dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam penyelenggaraan Pelabuhan Patimban yang terkait dengan pembangunan, pengoperasian dan pengusaha, menurut Perpres ini, Kementerian Perhubungan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan. Perpres ini juga menegaskan, pembiayaan penyelenggaraan Pelabuhan Patimban dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah; b. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri; c. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan/atau d. Sumber lainnya yang sah. "Pembiayaan penyelenggaraan Pelabuhan Patimban untuk penyediaan peralatan dan pengoperasian pelabuhan, dilakukan melalui kerja sama pemerintah dan Badan Usaha Pelabuhan," bunyi Pasal 3 Ayat (2) Perpres No. 47 Tahun 2016. Melalui Perpres ini, Presiden memerintahkan kepada para Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan Pelabuhan Patimban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 Mei 2016.

Pemerintah membangun Pelabuhan Internasional Patimban di Subang Provinsi Jawa Barat. Pembangunan pelabuhan dimulai pada 2018 dengan dana mencapai US\$ 3,06 miliar atau sekitar Rp 43,2 triliun. Sekitar US\$ 1,03 akan dibiayai dengan pinjaman dari *Japan*

International Cooperation Agency (JICA). Pembangunan Pelabuhan Patimban akan berlangsung dalam tiga tahap. Untuk tahap pertama, yang berlangsung dalam dua fase membutuhkan investasi Rp 31,8 triliun. Pada tahap 2 kebutuhan investasi mencapai Rp 5,58 triliun, dan pada tahap 3 sebesar Rp 3,86 triliun. Pada tahap 1 fase 1 kapasitas Pelabuhan Patimban sebesar 250.000 *Twenty foot Equivalent Unit* (TEUs) dan pada fase 2 bertambah 3,5 juta TEUs menjadi 3,75 TEUs. Untuk tahap 2 kapasitas pelabuhan bertambah 1,45 juta TEUs, serta pada tahap 3 bertambah 2,29 juta TEUs. Total, kapasitasnya pelabuhan menjadi 7,5 juta TEUs.

Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban sebagai proyek strategis nasional itu, menurut Perpres ini, meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, pembinaan teknis dan pembinaan manajemen pengoperasian pelabuhan serta pembinaan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan lingkungan. Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban sebagai proyek strategis nasional itu dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam penyelenggaraan Pelabuhan Patimban yang terkait dengan pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, menurut Perpres ini, Kementerian Perhubungan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan. Perpres ini juga menegaskan, pembiayaan penyelenggaraan Pelabuhan Patimban dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah;
- b. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri
- c. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau
- d. Sumber lainnya yang sah.

Presiden memerintahkan kepada para Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan Pelabuhan Patimban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan kebijakan pembangunan pelabuhan Patimban diatas, hal ini sangat menarik untuk dikaji karena menjadi bagian dari *Government – Business Partnership* (GBPs) dan daya saing Bangsa Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang, terebih peran kebijakan ini dapat mengembangkan kapasitas sektor publik yang dapat menjadi tumpuan pelayanan.

Ketika globalisasi dan pasar bebas memacu tingkat kompetisi yang sangat tinggi dari seluruh elemen kelembagaan negara, termasuk kelembagaan pemerintah daerah serta sektor swasta pada tingkat kompetisi yang semakin terbuka, persaingan tingkat efisiensi (*cost reduction drive*), dan perebutan segmen pasar (*drive*). Meperhatikan kondisi persaingan yang semakin tinggi tersebut, maka langkah-langkah inovatif menjadi salah satu pilihan yang harus diambil agar setiap elemen internal maupun eksternal secara sinergis dapat membangun kemampuan dalam memenangkan persaingan dan memberi jaminan pelayanan internal atas tuntutan mendasar yang terus berubah. Dinamika pasar, dinamika global, serta tarikan-tarikan kekuatan eksternal, arus secara taktis diantisipasi secara pro-aktif bukan secara pasif. Persoalan yang paling mendasar dalam hal ini adalah bagaimana birokrasi pemerintah pusat dan

pemerintah daerah mampu menciptakan suatu nilai *Government – Business Partnership* (GBPS) dan daya saing yang didayagunakan untuk kesejahteraan publik baik pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat lokal atau daerah. Untuk itulah arah pemerintahan dalam membangun kerjasama dengan swasta tetap harus ditunjang oleh pembangunan *administrasi* (*Development of Administration*). Pembangunan administrasi (*Development of Administration*) bertujuan meningkatkan kapasitas dan atau daya dukung administrasi publik bagi kebijakan-kebijakan dan program-program perbaikan ekonomi dan sosial sehingga proses GBPs menjadi penting dalam kerangka kebijakan berbagai bidang pembangunan nasional dan daerah.

Seperti tersirat pada uraian diatas, bahwa pemerintah mempunyai peranan penting dalam pengembangan investasi nasional baik yang dilakukan oleh negara melalui APBN dan APBD berupa investasi publik, maupun investasi yang dilakukan oleh swasta (private), domestik, maupun asing. Pemerintah sebagai penyelenggara negara, perlu dan harus berperan aktif untuk mengembangkan investasi nasional, karena berkaitan erat dengan pencapaian tujuan bernegara guna mensejahterakan seluruh rakyatnya. Keterlibatan suatu pemerintah dalam pengembangan investasi di negaranya, pada hakikatnya adalah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara negara. Oleh karena itu, maka peran ini tidak boleh hilang, dibatasi atau tidak bisa dihalangi atau dihilangkan oleh alasan globalisasi atau Perdagangan bebas, ataupun alasan lainnya.

Secara konseptual bahwa investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini (sekarang, present) dengan harapan mendapatkan manfaat (di kemudian hari, future). Dengan demikian, pengembangan investasi secara nasional dapat diartikan dengan mengorbankan sumber kekayaan alam (yang sebagiannya adalah sumber kehidupan anak-cucu kita di kemudian hari) saat ini, tentunya dengan meningkatkan kesejahteraan anak bangsa, termasuk generasi muda sampai anak-cucu kita selama negara ini masih ada. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya.

Indonesia masih dalam peringkat rendah dalam iklim investasi global di beberapa indikator perbandingan global. Walaupun, Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki iklim investasi global di Indonesia dengan mengambil langkah-langkah melalui paket-paket reformasi kebijakan yang sebelumnya menjadi masalah besar bagi investor-investor swasta, seperti pajak, cukai, kerangka investasi, dan sector keuangan, dan telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 untuk memperbaiki iklim investasi tetapi masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia terlebih akhir-akhir ini Indonesia mengalami cambukan yang hebat oleh pihak-pihak instansi yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menjadi tamparan yang pelak bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem-sistem yang ada. Oleh karena itu, Korupsi kelembagaan adalah hambatan utama dibidang ini, juga masih banyak reformasi yang belum diterapkan secara efektif dan merata di Lapangan. Meningkatkan kualitas infrastruktur adalah aspek yang penting dalam upaya penguatan daya saing Indonesia.

Peranan pemerintah dalam pengembangan investasi nasional sangat luas, bukan hanya dalam bentuk perizinan usaha, melainkan yang lebih mendasar adalah bagaimana menjadikan investasi nasional, bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Secara umum, peran tersebut dapat dibuat dalam beberapa kelompok. Peran pengatur adalah peran pemerintah sebagai penyelenggara negara di bidang investasi. Karena strategisnya fungsi pemerintah sebagai penyelenggara negara, pemerintah perlu menetapkan prioritas yang jelas dan konsisten mengenai: investasi yang diperbolehkan, investasi apa yang dianjurkan, investasi yang dilarang, investasi yang dapat dilakukan asing, investasi yang hanya boleh untuk UKM dan koperasi, investasi yang hanya boleh untuk BUMN, investasi yang harus ada kemitraan dengan usaha lokal atau negara, dan seterusnya. Berbagai keluaran dari peran pengaturan ini perlu ditinjau secara berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional. Tujuan peninjauan ini semata-mata untuk kepentingan nasional, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di negara tersebut. Peran pengarah adalah tugas pemerintah dalam mengalokasikan atau mengarahkan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Peran pengarah ini diwujudkan dalam bentuk pengarahan untuk: mengelompokkan investasi apa saja yang perlu dilindungi (*protected*) oleh negara dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional, investasi mana saja yang perlu dibantu (*assisted*) oleh negara dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat tertentu demi keadilan dan pemerataan pembangunan nasional, sehingga negara perlu menyediakan sarana atau prasarannya, investasi mana saja yang perlu didorong (*promoted*) pengembangannya, karena memberikan dampak (*multiplier effect*) positif yang besar bagi ekonomi nasional sehingga perlu diberi insentif. Peran ini bertujuan agar investasi nasional dapat memberikan kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat. Seperti halnya peran pengaturan, maka keluaran dari peran pengarah ini, juga perlu ditinjau secara berkala agar sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat, dan tujuannya adalah semata-mata untuk kepentingan nasional, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di negara tersebut.

B. Pembahasan

Indonesia merupakan Negara yang telah mengalami beberapa kali krisis salah satu adalah krisis ekonomi 1998, ekonomi Indonesia sudah kembali menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, namun hingga saat ini pertumbuhannya rata-rata per tahun relatif masih lambat dibandingkan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis seperti Korea Selatan dan Thailand, atau masih jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata per tahun yang pernah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru (ORBA), khususnya pada periode 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Salah satu penyebabnya adalah masih belum intensifnya kegiatan investasi, termasuk arus investasi dari luar terutama dalam bentuk penanaman modal asing (PMA). Padahal era ORBA membuktikan bahwa investasi, khususnya PMA, merupakan faktor pendorong yang sangat krusial bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Terutama melihat kenyataan bahwa sumber perkembangan teknologi, perubahan struktural, diversifikasi produk, dan pertumbuhan ekspor di Indonesia selama ORBA sebagian besar karena kehadiran PMA di Indonesia.

Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan salah satu alat kebijakan pemerintah yang berfungsi untuk mengatur investasi di Indonesia. Pada intinya, DNI memuat bidang usaha (sektor bisnis) mana saja yang tertutup sepenuhnya bagi investasi atau terbuka sebagian, yakni berinvestasi dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha (sektor bisnis) dan persyaratan dimaksud tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi yang direvisi secara berkala sesuai kebutuhan dan kepentingan pembangunan nasional. Pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun DNI adalah *negative approach*, dimana bidang usaha (sektor bisnis) yang dikecualikan dari daftar ini berarti terbuka sepenuhnya bagi asing untuk berinvestasi.

Pengalaman *best practice* dari beberapa negara menunjukkan bahwa semakin maju tingkat pembangunan ekonomi suatu negara maka semakin terbuka terhadap investasi asing. Dengan demikian, daftar bidang usaha yang masuk dalam *negative list* bagi investasi asing otomatis juga akan semakin pendek, atausemakin mudah persyaratannya. Pengaturan terhadap investasi asing di negara-negara seperti ini relatif hampir sama dengan pengaturan terhadap investasi domestiknya. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang bahkan tidak lagi menerapkan aturan seperti DNI.

Sebagai negara yang masih membutuhkan investasi, tentunya pemerintah akan berupaya maksimal untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya, terutama bagi investasi asing khususnya di bidang-bidang usaha penting namun belum mampu dikuasai oleh bangsa Indonesia. Diharapkan, masuknya investasi asing akan memberikan kontribusi pada bangsa Indonesia berupa perbaikan level kemampuan teknologi (*technology upgrading*) melalui transfer teknologi (*spillover*), perbaikan keahlian dan pengetahuan (*improved skill and knowledge*) tenaga kerja maupun memperluas jaringan usaha (*business network expansion*). Disamping itu, juga menciptakan lapangan pekerjaan baru, berpotensi menambah pendapatan negara, dan masih banyak manfaat positif lainnya. Ada sedikit catatan, beberapa dari manfaat diatas, pada prakteknya belum terjadi secara optimal di lapangan. Dalam banyak kasus, proses transfer teknologi, keahlian dan ilmu pengetahuan (*spillover*) kepada SDM Indonesia tidak berjalan semulus yang diperkirakan. Begitu juga dengan harapan bertambah luasnya jaringan bisnis bagi perusahaan lokal tidak dengan serta merta terlaksana dengan mudah. Oleh karena itu, aturandan regulasi pendukung yang berkaitan dengan hal-hal tersebut perlu dibuat dan dilaksanakan secara tegas dan konsisten.

Sebagai salah satu negara tujuan investasi yang cukup menarik, proses penyusunan DNI harus sejalan dan konsisten dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional dan kepentingan publik antara lain: pengembangan UMKM dan Koperasi, pemerataan pembangunan, perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, bidang usaha strategis bagi NKRI dlsb. Dalam rangka mengakomodasi tujuan dan kepentingan dimaksud, daftar bidang usaha dalam DNIdiatur melalui dua cara, yaitu: (a) bidang usaha yang tertutup penuh untuk investasi (baik domestik maupun asing), dan (b) bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Adapun persyaratannya mencakup: (i) dicadangkan untuk UMKM dan Koperasi, (ii) besaran kepemilikan modal asing, (iii) melalui kemitraan, (iv) memerlukan izin khusus, (v) harus berdiri di lokasi tertentu, dan atau (vi) kombinasi dari persyaratan-persyaratan diatas.

Terlepas dari berbagai persyaratan yang diterapkan, Pemerintah perlu mencari titik keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan investasi yang cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu diupayakan langkah-langkah terobosan. Misalnya dalam upaya mendorong perkembangan UMKM dan Koperasi, pemerintah bisa memberikan insentif (dalam berbagai bentuk) bagi investasi berskala besar (baik asing maupun domestik) untuk masuk ke bidang-bidang usaha tertentu asalkan bermitra dengan UMKM dan Koperasi lokal. Dengan demikian UMKM dan Koperasi akan semakin terintegrasi dalam jaringan produksi/distribusi yang lebih luas secara nasional maupun internasional. Langkah ini sudah dilakukan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X yang diluncurkan bulan Februari 2016 lalu, walaupun produk hukumnya belum tersedia.

Aturan DNI terakhir yang diterbitkan pemerintah adalah Perpres Nomor 39/2014. Aturan ini merupakan revisi dari aturan sebelumnya, yakni Perpres no.36/2010. Ada sedikit perbedaan dengan aturan sebelumnya, dimana Perpres no.39/2014 memperketat aturan bahkan menutup bidang usaha tertentu untuk investasi asing diantaranya: jasa migas, perdagangan eceran (kecuali usaha skala besar), transportasi, pembangkit energi skala kecil, jasa pengamanan, dan perdagangan dan logistik. Sementara disisi lain, membuka atau mempermudah aturan yang ada untuk investasi asing di beberapa bidang usaha meliputi: fasilitas pelabuhan, energi, farmasi/obat-obatan, telekomunikasi fixed line, kelautan dan modal ventura.

Setidaknya ada tiga isu penting dalam proses penyusunan DNI yang perlu mendapat perhatian serius. Jika tidak ditangani dengan tepat, akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bisnis bagi para investor, khususnya investor asing, yang dapat bermuara pada hengkangnya mereka dari Indonesia. Isu tersebut adalah:

1. Pada pelaksanaannya, banyak bermunculan inkonsistensi aturan yang terjadi di lapangan. Inkonsistensi ini muncul karena ada perbedaan penafsiran hukum antara aturan DNI yang bersifat lintas sektoral (*generalis*) dengan aturan sektoral yang lebih spesifik (*specialis*). Aturan mana yang harus diikuti, seandainya terjadi pertentangan diantara keduanya. Ditambah lagi dengan munculnya isu tata urutan (hirarki) perundangan, dimana aturan berbentuk Undang Undang (UU) memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Presiden. Akibatnya, seringkali para pengambil kebijakan sektoral tidak mengindahkan aturan dalam DNI. Oleh karena itu perlu ada upaya penataan hukum yang terkoordinasi untuk memecahkan masalah ini. Misalnya: (1) menjadikan aturan tentang DNI sebagai acuan satu-satunya tentang investasi asing dalam penyusunan aturan pelaksanaan sektoral, (2) mempertegas fungsi kendali dan koordinasi dari Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang terkait dengan aturan tentang DNI.
2. Hal lain yang juga kerap muncul di lapangan adalah masih adanya pemahaman yang keliru dari sebagian pemangku kepentingan yang beranggapan bahwa DNI merupakan aturan untuk melindungi (proteksi) bidang usaha tertentu dari investasi asing. Berangkat dari pemikiran dimaksud, seringkali muncul loby dan desakan dari pihak-pihak yang berkepentingan agar bidang usaha tertentu dimasukkan ke dalam DNI sehingga terbebas dari asing atau setidaknya ada persyaratan khusus untuk investasi asing. Berbagai alasan, dan

justifikasi, termasuk isu nasionalisme dikemukakan agar investasi asing tidak masuk atau setidaknya dibatasi di bidang tertentu. Sementara disisi lain ada beberapa pihak lain yang berkepentingan menginginkan agar bidang usaha dimaksud dibuka seluas-luasnya untuk asing. Mereka umumnya beranggapan bahwa proteksi melalui DNI hanya akan menyuburkan praktik bisnis yang tidak sehat dan hanya menguntungkan segelintir produsen dalam negeri. Tidak jarang, tarik menarik yang terjadi antar kepentingan yang saling berlawanan ini menjadikan proses penyusunannya menjadi alot dan memakan waktu. Akibatnya revisi aturan tentang DNI yang ditunggu-tunggu investor terlambat diterbitkan.

3. Yang juga banyak dikeluhkan, utamanya oleh para pemodal adalah proses penyusunan DNI yang seringkali tidak transparan. Tanpa ada pemberitahuan atau penjelasan dari pihak berwenang terlebih dulu, ada bidang usaha tertentu dimasukan atau dikeluarkan dari daftar DNI. Tentunya ini akan sangat mempengaruhi minat untuk berinvestasi di bidang tersebut. Secara prosedural, usulan pertama bidang usaha tertentu masuk/keluar dari daftar DNI berasal dari kementerian/lembaga terkait, yang secara umum menerima masukan dari asosiasi bisnis di bidang usaha tersebut. Walaupun ada proses verifikasi di kementerian/lembaga, bisa dikatakan hampir semua usulan tidak dilengkapi dengan kajian biaya dan manfaat (*cost benefit analysis*). Kemudian BKPM dan Kemenko Perekonomian sebagai lembaga lintas sektoral yang berwenang juga melakukan *screening* dari usulan yang masuk dari kementerian/lembaga. Namun proses ini juga tidak dilengkapi dengan kajian mendalam yang menggunakan instrumen analisis yang memadai seperti *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Akibatnya penentuan masuk/tidaknya satu bidang usaha ke dalam daftar DNI tidak memiliki kriteria yang jelas dan terkadang hasil dari proses tawar menawar.

Banyak sekali faktor-faktor yang sebagian besar saling terkait satu sama lainnya dengan pola yang sangat kompleks yang menyebabkan lambatnya pemulihan investasi di Indonesia hingga saat ini. Faktor-faktor tersebut mulai dari yang sering disebut di media masa yakni masalah keamanan, tidak adanya kepastian hukum, dan kondisi infrastruktur yang buruk, hingga kondisi perburuhan yang semakin buruk. Jadi dari uraian di atas, pokok permasalahan adalah iklim investasi yang sangat kompleks, yang implikasinya adalah bahwa kebijakan investasi tidak bisa berdiri sendiri. Dalam kata lain, bagaimanapun bagus suatu kebijakan investasi, efektivitas dari kebijakan tersebut akan tergantung pada banyak faktor lain di luar wilayah kebijakan investasi itu sendiri.

Kapasitas Government –Business Partnership (GBPs)

Dewasa ini upaya pengembangan kapasitas merupakan bagian yang penting di dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari pengembangan kapasitas misalnya dilaksanakan dengan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Di dalam perusahaan misalnya melalui pelatihan-pelatihan sumberdaya manusia, pengembangan sistem manajerial. Di dalam pemerintahan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan juga penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjadikan tugasnya sebagai abdi negara, dan juga

regulasi dan deregulasi kebijakan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan pun upaya pengembangan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain tidak mungkin terjadi suatu proses pembangunan/pengembangan dalam hal apapun tanpa upaya pengembangan kapasitas bagi pelaku maupun juga sistem yang mengaturnya.

Seperti tersirat pada uraian sebelumnya pemerintah mempunyai peranan penting dalam pengembangan investasi nasional baik yang dilakukan oleh negara melalui APBN dan APBD berupa investasi publik, maupun investasi yang dilakukan oleh swasta (private), domestik, maupun asing. Pemerintah sebagai penyelenggara negara, perlu dan harus berperan aktif untuk mengembangkan investasi nasional, karena berkaitan erat dengan pencapaian tujuan bernegara guna mensejahterakan seluruh rakyatnya. Keterlibatan suatu pemerintah dalam pengembangan investasi di negaranya, pada hakikatnya adalah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara negara. Oleh karena itu, maka peran ini tidak boleh hilang, dibatasi atau tidak bisa dihalangi atau dihilangkan oleh alasan globalisasi atau Perdagangan bebas, ataupun alasan lainnya.

Maju tidaknya suatu daerah dapat dilihat dari tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut. Jika kita telaah dari segi bahasa pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, berbeda dengan pembangunan ekonomi yang lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian. Namun pembangunan ekonomi tak lepas dari peranan-peranan sektor yang ada dalam suatu daerah.

Dalam pembangunan ekonomi, sumberdaya alam sangat berpengaruh. Sumber daya alam menjadi faktor yang sangat penting karena sumber daya alam adalah salah satu unsur utama dalam proses produksi. Tanpa adanya sumberdaya alam maka akan sulit terjadi proses produksi. Macam-macam sumber daya alam dapat dibagi oleh beberapa jenis yaitu sumber daya alam yang yang tidak dapat habis, Meliputi udara, energi materi dan air hujan, sumber daya alam yang dapat diganti atau dapat diperbaikidan dipelihara, Meliputi air yang ada ditempat, sumber daya alam yang dapat diperbaiki, Mencakup sumber daya mineral. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pembangunan suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi .Namun sangat disayangkan dari jika baku tersebut dibiarkan begitu saja. Tidak akan pernah bernilai jika dari mengolahnya. Karena hal itu lah jika masyarakatnya belum termotivasi untuk memajukan diperlukan peran pemerintah untuk memberikan kebijakan yang berkaitan dengan penumbuhan keinginan masyarakat untuk membangun daerahnya.

Kebijakan Pemerintah yang berpihak pada sector riil akan memudahkan pertumbuhan ekonomi. Tentu saja hal itu perlu di dukung dengan Sumber Daya Manusia. Karena Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek

pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Tak lupa sistem politik dan pemerintahan suatu daerah juga berpengaruh terhadap keberlangsungan proses pembangunan.

Sebagai contoh, bagaimana peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Potensi keunikan alam yang ada di Banyuwangi ini tengah dilirik untuk digarap menjadi obyek wisata budaya. Keunikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi berbeda dengan Bali walau sama-sama mengandung unsur budaya Hindu nya. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah jelas sangat dibutuhkan guna mendukung pembangunan tersebut. Karena pemerintah merupakan *stakeholder* atau pemangku kepentingan dalam pemberian keputusan “akan diapakan daerah tersebut”. Pemikiran yang panjang tentang rencana pembangunan pasti sudah dipikirkan jauh-jauh hari oleh pemerintah. Tinggal bagaimana merealisasikan rencana tersebut. Saat ini Kabupaten Banyuwangi nya sedang gencar-gencar nya melakukan promosi pariwisata kepada Indonesia serta dunia. Mengenalkan keindahan alam serta budaya nya yang masih terkesan natural. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya iklan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung hal tersebut. Seperti pembangunan infrastruktur dan fisik bagi pengembangan wilayah ekowisata. Sebagian akses jalan melalui tempat wisata diperbaiki untuk lebih memudahkan wisatawan kesana. Bahkan pemerintah Banyuwangi telah membangun infrastruktur pada daerah selatan Banyuwangi sebagai kawasan pelabuhan. Selain itu kawasan selatan telah pula bangun bandar udara guna memudahkan akses kesana, Banyuwangi bagian tengah diersiapkan sebagai sentra UMKM. Sedangkan bagian barat dimaksimalkan untuk produksi hasil perkebunan dan kehutanan. Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Banyuwangi untuk mesentralisasikan kawasan Industri sehingga di Kota Banyuwangi tidak akan ditemukan banyak Mall karena dikhawatirkan akan menggeser keberadaan pasar tradisional. Bukan itu saja Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyadari peran penting internet sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Maka itu, infrastruktur digital dibangun dan dikembangkan sedemikian rupa. Bekerja sama dengan salah satu PT Telekomunikasi di Indonesia, dirilislah Banyuwangi Digital Society pada Maret 2013. Diresmikan oleh Menkominfo Tifatul Sembiring dan Dirut Telkom Arief Yahya, kini Banyuwangi mempunyai 1.700 titik wifi yang ada di tempat-tempat publik, mulai dari sekolah, taman, hingga puskesmas. Melalui hal itu diharapkan dapat masyarakat Banyuwangi dapat menggunakan teknologi informasi internet dalam hal positive contohnya mengenalkan potensi Banyuwangi lewat media sosial, berbisnis lewat internet dsbnya. Program Digital Society ini juga telah membawa Banyuwangi mendapatkan penghargaan di ajang Indonesia *Digital Society Award* (IDSA) 2013. Dalam ajang tersebut, Anas mendapat *Certificate of Acknowledgement* dalam kategori *Overall Society*. Selain itu, Banyuwangi juga mendapat penghargaan sebagai *The Pioneer of Digital Society*. Penghargaan diserahkan Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta pada April 2013. Namun semua itu tak lepas dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan daerah yang sudah dijalankan di Banyuwangi. Dibantu oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Banyuwangi (bappeda) dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Banyuwangi makin gencar melakukan pembangunan di berbagai aspek tidak hanya disektor pariwisata saja. Dan saat ini nama Banyuwangi semakin

melejit di kawasan Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi yang mulai dikenal di Indonesia. Hal itu dapat dilihat banyaknya Penghargaan yang diperoleh. Dari berhasil Banyuwangi meraih Anugerah Pangripta Nusantara Utama 2014 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). penghargaan daerah berkinerja saat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri. Perbaikan itu, di antaranya penurunan kemiskinan dari level 20 persen menjadi ke level 9,93 persen selama tiga tahun. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari posisi 3,92 persen menjadi 3,4 persen dalam tiga tahun terakhir. Tingkat pengangguran di Banyuwangi lebih rendah dibanding Jatim yang sebesar 4,12 persen. Di bidang penanaman modal, pada 2013, investasi yang masuk di Banyuwangi mencapai Rp 3,2 triliun, meningkat hingga 175 persen dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp 1,1 triliun. Jika dibandingkan dengan 2010 yang investasinya baru Rp 272 miliar, investasi di Banyuwangi melonjak drastis hampir 1.100 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi Banyuwangi dalam tiga tahun terakhir selalu di atas rata-rata nasional. Pendapatan per kapita per tahun di Banyuwangi pada 2013 mencapai Rp 21,84 juta, meningkat dari posisi 2010 sebesar Rp15,14 juta. Pendapatan per kapita di Banyuwangi termasuk yang tertinggi di Jatim.

Memperhatikan gambaran peran pemerintah melalui berbagai kebijakan di Banyuwangi tersebut, maka jelas kegiatan ekonomi pemerintahan tidaklah sesimpel yang kita bayangkan. Dengan skalanya yang bersifat *makro*, maka fungsi pemerintah sangatlah vital terhadap roda perekonomian di Indonesia. Kebijakan *makro* yang dijalankan oleh pemerintah, tentu akan sangat mempengaruhi perekonomian *mikro* -- yang dijalankan oleh rakyat. Yang namanya kegiatan ekonomi suatu negara, sangat sulit untuk menolak kehadiran peran pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian. Tanpa 'campur tangan' pemerintah, kegiatan perekonomian berpotensi menimbulkan ketimpangan, ketidakstabilan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Sejak Indonesia merdeka -- sudah terlihat bahwa pemerintah memegang peranan besar dalam kegiatan perekonomian. Hal itu tertulis dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, yang isinya: *Ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 : Sumber air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, apa saja fungsi pemerintah dalam kegiatan ekonomi di Indonesia?.* Terdapat 3 Fungsi pemerintah dalam kegiatan ekonomi pemerintahan :

1. Fungsi Alokasi

Fungsi ini memiliki arti bahwa pemerintah berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon umum. Tentunya hal itu sangat vital dalam kaitannya dengan perekonomian di Indonesia. Tanpa adanya fungsi ini, maka kegiatan ekonomi di Indonesia tidak akan berjalan dengan lancar.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi ini mengartikan bahwa pemerintah memiliki peran dalam hal pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Tujuannya agar tidak ada ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang terlalu mencolok -- antar penduduk di negeri ini.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi ini mengartikan bahwa pemerintah memiliki peran dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Jadi, tujuan dari fungsi ini agar menjaga perekonomian, nilai tukar rupiah, dan arus investasi agar tetap positif.

Hal menarik yang perlu dikaji berkenaan dengan kapasitas pemerintah ini adalah menyangkut pembangunan kapasitas administrasi mencakup perbaikan organisasi dan manajemen. Pembangunan kapasitas administrasi mencakup perbaikan organisasi dan manajemen. Sedangkan pembangunan birokrasi secara lebih khusus bertujuan memodernisasi birokrasi agar lebih mampu mendukung proses pembangunan dan secara bertahap mampu melayani kehidupan modern.

Kapasitas GBPs Dalam Pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban.

Sebagaimana kita ketahui bahwa bumi ini dua per tiga terdiri atas perairan. Daerah yang begitu luasnya membutuhkan suatu sarana dan prasarana yang akan menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Peranan pelayaran adalah sangat penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta hal-hal yang lainnya. Kapal sebagai sarana pelayaran yang menghubungkan antar daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem angkutan laut. Untuk mendukung kegiatan dari kapal dalam melakukan kegiatan pelayaran dibutuhkan prasarana berupa pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat pemberhentian (terminal) kapal setelah melakukan pelayaran. Di pelabuhan ini kapal melakukan berbagai kegiatan seperti menaik-turunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian bahan bakar dan air tawar, melakukan reparasi, mengadakan perbekalan dan sebagainya.

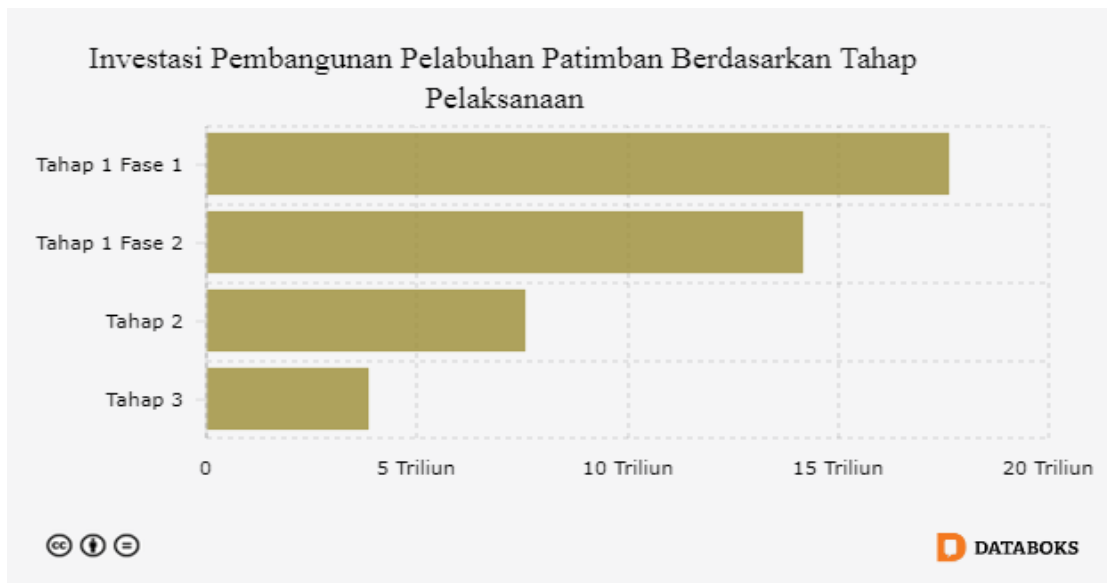
Pelabuhan merupakan pintu gerbang yang menghubungkan dan memperlancar komunikasi antar daerah yang satu dengan yang lainnya. Selain untuk kepentingan sosial dan ekonomi, ada pula pelabuhan yang dibangun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan suatu daerah atau negara. Dalam hal ini pelabuhan tersebut dinamakan pangkalan angkutan laut atau pelabuhan militer.

Kebutuhan akan pelabuhan pada dasarnya timbul untuk memenuhi beberapa hal berikut ini yaitu:

- a. Pembangunan pelabuhan yang didasarkan pada pertimbangan politik. Sebagai contoh pelabuhan militer yang diperlukan untuk mendukung pertahanan dan keamanan suatu daerah atau negara.
- b. Pembangunan suatu pelabuhan diperlukan untuk melayani atau meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah belakangnya (hinterland) dan untuk menunjang kelancaran perdagangan antar pulau atau negara (ekspor dan import) serta mendukung perkembangan daerah sekitarnya.

- c. Mendukung kelancaran produksi suatu perusahaan atau pabrik. Pelabuhan diperlukan untuk memperlancar pemasaran hasil-hasil produksinya, atau mendatangkan bahan baku untuk keperluan produksinya. Bahkan ada pelabuhan khusus yang digunakan untuk melayani perusahaan dalam berproduksi.

Pemerintah menetapkan proyek Pelabuhan Patimbang di Subang, Jawa Barat, sebagai proyek strategis nasional. Ini menggantikan proyek Pelabuhan Cilamaya di Karawang yang batal digarap karena lokasinya bersinggungan dengan jalur pipa minyak dan gas bawah laut. "Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional," bunyi Pasal 1 Perpres tersebut. Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban sebagai proyek strategis nasional itu, menurut Perpres ini, meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, pembinaan teknis dan pembinaan manajemen pengoperasian pelabuhan serta pembinaan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan lingkungan. Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban sebagai proyek strategis nasional itu dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam penyelenggaraan Pelabuhan Patimban yang terkait dengan pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, menurut Perpres ini, Kementerian Perhubungan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan. Perpres ini juga menegaskan, pembiayaan penyelenggaraan Pelabuhan Patimban dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah; b. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri; c. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan/atau d. Sumber lainnya yang sah. "Pembiayaan penyelenggaraan Pelabuhan Patimban untuk penyediaan peralatan dan pengoperasian pelabuhan, dilakukan melalui kerja sama pemerintah dan Badan Usaha Pelabuhan," bunyi Pasal 3 Ayat (2) Perpres No. 47 Tahun 2016 itu. Melalui Perpres ini, Presiden memerintahkan kepada para Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan Pelabuhan Patimban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 Mei 2016 itu. Pemerintah membangun Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Pembangunan pelabuhan akan dimulai pada 2018 dengan dana mencapai US\$ 3,06 miliar atau sekitar Rp 43,2 triliun. Sekitar US\$ 1,03 akan dibiayai dengan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Pembangunan Pelabuhan Patimban akan berlangsung dalam tiga tahap. Untuk tahap pertama, yang berlangsung dalam dua fase membutuhkan investasi Rp 31,8 triliun. Pada tahap 2 kebutuhan investasi mencapai Rp 5,58 triliun, dan pada tahap 3 sebesar Rp 3,86 triliun. Pada tahap 1 fase 1 kapasitas Pelabuhan Patimban sebesar 250.000 *Twenty foot Equivalent Unit* (TEUs) dan pada fase 2 bertambah 3,5 juta TEUs menjadi 3,75 TEUs. Untuk tahap 2 kapasitas pelabuhan bertambah 1,45 juta TEUs, serta pada tahap 3 bertambah 2,29 juta TEUs. Total, kapasitasnya pelabuhan menjadi 7,5 juta TEUs.



Secara umum perencanaan/pengembangan pelabuhan dapat direfleksikan oleh sifat kelembagaannya, ada yang berorientasi bisnis (*bussiness oriented*) dan ada yang berorientasi kepada kepentingan umum. Pelabuhan yang berorientasi pada keuntungan, perencanaan pengembangan dilakukan secara bertahap dan dikaitkan pada pengembangan yang memberikan keuntungan langsung. Sebaliknya pelabuhan yang berorientasi pada kepentingan umum, perencanaan pengembangan dilaksanakan dalam jangka panjang dan komprehensif serta diarahkan pada pelabuhan sebagai prasarana umum yang menunjang perkembangan sosial ekonomi daerah dan nasional, guna memperoleh keuntungan menyeluruh.

Sebagai gambaran singkat tentang kerjasama pembangunan Paelabuhan Patimban dapat penulis kemukakan keterangan sebagai berikut :

Pembangunan Pelabuhan Patimban juga merupakan penanda eratnya kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang yang sudah terjalin selama 60 (enam puluh) tahun,” ujar Dirjen Agus. Lebih jauh Dirjen Agus mengatakan bahwa dibangunnya Pelabuhan Patimban akan mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta dengan pembagian arus lalu lintas kendaraan, serta menjamin keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi Migas. Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahap. Pada Tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani 3.5 Juta peti kemas (TEUS) dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU). Pada Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUS dan pada Tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7.5 Juta Teus. “Nantinya Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor yang diangkut menggunakan kapal-kqpal kargo. Pelabuhan Patimban juga akan didukung area sarana penunjang (Backup Area) untuk mendukung efisiensi logistik dari dan ke Pelabuhan Patimban seluas 356 Ha

Pembangunan pelabuhan konstruksi pelabuhan Patimban, Subang, mulai dilakukan awal Agustus 2018. Khusus untuk pembangunan terminal kendaraan dan dermaga kapal Ro-Ro ditargetkan bisa selesai Maret 2019 dan beroperasi pada tahun yang sama. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat acara penandatanganan kontrak Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban di kantor Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. Penandatanganan dilakukan antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan konsorsium proyek yang beranggotakan perusahaan Jepang dan Indonesia, yaitu Penta Ocean-Toa-Rinkai-Wika-PP. Dengan ditandatanganinya kontrak tersebut, JICA akan mulai mengucurkan pinjaman untuk pengerjaan tahap satu senilai Rp 8,9 triliun. Pengerjaan tahap satu ini diantaranya terminal kendaraan, peti kemas, dan dermaga kapal Ro-ro. "Untuk tahap pertama ini akan dibangun untuk 1 juta Teus dulu. Nanti direncanakan akan melayani 3,5 juta Teus lalu 5,5 juta Teus, sampai akhirnya jadi 7,5 juta Teus. Jadi bisa dikatakan pelabuhan Patimban akan sama besar dengan Tanjung Priuk," ujar Budi. Dia mengatakan, proyek pelabuhan Patimban ini dibagi alam tiga tahap dan ditargetkan rampung tahun 2027. Total kebutuhan biaya yang pembangunan pelabuhan ini mencapai Rp 43 triliun. Budi mengatakan, pembangunan pelabuhan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional. Pembangunan pelabuhan Patimban diharapkan dapat menambah daya saing Indonesia dengan menekan biaya logistik. Apalagi Indonesia berencana untuk menjadi pusat industri otomotif. "Oleh karenanya saya menganggap proyek ini penting dan harus dilakukan bersama. Dengan adanya pelabuhan Patimban, distribusi Jawa bagian tengah bisa lancar," ujar dia. Kepala Bagian Ekonomi Kedutaan Besar Jepang, Mari Takada, mengatakan pembangunan pelabuhan Patimban bisa berkontribusi pada ekspor dan impor dari negara Jepang. Sebab daerah itu dekat dengan beberapa industri yang induknya berasal dari Jepang. "Jadi saya pikir, ya memang lebih baik ekonomi Jepang. Tapi kami berharap bisa berkontribusi juga pada perekonomian Indonesia," ujar dia. Dia mengatakan, kendaraan logistik Tanjung priuk sudah penuh dan menimbulkan kemacetan. Dengan pembangunan pelabuhan Patimban, diharapkan bisa mengurai kemacetan tersebut. Sementara itu mengenai operator pelabuhan, Mari mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang sudah sepakat mengoperasikannya bersama-sama. "Kami berharap pihak swasta Indonesia juga turut berpartisipasi".

"Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, meski lelang baru dimulai September mendatang, namun sudah ada 10 perusahaan swasta yang tertarik untuk menjadi operator di Pelabuhan Patimban. "Sudah ada 10, konsorsium tiga sampai empat," kata Budi usai penandatanganan konstruksi Pelabuhan Patimban Paket 1 di Kementerian Perhubungan, Jakarta, dikutip Antara, Jumat (27/7). Dia menyebutkan 10 swasta tersebut, beberapa dari Indonesia dan Jepang sesuai dengan perjanjian konsorsium Indonesia memegang saham 51 persen, sementara Jepang 49 persen, salah satunya adalah Astra. Menurutnya, tidak ada prioritas dalam lelang tersebut, keduanya memiliki kesempatan yang sama selama porsi saham masih 51:49. Konselor Ekonomi Kedutaan Besar Jepang Mari Takada mengatakan pihaknya akan berkomitmen dalam kerja sama Pelabuhan Patimban karena akan turut membantu perekonomian Jepang, mengingat lokasi pelabuhan sangat dekat dengan kawasan industri otomotif asal negara Sakura tersebut. "Seperti yang dikatakan, lokasinya itu memang ada

banyak perusahaan Jepang. Jadi ini bisa berkontribusi untuk ekspor impor perusahaan Jepang. Itu baik bagi ekonomi Jepang, juga bagi Indonesia," katanya. "Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk kerja sama operasi, kami berharap pihak swasta juga terlibat. Antara Jepang dan Indonesia sudah sepakat bersama-sama, jadi itu harus," jelas Mari. Diketahui, Paket 1 Pelabuhan Patimban telah ditandatangani dengan nilai kontrak Rp 6 triliun dari total Rp 8,9 triliun hingga 2020. Untuk Paket 1 akan dibangun terminal kendaraan 350.000 unit, terminal peti kemas 800.000 Teus dan dermaga Roro dan diharapkan akan beroperasi pada tahun depan".

Bila dicermati dari beberapa keterangan diatas, bahwa dalam pembangunan pelabuhan Internasional Patimban terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- Kebutuhan akan ruang dan lahan yang sesuai dengan rencana.
- Perkembangan ekonomi daerah hinterland pelabuhan.
- Perkembangan industri yang terkait pada pelabuhan.
- Arus dan komposisi barang yang ada dan diperkirakan.
- Jenis dan ukuran kapal.
- Hubungan transportasi darat dan perairan dengan hinterland
- Akses dari dan menuju laut.
- Potensi pengembangan fisik
- Aspek nautis dan hidraulik.
- Keamanan/keselamatan dan dampak lingkungan.

- Analisis ekonomi dan finansial.
- Fasilitas dan struktur yang ada.

Kita berharap tujuan Pembangunan Pelabuhan Patimban dapat diwujudkan yakni untuk mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kemampatan lalu lintas di Jakarta dengan pembagian arus lalu lintas kendaraan. Serta menjamin keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi migas. Patimban sangat strategis, karena tumpuan dari industri ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sehingga dengan adanya Patimban, daerah ini memiliki dua pelabuhan yakni Tj. Priok dan Patimban. Terbayang sudah begitu besarnya peranan yang akan diemban pelabuhan Patimban ini?

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kerjasama pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat merupakan strategi yang selalu diperhitungkan dalam membangun Negara termasuk dalam investasi bisnis. Pengalaman *best practice* dari beberapa negara menunjukkan bahwa semakin maju tingkat pembangunan ekonomi suatu negara maka semakin terbuka terhadap investasi asing.

Salah satu peran pemerintah dalam kerjasama bisnis strategis di Indonesia yakni kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, pembinaan teknis dan pembinaan manajemen pengoperasian pelabuhan serta pembinaan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan lingkungan dengan kebijakan Pelabuhan Internasional Patimban yang berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Persoalan yang paling mendasar dalam hal ini adalah bagaimana birokrasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu menciptakan suatu nilai GBPs dan daya saing yang didayagunakan untuk kesejahteraan publik baik pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat lokal atau daerah. Untuk itulah arah pemerintahan dalam membangun kerjasama dengan swasta tetap harus ditunjang oleh pembangunan administrasi (*Development of Administration*). Peran pengatur adalah peran pemerintah sebagai penyelenggara negara di bidang investasi. Karena strategisnya fungsi pemerintah sebagai penyelenggara negara, pemerintah perlu menetapkan prioritas yang jelas dan konsisten mengenai: investasi yang diperbolehkan, investasi apa yang dianjurkan, investasi yang dilarang, investasi yang dapat dilakukan asing, investasi yang hanya boleh untuk UKM dan koperasi, investasi yang hanya boleh untuk BUMN, investasi yang harus ada kemitraan dengan usaha lokal atau negara, dan seterusnya. Berbagai keluaran dari peran pengaturan ini perlu ditinjau secara berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional. Tujuan peninjauan ini semata-mata untuk kepentingan nasional, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di negara tersebut. Peran pengarah adalah tugas pemerintah dalam mengalokasikan atau mengarahkan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Peran pengarah ini diwujudkan dalam bentuk pengarahannya untuk: mengelompokkan investasi apa saja yang perlu dilindungi (*protected*) oleh negara dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional, investasi mana saja yang perlu dibantu (*assisted*) oleh negara dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat tertentu demi keadilan dan pemerataan pembangunan nasional, sehingga negara perlu menyediakan sarana atau prasarannya, investasi mana saja yang perlu didorong (*promoted*) pengembangannya, karena memberikan dampak (*multiplier effect*) positif yang besar bagi ekonomi nasional.

Terdapat 3 Fungsi pemerintah dalam kegiatan ekonomi pemerintahan : 1) Fungsi Alokasi; Fungsi ini memiliki arti bahwa pemerintah berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon umum. Tentunya hal itu sangat vital dalam kaitannya dengan perekonomian di Indonesia. Tanpa adanya fungsi ini, maka kegiatan ekonomi di Indonesia tidak akan berjalan dengan lancar. 2)

Fungsi Distribusi; Fungsi ini mengartikan bahwa pemerintah memiliki peran dalam hal pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Tujuannya agar tidak ada ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang terlalu mencolok -- antar penduduk di negeri ini. 3) Fungsi Stabilisasi; Fungsi ini mengartikan bahwa pemerintah memiliki peran dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Jadi, tujuan dari fungsi ini agar menjaga perekonomian, nilai tukar rupiah, dan arus investasi agar tetap positif.

Pembangunan kapasitas administrasi mencakup perbaikan organisasi dan manajemen. Sedangkan pembangunan birokrasi secara lebih khusus bertujuan memodernisasi birokrasi agar lebih mampu mendukung proses pembangunan dan secara bertahap mampu melayani kehidupan modern.

Kapasitas pemerintah dan GBPs menurut penulis diantaranya :

- 1) Menciptakan stabilitas iklim politik, sosial dan ekonomi. Banyak studi mengenai penanaman modal asing di sejumlah negara menunjukkan bahwa faktor politik merupakan faktor yang selalu signifikan dalam mempengaruhi besarnya investasi.
- 2) Memperbaiki kondisi/ menyediakan infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan)
- 3) Membuat berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan.
- 4) Menciptakan good governance termasuk pemberantasan korupsi.
- 5) Di Sektor Birokrasi, membuat peraturan perizinan investasi yang mudah tidak berbelit-belit, transparan dan saling menguntungkan antara Pemerintah Investor.
- 6) Menciptakan kepastian dalam kebijakan ekonomi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak.
- 7) Menyederhanakan perijinan.
- 8) Transparansi biaya perijinan.
- 9) Penurunan berbagai pungutan liar yang tumpang tindih.

Saran-Saran

1. Kerjasama pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat merupakan strategi yang sebaiknya selalu diperhitungkan dalam pembangunan Patimban.
2. Kebijakan Pemerintah yang berpihak pada sektor riil juga menjadi bagian dalam pembangunan Pelabuhan Patimban sehingga kerjasama investasi tetap memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu terus berupaya supaya mampu menciptakan suatu nilai GBPs dan daya saing dalam pembangunan pelabuhan Patimban.

DAFTAR PUSTAKA

- Diocon, Monica. 2003. *Entrepreneurship and Community Development*. Montreal.
- Dye, Thomas. R. 2005. *Understanding Public Policy. Eleventh Edition*. Englewood Cliffs. New Jersey : Prentice Hall.
- Hoessein, Bhenyamin. 2001. *Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Idealisme Kebijakan Desentralisasi*. Jakarta : MIPI
- Kay, Adrian., 2006., *The Dinamic of Public Policy.*, USA : Edward Elgar Publishing, Inc.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Codes.
- Kartiwa, Asep., 2012., *Mengelola Kewenangan Pemerintahan.*, Bandung : Lepsindo.
- Keban, Yeremis T., 2008. *Enam Dimensi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gramedia.
- Mitchell, C (2001), *Memahami Bisnis Internasional*. Jakarta : PPM
- Morris, M.H. & Paul, G.W. (1987), "The relationship between entrepreneurship and marketing in established firms", *Journal of Business Venturing*, Elsevier Science Publishing, Vol. 2 No. 3, pp. 247-259.
- Porter E. Michael., 2007. *Dynamic Governance*. USA. Harvard Business School : World Scientific.
- Romansen & Suprianto (2016). MAJALAH SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN (MARSELA). MEDAN MERDEKA SELATAN Volume 1 / Tahun XI / 2016/
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan masa depan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Ury, W (1991). *Getting Past No; Negotiating* : Business Books Ltd.
- <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-x-tingkatkan-investasi-lindungi-umkkm>
- <http://www.merdeka.com/uang/bkpm-sebut-regulasi-revisi-dni-diterbitkan-perrtengahan-april.html>
- Pemda Kabupaten Subang, .2010. *Percepatan Pembangunan di Kabupaten Subang*, <https://www.123intropro.blogspot.com>.

GOVERNMENT - BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs)
DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA SEMARANG

Oleh:

Tri Yuniningsih, Neni Sriwahyuni

(Departemen Administrasi Publik, FISIP-UNDIP),

Prof.Soedarto, SH Street.Tembalang, Semarang.Jawa Tengah

Email: triyuniningsih67@yahoo.com,

Hp: 085865964390

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah memandang sangat pentingnya kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam Semarang dalam mengembangkan pariwisata di kota Semarang. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana peran Pemerintah dan Swasta dan pentingnya kemitraan dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang. Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah kemitraan antara Pemerintah dan Swasta sebagai aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang masih belum optimal. Tipe penelitian termasuk tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Penentuan informan dengan teknik *Snowball*, dengan *key informan* Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran Pemerintah dalam hal ini masih sangat dominan dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang dan peran swasta masih kurang. Hal ini disebabkan dalam pengembangan pariwisata pemerintah masih ingin menunjukkan povernya, sementara untuk berkembang terganjal pada regulasi yang menghambat. Pihak swasta dalam hal ini merasa kurang bisa bekerjasama dengan Pemerintah mengingat Pemerintah selalu justru dibalik semua kegiatan swasta menumpang dan hanya sekedar memfasilitasi. Sedangkan harapan swasta pemerintah bisa menjadi mitra yang nyata disemua aspek kegiatan pengembangan pariwisata. Rekomendasi yang disampaikan adalah peningkatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dengan merangkul semua elemen atau aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata berdasarkan asas sama- sama menguntungkan.

Keywords: Pemerintah, Pengembangan, Pariwisata, Swasta

GOVERNMENT - BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs) IN DEVELOPMENT OF TOURISM IN SEMARANG CITY

By:

Tri Yuniningsih, Tri Yuniningsih, Neni Sriwahyuni
(Department of Public Administration, FISIP-UNDIP),
Prof. Soedarto, SH Street. Tembalang, Semarang. Central Java
Email: triyuniningsih67@yahoo.com,
Mobile: 085865964390

ABSTRACT

The background of this research is to see the importance of the partnership between the government and the private sector in Semarang in developing tourism in the city of Semarang. The research objective is to describe the role of the Government and the Private Sector and the importance of partnerships in the development of tourism in the city of Semarang. The problem faced so far is that the partnership between the Government and Private actors involved in developing tourism in the city of Semarang is still not optimal. qualitative approach. Data collection is done by interview and observation. Determination of informants with the Snowball technique, with the key informant of the Semarang City Tourism Office. From the results of the study it can be seen that the Government's role in this case is still very dominant in tourism development in Semarang City and the role of the private sector is lacking. showing its power, while developing it is hampered by inhibiting regulations. The private sector in this case feels that it is unable to cooperate with the Government considering that the Government is always behind all private activities to hitch a ride and only facilitate it. While the hope of the private sector can be a real partner in all aspects of tourism development activities. The recommendations presented were an increase in partnerships between the government and the private sector by embracing all elements or actors involved in tourism development.

Keywords: *Government, Development, Tourism, Private*

A. PENDAHULUAN

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah dari: (1) Victoria M. Waligo, Jackie Clarke, Rebecca Hawkin(2001), *Implementing Sustainable Tourism: Multi Stakeholder Involvement Management (MSIM) Framework, Tourism Managemant*. (2) Albert N. Kimbu and Michael Z. Ngoasong(2013) *Centralized Decentralization of Tourism Development : A Network Perspective, Annals of Tourism Research*. (3) Carl Crafton & Anne Permalof (2005), Fokus penelitiannya tentang proses kebijakan publik dan *networking*, dimana temuan penelitiannya adalah Peran media massa sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan politik, akan tetapi *content* berita menjadi hal yang penting.(4) Bach&Niklasson (2012), Fokus penelitiannya adalah *Principal dan Agen Theory*, dimana temuan penelitiannya adalah Kebijakan yang didelegasikan kepada agen sebaiknya dilakukan dengan mekanisme

akuntabilitas dan transparansi.(5) Tri Yuniningsih (2018), Analisis Jaringan Aktor dalam Pengembangan Pariwisata kota Semarang.

Teori yang dipakai berkaitan dengan kemitraan adalah dari Howlett dan Ramesh, yang dimaksud dengan *policy network* (jejaring kebijakan) adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah, masyarakat termasuk privat (Yuniningsih,2018:47). Aktor-aktor kebijakan publik sering disebut sebagai *stakeholders*. Kerjasama antara organisasi publik dengan aktor-aktor atau *stakeholders* menimbulkan organisasi *hybrid* semacam *cluster* dan *quano*. Savas (dalam Suwitri,2011) menyebut hubungan organisasi publik dengan privat sebagai *public-private partnerships*. UN ESCAP (dalam Yuniningsih,2018) meneliti konsep *governance* dan aktor yang terlibat (*government*, militer dan masyarakat sipil) dalam pembuatan keputusan dan implementasinya baik dari struktur formal maupun informal. *Good governance* tercipta apabila keseluruhan aktor aktif terlibat dalam proses kebijakan sejak pembuatan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan. Howlett dan M. Ramesh (dalam Yuniningsih,2018:56) mengemukakan bahwa aktor kebijakan (*policy aktor*) merupakan *policy subsystem* yang berada dalam jejaring kebijakan antara *organization of the international system*, *organization of the society* dan *organization of the state*. Aktor kebijakan terdiri atas : 1) *elected officials* yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 2) *appointed officials* atau pejabat politik yang ditunjuk oleh pejabat politik terpilih untuk duduk dalam birokrasi, 3) *interest group*, 4) *research organization*, 5) media massa. Aktor-aktor tersebut saling berinteraksi untuk memberikan persetujuan (pro) maupun ketidaksetujuan (kontra) terhadap suatu kebijakan. Interaksi tersebut membentuk koalisi. Seringkali media massa menjadi perangkap pemicu (*trigger device*) dari kuat lemahnya hubungan antar aktor. Pendapat ini dikemukakan Cobb dan Elder (dalam Tri Yuniningsih,2018:56-57). Cobb dan Elder mengemukakan bahwa aktor kebijakan terdiri dari pemerintah dan sekumpulan publik yang mengetahui dan tertarik dengan urusan publik dan yang mempunyai pemimpin opini, dan media massa yang menjadi pemicu bagi kuat lemahnya tekanan publik tersebut terhadap pemerintah agar suatu urusan publik tersebut (isu) menjadi *policy output*. Peran media massa sangat penting dalam membangkitkan perhatian, memprovokasi aksi, melemahkan penentangan, menunjukkan kekuatan komitmen dan dukungan. Dalam setiap proses kebijakan publik terdapat aktor-aktor yang memainkan peran masing-masing dari proses pembuatan kebijakan hingga proses evaluasi kebijakan. Mengacu pendapat Viney (dalam Suwitri,2011), aktor atau *stakeholders* dapat dipilah ke dalam 4 kategori yaitu a) primer: aktor dengan pengaruh yang tinggi dan mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara *partner*; b) sekunder: aktor dengan pengaruh yang tinggi tetapi tingkat kepentingan yang rendah, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara *consult*; c) sekunder kedua atau tersier, yaitu aktor dengan pengaruh yang rendah tetapi memiliki kepentingan yang tinggi, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara *inform*; d) aktor sekunder ketiga atau kwarter, yaitu aktor dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara *control*. Dalam Bukunya Anderson (tahun 1979; Lester dan Stewart, tahun 2000: 2) mengatakan bahwa aktor yang terlibat memiliki peran sendiri – sendiri dalam suatu kebijakan yang meliputi : Legislatif, Eksekutif, Yudikatif,Instansi administratif, kelompok kepentingan dan warga masyarakat.Dari banyak pendapat pakar di atas dapat diketahui bahwa aktor dalam kebijakan adalah mereka

yang terlibat secara langsung pada pelaksanaan suatu kebijakan, karena tanpa adanya aktor kebijakan tidak akan bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Latar belakang penelitian ini adalah memandang sangat pentingnya kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam mengembangkan pariwisata di kota Semarang. Permasalahan yang dihadapi adalah kemitraan antara Pemerintah dan Swasta sebagai aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang masih belum optimal (RPJMD Kota Semarang tahun 2016 -2021). Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana peran dan kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang. Dalam penelitian ini hanya akan mengkaji tentang bagaimana peran dan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Peran Pemerintah

Sebagai tindak lanjut terhadap Undang-Undang Kepariwisata No.10 Tahun 2009, dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepariwisataan serta untuk meningkatkan daya saing Kota Semarang yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, maka Pemerintah Kota Semarang membuat Perda tentang Kepariwisata Nomor 3 Tahun 2010. Perda ini sebagai dasar Regulasi dari Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan tentang Kepariwisata. Berkaitan dengan masalah kemitraan dan kerjasama aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang, dan dengan mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab IX, Bab X dan Bab XI yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perda kota Semarang Nomor 3 tahun 2010 tentang Kepariwisata, Bab X, Bab XI dan Bab XII dapat diketahui bahwa masalah kerjasama dan kemitraan serta koordinasi antar aktor yang terlibat sudah diatur dengan jelas. Namun dalam kenyataannya belum optimal. Permasalahan dalam pengembangan pariwisata, terutama dalam hal kemitraan dan kerjasama dengan *stakeholder* dapat dilihat dari Evaluasi Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2011 sd 2015 yang dilaksanakan tahun 2016 sbb :

“Pada saat pelaksanaan program/kegiatan pada sasaran pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata di Kota Semarang terdapat kendala yang dihadapi, sebagai berikut: (1) terbatasnya jumlah media bahan dan promosi kepariwisataan Kota Semarang dan (2) kurang koordinasi dengan asosiasi pelaku usaha pariwisata, khususnya biro-biro perjalanan wisata.”

Selain itu dalam kaitannya dengan program pengembangan kemitraan kepariwisataan yang ditarget 25% dengan indikasi kinerja okupansi hotel rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir hanya tercapai 5,7%. (RPJMD, 2016), Perkembangan jumlah pelaku pariwisata juga tidak mengalami peningkatan dimana rata-rata selama 3 (tiga) tahun terakhir tetap di tingkat 10%.

Dalam tahapan implementasi terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, dan diidentifikasi berasal dari kalangan

birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan, dan organisasi-organisasi komunitas (James Anderson, 2003). Pada umumnya birokrasi / pemerintah dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan. Pandangan ini berlaku untuk implementasi kebijakan Negara maju maupun Negara yang sedang berkembang (NSB). Birokrasi mempunyai wewenang yang besar untuk sepenuhnya menguasai “area” implementasi kebijakan dalam wilayah operasinya karena mereka mendapat mandate dari lembaga legislatif. Berkaitan dengan peran inilah maka pemerintah kota Semarang dalam penelitian memiliki peran melaksanakan kebijakan tentang kepariwisataan yang langsung dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Dinas dalam hal ini menjadi koordinator semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di kota Semarang.

Tabel 1

Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata kota Semarang

Pemerintah	Peran
Disbudpar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan Evaluasi 2. Keuangan 3. Umum dan kepegawaian 4. Urusan Bidang Kebudayaan, Kesenian, Pembinaan Industri Pariwisata, Pemasaran (Promosi)
Bappeda	Perencanaan Pengembangan Pariwisata yang tersusun dalam Renstra Kota Semarang
Dishubkominfo	Penyediaan akses dan infrastruktur berkaitan dengan kepariwisataan
Diskintaru	Memfasilitasi dalam hal homestay, penginapan
Dinas Pekerjaan Umum	Memfasilitasi sarana dan prasaranan jalan
Dinas Pertamanan	Memfasilitasi keberadaan taman kota

Dinas Pertanian	Memfasilitasi bidang pertanian, peternakan,
Dinas Kehutanan	Memfasilitasi bidang kehutanan
Disperindag	Memfasilitasi bidang industri dan perdagangan
Koperasi dan UMKM	Memfasilitasi bidang koperasi dan UMKM
BBWS	Memfasilitasi area yang menjadi wilayah kerjanya
Satpol PP	Penegkan peraturan dan penertiban wilayah sekitar objek wisata
BP2KS	Memberikan ide dan gagasan pengembangan wisata khususnya pada bidang Promosi wisata Kota Semarang
Pokdarwis	Ujung tombak pengembangan wisata di level terbawah
DKS	Memberikan ide gagasan dan masukan kepada <i>leading sector</i> , sekaligus koordinator kesenian diluar Pemerintah
Tematik	Memberikan ide gagasan dan masukan kepada <i>leading sector</i> terutama pembinaan kampung tematik
DPRD	Formulasi. budgeting, evaluasi
Satpam Obvit	Pengamanan dan kenyamanan pada objek dan wisatawan

Sumber : data diolah 2018

b. Peran swasta

Peran swasta dalam hal pengembangan pariwisata kota Semarang dilakukan oleh beberapa komponen yang ada di masyarakat. Komponen tersebut adalah PHRI, ASITA, PUTRI, APPS dan KADIN . Temuan lapangan dari penelitian ini adalah Pihak swasta dalam hal ini merasa kurang bisa bekerjasama dengan Pemerintah mengingat Pemerintah cenderung menumpang dibalik semua kegiatan swasta dan hanya sekedar memfasilitasi. Sedangkan harapan swasta pemerintah bisa menjadi mitra yang nyata disemua aspek kegiatan pengembangan pariwisata.

Tabel 2
Peran Swasta dalam pengembangan pariwisata kota Semarang

Swasta	Peran
PHRI	Memberikan ide gagasan dan masukan kepada <i>aktor utama</i> , serta Pengelolaan hotel dan restoran
ASITA	Memberikan ide gagasan dan masukan kepada <i>aktor utama</i> , serta Koordinator biro perjalanan dan travel
PUTRI	Memberikan ide gagasan dan masukan kepada <i>aktor utama</i> serta Koordinator taman dan tempat rekreasi
APPS	Memberikan ide gagasan dan masukan kepada <i>aktor utama</i> , serta Koordinator pelaku usaha pandanaran
KADIN	Memberikan ide gagasan dan masukan kepada <i>aktor utama</i> , serta Koordinator bidang perdagangan dan UMKM

Sumber : data diolah 2018

c. Pola kemitraan Pemerintah dan Swasta

Wilks dan Wright mendukung ‘tipologi’ Rhodes yang dikutip Howlett dan Ramesh (1995: 123) dengan alasan bahwa jaringan bervariasi sepanjang lima dimensi utama: (1) kepentingan anggota jaringan, (2) keanggotaan, (3) tingkat ketergantungan antar anggota, (4) sejauh mana jaringan terisolasi dari jaringan lain, (5) variasi dalam distribusi sumber daya antar anggota. Howlett dan Ramesh (1995: 131) mengutip pendapat Van Waarden (1992) telah menyatakan, jaringan kebijakan ini akan bervariasi sesuai dengan jumlah dan jenis peserta dan hubungan mereka satu sama lain.

Tabel 3
A Taxonomy Of Policy Network

		Number/Type of Network Participations			
		State Agencies	One Major Societal Group	Two Major Societal Groups	Three or More Groups
State/Societal Relations With in Network	State Directed	Bureaucratic Network	Clientelistic Network	Triadic Network	Pluralistic Network
	Society Dominated	Participatory statis Network	Caputured Network	Corporatist Network	Issue Network

Sumber : modeled after Frans Van Waarden, 'Dimentions and Types of Policy Network'. European Journal of Political Research 21, 1/2 (1992): 29-52

Berdasarkan kriteria ganda dari jumlah dan lokasi kepentingan kebijakan yang relevan dan pengetahuan, dapat ditemukan delapan jenis dasar jaringan kebijakan. *Bureaucratic Network* merupakan hal yang utama dimana interaksi antara anggota subsistem berlangsung secara efektif dalam Negara. Pada ekstrem yang lain, jaringan masalah adalah satu dimana interaksi utama terjadi diantara sejumlah besar aktor sosial. Antara dua ekstrem ada enam kemungkinan lain. *Participatory statis Network*, merupakan orang-orang dimana aktor Negara memainkan peran utama namun didominasi oleh anggota masyarakat yang tidak terorganisir. *Pluralist Network*, adalah mereka dimana sejumlah aktor besar terlibat dalam subsistem tetapi aktor Negara yang dominan. Ketika hanya ada satu aktor sosial utama yang dihadapi Negara, dua jenis namun jaringan yang ada. Dalam *Clientelistic Network*, Negara mendominasi aktor sosial, sedangkan dalam *Captured Network* sebaliknya adalah benar. Ketika dua aktor sosial menghadapi Negara, jika Negara mendominasi subsistem tersebut dapat disebut sebagai *Triadic Network* . ketika aktor sosial mendominasi Negara, subsistem tersebut lebih mirip dengan *traditional corporatist network*.

Berkaitan dengan pola kemitraan dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang, maka Pemerintah sejatinya membutuhkan swasta dalam hal penyediaan barang – barang dan pelayanan yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah, sebagai timbal baliknya maka, pemerintah akan memberikan stabilitas *financial* untuk proyek – proyek yang dijalankan oleh swasta. Dan apabila dikategorikan maka termasuk dalam kategori *Pluralist Network*. Adapun kelebihan dari pola ini adalah:

1. Memungkinkan entitas – entitas Pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk proyek dan kemitraan, karena tanpa pola kemitraan ini, swasta akan mengalami kesulitan dalam menyatukan paket pembiayaan yang besar ditambah jumlah otoritas pajak yang sangat besar.
2. Proyek untuk barang publik yang dikerjakan swasta terdani, karena tanpa keterlibatan pemerintah dalam bentuk pembiayaan proyek secara langsung atau jaminan pinjaman atau bantuan lainnya, proyek tersebut bisa saja terhenti atau berjalan lambat.
3. Bagi swasta yang mampu berpartisipasi dalam proyek besar pemerintah maka secara tidak langsung ia akan mendapat nama yang patut diperhitungkan dan visibilitas dimana hal ini akan memudahkannya dalam mendapatkan klien dari sektor swasta.
4. Resiko keuangan rendah, karena ketika swasta bermitra dengan pemerintah maka kekhawatiran terkait kekurangan dana akan berkurang karena pemerintah memiliki pendapatan berkelanjutan dan kapasitas pinjaman untuk memenuhi kewajiban.

Selain segi kelebihan, kemitraan ini juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya:

- 1) Kecepatan lambat birokrasi, pemerintah memiliki proses penawaran formal yang begitu panjang dan rumit, sehingga bagi pihak swasta yang biasa bekerja cepat, hal ini akan menghambat pekerjaan mereka.
- 2) Pemerintah cenderung memilih siapa yang menang, dalam hal ini pemerintah memiliki kuasa lebih untuk memilih perusahaan secara bebas, melalui proses persaingan ini maka perusahaan mana yang menang maka perusahaan itulah yang akan dipilih.
- 3) Pergeseran politik dapat meniadakan kemitraan, hal ini karena pihak pemerintah terpilih hanya memiliki waktu yang terbatas selama masa kepemimpinannya, kecenderungan untuk tidak meneruskan proyek kepemimpinan pemerintah sebelumnya menimbulkan kekhawatiran dalam keberlangsungan anggaran proyek.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bertipe deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penulisan yang berisi uraian tentang suatu objek sebagaimana adanya waktu tertentu, untuk memaparkan secara rinci serangkaian data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan (Yudiono , dalam Riris Ning Pambudi 2014:41). Data primer diperoleh dari nara sumber yang ditentukan secara *snoball*, dengan key informan Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan, media elektronik, dan Internet, serta jurnal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, verifikasi data, dan konklusi. Untuk validasi data dengan menggunakan *triangulasi* sumber. Fenomena yang diamati adalah Peran Pemerintah dan peran bisnis dalam pengembangan pariwisata kota Semarang serta pola kemitraan yang terjalin dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang masih belum optimal, mengingat masing –masing masih berjalan sendiri-sendiri, peran pemerintah masih sangat dominan dan rasa enggan /kurang nyaman swasta menjalin kemitraan dengan pemerintah, sehingga rekomendasi yang disampaikan adalah meningkatkan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dengan merangkul semua elemen atau aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata berdasarkan asas sama- sama menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E, 2006, *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Muffin Company.
- Albert N. Kimbu Michael Z, Ngoasong, 2013, Centralized Decentralization of Tourism Development : A Network Perspective, *Annals of Tourism Research*, vol. 10, 235 – 259.
- Chui, Hua Lie et al., 2012, Improving Tourism Policy Implementation : The use of Hybrid MCDM Model, *Tourism Management*, (33), 413-426.
- Dang Wang, John Ap, 2013, *Faktor Affecting Tourism Policy Implementation : Conceptual Framework and Case Study in China*. *Journal of Tourism Management*, (36), 221- 233.
- Howlett, Michel, dan Ramesh. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: University Press.
- Meitisa Vansa Simanjuntak, 2015, Analisis Jaringan Aktor dalam Perlindungan Anak di Kota Semarang, Tesis, MIA FISIP-UNDIP, Semarang
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyani, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media : Yogyakarta.
- Suwitri, Sri, 2011, *Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik: Suatu Kajian Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tri Yuniningsih, 2018, *Analisis Jaringan Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pariwisata kota Semarang*, Desertasi, PRODAP FISIP –UNDIP, Semarang
- Victoria M. Waligo, Jackie Clarke, Rebecca Hawkin, 2012, Implementing Sustainable Tourism: Multi Stakeholder Involvement Framework, *Tourism Management*, 30 1- 12.

Sumber Lain

Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
Perda Kota Semarang No.9 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan

KEMITRAAN UNM DAN PEMERINTAH LOKAL DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEPALA SEKOLAH

Oleh
Dr. Andi Cudai Nur, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami realitas kemitraan dalam pendidikan dan latihan bagi calon kepala sekolah, dan kepala sekolah untuk mendapatkan kompetensi dan peningkatan profesionalisasi. Metodologi kualitatif dipergunakan dengan pendekatan analisis, dimana lokus adalah Universitas Negeri Makassar dan Pemerintah Kabupaten Gowa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sumber datanya, dokumen, hasil wawancara dan observasi kemitraan, dengan informan yaitu Pengelola pada Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNM dan Pengelola pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah “kemitraan perguruan tinggi dapat berhasil secara maksimal bila dibangun dari bawah dalam hal ini program studi atau jurusan berdasarkan akar masalah dan mendapatkan dukungan mitra yaitu pemerintah lokal, serta dilaksanakan dengan mempergunakan pendekatan yang sesuai dan adanya hubungan intensif antara semua pihak yang bermitra”. Temuan penting dari penelitian ini adalah kemitraan pada perguruan tinggi dapat memperluas jaringan kerja kemitraan (*partnership networking*), dan interkoneksi antar berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder untuk berbagi berbagai sumberdaya pada perguruan tinggi, pemerintah lokal, masyarakat setempat pada lokasi penelitian, dan dunia usaha (*entrepreneurship*).

Kata kunci: kemitraan, perguruan tinggi, program pendidikan dan latihan, serta Pemerintah lokal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 49 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah ini menyatakan: “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.”

Menurut Tony Lendrum, “*if you always do what you always done, then you will always get what you have always got, strategic partnering is fundamentally a process of change*”. Karena pada dasarnya kemitraan menurutnya, “*In partnering it will be the manage change of many, as well as the uncontrollable and dynamic change in a few, that will ensure success*”. Dimana kemitraan yang strategis adalah kerjasama jangka panjang yang didasarkan saling percaya antarlembaga yang bermitra dan memberikan manfaat bagi semua institusi yang bermitra (Lendrum, 2003:7).

Pada intinya kemitraan harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk melakukan kerjasama, dalam hal ini pihak yang bermitra. Kemudian Visi Kemendiknas 2014 adalah: “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif“. Sekolah dituntut untuk lebih mandiri, lebih mampu membangun hubungan kemitraan dengan memperkuat partisipasi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), bersikap lebih terbuka dan akuntabel. Pengembangan Kepala Sekolah semakin kuat dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah, yang dinyatakan pada pasal 1 ayat 1, yaitu: “Untuk dapat diangkat sebagai Kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kompetensi kepala sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional”. Kemudian diperkuat lagi dengan terbitnya Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dimana seleksi substansi merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan sekarang ini oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) sekaligus sebagai penyelenggara pelatihan calon kepala sekolah.

Atas dasar pertimbangan kebijakan yang telah dikemukakan di atas, maka Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar mulai tahun akademik 2008 melaksanakan program Diklat Kepala Sekolah yang berbasis kompetensi yang diharapkan dapat melahirkan tenaga kependidikan khususnya kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang profesional. Salah satu bentuknya adalah dengan memberikan pendidikan akademik melalui jalur Diklat Kepala Sekolah yang kompeten dan profesional. Penyelenggaraan Diklat ini diselenggarakan oleh Jurusan Administrasi Pendidikan dalam hal ini pengelola khusus sebagai pelaksana, yang bertugas mengembangkan inovasi kurikulum bermuatan pengetahuan praktis, yaitu 60% mata kuliah praktik dan hanya 40% teori. Penyelenggara program ini adalah Jurusan Administrasi Pendidikan yang bermitra dengan semua kabupaten/kota di Sulawesi-Selatan sejak tahun 1998 sampai sekarang. Melalui pendidikan dan pelatihan, para peserta diproyeksikan akan mengemban tugas sebagai kepala sekolah, dengan harapan mampu mengembangkan kompetensi yang strategis dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan untuk mewujudkan peserta didik yang kompetitif pada era globalisasi demi pembangunan bangsa dan negara.

Penyelenggaraan kemitraan dalam pendidikan dan pelatihan kepala sekolah yang diselenggarakan Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNM mempunyai model yang berbeda-beda pada pelaksanaan kemitraan yang telah dilakukan pada sembilan kabupaten/kota di Sulawesi-Selatan, yang mana dipengaruhi oleh sistem pengelolaan, pembiayaan, rekrutmen, dan mekanisme pelaksanaan kemitraan.

B. Rumusan Masalah

Fokus masalah dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana realitas kemitraan Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Makassar dengan Pemerintah Kabupaten Gowa di Sulawesi-Selatan dalam program pendidikan dan pelatihan Akta Kekepalasekolahan yang relevan dengan kebutuhan stakeholder, dan secara visual akan mendukung kualitas alumni program Akta Kekepalasekolahan. Kemudian sejauh mana keterlibatan pemimpin perguruan tinggi, pemimpin Pemerintahan Kabupaten Gowa, dan stakeholder dalam merumuskan kebijakan kemitraan khususnya kemitraan yang diterapkan dalam implementasi program Akta Kekepalasekolahan.

Untuk memperinci rumusan tersebut maka ditelusuri peran ilmu administrasi, kebijakan publik, manajemen strategi, teori organisasi, dan kemitraan yang menjadi latar dari penelitian ini:

1. Bagaimanakah kondisi umum, karakteristik fisik lingkungan dan prasarana serta sarana yang menjadi latar dari penelitian yakni Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Makassar dan Kabupaten/kota mitra?
2. Bagaimanakah gambaran umum tentang kebijakan kemitraan khususnya kemitraan dalam Program Diklat Kepala Sekolah?
3. Bagaimanakah gambaran kemitraan Program Diklat Kepala Sekolah yang diterapkan pada Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar yang dapat mendukung kualitas proses dan produk yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah yang telah dikemukakan pada bagian rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas pola kemitraan Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Makassar dengan Kabupaten Gowa di Sulawesi-Selatan dalam program pendidikan dan pelatihan Akta Kekepalasekolahan yang relevan dengan kebutuhan stakeholder, dan secara visual akan mendukung kualitas alumni program Akta Kekepalasekolahan. Kemudian sejauh mana keterlibatan pemimpin perguruan tinggi, pemimpin kabupaten/kota, dan stakeholder dalam merumuskan kebijakan kemitraan khususnya model kemitraan yang diterapkan dalam implementasi program Akta Kekepalasekolahan.

Untuk mencapai tujuan itu ditelusuri peran ilmu administrasi, kebijakan publik, administrasi pendidikan, manajemen strategi, teori organisasi, dan kemitraan yang menjadi latar dari penelitian ini:

1. Mempelajari kondisi umum, karakteristik fisik lingkungan dan prasarana serta sarana yang menjadi latar dari penelitian yakni Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Makassar dan Kabupaten/kota mitra.
2. Memberikan gambaran umum tentang kebijakan kemitraan khususnya kemitraan dalam Program Diklat Kepala Sekolah

3. Memberikan gambaran kemitraan Program Diklat Kepala Sekolah yang diterapkan pada Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar yang mendukung kualitas proses dan produk yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan akan memberi manfaat bagi pengembangan bidang ilmu administrasi, kebijakan dan pengembangan kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan akademik pendidikan perguruan tinggi. Pada satu sisi penelitian ini diharapkan akan memberi arah baru dalam menjelaskan bagaimana perguruan tinggi berinteraksi dengan lingkungan sosial dalam hal ini bermitra dengan stakeholder. Kemudian bagaimana para pemimpin, mendorong tindakan kemitraan Universitas Negeri Makassar, Kabupaten Gowa dan stakeholder dalam kemitraan program Diklat Kepala Sekolah dan bagaimanakah penerapan kemitraan Program Diklat Kepala Sekolah Universitas Negeri Makassar dengan Kabupaten Gowa di Sulawesi-Selatan.

1. Bagi Kehidupan Masyarakat

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna untuk menemu-kenali problematika sosial dalam keprofesionalan kepala sekolah agar memiliki kompetensi dan keterampilan manajemen berbasis sekolah. Sehingga hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat bagi upaya mencari solusi.

2. Bagi para pembuat kebijakan,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi mereka dasar pengetahuan Administrasi dan kebijakan publik yang diperlukan di dalam membuat kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan para stakeholder dan juga sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan, sehingga kepala sekolah dapat lebih profesional dan melengkapi kompetensinya. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran umum untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kemitraan pendidikan.

KAJIAN PUSTAKA

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus melaju mengikuti dinamika kehidupan masyarakat dunia, yang mana sangat membutuhkan manusia yang cerdas komprehensif. Untuk mendukung perkembangan tersebut dibutuhkan partnership atau kemitraan untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang handal dan kompeten dengan mengacu pada ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan agar dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memasuki abad milinea. Perubahan global yang begitu dahsyat membawa pengaruh dalam pranata sosial dan berimplikasi pada nilai-nilai kehidupan yang semakin kompleks, karena terciptanya kreativitas dan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi pergeseran kebutuhan

manusia dalam abad kosmopolitan. Pergeseran ini terus berlanjut mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi yang mewarnai kehidupan masyarakat internasional yang semakin kompetitif. Bell dan Watkins (1996), menyebutkan bahwa partnership atau kemitraan pendidikan berada dalam ruang pembatasan 4 tipologi hubungan interorganisasi, yaitu: a. Kompetisi, b. Kooperasi, c. Koordinasi, dan d. Kolaborasi.

A. Administrasi

Ilmu administrasi selalu menekankan kerjasama menuju terwujudnya tujuan tertentu (Siagian, 1988:2). Ilmu Administrasi merupakan hasil pemikiran dan penalaran manusia yang disusun berdasarkan dengan rasionalitas dan sistematika yang mengungkapkan kejelasan tentang objek forma, yaitu pemikiran untuk menciptakan suatu keteraturan dari berbagai aksi dan reaksi yang dilakoni oleh manusia dan objek material, yaitu manusia yang melakukan administrasi dalam bentuk kerjasama menuju terwujudnya tujuan tertentu (Makmur, 2007:5). Melalui kerjasama dapat dilakukan saling berbagi pengetahuan serta ketrampilan dan dengan itu sebuah tim mampu menyelesaikan tugas secara efektif, ketimbang dilakukan oleh seorang individu (Arismunandar, 2009).

Kemitraan perguruan tinggi dengan stakeholder, memerlukan dua pelaku yang terlibat, yakni stakeholder intern dan stakeholder ekstern yaitu : “Adapun stakeholder intern, yaitu: mahasiswa, dosen, dan tenaga administrasi kemudian stakeholder ekstern, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masing-masing stakeholder bekerjasama sebagai mitra, dalam hal ini tidak ada pihak yang bersifat membawahi pihak lain. Adanya tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai. Setiap tujuan bersama berdasarkan komitmen tanggung jawab sendiri” (Kumorotomo, 1999:92)

B. Kebijakan

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang berarti negara. Kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris “*policie*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Kemitraan (*partnership*) sebagai embrio komunitas kebijakan gagasan-gagasan visioner yang diungkapkan sebelumnya mengandung spiritualitas yang cemerlang. Akar dari semua persoalan terletak pada absennya kesatuan, visi, dan aksi, yang sebenarnya bisa diatasi dengan mengembangkan suatu komunitas kebijakan, dapat dikembangkan nilai, norma, atau aturan yang sama, serta terbuka peluang untuk mengembangkan visi bersama, mendialogkan agenda aksi, serta mengintegrasikan energi dan sumber daya dalam iklim interaksi dan konsultasi yang lebih intensif.

C. Manajemen Strategi dan Organisasi

Manajemen strategi dalam pengembangan pendidikan secara sadar atau tidak kini tengah bergerak menjadi satu pasar dunia, suatu pasar yang efisien dan transparan, yang mencakup daerah-daerah yang tak terbatas. Globalisasi mau tidak mau akan menjadi trend dari setiap organisasi baik organisasi usaha, sosial maupun organisasi pendidikan. Negara yang tidak mau ikut dalam pengefisienan dan pentransparanan tersebut akan ketinggalan karena dinamisnya perubahan.

Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Gibson dkk. (1996:6), mengemukakan: "organisasi adalah suatu unit terkoordinasi terdiri setidaknya dua orang dan berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran". Organisasi juga merupakan unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua individu atau lebih dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan (Robins dkk, 2008:5).

Luthans (2006:121) mengemukakan "organisasi jaringan dan organisasi virtual dapat membantu persaingan dalam ekonomi global dengan atribut kunci: teknologi, oportunistik, tanpa batas, kepercayaan dan keunggulan". Di mana aliansi dan kemitraan dengan organisasi lain dapat menjangkau seluruh dunia, kesaling-tergantungan spasial dan temporer dengan mudah dapat menembus berbagai batasan, dan fleksibilitas memungkinkan mudahnya penugasan dan pengalokasian kembali untuk memanfaatkan dengan cepat berbagai peluang akibat pergeseran pasar global" (Luthans, 2006:122).

D. Kemitraan

Kata kemitraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata *mitra* yang berarti teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja dan rekan. Kemudian "mitra" dalam konteks ekonomi, yang pada pokoknya sama dengan "teman" atau "kawan" dalam bahasa sehari-hari. Kemudian mendapat awalan ke dan akhiran *an*, menjadi kemitraan yang berarti pertemanan, persahabatan, rekanan, dan kerjasama. Padanan bahasa Inggrisnya adalah "*friendship*" dan "*partnership*". Artinya, sumberdaya dan kompetensi masing-masing digabungkan untuk mencapai sinergi, menuju peningkatan volume maupun kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.

Menurut Teece (1992), kemitraan adalah "suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu". Kemitraan yang baik adalah yang mampu memberi keuntungan atau nilai lebih bagi masing-masing pihak yang bermitra, dengan kata lain memberi *win-win solution*. Nilai lebih ini tidak harus berupa materi, namun biasa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas layanan (seperti: pendidikan, kesehatan, penyediaan tenaga kerja), bertambahnya akses seperti kerjasama sosial ekonomi, dan pendidikan antara negara.

Linton (1995) mengemukakan alasan mengapa harus bermitra, yaitu: untuk bisa mencapai tujuan yaitu kesejahteraan bersama (kesejahteraan ekonomi, sosial dan menjaga keamanan

bersama), karena beberapa pihak seringkali tidak bisa melakukannya sendiri-sendiri. Penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya (fisik-geografis, sosial, dan ekonomi) yang dimiliki oleh masing-masing kelompok sehingga ‘memaksa’ untuk saling berbagi sumber daya yang dimiliki dan melakukan kerjasama.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Pendekatan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moeleong, 1990:3). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus *grounded theory*. Bogdan dan Biklen (2007) menyatakan bahwa studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Sementara Yin (1987) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Ary, Jacobs, dan Razavieh (1985) menjelaskan bahwa dalam studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam.

Para peneliti berusaha menemukan semua variabel yang penting. Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya. Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran detail gejala atau fenomena yang diteliti. Hasil akhir penelitian memberikan deskripsi tipologi atau pola-pola mengenai fenomena tersebut (Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2008:42).

B. Fokus Masalah Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian ini berfokus pada pola kemitraan Program Akta Kekepalasekolahan Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Makassar dengan relevansi kebutuhan *stakeholder*. Para pemimpin di lingkungan Universitas Negeri Makassar diharapkan dapat memformulasi dan merumuskan kebijakan dalam memformulasi kemitraan pada program dan kegiatan Akta Kekepalasekolahan AP FIP UNM untuk mencapai tujuan perbaikan profesionalitas dan kualitas alumni.

1. Fokus penelitian adalah bagaimana kemitraan yang diterapkan pada universitas negeri makassar dalam implementasi kemitraan Program Diklat Kekepalasekolahan dalam relevansi program dan kegiatan dengan kebutuhan stakeholder, dengan pemanfaatan sumber daya manusia, sarana dan dana.
2. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:
Fokus masalah pertama: Bentuk (wujud) kemitraan Program Diklat Kepala Sekolah Administrasi Pendidikan FIP UNM

Fokus masalah dua: Kemitraan yang diterapkan di Universitas Negeri Makassar menunjang kualitas proses dan kualitas kemitraan Program Diklat Kepala Sekolah Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNM

Fokus masalah tiga: Pemanfaatan sumber daya (manusia, sarana, dan dana) dalam penerapan kemitraan Program Diklat Kepala Sekolah Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Makassar

- Fokus 1: "Bentuk (wujud) kemitraan yang diterapkan" dalam implementasi kebijakan kemitraan Program Diklat Kepala Sekolah: Penerapan Program Diklat Kepala Sekolah: Pengembangan kurikulum; b) Pelaksanaan perkuliahan; c) Pengadaan sarana penunjang pembelajaran (perkuliahan): (laboratorium, perpustakaan, komputer, fasilitas praktek lapangan, dan lain-lain); d) Peningkatan kualitas SDM (dosen, tenaga administrasi, laboran, dan pustakawan); e) Penyelenggaraan pendidikan profesional dalam perkuliahan guru sekolah dasar; f) Bantuan / guru besar / dosen luar biasa; g) Penataran/pelatihan metodologi penelitian; h) Melaksanakan penelitian bersama; i) Menyelenggarakan seminar penelitian;
- Fokus 2: Besarnya dukungan pemerintah pada kemitraan Program Diklat Kepala Sekolah Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNM terhadap kualitas proses dan kualitas produk implementasi kemitraan: a) Besarnya dukungan penerapan kemitraan Program Diklat Kepala Sekolah AP FIP UNM, terhadap perencanaan kemitraan; b) Besarnya dukungan penerapan kemitraan Program Diklat Kepala Sekolah AP FIP UNM, terhadap pengelolaan kemitraan; c) Besarnya dukungan penerapan kemitraan Program Diklat Kepala Sekolah AP FIP UNM, terhadap pengawasan kemitraan Program Diklat Kepala Sekolah AP FIP UNM
- Fokus 3: "Besarnya pemanfaatan sumber daya (manusia, sarana, dan dana), dalam penerapan kemitraan". Penerapan kemitraan program Diklat Kepala Sekolah: a) SDM; b) Sarana; dan c) Dana

C. Data dan Sumber Data

Subyek utama penelitian ini adalah lima (5) orang, yaitu dua (3) orang subyek pada Universitas Negeri Makassar, yaitu pengelola dalam hal ini, selaku Dosen Jurusan AP FIP UNM Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNM. Kemudian delapan (2) *stakeholder* sebagai pemangku kepentingan adalah pihak, SKPD Pendidikan Kabupaten Gowa, serta Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, mahasiswa program Diklat Kepala Sekolah AP FIP UNM, tenaga administrasi UNM, Pengelola pusat dan daerah. Data yang ditelusuri dan dihimpun dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian dan rumusan masalah: a) data umum dan konteks, menyangkut data umum dan lokasi; b) data subyek dan obyek, data ini berisi segala macam data tentang pikiran para subyek dan perubahan pemikiran.

D. Prosedur Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, dokumentasi dan wawancara untuk menganalisis kemitraan Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNM dengan Kabupaten Gowa Sulawesi-Selatan. Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara mendalam dan wawancara elit, dari subyek penelitian yang terpilih yaitu: 5 (lima), merupakan subyek yang dianggap mengetahui secara mendalam kemitraan Program Diklat Kepala Sekolah Jurusan AP FIP UNM: 3 (sebelas) subyek utama dan 2 (dua) stakeholder.

Dalam penelitian ini tidak dilakukan pentahapan dalam penjarangan data. Penjarangan data dan analisis data dilakukan bersamaan selama masa penelitian lapangan. Kegiatan penjarangan data lapangan yang dilaksanakan bersamaan dengan analisis data, selama 6 bulan.

Peneliti sebagai instrumen penelitian, dapat menyesuaikan cara penjarangan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak, dengan tehnik sebagai berikut: (1) observasi, dilakukan dengan menelusuri Program Studi untuk mendapatkan informasi tentang adanya kemitraan yang dilakukan; (2) dokumentasi, pencarian dokumentasi data tentang kemitraan Program Diklat Kepala Sekolah FIP UNM, dan (3) wawancara, jenis wawancara yang dipilih adalah sebagai berikut: 1) Wawancara mendalam, dan 2) Wawancara elit.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah tim peneliti sendiri yang secara langsung turun ke lapangan untuk menggali informasi melakukan observasi, penelusuran dokumen kemitraan dan wawancara langsung terhadap 5 (lima) informan, yang terdiri dari 3 (tiga) subyek utama yang cukup terpercaya di lingkungan Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNM serta 2 (dua) stakeholder di Kabupaten/Kota Makassar. Selain bertindak sebagai instrumen utama, tim peneliti juga bertindak sebagai pengolah dan penginterpretasi data, tim peneliti juga berfungsi sebagai pengumpul data. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti secara aktif mencari dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui observasi dokumentasi dan wawancara. Instrumen pendukung yang didayagunakan adalah format pedoman wawancara dan format observasi yang berisi masalah, submasalah, dan indikator penelitian.

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul peneliti dapat mulai mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksi hal-hal khusus menjadi hal-hal umum guna menemukan pola umum data. Data diorganisasi secara kronologis, kategori atau dimasukkan ke dalam tipologi, dan analisis data dilakukan sejak peneliti di lapangan.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan dilakukan melalui pengujian: empat kriteria, yakni; *credibility*, *dependability*, *confirmability* dan *transferability*. Prinsip dan kriteria ini diterapkan pula untuk melihat tingkat kepercayaan hasil penelitian ini. Kredibilitas penelitian akan terkait dengan tingkat kepercayaan orang lain terhadap hasil penelitian yang dilakukan, sehingga tertarik untuk menanggapi dan menghargai penelitian yang dilaksanakan. Pada penelitian ini dilakukan langkah kegiatan antara lain: proses pelaksanaan penelitian di lapangan dengan melakukan studi dokumentasi, wawancara sekaligus observasi yang dilakukan secara kontinu. Proses analisis data penelitian, senantiasa dilakukan konsultasi dan diskusi dengan ahli, yang dengan konsisten mengacu pada fokus masalah penelitian untuk menghindari bias. Dengan demikian, pada penelitian ini peneliti senantiasa melakukan langkah konfirmasi tentang tingkat kebenaran, kepercayaan proses dan hasil penelitian ini diupayakan tidak manipulatif dalam arti mengungkapkan yang sesungguhnya.

Kriteria dependabilitas dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diandalkan (reabilitas). Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan sebagai langkah kegiatan penelitian dengan tetap mempertahankan secara konsisten teknik pengumpulan data, dan konsistensi penggunaan konsep, proposisi dan teori selama penelitian dilaksanakan termasuk pada tahap proses penafsiran dan penarikan kesimpulan.

Kriteria konfirmabilitas dari hasil penelitian ini mengupayakan peningkatan keyakinan akan data penelitian yang diperoleh. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan diskusi dengan teman sejawat tentang temuan dan draft hasil penelitian. Disamping itu, melakukan audit trial ke berbagai pihak termasuk kepada promotor, melakukan kerja secara sistematis dan melakukan pemeriksaan secara teliti setiap langkah penelitian.

Kriteria transferabilitas dari hasil penelitian ini dilihat dari apakah hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan atau dapat diaplikasikan pada situasi lain. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan langkah penyesuaian karakteristik agar sama atau setidaknya mirip dengan situasi penelitian serta penyesuaian asumsi-asumsi yang digunakan.

DESKRIPSI UMUM

A. Deskripsi Umum Universitas Negeri Makassar sebagai Lokus Kemitraan

Sejak berdirinya pada 1 Agustus 1961, perguruan tinggi yang kini bernama Universitas Negeri Makassar (UNM) telah mengalami pergantian nama sebanyak empat kali. Ketika Pemerintah mengambil kebijaksanaan mengintegrasikan Kursus-kursus BI/BII ke dalam universitas, di Makassar dibentuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai wujud pengintegrasian BI Bahasa Indonesia, Ilmu Pasti, dan BI Swasta bersubsidi lainnya. FKIP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 30 tahun 1962, dan berlaku surut terhitung mulai 1 Agustus 1961, serta menjadi salah satu fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin.

Kedudukan sebagai fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin berlangsung sampai dengan tanggal 4 Januari 1964, karena dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1964 tanggal 5 Januari 1964, FKIP diubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 154 Tahun 1964, FKIP Universitas Hasanuddin di Makassar dinyatakan menjadi IKIP Yogyakarta Cabang Makassar terhitung mulai 1 September 1964. Selama berkedudukan sebagai IKIP Cabang, IKIP Makassar dipimpin oleh seorang Dekan Koordinator.

Status sebagai IKIP Yogyakarta Cabang Makassar berlangsung sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 272 Tahun 1965 yang mengesahkan berdirinya IKIP Makassar yang berdiri sendiri. Keputusan Presiden ini berlaku surut terhitung mulai 5 Januari 1965. Sejak 5 Januari 1965, IKIP Makassar telah mengalami berkali-kali perubahan nama sejalan dengan perubahan nama kota tempat kedudukan IKIP. Nama IKIP Makassar berubah menjadi IKIP Ujung Pandang ketika nama Kota Makassar berubah menjadi Kota Ujung Pandang pada tahun 1971, dan ketika nama Makassar kembali lagi pada tahun 1999, nama Ujung Pandang yang melekat pada institut ini pun turut pula berubah menjadi IKIP Makassar. Setelah dikonversi ke universitas berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus, nama institut ini berubah menjadi Universitas Negeri Makassar (UNM).

A. Visi dan Misi

Visi

Visi Universitas Negeri Makassar sebagai pusat pendidikan, pengkajian, dan pengembangan pendidikan, sains, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan dan kewirausahaan.

Misi

1. Menghasilkan sumber daya manusia profesional di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang memiliki:
 - a. Ketakwaan, moral, nilai-nilai etika, integritas intelektual, toleransi perbedaan, serta aspirasi memperjuangkan kebenaran dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - b. Kemajuan dan kemampuan untuk berlatih kepemimpinan dan keintelektualan pribadi dalam bidang pekerjaan yang dipilihnya;
 - c. Pikiran kreatif dan kritis, termasuk pemecahan masalah secara intelektual melalui kegiatan membaca, meneliti, menulis, dan berbicara secara efektif.
2. Menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif bagi peserta diklat untuk:
 - a. Mempersiapkan diri menyelesaikan program-program sarjana, pascasarjana, dan profesional yang berkualitas dan tepat guna
 - b. Memelihara lingkungan hidup dan pembelajaran yang menuntut tantangan guna menumbuh kembangkan kemampuan menyelesaikan masalah;

- c. Menumbuhkembangkan kemampuan sosial kemasyarakatan dan kemandiriannya untuk menjadi sumber kebanggaan Universitas, alumni, masyarakat, dan bangsa.
3. Memberikan layanan kepada masyarakat luas untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, bangsa, dan negara yang menekankan:
 - a. Penerapan IPTEK guna menumbuhkembangkan potensi daerah dalam menunjang kemandirian dan pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. Penanaman keyakinan bahwa UNM merupakan sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Pengembangan dan peningkatan sumber-sumber dukungan pemerintah dan masyarakat melalui pengakuan umum atas program dan sumber dayanya;
 - d. Pemberian dorongan dan pengakuan yang semestinya kepada anggota masyarakat yang ikut berperan dalam pencapaian tujuan UNM.
 - e. Mengembangkan lembaga (Universitas) menjadi *teaching and research university* yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa melalui;
 - f. Pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - g. Sistem informasi dan manajemen bagi pelayanan sivitas akademika pada khususnya, dan pelayanan kepada masyarakat luas pada umumnya;
 - h. Kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga dan instansi di dalam dan luar negeri, khususnya dalam perwujudan tridharma perguruan tinggi.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No.277/0/1999. Tanggal 14 Oktober 1999 NO. 200/0/2003 tanggal 31 Oktober 2003. Struktur organisasi Universitas Negeri Makassar terdiri atas komponen-komponen berikut ini:

1. Rektor dan pembantu Rektor
2. Senat
3. Fakultas Fakultas
4. Program Pascasarjana
5. Dosen
6. Lembaga Penelitian
7. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Biro Administrasi Akademik Kepeserta diklatan
9. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
10. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi
11. Unit Pelaksana Teknis:1) UPT Perpustakaan, 2) Pusat Komputer dan 3) Unit Pelaksana Teknis Lainnya
12. Dewan Penyantun

C. Rektor dan Pembantu Rektor

Rektor adalah pemimpin tertinggi universitas. Rektor dipilih oleh Senat untuk masa bakti empat tahun. Setelah masa bakti empat tahun pertama, Rektor dapat dipilih kembali untuk masa bakti empat tahun kedua. Masa bakti maksimum untuk Rektor adalah dua kali masa jabatan berturut-turut. Untuk pelaksanaan program Universitas, Rektor dibantu oleh Pembantu-pembantu Rektor yaitu:

1. Rektor I Bidang Akademik
2. Pembantu Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan
3. Pembantu Rektor III Bidang Kepeserta diklatan
4. Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama

D. Fakultas-Fakultas

Fakultas berfungsi mengorganisasi dan menjalankan proses pendidikan dan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurut bidangnya masing-masing. Setiap fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang dipilih dan diangkat oleh Senat fakultas untuk masa bakti empat tahun. Sama halnya dengan Rektor, Dekan dapat dipilih kembali untuk masa bakti kedua setelah masa bakti pertama selesai. Saat ini Universitas Negeri Makassar memiliki 10 (sepuluh) fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana yaitu:

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
2. Fakultas Teknik (FT)
3. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
4. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
5. Fakultas Bahasa (FB)
6. Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
7. Fakultas Sosiologi
8. Fakultas Psikologi
9. Fakultas Ekonomi (FE)
10. Fakultas Seni dan Desain (FSD)
11. Program Pascasarjana (PPs)

Setiap fakultas terdiri atas beberapa jurusan dan Program Studi. Jurusan dan Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris yang dipilih oleh dosen-dosen pada Jurusan dan Program Studi tersebut untuk masa bakti empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti empat tahun berikutnya.

Untuk pelaksanaan proses belajar mengajar, dan penelitian, Jurusan dan Program Studi dilengkapi dengan Laboratorium-laboratorium. Setiap laboratorium dikepalai oleh seorang staf pengajar yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan.

E. Kerjasama Kelembagaan

Menjalin kerjasama dengan berbagai Kementerian dan Departemen, seperti Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Kehutanan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lembaga Internasional. Selain itu kerjasama penelitian dengan instansi lain, seperti Balitbangda Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Perusahaan swasta Nasional dan Daerah, serta Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain kerjasama kegiatan penelitian, peneliti UNM juga menghadirkan beberapa pertemuan ilmiah, seperti seminar dan lokakarya yang diadakan oleh lembaga kerjasama terkait, seperti mengikuti seminar hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kemitraan dilakukan agar dapat membantu perguruan tinggi memperluas jaringan kerja dalam upaya pencapaian pelaksanaan tridharma yang lebih efektif dan efisien, sehingga memenuhi standar mutu lulusan yang lebih berkualitas. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan perlunya suatu standar nasional pendidikan yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.

Program hibah kemitraan merupakan salah satu upaya Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti untuk mendorong LPTK dalam mengembangkan dan melaksanakan program-program kemitraan secara terpadu, sehingga dapat memberikan manfaat akademik, profesional, dan sosial kepada pihak-pihak yang bermitra secara seimbang.

B. Kemitraan Program Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah

Sejak berdiri pada 1 Agustus 1961, perguruan tinggi yang kini bernama Universitas Negeri Makassar (UNM) telah mengalami pergantian nama sebanyak empat kali, ketika pemerintah mengambil kebijaksanaan mengintegrasikan kursus-kursus BI/BII ke dalam Universitas, di Makassar di bentuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai wujud pengintegrasian BI Bahasa Indonesia, Ilmu Pasti, dan BI swasta bersubsidi lainnya. FKIP di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 30 tahun 1962, dan berlaku surat terhitung mulai 1 Agustus 1962, serta menjadi salah satu fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin.

Kedudukan sebagai fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin berlangsung sampai dengan tanggal 4 Januari 1964, karena dengan surat Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1964 tanggal 5 Januari 1964, FKIP di ubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 154 tahun 1964, FKIP Universitas Hasanuddin di Makassar di nyatakan menjadi IKIP Yogyakarta Cabang Makassar terhitung

mulai 1 september 1964. Selamanya berkedudukan sebagai IKIP Cabang Yogyakarta, IKIP Makassar di pimpin oleh seorang Dekan Koordinator.

Status sebagai IKIP Yogyakarta Cabang Makassar Berlangsung sampai dengan di keluarkannya Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 272 Tahun 1965 yang mengesahkan berdirinya IKIP Makassar yang berdiri sendiri. Keputusan Presiden ini berlaku surut terhitung mulai 5 Januari 1965.

Sejak 5 Januari, IKIP makassar telah mengalami berkali-kali perubahan nama sejalan dengan perubahan nama kota tempat kedudukan IKIP. Nama IKIP Makassar berubah menjadi IKIP Ujung Pandang ketika nama kota Makassar berubah menjadi kota Ujung Pandang pada tahun 1971, dan ketika nama Makassar kembali lagi pada tahun 1999, nama Ujung Pandang yang melekat pada institut ini pun turut pula berubah menjadi IKIP Makassar. Setelah dikonversi ke Universitas berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No.93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus, nama institut ini berubah menjadi Universitas Negeri Makassar (UNM).

Saat ini Universitas Negeri Makassar memiliki 10 (Sepuluh) fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana yaitu:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Fakultas Matematika dan Ilmu | 7) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) |
| 2) Pengetahuan Alam (FMIPA) | 8) Fakultas Bahasa dan Sastra |
| 3) Fakultas Teknik (FT) | 9) Fakultas Seni dan Desain |
| 4) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | 10) Fakultas Sosiologi |
| 5) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | 11) Fakultas Psikologi |
| 6) Fakultas Ekonomi (FE) | 12) Program Pascasarjana (PPs) |

Setiap fakultas terdiri atas beberapa jurusan dan Program Studi. Jurusan dan Program Studi dipimpin Seorang Ketua dan Sekretaris yang dipilih oleh dosen-dosen pada Jurusan dan Program Studi tersebut untuk masa bakti empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti empat tahun berikutnya.

Untuk pelaksanaan proses belajar mengajar, dan penelitian, Jurusan dan Program Studi dilengkapi dengan Laboratorium-laboratorium. Setiap laboratorium dikepalai oleh seorang staf pengajar yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan.

Fakultas Ilmu Pendidikan dalam Era globalisasi informasi, komunikasi, dan teknologi saat ini berpengaruh kuat terhadap semua sektor kehidupan manusia termasuk sektor pendidikan yang dalam dasawarsa terakhir ini populer disebut sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu sektor pendidikan menempati tempat yang strategis dan menentukan dalam rangka menciptakan luaran yang handal bagi pembangunan bangsa dan negara. Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan Fakultas tertua di UNM dan telah mempunyai 7 Program Studi yaitu: 1) Administrasi Pendidikan, 2) Kurikulum Teknologi Pendidikan, 3) Pendidikan Psikologi Bimbingan, 4) Pendidikan Luar Sekolah, 5) Pendidikan Luar Biasa, 6) PGSD dan 7) PGTK.

Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNM adalah lembaga yang mencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang ahli dibidang administrasi dan manajemen pendidikan yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat. Pendirian Jurusan Administrasi Pendidikan dilakukan bersamaan dengan Jurusan Home Economic (Kini PKK) yang berada di bawah naungan Fakultas Teknik UNM, dalam Statusnya Sebagai cabang IKIP Jogjakarta pada tahun akademik 1965/1966.

Pada awal pembukaannya, Jurusan ini cukup di minati oleh peserta diklat terbukti dengan diterimanya sebanyak 59 orang peserta diklat yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Tetapi karena masih baru, jurusan ini memiliki tenaga pengajar yang relatif terbatas sehingga pembinaan sejumlah mata kuliah jurusan/bidang studi menggunakan dosen luar biasa dari lingkungan IKIP Makassar, Universitas Hasanuddin dan pejabat teras dari Kantor Perwakilan P & K Provinsi Sulawesi Selatan.

Periode kepemimpinan Jurusan Administrasi Pendidikan telah mengalami pergantian nama menjadi Program Studi Perencanaan dan Manajemen Pendidikan di bawah naungan Departemen Pendidikan. Berdasarkan hasil temu kologial di Malang pada tahun 2000 Jurusan Administrasi Pendidikan berubah nama menjadi Manajemen Pendidikan kemudian kembali berganti nama menjadi Administrasi Pendidikan sampai sekarang.

Jurusan Administrasi Pendidikan mempunyai visi yaitu: Sebagai pusat pengembangan ilmu administrasi dan manajemen pendidikan yang berwawasan global melalui tridarma perguruan tinggi. Misi Jurusan Administrasi Pendidikan mengemban misi sebagai berikut:

a) Mengembangkan ilmu administrasi dan manajemen pendidikan, b) Menyiapkan tenaga administrasi dan manajemen pendidikan yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pendidikan, c) Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan, lembaga pemerintah dan non pemerintah. Serta bertujuan: 1) Menghasilkan lulusan administrator dan manajer pendidikan yang memiliki wawasan akademik dan kemampuan professional di bidang administrasi/manajemen pendidikan, yang menguasai dan dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen di lingkungan organisasi di mana mereka berada. 2) Mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang Administrasi/Manajemen Pendidikan yang relevan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. 3) Memberikan layanan pendidikan dalam jabatan (inservice training) kepada tenaga kependidikan yang sudah bekerja pada suatu lembaga pendidikan untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam mendukung peningkatan kualitas manajemen pendidikan.

Jurusan Administrasi Pendidikan (AP) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Makassar (UNM) merupakan jenjang program sarjana strata satu (S1) dengan beban studi minimal 148 SKS yang tersebar dalam 8 (delapan) pengelompokan mata kuliah dengan masa studi 8 (delapan) semester atau ditempuh dalam kurun waktu minimal 4 (empat) tahun. Beban studi minimal untuk meraih gelar sarjana Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan adalah 148 SKS untuk SI Jurusan Administrasi Pendidikan. Jurusan Administrasi Pendidikan selain program SI juga memiliki memiliki Program Diklat Kepala sekolah yang

mempunyai Kurikulum sendiri dan dirancang oleh Tim Ahli pada Jurusan Administrasi Pendidikan yang terdiri dari 30 SKS.

Program Diklat Kepala Sekolah ini mulai dirintis sejak tahun 1997 dan sudah melaksanakan kegiatannya pada beberapa kabupaten kota sejak tahun 1998, yang pada saat itu pengelolaannya menyatu dengan Jurusan sehingga pelaksanaannya juga dilaksanakan oleh pihak Jurusan sampai tahun 2007, adapun kabupaten kota yang melakukan kerjasama dengan Jurusan Administrasi Pendidikan yaitu Kabupaten: Sengkang, Pinrang, Soppeng, Pangkep, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru Bulukumba dan terakhir Kabupaten Gowa.

Kepala sekolah merupakan tugas tambahan guru yang memegang peranan penting bagi keberhasilan sistem pendidikan disekolah. Pembinaan profesional kepala sekolah memerlukan adanya penyiapan dan pengembangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kompleksitas permasalahan pendidikan menuntut keahlian seorang kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dalam mengidentifikasi permasalahan pendidikan, merencanakan, mengelola dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Untuk memenuhi tuntutan tugas tersebut maka diperlukan tenaga kependidikan yang secara konsisten mendidik calon tenaga kepala sekolah yang profesional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, pada pasal 20 ayat 3 dinyatakan bahwa “Calon tenaga kependidikan (yang bukan tenaga pendidik) dipersiapkan melalui pendidikan khusus”.

Peraturan pemerintah tersebut diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, dinyatakan pada pasal 1 ayat 1, “Untuk dapat diangkat sebagai Kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kompetensi kepala sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional”.

Penyelenggaraan Diklat ini juga tidak lagi dikelola oleh Jurusan Administrasi Pendidikan tetapi dibentuk pengelola khusus dan pelaksanaannya lebih dikembangkan seperti pembaharuan kurikulum bermuatan pengetahuan praktis yang lebih dominan, yaitu 60% mata kuliah praktek dan hanya 40% teori. Pembaharuan ini sudah dilaksanakan pada Program Diklat Kekepasekolahan di Kabupaten Belopa, Barru dan Kabupaten Bulukumba.

Adapun landasan dari pada Program Pendidikan Pelatihan Kepala Sekolah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab XI, Pasal 39, ayat 1 berbunyi “Tenaga Kependidikan (termasuk kepala sekolah) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan”.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1990 Bab VIII pasal 14; PP Nomor 28 Tahun 1990 Bab IV Pasal 12 dan 13; PP Nomor 29 Tahun 1990 Bab VI, Pasal 12 dan 13, PP Nomor 30 Tahun 1990 Bab IX Pasal 98-104 yang memberikan legalitas bagi pentingnya pendidikan tenaga kependidikan nonpendidik termasuk kepala sekolah.

4. PP Nomor Tahun 2006, Tentang Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pendidikan (Kepala Sekolah dan Pengawas) dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Pasal 1, ayat 1 untuk dapat diangkat sebagai Kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kompetensi Kepala sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional.
7. Permendiknas Nomor 28 tahun 2010, tentang penugasan guru dalam jabatan kepala sekolah. Intinya menegaskan bahwa Guru yang diangkat dalam jabatan kepala sekolah wajib memiliki sertifikat pendidikan dan latihan sebagai calon kepala sekolah.

Program Diklat Kepala Sekolah ini bertujuan untuk: 1) menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan akademik dan kemampuan profesional dibidang administrasi pendidikan, khususnya Manajemen pendidikan; 2) meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat menunjang pengembangan karir dan prestasi kerja sebagai kepala sekolah; 3) mengembangkan ilmu dan teknologi administrasi pendidikan yang relevan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat; 4) memberikan layanan pendidikan dalam jabatan tenaga kependidikan sebagai calon kepala sekolah dan kepala sekolah/madrasah.; 5) menjalin kerjasama dengan Lembaga terkait untuk meningkatkan peran sertanya dalam mendukung peningkatan kualitas kepala sekolah di semua jenjang persekolahan.

Pembina, Penanggung Jawab dan Penyelenggara tahun 2014 pada kemitraan UNM dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa:

1. Pembina Program Diklat Kepala Sekolah adalah Bupati Gowa.
2. Pelindung Program Diklat Kepala Sekolah adalah Rektor UNM dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
3. Penanggungjawab Program adalah Dekan FIP- UNM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
4. Penyelenggara adalah Pengelola Program Kekhususan Jurusan AP FIP –UNM.

Program Diklat Kepala Sekolah menyajikan mata kuliah dengan mengacu pada standar kompetensi kepala sekolah yang terdiri atas kompetensi Kepribadian, Supervisi, Manajerial, Sosial, dan Kewirausahaan dengan dengan beban studi 10 mata kuliah setara dengan 30 SKS.

Adapun proporsi mata kuliah sebagai berikut:

Tabel
Mata Kuliah

No.	Mata Kuliah
1.	Pengembangan Kepribadian & Sosial
2.	Kebijakan Pendidikan
3.	Supervisi Pendidikan
4.	SIM dan Pengambilan Keputusan
5.	Perencanaan Pengembangan Sekolah
6.	Kewirausahaan Sekolah
7.	Pengembangan Kurikulum
8.	Kepemimpinan Sekolah
9.	Evaluasi Program Sekolah
10.	Manajemen Sekolah

Adapun Peserta Program ini adalah:

1. Guru sekolah pendidikan TK, pendidikan dasar dan menengah
2. Calon Kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan dan Kepala Sekolah, yang memiliki potensi dan prospek menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah.
3. Kepala sekolah khususnya sebagai Kepala sekolah/madrasah.

Waktu dan Tempat Perkuliahan: Program Diklat Kepala Sekolah dilaksanakan selama satu semester (22 minggu), perkuliahan berlangsung hari Sabtu jam 14.00 – 17.00 dan hari Minggu jam 08.00 – 16.00. Tempat perkuliahan dilaksanakan di lingkungan kampus UNM.

Syarat-Syarat Pendaftaran: Calon peserta mengajukan permohonan yang dilampiri: Fotocopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, Surat izin dari atasan langsung, SK pengangkatan PNS dan pengangkatan sebagai kepala sekolah (bagi yang sudah menjabat sebagai kepala sekolah), Pasfoto ukuran 3x4 = 3 lembar terbaru (memakai jas dan dasi bagi laki-laki) bagi perempuan bebas dan rapi tidak memakai jilbab (telinga harus kelihatan), Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Biaya Perkuliahan dan jumlah rombongan belajar:

1. Sumber Pembiayaan bersumber dari: Peserta atau swadana penuh; Pemerintah Daerah Kabupaten; Subsidi silang antara peserta dan Pemerintah Daerah
2. Besarnya biaya perkuliahan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UNM.

Jumlah Peserta dalam setiap rombongan belajar maksimal 45 orang. Khusus untuk Kabupaten Gowa, pembiayaannya ditanggung oleh peserta sendiri, yang diikuti oleh 120 peserta .

Jumlah Peserta Perkuliahan

Kelas	A	B	C
Tahun 2014/2015	40	40	40

Pendaftaran calon peserta Diklat Kepala Sekolah bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tempat pelaksanaan kegiatan Program Diklat Kepala Sekolah. Program Diklat Kepala Sekolah ini diselenggarakan dengan menekankan penguasaan teoretis yang merupakan landasan bagi penguasaan praktis dimana penguasaan praktis akan membawa calon kepala sekolah lebih menguasai praktek di lapangan secara langsung, sehingga saat menjadi kepala sekolah mengetahui solusi permasalahan yang ditemui dan memberikan pengalaman/gambaran pemecahan masalahnya.

Tujuan praktek lapangan yang dilaksanakan dalam Program Diklat Kepala Sekolah ini adalah agar peserta memperoleh pengalaman langsung dalam lingkup dimensi kompetensi kepala sekolah yang dilakukan di sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat umum, dengan melakukan analisis yang bersifat rasional dan sistimatis terhadap kondisi lingkungan sekolah tempat magang dan praktek-praktek terbaik yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolahnya masing-masing. Praktek lapangan diharapkan dapat memberi pengalaman langsung pada peserta diklat, akan berbagai informasi dan membuka wawasan peserta sehingga dalam melaksanakan tugasnya ke depan dapat lebih profesional dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan

Kegiatan peserta Diklat :a) mengadakan orientasi ke sekolah yang ditentukan; b) mengobservasi dan mempelajari program-program kegiatan sekolah yang telah dilaksanakan dan program sekolah yang belum terlaksana saat ini; c) mengadakan dialog dan diskusi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru tentang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah; d) menyusun laporan praktek lapangan; e) mendiskusikan/menyajikan dalam diskusi kelas atau workshop; f) menarik kesimpulan untuk diimplementasikan di sekolah masing-masing.

1. Pembagian tempat praktek lapangan dan pembimbing
Menetapkan sekolah-sekolah tempat praktek lapangan dan jumlah peserta pada setiap sekolah. Diupayakan tiap sekolah tempat praktek tidak lebih dari 6-7 orang, agar semua peserta aktif,. Tugas pembimbing adalah memberi pengarahan kegiatan praktik lapangan, membantu membuat rancangan kegiatan, membantu memecahkan masalah sampai dengan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Penentuan jadwal praktek lapangan
Praktek lapangan dilakukan setelah semua kompetensi dan materi dalam mata ajar pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan dengan tuntas. Praktek dilakukan selama tiga bulan pada sekolah magang yang telah ditentukan. Terakhir adalah evaluasi yang dilakukan selama proses praktek lapangan berlangsung sampai pada tahap pelaporan. Kemudian aspek-aspek dan kriteria penilaian yaitu:1) Partisipasi peserta; 2)Kerjasama dengan peserta lain;3) Kesungguhan mengikuti kegiatan;4) Kuantitas pengalaman lapangan;5) Kemampuan merumuskan permasalahan;6) Kemampuan merumuskan alternatif pemecahan masalah.Evaluasi dilakukan selama proses praktek lapangan berlangsung sampai pada tahap pelaporan.

Aspek Penilaian dan Pengskoran

No	Aspek-Aspek Penilaian	Skor 1- 10	Ket
1	Partisipasi peserta		
2	Kerjasama dengan peserta lain		
3	Kesungguhan mengikuti kegiatan		
4	Kuantitas pengalaman lapangan		
5	Kualitas pengalaman lapangan		
6	Kemampuan merumuskan permasalahan		
7	Kemampuan merumuskan alternatif pemecahan masalah		

Lembar Kerja Materi Diklat ditentukan dengan menyiapkan instrumen yang disusun secara bersama-sama oleh tim yang dibentuk Program Diklat Kepala Sekolah ini dengan pembagian sebagai berikut:

1. Pengembangan Kepribadian dan Sosial
2. Perencanaan dan Pengembangan Sekolah
3. Kepemimpinan dan Budaya Sekolah
4. Manajemen Sekolah
5. Pengembangan Kurikulum

6. Kewirausahaan Sekolah
7. Sistem Informasi Manajemen dan Pengambilan Keputusan
8. Supervisi Akademik
9. Evaluasi Program Sekolah

Hasil penilaian atau prestasi peserta Diklat Kepala Sekolah di Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Prestasi Akademik Peserta Diklat

Kelas	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-Rata
A	2,73	3,75	3,19
B	2,79	3,87	3,20
C	2,80	3,90	3,22

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini adalah kemitraan Program Diklat Kepala Sekolah antara Universitas Negeri Makassar dengan Pemerintah Kabupaten Gowa, yaitu: “kemitraan perguruan tinggi dapat berhasil secara maksimal bila dibangun dari bawah dalam hal ini jurusan Administrasi Pendidikan berdasarkan akar masalah dan mendapatkan dukungan mitra yaitu pemerintah lokal, serta dilaksanakan dengan mempergunakan pendekatan yang sesuai dan adanya hubungan intensif antara semua pihak yang bermitra”. Temuan penting dari penelitian ini adalah kemitraan pada perguruan tinggi dapat memperluas jaringan kerja kemitraan (*partnership networking*), dan interkoneksi antar berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder untuk berbagi berbagai sumberdaya yang dimiliki pada perguruan tinggi, pemerintah lokal, masyarakat setempat pada lokasi penelitian, dan dunia usaha (*entrepreneurship*).

Pemanfaatan sumber daya (manusia, sarana, dan dana), dalam penerapan kemitraan Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Makassar, sudah terpenuhi pada sumber daya manusia, namun masih terbatas pada sumber daya sarana dan cukup pada sumber daya dana. Adapun kemitraan yang diterapkan pada Program Diklat Kepala Sekolah Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Makassar sudah menunjang kualitas proses dan produk dalam program, walaupun dalam proses semua pihak belum terlibat dalam setiap tahap kegiatan, tetapi sudah menghasilkan produk yang memberi nilai lebih. Program Diklat Kepala Sekolah semua pihak terlibat dalam enam dari delapan tahap kegiatan yaitu: identifikasi masalah, analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan. Produknya yaitu nilai kumulatif peserta diklat yang cukup tinggi yaitu rata-rata 78,8 dengan kategori sangat memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arismunandar. 2009. *Perilaku Organisasi sebagai Pendekatan Antardisiplin dalam Manajemen Pendidikan. Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Anderson, K. 2004. Access and Partnership: issues in Profesional Education, Tersedia.[http://www.archivists.org.au/events/ARES2003/K%20Anderson%20Access and partnerships.pdf](http://www.archivists.org.au/events/ARES2003/K%20Anderson%20Access%20and%20partnerships.pdf)(15 Juni 2004)
- Bogdan, R.C. & Biklen, S. K. 2007. *Qualitative Research for Education an Intruduction to Theories and Methodes*. Fifth Edition Boston: Allyn and Bacon.
- Clark, TA.1994. *Kolaborasi Membangun Kompetensi : Perspektif Superintenden Urban*. ERIC Review 2. No2 (Fall 1992); 2-6. Minneapolis: Compact Boston.
- Cudai Nur, Andi. 2013. *Kemitraan Pendidikan*, Leutika Books: Yogyakarta
- Cudai Nur, Andi 2017. *Kebijakan Pendidikan*, Agma, Makassar
- Cudai Nur, Andi, 2018. *Peranan dan Tantangan Kebijakan Publik*, Agma; Makassar
- Engkoswara dan Aan Komariah, 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Evaluasi dan Lembaga Pelatihan, 1993. *Pendidikan Kemitraan Industri: Paket Pendidikan Kejuruan Resource*. Los Angeles : ETI (ED 357 796).
- Geoffrey Marczyk, David DeMatteo, and David Festinger. 2005. *Essentials of Research Design and Methodology*, Hoboken, New Jersey. Published simultaneously in Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Grobe, T. et al. 1993. *Sintesis Pengetahuan dan Praktek di Bidang Kemitraan Pendidikan*. Washington, DC: Dinas Pendidikan dan Peningkatan Penelitian (ED 362 994)
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1996. *Organizations*. 8 Ed. Kentucky: Richard D. Irwin, Inc.
- Huberman, Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Ivancevich, John M., Robert konopaske, Michael T. Matteson, 2005. *Perilaku dan Manajemen Organisasi* Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hall, RF et al. 1993. *Bisnis Kemitraan Pendidikan: Mengembangkan Hubungan Kerjasama dengan Komunitas Bisnis*. Macomb: Western Illinois (ED 369 169)
- Lendrum, T. 2003. *The Strategic Partnering Handbook, The Practisioners Guide to Partnership and Alliances*, Australia : TheMcGraw-Hill Companies.
- Linton, L., 1995. *Council on Competitiveness, Endless Frontier, Limited Resources: U.S. R&D Policy for Competitiveness*. Washington: Council on Competitiveness.
- Linton, L., 1995. *Parthnership, Modal Ventura*, Jakarta: IBEC.
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Makmur. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda-karya.
- Nana Rukmana, 2006, *Strategic Partnering For Educational Management, Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*. Bandung; Alfabeta
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Robbins, Stephen P. and Judge Timothy A. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba.

- Robbins, Stephen. 2007. *Organizational Behavior*. 12 ed. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Sallis, E. 2010. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan (Peran Strategis Pendidikan di Era Globalisasi Modern)*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Tilaar. H. A. R. 2004. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Teece, D. J., 1992. Competition, Cooperation, and Innovation: Organizational Arrangements for Regimes of Rapid Technological Progress. *Journal of Economic Behavior and Organization*.
- Thomson, Jr. Arthur A. 2001. *Strategic Management Concepts and Cases*, Singapura: Exclusive rights by McGraw-Hill Book Co-Singapore

**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(FINTECH) SEBAGAI SARANA OPTIMALISASI *GOVERNMENT-BUSINESS*
PARTNERSHIP (GBPS) DI INDONESIA**

Budi Rustandi Kartawinata, S.E.,M.M.
Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu Bandung

Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom

Abstrak

Setiap desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai organisasi bisnis yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warga. Akan tetapi saat ini, belum banyak BUMDes yang dapat menggali potensi sumberdaya keuangan di desa melalui usaha jasa keuangan dengan model inklusi keuangan yang berbasis financial technology (fintech), sehingga potensi sumber daya keuangan ini menjadi kurang bermakna dan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa tersebut.. Teknologi Keuangan atau Fintech merupakan industri yang paling menjanjikan karena didorong oleh gelombang revolusi fintech yang dimulai dari model bisnis dan pendapatan baru yang inovatif, produk dan layanan yang baru, mengubah layanan keuangan menjadi secara global. Perusahaan-perusahaan fintech menawarkan kepada pengguna berbagai macam layanan jasa keuangan yang yang dulunya sangat eksklusif dalam bisnis perbankan. kemitraan antara pemerintahan dengan bisnis atau yang biasa di kenal dengan Government-Business Partnership (GBPs). Tentunya kemitraan GBPs ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan kemitraan-kemitraan yang telah di basah sebelumnya. Akan tetapi untuk Indonesia kemitraan GBPs ini belum terlalu terasa dan terlihat. Hal ini bisa jadi dikarenakan belum adanya pemodelan yang mapan, baik itu yang dibuat oleh pemerintah maupun pihak penyelenggara bisnis yang menjadikan kemitraan GBPs ini dapat dikembangkan dengan baik.

Kata Kunci : BUMDes, Fintech, GBPs.

Latar Belakang

Kemitraan merupakan satu kata yang sedang berkembang saat ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemitraan memiliki arti perihal hubungan (jalanan kerjasama dan sebagainya) sebagai mitra. Kemitraan di Indonesia berkembang dengan tujuan pencapaian sebuah hasil yang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, hal ini terjadi karena setiap tujuan atau pekerjaan tidak mungkin berhasil dilakukan hanya sebatas sektoral, akan tetapi membutuhkan kerjasama antar sektor. Terlebih pada era revolusi industri 4.0 dengan tanda sistem fisik-siber yang menyatukan dunia fisik, digital, dan biologis secara online, internet of things (IoT), clud computing, dan cognitive computing. Jika seluruh kegiatan hanya dikerjakan secara sektoral, maka keberhasilannya akan semakin jauh, sehingga terbukti sebuah adagium atau pepatah saat ini yaitu, “tidak perlu superman, jadilah superteam”.

Pembangunan di Indonesia memerlukan sebuah strategi administrasi untuk memastikan pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik. Sampai dengan tahun 2045, dunia menghadapi sepuluh kecenderungan besar, yang biasa disebut dengan global megatrend, diantaranya: pertumbuhan penduduk dunia melambat dan migrasi antara negara tinggi; sebagian penduduk dunia akan tinggal di perkotaan (urbanisasi yang tinggi); negara berkembang penggerak perdagangan dunia; potensi krisis global; middle dan upper income class meningkat pesat; multipolar dengan perebutan pengaruh negara-negara besar di Asia; kekhawatiran terhadap persediaan pangan, air dan energi; revolusi industri dari 1.0 menuju 4.0 dan breakthrough teknologi ke depan; resiko kenaikan suhu global.

Untuk menghadapi megatrend tersebut, Pemerintah Indonesia membuat apa yang dinamakan dengan “Visi Indonesia 2045”. Visi ini terdiri dari empat pilar yang menjadi acuan untuk tercapainya visi tersebut, dan dengan Pancasila sebagai dasar fondasi dari pilar-pilar tersebut. Empat pilar Visi Indonesia 2045 adalah :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Pemerataan pembangunan
4. Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Apabila dilihat dari tantangan dunia dalam Megatrend maka sangat jelas bahwa Visi 2045 merupakan jawaban bagaimana Indonesia telah memiliki arahan yang komprehensif sehingga pada tahun 2045 kelak, Indonesia akan menjadi sebuah negara yang bukan hanya lolos dari tantangan dan masalah global, juga sebagai pemenang sebagai negara yang termaju dengan penciptaan apa yang dikemukakan dalam Visi Indonesia 2045.

Pencapaian visi tersebut sudah barang tentu membutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh komponen di Indonesia, sehingga program kemitraan yang telah dijelaskan di atas menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia mengembangkan Open Government Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh seluruh *stakeholders* Indonesia baik itu pemerintah maupun masyarakat dengan tujuan adanya sistem pemerintahan yang terbuka untuk terlaksananya pelayanan publik di Indonesia. sebagai, ana sudah dimatnakan oleh Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Program kemitraan saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah maupun pihak swasta di Indonesia, hal ini dilakukan salah satu tujuannya adalah untuk mencapai Visi Indonesia 2045 menghadapi megatrend 2045. Dimulai dari pihak pemerintah dengan adanya kolaborasi kementerian dan lembaga pemerintahan saling berkolaborasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimana dengan berkembang pesatnya era digital mengharuskan setiap pelaksana pemerintah mengerti dan cakap mengenai digitalisasi.

Kemitraan selanjutnya adalah dalam kerangka pendanaan, dimana dalam beberapa pendanaan untuk pembangunan melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Program ini dinamakan dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kerjasama ini terutama untuk pendanaan pembangunan baik pendanaan yang melibatkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara maupun pembiayaan infrastruktur Non APBN (PINA). Kemitraan pendanaan pembangunan salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta agar pembangunan di Indonesia, baik itu infrastruktur maupun non infrastruktur dapat terus berkesinambungan.

Yang terakhir, adalah kemitraan antara pemerintahan dengan bisnis atau yang biasa di kenal dengan Government-Business Partnership (GBPs). Tentunya kemitraan GBPs ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan kemitraan-kemitraan yang telah di basah sebelumnya. Akan tetapi untuk Indonesia kemitraan GBPs ini belum terlalu terasa dan terlihat. Hal ini bisa jadi dikarenakan belum adanya pemodelan yang mapan, baik itu yang dibuat oleh pemerintah maupun pihak penyelenggara bisnis yang menjadikan kemitraan GBPs ini dapat dikembangkan dengan baik.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini sedang gencar diprogramkan oleh pemerintah nampaknya menjadi sebuah awal yang baik untuk dimulainya kemitraan antara pemerintah dan sektor bisnis (Government-Business Partnership/GBP's). Hal ini dikarenakan akan banyak BUMDes yang tercipta dan melaksanakan kegiatan bisnisnya di daerah sendiri, dan bisa menjadi mitra pemerintah untuk pembangunan desa dengan lebih baik. Kemitraan ini dihadapkan membuat pembangunan desa lebih maju sehingga menurunkan tingkat urbanisasi dan menjadi jawaban atas ancaman yang ada dalam megatrend 2045 dimana terjadi pemindahan penduduk dari desa ke kota.

Pertanyaan

Artikel ilmiah dengan topik kemitraan pemerintah dan bisnis (Government-Business Partnership/GBP's) mengandung beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana Pemerintah Indonesia dengan ekonomi digital ?
2. Bagaimana BUMDes berbasis Fintech dapat menjadi sarana optimalisasi GBP's di Indonesia?

Maksud dan Tujuan

Maksud tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menemukan jawaban mengenai beberapa pertanyaan, yaitu :

1. Pemerintahan Indonesia dengan ekonomi digital.
2. BUMDes berbasis Fintech dapat menjadi sarana optimalisasi GBP's di Indonesia.

Pembahasan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengemukakan bahwa desa dapat mengatur urusannya sendiri dan dihormati oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengatur segala urusannya sendiri, desa diberikan dana desa oleh pemerintah pusat dan desa diberikan hak untuk mengelola dana desa tersebut. Dalam mengelola dana desa, menurut UU No 6 Tahun 2014, desa bisa mendirikan sebuah lembaga bisnis dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana badan usaha ini adalah badan usaha yang leluasa ataupun sebagian modalnya dimiliki oleh desawong pengelolaannya dipisahkan. Tujuan dari BUM Desa ini adalah untuk mengelola seluruh kegiatan bidang ekonomi dan pelayanan umum yang ada di desa. Salah satu hal yang penting adalah, BUM Desa dapat bergerak di bidang jasa keuangan dalam bentuk lembaga keuangan mikro dengan modal dari desa sebanyak 60%. BUM Desa yang bergerak dalam usaha jasa keuangan diharapkan akan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat desa dan membantu perkembangan usaha yang ada di desa tersebut.

Inklusi dan Literasi Keuangan

Tahun 2019, pemerintah Republik Indonesia menargetkan tingkat inklusi keuangan pada titik 75 persen sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Secara sederhana, target inklusi keuangan atau disebut dengan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) adalah kondisi faktual masyarakat dewasa yang terakses sektor jasa keuangan. Percepatan inklusi keuangan harus terus dilakukan selaras dengan perubahan zaman dan persaingan global di depan mata. Jika melihat *trend* pertumbuhan inklusi keuangan, pencapaian target ini terlihat optimis. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2013 dan 2016, Indeks Inklusi Keuangan (IIK) tahun 2013 secara nasional mencapai 5,9%, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 67,82%. Peningkatan IIK hingga tahun 2016 sebesar 8,12% menjadi penanda optimis bahwa *trend* peningkatan dapat konsisten dipertahankan hingga tahun 2019. Namun muncul suatu pertanyaan, bagaimana dengan kualitas inklusi keuangan tersebut?

Kualitas inklusi keuangan sangat erat kaitannya dengan tingkat literasi keuangan atau dikenal dengan Indeks Literasi Keuangan (ILK). Dari tahun ke tahun, ILK mengalami kemajuan. Hal ini terlihat pada tahun 2013, ILK sebesar 21,8% yang terus meningkat menjadi 29,66% pada tahun 2016. Hal yang senada dengan IIK, ILK memiliki tren yang optimis untuk dicapai, bahkan dimungkinkan melampaui target. Berdasarkan PerPres Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, target ILK sebesar 35% pada tahun 2019. Namun, perbandingan nilai kualitatif antara tingkat inklusi dan literasi pada posisi *unbalance*. Terdapat *gap* antara tingkat inklusi dengan literasi sebesar 38,16%. Artinya, sebanyak 38,16% penduduk Indonesia dewasa yang telah terakses dengan produk dan/atau industri jasa keuangan, minim pemahaman mengenai produk/jasa industri jasa keuangan yang digunakan. Pemicunya

adalah keterbatasan infrastruktur sampai di pelosok negeri serta belum optimalnya sinergi dalam literasi keuangan.

Hal yang perlu kita pelajari dari negara-negara maju ialah mengapa pemerataan akses keuangan termasuk inovasi terkait produk/jasa sektor jasa keuangan dapat tumbuh dengan cepat. Penyebabnya karena pertumbuhan tingkat literasi sejalan dengan tingkat inklusi keuangan masyarakat. Tingkat literasi yang matang sejatinya membentuk ekosistem pasar yang menstimulus masyarakat meningkatkan kualitas pilihan dalam menggunakan produk/jasa pada industri jasa keuangan. Kualitas pilihan masyarakat ini mendorong industri jasa keuangan untuk lebih inovatif, efisien, dan efektif dalam menyediakan jasa dan produknya. Maka tidak heran, perkembangan zaman membawa industri jasa keuangan untuk bersimbiosis dengan teknologi informasi. Buktinya adalah dengan kehadiran *branchless banking* hingga *financial technology*.

Pemahaman masyarakat atas produk/jasa industri jasa keuangan bisa jadi pemicu resistensi terhadap perkembangan bisnis dalam industri jasa keuangan. Resistensi ini signifikan terlihat, khususnya di daerah pelosok yang masih gagap produk/jasa keuangan termasuk teknologi. Padahal tidak dapat dipungkiri, salah satu pemacu pertumbuhan ekonomi signifikan adalah akses investasi dan pembiayaan dari sektor jasa keuangan hingga ke pelosok negeri, khususnya melalui teknologi informasi tadi. Artinya, ke depan Pemerintah termasuk OJK perlu membuat suatu desain strategi uang menciptakan keseimbangan antara inklusi dan literasi keuangan dengan melibatkan sektor jasa keuangan bagi seluruh rakyat Indonesia, dari kota hingga, dengan tetap memperhatikan pencapaian target IIK dan ILK sebagaimana telah ditetapkan dalam dua ketentuan di atas. Seperti pepatah yang menyatakan: “Kecepatan kereta kuda, bukan tergantung pada kuda yang paling cepat, tetapi kuda yang paling lambat”.

Inklusi dan literasi keuangan berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan inklusi dan literasi keuangan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut www.infobanknews.com tanggal 30 Mei 2016, dalam survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, mendapatkan kesimpulan bahwa tingkat literasi keuangan Masyarakat Indonesia adalah sebesar 21,8%, dengan tingkat inklusi keuangan ada dalam posisi 59,7%. Mengutip data dari Bank Dunia di area regional ASEA, tingkat inklusi keuangan di Indonesia sudah berkembang dengan baik ditandai dengan mencapai lebih dari 31%, dibawah Malaysia, Thailan, dan Singapura. Aka tetapi ini masih merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus meningkatkan inklusi keuangan mencapai lebih dari 90% agar bisa bersaing dengan negara-negara besar di regional ASEAN.

Financial Technology (Fintech) di Indonesia

Saat itu e-reader banyak tersedia di toko-toko elektronik tapi di sana tidak ada indikasi nyata bahwa revolusi akan menyapu industri penerbitan. Kelebihan e-book secara luas didiskusikan oleh pembeli buku, tetapi dicetak kata masih berkuasa tertinggi-konsumsi digital sangat banyak olahraga minoritas. Maju cepat hingga hari ini dan baik pembaca maupun

penerbit berada dalam sangat tempat yang berbeda, dan penjualan e-book telah meroket. Menurut angka yang dipublikasikan oleh Statista.

Pasar buku digital AS hanya sekitar 0,3 miliar Dollar AS pada tahun 2008, tetapi pada tahun 2015 angka itu telah meningkat menjadi sekitar 6 miliar Dollar AS. Penjualan buku fisik belum runtuh; apa yang telah kita lihat adalah penerbitan digital mengambil rute cepat dari pinggiran kesadaran publik ke arus utama dalam waktu kurang dari 10 tahun. E-book sekarang bagian dari kehidupan kita. Ini adalah perjalanan yang mencerminkan kesediaan - dan keinginan - dari konsumen untuk merangkul kenyamanan bahkan jika ini memungkinkan oleh kompleks teknologi baru, saluran pengiriman, dan model bisnis. Dan perjalanan ini saat ini sedang bergema dalam industri jasa keuangan.

Bank ritel besar dunia masih mendominasi lanskap jasa keuangan, menyediakan deposit, pembayaran, dan fasilitas kredit yang kita semua gunakan dan ambil untuk diberikan, tetapi mereka bukan lagi satu-satunya pemain di kota. Pembeli online hari ini mungkin membayar dengan kartu debit, tetapi sama-sama mereka mungkin memilih PayPal. Bisnis yang pernah mengandalkan bank untuk kredit sekarang dapat meminjam dari platform peer-to-peer (P2P) atau pemberi pinjaman spesialis. Dan bank digital bersaing dengan mereka batu bata-dan-mortir untuk setoran pelanggan. Ini semua tentang akses dan kemudahan. Ketika keuangan alternatif mendapatkan traksi dengan pelanggan. FinTech semakin mendekati momen e-book di mana massa kritis konsumen dan bisnis pelanggan melihat solusi berbasis teknologi yang ditawarkan oleh pemain baru di pasar sebagai alternatif yang layak dan seringkali lebih disukai dari layanan yang ditawarkan oleh bank incumbent. Implikasinya bagi industri perbankan tradisional sangat besar. Perkembangan di FinTech memiliki potensi untuk mengikis ekuitas merek pemain incumbent dan makan ke pangsa pasar. Tetapi bank juga memiliki kesempatan untuk merangkul FinTech inovasi dan menawarkan solusi baru kepada pelanggan mereka.

Siapa pun yang mencari bukti kekuatan pasar potensial dan jangkauan penyedia teknologi keuangan yang dikehendaki tidak perlu melihat lebih jauh daripada Paypal yang sekarang terhormat. Diluncurkan pada tahun 1998, perusahaan ini diambil alih oleh eBay pada tahun 2002 dan menjadi sistem pembayaran default di semua situs internasional operator lelang online. Sejak itu PayPal telah memperluas penawarannya dan sekarang duduk berdampingan dengan debit dan kartu kredit sebagai opsi pembayaran pada jumlah e-commerce yang terus meningkat situs. Apakah itu kinerja online akan menerjemahkan ke dominasi dalam tatap muka transaksi masih harus dilihat. Saat ini, perusahaan menawarkan lebih dari 100 juta akun aktif dan memproses rata-rata pembayaran 315 juta Dollar AS setiap hari.

Pasar pembayaran berkembang dengan cepat dan evolusi ini akan mengejar kenyamanan, kecepatan, dan pengumpulan data. Saksikan keberhasilan awal dari contactless Apple, sistem pembayaran Apple Pay, yang memungkinkan konsumen untuk membeli dan membayar barang dan jasa cukup dengan menempatkan iPhone 6 yang dekat dengan titik penjualan terminal. Apple Pay baru saja diluncurkan di Inggris, tetapi saat ini menyumbangkan 2 Dollar AS dari setiap 3 Dollar AS diproses oleh sistem contactless di AS. Salah satu rintangan terbesar adalah ubiquity - konsumen yang dihadapkan berbagai cara untuk membayar. Kita sekarang

menyaksikan gelombang global untuk memperkenalkan secara penuh. Pada tingkat yang paling sederhana, bank ritel menyediakan tiga fungsi penting, yaitu:

- Mereka mengambil deposito dan memberi pelanggan tempat yang aman untuk menyimpan uang tunai dan mendapatkan bunga, didukung oleh asuransi deposito dan peraturan yang signifikan.
- Mereka memfasilitasi pembayaran melalui berbagai sistem, termasuk uang tunai, kartu, dan transfer.
- Mereka meminjamkan uang.

Untuk layanan keuangan agnostik layanan yang sama dapat diberikan oleh yang baru generasi penantang berbasis teknologi. Dalam hal perbankan ritel, uang bisa disimpan dengan bank penantang, ditempatkan di kartu pra-bayar, disimpan di PayPal akun, diinvestasikan dalam bitcoin, atau diinvestasikan melalui situs peminjaman P2P. Kredit tersedia dari bank penantang dan pemberi pinjaman alternatif (termasuk P2P), dan pelanggan memiliki pilihan opsi pembayaran yang terus meningkat, termasuk PayPal, e-wallet, dan sistem berbasis telepon. Sementara banyak dari opsi ini masih menggunakan pipa dari sistem perbankan, dalam jangka menengah kita dapat melihat pembayaran dan mekanisme pertukaran asing yang benar-benar memotong

Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri adalah sebuah konsep dan perkembangan yang secara fundamental telah mengubah masyarakat dan ekonomi kita. Istilah “pembangunan” mungkin tampak menunjukkan beberapa keterlambatan dalam konteks “revolusi”, yang benar-benar menandakan perubahan yang cepat dan mendasar, tetapi tidak ada keraguan bahwa perubahan besar terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Industri-industri muncul dan menggantikan bengkel-bengkel kerja skala kecil dan studio kerajinan. Pabrik-pabrik tekstil dan gerabah adalah yang pertama mengenali fajar baru, dan infrastruktur kanal dan jalur kereta api yang baru memungkinkan distribusi yang efisien. Itu adalah transisi dari rajin ke industri, dan awal boom untuk keduanya. Dari alat tenun mekanik pertama, yang berasal dari tahun 1784, tepatnya 230 tahun yang lalu, kita dapat membedakan empat tahap dalam proses yang sedang berlangsung yang disebut Revolusi Industri. Begitulah cara kita memandangnya saat ini. “Percepatan” pertama terjadi menjelang akhir abad ke-18: produksi mekanis atas dasar air dan uap. Kami menempatkan Revolusi Industri Kedua pada awal abad ke-20: pengenalan sabun konveyor dan produksi massal, di mana nama-nama ikon seperti Henry Ford dan Frederick Taylor terkait. Nomor tiga adalah otomatisasi digital produksi melalui alat elektronik dan itu.

Saat ini, kita menemukan diri kita di awal tahap keempat ini, yang dicirikan oleh apa yang disebut “Sistem Cyber-Fisik” (cps). Sistem ini merupakan konsekuensi dari integrasi produksi, keberlanjutan, dan kepuasan pelanggan yang luas yang membentuk dasar sistem dan proses jaringan cerdas. Lantai pabrik sudah penuh dengan “hal-hal” Internet. Dalam konteks ini, seseorang dapat memikirkan mikroprosesor, yang merupakan otak dari perangkat dan

sistem digital. Mereka pas dengan mulus dengan komponen konvensional, seperti modul i / o. Tetapi akselerasi industri Internet yang sangat besar berasal dari pertumbuhan eksplosif perangkat digital dari disiplin lain. Kamera video, pembaca rfid, tablet, tiket masuk, dll. Semua jenis perangkat Internet ini meningkatkan kualitas, efisiensi dan keamanan operasi produksi dan proses. Menjadi lebih mudah untuk menghubungkan peralatan, mesin, benda, pabrik lengkap dan lingkungan industri lainnya dan proses ke Internet. Konsorsium Industri ip Advantage (<http://www.industrial-ip.org>), didirikan pada tahun 2013, secara serius terlibat dalam bidang keahlian ini. Ip Industri bertujuan untuk mengaktifkan semua infrastruktur jaringan industri dan aplikasi untuk mendapatkan manfaat dari konektivitas Internet end-to-end. Selain ethernet yang terhubung ke ip Industri, ada juga Common Industrial Protocol (cip), yang diarahkan untuk komunikasi terpadu.

Pemerintah dan Ekonomi Digital

Perkembangan digital di dunia saat ini adalah dari 7,6 trilyun total populasi di dunia, 4 trilyun sebagai pengguna internet, 3,1 trilyun aktif menggunakan sosial media, 5,1 trilyun menggunakan mobil phone, dan 2,9 trilyun aktif menggunakan sosial media dengan mobil phone. Sedangkan sebaran pengguna digital di Indonesia adalah dari 2,56 milyar penduduk di Indonesia, sebanyak 132 miliar pengguna internet, 130 milyar aktif menggunakan sosial media, 177 milyar menggunakan mobile phone dan 120 milyar aktif bersosialo media menggunakan mobil phone. Hal ini menjadi seguah tanda mengenai hadirnya jaman baru yang juga berabrti cara hidup yang baru di lingkupi oleh sebuah revolusi industri 4.0.

Salah satu dampak dari era digital revolusi industri 4.0 adalah pasar tenaga kerja, dimana World Economic Forum (WEF) memperkirakan antara 2015-2020mjutaan pekerjaan berkurang dan digantikan mesin, robot, artificial intelligence dan perangkat komputasi nlainnya. Hal ini menciptakan sebuah pandangan baru yang dinamakan dengan Geoekonomi Digital yang membuka peluang baru di era baru.

Implikasi ekonomi digital pada era ini adalah revolusi industri 4.0 itu harus diikuti dengan perkembangan Government 4.0, University 4.0, dan development 4.0. haol ini menandakan bahwa ketika revolusi industri datang seperti saat ni, maka semua cara dan peran pun menjadi sesuatu yang baru. Begitu pula dengan pemerintahan di Indonesia. indikator makro dari indeks efektivitas pemerintah Indonesia menempati urutan ke ke lima di bawah negara Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Hal ini membuktikan bahwa mesin birokrasi masih lamban. Untuk melakukan perubahan pada kondisi saat ini, maka pemerintah melakukan refleksi untuk mengembangkan kemampuan pemerintahan bagi sumber daya manusianya maupun infrastrukturnya sehingga perubahan tidak hanya tergantung pada pemimpin tapi juga dari birokrat dan birokrasi. Birokrasi tidak untuk dirinya sendiri melainkan unatuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Pokok perkara menata kembali birokrasi adalah menyiapkan jajaran pemerintahan yang adaptif yang tahu bagaimana beradaptasi dengan perubahan bukan sekedar tau apa perubahan itu. Bagi birokrat di jaman modern tak ada cara lain yaitu reformasi atau mati.

BUMDes Berbasis Fintech Sebagai Sarana Optimalisasi GBPs

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak mengatur seluruh urusannya sendiri, baik itu urusan pemerintahan, sosial, dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sampai tahun 2016 jumlah total desa yang ada di Indonesia adalah sebanyak 79.957 desa. Dari total desa di Indonesia tersebut, sebanyak 22.475 atau sekitar 28,7% ada di Pulau Jawa yang terbagi ke dalam 5 propinsi. Jika ditinjau dari UU No 6 Tahun 2015 tentang Desa, maka dapat kita simpulkan bahwa saat ini begitu banyak desa yang seharusnya maju dan berkembang dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala macam urusan terutama keuangan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Terlebih lagi dengan adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat yang dalam konsepnya, dana desa ini merupakan sumber pendapatan desa yang dapat dikelola oleh desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga tujuan dari dana desa diantaranya mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian desa dapat tercapai.

Kemiskinan yang ada di desa salah satu penyebabnya adalah praktek rentenir yang marak terjadi, baik di desa yang produktif maupun di desa yang memang tergolong menjadi desa tertinggal. Untuk mengatasi masalah ini di desa, dengan program dana desa dari pemerintah pusat diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghilangkan praktek rentenir. Selain itu dengan adanya program inklusi dan literasi keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan POJK No. 76 tahun 2016 diharapkan masyarakat desa yang membutuhkan dana tidak lagi terperangkap oleh para rentenir, akan tetapi dapat memanfaatkan jasa keuangan yang resmi dan terdaftar di OJK sehingga dapat memberikan solusi bagi masyarakat.

Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan modal yang berasal dari dana desa. Untuk bersinergi dengan program inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK, maka desa dapat mendirikan BUMDes yang bergerak di bidang jasa keuangan dalam bentuk lembaga keuangan mikro. Pada tahun 2017, BUMDes yang bergerak dalam usaha jasa keuangan sudah mulai bermunculan, walaupun yang berhasil masih sedikit, hal ini dikarenakan kurangnya inovasi yang dilakukan, padahal saat ini, revolusi industri 4.0 sudah merambah ke desa terutama desa-desa yang ada di Pulau Jawa. Dapat dilihat bagaimana masyarakat desa sudah mulai melek teknologi dibuktikan dengan kepemilikan gadget (handphone) yang canggih dengan terkoneksi internet. Keadaan ini merupakan peluang bagi BUMDes yang bergerak dalam bisang usaha jasa keuangan untuk berinovasi dengan menerapkan konsep financial technology (fintech). Peer to Peer (P2P) Lending adalah salah satu contoh penerapan fintech dan mulai berkembang di Indonesia, dimana praktek usaha simpan-pinjam dilakukan dengan menggunakan teknologi internet dalam hal ini simpan-pinjam dapat dilakukan dengan gadget atau handphone yang terkoneksi dengan internet. Banyak keuntungan yang dapat BUMDes bidang usaha jasa keuangan raih ketika menerapkan P2P Lending diantaranya adalah

menyediakan akses mudah terhadap pinjaman, pendanaan yang cepat, penganekaragaman investasi, dan membantu pertumbuhan usaha rakyat.

Kesimpulan

Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan fokus bergerak dalam jasa keuangan tentunya akan berakibat pada kemajuan desa, karena adanya aliran modal bagi para pelaku usaha kecil dan menengah sehingga diharapkan menjadi usaha besar yang ada di desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu contoh implementasi kemitraan antara pemerintah yang diwakili oleh pihak desa, dengan dunia bisnis yang diwakili oleh para pengusaha yang ada di desa tersebut. Dan jika seluruh BUMDes yang ada di Indonesia dapat berhasil dalam menerapkan Government-Business Partnership (GBPs), dapat dibayangkan kemajuan yang luar biasa besarnya dan langkah yang tepat untuk menyambut Megatrend dengan terciptanya Visi Indonesia 2045.

Daftar Pustaka

- Abyan, M.A. 2018. Konsep Penggunaan Financial Technology dalam Membantu Masyarakat Sub Urban di Indonesia Dalam Melakukan Transaksi Financial. FIK Universitas Indonesia. p 10
- Christi, S dan Barberis, J. 2016. The Fintech Book. Wiley. p 122-250
- Gidwani, G. 2017. What Are The Best P2P Lending Platform In India? <https://www.quora.com/What-are-the-best-peer-to-peer-lending-platforms-in-India>
- Hajkowich, S. 2015. Global Megatrend. CSRIO Publishing. Melbourne.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- <http://www.industrial-ip.org>
- <http://www.infobaknews.com>

**POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH, SWASTA DAN
MASYARAKATDALAM PROGRAM TOKO MILIK RAKYAT (TOMIRA) DI
KABUPATEN KULON PROGO**

Oleh :

ETIH HENRIYANI

LINA MARLIANI

FISIP Universitas Galuh Ciamis

henriyanietih@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menjamurnya minimarket berjejaring di berbagai daerah di Indonesia, yang kemudian melihat inisiatif Pemerintah Kabupaten Kulon progo untuk melindungi produk lokal dan para pedagang tradisional dengan membangun kemitraan melalui program Toko Milik Rakyat (TOMIRA). Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola kemitraan Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan program Toko Milik Rakyat (TOMIRA). Sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui : Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Dan berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa Pola kemitraan ini dalam bentuk akuisisi (*Take over*) oleh koperasi. Yang mana pada tahap awalnya dilaksanakan terhadap 3 Alfamart, kemudian terus berkembang hingga saat ini jumlahnya sekitar 16 TOMIRA yang tersebar di seluruh Kabupaten Kulon Progo. Banyak keuntungan yang diperoleh dari pola kemitraan tersebut, seperti : branding toko yang dikombinasikan, karyawannya dari karyawan koperasi, menjual produk lokal minimal 20%, peningkatan kualitas SDM, tidak dikenakan goodwill dan royalty free, adanya pinjaman modal bagi anggota koperasi serta mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kulon Progo.

Kata Kunci : Kemitraan, TOMIRA

I. PENDAHULUAN

Saat ini minimarket menjadi salah satu bentuk pasar modern yang tumbuh pesat tidak hanya di kota besar, melainkan masuk ke wilayah Kecamatan, Kelurahan, bahkan Desa-Desa hingga pelosok permukiman. Sehingga keberadaannya telah mengancam pedagang tradisional baik berupa pasar, kios ataupun warung. Dimana modal dan sumber daya manusia pedagang tradisional sangatlah terbatas, dibanding minimarket yang dikelola oleh perusahaan besar dengan beragam produk yang dijual. Ancaman ini sebagaimana diungkapkan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional (APPTI), bahwa “setiap pendirian satu minimarket akan membunuh sekitar 20 pedagang tradisional”. (Rusli, 2015 : 199).

Menjamurnya minimarket modern berjejaring di berbagai daerah di Indonesia ini telah menginisiasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, untuk melindungi produk lokal dan melakukan penataan agar para pelaku usaha perdagangan bisa sama-sama tumbuh dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

Adapun konsekuensi dari Perda tersebut antara lain : semua minimarket modern dengan jarak kurang dari 1.000 meter harus menentukan pilihan, yaitu tidak diperpanjang izinnya, tutup, atau diambil alih oleh koperasi. Dan salah satu minimarket yang memilih untuk *take over*, yaitu Alfamart. Tujuannya untuk memberdayakan perekonomian masyarakat yang bersifat kemitraan dengan Koperasi maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Wujud keseriusan antara pengelola Alfamart yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Pemkab Kulon Progo ditandai dengan adanya MOU nomor ; 28/MOU.KP/HKM/2014 dan SAT/LCS/KTN/IX/14 tentang kerjasama dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat kemitraan dengan Koperasi dan UMKM melalui program Toko Milik Rakyat (TOMIRA).

Kemitraan tersebut juga merupakan bagian dari “Bela – beli Kulon Progo”, yang didukung oleh masyarakat khususnya para konsumen dengan sadar diri membeli produk-produk lokal hasil UMKM untuk keperluan sehari-hari di TOMIRA. Adapun produk yang umumnya dijual di TOMIRA adalah kopi, kecap kripik pegagan, ikan krispi, wingko ijo, dan keripik belut.

Dari keberhasilan dan eksistensi TOMIRA sampai saat ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang pola kemitraan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan program Toko Milik Rakyat (TOMIRA).

II. KAJIAN TEORITIS

Menurut Sujana (2012 : 78), hubungan kemitraan “merupakan bentuk kerjasama dua orang/lebih atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing”.

Sementara itu, Subarsono (2016 : 180), mengatakan bahwa “kemitraan antara pemerintah dan swasta merupakan kerjasama yang didasari atas kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam rangka menghasilkan suatu produk pelayanan publik dengan adanya pembagian resiko, penyatuan sumberdaya dan pemenuhan tujuan bersama”.

Dari beberapa definisi ahli tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa karakteristik dari kemitraan antara pemerintah dan swasta, antara lain :

1. Kerjasama melibatkan setidaknya-tidaknya satu lembaga pemerintah dan satu lembaga swasta.

2. Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau secara timbal balik kompatibel dan saling melengkapi.
 3. Bersifat kompleks dan membutuhkan koordinasi yang intensif.
 4. Kerjasama dilakukan dalam rangka melakukan *procurement* atau pelaksanaan tugas tertentu.
 5. Memiliki orientasi jangka panjang
 6. Penyatuan, pemanfaatan dan sinergi dari sumberdaya pemerintah dan swasta.
 7. Berbagi resiko, dan
 8. Perolehan dalam efisiensi dan efektivitas.
- (Dwiyanto, 2011 : 255).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemitraan pemerintah dengan swasta bukanlah sekedar mencapai tujuan bersama, akan tetapi harus memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti aspek sumberdaya, tanggung jawab, manfaat yang akan diterima serta resiko yang harus ditanggung pihak yang terlibat. Dan untuk memberikan gambaran yang utuh, berikut penulis sampaikan rincian perbedaan antara kemitraan dengan kerjasama non-kemitraan :

Tabel 1.1.
Perbedaan Antara Kemitraan dan Kerjasama Non-Kemitraan

Ciri-Ciri	Tipe Kerjasama Pemerintah dan Swasta	
	Kemitraan	Non-Kemitraan
Sifat Kerjasama	Kolaboratif	Swastanisasi- <i>outsourcing</i>
Intensitas	Tinggi	Rendah
Jangka Waktu	Panjang	Pendek
Kedudukan Para Pihak	Setara dan Otonom	Tidak setara, terikat dengan kontrak
Manfaat dan Resiko	Saling berbagi manfaat dan resiko	Manfaat dihitung sebagai kompensasi atas prestasi, resiko ditanggung masing-masing pihak.
Sumberdaya Untuk Pelaksanaan Kegiatan	Penggabungan sumberdaya	Tidak ada penggabungan sumberdaya.

Sumber : Dwiyanto, 2011 : 256

Berkaitan dengan kemitraan usaha, Pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Dalam Pasal 30 Ayat 1, Peraturan Pemerintah tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran mengatur usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Atau usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.

Adapun kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjalankan perannya tersebut adalah :

- a. Menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang siap bermitra.
- b. Mengembangkan proyek percontohan kemitraan
- c. Memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Kerjasama kemitraan diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak. Sehingga dengan kerjasama kemitraan sudah dapat dipastikan masalah bersama dapat diatasi melalui kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Begitu pula dengan kemitraan usaha, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan usaha kecil, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, serta meningkatkan pemertaan dan pemberdayaan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode kualitatif. Yaitu metode penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. (Moleong, 2015 : 6).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah : *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*. (Sugiyono, 2009 : 246).

IV. PEMBAHASAN

Toko Milik Rakyat (TOMIRA) merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap ekonomi kerakyatan. Kemitraan ini juga sebagai implementasi dari UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pasal 25 (dua puluh lima) nomor 1 (satu) yang menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Pelaksanaan kemitraan dalam bentuk akuisisi (*Take over*) oleh koperasi ini, pada tahap awalnya dilaksanakan terhadap 3 Alfamart yaitu Alfamart Bendungan, Dekso dan Jombakan oleh 3 Koperasi yaitu KSU BMT Giri Makmur Girimulyo, Koppaneka Wates dan Koperasi Bima Wates. Dimana untuk melakukan *take over*, Koperasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Badan hukum Koperasi di Kulon Progo.
2. Beralamat di wilayah terdekat alfamart yang akan di take over (ada surat pernyataan dari Koperasi untuk membuka kantor pelayanan atau menambah anggota di wilayah alfamart).
3. Mempunyai unit usaha pertokoan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Koperasi.
4. Koperasi aktif (telah melaksanakan RAT dalam tahun terakhir, partisipasi anggota berjalan baik, pengurus dan pengawas telah melaksanakan tugas dan fungsinya).
5. Kelayakan usaha koperasi berjalan baik (ada keuntungan, kesejahteraan karyawan terpenuhi, ada modal tetap di unit pertokoan, SDM yang mampu menangani unit pertokoan).
6. Mempunyai izin usaha teknis (SIUP, TDP dll) sesuai usaha yang telah dilakukan.
7. Mempunyai NPWP dan tertib perpajakan.
8. Mempunyai rekening bank atas nama Koperasi.

Dalam perkembangannya, keberadaan TOMIRA tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kulon Progo, akan tetapi jumlahnya pun terus bertambah. Pada tahun 2016, terdapat tujuh unit Toko Milik Rakyat hasil take over Alfamart, dan saat ini sudah ada sekitar 16 TOMIRA yang tersebar di Kulon Progo. Peningkatan ini tentu saja dipicu oleh beberapa keuntungan dari pola kemitraan yang dibangun, jika dibandingkan dengan pola kerjasama franchise. Keuntungan tersebut antara lain :

1. Branding toko dikombinasikan antara Alfamart dan Koperasi dengan nama Toko Milik Rakyat (TOMIRA).
2. Karyawan toko berasal dari karyawan koperasi.
3. Menjual produk lokal Kulon Progo minimal 20% dengan memenuhi standar PIRT, HKI, Halal MUI dsb.
4. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui transfer teknologi dan transfer knowledge terhadap anggota koperasi.
5. Tidak dikenakan goodwiil dan Royalty Free, sehingga tidak membebani keuangan koperasi.
6. Pemberian pinjaman modal bagi anggota koperasi untuk memenuhi persyaratan agar produknya bisa masuk ke took modern.
7. Mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kulon Progo dalam bentuk penyisihan laba untuk kegiatan pendampingan UMKM, bedah rumah, dan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu.

Keberhasilan Kulon Progo dalam mewujudkan TOMIRA, tentu dapat direfleksikan oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal ini menjadi pola baru untuk memperkuat budaya bisnis yang sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Dimana pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan regulator dalam mendukung efektivitas kemitraan.

V. KESIMPULAN

Meningkatnya pertumbuhan toko modern/minimarket berkorelasi dengan menurunnya daya saing toko/warung tradisional. Oleh karena itu diperlukan pembinaan dan penataan sehingga para pelaku usaha perdagangan baik modern maupun tradisional bisa sama-sama tumbuh. Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

Adapun tindak lanjut dari Perda tersebut berupa MoU dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk selaku pengelola Alfamart untuk bekerjasama dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat kemitraan dengan Koperasi dan UMKM melalui program Toko Milik Rakyat (TOMIRA).

Kerberhasilan program TOMIRA yang eksis sampai saat ini tiada lain karena persepsi, kepercayaan dan sikap dari pihak yang terlibat untuk terus memperkuat budaya bisnis yang sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Semoga pola kemitraan ini dapat mendorong daerah-daerah lainnya di Indonesia untuk meningkatkan daya saing para pedagang tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku - Buku

Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Iklusif dan Kolaboratif*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya Offset : Bandung.

Rusli, Budiman. 2015. *Isu - Isu Krusial Administrasi Publik Kontemporer*. Edisi Revisi. Mega Rancage' Press : Bandung.

Subarsono. Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu - Isu Kontemporer*. Gava Media : Yogyakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung

Sujana, Asep ST. 2012. *Manajemen Minimarket. Raih Asa Sukses (RAS)* : Jakarta.

2. Dokumen

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

3. Sumber Lain

<http://dpmppt.kulonprogokab.go.id/article/234/tertarik-tomira-pemkab-tasikmalaya-studi-banding-ke-kulon-progo.html>.

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/competition/inovasidaerahku>.

<http://koperasi.kulonprogokab.go.id/article/204/tomira-memperluas-pasar-produk-lokal.html>.

HARMONISASI ADMINISTRASI PUBLIK DAN BISNIS, MENINGKATKAN PERANAN ADMINISTRASI DALAM PEMANFAATAN HUTAN DAN LAHAN MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN” PENGALAMAN DI RIAU ¹

Dr. H. Ahmad Tarmizi Yussa ,MA , Dr. Hj. Rosmayani, Lilis Suriani S.Sos ,Msi

Email; tarmiziuir@uir.ac.d

ABSTRAK

Bisnis berorientasi hutan berkembang dan marak di Riau. Disamping meningkatkan ekonomi juga perlu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Bisnis telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan konflik. Konflik antara pengusaha dengan masyarakat mulai dari industri hulu sampai ke hilir. Kesannya tidak harmonisasi antara kedua belah pihak, mulai orde baru sampai sekarang. Posisi masyarakat selalu pasif, apatis dan lemah. Idealnya peranan administrasi publik yang mementingkan kepentingan universal, sebagai alat stabilisasi, berperan dalam perubahan sosial, sebagai peluang perubahan manajemen, dan kunci modernisasi masyarakat. Harapan yang besar terhadap reformasi dan otonomi daerah belum menunjukkan hasil yang signifikan mengembalikan hak masyarakat tempatan dan aplikasi pembangunan berkelanjutan. Korupsi hutan lahan tidak dapat dihindari. Hasil kajian menunjukkan konflik antara pebisnis hutan lahan dengan masyarakat setempat sampai hari ini tidak terselesaikan. Diantara sektor yang mengundang konflik adalah industri perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Kemudian pola pemanfaat lahan dalam beberapa tahun terakhir ini beralih ke pulau-pulau dan di tepi pantai. Pola inipun tetap menimbulkan konflik dan bahkan mengancam eksistensi lingkungan pulau-pulau di sepanjang tepian Selat Melaka seperti Bengkalis, Rupat, Pulau Padang dan Pulau Rangsang. Satu hal lagi selain efek abrasi dan hama yang ditimbulkan, juga membuat pulau-pulau disini sukar membangun, proses modernisasinya lambat. Stagnan dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu kasus perjuangan masyarakat adat di Riau daratan yang dulunya milik suku Petalangan, belum lagi tuntas. Masyarakat petalangan dengan sistem adat istiadat tata kelola hutan tanah dan kearifan lokal yang baik justru punah. Padahal pola mengelola hutan tanah mereka dapat dijadikan model pembangunan berkelanjutan yang baik. Disarankan agar pemerintah menjadi mediator yang akuntabel, impartial, objektif, berintegritas, honesty dan right and responsible dengan mengedepankan filosofis administrasi secara sederhana mebina relationship dan mutually pada semua pihak tanpa diskriminasi “impartial” serta berani mereposisi kebijakan yang benar-benar pro publik. Karena intinya kebijakan itu adalah berharap dan menanti. Hanya administrator yang arif dan bijaksanalah selalu menampilkan sikap yang pro publik dan demokratis. Dimana sumberdaya alam dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata.

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional Bussiness, *Government dan the Public : Optimalisasi Government-Bussiness Partnership* (GBP-s) untuk Tujuan Nasional Pembangunan Berkelanjutan, Bandung 28 November 2018

A. Pendahuluan

1. Latar belakang masalah

Pembangunan nasional memerlukan dukungan daerah. Secara sistemik intinya keberhasilan pembangunan daerah sebagai lokomotif keberhasilan pembangunan nasional. Bagaimanapun pembangunan hari ini perlu dinikmati dikecap oleh generasi mendatang, dan bukan sekedar kenikmatan generasi hari ini dimana mereka juga memerlukan harmonisasi hubungan dengan alam mereka. Pola pembangunan yang governance administrasi perlu menyelenggarakan proses yang humanis, partisipatif dan akuntabel bukan sekedar ekonomis dan efisien. Kemampuan mengadministrasi potensi publik dan privat yang seyogyanya selenggarakan secara tepat, benar, adil dan merata. Inti tujuan administrasi publik Indonesia mencapai adil makmur dan sejahtera. Semestinya pemerintah sebagai mesin produksi “administrative state” dapat mengeloa aneka sumber daya negara-daerah dan kemudian mengalokasinya secara tepat dan benar.

Aktivitas bisnis yang beorientasi hutan dan lahan dalam lima dekade ini sangat marak di Riau. Budaya bisnis ini dimulai dari era orde baru sampai orde reformasi. Pada era reformasi yang diharapkan itu dimana“ di daerah dikendalikan oleh rezim pemda yang “otda” berkolaborasi dengan berbagai kekuatan termasuk pusat. Diantara banyak kebijakan adalah regulasi bisnis hutan dan lahan. Spirit berkembangnya bisnis tersebut amat klasik dan sederhana mengangkat ekonomi dan devisa. Namun disebalik itu menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap sistem ekologi administrasi publik. Tidak ayal lagi pengalaman di daerah memberi kesan ketidak berpihak dan inkonsisten mengaplikasikan pembangunan berkelanjutan. Jika bisnis yang lanjut dan berkembang maka dilain pihak justru banyak menimbulkan kerusakan dan penderitaan masyarakat. Ironisnya hari ini kerusakan-kerusakan itu terjadi mulai dari hulu sampai ke hilir.

Aktivitas bisnis Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya ditulis “HTI” menggantang banyak masalah. Mulai dari praktek penguasaan hutan dan lahan sering memicu isu konflik dengan masyarakat lokal sampai polusi yang merusak”lingkungan” ditimbulkan oleh pabrik. Tanpa terasakan justru proses transporasi industri agro bisnis banyak menimbulkan kerusakan prasarana publik dan mengancam keselamatan/nyawa pengguna jalan publik. Belum lagi isu pembakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) dengan berbagai efek yang ditimbulkan bahkan merusak imej negara dimata internasional. Peran pemerintah sebagai agency public administration, sebagai regulator dan administrator publik belum banyak tampil/nampak sampai saat ini. Proses bisnis berlalu begitu saja, sangat dimanjakan tanpa menunjukkan keberpihakan dan keselamatan orang ramai “publik”. Seakan potensi bisnis diatas segalanya sehingga pihak-pihak yang memiliki otoritas resmipun banyak diam dan pada memberi reaksi terhadap peristiwa dan kasus yang dirasakan oleh publik. Kesan keberpihakan terhadap dunia bisnis itu terlalu berlebihan dibandingkan terhadap orang ramai. “publik”

Dalam proses kenegaraan administrasi publik mesti hadir memfasilitasi kepentingan bisnis dan publik. Bila dikaitkan dengan regulasi pembangunan berkelanjutan justru menjadi kontra produktif apabila bisnis menista publik. Mengikuti Gary bahwa peran pemerintah sebagai agen yang melancarkan konsitusi secara smart sangat penting. Dikatakannya peran itu pernah diungkapkan oleh Wilson dikatakan “*running a constitution*” is a public administration that does result in the stable and effective functioning of our political system – in a way that steadily improves the quality our lives and expand both equity and opportunity (Gary, 1990 : 32) diantara sebagai agen yang memiliki perspektif, possible terhadap kepentingan publik dan menyelenggarakan konsitusi dengan proses yang governance.) sebaliknya tidak mencederai proses pemerintah yang tidak pro publik dan tidak terbawa dalam alam politik yang anomali. Tidak sebagai pelaku konsitusi yang distorsi (Tangkilisan, (2003). Pengalaman di Malaysia menurut Ngah, pemda dapat berperan sebagai penggerak ekonomi dan sosial masyarakat setempat melalui peran partisipatif (Kamaruddin Ngah :1996)

Pemerintahan governance hari ini *expertise is a vital source of power all bureaucracies, is equally important, especially in democratic societies, for administrative agency to command strong political support*” (France E. Rourke, dlm Peter kobra, 1993:72) administrasi memerlukan proses kebijakan yang demokratis dan adil untuk menciptakan kesejahteraan publik (Frederickson, 1989). Sampai hari ini negara modern seperti Amerika masih memperhitungkan persialan social equity dalam proses administrasi publik Frederickson (2014). Menurut Bank Dunia beberapa isu pembangunan infrastruktur dan pembangunan institusi diantaranya berkaitan dengan (1) *greening development*, dan (2) *democratization and development* (Word Bank Development Report 1994-p 1-8)

Pembangunan kelanjutan semesti mencerminkan proses pembangunan yang dinikmati oleh semua makhluk secara harmonis dan berkelanjutan. Jangan disatu sisi ada kelompok yang sangat menikmati/diuntungkan tanpa memperdulikan resiko dan efek pembangunan yang dilakukan oleh kelompok mereka sebagai (bisnis) sementara disisi lain banyak orang (publik) yang terkorban atas cara bisnis mereka yang ingin hidup dan menang sendiri. Efek yang perlu menjadi perhitungan antaranya social, bearable. Equitable, enviromental, sustainable viable dan economic. Oleh Word Bank Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai *of opportunity for future generation. Frame work the rule that good governance plays in the true commitment to advancing the sustainable agenda*. Dikutip dari pengalaman di Afrika bahwa pemerintahnya dalam menggerakkan pembangunan berkelanjutan memiliki karekteristik fragile, soft and significance and at the same time predatory in their relationship to the citizenry. Jelas hal proses pemanfaatan sumber daya alam justru memakan diri sendiri bila diselenggarakan secara kolusif dan koruptif. Faktor-faktor memanjakan pemodal tanpa disandari akan menista hak manusiwa secara manusiawi. Oleh Fukuyama dikatakan jika berlaku pembangunan ekonomi dan mutu kehidupan maka pembangunan yang memperhatikan maratabat manusia adalah pembangunan yang seimbang dan lebih sempurna (Fukuyama dalam Embong, 2002).

Riau terkenal sebagai salah satu provinsi yang memiliki sumberdaya alam yang besar sehingga sering mendapat julukan sebagai “provinsi yang kaya”. Namun kaya belum tau makmur dimana masyarakatnya dapat menikmati sumberdaya alam untuk kesejahteraan. Data terakhir Riau merupakan wilayah administrasi di daratan Sumatra dengan jumlah penduduk 5.8 juta. Luas wilayah 8.702. 000 ha, wilayah hutan seluas 7.121.344.00 a ha dan lahan gambut seluas 3.867.000a ha. (INCAS, *Indonesiaan National Carbon Accounting System*). diunduh tanggal 4 Nopember 2018 pukul 7.21 WIB)

Banyak pengalaman eksplorasi sumber daya alam telah menimbulkan efek eksploitasi. Sumber daya alam menjadi sumber masalah yang sampai hari ini tidak kunjung selesai. Teknik pemafaat sumber daya alam berbagai cara dari satu pola ke pola yang lain selalu menguntungkan korporat hutan lahan “KHL” dan secara nyata tidak berpihak kepada pembangunan berkelanjutan terutama dari pendekatan kemanusiaan. Sumber daya alam yang paling rawan dan rentan masalah adalah hutan dan lahan. Dimana Riau dahulu memiliki lebih dahulu 10 juta hektar hutan yang masih perawan, kemudian dirambah tahun demi tahun sehingga kini tidak lebih dari 6 juta hektar hutan sudah hilang di Riau, yang semula pada tahun 1950 seluas 8.702.366 ha pada tahun 2014 hanya tinggal 2.465.800 ha. Telah terjadi deforestasi seluas 6.236.566 ha. Diantara kebun kelapa sawit seluas 2.290.736 ha. Informasi terakhir sudah 64 juta hutan dan lahan ditebang/babat dan dijarah. Pembabatan hutan dan lahan di Riau melejit drastis dalam jangka waktu 1984-2005 di eksploitasi hutan seluas 3 juta hektar. Tertinggi pada tahun 1999-2005. seluas 840.000 rata 150 hektar pertahun (WALHI

Satu hal yang menarik alasan bahwa perkebunan kelapa sawit di Riau bukan deforestasi akan tetapi adalah reforestasi menanamkan kembali lahan yang terlantar. Pernyataan ini jelas melecehkan pengorbanan eko sistem baik flora, fauna terutama manusia yang berjuang melawan konflik perampasan hak-hak masyarakat asli di daerah- daerah di Riau yang tahun demi tahun tidak kunjung selesai. Belum lagi persoalan kebakaran hutan dan lahan di Riau berdasarkan informasi sepanjang tahun 2018 sebanyak 1.647 ha. (Kompas, 11 April 2018) Kemudian menurut BPBD Riau seluas 2.152. ha. Kebanyakan hutan dan lahan yang terbakar adalah lahan yang dicadangkan untuk penanaman kebun kelapa sawit. Akhir-akhir ini lahan dan hutan yang terbakar sudah ke lahan gambut, karena persiapan hutan lahan yang normal sudah tidak ada lagi. Tentunya efek karhutla sangat luar biasa. Dampak ini mengakibatkan manusia terpapar asap dalam jumlah massal dan proses moblitas sosial ekonomipun ikut terhambat. Hebatnya pernyataan dari media GAPKI bahwa lahan sawit jutaan hektar di indonesia itu merupakan proses konversi tanah belukar, lahan terlantar dan HTI. Bukan deforestasi sifatnya namun reforestasi. (Media GAPKI, 27 Februari 2017). Informasi-informasi yang beginilah sering diterima oleh pemerintah pusat melalui foto satelit yang sangat global sifatnya demi kepentingan bisnis KHL yang bercokol kuat dan hebat di Riau.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Scale Up salah satu NGO di Indonesia, menemukan gejala pergeseran eskalasi konflik dari tahun sebelumnya yang didominasi oleh Industri Perkebunan sawit, namun pada temuan di tahun 2009 didominasi konflik di sector industriper kebun Hutan Tanaman Industri (HTI) sebesar 75,9%, seterusnya oleh industri perkebunan kelapa sawit 20%, industri pertambangan 0,2 %, dan lain-lain 3,9 %. Khusus di sektor industri

kehutanan konflik didominasi antara industri Perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan masyarakat yaitu sebesar 62,9%, di kawasan konservasi 33,3%, antar industri Perkebunan 3,4% dan antar masyarakat 0,4%. Dari 2 (dua) industri perkebunan Hutan Tanaman Industri yang ada di Riau konflik terbanyak terjadi pada PT. Group APRIL yang merupakan induk dari PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) dan Mitranya yaitu sebesar 88% dari total konflik pada HTI dan Group IKPP yang membawahi PT. Arara Abadi (AA) dan mitranya sebesar 12 %. (Sobri, 2015)

Artinya bahwa proses perkebunan jutaan hektar lahan itu tanpa mengorban biodiversiti dan efek budaya adat istiadat dalam sistem komunal masyarakat lokal. Sebuah pernyataan yang menista nilai-nilai manusiawi dan biodiversiti yang sudah lama hidup nyaman utan belantara. dan kontraversi dengan sistem pembangunan berkelanjutan. Kasus lahan “hutan tanah” masyarakat adat Petalangan di Desa Sialang Godang mencapai 15 ribu hektar sampai hari ini belum rampung. Konflik demi konflik terjadi, dan proses peradilan selalu dimenangkan oleh pengusaha. Padahal kekuatan adat yang mendasari perjuangan dalam bentuk “tombo” yang berisikan administrasi dan kebijakan mengelola “hutan tanah” masih tersimpan sampai saat ini. Berbagai dokumen adat dan sejarah menyatakan bahwa posisi masyarakat adat petalangan terhadap hutan tanah adalah kuat. Karena masyarakat petalangan juga disebut orang talang atau orang darat. Norma-norma adat istiadat dan kearifan lokal konsens berpihak pada pembangunan berkelanjutan “melestarikan hutan rimba” sangat menarik dijadikan model mengadministrasi hutan rimba sebagai objek dan subjek pembangunan berkelanjutan. Namun dengan kekalahan dan posisi masyarakat adat “masyarakat kampung” yang lemah selalu membuat mereka pecundang. Administrasi publik mulai dari orde baru sampai reformasi ternyata masih belum berpihak kepada mereka.

Di Riau lautan, proses penjarahan hutan dan lahan yang ganas dan jahat juga terjadi di era reformasi. Perusahaan-perusahaan besar “raksasa” di Riau ternyata sudah kehabisan hutan alam. Tanaman hutan industri “HTI” di daratan sumatra tidak mencukupi, dan hutan rimba perawan di pulau ini sudah terkikis. Jelas tidak mencerminkan adanya pembangunan berkelanjutan. Dalam banyak peristiwa, konflik dan reaksi-reaksi kontra “menolak” dari masyarakat kampung yang lugu juga mereka selalu pecundang. Pemerintah “daerah” selalu berpihak pada korporat “pebisnis” yang lihai menggunakan potensi. Tidak ayal lagi hutan-hutan di pulau rawa seperti Bengkalis, Rupat, pulau Padang dan Pulau Rangsang sudah berubah menjadi HTI dan kaya kayuan yang masih alam dan perawan itu lenyap tidak tentu arah. Melakukan penanaman kembali tidak ada sama sekali. Sebagian hutan pulau yang perawan berubah menjadi hutan homogen sawait dan akasia. Biodiversiti flora dan fauna di pulau-pulau ini lenyap. Ironisnya lagi pulau-pulau ini adalah pulau deng topografi dataran rendah berawarawa, tanah redang. Pulau-pulau disini terletak di sepanjang selat melaka sebagai pulau sedimen yang rentan terjadi abrasi. Proses penjarahan hutan lahan ini justru semakin menggila terjadi pada era reformasi sekitar tahun 2011. Sampai hari keberpihak pemerintah terhadap komunitas lokal di pulau-pulau itu tidak jelas. Cita-cita masyarakat untuk membangun pulau dengan melakukan kerjasama dengan para investor pun kandas. Untuk melakukan perlawanan mereka sekali lagi lemah, dan tidak berdaya dan akhirnya selalu pecundang.

Hebatnya lagi ekspansi agro industri sudah sampai di tengah-tengah/jantung kota Dumai. Dumai yang dulunya terkenal sebagai kota Pelabuhan alam, pelabuhan suplai minyak bumi internasional sudah beralih menjadi kota industri. Secara drastis tata kota ini khususnya areal pelabuhan menjadi areal industri kelapa sawit. Dimana beberapa pabrik kelapa sawit beroperasi ditengah-tengah kota tersebut. Tentu saja dampak industri yang luar biasa terjadi dan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Mulai dari bunyi bising, bau busuk dan kondisi kondisi yang kumuh menimbulkan efek kesehatan/tidak sehat. Disampai itu lalu lalang kendaraan berat bertonage tinggi sangat mengancam keamanan pengguna lalu lintas di kota ini. Bukan hanya itu saja lalu/ transportasi komoditas kelapa sawit dengan ribuan truk tangki setiap hari menyibukkan lalu lintas di lintas Sumatra menuju Dumai. Kondisi ini sangat mengganggu dan menghambat proses lalu lintas umum. Sehingga fungsi sosial jalan raya tidak jelas lagi sudah dimonopoli oleh kepentingan bisnis. Disamping sering mengancam keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Jalan Dumai- Pekanbaru yang semestinya hanya dilalu dalam masa tempoh tiga jam sekarang menjadi rata-rata tujuh jam. Artinya kepentingan bisnis sudah sangat mengganggu kepentingan publik. Sementara itu upaya pemerintah untuk menjadikan jalan agar dialihkan ke jalan-jalan khusus tidak ada sama sekali. Apalagi terjadi eksiden kendaraan berat itu di jalan, atau adanya perbaikan jalan, tidak jarang masyarakat pengguna jalan terpaksa tidur/ menginap di jalan. Artinya bisnis agro industri kelapa sawit sudah memonopoli proses kehidupan publik mulai dari hulu sampai ke hilir. Di areal Pelindo Dumai masyarakat sekitarnya sangat berharap adanya upaya memperhatikan kesehatan mereka, melakukan penghijauan dan memitigasi persoalan sosial ekonomi yang stagan oleh tutupan kawasan industri seperti adanya program CSR.

Proses pembangunan yang diharapkan adalah proses pembangunan yang elegan, berkeadilan dan menyeimbangkan antara keuntungan (*profit*) yang diperoleh dengan penghargaan terhadap manusia (*people*) serta konsisten dan komitmen melestarikan dan memelihara bumi (*planet*) yang tata ruangnya diperlukan bersama-sama. Administrasi dalam hal ini selain dijadikan sebagai alat modernisasi dan juga sebagai media dan rujukan penting amengatur proses perubahan, membina spirit solidaritas, bertimbang rasa, berkeadilan sosial (*social equity*) serta membina soliditas kelompok agar tidak terjadi konflik dan eksploitasi atas masyarakat “lingkungan” oleh tindak ekonomi yang mencari keuntungan secara ekonomi semata-mata.

Pemerintah daerah era kini secara konsep yang masih semi dan abu-abu menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Diharapkan memperhatikan dimensi “lingkungan” secara istiqomah. Jika perlu merevisi kebijakan dan merevitalisasi pola aksi bisnis yang monopoli dan tidak humanis. Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; (konsideran point (b). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2. Perumusan Masalah

Semestinya secara ideal para pebisnis hutan lahan “korporat hutan lahan (baca ”KHL””) dapat mengunjuk positif proses kehidupan bersama “cooperative “ yang harmonis dapat hidup serasi berdamping dalam sistem yang semula nyaman penuh saling pengertian “mutually”. Kehadiran mereka tidak menjadi hama pengganggu “parasite” dalam banyak sektor. Sehingga ekologi manusia “human ecology” tidak nyaman dan tidak harmonis. Aneka dampak yang ditimbulkan mulai hulu dan hilir benar-benar direspon oleh pemerintah sebagai agency administrasi publik. Kondisi dari masalah yang dikemukakan diatas mencerminkan bahwa administrasi publik kurang berdaya “terkooptasi” oleh KHL dan mereka sangat dominan menguasai alam. Sehingga kesannya pembangunan berkelanjutan yang secara sederhana adalah proses hidup berdamping secara damai memanfaatkan bumi (planet) dalam proses mencari untung (profit) yang hanya sustainable untuk kepentingan segelintir mereka dan semestinya jika ada mutually kehdairannya tidak mengganggu eksistensi masyarakat (public). Pola pikir pemerintah yang mendewakan investasi perlu disertai dengan sikap responsive dan akuntabel pada kondisi “lingkungan”. Akuntabilitas publik. Dimana pemerintah setidaknya tidak bisa tampil sebagai agent penyeimbang “*equilibrium agent*” yang neutral, cakap dan berwibawa. Memfasilitas kepentingan bisnis yang rakus dengan kepentingan publik “public interest” yang sederhana “sejahtera bersama” sebagai “*welfare society*”

Karena tidak mungkin orang ramai “public” dikorban oleh kepentingan KHL yang hanya segelintir orang saja. Bayangkan deforestasi yang terjadi lebih dari enam juta hektar maka tidak mungkin tidak mengusik kondisi pembangunan berkelanjutan dimana hari ini hutan Riau sudah berubah menjadi hutan homogen sawit dan akasia dalam jumlah yang besar dan proses pembangunan ke depan bisa stagnan dalam jangka waktu yang lama. Dikhawatirkan modernisasi pulau-pulau strategis, pulau terluar di pintu ASEAN akan terhambat.

Rute sulit tetapi apakah akhirnya lebih berkelanjutan, untuk merebut kembali hutan lahan yang sudah dijarah sehingga tidak mencirikan proses sustainable development, ”politik hijau” “Green Policy” Ke depan mampukah pemerintah melestarikan hutan primer yang masih tersisa. Enam puluh empat juta hektar hutan telah ditebang dan dirambah selama 50 tahun terakhir. Tidak ada pembenaran ekonomi atau etika selama 64 juta hektar jika hutan lahan sebagai “ekologi manusia” dan makhluk hidup “bio diversity” lainnya akan hilang selama 50 tahun ke depan.

Maka sangat mungkin kiranya jika pemerintah mengembalikan “filosofis administrasi” dalam menjembatani kepentingan banyak pihak terkait bisnis hutan lahan ini sama-sama senang dan sama-sama maju. Karena setelah dua puluh tahun reformasi ditambah dengan praktik bisnis orde baru sebelumnya, tidak banyak persoalan pembangunan berkelanjutan dapat dipecahkan dan wujud mata di depan mata. Kebanyakannya banyak dimanipulasi oleh alasan bisnis dan devisa negara. Bertitik tolak dari permasalahan yang diungkapkan sebelumnya, maka semestinya aplikasi yang konsisten terhadap administrasi “pentadbiran” dalam menjadikan model harmonisasi antara administrasi bisnis dengan administrasi publik. Artinya administrasi mesti banyak tampil dengan formula nyata sederhana ditengah-tengah proses pemerintahan

yang benar-benar melayani “rakyat” “public” dan bukan pelanggan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses administrasi pemerintahan hari ini dan kedepan yang benar-benar dapat mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan yang sebelumnya diawali dengan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita otonomi daerah itu.

3. Tujuan/Kegunaan Penulisan

- a. Untuk mendeskripsi pengalaman dan fakta bisnis hutan lahan di Riau, efek kemanusiaan dalam misi pembangunan berkelanjutan..
- b. Mengungkap sejauhmana komitmen pemerintah era yang reformasi dan otonomi daerah terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan hutan lahan dan dampaknya terhadap masyarakat lokal
- c. Memberikan rekomendasi dari pendekatan administrasi terhadap proses harmonisasi bisnis dan publik mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bumi Indonesia yang kaya untuk kesejahteraan bersama.

A. Studi Kepustakaan dan dan Literature Review

1. Konsep Administrasi

Leonard D. White berpendapat bahwa administrasi publik adalah “semua operasi yang dilakukan untuk tujuan mengisi atau menjalankan kebijakan negara (dalam Dvorin dan Simon). Penekanan administrasi publik baru, (NPA) membuat kebijakan berorientasi pada keadilan sosial dan kesamarataan sosial untuk mensejahterakan masyarakat (Frederickson, 1981). Krislov dalam Gültekin (2011) menekankan bahwa administrator publik harus kuat dan harus aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan untuk memastikan keadilan sosial. Diantara karekter kebijakan yang baik menurut Caiden. selain memerlukan kerangka kerja dan konsep yang baik dan benar juga sangat memerlukan partisipasi masyarakat (Caiden, dalam Thoha, 2011), diantara karekter demokrasi menurut Dahl adalah partisipasi efektif (Robert Dahl, 1982) Mills dalam (Dahl, 2001)) menyatakan, rakyat dapat melindungi hak-hak dan kepentingan mereka dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemerintah dan mereka yang mempengaruhi atau menguasai pemerintahan, hanya jika mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam nenentukan perilaku pemerintah... dan hal itu adalah pemerintahan demokratis.

2. Konsep Birokrasi dan Organisasi

Birokrasi memiliki peranan besar dalam proses kebijakan. Menurut (Lindblom dan Woodhouse, :1993) Memiliki prospek yang hebat untuk inspirasi/konfidensi kerja, untuk itu kebijakan dan penetapan kebijakan yang demokratis dan memfungsikan pelayanan publik korektif, birokrat memiliki andil bahkan semakin memperburuk masalah yang ada dlam proses pembuatan kebijakan. Keijakan publik merupakan pendekatan khusus bagi negara yg dlm keadaan lemah untuk memperbaikinya dari konflik hebat, oleh karena itu kebijakan pemerintah dapat membuat ketegangan sosial semakin memburuk atau menjadi lebih baik) Tammosoli , 2007: 78)

Meskipun kendala mereformasi dan mereorientasi birokrasi adalah Sikap birokrasi yang dikehendaki pada masa orde baru adalah birokrasi konservatif. Jika birokrasi bersifat dinamis dan progress maka dapat dibayangkan betapa ketertiban dan kepastian akan hilang dari kehidupan suatu bangsa. Bangsa manapun di dunia, dan apapun sistem sosialnya dan setinggi apaun tingkat modernistasnya, memerlukan birokrasi yang konservasi (Sarwono, 1992) alasannya Birokrasi adalah organisasi yg memiliki daya jangkau nasional yang kewenangannya menyentuh kehidupan khyalajak umum. Apalagi karena masyarakat luas berpaling pada birokrasi sebagai teladan. Karakter dan watak birokrasi sebagai pelayan yang istiqomah perlu dibina terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama secara adil “social equity and social equility”. Justru semestinya standart perilaku mengemuka menjadi “perhatian prioritas/penting. Menampilkan administrasi publik yang merujuk pada karakteristik, *integrity, honesty, objective impartially/political impartially,, right and responsibility.*

Watson (1994), mendefinisikan organisasi sebagai “*organizations are sets of ongoing human relationships.* Sementara Bowey berpendapat bahwa organizations cannot be conceived without regard to human issues (Bowey 1980). Dalam (Mutti, C d N and Hughes, W (2001) Stimson mengkonsepsikan sebuah organisasi pelayanan dan bisnis dengan manajemen administrasi yang kuat, sebagaimana dikatakan :’*A robust organization will be fully integrated so as to be effective, which mean adaptability has be thoughtfully built in* (Stimson, 1996). Menurut Bennis organisasi merupakan pembentuk utama kemajuan masyarakat yang seharusnya tampil sebagai arsitek sosial. Aparat pemerintah para arsitek sosial harus merancang kembali organisasi mereka agar dapat merancang masyarakat menurut garis yang lebih manusiawi dan fungsional. Mereka perlu secara singkat mampu menjadi pemimpin bukan manejer (Bennis, 1994)

Anjakan berpikir pada paradigma organisasi baru abad 21. Dikatakan oleh Florent dan Treacy (2005:30) bahwa : “Alokasi sumberdaya diputuskan bersama oleh manajemen lokal dan kantor pusat . Strategi berfokus pada integrasi global dan daya tanggap nasional, struktur terdiri dari suatu jaringan dari organisasi. Orang terbaik yang ada diseluruh penjuru dunia dikembngkan untuk posisi penting yang tersebar dimanapun. Paradigma baru organisasi memerlukan ketrampilan kerja yang lintas fungsi dan lintas budaya. Kompetensi ini adalah penting karena pemimpin global harus tumbuh diatas keunikan dari banyak budaya nasional dan regional.

Gambaran kinerja birokrasi publik hari ini dalam organisasi publik yang kompleks dan rumit. Kondisi dunia hari ini khususnya negara transisi selalu dihadapkan pada persoalan yang dilemmatis . Namun sebuah kenyataan organisasi “ketika menuruni aliran deras, apakah lebih baik melihat kemana anda akan pergi atau terpaku kepada darimana anda datang. Hodgson dan Crainer dalam buku *The Future Leadership* mengatakan bahwa tugas pemimpin organisasi publik dalam kondisi gelombang dunia yang tidak menentu pada hari ini sangat berat dikatakan dipandang dari pendekatan administrasi. “ dari piring spaghetti yang kompleks, akhirnya disusun kembali menjadi helaian tunggal; kenyataan yang kacau dibersihkan, diletakkan dalam uruta-urutan yang kronologis, dan pada umumnya dirapikan

untuk menjadi konsumsi publik. Artinya persoalan yang rumit menimbulkan efek publik yang massal efeknya jangan dibiarkan begitu saja. Keberpihak kepada publik yang mayoritas mesti ditunjukkan dengan proses saling pengertian yang mesti dimediasi oleh pemerintah yang arif lagi bijaksana.

3. Konsep aplikasinya Administrasi Publik.

Jauh sebelumnya John A. Gaus (1947) menyatakan ekologi administrasi publik berkaitan erat dengan setting lingkungan. Artinya banyak faktor lingkungan menentukan eksistensi administrasi public. (Riggs, 1989). Mengutip kamus Webster dikatakan ekologi adalah “*mutual relations, collectivity, between organism their environment*. Dalam kaitan administrasi dengan lingkungannya Charles Beard dalam Gaus menyatakan *formulated some axioms of government in which environmental change is linked with resulting public administration. any such society itself, is strong proportion to its capacity the administer the functions that are brought into being*. Setiap administrasi yang sukses yang kompleks konsekuensi setiap kesuksesan masyarakatnya sendiri, dengan proporsi yang besar untuk meningkatkan kapasitas dengan mengadministrasikan fungsi-fungsi agar menjadikannya sesuatu yang lebih baik. (Beard, 1947) bahwa administrasi sebagai alat modernisasi sebuah bangsa. Emery dan Giauque (2014) memetik pendapat Wyser yang mengatakan apabila perkembangan terbaru manajemen akan memunculkan ukuran-ukuran baru maka ianya tidak dapat melenyapkan tradisi logik administrasi publik.

Dalam artian yang filosofis administrasi adalah alat mengatur dan menertibkan proses hidup bersama dimana posisi negara sebagai pengelolanya banyak kepentingan dapat diselaraskan dengan spirit kebersamaan, relasi yang baik dalam proses kebijakan, yang akhirnya membangun sikap penuh pengertian. Sampai saat ini persoalan keberadaan administrasi public menampilkan aksi dan interaksi “publik “ dengan penuh pertimbangan keadilan sosial dan kesamarataan sosial yang mengedepankan hak azasi manusia tetap di tuntutan oleh bangsa modern seperti Amerika sekalipun (Frederickson, 2016) *Local government exist to preserve and protect the right of individual and contribute to welfare of the nation as a whole* (Freman 1968)

Baik administrasi bisnis maupun publik semestinya pada pendekatan filosofis administrasi sebagai alat yang mengatur, menertibkan memfasilitasi proses kerjasama yang humanis dan melalui proses colaborasi untuk cooperative. Karena menurut Wilson pelopor administrasi modern mengkonsepsikan bahwa administrasi adalah “*human cooperative effort*”. Usaha yang manusiawi dalam kebersamaan. Sementara konsep administrasi menurut Berkley dan Rouse terdiri dalam lima ingredient/komposisi antaranya people-action- interaction- relations dan mutually. People dalam hal ini adalah orang banyak – publik sebagai penikmat planet bumi yang dibutuhkan bersama. Dimana posisi sebagai pemegang amanah “khalifah” di planet bumi ini. Justru karena itu mesti care bersama. Karena sama-sama butuh terhadap bumi ini. Kemudian untuk melanggengkan kehidupan mesti ada sesuatu usaha/kerja/aktivitas dilakukan. Kerja-kerja itu menjadi semakin ringan jika diaktifkan bersama, interaction. Menunjukkan bahwa manusia perlu saling membina

solidaritas dan soliditas. Tidak menampung sikap ego, ingin hebat, maju dan menang sendiri. Demikian juga dalam bisnis perlu membina tim kerja dan membina relasi keluar dan ke dalam. Justru itu interaksi mesti di langgengkan dan suasana yang harmonis/serasi dengan membina relations. Mengarahkan pada relationship berkomunikasi dengan baik antara sesama tidak menutup diri dan hanya berkomunikasi dengan para pejabat dan pengambil keputusan negara, sehingga menista hak-hak publik. Karena pada relasi yang baik itulah letaknya berkelanjutan- sustainable. Proses eksplorasi hutan lahan selama ini minim partisipasi, tidak terakses publik dan tertutup, tidak mencerminkan transparansi, sangat elitis sifatnya “policy model elit”. Sekonyong-konyong publik kejatuhan regulasi yang membawa penderitaan bagi mereka. Penderitaan yang dialami akhir di acuhkan saja oleh KHL dan pemerintah. Kondisi masyarakat diam dan apatis bukan berarti setuju. Tapi diam menyerah setelah dipecundangi oleh regulasi yang tidak memihak pada mereka. Artinya proses bisnis mengabaikan arti penting demokratisasi. Padahal kata akhir dari proses administrasi yang berhasil itu adalah “mutually” membangun sikap penuh saling pengertian, bertenggang rasa dengan kondisi orang lain dan empati. Apabila hal ini tidak menjelma/wujud dalam proses administrasi menandakan ada yang salah dari proses itu.

Elemen pokok dari Administrasi Publik harus melayani publik. Masyarakat berhak mengkritik perilaku pemerintah. Orientasi pejabat pemerintah terhadap kepentingan publik adalah prinsip pokok pemerintah yang demokratis. Dengan sikap pembahasan hati-hati terhadap tanggungjawab mengantarkan kita pada tiga hakekat tanggung jawab (1) tanggungjawab berarti kewajiban legal (2) Tanggungjawab dipandang sebagai kualitas moral (3) Tanggungjawab diartikan sebagai sikap tanggap terhadap sistem nilai orang lain. Dipetik kata bijak tentang kebijakan dari Santosa (2012) *All human wisdom is summed up in two word, wait and hope* (seluruh kebijakan manusiawi dapat diringkas dalam dua pata kata “ Menanti dan Berharap” .

Administrator yang humanis menampilkan kebijakan sebagai proses *human being*, menampilkan moral kemuanusiaan yang tinggi. Apabila kebijakan publik mengabaikan budaya, mencerminkan sistem perilaku yang tidak berbudaya. Apabila kebijakan publik mengabaikan publik mencerminkan pemerintah yang tidak demokratis. Administrator yang bijaksana dan arif mentakrifkan kebijakan sebagai keadilan sama rasa, senasib sepenanggungan, sementara yang otoriter cenderung mewujudkan kekuasaan tanpa belas kasihan, sebagai jalan pintas kepentingan sepihak dan sesaat sifatnya (Teyusa, 2018)

Padahal peranan administrasi selain sebagai alat modernisasi bangsa juga dijadikan sebagai alat memecahkan masalah sosial, serta menstabilkan kondisi bangsa. (Lepawsky,1966) Administrasi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menerangkan watak dan karakter administrasi suatu organisasi/bangsa. (Daniel E. Griffiths, dlm Sutarto : 1982) menurut wilson bidang administrasi adalah bidang bisnis. Ia terpisah daripada kegelisahan dan kecepatan politik. Administrasi terletak diluar lingkungan politik. Persoalan-persoalan politik bukan persoalan administrasi. Walaupun politik menggariskan tugas administrasi. Ia tidak dibebankan untuk menguasai bidang ini. (Woodrow Wilson “ *The Study Of Administration*, 1887. Disiplin Administrasi public pada hakekatnya merupakan satu

disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*) dan management dari usaha-usaha masyarakat. Caiden dlm Miftah (2003)

Dari kutipan beberapa teori di atas jelas bahwa pengaruh kinerja Implementasi kebijakan tidak terlepas dari kualitas aksi dari berbagai pihak terkait melalui tahapan-tahapan tertentu untuk pelaksanaan mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu Nigro dan Nigro (2012: 28-31) mengutip pendapat Charles O, Jones tentang beberapa konsep kunci bagi kebijakan publik diantaranya : (a) Kejadian-kejadian dimasyarakat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda-beda, oleh orang yang berbeda-beda dalam waktu yang berbeda-beda (b) Banyak masalah bisa muncul dari satu kejadian yang sama (c) Setiap orang memiliki berbagai tingkat akses bagi proses kebijakan di pemerintahan (d) Banyak persoalan swasta yang mesti ditindak lanjuti oleh pemerintah (e) Para pembuat kebijakan berhadapan dengan suatu masalah tertentu (f) Masalah dan tuntutan secara konstan didefinisikan dan didefinisikan ulang di dalam proses kebijakan. (g) Pembuat kebijakan kadangkala mendefinisikan persoalan bagi orang-orang yang tidak mendefinisikan masalah tersebut (h) Semua sistem kebijakan memiliki sebuah bias. (h) Tidak ada sistem kebijakan ideal yang eksis terpisah dari preferensi arsitek sistem tersebut. (Nigro dan Nigro, 2012)

Waldo membuat kriteria *A good portion of The Administrative State* yang berkaitan tentang alami berkehidupan yang baik atau dengan visi apa yang baik dilakukan untuk masyarakat dan selalu melihat sesuatu yang baik dan menjadikan lebih baik. Kriteria aksi didasari oleh prosedur dimaknai melalui keputusan kolektif agar menjadi lebih baik. (Waldo dalam Frederikson, 1997) Akhirnya tatkala masyarakat diabaikan dan ternista oleh sistem yang tidak pro terhadap mereka justru terjadi ditengah-tengah gelombang otda maka timbul pertanyaan “Dengan pertanyaan siapa yang berperanan” padahal semestinya Proses menetapkan kebijakan kesannya tdk prosedur secara universal mengedepankan prinsip keadilan dan demokrasi. Diantaranya mengedepankan peran partisipasi masyarakat (Caiden dlm Toha, 2009)

Agar pemerintah bekerja konsisten dalam menjentrai proses pemerintahan, jangan terbawa dalam aliran politik yg tdk normal. (anomaly politics) selain memiliki skill managerial. Maka kompetensi yg dibangun sikap (1) *agency perspective* (dari perspektif badan pemerintahan) (2) *broadest possible public interest* (orientasi sangat luas thdp kepentingan publik yang masuk akal) . (3) *The constitutional Governance process*. (proses tata kelo pemerintahan yang konstitusional. (Gary, 1990)

Administrasi pemda otonomi daerah semestinya menampilkan karakter pemda yang otonom dan desentralisasi. Menurut Sabir, Dennis dan Rondinelli tujuan desentralisasi politik itu diantaranya, Untuk mewujudkan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan dimulai dari daerah. (Kartiwa dan Nugraha, 2011).; (Alekaibaf dan Jawan, 2011). Silverman menekankan arti penting desentralisasi dalam mewujudkan governance yang terbaik sebagaimana dinyatakan bahwa *Decentralization has the potential to be powerful instrument for better governance*. (Silverman, 1992:4)

Dalam pendekatan governance public policy pada administrasi publik kontemporer digambarkan Almaashi Ibrahim (2015) bahwa typologi pemerintahnya mesti dekat dengan rakyat dan mendefinisikan undang-undang benar-benar klar dan mantap dalam aplikasinya “ *Government more near the citizen and are defined laws and regulations more clear and better to be applied*. Proses kebijakan yang establish dan memelihara *good governance* menurut PBB parameterinya adalah *responsive, transparent, consensus oriented, equitable and inclusive, effective and efficient, follow the rule of law, participatory dan accountable*. (Geurts T. 2011) Karakter dan watak pemerintah akan tercermin dari proses pp yg diselenggarakannya karena itu kebijakan memiliki arti yang luas sebagaimana dinyatakan oleh PBB *a government's public policy is the set of policies (laws, plans, actions, behaviors) that it chooses* (kebijakan pemerintah berisikan sekumpulan kebijakan dalam bentuk, hukum, perencanaan, aksi, perilaku, atas pilihannya) sementara itu menurut Peter bahwa *Public policy is “the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the life of citizens”*. Publik policy sejumlah aktivitas pemerintah, biasanya aksi langsung dilakukan agen atas semuanya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. (Guy Peter, 1998)

Karakter administrasi publik global perlu disikapi dengan baik dalam konteks harmonisasi kepentingan public dengan bisnis. Pola pendekatan para administrator dalam semestinya berubah karena kondisi global pemerintah dihadapkan pada “*Policy problems faced ...are increasingly complex, wicked and global*. Mark Robinson (2015) masalah kebijakan dihadapkan pada semakin semakin meningkat kompleks, Jahat dan mengglobal”. *Public service reform problems and approaches- How can we make government more honest? Integrity and anti-corruption reforms 1990s to present*. Standart perilaku sangat diperlukan. Pendekatan NPG menekankan hubungan antar organisasi, dengan proses tata kelola melalui modal kepercayaan, modal relational berfungsi sebagai inti mekanisme governance. Kemudian menetapkan standard perilaku yang parameterinya adalah *honesty, integrity, impartially/political impartially/objective and rights and responsibility*

Justru karena itu dalam menghadap dunia bisnis perlu kehati-hatian, mengantisipasi dengan jeli dan respek, berubah menjadi pemerintah yg responsif dan senantiasa merespon *feed back* sistem dalam berbagai level struktur pemerintahan dari desa sampai Jakarta. Pola memperhatikan masyarakat yang lebih *humanis - care to public*. Artinya apapun dilakukan pemerintah modern hari ini muara akhirnya adalah melayani publik baik langsung maupun tidak langsung. Jangan sampai publik merasa tidak diperhatikan, tidak merasa berarti akan kehadiran pemerintah dan akhirnya mereka bisa mereka tidak ada tempat mengadu di bulan-bulanan. Berjuang menuntut hak dan keadilan lalu pingpong kesana kemari. Akhirnya publik kehabisan energi, jadi tidak administrative karena banyak terjadi pemborosan sumber dalam perjuangan. Cerminan pelayanan yang demokrasi melayan warga negara bukan pelanggan, dan spesifik pemerintah governance baru “NPG” adalah pemerintah yang melayani. “*governing serving citizens*”

Sebenarnya kondisi administrasi publik menjadi semakin pulih dan berkembang setelah 20 tahun reformasi. Bukan sebaliknya sering menampilkan proses politik prematu, ditandai

dengan ketidakmapanaan politik serta kecendrungan masih melanjutkan budaya politik masa lalu. Sebagaimana yang diprediksi Winters tentang kelanjutan politik Indonesia. Dikutip dari Winters tentang prediksi keberlanjutan politik Indonesia pasca orba dikatakan . Poin penting dari oligarki di Indonesia jaringan elit bertahan terus dan punya kemampuan tinggi untuk beradaptasi setiap kali ada perubahan bentuk, struktur atau institusi pemerintahan. Pengalaman Negara transisi dari Negara sedang berkembang ke Negara maju adalah “*oligarki dijinakkan*”. Namun menjatuhkan seorang diktator tidak sama dengan menjinakkan oligarki yang berkuasa. (Winters. 2004). Kondisi politik lokal maupun nasional yang sedang galau yang dikatakan berada pada arena politik abu-abu “*grey zone*” , situasi politik di daerah bergelut dalam tiga arena budaya politik yang tidak konstruktif. Pertama, praktek politik patrimonial, kedua praktek politik oligarki dan ketiga jaringan politik para elit yang rakus bекolaborat menguasai sumber-sumber daerah yang disebut “*bossim*”

Justru itulah menampilkan pemda yang berkapasitas mesti menjadi prioritas. Dikatakan oleh Pollit bahwa reformasi management pemerintahan memerlukan relasi baik dan eksis antara politik dan administrasi. : ‘*public management cannot be adequately comprehended without reference to crucial relationship that exist between administration and politics and between administrators and politicians.* (Pollits dan Bouckaert, 2004) dikatakan lagi *while there is wide agreement that frontier is an impotent one, there appears to be sharply varying opinions to what is taking place along the borderlines. Some have seen management (is sense modernized public administration plus privatization) invading politics and taking over slice political territory.* (Pollitt and Bouckaert, 2004)

Menurut Rok, pembangunan berkelanjutan yan sifatnya permanen “ *The concept of permanent and sustainable development includes much more than only the respect for the natural environment. It is impossible to protect the natural environment without a simultaneous respect for local laws, principles of democracy and participation in the development of the civil society or the pursuit of the elimination of poverty. Hence the belief that an effective development strategy for a company needs to include the economic, ecological and social dimension to an equal extent* (Rok 2010).

Dalam deklarasi Rio de Janeiro pada perinsip 1 dinyatakan : *Human being are the center of concern for sustainable development. They intitled to a healty and productive life in harmonis with nature.* Kemudian pada prinsip 22 dinyatakan tentang pembangunan berkelanjutan sangat penting memperhatikan kearifan lokal, dan komunitasnya, sangat penting memainkan peran manajemen lingkungan karena mereka mengerti dan tau akan tentang praktik tradisional. Budaya dan kepentingan mereka sangat diperlukan mengenable partisipasi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Posisi komitmen masyarakat adat terhadap pembangunan berkelanjutan sehingga mereka mendapat prediket masyarakat dunia ke empat.

Perjalanan panjang bisnis hutla di Riau merupakan episode panjang dan menarik untuk disimak bagi perlunya penguatan sistem administrasi publik dan bisnis. semestinya baik bisnis maupun publik tetap mengetengahkan administrasi sebagai ibu dan landasan filosofis/akademis. dimana bisnis memerlukan publik dan tetap ingin hidup berdampingan dg publik sebagai market baik publik maupun bisnis. apapun alasannya sebuah praktik ap yang berhasil juga dinilai dari keberhasilan mengelola publik “*management puclic sector agency*”, yang pada hari ini walaupun ap mengadopsi prinsip bisnis dlm npm tetapi digunakan utk kemajuan publik. lalu apakah bisnis boleh mengabaikan dan menista kepentingan publik

Etika bisnis “ditandai dengan sikap mengendalikan diri, pengembangan tanggungjawab sosial perusahaan, mempertahankan diri, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dan menghindari 5k (katabelece - kongkalingkong-koneksi-kolusi dan komisi) yang mampu mengatakan benar itu benar. (Dalimunthe, 2004.) Prinsip etika bisnis menurut Josephen dalam Kurniawati (2015)kejujuran, integritas, kewajaran/keadilan, menghargai martabat orang lain, bertanggungjawab, dan dapat dipertanggungjawabkan (Hanie Kurniawati, 2015). Selanjutnya menurut Paulus Etika bisnis menjadi motor penggerak dilaksanakannya TJSP. Bisnis yang bermoral tidak harus berpijak di atas puing-puing kehancuran sesama. Haruslah dipelihara keseimbangan antara nilai-nilai individu dan nilai-nilai masyarakat, diantara kontrol dan kebebasan, diantara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan masyarakat. (Paulus, 2017)

B. Metode Penulisan

Penulisan kertas kerja ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sera eksploratif, mengungkap peristiwa dan fakta-fakta dari pengalaman ekspansi ekonomi elit korporat hutan lahan “KHL di Riau dalam kurun waktu lama’ baik kajian dan kasus eksplorasi hutan lahan pada masa orde baru sampai ke orde reformasi dari sudut pandang administrasi publik dalam fakta dan pengalaman bisnis hutan lahan di Riau. Metoda penelitian secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus juga untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer berhubungan dengan berbagai cara dan bukti melalui dokumen, peralatan, observasi dan manipulasi informal. Dilihat dari cara kerjanya metode penelitian kualitatif deskriptif dapat bekerja pada tataran permukaan (*appearance*) dan juga di bawah permukaan. Kedua cara ini dapat dilakukan (Straus dan Corbin 2003)

Analisis penelitian ini juga untuk meneliti sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui. Dapat mengungkapkan metode yang sulit diungkapkan dengan metode kuantitatif. Menurut Kriyantono (2010 : 56), dimana riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. Daymon dan Holloway ((2008) menyebut penelitian kualitatif lebih berfokus pada kata, bukan angka, meski ada kalanya angka digunakan untuk menandai frekuensi kehadiran suatu tema dalam transkrip atau terjadinya tindakan tertentu. Menurut Hiilway dalam Mukhtar (2012) Proses penelitian ini mencakup pengumpulan fakta (*fact finding*), penafsiran kritik (*critical interperatation*).

C. Pembahasan dan Analisis

1. Pembahasan

Korporat tetap hidup dan berkembang tanpa peduli kondisi di sekitarnya, meskipun mengorban sistem. Masyarakat dengan desa/adat dengan budaya, adat istiadat, ekonomi, sosial dan lingkungan arti fisik (tata ruang) sehingga hari masih ingin berjuang mengembalikan hak dasar mereka tanah adat. Tanpa disadari banyak desa yang hilang “lost of village” untuk peristiwa pemberian Hak Guna Usaha (HGU) tidak disangka-sangka kantor bupati dan istana siakpun menjadi bagian dari HGU.

Dalam kasus tanah adat masyarakat suku Petalangan di Pelalawan diantara 14.500 hektar tanah adat petalangan yg menjadi lahan HGU PT SP telah memusnah sumber ekonomi bahkan budaya adat istiadat, kearifan lokal yang disakralkan oleh penduduk petalangan yaitu pohon sialang dengan sistem administrasi Kepongan Sialang ikut punah oleh ekspansi bisnis kapitalis. Kearifan lokal kepongan Sialang ini bukan saja menjadi kebanggaan nenek moyang mereka juga dapat dijadikan sebagai model pelestarian lingkungan yang dan efektifhandal dan terbukti bisa bertahan lama. Namun akhirnya punah tanpa bekas oleh ekplorasi ekonomi yang kejam dan rakus. Bahkan disinyalir aksi jahat mereka menghilangkan nyawa tokoh adat penghulu setempat karena menantang keras/ menolak keberadaan perusahaan dan coba mempertahankan tanah adat. Namun kelicikan kapitalis tetap berada pada pihak yang benar dan selalu menang. Perjuangan lebih tiga puluh tahun sia-sia dan selalu pecundang. Karena tidak punya dana perjuangan dan kelompok berjuang sudah pecah belah.

Luas lahan “hutan tanah “ yang hasil dari proses peradilan yang dituntut Pak Rahman Pengulu Setio Dirajo seluas 14.642 ha. Baru diganti rugi seluas 5330 ha sebanyak 607 juta rata-rata pada Thn 1999 mendapat ganti rugi tanaman sebanyak 30 sampai 50 ribu rupiah per KK. Jadi yang masih diganti rugi kurang lebih seluas 9.200 ha. PT SP mendapat HGU tahun 1999 akan tetapi sebelumnya sudah bertanam sawit. Sebanyak 5 Dusun/ kampung yang hilang dari sistem administrasi lama kini disamarkan oleh lahan yang tak berbatas administrative sesuai dengan perizinan. Kemudian pemerintah setempat memekarkan desa- desa disini menjadi 10 desa agar terkesan tidak ada desa yang hilang secara kwantitas. Namun secara faktual wilayah teritorial komunitas adat itu bersama sistemnya sudah punah. Dimana tidak ada lagi pembangunan berkelanjutan. Bukan saja alam hilang secara fisik/tata ruang tetapi juga yang paling penting adalah aspek “human ecology” Hilang bersama dengan tata ruang adalah manusia tua masyarakat adat “orang darat” suku talang. Tidak ada lagi kelanjutan generasi ditanah kelahiran turun temurun. Karen adat kebiasaan mereka sehari-hari banyak bergantung pada “hutan-tanah”

Orang Petalangan juga disebut orang darat atau orang Talang. Talang artinya bambu dimana hutan belantara disini banyak ditumbuh rumpun-rumpun bambu dan suku petalangan banyak memanfaatkan bambu untuk aneka keperluan harian. Kondisi bio diversity baik manusia, flora dan fauna sudah berubah sama sekali. Selama tiga dekade ini sudah berubah menjadi hutan homogen “kelapa sawit”. Mereka sudah kehilangan teritorial sosial dalam sistem kehidupan yg selama ratusan tahun mereka biasakan. Menurut Slater dan Bennis dalam (Wesley G. Mathew , 2000 :4) *social territory of an organization encompasses group, organization, and cultural norm and traditions.*

Hak Publik yg terbaik kalah dengan pelaku bisnis. Realita perjuangan yang sangat lama administrasi publik seakan tidak tampil dalam perjuangan mengembalikan hak masyarakat lapisan bawah “grass roots” di desa-desa. PBK dari sektor budaya masyarakat petalangan hancur oleh aktivitas bisnis PT SP semenjak orde Baru. Padahal PBK sektor budaya adat istiadat melalui kearifan lokal masyarakat Petalangan merupakan model manajemen pelestarian lingkungan yang patut menjadi contoh. Budaya “Kepongan Sialang” yang praktekkan dan pupuk beratus-ratus tahun lamanya musnah oleh aktivitas dan regulasi duet antara pemerintah dan pelaku bisnis. Masyarakat Petalangan di sekitar Desa Sialang Godang tidak lagi memiliki kampung halaman hutan adat yang relatif besar mencapai 15 ribu hektar. Mereka tetap berjuang mendapatkan kembali kampung halaman komunitas adat petalangan. Namun selalu kalah berhadapan dengan korporat bermodal besar. Telah mengadu beberapa kali ke pemerintah daerah dan pusat tapi sia-sia. Pada tahun 2015 coba ikut perjuangan melalui proses peradilan kandas hanya mampu sampai ke pengadilan Tinggi dan kalah. Berjuang memperjuangkan nasib mengharapkan keadilan selalu di dukung oleh embel-embel uang. Berhadapan dengan pemilik modal jelas kalah. Sekarang Pak Rahman pemangku adat yang bergelar “penghulu Sutio di Rajo” itu tetap keras berjuang sampai ke MA. Namun untuk mendapat model perjuangan terpaksa menjadi tukang pakang “broker “ membantu menjual tanah kenalan di Indragiri Hulu. Status dari penguasa adat dengan puluhan ribu hektar tanah adat yang pernah dikuasai turun termurun dengan administrasi kepongan Sialang yang dibanggakan sekarang beralih menjadi tukang pakang “broker” tanah kelak terjual sebagai bekal berjuang sampai ke MA. Sekarang Rahman yang kebetulan ASN” Guru berjuang tunggal “solo” karena kawan-kawan seperjuangan itu tidak segiat dan seliat Pak Rahman . Pak Rahman juga mulai lelah dan jenuh berhadapan dengan kelicikan dan kejahatan kapitalis PT SP di kampung Halamannya. Sementara kearifan lokal PBK Kepongan Sialang yang menjadi kebanggaan masyarakat Riau daratan itu, hanya tinggal kenangan. Pohon sialang habitan lebih sudah berganti, sama halnya dengan Hutan di Riau hari tidak lagi heterogen tapi sudah berubah menjadi hutan homogen Kebun Kelapa Sawit dan HTI.

Komunitas lokal tersingkir paksa dan tersungkur meninggalkan ekosistem mereka. Human ecology” hutan tanah sudah musnah bersama sistem adat yang bergantung pada objek itu. Tidak lagi terjadi keseimbangan ekosistem manusia dengan alam putusa mata rantainya. Alam yang semula asli tak terjamah “naturalism’ dimana mereka hidup ratusan tahun di dalamnya. Kini sudah berpisah dari kehidupan masyarakat adat di Petalangan. Tidak ada lagi model equilibrium yang semestinya ditampilkan oleh administrasi publik. Komunitas asli, masyarakat adat, kaum pribumi, “sendiri berjuang” dan sampai hari ini diacuhkan. Mengadu kesana sini. tidak diperhatikan. Ini musnah oleh kerakusan dan kelicikan KHL yang memiliki modal besar. Bisa membeli dan mengkooptasi banyak kekuatan. Kolaborasi dan kongsi gelao membuat pihak berwenang para pejabat diam dan bisu. Begitu juga proses peradilan tidak berpihak pada masyarakat setempat. Kalah dan kalah, dipecundangi oleh KHL.

Proses eksplorasi hutan dan lahan di Riau, beberapa lalu beralih dari daratan Sumatra yang sudah habis dijarah, ke pulau-pulau di deretan sela Melaka “pulau sedimen yang berawarawa. Kondisi pulau disini amat rentan terjadinya abrasi dan sangat beresiko untuk jangka panjang. Pulau ini juga akan stagnan dalam jangka waktu yang lama. Tidak membangun.

Ekplorasi hutan lahan juga diikuti dengan eksploitasi atas kehidupan dan masa depan penduduk setempat, termasuk budaya dan kearifan lokal yang hilang. Paling nyata adalah sebagian dari pulau-pulau ini akan menjadi pulau yang mati dengan hutan homogen, hutan akasa komoditas bahan baku kertas. Diperkirakan dalam jangka waktu panjang sehingga pulau-pulau berubah menjadi tata ruang statis dan tidak bermasa depan bagi masyarakat disini secara massal. Kenyataan ini jelas tidak memberi peluang untuk eksistensi pembangunan berkelanjutan. Inilah bagian lain dari produk otonomi daerah. ironisnya beberapa pulau seperti Rangsang dan Pulau Padang adalah pulau dari kabupaten pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti. Kebijakan pemekaran jelas membuat masyarakat berharap dan menanti, kelak daerah ini akan maju luar biasa setelah pemekaran. Apalagi pulau-pulau ini berada dibibir selat Melaka, amat potensial untuk dikembangkan menjadi pulau modern seperti Batam, Karimun dan Bintan. Apakah kebijakan ini sebuah terobosan atau kekoyolan.

Perjuangan masyarakat Pulau-pulau di Riau lautan untuk mempertahankan hutan dan lahan di desa mereka, selalu kandas. Akibatnya tidak terjadi disharmonisi antara pelaku bisnis dengan penduduk lokal. Penduduk dan lingkungan terancam. Terancam tidak berkembang dalam jangka waktu lama. Dimana sebelumnya lingkungan sebagai aneka sumber kehidupan, ekonomi, budaya adat istiadat dan kearifan lokal. Jangankan harmonisasi lingkungan dengan masyarakat, untuk melanggengkan pembangunan bernuansa hijau “green politics” dengan kearifan lokal tidak lagi mungkin terjadi. Kesenangan dan kearifan lokal mereka terbayar mahal dan terpaksa bekorban yang sangat besar. Hilang dan musnahnya desa, dusun, kampung halaman “*damage of Village*’ berubah menjadi kawasan tanaman industri dan kelapa sawit.

Mahidin tokoh adat Rangsang mengaku menyerah dan menurutnya para pelaku bisnis hutan lahan “KHL” sangat kuat. Mereka bukan saja bisa melumpuhkan masyarakat yang tidak kompak seperti komunitas kami di Rangsang, bahkan Pemda sendiripun tak berkutik. Beberapa kali terjadi reaksi masyarakat agar mereka tidak menjarah dan merajah-rajah pulau ini menjadi HTI akan tetapi ternyata proyek tidak tidak ramah lingkungan itu tetap jalan. (Mahidin, 22 September 2018). Akibat lain katanya para calon investor pun enggan berinvestasi kesini, karena kondisi lahan disini tidak seperti dulu. Keinginan awal kami disini ingin jadi petani yang berhasil. Apalagi kami dekat dengan Malaysia maka kami jejak kemungkinan ada peminat dari sana jadi investor. Namun dalam perundingan jadi kandas karena sekonyong konyong ada proyek HTI dengan keputusan sepihak yang meluluh lantakkan alam dan semangat kami. Itulah nasib kami. Katanya. Untuk melawan dan bereaksi pertama kami tidak kompak kedua kami tidak kuat melawan kekuatan mereka. Akhirnya kami diam dan pasrah. Artinya situasi proses eksploitasi huthla di Riau bukannya tidak ada reaksi dari publik akan tetapi mereka diposisi yang lemah selalu kalah, dan ketidak berpihak penguasa dan petugas terhadap mereka sengat jelas. Mereka sudah pasrah dan menyadari jika mereka melawanpun pada sistem kapitalism ini sangat kuat akan sia-sia. KHL itu kokoh dan liat. Akhirnya rakyat akan tetap kalah dan usaha mereka tetap eksis dan survival. Artinya pembangunan berkelanjutan hanya dalam kontek memperkaya para pebisnis hutan lahan “KHL”

Pada saat suasana berkecamuk, disaat terjadi penolakan dari masyarakat terhadap masuknya pengusaha HTI, datang dua oknum *Green Peace* orang barat katanya Pak Mahidin. Mereka datang membawa alat menilai tanah, dan kemudian hasil pemeriksaan dikatakan (1)

tanah pulau disini labil dan merupakan pulau endapan (sedimen) (2) humus tanah habis dan kanal yang dibuat membelah pulau akan memperburuk kontur tanah disini.. Menurut Pak Mahidin Tanah disini sudah mulai retak-retak dan pada musim Utara dan Timur pantai runtuh lama kelamaan akan sampai ke kanal. Menurutnyanya analiis dua person *green peace* yang datang beberapa tahun lalu ke desanya bahwa efek terhadap lingkungan dan kondisi fisik tanah sedimen di pulau ini akan luar biasa. Menurut Mahidin bahwa pohon kelapa yang menjadi andalan penduduk pulau Rangsang sudah mulai tidak subur lagi dan sudah diserang oleh hama penyakit. Ia menduga sebagai efek hama akasia sebagaimana yang di prediksi oleh anggota *Green Peace* tempo hari.

Akhirnya banyak desa yang berubah menjadi desa HTI. Menurut Mahidin desa-desa yang digarap HTI diantaranya desa Tebun, Repan, Kemalasari, Teluk Samak dan Tanjung Samak Kiri. Sebelum masyarakat sudah mulai ingin mengembangkan kampung dengan membentuk Koperasi Buana Rangsang, dan menyiapkan Proposal utk bekerjasama dengan investor utk memajukan Rangsang. Garapan area/lahan Koperasipun sudah di etahui dan disetujui Pak Camat Rajito. Diantara proses yang sudah mulai area kerjanya di desa Gayung Kiri, Kampung Tengah, Kampung Baru semua surat menyurat tanah sudah disiapkan dengan Pak Camat termasuk Badan Hukum koperasi. Tapi sayang keinginan mereka ingin maju kan ekonomi kampung gagal setelah masuk perusahaan IKPP. Kami tak kuasa melawan perusahaan. Kami rakyat kecil dan mereka punya backing yang kuat. (Mahidin, 20 September 2018) . namun hari ini sudah mulai kami rasakan efeknya. Kesannya pohon akasia di HTI ada hama yang bisa menular ke tanaman lain. Di Kampung Baru pohon kelapa masyarakat sudah banyak yang mati pucuk dan lama kelamaan tumbang.

KHL memang licik. Isu menarik yang dimanipulasi oleh perusahaan bahwa di pulau-pulau yang mereka garap hutan dan lahannya adalah pulau yang tidak berpenghuni. Padahal di pulau Padang dari dua kecamatan jelas pulau yang dihuni oleh masyarakat. Namun mereka sudah memasukkan alat berat sebanyak 1025 dan eskavator untuk menjarah pulau sedimen itu sebagai lahan HTI yang terlebih dahulu memanfaatkan kayu alami yang sudah beberapa abad hidup di pulau itu. Walau bagaimanapun bahwa bupati Meranti seakan-akan kaget dengan kejadian itu (4 Mei 2011) bahwa secara prosedural izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Masyarakat menantang dan mengadu kesana sini. Karena tidak digubris di daerah “gerak bisu” menjahit”. Coba mengadu ke Jakarya, ke DPR RI dan Kementerian Kehutanan.dan LH Juga tidak digubris dan tidak ada penyelasain. (28 April 2011). Mereka berdemo dengan alasan “ Menyelamatkan Pulau Padang dan Pulau Rangsang” PT LUM, SRL. (Sumber Serikat Tani Nasional, Jumat 6 Mei 2011) thema “ Pemerintah Harus belajar Mendengar “ Indonesia Harus Mampu menyelamatkan Pulau Padang- Tolak HTI RAPP.

KHL sangat licik membungkam para tokoh dan orang-orang berpengaruh di Riau, sedangkan pengalaman Pak Datok Mahidin tokoh LAMR di tingkat kecamatan saja coba dibungkam dengan cara memujuk belia uagar diam dan di iming-iming jadi mandor di gaji 7 juta/bulan. Menurutnyanya lagi para aparat diberi jatah, seperti kades 100 Juta setahun.

Akhirnya lama kelamaan semakin terasa, dampak terhadap pulau-pulau di pinggiran selat Melaka. Sebuah demonstrasi masyarakat dan mahasiswa di kantor DPRD Riau yang

temanya “Tolong selamatkan desa kami” itulah jeritan dan laungan pada demonstran yang berdemo pada tanggal 34 September 2018 baru-baru ini. Kedatangan para petani dan nelayan di tiga kabupaten yakni Meranti, Indragiri Hilir dan Bengkalis. Mereka datang ke Pekanbaru menyampaikan keluhan kondisi pulau kampung halaman mereka. Artinya kondisi puluhan desa pantai di tiga kabupaten tersebut perlu perhatian karena sudah terjadi abrasi dalam jumlah yang relatif luas. (Tribune Pekanbaru, 25 September 2018). Justru itulah pemanfaatan pulau sedimen yang terdiri dari gambut dan rawa juga semestinya dilakukan dengan hati-hati.

Masih di pulau-pulau provinsi Riau terjadi konflik lahan antara masyarakat Pulau Rupa dengan PT SRL. . Warga dua desa menuntut pengembalian lahan di kawasan konsesi perusahaan HTI tersebut. Warga dari dua desa yang berada di Pulau Rupa yakni, Desa Pergam dan Desa Mesim Kecamatan Rupa mendesak (SRL) mengeluarkan lahan yang diklaim milik para warga sedang digarap perusahaan perkebunan. mengelola dan menggarap lahan yang diklaim sebagai milik mereka. “Masyarakat di dua desa ini sangat resah. Selain persoalan tapal batas antara lahan milik masyarakat dengan perusahaan yang tidak jelas, mereka juga mencemaskan jika areal lahan kelompok masyarakat ini ditambah perusahaan,” ujar Sugianto, Ketua Komite Pimpinan Kecamatan Serikat Tani Riau (STR) Kecamatan Rupa.,

Di kecamatan Pinggir Bengkalis semenjak tahun 1991 kawasan yang terdiri dari 5 Desa atau kampung disini dijadikan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dari PT AA. Dimana lima Desa menanggung akibatnya yaitu Desa Beringin, Teluk Betong, Tasik Serai, Melibur, Lubuk Lembut. Di kawasan ini diperkirakan terdapat ratusan ribu hektar hutan dan kampung masyarakat yang inklaif menjadi HTI AA. Sudah tentu kampung halaman dan lahan kehidupan masyarakat disini terancam dengan ekspansi hutan yang sedemikian besar untuk kepentingan pihak pengusaha AA. Menurut Pak Mohd Syarif yang bertindak sebagai Kepala Dusun Tua dan sesepuh masyarakat tempatan. Semenjak kawasan ini aktif beroperasi tangkapan ikan masyarakat disepanjang Sungai Mandau mulai punah dan sangat berkurang. Ini disebabkan pupuk pohon akasia yang keras, sehingga mematikan ikan-ikan disini.

Pengalaman yang menarik tentang pembangunan berkelanjutan dan sepak terjang KHL, juga terjadi di jantung kota Dumai. Proses industri agro efek lingkungan tidak termitigasi melalui perhatian dan kepedulian terhadap penduduk setempat di tengah-tengah kota dan pelabuhan internasional. Semestinya melalui penerapan CSR sesuai Perda Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 dapat memberi perhatian pada masyarakat setempat dan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapp Perda ini tidak berfungsi bahkan tidak tersosialisasi. Pemerintah provinsi/kota tidak berperan serta, tidak menunjukkan sikap tegas, tidak bertanggung jawab dan sebagiannya dilakukan dilakukan kurang transparan. Mengatasnamakan CSR.

Anehnya meskipun bisnis menimbulkan banyak kesan/dampak negatif dan serius terhadap lingkungan, namun manajemen bisnis tidak familiar dan tidak komunikatif dengan lingkungan. Menutup diri dari komunitas. Kawasan industri dijaga ketat bagaikan kamp militer. Bahkan tidak bersahabat dan penuh rasa curiga.

Belum ada upaya serius dari pemerintah setempat untuk memfasilitasi proses bisnis yang pro publik dan mensosialisasi perlunya etika bisnis. Dalam konteks CSR tidak terjadi komitmen dalam melaksanakan Tanggung jawab Sosial Perusahaan. Padahal baik perda maupun undang-undang mewajibkan perusahaan yang bergerak dari sumber daya alam

diwajibkan melaksanakan TJSP secara terprogram, berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Semestinya pelaku bisnis menyadari bahwa publik juga membutuhkan planet bumi ini. Ironisnya semakin otda semakin menjadi-jadi kejahatan ekonomi pelaku bisnis terhadap “lingkungan” dan mengabaikan arti penting pembangunan berkelanjutan demi menyelamatkan bumi dan isinya. Proses reklamasi yang tidak partisipatif menimbulkan efek banjir di Kota Dumai. Karena beberapa anak sungai dan parit saluran primer ditutup oleh pengusaha yang menjalankan operasi di pelabuhan di jantung kota Dumai. Tepatnya di sepanjang pantai utara Dumai jalan Datuk Laksamana. Mencakup tiga kelurahan Laksamana, Dumai Kota dan Buluh Kasap

Sampai hari ini belum ada upaya memfasilitasi proses bisnis yang pro publik dan mensosialisasi perlunya etika bisnis diantaranya mengaplikasi TJSP sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sosial. Upaya memitigasi dapat setidaknya-tidaknya perlu secara konsistensi melaksanakan TJSP secara terprogram, berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Semestinya pelaku bisnis menyadari perlunya hidup berdampingan dengan penuh pengertian dan damai. Kemudian menyadari bahwa publik juga membutuhkan planet bumi ini. – ironisnya semakin otda semakin menjadi-jadi kejahatan ekonomi pelaku bisnis terhadap “lingkungan” dan mengabaikan arti penting pembangunan berkelanjutan demi menyelamatkan bumi dan isinya

2. Analisis

Spirit otonomi memberi kewenangan yang besar kepada Pemda, lebih besar dari permasalahan yang timbul oleh diskresi mereka. Otonomi memiliki esensi menyelesaikan masalah masyarakat daerah secara lebih cepat dan tepat. Karena persoalan spesifik dan keunikan ekologi administrasi daerah idealnya Pemda yang mengetahui dengan jelimet dan tuntas. Semestinya mencermati persoalan dari fenomena bisnis KHL dan dampak luar biasa yang ditimbulkan timbul sikap respek dan akuntabilitas kepada public di daerah. Tidak terapkannya akses public ke perusahaan, yang menutup diri tidak mau peduli dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat komunitas stempat merupakan tantangan pemda sebagai fasilitator dan mediator yang cakap memainkan peran komunikasi administrasi publik. Terkesan pemda kabupaten kota tidak memfasilitasi dampak dan tuntutan masyarakat termasuk menuntut hak hutla dimana perkara “kasus hutla” banyak yg statis dan tidak progress meskipun otonomi daerah sudah dua dekade lamanya. Banyak hak-hak masyarakat, baik individu maupun komunitas tidak terselesaikan, dimana berpuluh-puluh tahun berjuang menuntut hak, tapi tidak ada penyelesaian setidaknya titik terang. Walaupun besar harapan masyarakat pada otonomi daerah dan berkepemimpinan putera daerah sebagai tuntutan reformasi disayangkan tidak terjadi kemajuan yang signifikan baik tampil sebagai fasilitator atau yang lebih ekstrim lagi, meninjau kembali jau dan memperbaiki kebijakan. Hal ini perlu dalam rangka membangun wibawa administrasi publik yang governance menampilkan akuntabilitas publik.

Persoalan ini mungkin tidak hanya terjadi di Riau saja. Semestinya ada upaya pemerintah pusat meninjau kembali dan merevitalasi kebijakan yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan tidak pro manusia. Tidak humanis, dan menyimpang dari filosofis pembangunan sosial. Banyak persoalan pengusahaan hutan dan isinya di Inonesia.

Carthy menggambarkan tersingkirnya masyarakat asli di Kalimantan Tengah dengan cara mobilisasi dan pemaksaan agar masyarakat adat tersingkir dari habitat mereka, dilakukan melalui kebijakan pemerintah yang terstruktur dan masif. Pola yang paling ampuh adalah alasan meningkatkan ekonomi nasional, meskipun jelas-jelas telah meluluhlantakkan ekonomi masyarakat tradisional, orang asli dan pribumi, (McCarthy, 2007). Praktek-praktek ini penguasaan hutan lahan memang hebat, sehingga tidak terbaca sebagai praktek *illegal logging*, diantaranya perambahan hutan di Rupert mengatasnamakan pesantren seluas 5500 hektar menghabiskan APBD untuk land clearance. Hutan rimba yang perawan pupus sementara pesantren tidak muncul sama sekali. (Teyusa, 2010. Akan tetapi fakta hutan punah dan eko sistem rusak dan bahkan hak-hak publik lokal terhadap hutan dan lahanpun terabaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Colfer dan Resodarmo dalam (Nurdjana dkk: 2005:64) desentralisasi kehutana bukan memperbaiki situasi justru semakin memperburuk keadaan lingkungan hutan dan lahan dan menjadi ajang korupsi.

Meskipun dari kepentingan pengusaha KHL dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan seakan tidak menimbulkan pengorbanan sistem hutan dan lahan. Akan tetapi pada hakekatnya justru terjadi konflik dengan masyarakat setempat terutama masyarakat adat atau orang asli. Ketika mereka mengabaikan aspek pembangunan berkelanjutan. Kesan ingin hidup dan senang/menang sendiri.

Direktur WALHI Riau, Hariansyah Usman mengatakan, penyelesaian konflik lahan saat ini hanya ada di atas kertas tanpa eksekusi di lapangan “Pembiaran konflik tanpa solusi inilah yang menaikkan situasi pada level perang. Ini artinya berkeinginan menghancurkan lawan atau menghalalkan secara cara. Masyarakat yang tidak memiliki modal semakin tertekan oleh pemodal besar yang memiliki relasi di pemerintah. Masyarakat frustrasi. Tidak percaya pada alat negara untuk membela mereka,” ujar Zazali kepada Mongabay (Mongabay Indonesia), July 31, 2012 3:19 am

Banyak peneliti dan para LSM mengambil perhatian terhadap pengabaian hak-hak masyarakat terhadap hutan dan lahan. Karena masyarakat asli orang tempatan sebagai masyarakat agraris juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan dan lahan. Justru karena itulah para peneliti dan pemerhati luar negeri juga mengambil penting persoalan dan efek ekspansi ekonomi potensi hutan lahan. Sebagaimana dikatankan Hai (2013) *While concern over deforestation was the initial focus. The impact of deforestation on the lost biodiversity, land and social conflict*

Inti kebijakan desentralisasi kehutanan memastikan agar pemerintah daerah dapat melayani masyarakat tempatan dengan lebih baik. Otonomi daerah belum dapat memberikan manfaat pengelolaan hutan kepada masyarakat daerah bahkan peningkatan eksploitasi hutan justru mengancam kerusakan hutan yang lebih besar (Colfer dan Resosudarmo dalam Nurdjana, 2005) Data Jikalauhari menunjukkan dalam tiga tahun 2009-2012, Riau kehilangan tutupan hutan alam sebesar 565.197.8 hektar (0,5 juta hektare),

Sebenarnya administrasi dapat dijadikan sebagai menjadi media penyelesaian masalah memfasilitasi antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik. Catatannya bagaimana kita sebagai bangsa yang bertamadun memandang bahwa administrasi itu penting dan bisa berperan dalam berbagai proses kehidupan, karena sifatnya yang universal. Diantara peranan

yang bisa dimainkan oleh administrasi adalah sebagai alat perubahan sosial, memecahkan konflik, kepentingan bersifat universal, peluang revolusi manajemen dan kunci modernisasi bangsa (Lypawski, 1966), inti dapat dipakai sepanjang administrasi dihargai dan dirasakan penting oleh siapapun terutama penguasa. Rasa tanggung terhadap public sebagai amanah “mandate” bagi administrator sangat perlu. Apalagi menyelesaikan konflik dan mengembalikan hak public sebagai warga negara. Karena itu dari pelayanan public baru bukan melayani pelanggan/pengusaha akan tetapi melayani warga negara (*people*). Oleh karena itu menerapkan elemen pokok dari Administrasi Publik harus melayani publik. Masyarakat berhak mengkritik perilaku pemerintah. Orientasi pejabat pemerintah terhadap kepentingan publik adalah prinsip pokok pemerintah yang demokratik. Dengan sikap pembahasan hati-hati terhadap tanggungjawab mengantarkan kita pada tiga hakekat tanggung jawab (1) tanggungjawab berarti kewajiban legal (2) Tanggungjawab dipandang sebagai kualitas moral (3) Tanggungjawab diartikan sebagai sikap tanggap terhadap sistem nilai orang lain. Dipetik kata bijak tentang kebijakan dari Santosa (2012) dipetik dari Sentos *All human wisdom is summed up in two word, wait and hope* (seluruh kebijakan manusiawi dapat diringkas dalam dua pata kata “ Menanti dan Berharap” . Begitu besarlah harapan public terhadap administrator yang governance. Administrasi jangan dipolitisir termasuk politik ekonomi yang merusak tatanan ideal administrasi. Menurut Wilson administrasi yang banyak campur tangan politik justru akan menimbulkan kegelisahan/kekacauan. Administrasi itu merupakan bidang bisnis. (Wilson 1887). Sampai hari ini administrasi public dengan paradigma NPM memberikan penekanan pada (a) culture millieu organization (b) strengthening local level institution (3) promoting accountability in public management.

Administrasi public sebagai agency penyelenggara negara tidak bisa lepas dari isu organisasi publik dalam berbagai level. Mesti merespon isu-isu penting menyangkut kepentingan publik. Baik dari pendekatan good governane, new public management, maupun new public governance. Watson (1994), mendefinisikan organisasi sebagai “*organizations are sets of ongoing human relationships*”. Sementara Bowey berpendapat bahwa organizations cannot be conceived without regard to human issues (Bowey 1980). Artinya pemerintah tidak boleh mengabaikan/acuh dengan isu-isu kemanusiaan dan terlalu berorientasi dan memanjakan kepentingan bisnis oleh segelintir KHL.

Dalam kaitan administrasi dengan lingkungannya Charles Beard dalam Gaus menyatakan *formulated some axioms of government in which environmental change is linked with resulting public administration. any such society itself, is strong proportion to its capacity the administer the functions that are brought into being*. Setiap administrasi yang sukses yang kompleks konsekwensi setiap kesuksesan masyarakatnya sendiri, dengan proporsi yang besar untuk meningkatkan kapasitas dengan mengadministrasikan fungsi-fungsi agar menjadikannya sesuatu yang lebih baik. (Beard, 1947) bahwa administrasi sebagai alat modenisasi sebuah bangsa. Emery dan Giauque (2014) memetik pendapat Wyser yang mengatakan apabila perkembangan terbaru manajemen akan memunculkan ukuran-ukuran baru maka ianya tidak dapat melenyapkan tradisi logik administrasi publik.

Pendekatan pemerintah yg terlalu berorientasi pada kekuasaan dan sikap penguasa semestinya beralih ke sikap adminisrtrator yang humanis. *“Human cooperative effort”* (Wilson:1887) membina *relationship* dan *good understanding* “mutually (Berkley dan Rouse, 1997). Baik administrasi bisnis maupun publik semestinya kembali merujuk pada model sederhana pendekatan “filosofis administrasi” sebagai alat yang mengatur dan , menertibkan. Salah satunya menampilkan proses sosialiasi untuk menyadarkan para pebisnis “KHL” akan perlunya kepedulian lingkungan dan tanggungawab sosial. Dua pendekatan etika perlu mengedepan dari proses bisnis para “KHL” tersebut. pertama pendekatan etika administrasi public melalui standart perilaku seperti Impartially, honesty, integrity, objective dan right and responsibility serta akuntabilitas public. Menurut Mark Robinson (2015) administrasi publik paradigma “NPM” yang reformasi setelah tahun 1990 mengaplikasikan *“ How can we make government more honest? Integrity and anti-corruption reforms 1990”*

Etika bisnis tidak menista komunitas atau masyarakat, karena bagaimanapun public adalah sasaran produksi dan pemasaran. Banyak energy “public” diperlukan dalam proses bisnis. Maka tidak mungkin mengabaikan kekuatan sosial, ekonomi dan budaya yang ada ditengah-tengah masyarakat dimana bisnis beroperasi. Amat tidak etis tentunya. Etika bisnis “ditandai dengan sikap mengendalikan diri, pengembangan tanggungjawab sosial perusahaan, mempertahankan diri, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dan menghindari 5k (katabelece - kongkalingkong-koneksi-kolusi dan komisi) yang mampu mengatakan benar itu benar. (Dalimunthe, 2004). Bisnis menjadi motor penggerak dilaksanakannya TJSP. Bisnis yang bermoral tidak harus berpijak di atas puing-puing kehancuran sesama. Haruslah dipelihara keseimbangan antara nilai-nilai individu dan nilai-nilai masyarakat, diantara kontrol dan kebebasan, diantara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan masyarakat. (Paulus, 2017). Bila dikaitkan dengan isu pembangunan berkelanjutan maka jelas hasil konfrensi dan deklarasi Rio de Jeneiro pada perinsip 1 dinyatakan : *Human being are the center of concern for sustainable development. They intitled to a healty and productive life in harmonis with nature.*

Kemudian membangun komunikasi yang elegant dan tidak menutup diri dari lingkungan dimana mereka menjalankan operasi, sedangkan polusi/resido selalu disuplai ke masyarakat dengan berbagai efek yang dirasakan. Mungkin melalui pendekatan CSR/TJSP dapat meringankan “memitigasi” penderitaan dan kesusahan mereka. Tentunya proses ini memerlukan campur tangan pemerintah sebagai agen komunikasi administrasi public, pemimpin transaksional dan sekaligus transformasional. Bagaimanapun efek diskresi atau regulasi dari buah tangan pemerintah perlu dipertanggungjawabkan. Setidak-tidak melakukan pendekatan dalam bentuk sosialisasi kepada para KHL tentang etika bisnis perihal membina sikap perlunya membuka diri membina relasi dengan masyarakat setempat. Sembari menyampaikan kepada mereka perihal banyaknya efek yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis hutan lahan mereka. Setidak-tidaknya memperhatikan/mengambil perhatian terhadap kondisi prasarana jalan umum yang hancur oleh proses bisnis KHL tersebut. Maka wajar jika ekonom seperti Ezra Mishan dalam (Andre Gorz. 2003)menyatakan :“jika kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh pertumbuhan ikut dimasukkan ke dalam perhitungan, maka “pertumbuhan” memberi tanda kemerosotan dan bukan perkembangan”. Biaya yang ditimbulkan lebih tingginya daripada keuntungan yang ia berikan

Administrasi merupakan proses memfasilitasi kerjasama yang humanis dan melalui proses kolaborasi untuk kooperatif. Menurut Wilson mahagutu/pelopor administrasi modern mengkonsepsikan bahwa administrasi adalah “ *human cooperative effort*”. Usaha yang manusiawi dalam kebersamaan. Sementara konsep administrasi menurut Berkley dan Rouse terdiri dalam lima ingridient/komposisi. Diantaranya *people- action- interaction- relations dan mutually*. People dalam hal ini adalah orang banyak – publik sebagai penikmat planit bumi yang dibutuhkan bersama, sekaligus posisi sebagai pemegang amanah “khalifah” di planet bumi ini. Justru karena itu mesti memelihara “care bersama”. Karena sama-sama butuh terhadap bumi ini. “. Mahatma Gandhi dalam satu kata filosofinya tentang alam mengatakan: “ Dunia ini sanggup memenuhi kebutuhan manusia, tapi akan tidak sanggup memenuhi kehendak orang yang rakus.” filsafat Melayu tentang perlunya mencintai alam. “*Tanda ingat kemasa datang, merusak alam ia berpantang- Siapa mengenang anak cucunya, bumi yang kaya takkan di rusaknya*”.

Kemudian untuk melanggengkan kehidupan mesti ada sesuatu usaha/kerja/aktivitas dilakukan. Kerja-kerja itu menjadi semakin ringan jika diaktifkan bersama, interaction. Menunjukkan bahwa manusia perlu saling membina solidaritas dan soliditas. Tidak menampung sikap ego, ingin hebat, maju dan menang sendiri. Demikian juga dalam bisnis perlu membina tim kerja dan membina relasi keluar dan ke dalam. Justru itu interaksi mesti di langgengkan dan suasana yang harmonis/serasi dengan membina relations. Mengarahkan pada relationship berkomunikasi dengan baik antara sesama tidak menutup diri dan hanya berkomunikasi dengan para pejabat dan pengambil keputusan negara, sehingga menista hak-hak publik. Karena pada relasi yang baik itulah letaknya berkelanjutan- sustainable. Proses eksplorasi hutan lahan selama ini minim partisipasi, tidak terakses publik dan tertutup, tidak mencerminkan transparansi, sangat elitis sifatnya “policy model elit”. Sekonyong-koyong publik kejatuhan regulasi yang membawa penderitaan bagi mereka. Penderitaan yang dialami akhir di acuhkan saja oleh KHL dan pemerintah. Kondisi masyarakat diam dan apatis bukan berarti setuju. Tapi diam menyerah setelah dipecundangi oleh regulasi yang tidak memihak pada mereka. Artinya proses bisnis mengabaikan arti penting demokratisasi. Padahal kata akhir dari proses administrasi yang berhasil itu adalah “mutually” membangun sikap penuh saling pengertian, bertenggang rasa dengan kondisi orang lain dan empati. Apabila hal ini tidak menjelma/wujud dalam proses administrasi menandakan ada yang salah dari proses itu.

D. Penutup : Kesimpulan dan Rekomendasi.

1. Kesimpulan.

Dampak bisnis terhadap publik lokal di Riau perlu menjadi perhatian. Ternyata reformasi dan otonomi daerah tidak memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat yang dizalimi oleh KHL dan jaringannya. Artinya keberadaan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan aneka dampak yang ditimbulkan. Bukan saja berpengaruh pada persoalan kemanusiaan. Sosial dan ekonomi bahkan memberikan akibat yang luar biasa terhadap musnahnya sistem adat, kearifan lokal di daerah. Untuk mengembalikan situasi alam dan adat yang hilang sangat sukar. Apalagi bila pemerintah tidak

menganggap penting hal-hal tersebut. maka keberadaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perlu ditindak lanjuti segera untuk mengamankan sisa-sisa hutan dan sumber daya alam di Riau atau merespon kondisi yang sudah ada agar pembangunan berkelanjutan setidaknya tidak terkesan mengedepan persoalan kemanusiaan, dan tidak terlalu memanjakan pelaku KHL yang sudah banyak menista warga tempatan, terutama masyarakat adat yang lemah dan selalu pecundang dalam perjuangannya.

Justru orde reformasi/otda semakin memperburuk situasi. Sekali lagi gerakan/aktivitas bisnis mengeksplor Sumberdaya alam hutan lahan mengancam sumber kehidupan masyarakat agraris/urban. Mengubah tata ruang dalam waktu lama/stagan Merusak sumber ekonomi masyarakat, menimbulkan efek polusi, menghancurkan budaya, adat istiadat dan kearifan lokal. Menimbulkan efek kerusakan hulu-hilir. Intinya masyarakat tersingkir terjadi marginalisasi dan menutup ruang gerak komunitas. Tidak ada upaya mereposisi kebijakan “policy modification” meninjau dan mengevaluasi dampak bisnis terhadap publik lokal. Diperlukan budaya pemerintahan yang kembali mengedepankan filosofis administrasi, agar kepentingan bisnis dan public dapat difasilitasi dan terjadi harmonisasi kedua sektor tersebut. diantaranya membina sikap berelasi yang baik dan membangun sikap mutually. Agar proses aktivitas, interaksi dari semua warga negara dapat harmonis dan langgeng. Jangan lagi menampilkan sikap penguasa, dengan kekuasaan yang bisa terkooptasi oleh kepentingan bisnis sehingga mengorbankan public dan lingkungan secara massal menista arti penting pembangunan berkelanjutan.

2. Rekomendasi

Perlu mengintegrasikan etika bisnis dengan etika publik, dimana peran administrasi publik mencerminkan pemerintah yg amanah dan pro publik. Karena publik peminjam kekuasaan “pemberi otoritas resmi kepada pemerintah’ sehingga legitimate. Meskipun kasus-kasus yg terjadi disemai oleh pemimpin masa lalu, semoga dengan kekuasaannya rezim komited diharapkan bisa menunjukkan sikap amanah yang pro publik lokal yang sampai hari ini tetap mencari keadilan. Proses AP/pemerintah terkesan bisu dan tidak mendengar. Dalam kasus-kasus ini para penegak keadilan seakan tidak tampil ditengah-tengah mereka. Padahal administrasi publik baru mencerminkan administrasi memerlukan proses kebijakan yang demokratis dan adil untuk menciptakan kesejahteraan publik. Begitu pula manajemen publik baru memperkuat institusi lokal, mengedepankan akuntabilitas publik . semakin maju peradaban semakin dituntut tipologi pemerintah demokrasi, dan akhirnya kembali ke entitas demokrasi. Menampilkan karakter pemerintah yang melayani rakyat. Meskipun perkembangan administrasi public luar biasa, jika tidak hati, kadangkala termakan oleh gelombang bisnis yang licik dan jahat. Belajar dari pengalaman negara-negara maju menjadikan administrasi adalah kunci modernisasi bangsa, proses pertembungan bisnis dan publik perlu mencari soko guru yang selama ini administrasi menjadi ibu kedua disipilin tapi juga kadang terlupakan oleh watak bisnis yang mengabaikan etika bisnis. Administrasi” diharapkan mampu menjembatani bisnis dengan public. Oleh karena itu pendekatan filosofis administrasi, etika bisnis dan pembangunan

berkelanjutan perlu diaplikasikan untuk menjembatani persoalan kepentingan bisnis hutan lahan di maneja oleh KHL untuk menampilkan proses kerjasama bisnis dan public yang lebih harmonis. Disarankan agar pemerintah sesegera mungkin menginventarisasi potensi konflik dan sumberdaya dijadikan sebagai sumber ekonomi masyarakat di daerah. Dalam hal ini sebelum menuntaskan permasalahan, perlu menampung aspirasi secara partisipatif melalui proses pemetaan masalah dan pola penuntasan yang pro publik lokal.

Keberadaan partisipasi public dalam bisnis untuk membuat public dan pemerintah tampil sebagai subjek dan bukan objek bisnis KHL. Persoalan apa yang terjadi seperti kolusi antara pemerintah dan KHL sudah tidak menjadi rahasia public lagi. Kelicikan mereka diketahui diantaranya memegang orang-orang penting yang akhirnya diam dan takluk dengan bisnis mereka. Padahal pengorbanan “lingkungan” secara sistem sudah luar biasa, dirasakan banyak efek yang timbul dari kerakusan mereka. Maka dari itu perlu di ke depankan standar perilaku, audit lingkungan yang serius, membuka akses public dengan KHL agar mereka menyadari dan peduli akan efek yang ditimbulkan. Pola pikir pemerintah yang hanya berorientasi investasi, kepentingan sesaat, mengambil jalan pintas menggarap sumber daya alam jelas sangat menimbulkan efek disharmonisasi dan sukar mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara benar dan kaffah. Pemerintah daerah/pusat perlu konsisten dan tidak setengah-setengah. Diantaranya kebijakan yang perlu didukung adalah segera mengaplikasikan peraturan presiden tentang pembangunan berkelanjutan dan moratorium perkebunan kelapa sawit secara tegas dan konsisten.

E. Daftar Pustaka

- Caiden. Gerald. 1991. *Administrative Reform Come Ages*. Walter Gruyter. New York.
- Cooper. J Philip . (dkk) 1998. *Public Administration for the Twenty First Century*. Harcourt Brace College Publishers. USA.
- Gaus M. Jonh . 1947. *The Ecology of Public Administration*. University of Alabama Press.
- Dahl A. Robert, 1992. *Demokrasi Ekonomi* (terj) Setiawan Abadi. Yayasan Obor . Jakarta
- Dalimunthe Rita. 2004. *Etika Bisnis, -usu repository@2004 Universitas Sumatra Utara*.
- Effendy Tennas. 2010. *Kearifan Pemikiran Melayu*. Pemko Kota Pekanbaru – Universiti Malaya. Yayasan Tennas Effendy. Pekanbaru
- Embong Abdul Rahman. 2003. *Pembangunan dan Kesejahteraan . Agenda Kemanusia Abad 21*. Penerbit UKM. Bangi – Selangor Daruh Ehsan.
- Freeman . T W. 1968 *Geography and regional administration*. . Hutchinson university library. London
- Gaventa John dan Valderrama Camilo, 2001 *Partisipasi, Kwargaan dan Pemerintah Daerah, Lokakarya Meningkatkan Partisipasi dalam Pemerintah daerah”* Jakarta, New Economics Foundation, *The British Council*
- Kets de Vries dan Elizabeth Florent-Treacy. 2005. . *Kepemimpinan Global dari A sampai Z*. (ed) Subir Chowdhury.” Organisasi Abad 21 (terj) aty Cahayani. Indeks. Jakarta
- Kurniawati Hanie 2015. . *Literature Review : Pentingkah Etika Bisnis Bagi Perusahaan*. Politeknik Negeri Bandung.
- Lepawsky. Albert. 1965. *Administration. The Art and Science of Organization and Management*.. Edited by v. O. Key, fr., Harvard University Oxford & IBH Publishing co. First Indian edition. Calcutta
- Manning Nick dan Parison Neil. 2004. *International Public Administration Reform, Implication for Russian Federation*. Washington Dc. Word Bank.
- Mukhtar. 2012. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Referensi. Jakarta.
- Nurdjana dkk. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Paulus Lilik Kristianto. 2017. . *Etika Binis Dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. Fakultas Ekonomi UKRIM
- Pecaric. Mirko 2011. *Administrative culture Hrvatska I Komparativna Javna Uprava*, god. 11. (2011.), br. 2., str. 379–409.

- Christopher Polliy dan David Held Pollit. 2007. *“Democracy and Bureacracy, . “ New Form of Democracy*, London : Sage Publications.
- Randall P. White, Philip Hodgson dan Stuart Crainer. 1997. *The Future of Leadership. Masa depan Kepemimpinan Revolusi Gelombang* (terj) Hari Suminto. Interaksara.
- Santosa, Pandji 2012. *Adminsitrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika aditama. Bandung
- Rigg. FW. 1985, *Studi Perbandingan Administrasi Negara*. (terj) Baysaruddin Noer. FISIP Universitas Riau. Pekanbaru.
- Rondenelli A. Dennis. 2007. *Government Serving People : The Change Roles of Public Administration in Democratic Governance*. United Nation
- Sebahattin Gültekin. Volume: 8 Issue: 2 Tahun: 2011. *Manajemen publik baru: Apakah itu benar-benar baru?*.
- Sobri. *Kunflik Kekerasan Antara Masyarakat Melayu Tambusai dengan PT Torganda Property*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 4 April 2011.
- Strauss Anselm dan Corbin Juliet. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. (terj) Mohammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tamura. Juji , 2003. *Redistribution policies for the rural poor of developing countries. Toward more equitable development*. University of Malaya Press. Kuala Lumpur.
- Tarmizi Ahmad. Ahmad 2014. *Riau Dalam Percaturan Masyarakat Ekonomi Asean “MEA” Belajar dari Pengalaman Kebijakan Masa Lalu*. Jurnal Siasat Volume 7 April 2014. Page 18-32
- Tarmizi Ahmad .. *Restorasi Koperasi Unit Desa, Sebuah Pendekatan Teori Organisasi*. Prosiding Seminar Nasional Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. UGM Yogyakarta. 8 Oktober 2016
- Tarmizi. Ahmad Jurnal Siasat Edisi 4 Taun II, Juli – Desember 1997 “Manejemen Asap” Tantang Administrasi Negara dalam Percaturan Politik EKonomi.
- Tarmizi. Ahmad 2010. *Reformasi Administrasi Publik dan Pembangunan Daerah dalam Pemerintahan Daerah Era Otonomi Daerah “ Suatu Kajian di Kabupaten Bengkalis. Propinsi Riau (2000-2005)*. Tesis Ph.D. Universiti Utara Malaysia. Sintok Kedah Malaysia
- Teoh Cheng Hai. 2013. *Malaysian Corporations As Strategic Player in Southeast Asia’s Palm Oil Industry*. (Ed) Oliver Pye and Jayati Bhattacharya. *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia. A. Transnational Perspective. ASEF-IQA and ISEAS*. Singapore.
- The Rio Declaration of enviroment and development) the united Nations Confrence on Enviroment and development Having met at Rio de Jeneiro from 3 to 14 June 1992.)*

- Thoha Miftah Thoha. 2011. *Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prada Media Group. Jakarta.
- Waldo Dwight. 1986. *Pengantar Studi Public Administration*. (terj) Slamet W. Admosoedarmo. Aksara Baru. Jakarta.
- Wesley. G. Matthei G. Wesley. 2000. *Managing The System, How The Change The System*. Synergy Books International- SAM Publishing Sdn Bhd. Kuala Lumpur.
- Willson W “ *The Study of administration*. 1887. (ed) Jay M. Shafritz dan Hyde. C. Albert. *Classic of Public Administration*. Moore Publishing Company. Illinois. USA
- William A, Stimson. 1996. *The Robust Organization. Transforming Your Company Adaptive Design*. Irwin Professional Publishing. Chicago.
- Winters A. Jeffrey. 2004. *Orba Jatuh, Orba Bertahan. Analisa Ekonomi-Politik 1998-2004*. Djambatan. Jakarta
- Tribune Pekanbaru, edisi 25 September 2018 .

MODEL KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SEKTOR SWASTA DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA

Oleh :

Wawan Risnawan ¹⁾, Ahmad Juliarso ²⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jln. R.E.Martadinata No.150 Ciamis

Abstrak

UMKM di Indonesia merupakan salah satu pilar stabilisator krisis ekonomi moneter tahun 1997, Namun dalam perjalannya, stagnasi perkembangan UMKM di Indonesia harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Lambannya perkembangan UMKM di Indonesia terlihat dari rendahnya produktivitas UMKM serta masih banyaknya UMKM yang mengalami gulung stagnan dalam usahanya. Hal ini diakibatkan karena : (1) Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan; (2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (3) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar; (4) Mentalitas Pengusaha UMKM dan (5) Kurangnya Transparansi antara generasi awal pembangun UMKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Keadaan ini mendorong pihak pemerintah untuk mengevaluasi program pengembangan UMKM yang ada. Partisipasi pihak swasta hendaknya dijadikan pemikiran yang positif dalam pengembangan UMKM di Indonesia mengacu pada konsep Good Governanve melalui kemitraan dengan pemerintah kondisi ini akan membawa motivasi baru bagi UMKM itu sendiri dimana pengalaman usaha pihak swasta akan menjadi bekal ilmu bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Artikel kajian ini bertujuan untuk menggambarkan model kemitraan yang dikembangkan di Indonesia sebagai bahan kajian untuk dapat tercipta suatu konsep model kemitraan sederhana dalam pengembangan UMKM di Indonesia untuk dijadikan obat penawar permasalahan yang dihadapi UMKM dewasa ini yang mengacu pada konsep good governance atas dasar implementasi dari UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2008.

Kata Kunci : Model Kemitraan, Pemerintah, Sektor Swasta

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional terus dikembangkan dalam berbagai sektor, keragaman sosial dan budaya serta sumberdaya alam yang begitu besar merupakan asset yang perlu diberdayakan dan dikelola dengan baik dalam upaya menopang pembangunan nasional. Kritis moneter yang terjadi pada tahun 1998 merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam merancang strategi ke depan sehingga dampak perubahan yang negatif dapat segera terdeteksi sedini mungkin.

Perekonomian bangsa yang dikenal stabil, saat krisis terlihat bagai macam ompong dibuatnya. Tingkat pengangguran tahun 1997 tercatat sebesar 4,3 juta jiwa. Namun pada 1998 meningkat menjadi 5,1 juta atau 5,5 persen dari jumlah angkatan tenaga kerja. Persentase tersebut belum termasuk jumlah pengangguran tidak penuh sebesar 8,6 juta jiwa. (08/10/2018) <https://www.inews.id/finance/read/270569/obat-mujarab-dari-badai-krisis-itu-bernama-umkm>

Berdasarkan dari gambaran tersebut, pemerintah saat ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo mencoba menitik beratkan program pembangunannya pada pengembangan UMKM untuk mencegah krisis ekonomi global dengan berdasarkan kepada UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang selanjutnya dituangkan dalam induk Program NAWA CITA. Program NAWA CITA pada **Agenda ke-7** menyatakan bahwa, Pemerintah berupaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk : Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pendirian Bank Petani dan UMKM Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita. Berlandaskan keadaan ini maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu: Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.

Sebagai wujud nyata implementasi program maka dibuat arah kebijakan yang dijabarkan lebih lanjut menjadi kebijakan-kebijakan bidang, dimana kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Kesungguhan pemerintah dalam mengembangkan UMKM tersebut merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan pembangunan nasional secara nyata dan sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas serta pemerataan ekonomi di masyarakat, secara signifikan diketahui bahwa UMKM di Indonesia ini tersebar di tiap daerah di Indonesia terutama di daerah. Sebagai data informasi diketahui bahwa jumlah UMKM yang tercatat di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI sampai dengan 2017 sebanyak 62.922.617 Unit usaha mikro, kecil dan menengah dengan penyerapan tenaga kerja sampai dengan tahun 2017 adalah 116.673.416 orang.

(08/10/2018)http://www.depkop.go.id/pdfviewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/SANDIN_GAN_DATAUMKM_2012-2017.pdf.

Keadaan seperti ini merupakan sebuah fenomena yang cukup baik untuk atmosfer perekonomian negara dan merupakan pondasi serta modal yang cukup kuat dalam menopang roda perekonomian. Potensi ini adalah sebuah kenyataan yang perlu diperhatikan dan dijadikan titik tolak untuk lebih meningkatkan roda ekonomi negara karena keberadaan UMKM yang cukup besar ini merupakan sebagai kekayaan sekaligus

kekuatan preventif dalam mencegah krisis moneter seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998.

Namun demikian, dalam perkembangannya, masih ditemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain meliputi :

1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar
4. Mentalitas Pengusaha UKM
5. Kurangnya Transparansi

Bertolak dari keadaan tersebut, maka jelas permasalahan yang melilit UMKM di Indonesia ini merupakan tanggung jawab bersama karena pengembangan UMKM ini tidaklah semata menjadi tanggungjawab pemerintah, namun perlu banyak pihak dan unsur yang terlibat dalam pelaksanaannya terutama sektor swasta sehingga tercipta sinergitas yang kondusif antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat sebagai pelaku UMKM.

Melalui konsep *Good Governance* dimana Pemerintah bersama-sama dengan Pihak Swasta dan masyarakat, ikut membangun dan mengembangkan program pembangunan khususnya pengembangan UMKM. Melalui model kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta adalah upaya perbaikan sistem pengembangan yang cukup signifikan dalam menghadapi permasalahan UMKM di Indonesia. Pola-pola kemitraan sebagaimana yang dituangkan dalam UU Nomor : 20 Tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM masih perlu didukung dengan model kemitraan yang efektif antara Pemerintah dan pihak swasta.

Keberadaan ini perlu dituangkan dalam sebuah kebijakan yang mendukung terciptanya Model Kemitraan antara Pemerintah dengan pihak swasta dimana proses yang dibangun tidaklah hanya untuk sebatas pencitraan saja tetapi harus terjalin secara serius dan kontinyu sehingga menciptakan hasil dan berdampak positif terutama dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan anggaran negara.

Model kemitraan ini perlu dipahami dan difokuskan pada permasalahan yang ada di UMKM sehingga dengan adanya kemitraan yang terjalin dapat menjadi obat atas permasalahan yang terjadi dalam UMKM di Indonesia. Berangkat dari pemahaman dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji, menganalisis dan mengembangkan lebih lanjut secara konseptual mengenai ***“Bagaimana Model Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan UMKM di Indonesia ?”***.

B. Metodologi Kajian

Pada Kajian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan literatur baik dari buku-buku literasi, artikel, berita di media masa baik elektronik maupun non elektronik serta data-data informasi dari pemerintah yang selanjutnya di analisa melalui proses tahapan reduksi data untuk kemudian data disajikan sebagai bahan analisa yang selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

C. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Kemitraan

Konsep awal yang hendaknya kita bangun dalam pengembangan UMKM ini adalah melalui pola kemitraan antara pemerintah dengan swasta. Hal ini sebagai bentuk upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri melalui pengembangan UMKM. Pola kemitraan merupakan langkah yang perlu diciptakan dan dikembangkan dalam proses kerja pengembangan UMKM di Indonesia dimana kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

Kemitraan dapat menghasilkan solusi antara argumen yang menekankan *market* atau *profit* (*the business of business is business* yang memprioritaskan *shareholders*) dengan argumen moral (atau *Corporate Social Responsibility* atau *CSR* yang memperhatikan *stakeholders*). Dalam hal ini *stakeholders* termasuk lingkungan yang "diam" (*silent stakeholders* atau flora dan fauna). Dengan kata lain, kemitraan merupakan suatu investasi - bukan *cost* - dan dapat menghasilkan *win-win solution* atau sinergi yang menghasilkan keadilan bagi masyarakat dan keamanan berusaha serta keserasian dengan lingkungan.

Franciscus Welirang (2002;24) mendefinisikan tentang kemitraan yaitu, Kemitraan adalah sikap menjalankan bisnis yang berorientasi pada hubungan kerjasama yang solid (kokoh dan mendalam), berjangka panjang, saling percaya, dan dalam kedudukan yang setara.

Sementara menurut Thoby Mutis mengungkapkan bahwa :

“Kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul”.

(18/10/2018) <https://www.hestanto.web.id/teori-pola-kemitraan-menurut-para-ahli/>

Untuk mewujudkan suatu kemitraan yang efektif maka perlu dibuat strategi agar kemitraan berjalan sesuai yang diharapkan. Hafsah (dalam Santoso) mengemukakan bahwa terdapat beberapa strategi yang perlu dilaksanakan agar kebijaksanaan dalam kemitraan dapat diwujudkan, yaitu :

1. Mengembangkan UMKM yang mandiri dan kuat.
2. Memacu penerapan Undang-undang tentang usaha kecil dan peraturan pemerintah tentang kemitraan.
3. Memantapkan kelembagaan kemitraan.
Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan kemitraan usaha kedua belah pihak yang harus dibangun dan dipersiapkan melalui proses terencana dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia.
5. Menerapkan teknologi, standarisasi, dan akreditasi.
6. Membangun akses pasar dan informasi pasar.
7. Mendorong pengembangan investasi dan permodalan.
8. Memantapkan birokrasi pemerintah sebagai lembaga pelayanan.

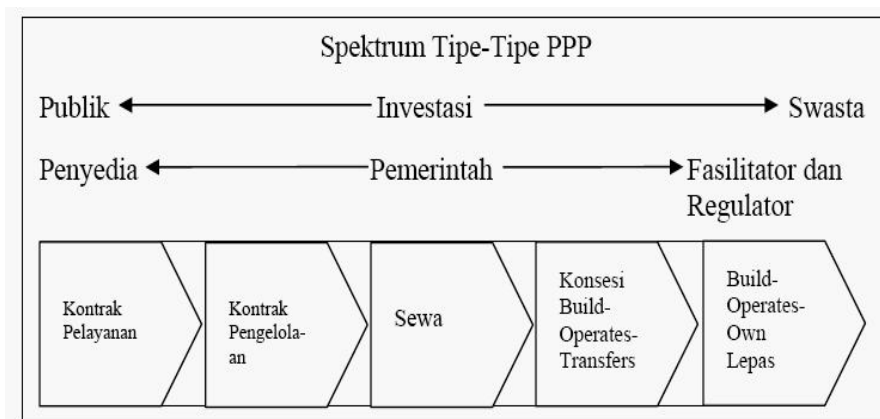
Kemitraan yang akan dijalin oleh pihak pemerintah dengan swasta dalam pengembangan UMKM di Indonesia agar lebih terarah terutama dalam mensinergikan visionerisasi kebijakan dan program pemerintah dalam lima tahun ke depan yaitu 2015-2019 dalam berupaya mengembangkan UMKM yang akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan daya saing UMKM di era globalisasi dan *e-comercial* saat ini.

2. Model Kemitraan

Dalam perkembangannya Sasi Kumar, dan C. Jayasankar Prasad, dalam judul bukunya *“Public-Private Partnerships in Urban Infrastructure”* Tahun 2004 yang dikutip oleh Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda menyatakan bahwa, terdapat beberapa tipe kemitraan yang didasarkan pada derajat resiko yang ditanggung kedua belah pihak serta dampak yang muncul dari perjanjian tersebut. keadaan tersebut dapat dilihat pada gambar 1 tentang gambaran singkat mengenai berbagai tipe PPP.

Gambar 1

Tipe-Tipe Public Private Partnership



Sumber: Adaptasi dari Kumar dan Prasad, 2004

Gambar tersebut mengimplikasikan adanya model kemitraan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta, yang terbentuk dalam model kontrak kemitraan sebagai berikut :

1. Model Kontrak pelayanan (*service contract*)
2. Model Kontrak Pengelolaan
3. Model sewa
4. Model Konsesi *Build Operate Transfer*
(Keempat model tersebut merupakan bentuk kemitraan yang lebih banyak menitikberatkan pada peran pemerintah, baik dari sisi investasi maupun penyediaan jasa layanan).
5. Model *build operates own* secara lepas merupakan bentuk PPP yang memfokuskan investasi dan penyediaan pelayanan pada sektor swasta dimana pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator.

Berikut secara rinci dapat digambarkan dalam tabel perbedaan antar type kemitraan :

Tabel 1.

Perbedaan Antar Type Kemitraan

No	Aspek	Kontrak Pelayanan	Kontrak Pengelolaan	Sewa	Konsesi BOT	BOO Tranfer / BOO Lepas
1	Kepemilikan Aset	Publik	Publik	Publik	Publik	Publik/Swasta
2	Operasi dan Manajemen	Publik	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta
3	Investasi Modal	Publik	Publik	Publik	Swasta	Swasta
4	Resiko Komesil	Swasta	Publik	Bersama	Swasta	Swasta
5	Periode Waktu	3-5 Tahun	3-5 Tahun	8-15 Tahun	25-30 Tahun	20-30 Tahun
6	Keahlian Teknis	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Kebijakan Manajerial	Tidak	Ya	Ya	Sebagian	Ya
8	Efisiensi	Tidak	Sebagian	Sebagian	Sebagian	Ya
9	Investasi Tidak Langsung	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
10	Investasi Langsung	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
11	Komitmen Politik	Rendah	Cukup	Cukup	Cukup	Tinggi
12	Tarif Pelayanan	Rendah	Cukup	Tinggi	Tinggi	Tinggi
13	Kerangka	Rendah	Cukup	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Selain kelima model tersebut, terdapat beberapa varian lain dari bentuk-bentuk kemitraan sebagaimana yang dikemukakan oleh *Ministry of Municipal Affairs* (1999) dimana PPP diklasifikasikan ke dalam 10 varian, yakni :

1. Operasionalisasi dan Pemeliharaan (*operations and maintenance*) ; Model ini didasari oleh kontrak antara pemerintah dan swasta untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas publik.
2. Perencanaan dan Pengembangan (*design-build*) ; dalam kontrak ini apabila fasilitas telah terbangun atau terbentuk maka akan menjadi milik pemerintah.
3. Pengoperasian (*turnkey operation*) ; swasta melakukan desain, membangun dan mengoperasikan dalam waktu tertentu dimana dana disediakan oleh pemerintah karena pemerintah adalah pemilik fasilitas tersebut.
4. Penambahan dalam Fasilitas yang Sudah Ada (*wrap around addition*) ; Pembiayaan dan mengoperasikan fasilitas dari swasta dalam jangka waktu tertentu sampai dapat kembalinya lagi dana investasi dan keuntungan yang diinvestasikan tersebut.
5. Sewa-Beli (*lease-purchase*) ; desain, biaya, dan membangun fasilitas pelayanan publik dari pemerintah dan swasta, selanjutnya pihak swasta menyewakan fasilitas tersebut kepada swasta atas jangka waktu tertentu yang kemudian fasilitas tersebut akan menjadi milik pemerintah. (keadaan ini terjadi apabila pemerintah tidak cukup biaya untuk membuat fasilitas dan fasilitas tersebut dipandang sangat dibutuhkan keberadaannya)
6. Privatisasi Sementara (*temporary privatization*) ; Kepemilikan fasilitas publik yang sudah ada diberikan pada pihak swasta untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan fasilitas. Fasilitas itu kemudian dimiliki dan dioperasikan oleh pihak swasta dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau sampai pihak swasta sudah dapat mengembalikan modal investasi ditambah keuntungannya.
7. Sewa–Pengembangan-Operasionalisasi (*lease-develop-operate*) atau Beli-Pengembangan-Operasionalisasi (*buy-develop-operate*) ; Mitra swasta menyewa atau membeli sebuah fasilitas dari pemerintah, kemudian mengembangkan atau memodernisasikannya, selanjutnya mengoperasikannya sesuai dengan kontrak yang dibuat bersama pemerintah. Pihak swasta diharapkan untuk berinvestasi dalam pengembangan fasilitas dan diberi jangka waktu yang pasti untuk mengembalikan dan memperoleh keuntungan dari investasi tersebut.
8. Pembangunan-Pengalihan-Pengoperasian (*Build-Transfer-Operate*) ; Didasari kontrak pemerintah dengan swasta untuk membiayai dan membangun fasilitas, di mana setelah fasilitas itu selesai dibangun, maka pihak swasta mengalihkan kepemilikan fasilitas itu pada pemerintah. Pemerintah kemudian menyewakan fasilitas itu lagi kepada swasta berdasarkan sewa jangka panjang yang memungkinkan swasta mengembalikan investasi dan memperoleh keuntungan.
9. Pembangunan-Kepemilikan-Pengoperasian-Pengalihan (*Build-Own-Operate-Transfer*) ; Pihak swasta memperoleh hak *franchise* secara eksklusif untuk membiayai, membangun, mengoperasikan, memelihara, mengelola, dan mengumpulkan biaya pungutan selama periode tertentu untuk mengembalikan investasi. Di akhir hak *franchise*, kepemilikan dialihkan kembali pada pemerintah.

10. Pembangunan-Kepemilikan-Pengoperasian (*Build-Own-Operate*) ; Pemerintah dapat mengalihkan kepemilikan dan tanggung jawab atas suatu fasilitas yang sudah ada, atau mengadakan kontrak dengan swasta untuk membangun, memiliki, dan mengoperasikan fasilitas yang baru dibangun. Pihak swasta menyediakan dana untuk pembangunan fasilitas tersebut.

Kemudian Richardus (2006) memberikan gambaran pemetaan model-model kemitraan berdasarkan peran yang dimainkan oleh Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Pemegang otoritas pelayanan publik adalah pemerintah sekaligus sebagai inisiator, investor, atau pelaksana pelayanan dan investor atau operator dilakukan oleh pihak swasta. tahapan pelaksanaan operasional program melibatkan masyarakat. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2

Model Ragam Kemitraan

Topology	Business Model	Investment	Operations
G-to-B-to-P G endorse B to serve P	G (do nothing, services delivered) B (exclusive right, captive market)	B	B and P
B-to-G-to-P B invest through G to serve P	G (budget to conduct services) B (ROI and shared income)	B	B and P
GB-to-P G & B invest together to serve P	G (services delivered, shared income) B (ROI and shared income)	G and B	G, B and P
G-to-B-to-G/B-to-P G endorse B to serve P B appoint other G/B to execute	G (do nothing, services delivered) B (exclusive right, captive market) Other G/B (management fee)	B	B and P
B-to-G-to-G/B-to-P B invest through G to serve P G appoint other G/B to execute	G (budget to conduct services) B (ROI and shared income) Other G/B (management fee)	B	B and P
GB-to-G/B-to-P G & B invest together to serve P by appointing other G/B to execute	G (services delivered, shared income) B (ROI and shared income) Other G/B (management fee)	G and B	G, B and P
G-to-B-to-I-to-P G endorse B to serve P B appoint other party to execute	G (do nothing, services delivered) B (exclusive right, captive market) I (management fee)	B	B and P
B-to-G-to-I-to-P B invest through G to serve P G appoint other party to execute	G (budget to conduct services) B (ROI and shared income) I (management fee)	B	B and P
GB-to-I-to-P G & B invest together to serve P by appointing other party to execute	G (services delivered, shared income) B (ROI and shared income) I (management fee)	G and B	G, B and P

3. Pola Kemitraan

Dalam mewujudkan pengembangan UMKM yang optimal di Indonesia, pemerintah harus berkomitmen mengajak sektor swasta untuk duduk bersama dan saling berkomunikasi mencari benang merah yang menyebabkan UMKM di Indonesia berjalan tidak optimal atau stagnan, padahal keberadaan UMKM ini sangat besar

pengaruhnya baik bagi pemerintah maupun sektor swasta terutama dalam menciptakan stabilitas ekonomi makro.

Dalam realitanya di masyarakat, sebenarnya saat ini telah terbentuk beberapa pola kemitraan di kalangan pengusaha swasta dan UMKM, namun secara integritas pengembangan UMKM, pemerintah belum secara signifikan menggandeng swasta bermitra dengan pemerintah dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Berikut digambarkan bentuk-bentuk pola kemitraan yang disampaikan dalam sebuah artikel elektronik *Lalightman* yang secara konsepsi dan praktis telah berada dan berkembang di Indonesia, antara lain :

- a. **Inti-Plasma.** Adalah merupakan hubungan kemitraan antara Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam hal ini, Usaha Besar mempunyai tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) untuk membina dan mengembangkan UKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang. Contoh: diterapkan dalam pengembangan Tambak Inti Rakyat dan Perkebunan Inti Rakyat
- b. **Subkontrak** yaitu pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar, dimana usaha kecil yang memproduksi komponen..... yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya. Pola ini ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang menyangkut volume, harga, mutu, dan waktu. Pola ini sangat bermanfaat dalam transfer alih teknologi, modal, ketrampilan, dan produktifitas.
- c. **Dagang umum** adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, dimana usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara usaha besar atau usaha menengah dengan usaha kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran produk, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar atau usaha menengah. Contohnya: kegiatan bisnis hortikultura, dimana kelompok tani hortikultura bergabung dengan koperasi kemudian bermitra dengan swalayan atau kelompok supermarket. Petani memiliki kewajiban untuk memasok barang-barang sesuai dengan persyaratan dan kualitas produk yang telah disepakati bersama.
- d. **Waralaba** adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi

waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Pemberi Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Penerima Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.

- e. **Keagenan** adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.
- f. **Pola kemitraan kerjasama operasional** adalah pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Kelompok mitra adalah kelompok yang menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja. Sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen dan pengadaan sarana produksi lainnya. Perusahaan mitra juga sebagai penjamin pasar dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. Pola ini sering diterapkan pada usaha perkebunan tebu, tembakau, sayuran dan pertambakan. Dalam pola ini telah diatur tentang kesepakatan pembagian hasil dan resiko.
- g. **Bapak angkat – Anak angkat** merupakan hubungan antara pengusaha besar yang bersedia membantu perkembangan pengusaha kecil. Dibutuhkan kesadaran tinggi bagi bapak angkat untuk membantu anak angkatnya. Salah satu contohnya adalah BUMN yang memperoleh profit besar memberikan modal tanpa bunga kepada peternak di daerah miskin.
- h. **Franchise** merupakan hubungan antara pemilik nama franchise (franchisor) dengan pembeli franchise (franchisee) yang menjual lisensi beserta atributnya seperti peralatan, proses produksi, resep campuran proses produksinya, pengendalian mutu, pengawasan mutu bahan baku, maupun barang jadinya serta bentuk pelayanannya.
- i. **Vendor** adalah kerjasama dimana produk yang dihasilkan oleh mitra kerjanya akan digunakan oleh bapak angkat, tetapi produk tersebut tidak menjadi bagian produk yang dihasilkan oleh bapak angkat. Sebagai contoh, PT Kratakau Steel yang *core business*-nya menghasilkan baja mempunyai anak angkat perusahaan kecil penghasil emping melinjo. Vendor juga dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis di mana BUMN/BUMS membeli barang setengah jadi atau barang jadi dari mitra usaha tidak berdasarkan kontrak tertulis, tetapi atas pesanan melalui perantara. Barang yang dibeli tidak memenuhi spesifikasi teknis yang spesifik, akan tetapi perusahaan besar melakukan grading dan membayar sesuai dengan mutu produk yang diserahkan.

(18/10/2018)<http://laligntsman.blogspot.com/2013/02/pola-pola-kemitraan-dalam-pengembangan.html>

Bentuk peran serta dunia usaha atau pihak swasta ini dapat dilakukan dengan membangun kemitraan bersama pemerintah yang berfokus pada pengembangan yang diarahkan pada empat bidang tersebut. Adapun cara pengembangannya dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara:
 - a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;
 - d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.
2. Pengembangan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara :
 - a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. Menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
 - e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
 - f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
3. Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan cara:
 - a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
 - c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
4. Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dapat dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
 - b. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
 - c. Meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
 - d. Memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup;
 - e. Mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

D. Pembahasan

Untuk membahas lebih lanjut tentang model kemitraan yang efektif antara pemerintah dan swasta (private) dalam pengembangan UMKM di Indonesia, maka untuk lebih memahami hendaknya kita mengkaji terlebih dahulu beberapa model kebijakan yang ada. Model-model kebijakan tersebut dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan konsepsi model kemitraan yang efektif berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Konsepsi tentang Good Governance merupakan dasar acuan terbentuknya sebuah model kemitraan dimana dalam hal ini pemerintah melalui regulasinya mendorong pihak swasta untuk ikut berintegrasi mengembangkan program UMKM di Indonesia. Konsep pengembangan UMKM ini pun mengacu kepada pola good governance sebagaimana yang disampaikan oleh Sedarmayanti (2007;2) yaitu :

“secara umum Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Governance mencakup 3 (tiga) domain yaitu state (negara/pemerintah), private sectors (sektor swasta/dunia usaha) dan society (masyarakat). Oleh sebab itu, good governance sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan stakeholder, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumberdaya seperti sumberdaya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut azas : keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (World Conference on Governance, UNDP, 1999)”.

Dari beberapa model kemitraan yang dikembangkan maka dari model-model kemitraan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kelompok bentuk model kemitraan dilihat dari bentuk kontrak kerjasama yang disepakati oleh masing-masing pelaku kemitraan. Adapun pengelompokan model kemitraan tersebut yaitu :

1. Model kemitraan dengan kelompok kerjasama yang berfokus pada pembangunan dan pembiayaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan serta Perencanaan dan Pengembangan fasilitas publik dalam bentuk fisik dengan orientasi profit adalah :
 - a. Kontrak Pelayanan
 - b. Kontrak Pengelolaan
 - c. Sewa
 - d. Build Operate Own
 - e. Build Operate Own Transfer/Lepas.
 - f. Operasionalisasi dan Pemeliharaan (*operations and maintenance*),
 - g. Perencanaan dan Pengembangan (*design-build*),
 - h. Pengoperasian (*turnkey operation*),
 - i. Penambahan dalam Fasilitas yang Sudah Ada (*wrap around addition*),
 - j. Sewa Beli (*lease-purchase*),
 - k. Privatisasi Sementara (*temporary privatization*),
 - l. Sewa–Pengembangan–Operasionalisasi (*lease developoperate*) atau Beli Pengembangan Operasionalisasi (*buy develop operate*),

- m. Sedangkan Model kemitraan Pembangunan-Pengalihan-Pengoperasian (*Build Transfer Operate*)
- n. Model Kemitraan Pembangunan Kepemilikan Pengoperasian Pengalihan (*Build-Own-Operate-Transfer*), model ini diberikan pada Pihak swasta memperoleh hak *franchise* sampai dengan investasi yang ditanamkan dapat dikembalikan berikut dengan profit yang telah direncanakan dan di akhir hak *franchise*, kepemilikan dialihkan kembali pada pemerintah
- o. Model kemitraan Pembangunan Kepemilikan Pengoperasian (*Build Own Operate*),
 Dari model-model kemitraan tersebut secara konstruksi pengembangan pembangunan fisik dapat diperoleh keuntungan dari pemerintah atas keterlibatan sektor swasta yakni :
 - a. Pemerintah terbantu untuk proses pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana fasilitas fisik yang merupakan salah satu bentuk pelayanan pembangunan infra struktur terhadap masyarakat.
 - b. Pihak swasta akan memperoleh hasil berupa profit dari pengorbanan yang ditanamkan dalam program tersebut

Namun demikian disamping dampak positif yang diterima oleh keduabelah pihak, terdapat pula dampak negatif dari kerjasama dalam bentuk model kemitraan tersebut, antara lain :

- a. Karena model kemitraan mengarah kepada bentuk kerja hasil secara fisik maka akan bersinggungan dengan bahan baku atau materi dari terbentuknya pembangunan fisik tersebut, oleh karena itu maka apabila terjadi krisis moneter maka akan terjadi kerugian yang dihadapi oleh sektor swasta karena meningkatnya harga-harga material yang digunakan untuk pembangunan.
 - b. Apabila hasil pembangunan kemudian diberikan hak pengelolaan oleh pemerintah maka hal ini rentan adanya kenaikan harga pelayanan yang dalam hal ini dibebankan kepada masyarakat sebagai pengguna apabila fasilitas fisik yang dibangun digunakan untuk pelayanan pada masyarakat, seperti pembangunan jalan tol dan pengelolaannya.
2. Model kemitraan dengan kelompok kerjasama yang berfokus pada pengembangan manajemen dan teknologi, yakni :
 - a. Model Kemitraan Partisipatif
 - b. Model kemitraan alih teknologi.
 Model kemitraan ini memfokuskan pada pengembangan manajemen dan kontinuitas kerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang memiliki kualitas optimal dimana dalam perkembangannya didukung alih teknologi, yang ditekankan pada aspek penjaminan keberlanjutan usaha dan Kompetisi usaha dalam menghadapi era pasar global yang berkembang saat ini.
 3. Model kemitraan dengan kelompok kerjasama yang berfokus pada pengembangan kelembagaan serta Organisasi dan Manajemen melalui peran dan fungsi kelembagaan yakni :

- a. Model kemitraan Lembaga Semi Publik / Semi Privat atau *Government Initiated Private Management*.
- b. Model kemitraan Pengelolaan Bersama (*Joint Management*)
- c. Model kemitraan Kawasan Otoritas khusus, namun demikian model kemitraan ini masih dipegang oleh otoritas pusat.
- d. Model kemitraan Tim/Komisi/Kepanitiaan,

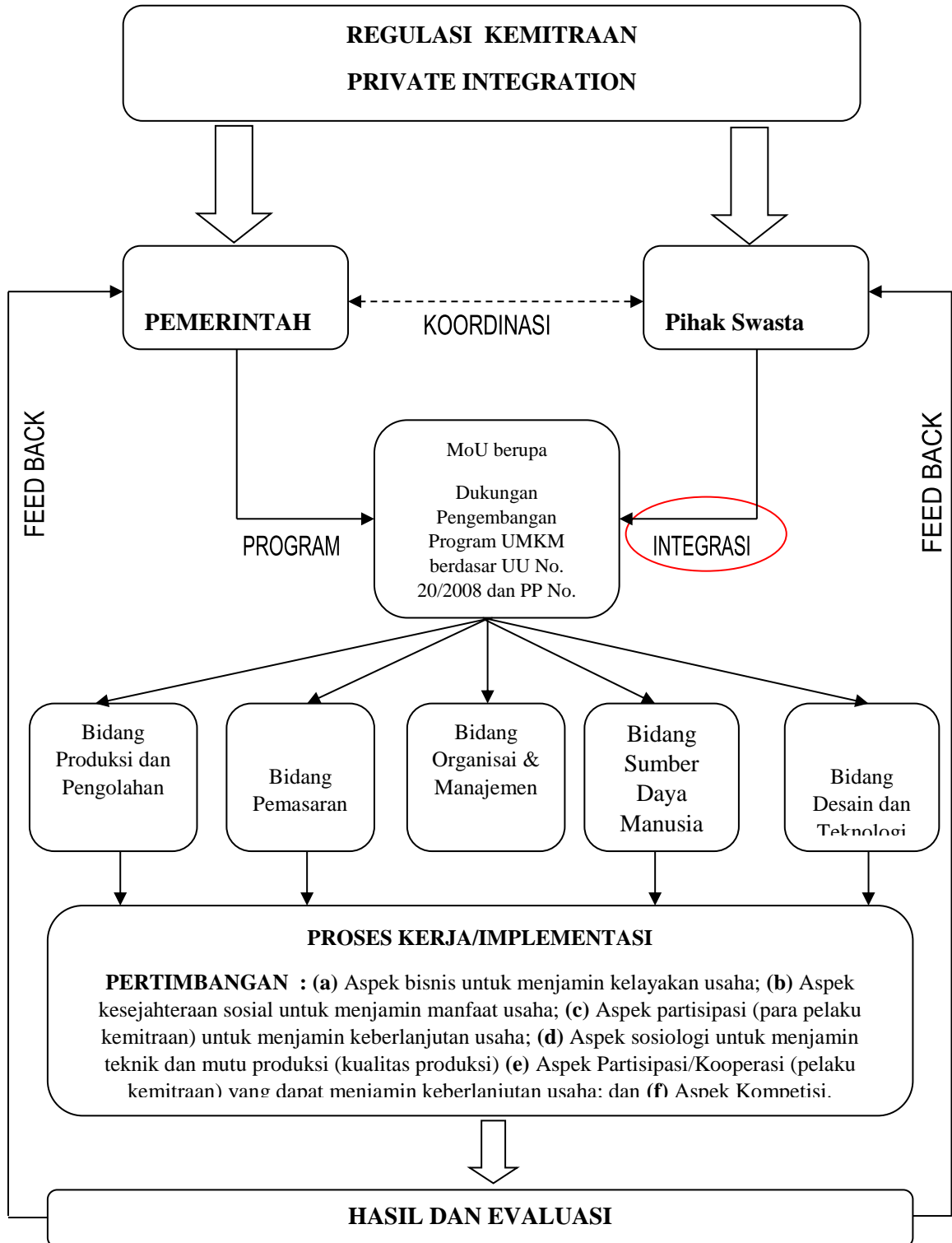
Berangkat dari pengelompokan tersebut, maka model pengembangan UMKM di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM hendaknya lebih mengedepankan dan dikembangkan model kemitraan pada pengembangan Kelembagaan, Organisasi dan Manajemen.

Berpijak dari hasil pemahaman dan analisa kebijakan mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM serta permasalahan yang dihadapi UMKM di Indonesia saat ini maka penulis mencoba mengembangkan sebuah model kemitraan yang dititikberatkan pada peranserta pihak swasta serta kepeduliannya terhadap UMKM sebagai pondasi perekonomian negara yang membantu terwujudnya stabilitas ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita di masyarakat. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi para pengusaha besar atau pihak swasta, dimana apabila ekonomi masyarakat mengalami stabilitas yang baik maka akan mendorong stabilitas usaha perusahaan besar saat ini.

Dalam keadaan ini pemerintah perlu membentuk regulasi khusus yang menaungi sektor swasta untuk ikut andil dan peduli dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Adapun keuntungan yang ditawarkan bagi pihak swasta atas model kemitraan yang dikembangkan ini adalah terbentuk secara alami dan berproses, tergantung dari kesungguhan dan konsistensi sektor swasta dalam menjalankan proses kemitraan tersebut.

Adapun bentuk kemitraan yang ditawarkan adalah Model Kemitraan **Privat Integration (Integrasi Pihak Swasta)**, dimana proses integrasi ini dapat digambarkan sebagai berikut :

BAGAN 1
MODEL KEMITRAAN PRIVAT INTEGRATION
(INTEGRASI PIHAK SWASTA)



Dari bagan alur model kemitraan *Privat Integration* (Integrasi Sektor Swasta) dapat digambarkan bahwa Pihak Swasta selaku pihak yang sama dengan pemerintah yakni pihak pemangku dimensi dalam pembentukan *Good Governance*. Sektor swasta diarahkan oleh regulasi kemitraan yang dibuat pemerintah untuk mendorong program pengembangan UMKM di Indonesia yang mengacu pada program pengembangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Proses MoU kemitraan yang dibuat disesuaikan dengan bidang pengembangan yang diinginkan berdasarkan hasil survey dan observasi terhadap para pelaku UMKM yang akan dijadikan sasaran pengembangan. Jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM harus memiliki linierisasi dengan pihak swasta/perusahaan yang akan memberikan dukungan pengembangan. Sehingga akan terjadi alih informasi dan pengalaman dari perusahaan besar tersebut bahkan dalam perkembangannya, para pelaku UMKM tersebut dapat dijadikan bahan untuk pengembangan usaha perusahaan besar tersebut melalui pola kemitraan yang telah diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM..

Pola Pengembangan Sektor Swasta/ Perusahaan Besar harus mengacu pada Aspek yang dijadikan dasar proses pengembangan UMKM yakni :

- (a) Aspek bisnis untuk menjamin kelayakan usaha;
- (b) Aspek kesejahteraan sosial pelaku UMKM untuk menjamin manfaat usaha;
- (c) Aspek partisipasi (para pelaku kemitraan) untuk menjamin keberlanjutan usaha;
- (d) Aspek sosiologi untuk menjamin teknik dan mutu produksi (kualitas produksi)
- (e) Aspek Partisipasi/Kooperasi (pelaku kemitraan) yang dapat menjamin keberlanjutan usaha; dan
- (f) Aspek Kompetisi.

Aspek-aspek ini merupakan dimensi yang harus diperhatikan oleh pihak Swasta dan pemerintah sebagai bahan evaluasi atas hasil kerja yang telah dilaksanakan. Adapun dari dimensi-dimensi tersebut masih dirasa belum optimal dipenuhi setelah dilakukan pemantauan maka kendala-kendala akan dijadikan feed back sebagai bahan evaluasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan dikaji kembali agar kembali dapat dilakukan proses pengembangan ulang sampai dimensi-dimensi tersebut secara faktual dipenuhi sehingga pelaku UMKM dapat bergerak secara mandiri dan produktif.

Model kemitraan ini tidak berorientasi pada profit tapi semata-mata karena kepedulian yang dikuatkan dengan dukungan regulasi pemerintah, hal ini merupakan bentuk partisipatif dari sektor swasta yang mendasari terbentuknya Model Kemitraan Private Integration ini. Proses kerja model kemitraan ini bersifat jangka panjang dan perlu tersusun secara terstruktur melalui roadmap pengembangan UMKM yang disepakati oleh pihak pemerintah maupun swasta. Banyaknya perusahaan swasta di Indonesia, dimungkinkan dapat menjadi modal yang konsisten dalam mendorong perkembangan UMKM sebagai podasi perekonomian masyarakat dalam upaya antisipatif apabila terjadi keterpurukan perekonomian global.

Dari paparan tersebut dapatlah kita pahami, bahwa setiap individu atau organisasi terutama pelaku UMKM hendaknya menyadari dan memahami bahwa perkembangan individu atau organisasi akan mengalami kemandegan dikarenakan berbagai faktor yang menghadangnya. Albrecht, (1985;2) mengemukakan bahwa, “sejarah hampir setiap organisasi merupakan rangkaian titik mandeg yang masing-masing ditandai oleh tumpukan tekanan yang menghendaki perubahan”. Oleh karenanya dalam menyikapi keadaan ini, pemerintah sebagai leading sektor hendaknya segera melakukan penyesuaian sebagai bentuk pengembangan organisasi dimana negara merupakan organisasi yang cukup besar dan kompleks. Pembaharuan dan pengembangan model kerjasama merupakan wujud pengembangan organisasi sebagaimana yang disampaikan Albrecht, (1985;2) dalam bukunya *Organization Development* bahwa, “dalam titik mandeg ini memerlukan beberapa perubahan yang cukup penting dalam organisasi itu sendiri”. Stagnasi UMKM di Indonesia dalam perkembangannya mendorong pemerintah melakukan perubahan sistem dalam pengembangan organisasi dimana melalui pola keterlibatan sektor swasta dalam mendorong berjalannya program pemerintah adalah upaya pemerintah untuk mencapai terciptanya Good Governance melalui Good Corporate governance (Kepemerintahan yang baik dan Tata kelola perusahaan yang baik).

E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari pembahasan tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengembangan UMKM di Indonesia perlu dibuatkan model kemitraan yang spesifik untuk pula pengembangan UMKM. Hal ini mengacu kepada beberapa pola kemitraan yang belum mengarah pada pola pengembangan UMKM yang berdasarkan pada UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Model kemitraan yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Model kemitraan dengan kelompok kerjasama yang berfokus pada pembangunan dan pembiayaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan serta Perencanaan dan Pengembangan fasilitas publik dalam bentuk fisik dengan orientasi profit,
2. Model kemitraan dengan kelompok kerjasama yang berfokus pada pengembangan manajemen dan teknologi,
3. Model kemitraan dengan kelompok kerjasama yang berfokus pada pengembangan kelembagaan serta Organisasi dan Manajemen melalui peran dan fungsi kelembagaan;

Dari model-model tersebut setelah dianalisa dan dikembangkan untuk lebih bersinergi dengan program pengembangan UMKM di Indonesia maka dari model kemitraan yang berfokus pada pengembangan kelembagaan serta Organisasi dan Manajemen melalui peran dan fungsi kelembagaan dengan berpijak pada pengembangan *Good Governance* maka terbentuk model kemitraan Model Kemitraan *Private Integration* yakni pola kemitraan yang membangun partisipasi pihak swasta dalam mendorong terwujudnya pengembangan program pemerintah khususnya program pengembangan UMKM di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Albrecht, Karl, 1985, *Pengembangan Organisasi*. Cetakan ke-10, Bandung: Penerbit Angkasa
- David K. Hart dan William G. Scott, *The Philosophy of American Management*, Southern Review of Public Administration (pre-1986) 6, 2 (Summer 1982)
- Hafsah, 2000, dalam Slamet Purwo Santoso, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemitraan Usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, (Jakarta : 2001)
- Kumar, Sasi dan C. Jayasankar Prasad. 2004. “*Public-Private Partnerships in Urban Infrastructure*”. Dalam *Kerala Calling*, edisi Februari.
- Ministry of Municipal Affairs. 1999. *Public-Private Partnership: A Guide for Local Government*. British Columbia.
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia : Menuju Negara Industri Baru 2030*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2007), h. 374
- Sedarmayanti, (2007). *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Cetakan ke-1, Bagian Ke-Tiga, (Bandung : C.V. Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. (2008). *Filsafat Administrasi*. Cetakan ke-4. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan ke-17, Bandung : Alfabeta
- Sukarno K, 1985, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung : Alumni Bandung
- Wayne P. Jones, *A Critical Analysis of Master in Business Administration Education in the Relation to the Philosophy of Pragmatism*, (Ph.d Dissertation, Marquette University, 1993)

Internet :

- <https://www.inews.id/finance/read/270569/obat-mujarab-dari-badai-krisis-itu-bernama-umkm> (diakses tanggal 08 Oktober 2018)
- <https://satujam.com/krisis-moneter/> (diakses tanggal 08 Oktober 2018)
- http://www.depkop.go.id/pdfviewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/SANDINGAN_DATAUMKM_2012-2017.pdf. (diakses tanggal 08 Oktober 2018)
- <http://wawan-satu.blogspot.com/2009/11/permasalahan-yang-dihadapi-ukm.html> (diakses Tanggal 18 Oktober 2018)
- <https://www.hestanto.web.id/teori-pola-kemitraan-menurut-para-ahli/> (diakses Tanggal 18 Oktober 2018)
- <http://lalightsman.blogspot.com/2013/02/pola-pola-kemitraan-dalam-pengembangan.html> (diakses Tanggal 18 Oktober 2018)

Skripsi

Zulkarnain, Febri M., (2017) *Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar*, Makasar, Universitas Hasanudin.

Artkel

Al Azhar, Muchtar Luthfi Malik, Imam Hardjanto, Minto Hadi, *Kemitraan Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Pelayanan Publik (Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 1048-1057

Saputra, Ruben Angga, (2015), *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm Pengolahan Waluh Sebagai Produk Unggulan Daerah Di Kabupaten Semarang*, Semarang, Universitas Diponegoro.

Tim Kajian PKP2A III, *Kemitraan Antara Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah Di Kalimantan*, Samarindan, LAN Samarinda.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

STRATEGI PROMOSI PARIWISATA KREATIF JEMBER FASHION CARNAVAL (JFC)

Selfi Budi Helpiastuti

Dina Suryawati

FISIP Universitas Jember

Email: selfibudihelpiastuti@unej.ac.id

Abstract

The promotion strategy for Jember Fashion Carnaval (JFC) conducted by the Jember Regency Tourism and Culture Office as a tourist destination in East Java is to introduce the public and tourists. This was done because Jember was nicknamed the world-class Carnaval City which was interesting and qualified to be used as a creative tourism destination. This research is a qualitative research which aims to find out how the promotion strategy carried out by the Jember Regency Tourism and Culture Office in making Jember a Carnaval city. Data collection techniques were carried out by interviewing resource persons from the Jember Regency Tourism and Culture Office who had an important role in carrying out the promotion strategy. The authors also observed the field to find out how the process of creative tourism promotion strategy Jember Fashion Carnaval (JFC). The author also uses literature studies to better explain this research to make it clearer. From the results of the study, the Jember Regency Tourism and Culture Office conducted a promotion strategy in several ways. First, collaborate with electronic media, online and newspapers. Second, make booklets and leaflets and hold exhibitions. Third, cooperating with Garuda Indonesian Airways, Wings Air and International Airport and stations in Java Fourth, socialization to tourism players in East Java, especially Jember.

Keywords: Promotion Strategy, Creative Tourism, and Jember Fashion Carnaval

I. Pendahuluan

Industri pariwisata menjadi strategis jika ditinjau dari segi pengembangan ekonomi dan sosial budaya karena kepariwisataan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas masyarakat dan dapat menambah rasa cinta tanah air terhadap nilai-nilai budaya bangsa sekaligus sebagai instrumen untuk melestarikan lingkungan. Peran pariwisata dalam pembangunan nasional sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat. Pajak pembangunan yang diperoleh dari sektor kepariwisataan telah terbukti menjadi tumpuan utama dalam pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini mendorong masyarakat untuk berkreasi dalam industri pariwisata agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah

Masyarakat kreatif dalam dunia pariwisata harus berbasis budaya lokal. Kolaborasi seni menjadi bagian penting dari proses ini sehingga komunitas pun akan tetap hidup walaupun wisatawan pada saatnya meninggalkan tujuan wisatanya. Wisatawan saat ini mengubah pola perjalanan wisatanya dari *buying product* menjadi *buying experience*. Dari *mass tourism* menjadi *responsible tourism*. Ketika semula wisatawan cukup senang berkunjung beramai-ramai ke suatu tempat hanya untuk sekedar berfoto, mereka kemudian mengubah tujuannya untuk mencoba memahami budaya setempat. Kunjungan wisata budaya, dengan melihat (dan mempelajari) galeri seni, kampung/desa wisata dan sebagainya akan menjadi trend baru saat ini.

Pemerintah Kabupaten Jember yang menjadikan tahun 2016 sebagai titik awal pengembangan industri pariwisata kreatif dan pariwisata lokal, secara umum akan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Industri pariwisata di Jember berkembang pesat setelah ada *Jember Fashion Carnaval* (JFC) yang telah mendunia. JFC ini mampu memperkenalkan Jember – kota kecil di pojok Jawa Timur – yang semula tidak dikenal, menjadi salah satu kiblat festival karnaval *fashion* yang kemudian mengilhami kota-kota lain di Indonesia untuk menirunya. JFC merupakan produk fashion Carnaval pertama di Indonesia. Tidak dapat di pungkiri bahwa JFC saat ini telah mendunia, berbagai prestasi di kancah Internasional telah didapat. Akibat dari prestasi-prestasi yang diperoleh, JFC saat ini telah menjadi produk andalan wisata utama Kabupaten Jember. JFC telah berhasil menjadikan Jember sebagai kota wisata budaya dan membawa dampak yang besar bagi perekonomian Jember.

Secara visual Jember Fashion Carnaval (JFC) merupakan sebuah seni pertunjukan yang berbentuk karnaval (pawai atau arak-arakan) yang bersifat masa kini. Dalam konteks seni tradisional biasanya pawai atau arak-arakan dilakukan dengan mengarak benda –benda pusaka atau tokoh-tokoh tertentu yang dispesialkan atau diagungkan. Sedangkan JFC merupakan sebuah genre seni pertunjukan masa kini yang menampilkan keindahan hasil kreativitas desain rias busana, dan disajikan secara teatrikal didukung oleh berbagai unsur dan cabang seni di antaranya adalah: seni tari, seni teater, seni musik, dan seni rupa. Sebagai produk seni pertunjukan, JFC memiliki berbagai Elemen pendukung pertunjukan meliputi: tema dan cerita, karakter tokoh, gerak tari, dan musik dalam bentuk marching band . Semua elemen tersebut tergabung dalam satu kesatuan bentuk pertunjukan yang sangat khas dan memiliki karakteristik gaya yang spesifik sebagai identitas JFC.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada *event marketing* ini ada kegiatan *Jember Fashion Carnaval* yang terbukti mampu mendatangkan pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri. JFC adalah sebuah *fashion carnival* dengan konsep kostum *trend fashion* dunia, dimana *catwalk* yang digunakan tercatat di MURI sebagai *catwalk* terpanjang, yaitu 3,6 kilometer. Menjelang diadakannya JFC, hotel dan penginapan di Jember dipenuhi oleh sekitar 300 media lokal dan internasional yang ingin meliput JFC (Wulandari et al, 2015). Dampak adanya JFC terhadap rangking Kabupaten Jember sebagai kota tujuan wisata naik dari posisi 27 (tahun 2005-2010) menjadi posisi ke 6 (tahun 2011) dan tahun 2016 menjadi posisi ke 4. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dampak JFC terhadap Pariwisata Jember

Tahun	Rangking Kabupaten Jember Sebagai Kota Tujuan Wisata di Jawa Timur	Rata-rata Kunjungan Wisatawan ke Jember per Tahun
2005-2010	27	260.000
2011	6	550.000
2016	4	1.998.297

Sumber: Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Jember, 2017

Salah satu cara yang ampuh dalam mempromosikan keunikan dan keunggulan daerah adalah dengan mengadakan kegiatan atau *event marketing*. *Event marketing* mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan *brand awareness* kepada konsumen sehingga dalam dirinya tumbuh fanatisme terhadap produk tertentu (Sukarmin, 2008:1). Melihat pada setiap tahunnya terjadi peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Jember maka dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat untuk dapat mengembangkan pariwisata kreatif Jember Fashion Carnaval terutama dalam strategi promosi. Jika *event* dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, *event marketing* mempunyai daya tarik yang sangat ampuh bagi pemasar dalam upaya memperkuat *brand awareness* suatu produk di mata konsumen (Ilhamdi, 2008:1).

Disisi lain, untuk membangun daya saing pariwisata akan sangat dipengaruhi oleh pengelola dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat. Demikian halnya sikap masyarakat yang ikut mendukung upaya pemerintah dalam menggiatkan wisata. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Adapun yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan prioritasnya untuk kepentingan pariwisata yang tugas pokoknya adalah memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan pelayanan di bidang pariwisata di Kabupaten Jember. Oleh karena itu dengan adanya peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yang sepatutnya memiliki kapasitas untuk mempromosikan kota Jember harus memiliki serangkaian perencanaan yang matang. Dibutuhkannya sebuah strategi dalam hal ini, strategi yang direncanakan nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan program-program pemerintah. Disini peneliti ingin mengetahui apa saja strategi yang dilakukan

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember untuk mempromosikan pariwisata kreatif JFC ke masyarakat serta wisatawan lokal maupun mancanegara.

II. Kajian Pustaka

1. Pariwisata Kreatif

Pariwisata didefinisikan sebagai aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta tujuan tujuan lainnya (UNESCO, 2009). Sedangkan menurut UU No.10/2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Seseorang atau lebih yang melakukan perjalanan wisata serta melakukan kegiatan yang terkait dengan wisata disebut Wisatawan. Wisatawan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Wisatawan nusantara adalah wisatawan warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan wisata sementara wisatawan mancanegara ditujukan bagi wisatawan warga negara asing yang melakukan perjalanan wisata.

Untuk mengembangkan kegiatan wisata, daerah tujuan wisata setidaknya harus memiliki komponen-komponen sebagai berikut (UNESCO, 2009) :

1. Obyek/atraksi dan daya tarik wisata
2. Transportasi dan infrastruktur
3. Akomodasi (tempat menginap)
4. Usaha makanan dan minuman
5. Jasa pendukung lainnya (hal-hal yang mendukung kelancaran berwisata misalnya biro perjalanan yang mengatur perjalanan wisatawan, penjualan cinderamata, informasi, jasa pemandu, kantor pos, bank, sarana penukaran uang, internet, wartel, tempat penjualan pulsa, salon, dll)

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia sebelumnya telah menetapkan program yang disebut dengan Sapta Pesona. Sapta Pesona mencakup 7 aspek yang harus diterapkan untuk memberikan pelayanan yang baik serta menjaga keindahan dan kelestarian alam dan budaya di daerah kita. Program Sapta Pesona ini mendapat dukungan dari UNESCO (2009) yang menyatakan bahwa setidaknya 6 aspek dari tujuh Sapta Pesona harus dimiliki oleh sebuah daerah tujuan wisata untuk membuat wisatawan betah dan ingin terus kembali ke tempat wisata, yaitu: Aman; Tertib; Bersih; Indah; Ramah; dan Kenangan.

Konsep kegiatan wisata dapat didefinisikan dengan tiga faktor, yaitu harus ada *something to see*, *something to do*, dan *something to buy* (Yoeti, 1985). *Something to see* terkait dengan atraksi di daerah tujuan wisata, *something to do* terkait dengan aktivitas wisatawan di daerah wisata, sementara *something to buy* terkait dengan souvenir khas yang dibeli di daerah

wisata sebagai memorabilia pribadi wisatawan. Dalam tiga komponen tersebut, destinasi pariwisata kreatif dapat masuk melalui *something to see* dan *something to do* dengan mengkreasi destinasi wisata melalui Jember Fashion Carnival (JFC).

Pariwisata kreatif, menurut pencetusnya, Greg Richards, terjadi diawali dengan wisata budaya, atau bahkan MICE. Keingintahuan yang lebih dari wisatawan, kemudian dimanfaatkan secara maksimal dengan melibatkan wisatawan untuk masuk memproduksi jenis atraksi wisata yang ditawarkan. Secara garis besar, penyedia jasa pariwisata kreatif (seperti Museum, Event Organizer, dll) harus menarik 'basah' wisatawan dengan tujuan agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih dengan ikut merasakan/empati dengan apa atraksi wisata yang ditawarkan. Untuk mendapatkan pengalaman ini, wisatawan harus melakukan 'bagian'nya agar menjadikan produk wisata kreatif menjadi 100%.

Cooper dkk (1993), menyatakan destinasi wisata merupakan salah satu elemen yang paling penting karena menjadi alasan orang - orang melakukan perjalanan wisata serta daya tarik wisata yang ada di dalamnya akan menarik kunjungan wisatawan. Sedangkan Gunn (1993), menyatakan bahwa kawasan wisata (destinasi) merupakan suatu tempat yang tidak saja menyediakan segala sesuatu yang dapat dilihat wisatawan, namun juga menawarkan aktivitas yang dapat dilakukan pada tempat tersebut dan menjadi daya tarik yang memikat orang untuk berkunjung ke tempat tersebut. Dari berbagai pendapat diatas, destinasi wisata, harusnya merupakan kawasan yang memiliki ciri khas atau keunikan agar dapat memberikan pesona atau daya tarik seorang pengunjung selama kunjungannya dan bahkan dapat memikat lebih lama dengan berkunjung kembali pada destinasi tersebut.

2. Jember Fashion Carnival (JFC)

Penyelenggaraan *Jember Fashion Carnival* (JFC), berawal dari adanya sebuah Rumah Mode yang didirikan oleh Dynand Fariz sebagai wujud apresiasi dan kontribusinya dalam dunia *fashion*. Rumah mode yang bernama *Dynand Fariz International High Fashion Center* tersebut dikelola oleh kerabat dekat Dynand Fariz. Keberadaan rumah mode tersebut menjadi suatu hal baru yang ada di Kota Jember dan hanya sedikit masyarakat yang tau. Oleh karena itu setiap tahunnya, diadakan sebuah acara *Fashion Week* yang terinspirasi dari acara rumah mode yang ada di Negara-negara *fashion* lain. Acara *Fashion Week* tersebut sebagai misi untuk mengembangkan Rumah Mode agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Acara *Fashion Week* yang dilakukan adalah mewajibkan seluruh karyawan *Dynand Fariz International High Fashion Center* memakai busana yang sedang *trend* di dunia, pada saat itu yang sedang trend adalah motif *army*, busana tersebut harus dipakai pada saat bekerja selama satu minggu dan harus dipakai dari rumah (Jember Fashion Carnival, Wikipedia)

Pada tahun 2002, acara *Fashion Week* yang dilakukan berbeda dengan tahun sebelumnya. Acara *Fashion Week* pada tahun selanjutnya, dilakukan dengan arak-arakan/pawai para karyawan dengan memakai busana yang didesain kreatif dan unik. Arak-arakan tersebut dilakukan disekitar lingkungan kantor Rumah Mode. Arak-arakan tersebut secara mengejutkan menarik perhatian dari masyarakat Kota Jember. Masyarakat sangat tertarik dengan busana yang didesain dengan kreatif dan dipamerkan dengan cara menari dan berjalan di jalanan. Hal

tersebut membuat masyarakat menyambut acara tersebut dengan tanggapan positif dan apresiasi yang baik. Antusias dan tanggapan positif masyarakat, menjadi ide bagi Dynand Fariz untuk membuat acara *Fashion Week* selanjutnya

Persiapan acara *Fashion Week* tahun selanjutnya yaitu tahun 2003, dilakukan dengan melakukan persiapan yang matang. Dynand Fariz dan pengelola Rumah Mode menyadari, bahwa persiapan harus dilakukan dengan benar-benar terkonsep, karena acara yang diselenggarakan bukanlah acara pekan mode seperti tahun sebelumnya. Acara yang akan diselenggarakan adalah sebuah acara karnaval fashion yang diharapkan nantinya dapat menarik perhatian masyarakat Jember. Dynand Fariz menginginkan cara karnaval *fashion* yang akan diselenggarakan memberikan dampak yang positif bagi Jember, sehingga tidak selesai begitu saja apabila pertunjukannya telah usai. Dynand fariz dan tim membuat visi misi dan konsep untuk membuat karnaval fashion ini kedepannya dapat berkembang menjadi lebih baik, dan menjadi karnaval *fashion* yang besar sehingga bisa memperkenalkan nama Jember kepada masyarakat luas.

3. Promosi Pariwisata Kreatif

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Bagaimanapun kualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Menurut Tjiptono (2008:219) pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. “Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran, yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhannya.” Lupiyoadi *dalam* Suryadana dan Octavia (2015:157).

Dari beberapa definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada konsumen untuk mempengaruhi atau mengajak konsumen untuk membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa. Agar promosi berjalan efektif, perusahaan harus menyusun strategi dalam memasarkan produknya. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratos*: militer, dan *ag*: memimpin) yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep strategi militer seringkali diadaptasi dan diterapkan dalam dunia bisnis. Dalam konteks bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi (Tjiptono, 2008:3).

Bentuk-bentuk Promosi

Menurut Tjiptono (2008:222) meskipun secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas khususnya. Beberapa tugas khusus itu sering disebut bauran promosi (*promotion mix*), yaitu mencakup:

1. *Personal Selling*; adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Sifat- sifat *personal selling* antara lain:
 - a. *Personal confrontation*, yaitu adanya hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara dua orang atau lebih.
 - b. *Cultivation*, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan jual beli sampai dengan suatu hubungan yang lebih akrab.
 - c. *Response*, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk mendengar, memperhatikan dan menanggapi. Oleh karena sifat-sifat tersebut metode ini mempunyai kelebihan antara lain operasinya lebih fleksibel karena penjual dapat mengamati reaksi pelanggan dan menyesuaikan pendekatannya, usaha yang sia-sia dapat diminimalkan, pelanggan yang berminat biasanya langsung membeli dan penjual dapat membina hubungan jangka panjang dengan pelanggannya.

Aktivitas *personal selling* juga memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. *Prospecting*, yaitu mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan mereka
- b. *Targeting*, yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjual demi pembeli
- c. *Communicating*, yaitu memberi informasi mengenai produk perusahaan kepada pelanggan
- d. *Selling*, yakni mendekati, mempresentasikan dan mendemonstrasikan, mengatasi penolakan, serta menjual produk kepada pelanggan
- e. *Servicing*, yakni memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan
- f. *Information gathering*, yakni melakukan riset dan intelijen pasar
- g. *Allocating*, yaitu menentukan pelanggan yang akan dituju

2. *Mass Selling*, terdiri atas periklanan dan publisitas; *Mass selling* merupakan pendekatan yang menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai dalam satu waktu.
 - a. Periklanan

Iklan merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. Iklan memiliki empat fungsi utama, yaitu menginformasikan khalayak mengenai seluk beluk produk (*informative*), mempengaruhi khalayak untuk membeli (*persuading*), dan menyegarkan informasi yang telah diterima khalayak (*reminding*), serta menciptakan suasana yang menyenangkan sewaktu khalayak menerima dan mencerna informasi (*entertainment*).
 - b. Publisitas

Publisitas adalah bentuk penyajian dan penyebaran ide, barang dan jasa secara non personal, yang mana orang atau organisasi yang diuntungkan tidak membayar untuk itu. Publisitas merupakan pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu produk untuk membentuk citra produk yang bersangkutan.
3. Promosi Penjualan; adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Melalui promosi penjualan perusahaan dapat menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggan untuk mencoba produk baru, mendorong pelanggan membeli lebih banyak, menyerang aktivitas promosi pesaing, meningkatkan *impulse buying* (pembelian tanpa rencana sebelumnya), atau mengupayakan kerja sama lebih erat dengan pengecer. Promosi penjualan yang dilakukan oleh penjual dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:
 - a. *Customer promotion*, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang atau mendorong pelanggan untuk membeli.
 - b. *Trade promotion*, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk mendorong atau merangsang pedagang grosir, pengecer, eksportir, dan importir untuk memperdagangkan barang atau jasa dari sponsor
 - c. *Sales-force promotion*, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada penjual
 - d. *Business promotion*, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, mempertahankan kontak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan produk baru, menjual lebih banyak kepada pelanggan lama, dan mendidik pelanggan.

4. *Public Relations* (Hubungan Masyarakat); merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. Dalam pelaksanaannya public relations dapat dilakukan oleh individu kunci dari suatu perusahaan dan dapat pula dilakukan oleh suatu lembaga formal dalam bentuk biro, departemen, maupun, seksi *public relations* dalam struktur organisasi.

Kegiatan-kegiatan *public relations* meliputi hal-hal berikut:

- a. *Press Relations*

Tujuan hubungan dengan pers adalah untuk memberikan informasi yang pantas atau layak dimuat disurat kabar agar dapat menarik perhatian publik terhadap seseorang, produk, jasa, atau organisasi.

- b. *Product Publicity*

Aktivitas ini meliputi berbagai upaya untuk mempublikasikan produk-produk tertentu.

- c. *Corporate Communication*

Kegiatan ini mencakup komunikasi internal dan eksternal, serta mempromosikan pemahaman tentang organisasi.

- d. *Lobbying*

Lobbying merupakan usaha untuk bekerja sama dengan pembuat undang-undang dan pejabat pemerintah sehingga perusahaan mendapatkan informasi-informasi penting yang berharga. Bahkan kadangkala juga dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil.

- e. *Counseling*

Aktivitas ini dilakukan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada manajemen mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan publik dan mengenai posisi dan citra perusahaan.

5. *Direct Marketing* (Pemasaran Langsung)

Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi di sembarang lokasi. Dalam *direct marketing*, komunikasi promosi ditujukan langsung kepada konsumen individual, dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan, baik melalui telepon, pos atau dengan datang langsung ke tempat pemasar.

4. Strategi Promosi Pariwisata kreatif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, menyebutkan bahwa Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, menkomunikasikan, menyampaikan Produk Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya. Penawaran terdapat banyak ragam produk dan juga jasa wisata yang di tawarkan yaitu semua produk yang diperuntukkan bagi atau dikonsumsi oleh seseorang selama melakukan kegiatan wisata (Freye, 1993:218 dalam Damanik, 2006:14).

Strategi promosi menurut Kotler dan Armstrong (2001:74) adalah kreativitas mengkomunikasikan keunggulan produk serta membujuk pasar sasaran. Dalam sektor pariwisata strategi promosi ini penting dilakukan karena sektor pariwisata merupakan industri yang kompetitif. Dalam industri pariwisata yang berkembang pesat, persaingan menjadi semakin tinggi, sehingga strategi promosi destinasi wisata semakin penting peranannya (Candra dan Menezes, 2001).

Ada empat teknik promosi untuk melakukan promosi pariwisata, yaitu *advertising*, *sales promotion*, *personal selling*, dan *public relation*. (Suryadana dan Octavia, 2015:158)

- a. **Advertising**; atau yang sering dikenal dengan istilah periklanan merupakan salah satu bentuk dari komunikasi impersonal yang digunakan oleh perusahaan baik perusahaan barang maupun jasa. Peranan periklanan dalam pemasaran jasa adalah untuk membangun kesadaran (*awareness*) calon pembeli terhadap jasa yang ditawarkan, untuk menambah pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan, membujuk calon pembeli agar mau membeli, mau menggunakan jasa tersebut, dan untuk membedakan pelayanan dari perusahaan satu dengan perusahaan lain. Iklan memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 1. Presentasi umum, ini berarti bahwa setiap iklan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang dapat menerima pesan yang sama tentang produk yang diiklankan; 2. Tersebar luas. Iklan yang dibuat sama baik bentuk maupun tujuannya serta dapat dilakukan berulang-ulang pada media yang sama maupun berbeda, dan dapat disebarluaskan ke tempat yang berbeda agar konsumen dapat menerima informasi dengan baik; 3. Ekspresi yang kuat, artinya iklan mampu mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui gambar dan suara untuk menggugah dan mempengaruhi perasaan pasar sasaran; 4. Tidak bersifat pribadi. Iklan yang dibuat diperuntukkan bagi semua orang, baik pasar sasaran maupun tidak dengan tidak memaksa pasar sasaran untuk memperhatikan dan menanggapi, karena iklan merupakan komunikasi yang monolog (satu arah).
- b. **Sales promotion**; adalah kegiatan-kegiatan pemasaran selain periklanan yang mendorong efektifitas pembelian konsumen dan pedagang perantara dengan menggunakan alat-alat promosi. Alat-alat promosi yang sering digunakan dalam kegiatan ini antara lain brosur, pameran, dan demonstrasi. Dalam upaya mencapai tujuan periklanan, proses promosi dengan menggunakan teknik *sales promotion* menggunakan beberapa metode promosi penjualan. Metode yang sering digunakan adalah: 1. *Product sampling* (contoh barang).

Perusahaan memberikan contoh barang secara cuma-cuma kepada pelanggan untuk dicoba atau digunakan; 2. Pengumpulan kupon atau nota pembelian misalnya, sejumlah nota pembelian dapat ditukar dengan barang seharga 10% dari jumlah yang tercantum dalam nota; 3. Pemberian diskon misalnya, setiap rombongan peserta paket perjalanan wisata di biro perjalanan wisata tertentu akan menerima diskon 10% dari perusahaan penyelenggara perjalanan wisata tersebut; 4. Kupon hadiah misalnya, seseorang yang menginap di hotel yang sama, dengan jumlah hari tertentu akan mendapatkan hadiah dari kupon yang diundi; dan 5. *Cash refund*. Metode promosi ini dilakukan dengan mengurangi harga yang diberikan kepada pembeli yang ditentukan dalam bentuk presentase atau satuan rupiah. Cara ini dipergunakan untuk memperkenalkan produk baru mendorong pembelian ulang atas suatu produk yang menguntungkan.

- c. ***Personal selling***; Penjualan tatap muka merupakan aktifitas komunikasi antar produsen yang diwakili oleh tenaga penjual dengan konsumen potensial yang melibatkan pikiran dan emosi serta berhadapan langsung dengan pembeli. Teknik promosi dengan menggunakan *personal selling* dapat dilakukan langsung dengan berhadapan langsung dengan calon pembeli, misalnya pada bursa pasar wisata (*travel mart*).
- d. ***Public relation***; Kata masyarakat (*public*) dalam hubungan masyarakat berarti setiap individu, kelompok, organisasi dan lain sebagainya yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pengusaha produk pariwisata yang bersangkutan seperti karyawan, pelanggan, perantara atau penyalur dan pemimpin masyarakat. Sedangkan kata hubungan (*relation*) berarti menciptakan atau membuka komunikasi dua arah yang saling menguntungkan, termasuk hubungan pertukaran dalam pemasaran produk pariwisata. Oleh karena itu, hubungan masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan dan mempertahankan komunikasi dua arah secara terbuka dengan semua lapisan masyarakat serta menciptakan opini masyarakat yang baik tentang produk pariwisata yang ditawarkan oleh perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sumber data sekunder diperoleh melalui studi literatur.

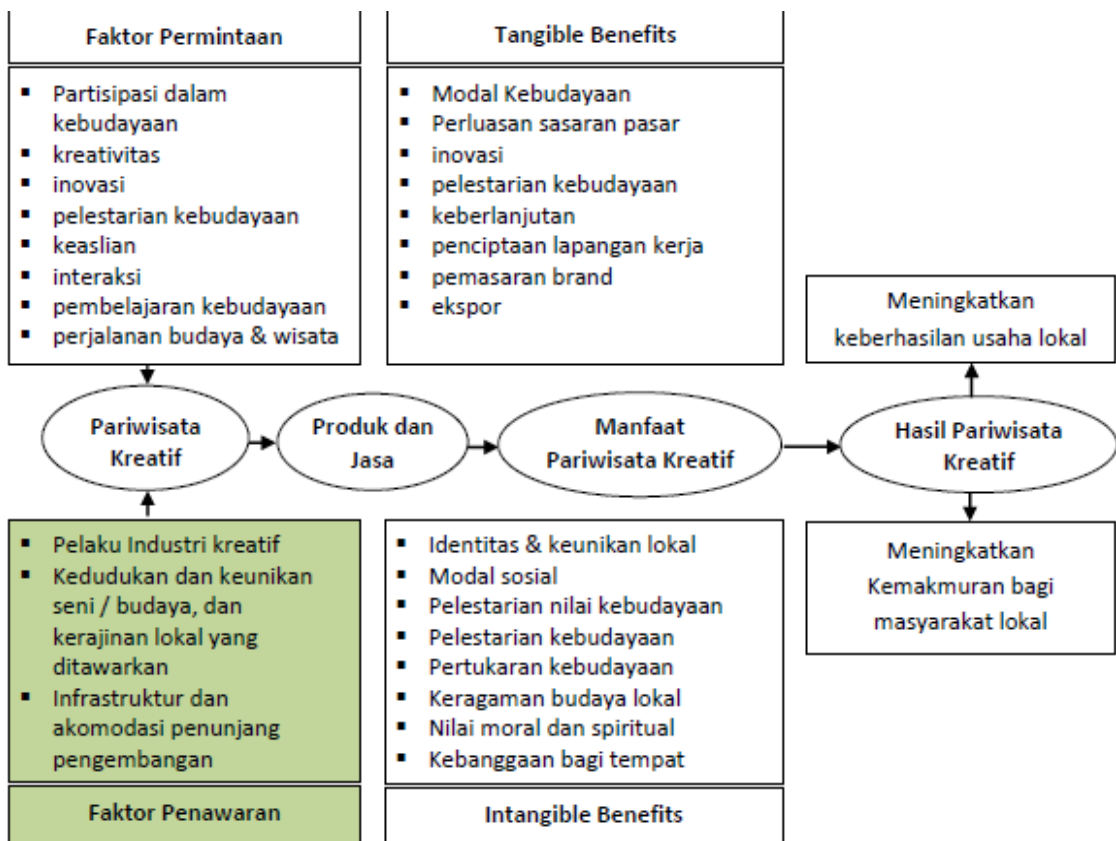
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata kreatif melihat kreativitas kota sebagai sumber daya, dan menyediakan kesempatan baru untuk memenuhi pengembangan kepentingan wisatawan. Pariwisata kreatif dapat meliputi wisatawan yang berlatar belakang bisnis kreatif seperti seniman, desainer, produsen perdagangan, organisasi atau jaringan produk kreatif, pelajar dan masyarakat yang termotivasi oleh adanya transfer pengetahuan ekonomi atau peremajaan perkotaan. Pariwisata kreatif harus dikaitkan dengan budaya, atraksi budaya yang khusus dan unik dari masing-

masing daerah tujuan wisata, demikian pula dengan produk industri kreatif lokal yang khas dan unik melalui unsur-unsur identitas lokal.

Pariwisata kreatif memberikan hak kepada wisatawan untuk untuk belajar tentang lingkungan di sekelilingnya dan menerapkan pengetahuan yang didapatkan untuk mengembangkan keterampilan diri. Gambar 1 adalah bentuk model dari pariwisata kreatif menurut (Ohridska-Olson & Ivanov, 2010).

Gambar 1. Model dari pariwisata kreatif



Sumber: Ohridska-Olson & Ivanov, 2010

Dalam model ini, terdapat lima elemen utama dalam pariwisata kreatif yaitu faktor permintaan, faktor penawaran, manfaat nyata dan tidak nyata serta manfaat finansial bagi daerah tujuan wisata (Ohridska-Olson & Ivanov, 2010). Maka dalam hasil penelitian ini, yang dilakukan untuk mempromosikan pariwisata kreatif adalah faktor penawaran. Jember Fashion Carnaval menawarkan dan mempromosikan sebagai bentuk pariwisata kreatif yang merupakan salah satu dari bagian pariwisata di Kabupaten Jember. Strategi penawaran dan promosi pariwisata kreatif adalah (1) pelaku industri kreatif; (2) kedudukan dan keunikan seni/budaya dan kerajinan lokal yang ditawarkan; (3) infrastruktur dan akomodasi penunjang pengembangan.

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan kebijakan sektor pariwisata dan penunjangnya. Sedangkan beberapa strategi Promosi Pariwisata Kreatif Jember Fashion Carnaval Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan promosi Jember Fashion Carnaval ke berbagai media massa, yaitu media cetak, media elektronik dan juga media online. Hal ini dikarenakan media massa mempunyai pengaruh cukup kuat bagi sasaran khususnya wisatawan.
2. Membuat *booklet* dan *leaflet* yang berisi tentang informasi Jember Fashion Carnaval dan *guide book* tentang pariwisata di Kabupaten Jember.
3. Melakukan promosi dan kerjasama ke maskapai penerbangan dan beberapa bandara di Indonesia. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember melakukan promosi ke maskapai Garuda Indonesia Airlines, Wings Air dan promosi ke beberapa bandara internasional, yaitu Surabaya dan Jakarta.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember melakukan penyuluhan dan sosialisai bagi para pelaku wisata seperti menggelar berbagai event berskala internasional.

Tabel 2. Strategi Promosi Pariwisata Kreatif Jember Fashion Carnaval

Startegi Promosi	Bentuk Promosi	Adaptasi dalam Jember Fashion Carnaval
1. <i>Advertising</i>	1. Presentasi umum, 2. Tersebar luas. 3. Ekspresi yang kuat, 4. Tidak bersifat pribadi	Pertama, melakukan kerja sama dengan media elektronik, <i>online</i> dan surat kabar; seperti: Kompas TV, Metro TV, Trans TV, TVRI, Detik.news.com, Oke.news.com, Jawa Pos, Kompas, Surya dll
2. <i>Sales promotion</i>	kegiatan ini antara lain brosur, pameran, dan demonstrasi.	Kedua, membuat <i>booklet</i> dan <i>leaflet</i> serta mengadakan pameran baik di dalam maupun di luar negeri, seperti: booklet JFC di majalah Garuda Indonesian Airways, pameran

		Tourism dan Cultural di Jakarta, Jatim Fair Tourism di Surabaya dll
3. <i>Personal selling</i>	dilakukan langsung dengan berhadapan langsung dengan calon pembeli	Ketiga melakukan kerja sama dengan <i>Garuda Indonesia, Wings Air</i> dan bandara Internasional Jakarta dan Surabaya serta stasiun Kereta Api wilayah Jawa.
4. <i>Public relation</i>	sosialisasi kepada pelaku wisata	Keempat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember melakukan penyuluhan dan sosialisai bagi para pelaku wisata; melalui <i>Press Relation, Product Publicity, Corporate Communication, Lobbying dan Counseling</i>

KESIMPULAN

Pariwisata kreatif membutuhkan lingkungan komunikasi yang baru, walaupun iklan seringkali menjadi elemen sentral dalam program komunikasi pemasaran, sekarang ini tidak menjadi satu-satunya dan bukan yang terutama dalam membangun brand suatu destinasi atau memasarkannya untuk menarik wisatawan. Pemasaran pariwisata harus mempertimbangkan berbagai media dan cara baru untuk berkomunikasi dengan wisatawan.

Promosi atau juga dikenal dengan komunikasi pemasaran merupakan berbagai cara untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu produk atau brand yang di jual, khususnya Jember Fashion Carnaval. Pada satu pihak, pariwisata dapat menggairahkan perkembangan pagelaran kesenian kearifan lokal, bahkan dapat juga menghidupkan kembali unsur karnaval yang hampir dilupakan. Pada lain pihak, pariwisata tadi mengubah motivasi berbagai unsur pagelaran kesenian, seperti karnaval yang tadinya dipersembahkan karena motivasi tradisi, menjadi motivasi yang bersifat komersil.

REFERENSI

- Chandra, Satish dan Menezes, Dennis. 2001. "Applications of Multivariate Analysis in International Tourism Research: The Marketing Strategy Perspective of NTOs", *Journal of Economic and Social Research*, 3(1): 77-98.
- Cooper, C. (1993). An Analysis of The Relationship Between Industry and Education in Travel and Tourism. Teoros International
- Damanik, Janianton dan Weber, Helmut. (2006). Perencanaan Ekowisata dari teori ke Aplikasi. Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 2017. *Profil Pariwisata Kabupaten Jember*
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Analisis Data*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Gunn C. 1993, *Tourism Planning; Basic, Concepts and Cases*, Taylor and Francis, USA
- Helpiastuti, Selfi Budi. (2018). Pengembangan Destinasi Pariwisata Kreatif Melalui Pasar Lumpur. *Journal of Torism and Creativity*. Vol.II(1). ISSN 2549-483X
- Hermantoro, Henky. (2011). Creative-based tourism: dari wisata rekreatif menuju wisata kreatif. Jakarta: Aditri
- Hidayat, M. (2011). Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata. *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, Vol. I, No. 1
- Ilhamdi, Sulaeman. 2008. *Manajemen Pemasaran Event Sponsorship*. Jakarta: Erlangga
- Kotler, Phillip dan Gary, Armstrong. 2001. *Prinsip-prinsip Pemasaran: Jilid 1, Edisi kedelapan*. Jakarta: Erlangga
- Kusumaputra, R. Adhi. (2011). Pariwisata Kreatif Harus Berbasis Budaya Lokal, Kompas.com
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Ohridska-Olson, R dan Ivanov, S.H (2010). Creative Tourism Business Model and Its Application in Bulgaria. <http://ssrn.com/abstract:1690425>
- Sukarmin, Yustinus. 2008. *Pemasaran Olahraga Melalui Berbagai Event Olahraga*. Dosen Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi FIK UNY
- Suryadana, M Liga dan Octavia Vanny. 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabet
- Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran (edisi III)*. Yogyakarta: Andi
- Wulandari, Deasy dkk. (2015). Event Marketing Sebagai Strategi Meningkatkan Brand Awareness Kabupaten Jember. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol 9 (1).
- Yoeti, Oka A. (1985). *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa

Sumber dari Internet:

Jember Fashion Carnaval Info. <http://www.jemberfashioncarnaval.com/main.php>

Jember Fashion Carnaval. https://id.wikipedia.org/wiki/Jember_Fashion_Carnaval

Peraturan Pemerintah No. 50/2011 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025

Undang-undang No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata

UNESCO (2009). Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata

**PENGARUH KOORDINASI KPA DENGAN KADER WPA TERHADAP
EFEKTIVITAS PENCAPAIAN PROGRAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI
KABUPATEN SUMEDANG**

Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si, Dhesti Widya Nurhasanah Ningrum, S.Sos., M.Si

Email: irmaharyanty79@gmail.com, dhe_widy@yahoo.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

ABSTRAK

Setiap tahunnya jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) mengalami peningkatan termasuk di Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sumedang, selama kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah ODHA di Kabupaten Sumedang sebagai berikut: Tahun 2015 ODHA berjumlah 36 orang, Tahun 2016 ODHA berjumlah 40 orang, dan Tahun 2017 (sampai dengan 31 mei 2017) ODHA berjumlah 45 orang. Agar angka ODHA mengalami penurunan di tahun-tahun kedepannya, maka pelaksanaan program-program tersebut harus dilakukan secara efektif. Dimana yang dimaksud dengan efektif yaitu bahwa program tersebut dapat terukur seberapa besar capaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koordinasi komisi penanggulangan AIDS dengan Kader Warga Peduli AIDS Terhadap efektivitas pencapaian program penanggulangan AIDS di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan teknik analisis berupa perhitungan persentase, uji koefisiensi *spearman rank*, uji signifikansi, dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh koordinasi komisi penanggulangan AIDS dengan kader warga peduli AIDS terhadap efektivitas pencapaian program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang sebesar 47,2%

Kata Kunci: Koordinasi, Efektivitas Program, Program Penanggulangan HIV/AIDS

LATAR BELAKANG PENELITIAN

HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah virus yang menurunkan kekebalan tubuh manusia dan termasuk golongan *retrovirus* yang terutama ditemukan di dalam cairan tubuh, seperti darah, cairan mani, cairan vagina dan air susu ibu. AIDS atau *Acquired Immune Deficiency Syndrom* adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV. Akibat menurunnya kekebalan tubuh timbul berbagai penyakit oportunistik seperti TBC, kandidiasis, berbagai radang pada kulit, paru, saluran pencernaan, otak dan kanker. Setiap tahunnya jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) mengalami peningkatan termasuk di Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sumedang, selama kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah ODHA di Kabupaten Sumedang sebagai berikut: Tahun 2015 ODHA berjumlah 36 orang, Tahun 2016 ODHA berjumlah 40 orang, dan Tahun 2017 (sampai dengan 31 mei 2017) ODHA berjumlah 45 orang.

Kabupaten Sumedang melakukan beberapa program penanggulangan HIV/AIDS. Program tersebut terdiri dari 6 (enam) program yaitu:

1. Komunikasi perubahan perilaku (KPP);
2. Pemakaian kondom 100% didaerah beresiko;
3. Layanan klinik infeksi menular seksual (IMS);
4. Pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba;
5. Konseling dan testing sukarela; dan
6. Perawatan, dukungan dan pengobatan.

Agar angka ODHA mengalami penurunan di tahun-tahun kedepannya, maka pelaksanaan program-program tersebut harus dilakukan secara efektif. Dimana yang dimaksud dengan efektif yaitu bahwa program tersebut dapat terukur seberapa besar capaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika hasil capaian telah sesuai atau melebihi sasaran dan tujuan yang ditentukan maka capaian program penanggulangan HIV/AIDS dapat dikatakan telah efektif.

Salah satu faktor pendukung dalam efektivitas pencapaian program penanggulangan HIV/AIDS yaitu perlunya koordinasi yang baik antara petugas KPA dengan Kader Warga Peduli AIDS (WPA), termasuk di Kabupaten Sumedang. Koordinasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kegiatan administrasi didalam suatu organisasi. Koordinasi adalah proses penyatupaduan saran-saran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian dari bidang fungsional) dari sesuatu organisasi secara efisien (Iskandar, 2013: 217). Fungsi organisasi ini sedemikian pentingnya, apalagi bila organisasi harus berjalan sebagai suatu sistem, sebagai suatu kesatuan yang bulat dari bagian-bagian (sub sistem) yang saling berhubungan, saling menunjang, dan saling bergantung. Oleh karena itu terdapat pengaruh koordinasi antara KPA dengan Kader WPA terhadap efektivitas pencapaian program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang.

PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa Baik Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS dengan Kader Warga Peduli AIDS?
2. Seberapa Baik Efektivitas Pencapaian Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang?
3. Adakah Hubungan antara Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS dengan Kader Warga Peduli AIDS, dengan Efektivitas Pencapaian Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang?
4. Adakah Pengaruh Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS dengan Kader Warga Peduli AIDS Terhadap Efektivitas Pencapaian Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang?

TUJUAN PENELITIAN

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Seberapa Baik Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS dengan Kader Warga Peduli AIDS.
2. Seberapa Baik Efektivitas Pencapaian Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang.
3. Hubungan antara Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS dengan Kader Warga Peduli AIDS, dengan Efektivitas Pencapaian Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang.
4. Pengaruh Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS dengan Kader Warga Peduli AIDS Terhadap Efektivitas Pencapaian Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang.

KERANGKA TEORITIK

Koordinasi

Hasibuan (2008: 85) menyatakan bahwa koordinasi adalah “Kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.\

Menurut Terry (Safii’e, 2010: 85-86) memberikan definisi sebagai berikut:

“Coordination is the orderly synchronization of efforts to provide the proper amount, timing and directing of execution resulting in harmonious and unified action to stated objective”. (Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu dan dipimpin, dalam hal pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa koordinasi menempati peranan penting karena begitu banyak kita temui tumpang-tindihnya pekerjaan yang disebabkan tidak adanya koordinasi, kendati keseluruhannya itu dapat disinkronkan, diatur demi tujuan dan

kepentingan bersama. Keuntungan adanya koordinasi sebenarnya adalah terciptanya sinergi yaitu diperolehnya hasil kerja sama yang lebih besar dari jumlah hasil individual kalau masing-masing individu bekerja sendiri-sendiri. Jadi koordinasi akan menciptakan sinergi dalam arti terciptanya perpaduan usaha dari berbagai orang, unit, atau organisasi yang menghasilkan output yang lebih besar dibanding dengan jumlah output masing-masing orang, unit atau organisasi bila mereka bekerja sendiri-sendiri atau tanpa koordinasi.

Fayol (Safii'e, 2010: 85) memberikan definisi bahwa mengkoordinasikan berarti "Mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha". Dalam hal ini juga koordinasi yakni menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama. Koordinasi merupakan alat untuk menyatupadukan tindakan-tindakan dari seseorang, unit ataupun bagian-bagian dari suatu organisasi agar pencapaian tujuan organisasi berjalan efektif. Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam kegiatan pemerintah perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam rangka pencapaian tujuan bersama.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi menurut Safii'e (2010: 86) mengemukakan unsur-unsur koordinasi yang dijadikan alat ukur penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan
- b. Sinkronisasi
- c. Kepentingan bersama
- d. Tujuan bersama

Efektivitas Pelaksanaan Program

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Menurut Wira (2015:43) mengemukakan bahwa:

"Efektivitas dapat digunakan untuk mengukur suatu kerja organisasi karena efektivitas merupakan kemampuan untuk dapat memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pelaksanaan pekerjaan atau program didalam organisasi dikatakan efektif apabila dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan dengan metoda (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan."

Sedangkan menurut Siagian, 2001 : 24 yaitu:

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa dengan jumlah mutu tertentu tepat pada waktunya.”

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya indikator-indikator yang telah ditentukan, seperti sasaran, sosialisasi, tujuan dan pemantauan program. Jadi apabila indikator-indikator tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif.

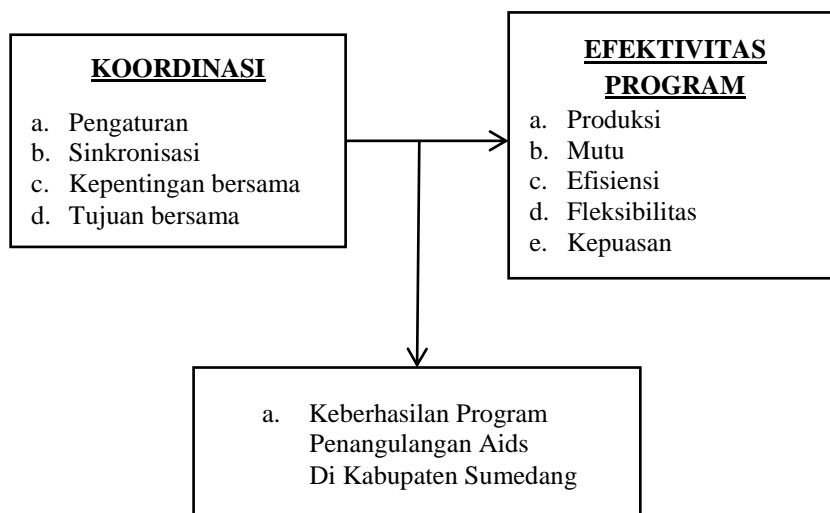
Adapun pengukuran efektivitas pencapaian program menurut Gibson dalam Iskandar (2013: 349) mencakup lima kriteria keefektivan sebagai berikut ini:

- a. Produksi
- b. Mutu
- c. Efisiensi
- d. Fleksibilitas
- e. Kepuasan

MODEL TEORITIK

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sumedang, selama kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah ODHA di Kabupaten Sumedang sebagai berikut: Tahun 2015 ODHA berjumlah 36 orang, Tahun 2016 ODHA berjumlah 40 orang, dan Tahun 2017 (sampai dengan 31 mei 2017) ODHA berjumlah 45 orang. Untuk mengurangi angka ODHA ditahun-tahun berikutnya maka Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Komisi Penanggulangan AIDS yang dibantu oleh Kader Warga Peduli AIDS melakukan beberapa program penanggulangan AIDS.

Agar pelaksanaan program tersebut berjalan dengan efektif maka diperlukan koordinasi yang baik antara para pelaksana kegiatan, yang dalam hal ini adalah Komisi Penanggulangan AIDS dan Kader Warga Peduli AIDS. Koordinasi diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam arti terciptanya perpaduan usaha dari berbagai orang, unit, atau organisasi yang menghasilkan output yang lebih besar dibanding dengan jumlah output masing-masing orang, unit atau organisasi bila mereka bekerja sendiri-sendiri atau tanpa koordinasi. Ketika koordinasi antara kedua belah pihak tersebut telah berjalan dengan baik maka dapat menghasilkan pelaksanaan program yang efektif. Adapun gambaran model teoritik dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Model Teoritik Penelitian

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, bentuk metode yang akan digunakan adalah bentuk pendekatan penelitian *deskriptif analisis*, sehubungan data yang akan dipelajari adalah data yang diambil dari populasi tersebut. Yaitu agar ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar komponen. Populasi pada penelitian ini adalah petugas Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sumedang dan Kader Warga Peduli AIDS sebanyak 19 orang yang terdiri dari petugas Komisi Penanggulangan AIDS sebanyak 10 orang, dan dari Kader Warga Peduli AIDS sebanyak 9 orang. Sehingga teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh, dimana semua populasi penelitian dijadikan sampel penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari Studi Dokumentasi dan Studi Lapangan (terdiri dari observasi dan angket). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu:

1. Uji Validitas Instrumen menggunakan *Pearson Product Moment*
2. Uji Reliabilitas Instrumen menggunakan *Alpha Cronbach*
3. Perhitungan Persentase
4. Uji Korelasi menggunakan *Spearman Rank*
5. Uji Signifikansi menggunakan Z_{hitung}
6. Uji Koefisien Determinasi

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas Variabel Koordinasi

Untuk mengetahui tingkat Koordinasi, maka dilakukan pengukuran terhadap 20 item pernyataan dari indikator variabel koordinasi. Hasil angket yang terkumpul diberi skor sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga diperoleh data tentang Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS dengan Kader Warga Peduli AIDS di Kabupaten Sumedang.

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner tentang koordinasi sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Koordinasi

No Resp	Variabel Koordinasi																				Skor Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	1	3	3	3	65
2	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	1	3	3	3	64
3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	1	3	3	3	63
4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	71
5	3	4	3	3	2	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	1	2	2	3	62
6	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	2	3	3	59
7	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	68
8	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2	3	3	4	4	3	4	3	3	4	68
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	79
10	4	4	3	4	3	4	4	2	2	1	2	4	4	2	3	3	2	1	4	4	60
11	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	64
12	3	3	3	3	3	3	3	4	4	1	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	61
13	3	3	3	3	3	4	3	2	2	3	3	3	3	4	4	3	3	4	1	4	61
14	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	62
15	4	4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	4	61
16	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	3	2	3	4	3	4	3	70
17	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	2	2	4	3	4	72
18	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	68
19	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	1	3	3	3	1	60
Jml	69	70	69	67	66	62	64	55	57	59	65	64	66	63	62	55	48	58	56	63	1238

Setelah data dimasukkan dalam tabel rekapitulasi, kemudian dilakukan perhitungan validitas untuk masing-masing item. Perhitungan tiap-tiap instrumen tersebut kemudian dibuat rekapitulasi, agar dapat diketahui mana item yang valid dan mana yang tidak, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Hasil Analisis Item Variabel Koordinasi

No Item	r hitung	r tabel	Ket
1	0,389	0.30	Valid
2	0,355	0.30	Valid
3	0,324	0.30	Valid
4	0,486	0.30	Valid
5	0,480	0.30	Valid
6	0,421	0.30	Valid
7	0,492	0.30	Valid
8	0,356	0.30	Valid
9	0,367	0.30	Valid
10	0,360	0.30	Valid
11	0,442	0.30	Valid
12	0,406	0.30	Valid
13	0,428	0.30	Valid
14	0,476	0.30	Valid
15	0,351	0.30	Valid
16	0,312	0.30	Valid
17	0,371	0.30	Valid
18	0,394	0.30	Valid
19	0,378	0.30	Valid
20	0,327	0.30	Valid

Uji Validitas Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV/AIDS

Setelah data dari penyebaran angket tentang efektivitas pencapaian program penanggulangan HIV/AIDS terkumpul maka dilakukan tabulasi sebagai berikut :

Tabel 3
Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV/AIDS

No Resp	Variabel Efektivitas Pelaksanaan Penanggulangan HIV/AIDS																				Skor Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	3	3	3	3	3	3	4	1	3	3	1	2	3	4	3	3	1	2	3	3	54
2	3	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	67
3	3	3	3	2	3	3	2	1	2	3	1	3	3	2	3	3	2	1	3	3	49
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	68
5	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	2	3	1	2	3	64
6	3	3	3	4	2	3	1	3	3	2	3	1	2	2	4	1	4	2	1	4	51
7	3	2	2	4	2	4	4	4	3	3	3	2	3	3	4	4	4	3	3	4	64
8	4	4	4	3	3	4	3	3	2	2	2	2	3	4	4	4	4	2	4	4	65
9	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	2	4	4	3	3	4	4	71
10	4	4	4	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2	3	4	2	2	1	4	4	60
11	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	70
12	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	67
13	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	3	4	4	4	2	4	3	3	3	1	55
14	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	66
15	3	3	3	3	2	2	2	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	60
16	3	2	3	4	2	2	4	4	2	2	2	4	2	2	4	4	3	1	4	1	55
17	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	4	2	3	3	67
18	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	66
19	4	3	3	2	3	1	3	3	3	3	4	2	3	2	1	4	4	4	3	3	58
Jml	64	60	61	64	56	59	59	58	56	54	53	53	59	59	66	63	61	49	61	62	1177

Setelah data dimasukkan dalam tabel rekapitulasi, kemudian dilakukan perhitungan validitas untuk masing-masing item. Perhitungan tiap-tiap instrumen tersebut kemudian dibuat rekapitulasi, agar dapat diketahui mana item yang valid dan mana yang tidak, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Hasil Analisis Item Variabel Efektivitas Pencapaian Program

No Item	r hitung	r tabel	Ket
1	0,432	0.30	Valid
2	0,394	0.30	Valid
3	0,334	0.30	Valid
4	0,350	0.30	Valid
5	0,478	0.30	Valid
6	0,366	0.30	Valid
7	0,464	0.30	Valid
8	0,420	0.30	Valid
9	0,507	0.30	Valid
10	0,417	0.30	Valid
11	0,421	0.30	Valid
12	0,294	0.30	Valid
13	0,476	0.30	Valid
14	0,324	0.30	Valid
15	0,356	0.30	Valid
16	0,394	0.30	Valid
17	0,407	0.30	Valid
18	0,469	0.30	Valid
19	0,441	0.30	Valid
20	0,472	0.30	Valid

Uji Reliabilitas Variabel Koordinasi

$$\begin{aligned}
 r_{11} &= \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right] \\
 &= \left[\frac{20}{(20-1)} \right] \left[1 - \frac{8,958}{25,817} \right] \\
 &= \left[\frac{20}{19} \right] [1 - 0,357] \\
 &= [1,053] [0,653] \\
 &= 0,69
 \end{aligned}$$

Jadi instrumen koordinasi dapat dinyatakan reliabel, hal tersebut sesuai dengan kaidah yaitu jika r hitung mencapai 0.60 atau ≥ 0.60 = reliabel, dimana r hitung (0,90) \geq (0,60).

Uji Reliabilitas Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV/AIDS

$$\begin{aligned}r_{11} &= \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum S_t^2}{S_t^2} \right] \\ &= \left[\frac{20}{(20-1)} \right] \left[1 - \frac{12,465}{41,102} \right] \\ &= \left[\frac{20}{19} \right] [1 - 0,303] \\ &= [1,053] [0,697] \\ &= 0,73\end{aligned}$$

Jadi instrumen koordinasi dapat dinyatakan reliabel, hal tersebut sesuai dengan kaidah yaitu jika r hitung mencapai 0.60 atau ≥ 0.60 = reliabel, dimana r hitung $(0,90) \geq (0,60)$

Perhitungan Porsentase Variabel Koodinasi Komisi Penanggulangan AIDS Dengan Kader Warga Peduli AIDS

Untuk mengetahui hasil prosentase variabel koordinasi komisi penanggulangan AIDS dengan Kader Warga Peduli AIDS adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Kategori Penilaian Variabel Koordinasi (X) per Indikator

No Item	Indikator	Jumlah Kumulatif	Persentase (%)	Kriteria
1	Memiliki tujuan pekerjaan yang jelas	69	72,63	Baik
2	Memahami tujuan pekerjaan	70	73,68	Baik
3	Memiliki prosedur kerja	69	72,63	Baik
4	Memahami prosedur kerja	67	70,53	Baik
5	Bekerja sesuai prosedur kerja	66	69,47	Baik
6	Memiliki pengetahuan dalam pekerjaan	62	65,26	Cukup Baik
7	Memiliki keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan	64	67,37	Cukup Baik
8	Memiliki sarana dan prasarana kerja yang lengkap	55	57,89	Cukup Baik
9	Mampu memanfaatkan sarana dan prasarana kerja	57	60,00	Cukup Baik
10	Lingkungan kerja nyaman	59	62,11	Cukup Baik
11	Lingkungan kerja aman	65	68,42	Baik
12	Adanya kejelasan didalam pembagian kerja	64	67,37	Cukup Baik
13	Menaati pembagian tugas	66	69,47	Baik
14	Adanya keserasian kegiatan dalam bekerja	63	66,32	Cukup Baik
15	Adanya saling menukar informasi mengenai pekerjaan diantara pegawai	62	65,26	Cukup Baik
16	Adanya pemberian masukan berupa ide/gagasan dalam bekerja	55	57,89	Cukup Baik
17	Adanya kesedian saling membantu dalam bekerja diantara pegawai	48	50,53	Kurang Baik
18	Adanya penggunaan sumber daya – sumber daya dalam pelaksanaan pekerjaan	58	61,05	Cukup Baik
19	Adanya peningkatan dalam efisiensi pencapaian tugas	56	58,95	Cukup Baik
20	Adanya peningkatan dalam efektivitas pencapaian tugas	63	66,32	Cukup Baik
Jumlah		1238	1303,16	
Rata-Rata			65,16	Cukup Baik

Perhitungan Porsentase Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV/AIDS

Untuk mengetahui hasil prosentase variabel efektivitas penerbitan nomor induk kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

Tabel 6

No Item	Indikator	Jumlah Kumulatif	Persentase (%)	Kriteria
1	Adanya kesesuaian antara program kerja dengan hasil pekerjaan	64	67,37	Cukup Baik
2	Hasil pekerjaan yang capai sesuai dengan hasil yang diharapkan	60	63,16	Cukup Baik
3	Hasil pekerjaan tepat sasaran	61	64,21	Cukup Baik
4	Memiliki tingkat motivasi kerja yang tinggi	64	67,37	Cukup Baik
5	Pekerjaan diselesaikan dengan mudah	56	58,95	Cukup Baik
6	Pekerjaan diselesaikan dengan rapih	59	62,11	Cukup Baik
7	Menyelesaikan pekerjaan dengann teliti	59	62,11	Cukup Baik
8	Memeriksa kembali pekerjaan sebelum dilaporkan	58	61,05	Cukup Baik
9	Tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam bekerja	56	58,95	Cukup Baik
10	Mampu melalui hambatan didalam bekerja	54	56,84	Cukup Baik
11	Pelaksanaan pekerjaan telah sesuai target	53	55,79	Cukup Baik
12	Pemanfaatan anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan	53	55,79	Cukup Baik
13	Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan	59	62,11	Cukup Baik
14	Memiliki target kesalahan kerja yang rendah	59	62,11	Cukup Baik
15	Memiliki tingkat kehadiran kerja yang tinggi	66	69,47	Baik
16	Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan	63	66,32	Cukup Baik
17	Bekerja sesuai tupoksi	61	64,21	Cukup Baik
18	Mampu menyelesaikan pekerjaan setiap hari	49	51,58	Kurang Baik
19	Bekerja sesuai jam kerja	61	64,21	Cukup Baik
20	Tidak menunda-nunda menyelesaikan pekerjaan	62	65,26	Cukup Baik
Jumlah		1177	1238,95	
Rata-Rata			61,95	Cukup Baik

Kategori Penilaian Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program (Y) per Indikator

Uji Korelasi Variabel Koordinasi dan Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang

$$\begin{aligned}
 r_s &= 1 - \frac{6 \times 357}{19(19^2 - 1)} \\
 &= 1 - \frac{2142}{19(361 - 1)} \\
 &= 1 - \frac{2142}{19 \times 360} \\
 &= 1 - \frac{2142}{6840}
 \end{aligned}$$

$$= 1 - 0,313$$

$$= 0,687$$

Kemudian hasil perhitungan r_s hitung tersebut dibandingkan dengan r_s tabel dengan taraf kesalahan 5% ($\alpha=0,05$) dan $n = 19$. Diperoleh nilai Rho tabel sebesar 0.475. Sehingga r_s hitung lebih besar dari harga r_s tabel ($0,687 > 0,475$).

Uji Signifikansi Variabel Koordinasi dan Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV/AIDS Pada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sumedang

$$Z_{hitung} = \frac{r_s}{\frac{1}{\sqrt{n-1}}}$$

$$Z_{hitung} = \frac{0,687}{\frac{1}{\sqrt{19-1}}}$$

$$Z_{hitung} = \frac{0,687}{0,236}$$

$$Z_{hitung} = 2,91$$

Dengan tingkat signifikansi 5%, harga Z_{tabel} dicari pada tabel Kurve Normal $Z_{([0,5] - \frac{1}{2} \cdot [0.05])} = Z_{0,475}$.

Apabila harga dalam kurve normal 0,475 maka harga $Z_{tabel} = 1,96$. Harga Z_{hitung} lebih besar dari Z_{tabel} , atau $2,91 > 1,96$.

Uji Koefisien Determinasi Variabel Koordinasi dan Variabel Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV/AIDS Pada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sumedang

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$= (0,687)^2 \times 100\%$$

$$= 0,472 \times 100\%$$

$$= 47,2 \%$$

PEMBAHASAN

Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS dengan Kader Warga Peduli AIDS

Hasil perhitungan persentase yang telah dilakukan menunjukkan hasil sebesar 65,16% yang artinya bahwa koordinasi yang terjalin antara Komisi Penanggulangan AIDS dengan Kader Warga Peduli AIDS berada dikategori cukup baik. Dimana dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan belum begitu baik, hal tersebut dapat dilihat dari masih kurang baiknya kerjasama antara pegawai di dalam menyelesaikan pekerjaan, belum baiknya keterampilan yang dimiliki akan pekerjaan yang dilakukan, dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menyelesaikan pekerjaan.

Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan AIDS di Kabupaten Sumedang

Hasil perhitungan persentase yang telah dilakukan menunjukkan hasil sebesar 61,95% yang artinya bahwa efektivitas pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang berada dikategori cukup baik. Dimana dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan belum begitu baik, hal tersebut dapat dilihat dari masih belum mampunya pegawai menyelesaikan pekerjaan setiap harinya, pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan belum sesuai target yang ditentukan, dan pegawai belum mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan secara langsung.

Hubungan antara Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS dan Kader Warga Peduli AIDS dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan AIDS di Kabupaten Sumedang

Hasil perhitungan korelasi yang telah dilakukan menunjukkan hasil r_{hitung} sebesar 0,687. Nilai dari r_{hitung} (0,687) tersebut dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (0,475) maka diketahui bahwa r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} atau $0,687 > 0,475$. Selain itu hasil Z_{hitung} menunjukkan bahwa nilai Z_{hitung} lebih besar dari Z_{tabel} , atau $2,91 > 1,96$.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara koordinasi komisi penanggulangan AIDS dan Kader Warga Peduli AIDS dengan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan AIDS di Kabupaten Sumedang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencapaian efektivitas pelaksanaan program penanggulangan AIDS di Kabupaten Sumedang dapat ditingkatkan apabila adanya koordinasi yang baik antara komisi penanggulangan AIDS dengan Kader Warga Peduli AIDS.

Pengaruh Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS dengan Kader Warga Peduli AIDS Terhadap Efektivitas Penanggulangan AIDS di Kabupaten Sumedang

Hasil perhitungan besaran pengaruh yang telah dilakukan menunjukkan hasil sebesar 47,2% yang artinya terdapat pengaruh koordinasi komisi penanggulangan AIDS dengan Kader Warga Peduli AIDS terhadap Efektivitas Penanggulangan AIDS di Kabupaten Sumedang. Hal ini berarti efektif atau tidaknya pelaksanaan program penanggulangan AIDS di Kabupaten Sumedang dapat dipengaruhi dari baik atau tidaknya koordinasi yang telah dilakukan oleh komisi penanggulangan AIDS dengan kader warga peduli AIDS. Oleh karena itu dalam

meningkatkan target pelaksanaan program penanggulangan AIDS perlu terlebih dahulu meningkatkan koordinasi maupun kerjasama diantara kedua belah pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara koordinasi dengan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS pada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sumedang, hal tersebut terlihat dari nilai Z_{hitung} lebih besar dari Z_{tabel} , atau $2,91 > 1,96$. Selain itu, terdapat pula pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV/AIDS pada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sumedang sebesar 47,2%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektif atau tidaknya pelaksanaan program penanggulanga AIDS pada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sumedang dapat dipengaruhi oleh koordinasi. Apabila koordinasi berjalan dengan baik maka hasil dari pelaksanaan program tersebut dapat efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik maka hasil dari pelaksanaan program pun tidak akan efektif.

SARAN

Adapun saran yang peneliti ajukan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan koordinasi komisi penanggulangan AIDS dengan Kader Warga Peduli AIDS dapat melakukan pelatihan dan pendidikan kepada kedua belah pihak mengenai HIV/AIDS seperti cara penularan virus, pencegahan penularan dan lain sebagainya untuk menyamakan persepsi, melakukan perencanaan yang matang akan program atau kegiatan yang akan dilakukan, dan meningkatkan sikap saling terbuka serta saling menghargai antara komisi penanggulangan AIDS dengan kader warga peduli AIDS.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan AIDS di Kabupaten Sumedang yaitu dengan menerapkan komitmen dalam penyelesaian pekerjaan, melengkapi sarana dan prasarana kerja, dan memahami serta menerapkan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, Prajudi. (1994). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Handyaningrat, Soewarno. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. (1999). *Manajemen (Edisi 2)*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu. SP. (2008). *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. (2005). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Putri.
- _____. (2013). *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijaksanaan Publik*. Bandung: Puspa.
- Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN). (2014). *Mengenal dan Menaggulangi HIV, AIDS, Infeksi Menular Seksual, dan Narkoba*. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara RI. (1998). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Napitupulu, Paimin dan Thamrin Mandiri. (2008). *Ekologi Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Priabu Tika, Moh. (2012). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarwoto. (1991). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert. (2009). *Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- STIA Sebelas April Sumedang. (2013). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Sumedang: STIA.
- Syafiie, dkk. (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsi, Ibnu. (1994). *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. (1997). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- _____. (2003). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administtrasi Negara*. Yogyakarta: UGM.
- Westra, Pariatra.dkk (1980). *Aneka Sari Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Balai Pembinaan Akademi Administrasi Negara

**PENGUATAN *BRAND COMMITMENT* PADA PERGURUAN TINGGI: ANALISIS
BRAND ORIENTATION DAN *BRAND INVOLVEMENT* BERDASARKAN *CAREER
STAGE* (STUDI PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN)
“VETERAN” JAWA TIMUR)**

Siti Ning Farida ¹, Nurul Azizah ²

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur ^{1&2}

Email korespondensi: nurulazizah.adbis@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Memasuki revolusi industry 4.0 seluruh organisasi dituntut untuk meningkatkan daya saing di era global. Dalam berdaya saing suatu organisasi harus memiliki keunikan atau sering disebut dengan istilah *branding*. *Branding strategy* sering digunakan perusahaan swasta dalam membentuk loyalitas dan kepuasan pelanggan. Selain perusahaan swasta, di era global ini, perusahaan negeri –non-profit- juga di tuntut demikian. Dalam membentuk atau memperkuat *branding* suatu organisasi diperlukan *brand commitment* yang baik agar tujuan organisasi tercapai. Dalam penelitian terdahulu diketahui bahwa *brand commitment* dipengaruhi oleh *brand orientation* dan *brand involvement* dari pelaku internal. Sehingga berkaitan dengan *career stage* pegawai di suatu organisasi. Kampus UPN “Veteran” Jawa Timur merupakan organisasi pendidikan negeri baru, yang memiliki *brand* sebagai kampus “Bela Negara”. Kemudian dalam penelitian ini dilakukan pada sampel sejumlah 285 di UPN “Veteran” Jawa Timur. Variabel yang digunakan terdiri dari *career stage*, *brand orientation*, *brand involvement* dan *brand commitment* dengan skala pengukuran yang diadaptasi dari penelitian terdahulu. Kemudian uji hipotesis dilakukan dengan uji ANOVA dan regresi linear. Kemudian diperoleh kesimpulan bahwa, terdapat perbedaan tingkat *brand orientation* berdasarkan *career stage*, sedangkan pada *brand involvement* dan *brand commitment* tidak terdapat perbedaan berdasarkan *career stage*. Kemudian hasil uji regresi linier menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan diantara variabel *brand orientation*, *brand involvement* dan *brand commitment*.

Kata kunci: *Career Stage*, *Brand Orientation*, *Brand Involvement*, *Brand Commitment*, *Higher Education*.

PENDAHULUAN

Memasuki revolusi industry 4.0 seluruh organisasi dituntut untuk meningkatkan daya saing di era global (Piehler, King, Burmann, & Xiong, 2016), baik itu sebuah organisasi bisnis ataupun organisasi pemerintah. Bahkan tidak sedikit sebuah organisasi yang notabene milik pemerintah namun harus mampu bersaing dengan organisasi swasta. Dalam berdaya saing suatu organisasi harus memiliki keunikan atau sering disebut dengan istilah *branding* (Keller, 2013), brand merupakan asset tidak tampak yang berfungsi sebagai pembeda antara organisasi satu dengan organisasi lain (Aaker, 1996). *Branding strategy* sering digunakan perusahaan swasta dalam membentuk loyalitas dan kepuasan pelanggan (Kotler dan Keller, 2006). Dalam membentuk atau memperkuat *branding* suatu organisasi diperlukan *brand commitment* yang baik agar tujuan organisasi tercapai (Pinar, Trapp, Girard, & E. Boyt, 2014).

Selain perusahaan swasta, di era global ini, perusahaan negeri –non-profit- juga diuntut demikian, hal tersebut juga bermakna bahwa sebuah organisasi atau produk tersebut harus menjaga dan mempertahankan makna sebuah brand yang melekat padanya (Modi & Patel, 2012). Hal tersebut tidak bertujuan untuk meningkatkan laba, namun lebih kepada membangun komitmen sebuah *brand* menjadi lebih baik (Modi & Patel, 2012), melihat dinamika pendidikan tinggi di Indonesia semakin ketat dalam bersaing (Wulandari, 2017). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa mempertahankan atau meningkatkan kualitas tidak mudah, di sini brand manajemen berperan penting didalamnya (Biedenbach & Manzhynski, 2016). Dalam penelitian (Powell, 2011) solusi untuk dalam mempertahankan atau meningkatkan komitmen sebuah brand diperlukan strategi *brand management internal* yang selaras antara atasan dan bawahan, atau internal pelaku dalam sebuah organisasi, dimana dalam konteks pendidikan tinggi di sini adalah pengajar yang nantinya akan mentransfer brand knowledge kepada anak didiknya. Selain diperkuat pernyataan (Burmann, Zeplin, & Riley, 2009) bahwa manajemen *brand* di internal memiliki banyak potensi sebagai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

(Du Preez & Bendixen, 2015) menyatakan bahwa alasan sebuah organisasi harus mengedepankan internal brand diantaranya mampu meningkatkan loyalitas organisasi dan keberlanjutan kerja, mendorong pegawai mempunyai pelayanan yang lebih baik, karena pemahaman mereka terhadap makna brand yang digunakan, dan mendorong pegawai untuk bekerja lebih baik. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan internal brand manajemen berperan penting terhadap kinerja organisasi, (De Chernatony et al., 2003) menyatakan bahwa pengalaman konsumen terhadap sebuah brand dipengaruhi oleh kinerja dari pegawainya dalam melayani. Penelitian lain menemukan bahwa manajemen *internal brand* berpengaruh terhadap sikap dan kinerja pegawai (Bastos & Levy, 2012). Lebih spesifik (Burmann & Zeplin, 2005) menemukan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap *brand commitment* adalah *brand orientation* dan *brand involvement*, khususnya dalam internal sebuah organisasi. Melihat penelitian terdahulu yang sudah ada, masih sedikit ditemukan penelitian penguatan *brand* pada organisasi pemerintah, khususnya pendidikan tinggi. Sehingga dalam penelitian berusaha menggali lebih jauh implementasi penguatan brand pada pendidikan tinggi. (Wulandari, 2017) menyatakan bahwa pertumbuhan pendidikan tinggi Indonesia semakin tinggi. Perusahaan swasta yang sudah menyentuh bidang pendidikan diantaranya Ciputra University, Bakrie University

dan lain sebagainya, sedangkan badan usaha negeri yang mempunyai yayasan pendidikan tinggi diantaranya semen Indonesia group, Telkom group dan lain sebagainya.

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran“ Jawa Timur merupakan salah satu perguruan tinggi negeri unggul di Indonesia. UPN di resmikan menjadi perguruan tinggi negeri dengan syarat menggunakan nama kampus “Bela Negara” pada Oktober 2014. Harapannya dengan adanya perguruan tinggi negeri yang berbasis “Bela Negara” mampu mempertahankan keutuhan NKRI dan mengenang jasa pahlawan yang berhasil menyatukan Indonesia menjadi NKRI. Bela Negara menjadi brand yang relative baru di UPN, sedangkan banyak pegawai didalamnya sudah bekerja sebelum peresmian nama *brand* tersebut. Hal tersebut menjadi hal menarik untuk di kaji apakah pegawai UPN “Veteran” Jawa Timur sudah memiliki komitmen terhadap brand yang ada. Tenaga pendidik menjadi kajian sumber daya manusia yang menarik untuk di kaji lebih mendalam, mengingat peran strategis mereka dalam menyampaikan brand “Bela Negara” kepada mahasiswa.

Peresmian UPN sebagai kampus “Bela Negara” yang relative baru perlu adanya penguatan *brand commitment* di internal pegawai untuk kemudian mampu memperkut brand secara eksternal. Meskipun setiap pegawai di UPN diwajibkan mengikuti pendidikan “Bela Negara” sebelum diangkat menjadi pegawai tetap. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah melalui pendidikan bela Negara tersebut, bisa dipastikan setiap pegawai sudah memahami maksud dan tujuan brand “Bela Negara”. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai kajian dalam meningkatkan kesadaran akan brand yang digunakan dan bagaimana penerapan dalam keseharian dalam mencerminkan sikap “Bela Negara”.

“Bela Negara” di anggap sebagai solusi atas permasalahan yang sekarang sedang terjadi di Negara berembang, khususnya Indonesia. Munculnya banyak pemahaman baru yang mengancam generasi muda di anggap membahayakan keamanan dan kesatuan Indonesia, sebagai negara bhineka tunggal ika. Pendidikan bela Negara diharapkan mampu mengenang kembali jasa para pahlawan dalam meraih kemerdekaan dan menumbuhkan sikap cinta tanah air. Melihat pentingnya pendidikan “Bela Negara”, UPN yang di klaim sebagai kampus “Bela Negara” memiliki peran penting ke depannya untuk turut berkontribusi dalam menjaga keutuhan NKRI. Mengacu pada latar belakang tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat *brand oreintation*, *brand involvement* dan *brand commitment* berdasarkan *career stage*. Selain itu, untuk menganalisis pengaruh *brand oreintation* dan *brand involvement* terhadap *brand commitment* pada pegawai UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai kampus “Bela Negara”.

TINJAUAN PUSTAKA

Career Stage

Penelitian mengenai *career stage* diawali oleh (Levinson D J, 1986), dimana gagasan utama dari konsep ini adalah apapun pekerjaan seseorang akan bertumbuh melalui tahapan hidup yang lebih spesifik selama ada berbagai kegiatan yang krusial dan adanya penyesuaian psikologis yang dihadapi. Statement Levinson tersebut lebih menekankan terhadap faktor usia. Namun menurut konsep (Super D E, 1984) jenjang karir tidak hanya dipengaruhi faktor usia, akan tetapi melibatkan faktor lain seperti pengalaman dan persepsi setiap individu. (Levinson D J, 1986) juga mendeskripsikan secara detail tahapan jenjang karir menjadi tiga yaitu: tahap *pre-employment*, tahap *socialization*, dan tahap *advancement*.

Dalam (Modi & Patel, 2012) disebutkan bahwa tahapan dalam jenjang karir ada tiga yaitu: *exploration*, *establishment* dan *maintenance* (Super D, 1957) yang didistribusikan dalam group yang berusia 25-65 tahun. Jangka waktu seorang individu bekerja dalam sebuah organisasi dipandang sebagai sebuah tolak ukur pengalaman dengan organisasi. (Singh & Singh, 2010) menyebutkan bahwa jenjang karir dinilai dari berapa lama seseorang sudah bekerja pada suatu organisasi tersebut, bukan usia hidup seseorang. Lebih lanjut (Burmam et al., 2009) semakin lama seseorang bekerja pada suatu organisasi semakin banyak komunikasi dan pertukaran informasi yang terjadi, sehingga pengetahuan terkait brand lebih banyak. Dengan demikian dalam penelitian ini mendefinisikan jenjang karir sebagai masa jabatan (Modi & Patel, 2012), dengan mengadaptasi dari penelitian terdahulu (Allen N J and Meyer J P, 1993a) membagi masa jabatan dalam organisasi menjadi tiga kelompok yaitu:

Tahap awal (*early-career stage*) menunjukkan masa kerja 0-2 tahun

Tahap pertengahan (*mid-career stage*) menunjukkan masa kerja 3-10 tahun

Tahap mature (*late-career stage*) menunjukkan masa kerja lebih dari 10 tahun

Berdasarkan uraian di atas mendorong untuk melihat lebih jauh apakah ada perbedaan brand orientation, brand involvement dan brand commitment berdasarkan career stage, sehingga hipotesis 1-3 digambarkan dalam pernyataan berikut:

H1: Terdapat perbedaan tingkat *brand orientation* berdasarkan *career stage*

H2: Terdapat perbedaan tingkat *brand involvement* berdasarkan *career stage*

H3: Terdapat perbedaan tingkat *brand commitment* berdasarkan *career stage*

Brand Orientation dan Brand Involvement

Brand manajemen diadopsi dari konsep marketing manajemen (Du Preez & Bendixen, 2015) yang menekankan pada pengaplikasian pemahaman pelaku pemasar baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara spesifik penulisan ini menekankan pegawai sebagai konsumen internal. Internal marketing melihat bahwa pegawai memerlukan motivasi dan berorientasi pada penjualan (Grönroos, 1984). (Burmam et al., 2009) menyatakan bahwa bagian krusial dalam membangun keunggulan kompetitif melalui penguatan brand oleh para pelaku internalnya. Internal marketing adalah unsur utama dari sebuah manajemen bukan hanya promosi dalam jangka pendek (Varey, 1995). Dengan adanya pemahaman dan pengetahuan dari pegawai internal maka produk atau brand dari sebuah organisasi akan lebih hidup (Kotler, P., Jain, D.C. and Maesincee, 2002).

Brand orientation adalah tingkat relevansi terkait penciptaan brand oleh para manajer dan mengatur pendekatan emotional dan persepsi terkait merek oleh seluruh pegawai dalam organisasi (Baumgarth, C. and Schmidt, 2010). *Brand orientation* dan *brand involvement* merupakan factor yang berpengaruh terhadap internal branding pada tingkat individu (Baumgarth, C. and Schmidt, 2010). *Brand orientation* merupakan sebuah representasi sebuah organisasi dalam memenuhi janji/komitmen mereka terhadap konsumen, sehingga tercipta konsistensi antara apa yang dijanjikan organisasi dengan apa yang didapat pelanggan (Liu, 2017). *Brand orientation* terdiri dari tiga jenis tindakan konkret dalam mengkomunikasikan merek organisasi: orkestrasi, interaksi, dan pengaruh (Ewing & Napoli, 2005; Napoli, 2006). Orkestrasi adalah sejauh mana organisasi secara efektif mengkomunikasikan janji mereknya kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Interaksi adalah sejauh mana suatu organisasi menggunakan umpan balik dan tanggapan pasar untuk menginformasikan perubahannya. Akhirnya, kemampuan mempengaruhi adalah sejauh mana organisasi memahami preferensi pemangku kepentingan (baik positif maupun negatif) tentang merek (Punjaisri & Wilson, 2011). Ketika sebuah organisasi dengan sengaja melakukan ketiga faktor tersebut maka akan menjadi lebih mampu menyelaraskan nilai-nilai brand-nya dengan pengalaman para pemangku kepentingan baik internal dan eksternal, dan terlibat dalam kegiatan terkait brand yang diperlukan untuk memaksimalkan efek dari brand.

Brand involvement adalah keterlibatan pegawai terhadap brand, dimana hal tersebut berawal dari kepercayaan pegawai dan tingkat persepsi relevansi (Biedenbach & Manzhynski, 2016). Perilaku *brand orientation* memiliki peran penting dalam memulai proses keterlibatan, karena itu memaksa pelaku internal untuk mengembangkan pemahaman yang lebih besar tentang makna merek organisasi dan merasa bahwa mereka terhubung dengannya, untuk mengomunikasikannya kepada pemangku kepentingan organisasi. Pernyataan tersebut menjadi dasar dalam membentuk hipotesis ke empat seperti di bawah ini:

H4: *Brand orientation* memiliki pengaruh positif terhadap *brand involvement*

Brand Commitment

Brand commitment adalah tingkat keterikatan psikologi pegawai terhadap brand yang berpengaruh terhadap kesadaran untuk melakukan usaha dalam mencapai tujuan sebuah brand (Burmam et al., 2009). Pada penelitian (Piehler et al., 2016) disebutkan bahwa konsep komitmen sangat dipengaruhi oleh afektif, keberlanjutan dan komitmen normative. Afektif komitmen menunjukkan keterikatan emosional pegawai pada organisasi. Keberlanjutan dan normative komitmen menggambarkan terhadap beban ketika meninggalkan suatu organisasi dan kewajiban untuk tetap tinggal pada suatu organisas (Allen N J and Meyer J P, 1993b). Menurut (Burmam & Zeplin, 2005) ada tiga faktor penting dalam mendorong sebuah brand yaitu : *compliance*, *identification* dan *ternalisation*. *Compliance* yaitu sebuah sikap tertentu yang ditunjukkan dalam menggambarkan sifat bran dsebagi upaya untk memperoleh penghargaan. *Identification* merupakan diterima pengaruh social yang disebabkan adanya rasa memiliki pada kelompok berdasarkan pengalaman penggunaan brand. *Internalization* adalah kesesuaian pada nilai brand dalam self-concep sehingga bisa dicerminkan dalam sikap dan perilaku (Burmam & Zeplin, 2005).

Dalam (Joung, Goh, Huffman, Yuan, & Surles, 2015) disebutkan definisi komitmen yaitu internalisasi dalam bertindak sesuai dengan tujuan organisasi dengan persepsi bahwa tindakan yang dilakukan adalah hal yang beanr dan seara moral wajar untuk dilakukan. Dimana pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat (Burmam & Zeplin, 2005) dan (Allen N J and Meyer J P, 1993b). Dalam hasil penelitian (Biedenbach & Manzhynski, 2016) ditemukan bahwa *brand orientation*, dan *brand involvement* berpengaruh terhadap tingkat brand komitmen pegawai. Selanjutnya juga ditemukan adanya pengaruh positif internal marketing terhadap organizational (Joung et al., 2015) . Uraian tersebut mendukung hipotesis keempat dan kelima yang diusulkan sebagai berikut:

H5: *Brand oreintation* memiliki pengaruh positif terhadap *brand commitment*

H6: *Brand involvement* memiliki pengaruh positif terhadap *brand commitment*

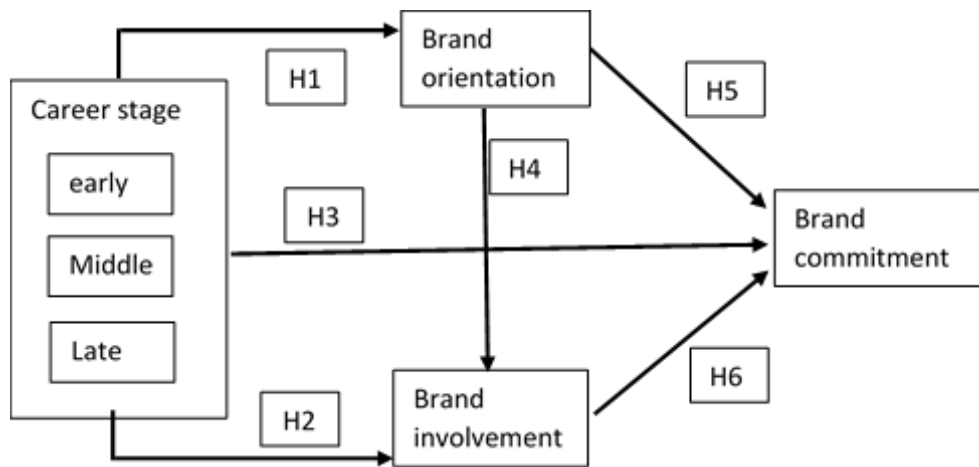
Bela Negara Sebagai Brand UPN “Veteran” Jawa Timur

“Bela Negara” merupakan langkah awal dalam menjawab tantangan global dan untuk mempertahankan keutuhan NKRI (Dr. Timbul Siahaan, 2016). Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar (UUD) 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang seutuhnya (UU No 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1). Adapun Unsur Dasar Bela Negara : 1) Cinta Tanah Air. 2) Kesadaran Berbangsa & bernegara. 3) Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4) Rela berkorban untuk bangsa & negara. 5) Memiliki kemampuan awal bela negara. Dalam implementasinya bela Negara tidak hanya berupa pendidikan “bela negara” baik secara teori maupun pelatihan, namun dapat juga dapat berupa pelestarian budaya , mengingat jasa-jasa pahlawan yang telah gugur seperti upacara-upacara hari besar nasional dan ziarah di para makam pahlawan dan lain sebagainya.

Universitas Pembangunan Nasioal yang merupakan pendidikan tinggi yang berdiri di bawah kementerian pertahanan menjadi role model untuk pendidikan “bela Negara”. Dengan harapan

ke depannya juga akan di ikuti seluruh perguruan tinggi ataupun lembaga lain. Pengaplikasian bela Negara di UPN sudah diterapkan apda seluruh pegawai di dalamnya sebelum di angkat menjadi pegAwai tetap. Selain itu juga di adakan quality control dalam menerpakan kampus “Bela Negara” yang dipegang oleh LP3M. Dalam sejarahnya UPN didirikan oleh para veteran yang telah berjuang di Indonesia sejak tahun 1959 yang terletak di Jawa Tengah. Dalam perkembangannya di buka UPN di kota Surabaya, Jawa Timur dan kota Jakarta , Jawa Barat.

Kerangka Berfikir



Gambar 2.1. Konseptual Model Berfikir

Sumber : Data Diolah Penulis (2017)

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah explanatory dengan pendekatan kuantitative . adapun varibel yang digunakan ada empat yaitu : Variabel independen (X), Career Stage dengan pengukuran yang di adaptasi dari penelitian terdahulu (Modi, 2012 dan Singh, 2010). Variabel mediator (Y): *brand orientation* dan *brand involvement*, menggunakan item indikator yang diadaptasi dari penelitian terdahulu (Biedenbach & Manzhynski, 2016) .Variabel dependen (Z) : *Brand Commitment*, menggunakan item indikator yang diadaptasi dari penelitian Biedenbach 2016 dan Duu Preez (2015).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai puniversitas pembangnan nasional (UPN) “veteran” jawa timur, yaitu sejumlah 755 terdiri atas 434 dosen dan 321 tenaga pendidik. Metode pengambilan sampel (sampling) pada penelitian ini termasuk dalam tipe probability sampling, dengan tipe desain pengambilan sampel simple random sampling. Adapun acuan yang dijadikan adalah berdasarkan tabel Yamane (1967). Dalam penelitian ini menggunakan tingkat presisi ±5% dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 285 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji ANOVA dan regresi linier dengan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Berdasarkan hasil pendistribusian kuisioner yang di lingkungan UPNVJT, diperoleh 285 responden dengan 138 laki-laki dan 147 perempuan. Masing-masing kategori dengan usia yang relative sama rata dengan presentase sekitar 20 %, dengan mayoritas sebagai tenaga pengajar dan tingkat pendidikan S2. Hal tersebut sesuai dengan sasaran yang ditargetkan dengan asumsi bahwa pihak yang banyak bertatap muka dengan mahasiswa adalah tenaga pengajar. Dari 285 responden rata-rata menjabat selama 3-10 tahun. Data lengkap terkait demografi responden yang diperoleh dalam penelitian ini telah di rangkum dalam tabel 1.

Tabel 1. Demografi Responden UPNVJT

	JUMLAH	PROSENTASE		JUMLAH	PROSENTASE
GENDER			POSISI		
Laki-laki	138	48.30%	tenaga pengajar	179	62.60%
perempuan	147	51.70%	tenga kependidikan	87	30.80%
USIA			laboran	19	6.60%
21-30 th	61	21.30%	MASA JABATAN		
31-40 th	81	28.30%	0-2 th	59	20.60%
41-50 th	72	25.20%	3-10 th	116	40.60%
>51	71	25.20%	> 10 th	110	38.80%
PEDIDIKAN			POSISI		
SMA/Sederajat	19	6.60%	tenaga pengajar	179	62.60%
SI/ sederajat	65	22.70%	tenga kependidikan	87	30.80%
S2	164	57.30%	laboran	19	6.60%
S3	37	13.30%			

Sumber : Data Diolah Peneliti (2018)

Uji Validitas Dan Reliabilitas

Pengukuran validitas dan reliabilitas variabel dan indikator di uji menggunakan SPSS dengan hasil yang terpapar dalam tabel 2. Berdasar hasil yang diperoleh dapat di simpulkan bahwa seluruh indicator setiap variabel dinyatakan valid dengan nilai rata-rata diatas 0.5. dimana menggunakan standar T-table yang berada di nilia 0.116, dan hasil uji SPPS nilai rata-rata di atas 0.5 sehingga bisa di simpulkan bahwa seluruh item id\ndikato sudah sangat valid. Begitu pula dengan nilai standar deviasi yang rata-rata mendekati 1, menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan item variabel sangat kecil. Standard lain di ukur dengan melihat Cronbach alpha yang menunjukkan nilai di atas 0.5, mengindikasikan bahwa reliabilitas variabel sudah cukup baik dan bisa digunakan untuk mengukur variabel yang sama dalam studi yang berbeda.

Tabel 2. Pengukuran uji validitas dan reliabilitas variabel dan item indicator setiap variabel

VARIABLE	VALIDITAS	STD DEV	C A	T-TABLE	KETERANGAN
BO			0.648		
BO1	0.651	1.028		0.116	Valid
BO2	0.626	1.023		0.116	Valid
BO3	0.558	0.839		0.116	Valid
BO4	0.611	0.907		0.116	Valid
BO5	0.589	0.865		0.116	Valid
BO6	0.506	0.77		0.116	Valid
BO7	0.557	0.905		0.116	Valid
BO8	0.556	0.951		0.116	Valid
B.INV			0.713		
B.INV1	0.64	0.98		0.116	Valid
B.INV2	0.666	0.929		0.116	Valid
B.INV3	0.73	0.957		0.116	Valid
B.INV4	0.676	1.054		0.116	Valid
B.INV5	0.654	0.971		0.116	Valid
BC			0.761		
BC1	0.685	0.949		0.116	Valid
BC2	0.635	0.855		0.116	Valid

BC3	0.621	0.871		0.116	Valid
BC4	0.638	0.929		0.116	Valid
BC5	0.67	0.838		0.116	Valid
BC6	0.48	0.9		0.116	Valid
BC7	0.695	0.891		0.116	Valid

Sumber : Data Diolah Peneliti (2018)

Tingkat Perbedaan Brand Orientation, Brand Involvement Dan Brand Commitment Berdasarkan Jenjang Karir

Hasil uji anova one-way untuk menguji tingkat perbedaan brand orientation, brand involvement, dan brand commitment terhadap jenjang karir, menunjukkan hasil yang signifikan pada hipotesis 1 dengan tingkat $1.862 > 1.665$, maka hipotesis diterima pada tingkat signifikan 10%. Sedangkan untuk hipotesis ke-2 dan ke-3 tidak cukup signifikan untuk menolak H_0 (tabel 3). Sehingga bisa diperoleh hasil bahwa tingkat perbedaan jenjang karir mempengaruhi tingkat orientasi, sedangkan tingkat keterlibatan dan komitmen tidak ada perbedaan pada tingkat jenjang karir.

Tabel 3. Hasil uji anova one-way

Variabel	Tenur		
	0-2 TH	3-10 TH	>10 TH
BO	-0.52	1.862*	1.862*
BI	0.285	0.711	0.711
BC	0.273	0.946	0.946

*. The mean difference is significant at the 0.05 level

Sumber : Data Diolah Peneliti (2018)

Pengaruh Brand Orientation, Brand Involvement dan Brand Commitment Di UPN "Veteran" Jawa Timur .

Setelah uji anova digunakan menguji hipotesis 1-3, selanjutnya dalah melakukan uji hipotesis 4-6 menggunakan uji regresi linier. Hasil uji regresi linier yang diperoleh secara lengkap ditunjukkan apda tabel 4, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat seluruh hasilnya memiliki nilai T-value > 1.96, dan > 2.58, maka hipotesis 4, 5 dan 6 dapat diterima dengan tingkat signifikansi 0.01.

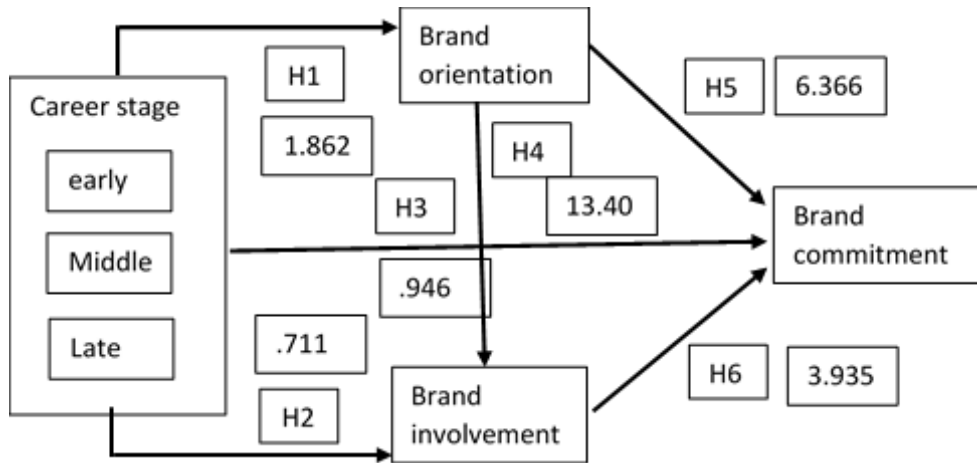
Tabel 4. Hasil uji regresi

Hipotesis	variabel	T-value	R square	sig	kesimpulan
H4	BO -> B.INV	13.403	0.381	0.000	Diterima
H5	BO -> BC	6.366	0.475	0.000	Diterima
H6	B.INV -> BC	3.935	0.415	0.000	Diterima

Sumber : Data Diolah Peneliti (2018)

Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa brand orientation mempengaruhi *brand involvement* sebesar 3.81%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain, hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu dari Liu, et al (2013), yang menyatakan bahwa *brand orientation* memiliki pengaruh terhadap keterlibatan staff dalam sebuah organisasi. *Brand orientation* berpengaruh sebesar 47.5% terhadap brand commitement. Artinya tingkat *brand commitment* seorang pegawai dipengaruhi oleh seberapa besar brand orientation yang telah ditanamkan, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Iglesias, et al (2018) yang menemukan bahwa *commitment* dipengaruhi oleh *employee empathy*. Kemudian hasil uji hipotesis ke enam menunjukkan bahwa *brand commitment* dipengaruhi oleh *brand involement* sebesar 41.5%, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Tseng, et al (2017) yang menemukan bahwa *commitment* dipengaruhi oleh keterlibatan konsumen dalam komunitas on-line.

Secara general seluruh hipotesis ditunjukkan oleh gambar 2. Dimana dari keseluruhan hipotesis yang di ajukan ada dua hipotesis yang tidak diterima, selebihnya diterima dengan tingkat signifikan 0.1 dan 0.01.



Gambar 2. Ilustrasi hasil uji hipotesis secara keseluruhan.

Sumber : data diolah peneliti (2018)

Implikasi Praktis Dan Teori

Berdasarkan analisis teori dan penelitian terdahulu, secara empiris penelitian ini menemukan bahwa jenjang karir seseorang berpengaruh terhadap tingkat orientasi, keterlibatan dan komitmen seseorang dalam sebuah organisasi. Namun secara praktis ternyata ditemukan fakta yang berbeda dimana jenjang karir hanya ditemukan perbedaan pada brand orientation. Hal tersebut mneunjukkan bahwa tingkat keterlibatan dan komitmen bisa ditanamkan sejak dini tanpa ada pengaruh dari masa kerja seseorang. Sehingga para pimpinan dalam suatu organisasi bisa melibatkan karyawan dari berbagai tingkat career stage dalam membangun sebuah brand.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji anova one-way diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan tingkat brand orientasi pada masa kerja seseorang, namun tidak ada perbedaan pada brand involvement dan brand commitment terhadap masa kerja seseorang. Kemudian berdasarkan hasil uji regresi linier diperoleh hasil bahwa brand orientation memiliki pengaruh positif terhadap brand involvement, dan brand commitement. Begitu pula brand involvement memiliki pengaruh positif terhadap *brand commitement*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, D. (1996). Measuring brand equity across products and markets. *California Management Review*, 38(3), 102–120. <https://doi.org/10.2307/41165845>
- Allen N J and Meyer J P. (1993a). Organizational Commitment: Evidence of Career Stage Effect. *Journal of Business Research*, 26, 49–61.
- Allen N J and Meyer J P. (1993b). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63(1), 1–18.
- Bastos, W., & Levy, S. J. (2012). A history of the concept of branding: practice and theory. *Journal of Historical Research in Marketing*, 4(3), 347–368. <https://doi.org/10.1108/17557501211252934>
- Baumgarth, C. and Schmidt, M. (2010). How strong is the business-to-business brand in the workforce? An empirically-tested model of “internal brand equity” in a business-to-business setting. *Industrial Marketing Management*, 39(8), 1250–1260.
- Biedenbach, G., & Manzhynski, S. (2016). Internal branding and sustainability: investigating perceptions of employees. *Journal of Product & Brand Management*, 25(3), 296–306. <https://doi.org/10.1108/JPBM-06-2015-0913>
- Burmam, C., & Zeplin, S. (2005). Building brand commitment: A behavioural approach to internal brand management. *Journal of Brand Management*, 12(4), 279–300. <https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540223>
- Burmam, C., Zeplin, S., & Riley, N. (2009). Key determinants of internal brand management success: An exploratory empirical analysis. *Journal of Brand Management*, 16(4), 264–284. <https://doi.org/10.1057/bm.2008.6>
- Dr. Timbul Siahaan. (2016). BELA NEGARA DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN. In *media informasi kementerian pertahanan* (pp. 6–16).
- Du Preez, R., & Bendixen, M. T. (2015). The impact of internal brand management on employee job satisfaction, brand commitment and intention to stay. *International Journal of Bank Marketing*, 33(1), 78–91. <https://doi.org/10.1108/IJBM-02-2014-0031>.
- Ewing, M. T., & Napoli, J. (2005). Developing and validating a multidimensional nonprofit brand orientation scale. *Journal of Business Research*, 58(6), 841–85
- Grönroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications. *European Journal of Marketing*, 18(4), 36–44.
- Iglesias, O, Markovic, Stefan Rialp, Josep. 2018. How does sensory brand experience influence brand equity? Considering the roles of customer satisfaction, customer affective commitment, and employee empathy. *Journal of Business Research*. 0-1.
- Joung, H., Goh, B. K., Huffman, L., Yuan, J. J., & Surles, J. (2015). Investigating relationships between internal marketing practices and employee organizational commitment in the foodservice industry, 27(7), 1618–1640. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-05-2014-0269>

- Keller, K. . (2013). *strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity* (4th ed.). boston: Pearson.
- Kotler, P., Jain, D.C. and Maesincee, S. (2002). *Marketing Moves: A New Approach to Profits, Growth, and Renewal*. Harvard Business School Publishing Corporation. boston.
- Levinson D J. (1986). A Conception of Adult Development. *American Psychologist*, 41(1), 3–13.
- Liu, G. C., Chris Ko, Wai Wai Ngugi, & Isaac K.2015. The Role of Internal Branding in Nonprofit Brand Management: An Empirical Investigation. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 44 (2), 319-339
- Modi, A., & Patel, J. D. (2012). Employees' Brand Commitment and Career Stages: Empirical Evidence from Indian Universities. *THE IUP Journal of Brand Management*, IX(1), 28–40.
- Piehler, R., King, C., Burmann, C., & Xiong, L. (2016). The importance of employee brand understanding, brand identification, and brand commitment in realizing brand citizenship behaviour. *European Journal of Marketing*, 50(9/10), 1575–1601. <https://doi.org/10.1108/EJM-11-2014-0725>
- Pinar, M., Trapp, P., Girard, T., & E. Boyt, T. (2014). University brand equity: an empirical investigation of its dimensions. *International Journal of Educational Management*, 28(6), 616–634. <https://doi.org/10.1108/IJEM-04-2013-0051>
- Powell, S. M. (2011). The nexus between ethical corporate marketing, ethical corporate identity and corporate social responsibility: an internal organisational perspective. *European Journal of Marketing*, 45(9/10), 1365–1379.
- Punjaisri, K., & Wilson, A. (2011). Internal branding process: Key mechanisms, outcomes and moderating factors. *European Journal of Marketing*, 45(10), 1521–1537
- Singh, A. K., & Singh, A. P. (2010). Career Stage and Organizational Citizenship Behaviour among Indian Managers. *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, 36(2), 268–275.
- Super D. (1957). *The Psychology of Careers*. new york.
- Super D E. (1984). *Career and Life Development*. san-fransisco: josesy-bass.
- Tseng, Ting hsiang Huang, Hazel H. Setiawan, Adilina. 2017. How do motivations for commitment in online brand communities evolve? The distinction between knowledge- and entertainment-seeking motivations. *Computers in Human Behavior*, 77 (1), 326-335.
- Varey, R. J. (1995). Internal marketing: a review and some interdisciplinary research challenges. *Internal Marketing: A Review and Some Interdisciplinary Research Challenges*, 6(1), 40–63.
- Wulandari, S. (2017). An Empirical Study on the Influence of Students ' Awareness on the Brand Identity : A Case of Telkom University Indonesia, 1(1), 54–59.

ANALISIS PENJUALAN DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP LABA BERSIH PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA

Soedarmanto

soedarmanto@stiamak.ac.id

STIA DAN MANAJEMEN KEPELABUHAN BARUNAWATI

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penjualan dan perputaran piutang secara parsial dan simultan terhadap laba bersih pada perusahaan pertambangan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi). Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Dari 22 perusahaan, hanya 18 perusahaan yang berhasil memenuhi kriteria penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini adalah uji deskriptif, asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji t dan uji f. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) penjualan (X_1) mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap laba bersih, Artinya jika penjualan meningkat, maka laba bersih meningkat, (2) perputaran piutang (X_2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Artinya, jika semakin cepat perputaran piutang selama 1 periode akuntansi, maka laba bersih akan semakin cepat meningkat, (3) penjualan (X_1) dan perputaran piutang (X_2) secara simultan memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu laba bersih.

Kata kunci : Penjualan, Perputaran Piutang, Laba Bersih

PENDAHULUAN

Laporan keuangan selain sebagai sumber informasi juga sebagai pertanggungjawaban dan juga menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Salah satu jenis laporan keuangan adalah laporan laba-rugi dimana pengertiannya adalah ringkasan dari pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu, dan diakhiri dengan laba atau rugi bersih untuk periode tersebut. Laba tidak dapat menjadi satu-satunya tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimum, perusahaan harus menghasilkan produk dengan cara dan dalam bentuk *volume* penjualan sehingga akhirnya akan didapat pendapatan penjualan. *Volume* penjualan diartikan sebagai seluruh jenis barang yang disediakan/diserahkan kepada konsumen atau pelanggan tanpa memandang jumlah rupiah relatif tiap jenis produk tersebut ataupun sering tidaknya produk tersebut dihasilkan, sedangkan pendapatan penjualan adalah kenaikan

modal pemilik karena adanya penjualan produk kepada konsumen. Laba bersih akan terjadi kalau pendapatan yang dihasilkan melebihi pengorbanan untuk mendapatkan pendapatan tersebut, sedangkan kalau rugi dapat dibebankan terhadap operasi tahun berjalan (walaupun tidak sebagai pengurang pendapatan kotor), rugi tersebut dapat diperlakukan sebagai pengurang laba bersih.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memilih melakukan penelitian melalui website www.idx.co.id dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penjualan dan perputaran piutang terhadap laba bersih pada perusahaan pertambangan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2016.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah penjualan berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan pertambangan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 ?
2. Apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan pertambangan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 ?
3. Apakah penjualan dan perputaran piutang berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan pertambangan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 ?

LANDASAN TEORI

Menurut Sutrisno (2012:9) Pengertian laporan keuangan menurut Sutrisno adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba-rugi. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan.

Penjualan

IAI dalam SAK No 23 paragraf 2 (2009) menyatakan, “Penjualan barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau lainnya”.

Definisi penjualan menurut Mulyadi (2008:202), “Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli”.

Piutang

Menurut Weygandt Kimmel Kieso (2013:368) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan piutang adalah sebagai berikut “piutang didefinisikan sebagai jumlah yang dapat ditagih dalam bentuk tunai dari seorang atau perusahaan lain”.

Pengertian Perputaran Piutang

Rasio Perputaran Piutang (*Receivable Turnover*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah (dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya) dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya jika rasio semakin rendah ada *over investment* dalam piutang (Kasmir, 2013:176).

Laba Bersih

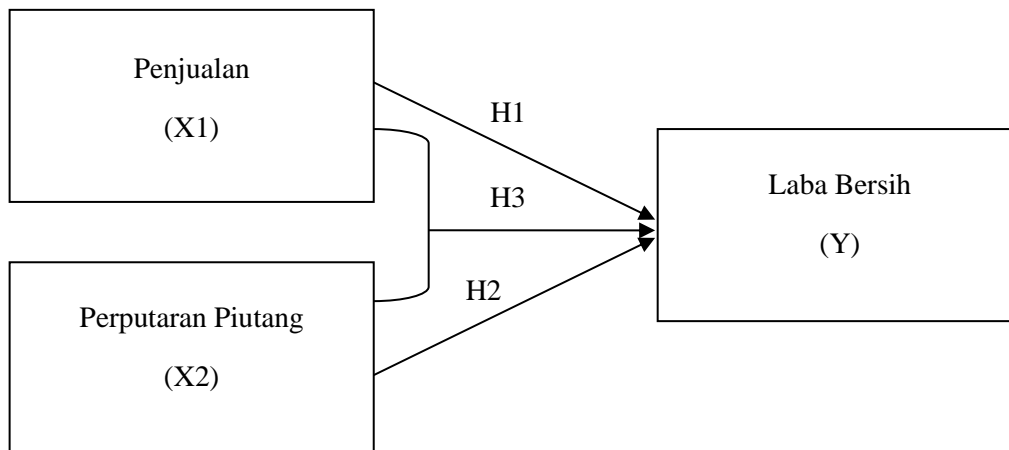
Menurut Harahap (2009:113) Laba adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi.

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul dan metode yang digunakan	Hasil/Simpulan
1.	Limas Guntur Anggriono Putra (2014)	Pengaruh Penjualan Dan Perputaran Piutang Terhadap Laba Bersih	Variabel Penjualan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba
		Perusahaan Farmasi dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif	bersih pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia karena nilai sign $0,000 < (\alpha) 0,05$. Variabel perputaran piutang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia karena nilai sign $0,039 < (\alpha) 0,05$. Variabel Penjualan mempunyai pengaruh dominan terhadap laba bersih dengan nilai koefisien regresi tertinggi diantara variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya.
2.	Nafilla Karina (2017)	Pengaruh Penjualan Dan Perputaran Piutang	Hasil uji t menunjukkan bahwa penjualan berpengaruh terhadap

		Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi BEI 2012 -2016 dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif	laba bersih dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ (tingkat signifikansi yang disyaratkan), hasil uji t menunjukkan bahwa
			perputaran piutang berpengaruh terhadap laba bersih dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0.025 < 0.05$ (tingkat signifikansi yang disyaratkan. Secara simultan penjualan dan perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ (tingkat signifikansi yang disyaratkan)
3.	Griselda Clarissa Tanny (2017)	Pengaruh Penjualan Dan Perputaran Piutang Terhadap Laba Bersih Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia	Variabel Penjualan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia karena nilai sign $0,000 < (\alpha) 0,05$. Variabel perputaran piutang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia ariab nilai sign $0,039 < (\alpha) 0,05$. Variabel Penjualan mempunyai pengaruh dominan terhadap laba bersih dengan nilai koefisien regresi tertinggi diantara variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Populasi

Menurut Sugiyono (2008:115) “Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan pertambangan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2013-2016

Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2011:81) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan teknik *sampling purposive*. Menurut (Sugiyono, 2012:126) *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria atau pertimbangan- pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti terhadap obyek yang akan diteliti. Adapun kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Obyek penelitian adalah 22 perusahaan sektor pertambangan batubara, 2) Perusahaan sektor pertambangan batubara yang menyediakan laporan keuangan dimana terdapat piutang usaha, penjualan, dan laba bersih didalamnya pada Bursa Efek secara berurutan selama tahun 2013-2016.

Tabel Prosedur Pengambilan Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan	Kriteria	
	Perusahaan		1	2
1	ADRO	PT. Adaro Energy Tbk	✓	✓
2	ARII	PT. Atlas Resources Tbk	✓	✓
3	ATPK	PT. Bara Jaya International Tbk	✓	✓
4	BORN	PT. Borneo Lumbang Energy & Metal Tbk	✓	✓
5	BSSR	PT. Baramulti Suksessarana Tbk	✓	✓
6	BUMI	PT. Bumi Resources Tbk	✓	
7	BYAN	PT. Bayan Resources Tbk	✓	✓
8	DEWA	PT. Darma Henwa Tbk	✓	✓
9	DOID	PT. Delta Dunia Makmur Tbk	✓	✓
10	FIRE	PT. Alfa Energi Investama Tbk	✓	
11	GEMS	PT. Golden Energy Mines Tbk	✓	✓
12	GTBO	PT. Garda Tujuh Buana Tbk	✓	
13	HRUM	PT. Harum Energy Tbk	✓	✓
14	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk	✓	✓
15	KKGI	PT. Resource Alam Indonesia Tbk	✓	✓
16	MBAP	PT. Mitrabara Adiperdana Tbk	✓	✓
17	MYOH	PT. Samindo Resources Tbk	✓	✓
18	PKPK	PT. Perdana Karya Perkasa Tbk	✓	✓
19	PTBA	PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	✓	✓
20	PTRO	PT. Petrosea Tbk	✓	✓
21	SMMT	PT. Golden Eagle Energy Tbk	✓	
22	TOBA	PT. Toba Bara Sejahtera Tbk	✓	✓

(Sumber: Diolah oleh peneliti)

Tabel Daftar Perusahaan Pertambangan Sektor Batubara Yang Digunakan Sebagai Sampel

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADRO	PT. Adaro Energy Tbk
2	ARII	PT. Atlas Resources Tbk
3	BYAN	PT. Bayan Resources Tbk
4	DEWA	PT. Derma Henwa Tbk
5	DOID	PT. Delta Dunia Makmur Tbk
6	GEMS	PT. Golden Energy Mines Tbk
7	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
8	KKGI	PT. Resource Alam Indonesia Tbk
9	MYOH	PT. Samindo Resources Tbk
10	PTRO	PT. Petrosea Tbk
11	TOBA	PT. Toba Bara Sejahtera Tbk
12	ATPK	PT. Bara Jaya International Tbk
13	BORN	PT. Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk
14	BSSR	PT. Baramulti Suksessarana Tbk
15	HRUM	PT. Harum Energy Tbk
16	MBAP	PT. Mitrabara Adiperdana Tbk
17	PKPK	PT. perdana karya perkasa tbk
18	PTBA	PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

(Sumber : Diolah oleh peneliti)

Kesimpulan: data yang diambil peneliti adalah data dari 18 perusahaan dengan laporan keuangan tahunan selama 4 tahun yang berjumlah, maka terdapat 72 sampel yang digunakan.

Jenis Dan Sumber Data

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs website, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011). Melalui sumber data tersebut maka diharapkan data yang diperoleh akurat dan dapat menjadi cerminan dari kualitas data tersebut. Dengan demikian jenis dan sumber pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penyusunan makalah ini dengan cara pengumpulan sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen milik Perusahaan Pertambangan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan-laporan hasil penelitian dan website internet yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

Variabel Penelitian

a. Variabel Independen (X)

1) Penjualan sebagai variabel pertama (X1)

2) Perputaran Piutang sebagai variabel kedua (X2)

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah Laba bersih yang merupakan selisih lebih pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu.

Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

b. Studi kepustakaan

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Ringkasan Proses Pemilihan Sampel

Uraian	Jumlah
Perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016	22 perusahaan
Perusahaan yang tidak ada data piutang usaha, penjualan, dan laba bersih	4 perusahaan
Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dan datanya lengkap	18 perusahaan
Tahun penelitian	4 tahun
Total data penelitian	72 data

Sumber: Data diolah peneliti

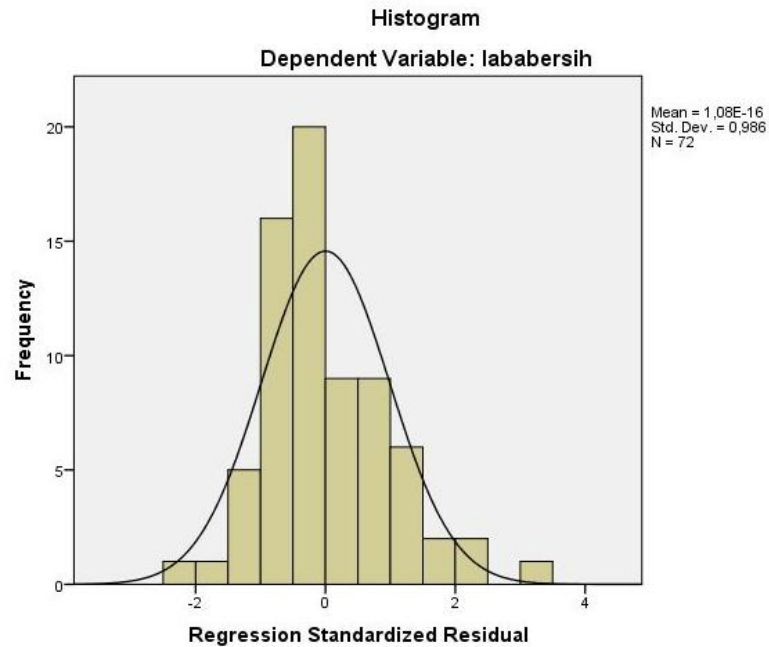
Tabel Hasil Analisis Deskriptif Variabel Independen & Dependen

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
penjualan	72	625363	3325444000	533858237,6	739361160,4
perputaranpiutang	72	,10	44,24	9,6776	7,80229
lababersih	72	-8211323	64475000	11091641,74	14886597,83
Valid N (listwise)	72				

(Sumber: Hasil output SPSS)

Uji Asumsi Klasik

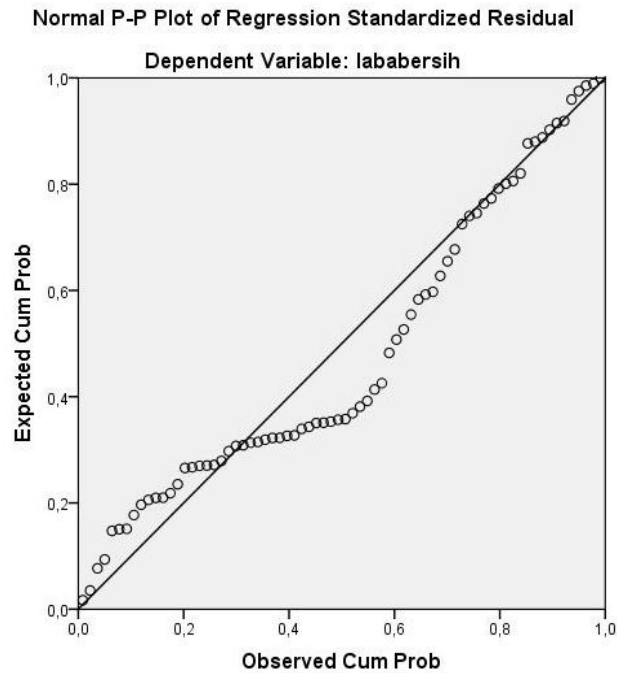
a. Uji Normalitas



Gambar Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik Histogram

(Sumber: Hasil output SPSS)

Gambar Hasil Uji Normalitas dengan grafik normal P-plot



(Sumber: Hasil output SPSS)

b. Uji Autokorelasi

Tabel Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,411 ^a	,169	,145	13768022,95	2,021

a. Predictors: (Constant), perputaranpiutang, penjualan

b. Dependent Variable: lababersih

(Sumber: Hasil output SPSS)

Tabel Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

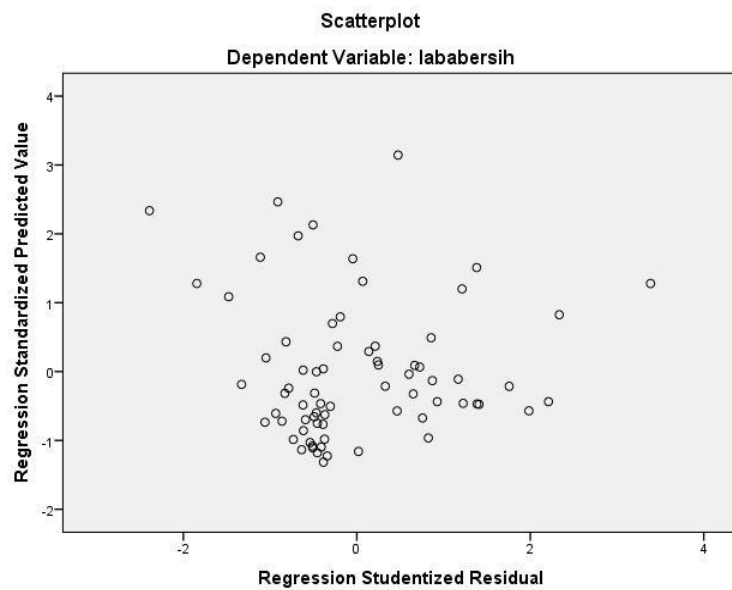
Hipotesis 0	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dL$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada kesimpulan	$dL \leq d \leq dU$
Tdk ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dL < d < 4$
Tdk ada korelasi negatif	Tidak ada kesimpulan	$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$
Tdk ada autokorelasi positif atau negatif	Tdk ditolak	$dU < d < 4 - dU$

Selanjutnya pada tabel Durbin Watsons (terlampir) cari nilai dL dan dU pada $T = 72$ dan $k = 3$, yaitu nilai $dL = 1,5323$ dan $dU = 1,7054$. Pada tabel di atas, nilai $d = 2,021$, maka kita hitung terlebih dahulu nilai $(4 - dU) = 2,2946$

Dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Scatterplot



(Sumber: Hasil output SPSS)

d. Uji Multikolineartas

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2990014,940	2749367,243		1,088	,281		
	penjualan	,005	,002	,249	2,242	,028	,980	1,020
	perputaranpiutang	561109,443	211506,309	,294	2,653	,010	,980	1,020

a. Dependent Variable: lababersih

(Sumber: Hasil output SPSS)

Tabel menunjukkan nilai VIF sebesar 1,020 itu berarti bahwa tidak ada variabel yang memiliki VIF lebih dari 10, sedangkan untuk nilai tolerance sebesar 0,980 yang artinya nilai tolerance tidak $< 0,1$ dalam pengujian model regresi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2990014,940	2749367,243		1,088	,281
	penjualan	,005	,002	,249	2,242	,028
	perputaranpiutang	561109,443	211506,309	,294	2,653	,010

a. Dependent Variable: lababersih

(Sumber: Hasil output SPSS)

Dari Tabel maka persamaan laba bersih dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 2990014 + 0,005X_1 + 561109X_2 + e$$

Koefisien Determinasi

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,411 ^a	,169	,145	13768022,95

a. Predictors: (Constant), perputaranpiutang, penjualan

(Sumber: Hasil output SPSS)

Uji Hipotesis

a. Uji Parsial atau Uji t

Tabel Hasil Uji T

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2990014,940	2749367,243		1,088	,281
	penjualan	,005	,002	,249	2,242	,028
	perputaranpiutang	561109,443	211506,309	,294	2,653	,010

a. Dependent Variable: lababersih

(Sumber: Hasil output SPSS)

- 1) Hasil uji t antara variabel independen dengan variabel dependen dalam analisis regresi berganda. Variabel penjualan (X_1) memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,028 < 0,05$. Nilai t hitung 2,242 lebih besar dari t tabel 1,66724. Dengan demikian H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan penjualan berpengaruh terhadap laba bersih.
- 2) Hasil uji t untuk variabel perputaran piutang (X_2) memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$. Nilai t hitung 2,653 lebih besar dari t tabel 1,99495. Dengan demikian H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan perputaran piutang berpengaruh terhadap laba bersih.

b. Uji F

Tabel Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,655E+15	2	1,327E+15	7,003	,002 ^b
	Residual	1,308E+16	69	1,896E+14		
	Total	1,573E+16	71			

a. Dependent Variable: lababersih

b. Predictors: (Constant), perputaranpiutang, penjualan

(Sumber: Hasil output SPSS)

Dari hasil yang diperoleh nilai sig ($0,002 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan menerima H_a , yang artinya secara simultan terdapat pengaruh signifikan variabel penjualan dan perputaran piutang terhadap laba bersih.

Berdasarkan hasil uji F, nilai F yang diperoleh adalah sebesar 7,003, lebih besar dari nilai F tabel dengan tingkat sig 0,002 yang berarti nilai sig $< (\alpha) 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil penelitian membuktikan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi faktor yang mempengaruhi laba.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat dibuat pembahasan mengenai penjualan, perputaran piutang dengan laba bersih sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian pada variabel penjualan (X_1) diperoleh nilai sebesar 2,242 dengan sig $0,028 < (\alpha) 0,05$ atau dengan taraf signifikansi kurang dari 0,05 maka H_0 berhasil ditolak berarti bahwa penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan pertambangan sektor pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih di Bursa Efek Indonesia terbukti. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya laba adalah kondisi penjualan pada perusahaan itu sendiri.

Semakin tinggi tingkat penjualan maka semakin besar pula besar laba yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut. Penjualan adalah suatu usaha terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan, karena dari penjualan dapat diperoleh laba serta suatu usaha untuk memikat konsumen yang diusahakan untuk mengetahui daya tarik mereka sehingga dapat mengetahui hasil produk yang dihasilkan.

2. Dari hasil penelitian pada variabel perputaran piutang (X_2) diperoleh nilai 2,653 dengan $\text{sig } 0,010 < (\alpha) 0,05$ atau dengan taraf signifikansi kurang dari 0,05 atau sebesar 0,010 maka H_0 berhasil ditolak berarti bahwa perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan pertambangan sektor pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia terbukti. Hal ini berarti perputaran piutang berperan secara langsung dalam mendukung peningkatan laba bersih pada perusahaan pertambangan sektor pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia. Perputaran piutang berpengaruh terhadap laba bersih karena tingkat perputaran piutang yang tinggi berarti piutang dagang membutuhkan waktu yang lebih pendek untuk dapat ditagih dalam bentuk uang tunai atau menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penjualan memiliki pengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan pertambangan sektor pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penjualan (X_1) mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap laba bersih, Artinya jika penjualan meningkat, maka laba bersih meningkat.
2. Perputaran piutang memiliki pengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan pertambangan sektor pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perputaran piutang (X_2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Artinya, jika semakin cepat perputaran piutang selama 1 periode akuntansi, maka laba bersih akan semakin cepat meningkat.
3. Penjualan dan perputaran piutang secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan pertambangan sektor pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,002, dimana nilai tersebut kurang dari nilai signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,05. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penjualan (X_1) dan perputaran piutang (X_2) secara simultan memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu laba bersih.

Saran

1. Bagi Perusahaan

Dengan hasil analisis yang telah dikemukakan maka diharapkan perusahaan lebih dapat meningkatkan jumlah penjualan. Dapat dilakukan dengan melebarkan wilayah penjualan ke perusahaan – perusahaan yang berpotensi, selain itu mengontrol beban operasional juga mampu meningkatkan laba bersih. Untuk perputaran piutang, perusahaan diharapkan mampu memperpendek masa piutang. Perusahaan hendaknya menjalankan kebijakan dalam pengumpulan piutang secara aktif atau pasif. Dapat juga dilakukan dengan cara memberikan potongan apabila pelanggan membayar piutang lebih cepat dari termin yang diberikan. Mendatangi pelanggan secara intensif sesuai jadwal pembayaran piutang juga dapat menjadi alternatif untuk kelancaran pembayaran piutang. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara aktif, maka perusahaan harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang, tetapi dengan menggunakan cara ini, maka piutang yang ada akan lebih cepat tertagih, sehingga akan lebih memperkecil jumlah piutang perusahaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan penjualan maupun perputaran piutang dan laba bersih agar hasil penelitiannya lebih baik dan lebih lengkap lagi. Diharapkan juga lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data, serta segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Untuk Variabel X_1 dan X_2 dapat diganti dengan variabel lain semisal beban operasional, modal kerja, beban produksi, ataupun yang lainnya.

Daftar pustaka

- Agus Purwanto, Erwan, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta : Gaya Media
- Baridwan, Zaki. 2008. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Edisi Kelima*. Yogyakarta: BPPE.
- Dwi Prastowo. 2011. *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Edy, Sutrisno. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar. 2008. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hanafi, Mahmud M. 2010. *Manajemen Keuangan. Cetakan ke lima*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hardi. 2008. *Memahami Akuntansi Dasar. Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI
- Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir. 2012. *Analisis Informasi Keuangan*. Yogyakarta : Liberty.
- Riduwan. 2013. *Rumus dan Data Dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for business Edisi I and 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Swastha, Basu. 2011. *Manajemen Penjualan: Pelaksanaan Penjualan*. Yogyakarta : BPFE.
- Warren D. Carl. et al. 2013. *Pengantar Akuntansi, Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Weygandt, Kimmel, dan Kieso. 2013. *Financial Accounting: IFRS Edition*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- www.idx.co.id diakses pada 15 April 2018
- <http://sahamok.com> diakses pada 14 April 2018
- <http://junaidichaniago.wordpress.com> diakses pada 14 Juli 2018

RINGKASAN

PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS HASIL PRODUKSI ROTI PLEMBEN, OPAK GAPIT DAN KRIPIK PISANG PADA “UKM NIKMAT” & “UKM HAFIZ” DI DESA BARENG, KEC. BARENG DAN DESA WONOSALAM, KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

Oleh :

Sri Andayani (Administrasi Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya)

Makanan ringan atau snack telah berkembang dengan pesat baik jenis maupun cita rasanya, maupun kemasannya. Dua (2) UMKM di Kabupaten Jombang, berlokasi di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang merupakan UKM yang menggarap bidang usaha dibidang pembuatan makanan ringan (snack) Opak Gapit dan Bolu Plemben, UKM “Nikmat”. serta Kripink pisang yaitu UKM “Hafiz” Proses produksi yang selama ini digunakan beberapa masih bersifat manual. Seperti pada alat/mesin pengaduk adonan, mixer yang digunakan masih “Hand Mixer” yang dipadu dengan baskom plastic, baru bisa digunakan untuk mencampur adonan untuk 1 resep saja. Adapun permasalahan yang dihadapi 2 UKM tersebut : a) Kapasitas produksi karena pemakaian mesin pengaduk bahan yang tidak bisa maksimal karena kapasitas pengadukan terbatas. b) Waktu yang lebih lama, karena pencampuran dan pengadukan dilakukan per resep. c) Proses mengemas produk, juga menjadi lebih lama karena sealer yang digunakan kurang mendukung. Waktu yang lebih lama juga terjadi pada proses pemotongan plastic dan kertas sebagai wadah dari camilan. d) UMK Hafiz alat produksi yang dimiliki berupa kompor yang sederhana, dan alat pemotong pisang hanya memakai pisau biasa dan proses pengemasan dilakukan dengan sederhana tanpa alat pengemas. e) Masih sangat sederhananya kemampuan pengelolaan usaha dan pembukuan usaha, serta strategi pemasaran. Solusi dan Pelaksanaan : untuk mengatasi masalah Program IPTEKDA LIPI dan Untag Surabaya mengintroduisir beberapa peralatan dan pendampingan diantaranya : pada UMK “NIKMAT “

- Introdusir tambahan kompor modifikasi 10 buah
- Mixer kapasitas 20 Kg
- Oven besar
- Pedal sealer unt kemasan
- Mesin Pamarut Kelapa
- Pendampingan dalam strategi pemasaran produk dan UMK Havid :
- Kompor dan Wajan untuk menggoreng pisang
- Pendampingan dalam manajemen usaha & strategi pemasaran produk

Dengan adanya, peralatan yang sudah diintrodusir, UMKM merasa terbantu pekerjaan, yang semula agak lambat dapat teratasi dan hasil produksi menjadi lebih cepat dan lebih banyak, sehingga tidak ada lagi pesanan yang lambat dan da kunci : Teknologi Tepat Guna, learning by doing

1. LATAR BELAKANG

Produk makanan ringan dalam perkembangannya dapat diproduksi dari berbagai macam bahan baku diantaranya makanan ringan berbahan baku pisang, tepung yang di olah semacam opak gambir, serta keripik. Keripik dan opak gapit merupakan makanan ringan favorit yang disukai oleh banyak orang, sehingga bisa dijadikan peluang bisnis yang memiliki omset penjualan yg cukup tinggi. Dua (2) UMK yang berlokasi di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang merupakan UMK yang menggarap bidang usaha dibidang pembuatan makanan ringan (snack) Opak Gapit dan Bolu Plemben, UMK “Nikmat”. serta Kripik pisang yaitu UMK “ Hafiz” mengelola bidang usaha makanan ringan dengan pertimbangan bahwa camilan atau makanan ringan mempunyai pasar yang sangat luas. Dimana camilan dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling modern sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada..

UMK “ NIKMAT” dalam menjalankan usahanya telah memiliki sejumlah 10 tenaga kerja yang terbagi dalam :

- 5 (lima) orang tenaga untuk pembuatan Bolu Plemben
- 5 (lima) orang tenaga untuk pembuatan Opak Gapit.

Proses produksi yang selama ini digunakan beberapa masih bersifat manual. Seperti pada alat/mesin pengaduk adonan, mixer yang digunakan masih “Hand Mixer” yang dipadu dengan baskom plastic, baru bisa digunakan untuk mencampur adonan untuk 1 resep saja. Sehingga kapasitas produksi masih sangat terbatas. Begitupun dengan proses pengemasan, masih menggunakan “Hand Sealer” yang berakibat kurang cepatnya dalam proses pengemasan. Sementara UMK “ HAFIZ” memproduksi Kripik Pisang dengan 2 orang tenaga kerja

Adapun permasalahan yang dihadapi 2 UMK tersebut

- Terbatasnya kapasitas produksi karena pemakaian mesin pengaduk bahan yang tidak bisa maksimal karena kapasitas pengadukan terbatas.
- Waktu yang lebih lama, karena pencampuran dan pengadukan dilakukan per resep. Dalam proses mengemas produk, juga menjadi lebih lama karena sealer yang digunakan kurang mendukung.
Waktu yang lebih lama juga terjadi pada proses pemotongan plastic dan kertas sebagai wadah dari camilan.
- Pada UMK Hafiz alat produksi yang dimiliki berupa kompor yang sederhana, dan alat pemotong pisang hanya memakai pisau biasa dan proses pengemasan dilakukan dengan sederhana tanpa alat pengemas
- Masih sangat sederhananya kemampuan pengelolaan usaha dan pembukuan usaha, serta strategi pemasaran

Permasalahan diatas menyebabkan tidak terpenuhinya permintaan pelanggan ataupun konsumen baru. hanya dapat memenuhi permintaan dari pelanggan lama, seperti toko, restoran dan warung tertentu. Padahal dengan kelebihan yang dimiliki opak gapit dan bolu plemben produksi UMK “ NIKMAT” dan UMK “HAFIZ” bisa bersaing di mutu dan harga. Dari saat berdiri tahun 2010 sampai sekarang tahun 2014, jumlah tenaga kerja yang terserap mengalami

peningkatan. Tenaga kerja baik berasal dari desa sekitar maupun dari para tetangga. Dan dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap, maka semakin meningkatkan jumlah pendapatan mereka, dan semakin meningkat pula kesejahteraannya. Dan sebagian besar adalah para perempuan, sehingga disini terjadi **Pemberdayaan Perempuan dalam keikutsertaannya dibidang usaha Produktif** Dengan Adanya kondisi tersebut, 2 UKM tersebut sangat membutuhkan peralatan yang dibutuhkan berupa peralatan dari teknologi tepat guna, maka LPPM Untag Surabaya bersama dengan KIAT Srikandi, pada kesempatan ini mengajukan Program Iptekda LIPI XIX Tahun 2016 dengan memilih dan bermaksud mendampingi 2 UKM tersebut. Harapan kita dengan penggunaan mesin yang diintroduksikan kemungkinan perkembangan usaha dan produk sangat menjanjikan, karena mesin tersebut benar-benar mesin yang sangat dibutuhkan oleh UKM.

1.1. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana meningkatkan kuantitas dan Kualitas pada produk makanan ringan di UMKM Nikmat dan Hafiz
- b. Bagaimana meningkatkan kemampuan Manajemen Usaha UKM Nikmat dan UKM Hafiz

1.2. Tujuan Kegiatan Pendampingan Iptekda LIPI

- Dengan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi Camilan/makanan ringan Opak Gapit dan Bolu Plemben dan Kripik Pisang pada UKM “ NIKMAT” dan UKM “ HAFIZ”.
- Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan tentang pemanfaatan Teknologi, pengembangan produk dan pengelolaan usaha.
- Meningkatkan manajemen usaha

1.3. Sasaran

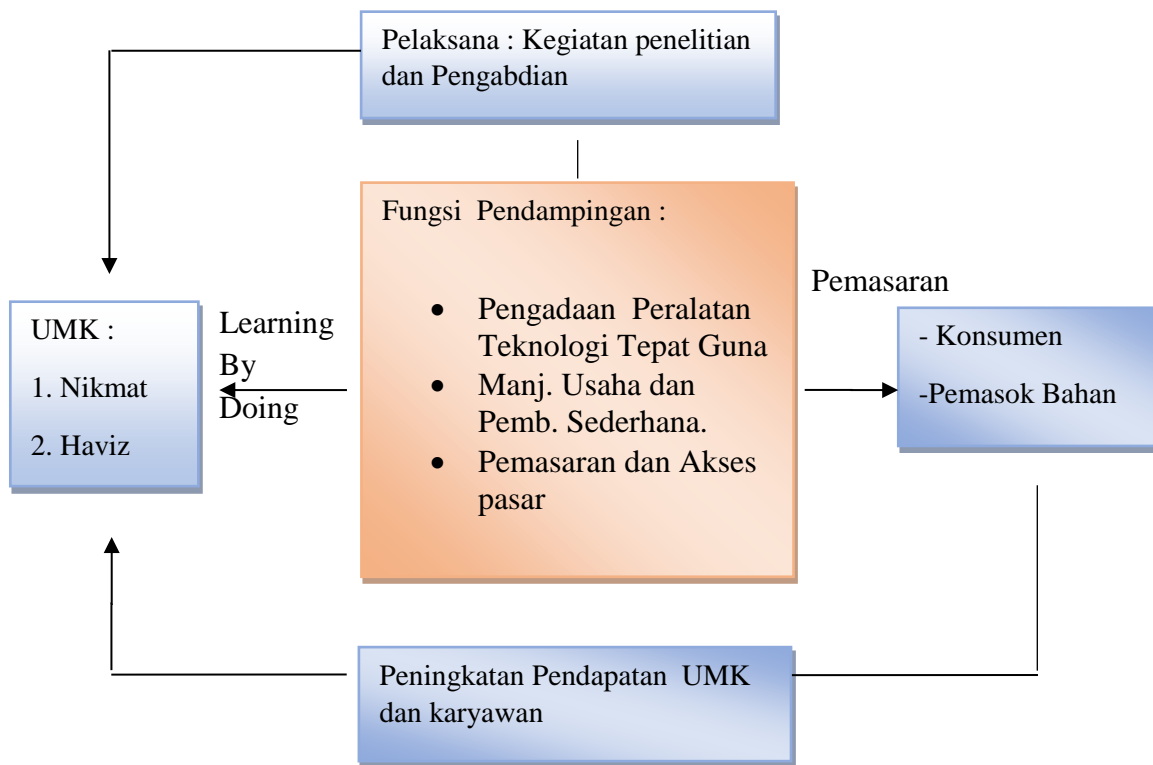
- Tersedianya Mesin Pencampur dan Pengaduk adonan dalam skala besar, sehingga dapat **meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi** serta dapat memenuhi permintaan pasar.
- Tersedianya kompor besar dan wajan
- Tersedianya Mesin/Alat Pedal Sealer, sehingga bisa mempercepat proses pengemasan, mesin parut kelapa .
- Tersedianya Kompor Modifikasi, sehingga meningkatkan kuantitas produksi.
- Tersedianya Mesin Oven Gas, sehingga kuantitas produksi meningkat.
- Meningkatnya ketrampilan penggunaan peralatan dan kemampuan pengelolaan usaha, dan pemasaran, dan pembukuan keuangan.

2. METODE KEGIATAN

- Melakukan identifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi”
- Introdusir peralatan TTG (teknologi tepat guna
- Metode pendekatan yang dilakukan dalam Pendampingan metode *Learning By Doing* dan Metode partisipatif. Maksudnya Perajin dalam mengikuti pelatihan dan pendampingan tidak harus meninggalkan pekerjaann. Dalam proses pelatihan dan pendampingan ini keterlibatan para pengrajin langsung dalam aplikasi

Adapun Alur pikir pendampingan dan pelatihan adalah sbb:

Alur Pikir Kegiatan dan Pendampingan Usaha



Gambar : Alur Pikir Kegiatan dan Pendampingan Usaha

3. KAJIAN PUSTAKA

Peningkatan Kuantitas dan kuantitas melalui penerapan teknologi tepat guna, Kuantitas: yakni banyaknya atau jumlah. Berbeda halnya dengan kualitas yang memiliki standard ukuran dengan baik atau buruk. Sedangkan kuanitas lebih terarah pada jumlah sesuatu. Jika sebuah perusahaan mampu menghasilkan produksi yang banyak, maka itu disebut sebagai kuantitas. (Philipus Vembrey Hariadi)

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, yaitu sebagai berikut.

a) **Intensifikasi**

Intensifikasi yaitu suatu upaya untuk meningkatkan hasil produksi, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya dengan cara memperbaiki metode kerja dan meningkatkan produktivitas faktor produksi yang digunakan. Contohnya dalam bidang pertanian. Untuk meningkatkan hasil produksi dapat dilakukan dengan menerapkan program panca usaha tani seperti memilih bibit unggul, penggunaan pupuk yang tepat, pemberantasan hama, pengairan yang cukup, menggunakan mesin-mesin pertanian serta penggunaan teknologi tepat guna.

b) **Ekstensifikasi**

Ekstensifikasi yaitu suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksi. Contohnya dalam bidang industri tekstil. Untuk menambah hasil industri, dilakukan upaya penambahan tenaga kerja, penambahan bahan baku atau penggantian mesin-mesin produksi dengan mesin yang lebih mutakhir.

c) **Diversifikasi**

Diversifikasi yaitu suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi dengan cara mengembangkan atau menambah keanekaragaman jenis hasil produksi. Contohnya dalam bidang industri minuman. Asalnya hanya menghasilkan satu rasa, dalam rangka meningkatkan kuantitas produksi ditambah menjadi lima rasa sehingga terdapat lima pilihan bagi konsumen untuk menikmatinya.

d) **Rasionalisasi**

Rasionalisasi yaitu suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi dengan cara menerapkan sistem manajemen yang lebih efektif dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya untuk menghemat tenaga manusia, digunakan mesin-mesin baru. (Sumber: Daily Actifity, Sabtu, 28 April 2012)

Perluasan Pasar

UKM batik dapat memperluas pasarnya karena permintaan akan batik Teyeng masih luas, tipe dan corak batik ini belum banyak saingan. Ada beberapa cara untuk memperluas pasar diantaranya dengan meningkatkan promosi dan memperbanyak Varian produk batik dengan harga yang bersaing. Menurut Philip Kotler , Perusahaan dapat meningkatkan bisnisnya dalam 4 cara, yaitu ;

- a. Perusahaan dapat menambah lini produknya.
- b. Perusahaan memperpanjang lini produk yang sudah ada dengan yang lebih lengkap.
- c. Perusahaan menambah keragaman tiap produknya sehingga memperdalam bauran produk.
- d. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi lini produknya, tergantung apakah perusahaan ingin memiliki reputasi kuat dalam satu bidang atau dalam beberapa bidang. (Kotel Philip 2012)

Strategi Memperluas Pasar. Ada tiga strategi yang dapat dilaksanakan perusahaan

1. Strategi Penerobosan Pasar (*Penetration*).

Di sini perusahaan mencari jalan untuk meningkatkan pangsa pasar bagi produknya saat ini dalam pasar-pasar mereka sekarang. Ada tiga cara pokok yang dapat dijalankan oleh perusahaan, yaitu:

- Meningkatkan Jumlah Pembeli Pada Segmen Yang Sama.
- Meningkatkan Frekuensi Pembelian.
- Meningkatkan Jumlah Pembelian.

2. Strategi Pengembangan Pasar (*Ekspansi*).

Perusahaan perlu mencari pasar-pasar baru yang kebutuhannya mungkin dapat dipenuhi oleh produk perusahaannya sekarang. Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu Pasar Geografis Baru.

3. Strategi Pengembangan Produk (*Bertahan/Stay*).



Perusahaan perlu memperhatikan kemungkinan dilaksanakannya pengembangan produk baru atau menyempurnakan produk-produknya bagi pasarnya yang sekarang. (Jatmiko)


4. PEMBAHASAN

4.1. PELAKSANAAN TEKNIS

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan beberapa peralatan Teknologi tepat guna, dengan fasilitas pinjaman tanpa bunga berupa beberapa peralatan diantaranya :

No	Kondisi Sebelumnya	Realisasi	Manfaat/Hasil
1	Kompor biasa	<p style="text-align: center;">Kompor Modifikasi</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	Hasil produksinya meningkat dan kualitasnya lebih baik

2	Kemasan manual dengan menggunakan lilin dan Hand sealer kecil	<p>Pengadaan Pedal sealer untuk membuat kemasan</p> 	Pengemasan lebih cepat dan rapi
3	Tungku dan kayu bakar	<p>Kompor Joss</p> 	Hasil lebih cepat dan praktis
4	Pengaduk buatan sendiri	<p>Mixer pengaduk bahan 20 Liter</p>	Hasil lebih banyak dan lebih halus

			
5	Pemarut kelapa manual	<p style="text-align: center;">Mesin Pemarut kelapa</p> 	Hasil lebih banyak dan lebih cepat
6	Oven biasa kecil	<p style="text-align: center;">Oven kapasitas besar</p> 	Hasil lebih banyak dan lebih kering
7	Contoh Hasil Produksi		Contoh hasil produksi

4.2. Pelaksanaan Usaha dan Perkembangannya

Dengan adanya program Iptekda LIPI terjadi peningkatan kapasitas produksi menjadi 3 kali lipat dan memperluas daerah pemasaran dan membidik peluang pasar didaerah lain. Dengan peningkatan kapasitas produksi dan perluasan daerah pemasaran maka secara otomatis akan menambah pendapatan tidak hanya bagi para karyawan dan tenaga pemasar saja, tetapi juga peningkatan pendapatan bagi UKM.

Sebelum Iptekda LIPI	Setelah Iptekda LIPI
Pekerjaan kurang efisien dan efektif	Dengan adanya pendampingan IPTEKDA LIPI jumlah produksi diharapkan dapat meningkat 30 %
Masa Pembuatan kue sebelum kegiatan IPTEKDA LIPI relative lebih lama karena hanya mengandalkan oven kecil.	Masa pembuatan kue menjadi lebih cepat dan efisien dengan menggunakan peralatan oven pengering yang lebih besar dan cepat,
Sebelumnya hanya mengandalkan Mixer modifikasi biasa buatan sendiri yang kapasitasnya lebih besar	Dengan adanya Mixer kapasitas besar proses produksi lebih cepat hasilnya lebih banyak pesanan –pesanan segera tercukupi .
Masa Pembuatan kue sebelum kegiatan IPTEKDA LIPI relative lebih lama karena hanya mengandalkan oven kecil.dan untuk menggoreng wajannya sedikit serta sederhana	Masa pembuatan kue menjadi lebih cepat dan efisien dengan menggunakan peralatan oven pengering yang lebih besar dan cepat, ditambah dengan tambahan kompor modifikasi sebanyak 5 unit . maka produksi bisa meningkat dengan demikian daerah pemasaran sudah diperluas sampai ke Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, daerah lain.
UKM Sebelumnya hanya mengandalkan pamarut biasa, hasilnya lebih sedikit dan lambat. UKM Havid hanya menggunakan pemotong pisang sederhana.	Adanya Mesin pamarut kelapa dengan kapasitaslebih besar memudahkan dalam memarut kelapa dan memeras, dan pemotong pisang Modif untk UKM Havid sehingga pekerjaan lebih efisien hasil lebih banyak, pesanan segera tercukupi .

5. PENUTUP .

a. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan pada kegiatan IPTEKDA LIPI Tahun 2016, dalam Tahap II ini, UKM Nikmat dan UKM Hafid , maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya Introdusir Peralatan TTG berupa wajan modifikasi, Mixer kapasitas besar, oven pengering kapasitas besar, mesin pamarut kelapa, maka kuantitas produk semakin meningkat 5 kali lipat dan kualitas hasil produksi semakin baik .
2. Adanya Introdusir alat pengemas, kemasan semakin bagus dan konsumen semakin bertambah, dengan adanya semua peralatan pasar semakin luas dan penjualan meningkat.
3. Video kegiatan untuk mempromosikan UKM dan Kegiatan IPTEKDA sangat bermanfaat bagi UKM dan Perguruan tinggi pelaksana.

b. SARAN

1. Kegiatan IPTEKDA LIPI hendaknya menjadi implementasi dan pelopor penggunaan teknologi tepat guna bagi UKM di daerah sehingga, kami harapkan kegiatan ini dilanjutkan lagi pada masa yang akan datang.
2. Kegiatan IPTEKDA LIPI merupakan penunjang terjadinya peningkatan kualitas dan produktivitas sehingga terjadi peningkatan usaha dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan

6. REFERENSI

Daily Actifity, (Sabtu, 28 April 2012) all about education and daily activity
Hasna Wijayati Pengertian Produksi dan Usaha Usaha Meningkatkan Faktor Produksi 3
September 2017

Kementerian KUKM, & BPS. 2004. *Pengkajian Dukungan Finansial dan NoFinansial dalam Pengembangan Sentra Bisnis Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta

Kotler, Philip. 2012. *Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control*, 8th

Edition, Prentice Hall Inc., New Jersey.

Philipus Vembrey Hariadi Antara Kualitas dan Kuantitas 2017

PROGRAM SENTRA WISATA KULINER SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SURABAYA

Sri Wibawani, Ertien Rining Nawangsari, Annora Aneriah

Email: wibawani2002@yahoo.com,

Ilmu Adm. Negara, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur

ABSTRAK

Pemerintah Kota Surabaya membuat program sentra sentra kuliner untuk menata Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan pedagang kaki lima. Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Program Sentra Wisata Kuliner dapat meningkatkan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surabaya.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian di Sentra Wisata Kuliner PKL Kota Surabaya. Fokus penelitian ada 4 yaitu Bimbingan dan Penyuluhan Manajemen Usaha, Pengembangan Usaha Melalui Kemitraan Dengan Pelaku Ekonomi Lainnya, Bimbingan Untuk Memperoleh Dan Meningkatkan Permodalan, dan Peningkatan Kualitas Alat Peraga PKL. Jenis data dan sumber data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara bertahap, observasi kelompok, dokumen resmi, penelusuran data online.

Upaya pemberdayaan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha berupa pemberian bimbingan teknis kesehatan dan bimbingan teknis etika berdagang kurang memberikan dampak peningkatan memberdayakan pedagang. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi lain, kemitraan secara tidak langsung pihak Kecamatan dan bekerjasama dengan beberapa perusahaan swasta masih jarang dilakukan. Kemitraan dilakukan dengan mengadakan event di lokasi binaan, mampu memberdayakan pedagang. Bimbingan memperoleh dan meningkatkan permodalan yang diberikan tidak berupa dana, tetapi bimbingan koperasi simpan/pinjam yang dikelola oleh paguyuban. Peningkatan kualitas alat peraga PKL diberi bantuan berupa rombongan yang serupa dan segala fasilitas yang telah ada di Sentra Wisata Kuliner. Secara menyeluruh Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Wisata Kuliner Kota Surabaya memang sudah meningkatkan keberdayaan pedagang. Namun dirasakan masih perlu ditingkatkan terus dan perlu inovasi baru dengan memperkenalkan pemesanan lewat jasa online.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan ditandai oleh keterisolasian, keterbelakangan, dan pengangguran yang kemudian meningkat menjadi antardaerah, antarsektor, dan antar golongan penduduk (Sumodiningrat, 1998: 26). Surabaya merupakan Kota Metropolitan kedua di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.942.782 Jiwa, yang secara fisik dan ekonomi telah berkembang secara luar biasa (Dispendukcapil-surabaya.go.id/2015). Ketika perekonomian suatu wilayah mulai berkembang, sebagai dampaknya maka para migran mulai berdatangan untuk mencari pekerjaan dan harapan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Arah pergerakan penduduk cenderung ke kota yang memiliki kekuatan relatif besar, sehingga menimbulkan masalah bagi kota yang didatangi.

Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang makin besar pula, oleh karena itu harus diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Kapasitas sistem ekonomi kota yang terbatas, desakan arus urbanisasi yang begitu besar tidak akan memungkinkan lapangan kerja dapat menampung seluruhnya. Hal ini juga disebabkan lapangan pekerjaan pada sektor formal semakin berkurang bahkan sangat sedikit, maka dari itu banyak penduduk yang memilih alternatif mendirikan sektor-sektor informal sebagai usaha untuk memenuhi kehidupannya. Salah satu sektor yang berperan dalam menampung tenaga kerja yang cukup besar adalah sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM mampu memberi kesempatan kerja pada jutaan penduduk di Indonesia yang tidak tertampung di sektor formal atau sector usaha besar. Karakteristik UMKM juga sesuai dengan karakteristik penduduk miskin yang berpendidikan rendah. Potensi sumber daya yang besar yang dimiliki oleh Indonesia salah satunya adalah potensi sumber daya ekonomi. Sebagai contoh sektor informal yang masuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu pedagang kaki lima (PKL), karena dalam bidang ini mereka langsung dapat menikmati hasil kerjanya serta tidak membutuhkan modal yang terlalu tinggi. Namun dengan pesatnya perkembangan pedagang kaki lima (PKL) di Surabaya dianggap dapat memunculkan berbagai macam permasalahan.

Pemerintah Kota Surabaya kemudian memberikan perhatian ekstra terhadap masalah pedagang kaki lima (PKL) dengan menggelar operasi penataan dan membuat sebuah Peraturan Daerah untuk pedagang kaki lima (PKL) yaitu Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perda tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan kepastian usaha, memberikan perlindungan dan pengembangan usaha bagi para pedagang kaki lima. Diantaranya pengembangan usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surabaya ialah memiliki gagasan yang menarik dalam mendukung kepariwisataan dan kuliner di Kota Pahlawan dengan Program Sentra Wisata Kuliner Pedagang Kaki Lima (PKL).

Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan usaha Pedagang Kaki lima adalah dengan Program Sentra Wisata Kuliner. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membentuk dan membina iklim usaha. Sehingga Pedagang Kakilima semakin mandiri dan dapat meningkatkan usahanya.

Landasan Teori

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, artinya pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan dan memandirikan masyarakat, Mardikanto (2012:27-29). Menurut Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pembinaan iklim usaha, dan pembinaan serta pengembangan sehingga mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi pengusaha yang formal.

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diatur dalam Perda Nomor. 17 Tahun 2003 BAB IV pasal 8, yaitu: Pertama, Untuk pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima (PKL), Kepala Daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa: bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha; pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lainnya; bimbingan untuk dapat memperoleh dan dapat meningkatkan permodalan; peningkatan kualitas alat peraga Pedagang Kaki Lima (PKL). Kedua, Kepala Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL); Ketiga, Ketentuan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku terhadap pelaksanaan kerjasama dimaksud kecuali telah diatur secara khusus sesuai dengan kesepakatan para pihak; Keempat, Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kelima, Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha Pedagang Kaki Lima (PKL).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Fokus penelitiannya adalah sebagai berikut : Pertama Bimbingan dan Penyuluhan Manajemen Usaha, yang dilakukan oleh pemerintah Pengembangan Usaha Melalui Kemitraan Dengan Pelaku Ekonomi Lainnya, Bimbingan Untuk Memperoleh Dan Meningkatkan Permodalan, dan Peningkatan Kualitas Alat Peraga PKL. Jenis data dan sumber data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara bertahap, observasi kelompok, dokumen resmi, penelusuran data online. Analisis data menggunakan metode analisis model interaktif yang menurut *Miles dan Huberman* yang dikutip Sugiyono (2013, h.91) ada tahapan yang harus dilalui yakni: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Bimbingan dan Penyuluhan Manajemen Usaha dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah dilakukan. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha kepada para pedagang kaki lima di sentra wisata kuliner dengan memberikan pelatihan pengelolaan pembukuan sederhana. Hal ini memberikan dampak meningkatnya pemahaman pentingnya pembukuan dalam usaha. Bimbingan Teknis Kesehatan dengan memberikan sosialisasi kebersihan dan tatacara menyimpan makanan memberikan peningkatan pemahaman dikarenakan pedagang sudah memahami dan menerapkan sesuai arahan materi sebelum mereka di relokasi sentra wisata kuliner. Bimbingan Teknis Etika berdagang telah dilakukan dan menghasilkan perubahan dengan bertambahnya kemampuan pedagang dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, namun kurang dikembangkan dan dipertahankan dikarenakan tidak ada pemantauan dari pihak-pihak terkait setelah diberikannya bimbingan tersebut.

Pengembangan Usaha Melalui Kemitraan Dengan Pelaku Ekonomi Lainnya. Sentra Wisata Kuliner belum pernah memiliki kerjasama yang terikat dalam kurun waktu dengan pelaku ekonomi lainnya. Kerjasama yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surabaya dengan Dinas Kesehatan dan Surabaya Hotel School (SHS) dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan. Serta kerjasama secara tidak langsung oleh pihak Kecamatan atau Kelurahan dengan beberapa perusahaan melalui pengadaan event-event pada lokasi binaan yang dapat berpengaruh pada meningkatnya pendapatan pedagang juga telah memberikan dampak positif bagi pedagang.

Bimbingan Untuk Memperoleh Dan Meningkatkan Permodalan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surabaya tidak pernah memberikan bantuan berupa pendanaan untuk permodalan tetapi berupa sarana dan fasilitas yang telah disediakan ketika relokasi di Sentra, pengurus paguyuban diberikan bimbingan untuk mendirikan koperasi simpan pinjam.

Peningkatan Kualitas Alat Peraga PKL, Pemberdayaan dalam bentuk peningkatan alat peraga PKL, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan bantuan berupa stan dan rombongan yang serupa disertai dengan fasilitas-fasilitas yang telah ada di Sentra. Namun tidak menghasilkan pengaruh bagi pedagang karena pemberian bantuan hanya diberikan sekali.

Upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah di sentra kuliner telah dilakukan dengan baik. Namun belum adanya proses pemantaun dan evaluasi secara rutin. Hal ini juga belum diperkuat adanya kesadaran pedagang dalam upaya meningkatkan keberdayaan mereka dalam berusaha di sentra wisata kuliner.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Upaya dalam pemberdayaan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha berupa pemberian bimbingan teknis kesehatan dan bimbingan teknis etika berdagang yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Surabaya Hotel School (SHS), telah dilakukan dengan baik tetapi kurang memberikan peningkatan pemberdayaan pedagang.

Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi lain, secara langsung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surabaya telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Surabaya Hotel School (SHS) dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan, sedangkan kemitraan secara tidak langsung pihak Kecamatan bekerjasama dengan beberapa perusahaan dengan mengadakan event yang dilakukan di lokasi binaan yang mampu memberdayakan pedagang dengan banyaknya pelanggan sehingga meningkatkan pendapatan.

Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan yang diberikan tidak berupa pemberian pendanaan, tetapi bimbingan koperasi simpan/pinjam yang dikelola oleh paguyuban

Peningkatan kualitas alat peraga PKL dengan memberikan bantuan rombongan yang serupa dan segala fasilitas yang telah ada di Sentra Wisata Kuliner telah memberikan dampak pada pemberdayaan perdagangan karena ada rasa percaya diri dalam berdagang dengan dukungan fasilitas yang ada.

Namun memang secara menyeluruh Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surabaya kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Wisata Kuliner Kota Surabaya memang sudah cukup dirasakan oleh pedagang. Namun dirasakan masih perlu ditingkatkan terus. Perlu adanya pembinaan secara terus menerus terutama dengan memperkenalkan pemesanan lewat jasa online.

Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah perlu dilakukannya pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sehingga tidak ada perubahan perilaku yang diharapkan.

Lebih sering dilakukan kerja sama dalam bentuk event-event di lokasi binaan seperti yang dilakukan oleh pihak Kecamatan/Kelurahan sehingga mendatangkan masyarakat lebih banyak sebagai konsumen. Pemberian bantuan permodalan berupa pendanaan dan menghidupkan kembali koperasi yang telah tidak berjalan khususnya menjelang adanya event-event. Perlu adanya pengenalan pemesanan lewat online sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana. 2003. *Urban Hidden Economic*. Surabaya: Lemlit ITS
- Tangkilisan, Hesel, Nogi. 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balaiurang
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Subri, M. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adisasmita, R. 2005. *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Mardikanto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

KEBIJAKAN PEMERINTAH MENJAWAB TANTANGAN PERANG KEAMANAN CYBER NASIONAL

**Andriansyah¹ ANDRIANSYAH dan Taufiqurokhman² TAUFUQUROKHMAN and,
Evi Satispi³**

^{1,2} Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof. Dr. Moesopo (Beragama), Jalan Hanglekir I Number 8 Jakarta 10270, DKI Jakarta, Indonesia.

³ Faculty of Social and Political Sciences Muhammadiyah University of Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Cireundeu, Ciputat Team., South Jakarta City.

E-mail:

taufiqurokhman@dsn.moestopo.ac.id¹ and evi.satispi@umj.ac.id² and andriansyah@dsn.moestopo.ac.id³

Abstrak

Penulisan penelitian ini untuk melihat sejauhmana kebijakan pemerintah terhadap perang siber nasional menjadi sebuah tantangan dalam menjawab dampak yang ditimbulkan.

Kondisi media siber yang bersifat terbuka dengan pengguna yang tersebar luas. Sukar bagi pemerintah memantau dan mengawal. Strategi keamanan siber sudah mulai diinisiasi dan dijalankan pemerintah Indonesia. Namun penilaian Global Cybersecurity Index (CGI, 2017) di Indonesia masih menunjukkan perlunya peningkatan komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan keamanan siber nasional.

Metodologi yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif literature review. Hasil penelitian penulisan diharapkan memberikan gambaran dan masukan bagi pengambilan kebijakan untuk menjawab perang strategi keamanan siber nasional. Dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan strateginya. Rekomendasi penulisan penelitian adalah bagaimana menjawab rumusan kebijakan pemerintah di masa mendatang melawan perang siber keamanan nasional.

Kata Kunci : *Kebijakan Pemerintah, Tantangan Perang Keamanan Siber Nasional.*

A. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya penetrasi jaringan global dan kemajuan mobile Internet di Indonesia, BSN, (2016). Dengan demikian akan semakin menambah kerentanan keamanan informasi sebuah organisasi dari ancaman siber (*cyber threat*), KOMINFO. (2015). Serangan siber menjadi tantangan tersendiri untuk pemangku kebijakan pada era informasi yang memasuki era dunia ke empat atau era digital, Indonesia dalam Situasi Perang Generasi Keempat (2016). Bulan Mei 2017, sebuah serangan siber *Ransomware Wanna Cry* menyebabkan gangguan pada perusahaan dan rumah sakit di lebih dari 150 negara termasuk Indonesia. Serangan tersebut menjadi panggilan untuk melakukan kerjasama dalam hal keamanan siber (*cybersecurity*) yang lebih luas dengan negara-negara di seluruh dunia., Kautsarina, dan Gautama, H. (2014).

Teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia pada saat ini. Hampir semua negara di dunia menyediakan internet kepada warganya. Persentase penggunaan internet yang tinggi akan menyebabkan rakyat mendapatkan informasi yang tidak dapat dipastikan benar atau salah, Amos Granit (March 2010). Informasi yang salah dan fitnah bisa melemahkan negara dan pemerintahan. Ini akan menyebabkan berlakunya konflik dan selanjutnya rakyat hilang kepercayaan kepada pemerintah karena informasi yang salah sengaja disebar dengan tujuan untuk menghilangkan kepercayaan kepada pemerintah, Ball, Desmond, and Gary Waters. (2013). Arab spring adalah contoh di negara Mesir dan Libya di mana penggunaan media sosial dapat menjatuhkan pemerintah yang ada. Pihak-pihak yang ada agenda tertentu sering mengguna media siber untuk melancarkan serangan siber. Oleh karena media televisi dan radio bisa dimonitor dan ditentukan oleh pemerintah, pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan media siber bagi membuat propaganda karena media siber sulit untuk dimonitor dan ditentukan kandungan berita, Ball, Desmond. (2011).

Media siber dalam Understanding the Risk. (2009), menyebutkan dijadikan alat untuk melakukan serangan kejahatan kepada pemerintah dalam bentuk perang urat saraf, Bejtlich, Richard. (2015). Media siber bersifat terbuka dan penggunaannya yang meluas sukar bagi pemerintah memantau dan mengawalnya. Media siber dapat menyebabkan terjadinya salah faham di antara pihak-pihak yang bertikai karena dianggap saling menyerang satu sama lain, Jagatreview (2015). Ini karena penafsiran secara terbuka dan mampu membawa kepada pertikaian jika tidak ditangani dengan baik. Kegemaran berkongsi berita dan video di media sosial yang mengandung unsur provokasi dan perpecahan akan menggugat stabilitas negara. Kemudian komen-komen berunsur provokasi menyusul selepas menonton video tersebut menyemarakkan lagi api perpecahan dan kebencian. Maka perlu dilakukan kontrol dan monitor agar ulasan dan video yang bisa memprovokasi tidak disebar dengan sewenang-wenangnya agar tidak terjadi kejahatan dalam dunia internet sehingga menimbulkan kejadian krisis dari para pengguna internet, CSIS Commission on Cybersecurity for the 44th President. (2010).

Meningkatnya kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi teridentifikasi sejak tahun 2003, sebagai contoh kejahatan *carding (credit card fraud)*, *ATM/EDC skimming* (awal tahun 2010), *hacking, cracking, phishing (internet banking fraud)*, *malware* (virus/worm/trojan/bots), *cybersquatting*, pornografi, perjudian online, transnasional crime

(perdagangan narkoba, mafia, *terorisme*, *money laundering*, *human trafficking*, *underground economy*) (ID- SIRTII/CC, 2017). Dampak kejahatan siber terhadap sektor ekonomi berdasarkan data dari Norton Symantec selama tahun 2015 sampai dengan Februari 2016, kejahatan *online* di Indonesia menimbulkan total kerugian Rp 194.6 miliar (Symantec, 2016). Usaha untuk meningkatkan komitmen dunia dalam keamanan siber, dilakukan dengan peneringkatan *Global Cybersecurity Index* (GCI) oleh *International Telecommunication Union* (ITU) kepada 93 negara-negara anggotanya. Penilaian tersebut didasarkan pada lima pilar GCI *framework* yaitu *legal*, *technical and procedure*, *organizational*, *capacity building*, dan *international cooperation*. Dari hasil penilaian GCI pada tahun 2017, Indonesia masih berada pada *mature stage*, yang berarti belum termasuk dalam jajaran Negara-negara Asia-Pacific yang dianggap memiliki komitmen tinggi dalam keamanan siber (ITU, 2017).

Dari hasil hasil penilaian GCI secara keseluruhan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara negara-negara dalam hal kesadaran, pemahaman, pengetahuan dan kapasitas untuk menerapkan strategi, kapabilitas dan program yang tepat untuk memastikan penggunaan TIK yang aman dan tepat sebagai pendorong pengembangan ekonomi, Bendiek, Annegret and Tobias Metzger. (2015). Kendala dan juga tuntutan bagi organisasi pemerintah dalam pelaksanaan *e- Government* salah satunya adalah faktor keamanan informasi yang meliputi kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) dari informasi. Oleh karena hal tersebut, strategi implementasi *e- Government* juga harus meliputi Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau *Information Security Management System* (ISMS) dalam memasuki era dunia ke empat atau era digita, Perang Generasi Ke 4 (Fourth Generation Warfare). Pada 14 Juni 2017. Yaitu suatu pendekatan yang sistematis untuk mengelola dan mengamankan informasi yang bersifat rahasia dan sangat penting dalam organisasi, meliputi aspek Sumber Daya Manusia (*people*), prosedur standar (*process*), dan Sistem Teknologi Informasinya (*technology*). Memfokuskan hanya pada aspek teknologi untuk mengatasi permasalahan keamanan informasi siber tidaklah mencukupi, Benitz, Jorge, and Jason Healey. (2012).

Selanjutnya strategi keamanan siber dalam pelaksanaannya memerlukan sinergi antara pemerintah, keterlibatan sector swasta, dan keaktifan masyarakat (Harknett dan Stever, 2009). Sikap pengguna media siber yang tidak ada kesadaran terhadap keselamatan dengan mudah mengunggah informasi-informasi rahasia seperti surat-surat dinas, aset pertahanan dan lain-lain. Ini telah membuka rahasia negara kepada umum. Sikap ini perlu diperbaiki dan perlunya ada peraturan dan kebijakan dari pemerintah supaya surat-surat serta informasi rahasia dan bernilai strategis tidak sewenang-wenangnya diletakkan di internet. Berkaitan ancaman peperangan siber, maka telah ada kebijakan yang menetapkan komputer yang digunakan untuk perihal operasi dan rahasia tidak boleh disambungkan ke internet, Borum, Randy, and Ronald Sanders. (2015). Sambungan ke internet adalah rawan bagi serangan siber dan informasi bisa disadap oleh pihak lain. Insiden penyadapan dan pemantauan bukan sesuatu yang asing jika kita mengikuti perkembangan dunia. Insiden pembongkaran aktivitas penyadapan dari agensi AS yaitu National Security Agency (NSA) telah mengejutkan dunia.

Kejadian dan hasil dari penggunaan media siber yang telah mengganggu keamanan negara dan perlu untuk diteliti mengapa hal tersebut terjadi. Pemerintah sampai hari ini sudah mempunyai kebijakan dalam mencegah berlakunya kerusakan yang timbul akibat sikap pengguna media siber yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana “Kebijakan Pemerintah Menjawab Tantangan Perang Keamanan Siber Nasional“. Selanjutnya penulis akan menjabarkan beberapa Literatur yang akan digunakan dalam penulisan penelitian di bawah ini.

B. Kajian Pustaka

B.1. Tiga Teori Melawan Perang Siber Nasional.

Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian kebijakan pemerintah dalam menjawab tantangan perang keamanan siber nasional menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (a) Teori Keamanan Nasional; (b) Teori Perang Asimetris; (c) Teori Komunikasi. Teori Keamanan Nasional adalah secara umum dan teori perang asimetris dan teori komunikasi akan digunakan dalam pembahasan yang lebih mendalam Teori Keamanan Nasional menurut Alan Collins (2003) adalah “*National security is the requirement to maintain the survival of the nation-state through the use of economic, military and political power and the exercise of diplomacy.*” Keamanan nasional adalah sebuah kebutuhan untuk menjaga ketahanan suatu bangsa melalui daya ekonomi, militer serta kekuatan politik dan kepiawaian berdiplomasi. Karena sifat yang kompetitif diantara bangsa-bangsa, keamanan nasional dengan negara yang mempunyai nilai sumber daya yang signifikan didasarkan kepada tindakan-tindakan teknis dan proses operasional. Hal ini berkisar dari perlindungan informasi yang berkaitan dengan rahasia Negara untuk persenjataan bagi militer hingga strategi bernegosiasi dengan negara bangsa lain. Oleh itu harus dilakukan beberapa langkah bagi memastikan keamanan negara terus dipelihara, Leo Taddeo (2017).

Perang asimetris, yaitu peperangan menggunakan sistem dan tujuan (susunan bertempur) yang inkonvensional, mempunyai banyak nama diantaranya istilah yang populer adalah peperangan asimetris (*asymmetrical warfare*). Jenis perang yang termasuk asimetris adalah insurjensi, terorisme dan Perang Internal Baru (Seskoed, 2010). Carl von Clausewitz menemukan teori center of gravity yang mengatakan bahwa siapa yang menguasai ketinggian akan menang perang. Ketinggian pada hari ini bisa di definisikan sebagai teknologi dan informasi. Beliau dalam bukunya “*On War*” menegaskan bahwa “*uncertainty is fundamental to warfare*”. Segala ketidakpastian tersebut diakibatkan oleh lemahnya fungsi intelijen untuk mendeteksi tentang tujuan musuh; waktu, lokasi atau bahkan rencana serangan; keberadaan senjata baru yang digunakan; dan perkembangan bentuk baru perang. Sun Tzu memberikan titik berat pada intelijen, pengelabuan, dan pendekatan tidak langsung kepada musuh sebagai cara yang paling efektif untuk memenangkan pertempuran. Penggunaan kemampuan intelijen, pengelabuan, dan mendekati musuh secara diam-diam dan tidak langsung merupakan

titik berat pembahasan taktis Sun Tzu dalam tataran operasional pertempuran (Seskoad, 2015).

Ancaman di era glolisasi tidak hanya ditujukan untuk menyerang instansi pemerintah atau militer melainkan dapat mengancam seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, budaya, dan keamanan suatu negara. Beberapa ancaman keamanan dan pertahanan nasional dilakukan oleh non state actor, seperti *terrorism*, *insurgency*, *cyber crime*, *human trafficking*, pembajakan di laut (*piracy*), jaringan narkoba (*drug trafficking*), bahkan termasuk pelanggaran terhadap hak azasi manusia (*human right*). Dalam konflik *asymmteric warfare*, dilakukan oleh non state actor sebagai pihak lemah (*weak*) melawan pemerintah (state) sebagai pihak yang kuat atau bagaimana negara lemah (*weak state*) melawan negara yang kuat (*strong state*).

Ancaman perang cyber (*cyber warfare*) terbesar dunia yang pernah dicatat oleh Discovery, seperti: *Pertama*, serangan Stuxnet. melumpuhkan pembangkit nuklir Bushehr dengan worm tahun 2010. *Kedua*, operasi Aurora tahun 2009, menyerang perusahaan besar termasuk *Google* dan *Adobe Systems*, oleh para hacker dan berhasil mencuri properti intelektual dari perusahaan-perusahaan tersebut. *Ketiga*, serangan terhadap Pusat Komando AS tahun 2008, sebuah USB flash drive yang tidak berwenang yang diselipkan ke salah satu laptop di sebuah markas militer AS di Timur Tengah. Flash disk tersebut mengandung kode berbahaya yang dikembangkan oleh intelijen asing dan menyebar melalui sistem komputer Departemen Pertahanan AS dan menyebabkan data dikirim ke server asing. *Keempat*, kasus Georgia tahun 2008, berawal dari konflik Rusia dan Georgia di Ossetia Selatan. Serangan cyber melumpuhkan beberapa situs pemerintah Georgia dan situs-situs media lokal, setelah Georgia menyerang Ossetia Selatan. Ini merupakan serangan yang mirip dengan serangan ke Estonia pada 2007. *Kelima*, kasus Estonia tahun 2007, dimana Estonia menghadapi gelombang serangan cyber yang melanda segenap infrastruktur internet negara itu, mulai dari situs-situs pemerintahan, perbankan, hingga situs-situs surat kabar lokal. Serangan ini terjadi melumpuhkan sistem pemerintahan Estonia selama 2 (dua) minggu.

Untuk menghindari terjadi serangan cyber dapat dilakukan dengan meningkatkan perlindungan terhadap informasi dan sistem terhadap akses tidak sah, melalui pembatasan informasi, integritas, kerahasiaan, otentifikasi, memiliki keabsahan yang benar. Ada tiga metode utama serangan *cyber warfare*, yaitu: *sabotase*, *spionase elektronik* (mencuri informasi dari komputer melalui virus) dan serangan pada grid listrik. Serangan yang ketiga adalah mungkin paling mengkhawatirkan. *North American Electric Reliability Corporation* (NERC) memperingatkan dalam pemberitahuan umum bahwa grid listrik AS rentan. Selanjutnya penulis akan menjelaskan keamanan bagi perang Siber nasional dari perspektif *people*, prosesnya dan teknologi yang akan digunakan di bawah ini.

B.2. Keamanan bagi Perang Siber Nasional Perspektif *People, Process, Technology*.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam melawan perang keamanan Siber (*cybersecurity*) nasional dapat dilakukan dari berbagai rangkaian tahapan dan pengukuran

yang dimaksudkan untuk melindungi dari serangan, disrupsi, atau ancaman yang lainnya melalui elemen-elemen *cyberspace* (*hardware, software, computer network*), (Fischer, 2009). Pelaksanaan keamanan siber nasional dapat digambarkan di satu sisi sebagai kebijakan, pedoman, proses, dan tindakan yang diperlukan agar transaksi elektronik dapat dilakukan dengan risiko pelanggaran, intrusi, atau pencurian minimum. Dan di sisi lain, keamanan siber adalah alat, teknik, atau proses yang digunakan untuk melindungi aset sistem informasi. Keamanan siber terdiri dari infrastruktur "lunak" dan "keras".

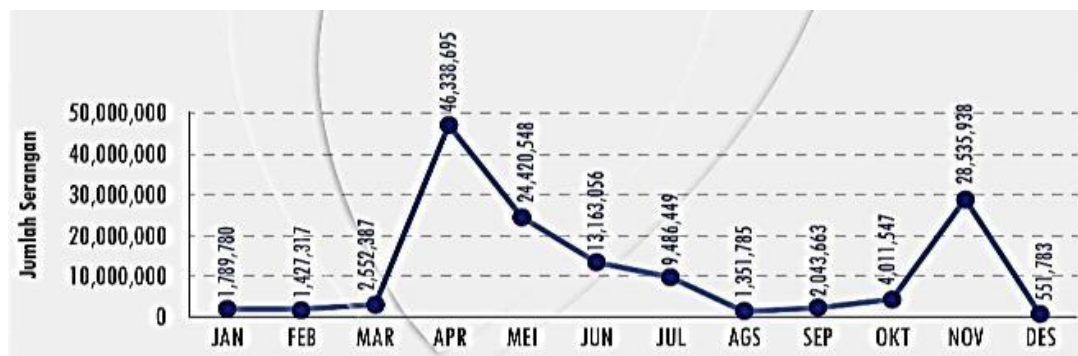
Komponen infrastruktur lunak adalah Sumber Daya Manusia pengelola maupun pembuat kebijakan (*people*); dan kebijakan, proses, protokol, dan pedoman yang menciptakan lingkungan pelindung untuk menjaga sistem dan data (*process*). Sedangkan infrastruktur keras adalah *technology* yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, yang dibutuhkan untuk melindungi sistem dan data dari ancaman eksternal dan internal siber.

B.3. Bentuk Serangan Siber Nasional Indonesia

Jika dilihat dari jumlah serangan siber di Indonesia jumlahnya semakin meningkat, dari 28,430,843 pada ahun 2015, meningkat menjadi 135.672.984 pada tahun 2016. Dan 47% dari keseluruhan kasus yang terjadi merupakan serangan *malware*, 44% merupakan penipuan. Sedangkan sisanya berbentuk kejahatan siber lainnya, seperti *website defacement*, dan aktivitas manipulasi data dan kebocoran data (ID-SIRTII, 2017). Tren peningkatan kejahatan siber dalam bentuk penyebaran konten ilegal, hate speech dan sejenisnya.

Gambar B.3.

Jumlah Serangan Siber di Indonesia tahun 2016 (ID-SIRTII, 2017)



Sumber: Diolah Penulis, 2018

B.4. Perlunya Global Cybersecurity Index (GCI) bagi Pemerintah Indonesia.

Survey yang dilakukan International terhadap komitmen pemeritahan di sebuah negara terhadap keamanan siber nasionalnya dari serangan yaitu menggunakan *International Telecommunication Union* (ITU). Yaitu untuk mengukur komitmen Negara-negara anggota terhadap keamanan siber nasional. Tujuan penggunaan dari Global Cybersecurity Index

(GCI) adalah untuk membantu negara-negara mengidentifikasi area yang harus diperbaiki dalam dunia keamanan siber nasionalnya. Sehingga membantu meningkatkan tingkat komitmen keseluruhan terhadap keamanan siber di seluruh dunia. Penilaian Global Cybersecurity Index didasarkan pada lima pilar, yaitu:

- 1) *Legal (hukum)*, diukur dari keberadaan institusi legal dan framework keamanan siber
- 2) *Technical*, diukur berdasarkan keberadaan institusi teknis dan penerapan teknologi
- 3) *Organizational*, diukur berdasarkan koordinasi pembuat kebijakan dan pengembangan strategi keamanan siber.
- 4) *Capacity Building*, diukur berdasarkan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan program pelatihan, profesional dan aparatur yang tersertifikasi
- 5) *Cooperation*, diukur dari adanya partnership, kerangka kerjasama dan *information sharing network*.

Hasil penilaian dikategorikan secara berurutan menjadi tiga *stage*, yaitu: kategori tertinggi adalah *leading stage* untuk Negara-negara yang mempunyai komitmen sangat tinggi terhadap keamanan informasi siber. Berikutnya adalah *maturing stage* untuk negara-negara yang telah mempunyai inisiatif dan sedang mengembangkan program-program keamanan siber namun belum berkomitmen tinggi. Penilaian terendah adalah kategori *initiating stage* yaitu Negara-negara yang baru memulai membuat komitmen terhadap keamanan siber (ITU, 2017).

Tabel B.4.

Pilar-pilar Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia

Strategi Nasional Keamanan Siber Eksisting dan Tantangan serta Hambatannya

	<i>Pilar – Pilaar CGI</i>	<i>Strategi Nasional Keamanan Siber Eksisting</i>	<i>Tantangan / Hambatan</i>

<i>People</i>	1. Capacity Building	<ol style="list-style-type: none"> 1) Talent Pool Born to control: Gladiator Cyber Security. Indonesia (GCSI). Peningkatan kemampuan keamanan siber dengan target penjangkaran 10.000 kandidat untuk peningkatan kapasitas keamanan siber lebih lanjut (SIARAN PERS NO.12 /HM/KOMINFO/01/2017, 2017) 2) Bimbingan teknis keamanan informasi (Indeks KAMI, APRISMA, SNI ISO 27001, ISO 22301) bagi instansi pemerintah (Chendramata, 2016) 3) Program awareness bagi legislatif, pimpinan instansi dan pimpinan industri sektor strategis melalui koordinasi dengan LEMHANAS dan LAN (Chendramata, 2016) 4) Penerapan program pendidikan untuk SDM Keamanan. Informasi yang terakreditasi, sesuai standar kompetensi industri melalui centre of Excellence di Perguruan Tinggi (Chendramata, 2016) 5) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Keamanan Informasi (KEMNAKER, 2015) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi keamanan informasi (termasuk aspek hukum, promosi SKKNI bidang Keamanan) 2. Informasi dan Auditor TI bagi masyarakat dan sector strategis masih sangat terbatas. Prosedur pembaharuan unit kompetesni dalam SKKN membutuhkan waktu yang lama, sementara laju perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan jenis, ancaman siber sangat pesat. 3. Eduksi public sosialisasi konten berkualitas, keamanan siber, pemahaman kebhinekaan dan anti terorisme belum diterapkan secara sistematis dimulai dari usia dini padahal pengguna internet di Indonesia usia 9 – 15 tahun cukup tinggi, yaitu sebesar 27,5 persen (Kominfo, 2016).
---------------	----------------------	--	--

		6) Edukasi Publik sosialisasi konten berkualitas, pemahaman kebhinekaan, dan anti terorisme.	
	2. Legal	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU No.19/2016 tentang perubahan atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (UU ITE, 2016). 2) UU Telekomunikasi No. 36/1999 (UU Telekomunikasi, 1999). 3) Peraturan Menteri Kominfo No.5 tahun 2017 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Kominfo No.26 tahun 2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet (PERMENKOMINFO No.5, 2017). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah policy dan regulasi untuk cybersecurity belum mengakomodasi segala bentuk ancaman siber, sementara kecepatan perkembangan TIK berbanding lurus dengan meningkatnya kejahatan siber 2) Urgensi pengesahan RUU Perlindungan Data dan informasi pribadi perlunya kepastian hukum perlindungan data pribadi.
	3. Organizational Structure	<ol style="list-style-type: none"> 1) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dibentuk berdasarkan Perpres No.53 tahun 2017. Lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2) Merupakan penguatan dari Lembaga Sandi Negara ditambah dengan Dit. Keamanan Informasi, 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurang jelasnya tenggat waktu peralihan penggabungan fungsi direktorat keamanan informasi dan Lembaga Sandi Negara menjadi BSSN sebagai organisasi baru. 2) Urgensi pembangunan

	<p>Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Perpres No.53, 2017)</p> <p>3) Fungsi BSSN dalam pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.</p>	<p>ekosistem ranah siber Indonesia yang tahan dan aman, dan diharapkan dapat segera menginisiasi Peta jalan pedoman penanganan keamanan siber.</p> <p>3) Seperti halnya di Negara-negara maju seperti UK, masyarakat memerlukan pusat keamanan siber nasional (National Cyber Security Centre) sebagai rujukan utama yang mapan dan jelas untuk penanganan ancaman siber (Stoddart, 2016).</p> <p>4) Pengawasan dan evaluasi oleh seluruh stakeholder.</p>
--	--	--

<i>Process</i>	<p>4. Internasional Cooperation</p>	<p>1) Indonesia Computer Emergency Response Team (ID-CERT) adalah tim CERT pertama yang berdiri di Indonesia, pada 1998, merupakan tim koordinasi teknis berbasis komunitas yang bersifat independen untuk melakukan koordinasi penanganan insiden yang melibatkan pihak Indonesia dan luar negeri (ID-CERT, 2015).</p> <p>2) <i>Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure</i> (ID-SIRTII). asistensi/pendampingan untuk meningkatkan sistem pengamanan dan keamanan di instansi/lembaga strategis (<i>critical infrastructure</i>) di Indonesia ; sentra koordinasi (<i>Coordination Center/CC</i>) untuk inisiatif dari dalam dan luar negeri dan sebagai <i>single point of contact</i> (ID-SIRTII/CC, 2017).</p>	<p>1) ID-CERT hanya bersifat volunteer (come and go). Urgensi peran ID-SIRTII dalam masa peralihan ke BSSN (Perpres No.53, 2017).</p> <p>2) Kolaborasi Antara private sector, pemerintah, masyarakat, dan dunia international dalam pencegahan maupun penanganan kejahatan siber masih kurang terwadahi (Murphy, 2010). Koordinasi dengan stakeholder aplikasi atau software, sebagai contoh twitter atau Facebook yang digunakan untuk media kejahatan memerlukan koordinasi antar Negara.</p>
----------------	-------------------------------------	---	---

<i>Technology</i>	<p>5. Technical and Procedural Measures</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nasional Indonesia (SNI) IEC/ISO 27001:2013 persyaratan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) (BSN, 2016). 2) 1SNI ISO/IEC 27018:2016, Teknologi informasi - Teknik keamanan - Petunjuk praktik perlindungan informasi personal (PII) dalam public cloud yang berperan sebagai pemroses PII (BSN, 2016). 3) Trust Positive (Trust+); Workshop penggunaan internet sehat dan aman; DNS filtering Nawala; program Kementerian komunikasi dan informatika (KOMINFO, 2015). 4) Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). Alat evaluasi untuk menganalisis kesiapan pengamanan informasi di instansi pemerintah berbasis ISO/IEC 27001:2009 (Dirjen Aplikasi Telematika, 2013). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perkembangan Machine-to-Machine (M2M) teknologi, Internet of Things (IoT), Cloud Computing diikuti perkembangan ragam serangan siber, dan malware semakin kompleks (Obiso, 2015). 2) Hasil penilaian indeks KAMI pada 41 organisasi pemerintah pada tahun 2012, dari 5 area kunci menunjukkan bahwa hanya 3% organisasi yang memenuhi standar, sedangkan selebihnya masih fokus hanya pada area teknologi (Kautsarina & Gautama, 2014)
-------------------	---	---	--

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, Creswell, J. W. (2014). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Fokus penelitian dalam metode kualitatif menurut Sugiyono. (2014), yaitu meneliti dan melihat sejauh mana sikap dan kebijakan yang direncanakan mampu menjejaskan keamanan nasional. Penelitian difokuskan pada faktor-faktor kerawanan keamanan, sikap dan kebijakan, Indrawan, Rully dan R. Poppy Yaniawati. (2014).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pejabat-pejabat terkait kewan siber dan agensi siber. Untuk data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan keamanan siber. Penentuan personal yang menjadi narasumber data dilakukan dengan model Purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini yaitu adalah keamanan nasional hasil dari penggunaan media siber, Sugiyono. (2014).

D. Hasil dan Diskusi

D.1. Ancaman Siber Kepada Negara

Media siber menjadi kerawanan kepada negara karena serangan siber mudah dilakukan oleh mereka yang berilmu dan tidak semesti state actor. Serangan siber dilakukan secara asymmetric dan tidak memerlukan teknologi yang tinggi. Negara yang bergantung kepada internet dan rangkaian yang tinggi lebih tinggi adalah lebih rawan kepada serangan siber. Kebergantungan kepada peralatan dan sistem yang dibangun oleh negara luar menyebabkan kerawanan bertambah tinggi. Dari segi teknis, semua peralatan mempunyai kerawanannya sendiri. Sikap pegawai dan karyawan juga bisa membuka peluang kepada lawan melakukan serangan siber dengan jaya. Pemerintah juga harus memastikan rangkaian komunikasi meraka aman dan tidak mudah diserang oleh musuh.

Teori Keaman Nasional menurut Alan Collins (2003) adalah “National security is the requirement to maintain the survival of the nation-state through the use of economic, military and political power and the exercise of diplomacy.” Keamanan nasional adalah sebuah kebutuhan untuk menjaga ketahanan suatu bangsa melalui daya ekonomi, militer serta kekuatan politik dan kepiawaian berdiplomasi. Karena sifat yang kompetitif diantara bangsa- bangsa, keamanan nasional dengan negara yang mempunyai nilai sumber daya yang signifikan didasarkan kepada tindakan-tindakan teknis dan proses operasional. Hal ini berkisar dari perlindungan informasi yang berkaitan dengan rahasia Negara untuk persenjataan bagi militer hingga strategi bernegosiasi dengan negara bangsa lain.

Ancaman adalah siber satu ancaman nyata (real) kepada sesebuah Negara. Ini didukung oleh data-data yang menunjukkan peningkatan serangan siber setiap tahun. Seiring dengan perkembangan teknologi, Senjata Siber (cyber weapon) menjadi bertambah canggih dan senang digunakan. Senjata Siber lebih murah, dan kadangkala boleh dibangun oleh sesorang yang mahir dalam pengaturcaraan. Tidak banyak kos dan peralatan yang diperlukan tetapi modalnya hanya kemahiran dalam menulis kode-kode komputer dan

dunia bisa tergoncang. Senjata siber boleh digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan bukan hanya state actor, malahan digunakan oleh penggnanas, penjenayah dll.

Berdasar semua uraian di atas, maka ditemukan bahwa media siber mampu memberi ancaman keamanan kepada negara sesuai dengan teori dan konsep keamanan negara yang digunakan dalam penulisan ini. Berbagai langkah perlu dilakukan bagi menangani permasalahan yang timbul dari media siber. Bermula dari pemerintah hingga ke pengguna yaitu rakyat dan karyawan perlu dididik ilmu keamanan siber agar dampak negatif tidak mudaratkan negara. Selain Pendidikan, perlu juga dibuat kebijakan, peraturan dan SOP sebagai panduan kepada karyawan dan rakyat agar semua dapat menggunakan media siber tanpa menjejaskan keamanan negara. Dengan spektrum ancaman yang besar dan luas, maka perlu dibuat satu komando bagi mengkoordinasi operasi semua instansi berkaitan siber seperti polisi, angkatan tentera, kementerian komunikasi dan lain-lain lagi. Jika semua instansi ini diintegarsi dan berkoordinasi, maka ancaman siber nasional dapat ditangani dengan tuntas dan efektif.

D.2. Faktor-faktor Kerawanan kepada Ancaman Siber Nasional

Teori Hukum Moore adalah salah satu hukum yang terkenal dalam industri mikroprosesor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Oleh itu, peralatan komputer berkembang dengan cepat karena mikroprosesor berkembang dengan eksponensial. Pihak yang terkait perlu senantiasa memastikan peralatan sistem pertahanan siber adalah senantiasa berada dalam teknologi terbaru, Harknett, R. J., & Stever, J. (2009).

Faktor Politik juga memainkan peranan dalam kerawanan siber. Kebijakan pemerintah dan sentimen kenegaraan dan politik bisa memicu serangan siber. Penyebaran virus komputer dapat merusak jaringan komputer yang digunakan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha maupun perorangan yang dapat berdampak terhadap kekacauan dalam sistem jaringan. Dapat dipastikan apabila sistem jaringan komputer perbankan tidak berfungsi dalam satu hari saja dapat menimbulkan kekacauan pembayaran maupun transaksi keuangan bagi nasabah. Kondisi ini memerlukan kebijakan politik pemerintah untuk menanggulangi cyber crime yang berkembang.

Perilaku atau budaya masyarakat yang senang membagi-bagi data serta informasi (USB dan lisan) juga bisa mendedahkan diri kepada kerawanan siber. Segala kata sandi dan alamat internet perkakasan perlu disimpan rapi agar tidak diketahui pihak lain. Budaya ini perlu diperbetulkan agar tidak menjadi ancaman kepada negara sekiranya staf pemerintah tidak mengamalkan budaya kerja yang betul. Perilaku perkongsian lokasi dan gambar-gambar rahasia juga adalah penyebabnya berlaku kerawanan siber kepada negara. Rahasia-rahasia ini diketahui karena kesilapan staf sendiri dan bukannya dengan usaha pihak lain.

Daripada analisis di atas, ditemukan bahwa adalah sukar untuk memelihara keamanan siber karena terdapat spektrum ancaman yang luas. Bermula dari human factors hingga kepada faktor peralatan. Oleh itu diperlukan untuk pihak-pihak yang terkait untuk sentiasa mengikuti perkembangan peralatan siber. SDM harus sentiasa dilatih dan perlu dibuat perintah tetap atau SOP supaya mereka tidak cuai dalam melaksanakan penugasan. Pihak pemerintah juga harus sentiasa memperbaharui kebijakan agar kebijakan yang relevan digunakan. Kerawanan siber boleh ditangani dengan memberi pendidikan keamanan siber kepada karyawan dan rakyat. Biaya dan dana dari pemerintah perlu disediakan bagi mengimbangi perubahan dan perkembangan siber yang sentiasa berkembang. Peralatan harus sentiasa mampu menangkis serangan siber dan SDM juga harus bisa menjaga keamanan siber negara.

D.3. Tipe Ancaman Media Siber bagi Negara.

Terdapat banyak macam ancaman siber kepada negara seperti yang telah dibahas di sub judul di atas. Berdasarkan teori keamanan nasional oleh Allan Collins (2013), maka sub judul ini akan membahas dua tipe utama yang menjadi kerawanan utama kepada amanan nasional yaitu cyber spoinase dan propaganda siber. Antara yang tipe ancaman yang paling ditakuti adalah cyber spoinase. Spionase cyber merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Propaganda di media siber juga bisa mengancam kestabilan negara. Negara-negara seperti AS, China dan Rusia melakukan propaganda siber dalam mendapatkan pengaruh politik mereka. Pihak militer Rusia telah mengakui adanya upaya dalam skala yang cukup besar untuk melakukan perang siber. Seperti dilansir dari BBC.com, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan adanya pasukan IT yang terlibat dalam intelijen untuk melakukan propaganda yang efektif. Selama berlangsungnya perang dingin, pihak Timur dan Barat mencurahkan segala bentuk upaya untuk sebuah propaganda. Proganda dibuat untuk mempengaruhi opini publik secara global serta untuk menjual ideologi – ideologi mereka.

Menurut Keir Gile, seorang pakar dibidang Militer Rusia, telah memperingati adanya Perang Siber yang telah disebar, sementara pihak barat terfokus pada Prajurit maya dan peretas. Tujuannya adalah untuk mengontrol informasi dengan segala cara. Rusia telah melakukan segala bentuk uji coba terhadap NATO. Mantan Panglima militer Rusia Jenderal Yuri Baluyevksy mengatakan bawah kemenangan dalam sebuah perang siber menjadi lebih penting ketimbang perang konvensional, karena tidak ada pertumpahan, tetapi dampaknya sangat luas, sehingga mampu melumpuhan struktur kekuatan musuh. Maka dapat ditemukan bahwa ancaman siber bisa datang dari state actor yang bisa jadi sipil dan militer juga menarget instansi pemerintah seperti ketenteraan, perusahaan dan elemen sipil. Ancaman siber juga bisa datang dari non state actor yang menyerang

pemerintah tanpa koordinasi dan terkoordinasi. Justeru tipe ancaman siber kepada negara memang banyak dan spektrumnya begitu luas dan sukar untuk diprediksi. Pertahanan siber perlu mantap dan sentiasa mengikuti perkembangan teknologi. Perlunya semua instansi berkoordinasi agar spektrum ancaman yang luas ini dapat ditangani.

d. Media Sosial Mengubah Pemerintahan.

Media siber bisa digunakan sebagai medium bagi menyalurkan idea dan propaganda dalam mengubah pemerintahan. Negara-negara mundur amat rawan jika media siber digunakan sebagai penyebaran propaganda. Teori Agenda Setting yang diperkenalkan oleh Mc Combs dan DL Shaw (1972) mengatakan bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi apa yang dianggap penting media, maka penting juga bagi masyarakat. Dalam hal ini media siber diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, karena masyarakat bisa mengakses informasi tanpa kontrol pemerintah. Dengan negara-negara mengenakan kontrol media radio dan televisi, media siber tidak bisa dikontrol karena ia masih baru dan bersifat internasional dan luar batas negara, Chendramata, A. (2016).

Teori ketergantungan terhadap media mula-mula diutarakan oleh Sandra Ball-Rokeach dan Melvin Defleur. Teori ini memprediksikan bahwa khalayak tergantung kepada informasi yang berasal dari media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan khalayak bersangkutan serta mencapai tujuan tertentu dari proses konsumsi media massa. Namun perlu digarisbawahi bahwa khalayak tidak memiliki ketergantungan yang sama terhadap semua media. Contohnya orang muda dan berpendidikan lebih cenderung menggunakan media siber dalam mendapat informasi, El-Nawawy. Kamis. (2012).

Situasi yang berlaku saat Arab Spring amat terakait dengan kedua-dua teori ini. Kebangkitan Arab muncul lewat 2010 untuk membantah kekuasaan pemerintah authoritarian yang bermula dari Libya, Tunisia, Bahrain, Syria dan seterusnya merebak ke negara Timur Tengah dan Afrika Utara dan salah satu darinya adalah Mesir. Kebangkitan ini menular dengan pantas kerana adanya media sosial menurut Fauziah (2017), dapat untuk menyebarkan dan mencambah setiap isu sensitif kegawatan negara Mesir. Ia juga telah menjambat beribu-ribu rakyat Mesir untuk bersatu dan keluar berdemonstrasi di jalanan untuk menyokong penyingkiran rejim pemerintahan Mubarak. Media sosial telah memberi impak terhadap pengetahuan, sikap dan tingkah laku khalayak merentasi global. Teori Agenda Setting telah berjaya dilaksanakan di dalam Arab Spring. Ini dapat dibuktikan dengan konfesi Presiden Turkey Academy of Military Sciences, Gen Makhmut Gareyev (2013) mengatakan bahwa teknologi informasi yang bersifat subversif yang telah dibangun oleh negara barat sejak 2011 adalah punca kejatuhan pemerintahan di Mesir, Tunisia dan Libya setelah 2 tahun dibangun. Situasi sebelum kerusuhan juga di simulasi dengan sengaja mencetuskan provokasi untuk melihat tindakan pihak pemerintah dalam dua tahun itu. Akhirnya media siber digunakan bagi memanggil rakyat berdemonstrasi hingga dapat menjatuhkan pemerintah. Berita yang dimasukkan setiap hari selama dua tahun itu telah

berjaya membentuk opini publik untuk menjelekan pemerintah. Akhirnya masyarakat tidak mempercayai pemerintah dan pemerintahan di negara-negara tersebut telah berjaya ditukarkan.

Pada temuan penulis, rakyat pada hari ini memang tidak bisa dijauhkan dari media sosial seperti facebook, tweter, whatapp dan lain- lain. Hampir setiap jam pengguna media sosial akan mendapat masukan baru yang belum tentu kebenarannya kandungannya. Oleh itu perlunya undang-undang bagi mengontrol supaya informasi yang berbaur fitnah tidak sewenang-wengangnya berlegar di internet. Rakyat juga perlu dididik agar dapat menapis informasi supaya mereka bisa menilai kebenaran sesuatu informasi. Pemerintah juga perlu mewujudkan badan penangkis propaganda agar rakyat tidak terpengaruh dengan propaganda musuh negara.

e. Siber Terorisme

Teroris menggunakan media siber dalam menjalan operasi mereka. Justeru perlu untuk pihak pemerintah memonitor aktivitas ini agar terorisme tidak berkembang. Media social dan siber digunakan karena bisa diakses oleh banyak orang dan teroris bisa berkomunikasi sesama mereka dalam aktivitas ini. Penggunaan siber memberikan outreach yang luas dalam mengembangkan agenda ekstrimis. Penggunaan media sosial amat berkesan kerana jaringan tanpa batasan dan luas senang digunakan untuk menyebarkan ideology teror. Penyebaran ideologi ekstrimis/teroris melalui media sosial telahpun berhasil. Bukti-bukti yang dikeluarkan menunjukkan kempanye perkaderan yang dijalankan oleh ISIS telah berjaya menarik ribuan pengikut untuk turut sama berjuang. Ini menunjukkan media sosial adalah medium yang berkesan untuk penyebaran ideologi ektrimis/teroris.

Penulisan ini menguraikan dua teori media dalam membahas isu cyber terrorism yaitu Teori Agenda Setting dan Teori Kebergantungan Media. Teori Agenda Setting yang diperkenalkan oleh McCombs dan DL Shaw (1972) mengatakan bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Maka dengan isu yang membangkitkan semangat dan ideologi yang sering dimainkan berulang-ulang bisa mempengaruhi pemikiran dan semangat melakukan aksi terror. Teori ketergantungan terhadap media mula- mula diutarakan oleh Sandra Ball- Rokeach dan Melvin Defleur. Teori ini memprediksikan bahwa khalayak tergantung kepada informasi yang berasal dari media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan khalayak bersangkutan serta mencapai tujuan tertentu dari proses konsumsi media massa. Namun perlu digarisbawahi bahwa khalayak tidak memiliki ketergantungan yang sama terhadap semua media. Dalam kasus ini, mereka yang cenderung kepada ideologi perjuangan kelompok teror akan ce Maka media siber adalah tempat yang baik bagi meluaskan ideologi teroris karena ia bisa diakses keseluruhan dunia.

Para teroris dapat memanipulasi media siber bagi mendapat komunikasi yang aman. Beberapa alternatif lain yang mereka gunakan bisa seperti Telegram yang sudah sejak awal

ditujukan untuk komunikasi mobile yang aman. Penggunaan aplikasi dengan enkripsi seperti Telegram juga sebenarnya masih terbuka dengan kelemahan, tapi untuk menerobosnya dibutuhkan upaya yang cukup rumit bagi kebanyakan orang biasa. Tidak semua mampu perusahaan telekomunikasi bisa menangkap komunikasi rahasia seperti ini. Tools yang menyediakan komunikasi yang aman via internet malah sudah tersedia banyak bahkan diantaranya gratis.

Teroris juga bisa memprogram dan membuat aplikasi sendiri. Sebagian kelompok teroris lebih percaya dengan aplikasi buatan sendiri dalam berkomunikasi dan membuat kontak dengan anggotanya. Berbagai kelompok teroris juga memiliki tim teknis yang membuat aplikasi bagi kelompoknya. Tidak hanya berbasis dekstop, kini beberapa aplikasi mobile juga sudah dibuat dengan semakin populernya platform android yang digunakan hampir di seluruh dunia.

Maka dengan pembahasan di atas, ditemukan bahwa media siber memberi banyak kelebihan kepada teroris dalam melakukan operasi mereka. Selain dari penyebaran ideologi, media siber bisa menjadi medan komunikasi aman untuk teroris, media penggerak operasi, sumber pengumpulan dana dan juga sebagai data mining. Oleh itu instansi pemerintah dan pasukan keamanan harus siap dan mempunyai pasukan yang bisa menanggulangi aktivitas teroris yang menggunakan media siber dalam operasi mereka. Semua pasukan keamanan harus terintegrasi dan bisa melakukan operasi secara bersama. Segala data dan sistem harus terkoneksi dan bisa dikongsi bersama instansi keamanan.

f. Langkah-langkah Kebijakan Mengatasi Serangan Siber

Untuk mengkonseptualisasikan keamanan siber dan mengembangkan kebijakan perlindungan, maka perlu membagi dunia siber mengikut kategori dimana kerentanannya paling mungkin terjadi. Salah satu kemungkinan adalah menganalisis dunia siber di berbagai tingkat, setiap tingkat menunjukkan konsekuensi yang berbeda dari gangguan infrastruktur maya, Cornish, Paul, David Livingstone, Dave Clemente, and Claire Yorke. (2011). Konsekuensi dari insiden cyber dan mekanisme respons yang tepat sangat berbeda di tingkat global, regional dan negara-negara dari pada tingkat struktur masyarakat, sektor ekonomi atau individu. Tapi semua tingkat ini terhubung erat di dunia maya, dan setiap sistem respons yang efektif perlu ditangani secara bersamaan. Dalam menemukan penanganan ancaman siber kepada negara bisa dilakukan dengan diintegrasikan semua elemen dan instansi yang terkait dengan keamanan siber, Craig, Anthony and Brandon Valeriano. (2016). SOP dan bidang tugas juga harus dijelaskan supaya tidak berlaku pertindihan tugas. Perlu juga dilakukan kampanye kesadaran keamanan siber supaya pengguna mengetahui cara yang aman dan benar menggunakan media siber, Clayton, Blake and Adam Segal. (2013).

1) Penanganan ancaman Siber Tingkat Global dan Regional

Gangguan infrastruktur informasi di tingkat global dan regional akan memberi implikasi yang besar dan serius apabila diserang. Meskipun gangguan global dan regional hampir tidak menjadi sasaran aktor internasional yang bertanggung jawab, secara teoritis hal tersebut dapat terjadi sebagai secara tidak disengajakan dalam menggunakan serangan cyber sebagai bagian dari konflik yang dikombinasikan dengan bentuk serangan fisik. Misalnya, jika dua kekuatan regional berusaha melemahkan satu sama lain, salah satunya (negara X) dapat meluncurkan serangan cyber operasi bersamaan dengan serangan fisik terhadap infrastruktur informasi (kabel optik, router dll) dengan bertujuan untuk mengganggu kegiatan ekonomi di negara lain (negara Y) untuk tujuan politik. Tetapi karena sistem keuangan regional dapat bergantung pada layanan keuangan yang diberikan oleh negara Y, ini akan menyebabkan gangguan yang serius untuk pusat keuangan di dekatnya, sehingga menyebabkan penurunan PDB yang serius di negara lain di wilayah ini. Data yang tidak bisa melewati kabel akan melalui satelit dan koneksi lainnya menyebabkan efek domino yang berbeda di wilayah lain. Di tingkat global dan regional, mekanisme tanggap insiden internasional dan jaringan kerja sama formal perlu dibentuk oleh pemerintah, organisasi internasional dan komunitas pemangku kepentingan perusahaan sektor TIK untuk menjamin kemampuan pengelolaan kejadian dalam kasus adanya gangguan global termasuk terhadap gangguan nuklir, Colby, Elbridge. (June 24, 2013).

Maka penulis menemukan bahwa perlu diadakan kerjasama sesama negara bagi menangani masalah siber diperingkat regional dan dunia. Ini boleh dilaksanakan dalam PBB atau Interpol bagi bekerjasama dalam kerjasama keamanan siber. Ini karena jika negara itu diserang secara siber, maka negara lain dan regional juga bisa terkena dampak ekonomi.

2) Penanganan ancaman Siber Nasional Tingkat Negara

Kategori kerentanan kedua menyangkut tingkat negara bangsa. Salah satu konflik yang paling ditakuti di dunia siber adalah serangan siber yang menghancurkan terhadap infrastruktur penting sebuah negara dilakukan dengan bersama serangan fisik. Namun, serangan siber selama konflik militer tidak akan menjadi masalah bagi analisis karena dalam kasus perang yang meluas, akan memungkinkan untuk menerapkan kerangka undang-undang internasional yang mencakup konflik bersenjata, dan mengatur aspek kemanusiaan dari sebuah konflik. Hukum Konflik Bersenjata dan Hukum Humaniter Internasional menetapkan persyaratan untuk menghindari korban di kalangan penduduk sipil, menahan diri dari tanggapan yang tidak proporsional, untuk mempertimbangkan efek sekunder dan tertier dll. Skenario yang sangat mungkin terjadi dalam konflik modern masa depan adalah penggunaan organisasi kriminal menggunakan media siber sebagai proxy negara lain. Kriminal mungkin kehilangan jejak dan mereka bersembunyi di balik fakta bahwa peraturan nasional dalam mengkriminalkan kejahatan cyber sangat

sama antara negara dengan negara yang lain. Petugas penegak hukum terbebani dan tidak ada cukup perhatian yang diberikan pada masalah kejahatan siber internasional. Negara-negara juga harus menghadapi kemungkinan serangan teroris yang menggunakan metode cyber atau menggunakan gabungan kekuatan serangan fisik dan cyber untuk mencapai tujuan sebuah operasi. Meskipun koordinasi anti-teror di antara negara-negara telah diperkuat setelah 9/11 dan sebagian besar negara di dunia bekerja sama di bidang ini, kemungkinan adanya ancaman dan respons akan mendapatkan pengetahuan yang diperlukan dan menggunakan metode cyber dalam operasi mereka. Perlu diketahui bahwa sejauh ini para teroris belum melakukan serangan nyata terhadap infrastruktur internet. Ini karena mereka membutuhkan internet sebagai alat rekrutmen dan tidak ingin merugikan media utama yang memfasilitasi komunikasi mereka. Maka Penulis menemukan bahwa penanganan ancaman siber kepada negara bisa dilakukan dengan diintegrasikan semua elemen dan instansi yang terkait dengan keamanan siber. SOP dan bidang tugas juga harus dijelaskan supaya tidak berlaku pertindihan tugas Collins, Alan (2003).

3) Penanganan Ancaman Siber Tingkat Masyarakat

Penanganan ancaman siber tingkat masyarakat termasuk kategori kerentanan ketiga. Terkait dengan dampak sosial dari aktivitas berbahaya di internet. Ini mencakup rekayasa sosial yang mengurangi kepercayaan di antara orang-orang, dan juga metode maya yang digunakan untuk mengagitasi, meneror, menyebarkan, atau menganggap tokoh masyarakat atau kelompok tertentu di masyarakat, Cilluffo, Frank J., and Joseph R. Clark. (2012). Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat telah meningkatkan komunikasi massa dan media-mediana ke tempat yang menonjol di masyarakat modern. Di era di mana media bergerak ke Internet dan komunikasi sosial beralih ke Chat room elektronik, kerusakan teknologi apapun akan mempengaruhi sejumlah besar orang. Pencurian identitas melalui jejaring sosial menempati peringkat sebagai ancaman cyber paling umum dalam beberapa tahun terakhir, dan banyak orang masih belum mengetahui bagaimana cara menghindari serangan semacam ini terhadap identitas mereka. Maka penulis menemukan bahwa yang paling penting dalam menangani ancaman peringkat masyarakat adalah dengan mengadakan kampanye keserasan keamanan siber agar semua pihak tau bagaimana menjaga keamanan siber untuk diri sendiri, masyarakat dan negara Clarke, Richard A. (2012).

4) Individu

Kategori terakhir adalah meningkatnya kegiatan berbahaya di dunia maya oleh individu pengguna komputer. Dalam kebanyakan skenario insiden siber, individu akan terpengaruh oleh gangguan siber dan akan menderita dari hilangnya layanan yang support kehidupan sehari-hari mereka, Cornish, Paul, David Livingstone, Dave

Clemente, and Claire Yorke. (2010). Dengan malapetaka siber buatan manusia atau teknologi, sebagian besar konsekuensinya bisa sangat tidak terduga, memiliki efek sekunder dan tersier. Bahkan pendekatan yang paling canggihpun tidak bisa menentukan secara pasti semua saling ketergantungan antara infrastruktur informasi penting yang mendukung fungsi normal masyarakat. Individu yang cuai juga merupakan ancaman di dunia maya jika komputer mereka yang tidak dilindungi akan digunakan sebagai bagian dari tentara komputer yang tidak terkoordinasi. Kerentanan serius tambahan pada tingkat individu yang patut mendapat perhatian adalah kelalaian pegawai. Human negligence dan kurangnya kemahiran adalah juga punca serangan luaran dan dalaman. Maka penulis dapat menemukan bahwa unsur manusiawi juga adalah rawan kepada keamanan siber. Maka perlu diadakan kampanye bagi menyadarkan rakyat dan karyawan agar menggunakan internet dengan aman dan mematuhi SOP yang telah dikeluarkan, Cornish, Paul, Rex Hughes, and David Livingstone. (2009).

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

E.1. Kesimpulan

Tantangan-tantangan dan hambatan dalam implementasinya keamanan siber nasional dapat disimpulkan beberapa langkah sebagai perlindungan terhadap siber nasional, sebagai berikut: *Pertama: Pilar Capacity Building*, yaitu Pemerintah Indonesia saat ini sudah menginisiasi strategi nasional keamanan siber dan menjalankan program-program jangka pendek maupun panjang, namun dalam implementasinya masih terdapat tantangan- tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan strategi nasional keamanan siber dari sisi sumber daya manusia, prosedur dan kebijakan pencegahan dan keamanan yang masih memerlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan bagi dari sektor swasta, pemerintah, masyarakat, dan institusi luar negeri yang merupakan pengembang dari aplikasi-aplikasi yang seringkali dipergunakan sebagai media kejahatan siber, dan teknologi yang harus dikembangkan seiring dengan meningkatnya jenis serangan siber. Keamanan siber merupakan sebuah ekosistem dimana aspek legal, organisasi, skill, kerjasama, dan implementasi teknik berjalan secara selaras untuk hasil yang efektif.

Media siber nasional secara keseluruhan merupakan ancaman kepada negara sifatnya nyata (real) dan bisa dilakukan oleh state dan non state actor. Senjata Siber (cyber weapon) menjadi bertambah sofisticated dan senang digunakan. Senjata Siber lebih murah dan boleh dibangun oleh seorang yang mahir dalam pengaturcaraan. Serangan dilakukan sama ada secara direct atau menggunakan proxy melalui negara- negara lain yang sulit untuk dikesan. Ancaman siber dapat melumpuhkan ekonomi, administrasi, sosial dan lain- lain bagi sebuah negara. Negara yang tinggi bergantungnya kepada internet dan rangkaian komputer adalah lebih rawan kepada serangan siber. Potensi serangan Siber oleh State actor karena adanya ketergantungan negara-negara kepada

internet dan rangkaian membuka ruang untuk serangan. Kegagalan mengamankan CNI akan memberi dampak yang teruk seperti yang berlaku di Estonia dan Georgia. Keberadaan medias sosial saat ini dapat mengubah pemerintahan, maka rakyat pada hari ini memang tidak bisa dijauhkan dari media sosial seperti facebook, tweter, whatapp dan lain- lain.

Didalam media sosial seringkali terdapat Cyber Terorime yang menggunakan media siber dalam menjalan operasi mereka. Sehingga perlu bagi pemerintah memonitor aktivitas ini agar terorisme tidak berkembang. Media sosial dan siber digunakan karena bisa diakses oleh banyak orang dan teroris bisa berkomunikasi sesama mereka dalam aktivitas ini. Penggunaan siber memberikan outreach yang luas dalam mengembangkan agenda ekstrimis. Penggunaan media sosial amat berkesan kerana jaringan tanpa batasan dan luas senang digunakan untuk menyebarkan ideology teror.

E.2. Rekomendasi

Rekomendasi dalam penulisan ini adalah: berdasarkan indikasi strategi nasional siber dan pelatihan profesional keamanan siber bagi Aparatur Sipil Negara, terutama yang mengelola data strategis, tenaga penyidik bidang ITE, maka perlunya peningkatan sosialisasi keamanan informasi (termasuk aspek hukum, promosi SKKNI bidang Keamanan Informasi dan Auditor TI) bagi masyarakat dan Sektor yang mengelola data Strategis. Kedua; perlunya Edukasi Publik untuk menumbuhkan kesadaran keamanan, pemahaman kebhinekaan, dan anti terorisme diterapkan secara sistematis dimulai dari usia dini dengan memasukkan kurikulum keamanan siber esensial dimulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari Pilar *Legal: hal lainnya adalah yang bersifat urgensi* pengesahan RUU Perlindungan Data dan informasi pribadi perlunya kepastian hukum perlindungan data pribadi untuk mendukung UU ITE dan UU Telekomunikasi.

Dari Aspek Pilar *Organizational Structure*: yang uUrgensi peran BSSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian diharapkan dapat berfungsi sebagai *National Cyber Security Centre* sebagai rujukan utama penanganan keamanan siber dan *clearing house information exchange* sebagai wujud nyata pembangunan ekosistem ranah siber Indonesia. Dan segera menginisiasi Peta jalan pedoman penanganan keamanan siber. Aspek Pilar *International Cooperation*: perlunya penguatan kerjasama antara swasta (melalui ID-CERT), pemerintah (BSSN), masyarakat, dan stakeholder internasional (seperti pemilik aplikasi *media social* yang seringkali dimanfaatkan untuk media kejahatan (twitter, Facebook, dan sebagainya), serta lembaga terkait di dunia internasional dalam pencegahan maupun penanganan kejahatan siber. Pilar Teknikal dan Pengukuran Prosedural: perlunya pembaharuan penguasaan teknologi keamanan siber selaras dengan ragam ancaman siber yang menyerta teknologi *Machine-to-Machine (M2M)*, *Internet of Things (IoT)*, *Cloud Computing*. Rekomendasi lainnya adalah: Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, disarankan kepada pihak pemerintah dan yang berkait dengan langkah tindak lanjut sebagai berikut: (a) Memaksimalkan kemahiran local dalam pembangunan infrastruktur teknologi

informasi nasional; (b) Menjalinkan kerjasama internasional dan regional dalam bidang siber agar ancaman siber dalam kriminal, teroris dan lain-lain dapat ditangani melangkaui batas negara.

F. References

- BSN. (2016). *Buletin Informasi SNI Terbaru*. Jakarta: Pusat Informasi dan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN).
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauziah, (2017). Kebergantungan Media Sosial Terhadap Isu Arab Spring Dalam Kalangan Khalayak di Malaysia, *Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication* Jilid 33(1)2017: 423-437, Universiti kebangsaan Malaysia.
- Indrawan, Rully dan R. Poppy Yaniawati. (2014). *Metode penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan pendidikan*. Bandung : Refika Aditama.
- KOMINFO. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : lfabeta.

Jurnal

- Amos Granit (March 2010). *Cyberspace as a Military Domain – In What Sense?* Institute for Intelligence Studies at IDF Military Intelligence.
- Ball, Desmond, and Gary Waters. (2013). "Cyber Defence and Warfare." *Security Challenges* 9, no. 2 (2013): 91-98.
- Ball, Desmond. (2011). "China's Cyber Warfare Capabilities." *Security Challenges* 7, no. 2 (Winter 2011): 81-103.
- Understanding the Risk. (2009). "Chatham House. (2015). Beidleman, Scott W. "Defining and Deterring Cyber War." Master's thesis, U.S. Army War College, June 2009.
- Bejtlich, Richard. (2015). "Outside Perspectives on the Department of Defense Cyber Strategy." The Brookings Institution. September 29, 2015.
- Bendiek, Annegret and Tobias Metzger. (2015). "Deterrence theory in the cyber-century: Lessons from a state-of-the-art literature review." *Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft fur Informatik, Bonn*.
- Benitz, Jorge, and Jason Healey. (2012). "Cyber Offense is King." The Atlantic Council. July 30, 2012.
- Borum, Randy, and Ronald Sanders. (2015). "Cyber Intelligence: Preparing Today: for Tomorrow's Threats." Intelligence and National Security Alliance, 2015.

- Chendramata, A. (2016). Indonesia Cybersecurity Strategy. Direktorat Keamanan Informasi Dirjen Aplikasi Telematika. (2013, Oktober 23).
- Collins, Alan (2003). Security and Southeast Asia: domestic, regional and global issues ,Singapore: ISEAS.
- Cilluffo, Frank J., and Joseph R. Clark. (2012). "Preparing for Netwars: Repurposing Cyber Command." *The Journal of International Security Affairs* (2012):111-118.
- Cilluffo, Frank J., Sharon L. Cardash, and George C. Salmolraghl. (2012). "A Blueprint for Cyber Deterrence: Building Stability through Strength." *Military and Strategic Affairs* 4, no. 3 (December 2012): 3-23.
- Clarke, Richard A. (2012). "Securing Cyberspace through International Norms: Recommendations for Policymakers and the Private Sector." Good Harbor Security Risk Management, LLC. 2012.
- Clayton, Blake and Adam Segal. (2013). "Addressing Cyber Threats to Oil and Gas Suppliers." Council on Foreign Relations. 2013.
- Colby, Elbridge. (June 24, 2013). "Cyberwar and the Nuclear Option." *The National Interest*.
- Collins, Alan, (2003). Security and Southeast Asia: domestic, regional and global issues ,Singapore: ISEAS.
- Cornish, Paul, David Livingstone, Dave Clemente, and Claire Yorke. (2010). "On Cyber Warfare." Chatham House.
- Cornish, Paul, David Livingstone, Dave Clemente, and Claire Yorke. (2011). "Cyber Security and the UK's Critical National Infrastructure." Chatham House.
- Cornish, Paul, Rex Hughes, and David Livingstone. (2009). "Cyberspace and the National Security of the United Kingdom." Chatham House. 2009.
- Craig, Anthony and Brandon Valeriano. (2016). "Conceptualising Cyber Arms Races." Presented at the 8th International Conference on Cyber Conflict, Tallinn, Estonia.
- CSIS Commission on Cybersecurity for the 44th President. (2010). "A Human Capital in Crisis: Technical Proficiency Matters." Center for Strategic and International Studies. November.
- El-Nawawy. Kamis. (2012). "Cyberactivists Paving the Way for the Arab Spring: Voices from Egypt, Tunisia and Libya." Pada 1 May 2017. <http://www.cyberorient.net/article.do?articleId=7994>
- Indonesia dalam Situasi Perang Generasi Keempat (2016). <http://www.beritasatu.com/nasional/351486-indonesia-dalam-zitulasi-perang-generasi-keempat.html>
- Harknett, R. J., & Stever, J. (2009). The Cybersecurity Triad: Government, Private Sector Partners, and the Engaged Cybersecurity Citizen. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*, 6, Article 79.

- Jagatreview (2015). “Waspada! Tren Terbaru Serangan Spionase Cyber –EquationDrug”
<http://www.jagatreview.com/2015/03/pr-waspada-tren-terbaru-serangan-spionase-cyber-equationdrug/> diakses pada 25 Agustus 2017.
- Kautsarina, dan Gautama, H. (2014). Journal of Information Security Readiness of Government of Government Institution in Indonesia. *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)*.
- Leo Taddeo (2017). “Nation-state cyber attacks come out of the shadows”
<http://tech.newstatesman.com/guest-opinion/nation-state-cyber-attacks-come-shadows> diakses pada 1 Juni 2017.
- Perang Generasi Ke 4 (Fourth Generation Warfare). Pada 14 Juni 2017.
<http://strategitaktik.blogspot.com/2013/08/perang-generasi-ke-4-fourth-generation.html>.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN SUMEDANG

Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si, Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si

Email: [dadan.setianugraha@gmail.com](mailto: dadan.setianugraha@gmail.com), [lalassulastri04@gmail.com](mailto: lalassulastri04@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang. Faktor-faktor tersebut meliputi Kompetensi Perencana (X_1), Data (X_2), dan Anggaran (X_3).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode ini berfungsi untuk memperoleh gambaran secara faktual tentang hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengajuan hipotesis yang diajukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, angket dan wawancara terstruktur. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu sebanyak 198 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah *proportionate stratified random sampling*. Sehingga, sampel penelitian sebanyak 50 responden yang diambil secara acak. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah analisis regresi linier berganda, uji-t dan uji-F, serta koefisien determinasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai t_{hitung} secara parsial antara Pengaruh Kompetensi Perencana terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam sebesar 10,27; Pengaruh Data terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam sebesar 12,31; serta Pengaruh Anggaran terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam sebesar 7,88. Sedangkan nilai F_{hitung} secara simultan Pengaruh Kompetensi Perencana, Data, serta Anggaran terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam sebesar 51,33 dengan Koefisien Determinasi sebesar 73,44%.

Kata kunci: Kompetensi Perencana, Data, Anggaran, Efektivitas Perencanaan, Penanggulangan Bencana Alam.

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Dalam penanggulangan bencana, agar setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan terarah maka dibutuhkan suatu rencana yang spesifik. Perencanaan yang spesifik akan mengarah pada penguatan kesiapan pemerintah, masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi kondisi bencana dan resiko bencana dapat diminimalisir semaksimal mungkin.

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah daerah adalah pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Sementara itu, dalam Undang-undang yang sama salah satu kewenangan daerah dalam penanggulangan bencana adalah pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan bencana. Secara kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat daerah dilaksanakan oleh BPBD (Badan Penanggulangan bencana Daerah). BPBD mempunyai fungsi merumuskan, menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Sementara itu, dalam implementasinya sistem penanggulangan bencana yang saat ini dikembangkan baik di tingkat nasional maupun daerah sedang berada pada tahap transisi antara sistem yang selama ini berjalan dengan sistem baru seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 (BAPPENAS). Tahap transisi tersebut dirasakan juga oleh BPBD Kabupaten Sumedang dalam menjalankan fungsinya. Kondisi bencana alam di Kabupaten Sumedang berdasarkan data yang dirilis dalam website resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (<http://dibi.bnpb.go.id/data-bencana>) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012 s.d 2016) terjadi 25 kali kejadian bencana.

Jika dilihat dari frekuensi kejadian, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan pada kecuali tahun 2013 hanya satu kali kejadian. Kejadian tersebut meliputi banjir delapan kali, longsor sembilan kali, kekeringan tiga kali, puting beliung tiga kali dan gempa bumi dua kali. Dari 25 kali kejadian di atas mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia, satu orang dinyatakan hilang, sembilan orang terluka dan 2207 orang mengungsi, seperti digambarkan dalam tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1 Frekuensi Bencana Alam di Kabupaten Sumedang
Selama Lima (5) Tahun Terakhir**

No.	Tanggal	Jenis Bencana	Meninggal	Hilang	Terluka	Mengungsi
1	01/10/2012	Kekeringan	0	0	0	0
2	01/09/2012	Kekeringan	0	0	0	0
3	01/08/2012	Kekeringan	0	0	0	0
4	01/07/2012	Kekeringan	0	0	0	0
5	01/01/2012	Banjir	0	0	0	0
6	01/01/2013	Banjir	0	0	0	0
7	27/12/2014	Tanah Longsor	0	0	0	0
8	20/12/2014	Tanah Longsor	0	0	0	0
9	17/04/2014	Puting Beliung	0	0	5	0
10	15/04/2014	Tanah Longsor	0	0	0	115
11	13/04/2014	Tanah Longsor	2	0	1	0
12	29/10/2015	Banjir	0	0	0	0
13	20/03/2015	Tanah Longsor	1	0	1	0
14	15/03/2015	Gempa Bumi	0	0	0	0
15	15/03/2015	Tanah Longsor	0	0	0	32
16	14/03/2015	Puting Beliung	0	0	0	840
17	11/11/2016	Banjir	0	0	0	0
18	03/11/2016	Tanah Longsor	0	0	0	0
19	02/11/2016	Banjir	0	0	0	0
20	20/09/2016	Banjir	0	0	0	0
21	20/09/2016	Tanah Longsor	6	1	2	1220
22	28/08/2016	Tanah Longsor	0	0	0	0
23	27/02/2016	Banjir	0	0	0	0
24	22/02/2016	Puting Beliung	0	0	0	0
25	21/02/2016	Banjir	0	0	0	0
Jumlah			9	1	9	2207

Sumber: <http://dibi.bnbp.go.id/data-bencana>, diunduh April 2017

Kondisi bencana di atas harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini adalah BPBD Kabupaten Sumedang. Terlebih jika melihat kondisi penanggulangan bencana yang selama ini dilakukan masih belum efektif. Penanganan jenis dan tingkat bencana masih dimonopoli oleh mekanisme yang lama (ketanggap darurat saja). Sementara, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pra bencana masih dirasakan kurang dan belum tepat sasaran. Begitu pula dalam kegiatan pasca bencana yang masih terjadi miskordinasi antara lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya serta masih belum terintegrasinya kebijakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan daerah membuat pelaksanaan penanggulanagn bencana makin terkesan parsial.

MASALAH DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum efektifnya perencanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang, diantaranya:

1. Kompetensi Perencana; kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang memahami perencanaan dan penanggulangan bencana alam.

2. Data; masih kurangnya data dan informasi mengenai potensi daerah bencana serta belum terpetakannya daerah rawan bencana alam.
3. Anggaran; kurangnya anggaran untuk mengadakan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana alam.

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh kompetensi perencana, data serta anggaran terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang? Selanjutnya dari pertanyaan penelitian di atas, di rinci ke dalam bentuk sub-sub pertanyaan sebagai berikut.

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi perencana terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang?
2. Seberapa besar pengaruh data terhadap perencanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang?
3. Seberapa besar pengaruh anggaran terhadap perencanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pengaruh kompetensi perencana terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang.
2. Pengaruh data terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang.
3. Pengaruh anggaran terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang.
4. Pengaruh kompetensi perencana, data, dan anggaran terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang.

KERANGKA TEORITIK

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia (Sjafrijal: 2011). Definisi tersebut menggambarkan dengan jelas bagaimana peran perencanaan dalam manajemen modern. Kegagalan implementasi, sasaran yang tidak tercapai dan pemborosan sumber daya seringkali terjadi diakibatkan karena kegagalan perencanaan.

Sedangkan secara spesifik perencanaan oleh Tarigan (2015) didefinisikan sebagai “mengetahui dan menganalisa kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *noncontrollable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut”. Kespesifikan dari penjelasan Tarigan tersebut dapat terlihat dari adanya kondisi analisa saat ini serta identifikasi terhadap faktor *noncontrollable* dan perkiraan terhadap faktor-faktor pembatas. Sebelum dapat menentukan tujuan dan sasaran, perlu lebih dahulu mengetahui kondisi saat ini dan menganalisa arah perkembangan berbagai faktor yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, peran-peran faktor yang tidak dikendalikan pun harus diperhatikan karena baik secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada proses pencapaian tujuan.

Sedangkan perencanaan pembangunan didefinisikan Sjafrizal (2011) sebagai cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Selanjutnya, untuk meluruskan pemahaman dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan menjelaskan bahwa, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Untuk dapat memberikan gambaran tentang penyusunan rencana yang dianggap baik, selanjutnya Sjafrizal (2011) menjelaskan ciri-ciri dari perencanaan yang baik yang selanjutnya dapat dijadikan acuan bagi perencanaan. Ciri-ciri tersebut meliputi:

1. Tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta;
2. Memasukan evaluasi perekonomian masa lalu;
3. Merinci tujuan dan prioritas pembangunan;
4. Menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan;
5. Strategi dan kebijakan bersifat spesifik;
6. Berisikan perencanaan kebutuhan investasi;
7. Memuat proyeksi selama periode perencanaan;
8. Mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan lainnya.

Silalahi (2005) menjelaskan bahwa perencanaan sebagai suatu proses dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Formulasi tujuan (*goal formulation*): identifikasi tentang sasaran-sasaran dan strategi mutakhir.
2. Analisis lingkungan (*environmental analysis*): identifikasi peluang dan kendala strategis lingkungan eksternal dan identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasional.
3. Pembuatan keputusan rencana strategi (*strategic plan decision making*): kembangkan alternatif, evaluasi alternatif, pilih alternatif.
4. Kembangkan rencana operasional (*develop operational plan*).

5. Implementasi rencana dan evaluasi hasil (*implement the plan and evaluate results*).

Kegagalan pelaksanaan rencana dapat terjadi karena dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan secara teknis sebenarnya kurang layak. Secara umum terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kegagalan rencana (*planning failure*) faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: 1) Dualisme pola penyusunan dan rencana; 2) Arah pembangunan yang kurang realistis; 3) Kelemahan dalam teknis penyusunan; 4) Keterbatasan data statistik yang tersedia; 5) Adanya gangguan krisis ekonomi dan bencana alam (Sjafrijal, 2011). Sementara itu, Sjafrijal (2011) menjelaskan pula bahwa, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan, yaitu kompetensi perencana, data dan informasi serta anggaran seperti dijelaskan berikut ini.

1. Kompetensi Perencana

Salah satu kelemahan teknis dari perencanaan adalah disebabkan karena tenaga perencana di level daerah masih terbatas baik jumlah dan kualitas tenaga (Sjafrijal, 2011). Kondisi demikian selanjutnya menyebabkan masih banyaknya dialami berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan rencana pembangunan.

2. Data

Ketersediaan data yang cukup dengan tingkat akurasi yang memadai merupakan persyaratan lain untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan yang layak secara teknis. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil pengolahan tersebut bisa menjadi informasi. Hasil pengolahan yang tidak memberikan makna atau arti bagi seseorang bukanlah merupakan informasi. Menurut Alter (dalam Kadir, 2003) informasi yang dibutuhkan dapat dibagi menjadi enam kategori, yaitu *comfort information, warning, key indikator, situasional information, gosip dan external information*.

3. Anggaran

Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran adalah merupakan persyaratan penting untuk dapat menjamin terlaksananya semua program dan kegiatan pembangunan (Sjafrijal 2011).

Penanggulangan Bencana

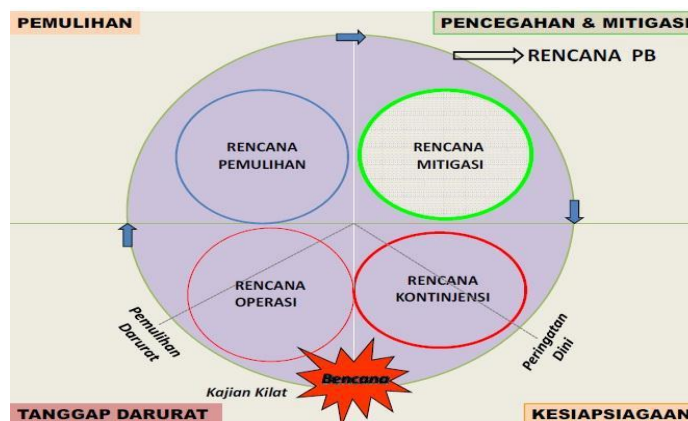
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana rangkaian kegiatan tersebut apabila digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana adalah sebagai berikut.

1. Pra bencana yang meliputi: situasi tidak terjadi bencana, situasi terdapat potensi bencana.
2. Saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana.
3. Pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 disebutkan pula bahwa, secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi:

1. Pada tahap prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana (*disaster management plan*), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan/bidang kerja kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi.
2. Pada tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (*single hazard*) maka disusun satu rencana yang disebut rencana kontinjensi (*contingency plan*).
3. Pada saat tanggap darurat dilakukan rencana operasi (*operational plan*) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari rencana kedaruratan atau rencana kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.
4. Pada tahap pemulihan dilakukan penyusunan rencana pemulihan (*recovery plan*) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana di masa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk/pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana.
- 5.



Gambar. 2.1: Perencanaan Penanggulangan Bencana

Sumber: Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan

yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

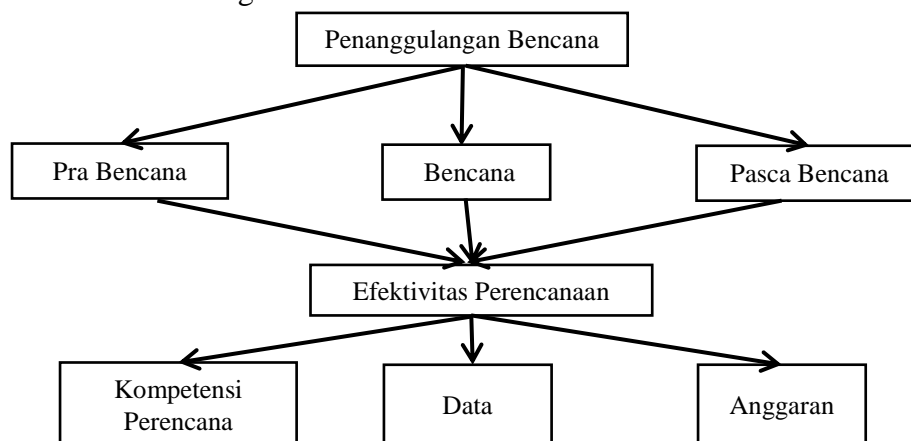
MODEL TEORITIK

Prinsip penanggulangan bencana merupakan suatu proses berkesinambungan untuk menangani daerah-daerah yang terkena bencana alam. Umumnya kegiatan penanggulangan bencana alam yang dilakukan meliputi perencanaan hingga penanganan dimulai saat sebelum bencana sampai pada setelah terjadinya bencana. Kegiatan yang dilakukan mencakup pencegahan, mitigasi bencana seperti mitigasi bencana banjir dan cara melakukan mitigasi bencana bumi, kesiapan dalam menghadapi bencana, penanganan darurat, dan terakhir pemulihan.

Kegiatan perencanaan memiliki porsi yang cukup penting dalam kegiatan penanggulangan bencana. Baik di tahapan pra bencana, saat terjadi bencana maupun penanganan pasca terjadi bencana. Pada tahap pra bencana upaya perencanaan yang dilakukan meliputi upaya-upaya pemerintah mengurangi resiko bencana, tahapan ini biasa di kenal tahap mitigasi bencana. Sedangkan pada tahap pelaksanaan bencana perencanaan yang dibuat meliputi rencana teknis dan rencana aksi evakuasi dan penanganan bencana. Pada tahap pasca bencana rencana yang dibuat meliputi rencana penanganan korban, rehabilitasi, dan tempat pengungsian bahkan sampai tahap relokasi. Semua tahapan dalam kegiatan penanggulangan bencana tersebut harus dapat direncanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.

Perencanaan pada dasarnya adalah merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia (Sjafrizal, 2014). Perencanaan penanggulangan Bencana di Kabupaten Sumedang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Sumedang. Dalam proses penyusunan renstra tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah Kompetensi Perencana, Anggaran serta data dan informasi yang tersedia.

Sehingga apabila penjelasan di atas peneliti gambarkan, maka dapat dilihat dalam bentuk model teoritik sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penggunaan metode ini didasarkan pada pendapat Iskandar (2013: 174) yang menyatakan bahwa, “penelitian deskriptif ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih fenomena”. Metode ini berfungsi untuk memperoleh gambaran secara faktual tentang fenomena penelitian tertentu dalam keadaan sekarang untuk mencari jawaban bagi pemecahan masalah yang terdapat pada fenomena tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu sebanyak 198 orang. Berdasarkan populasi di atas, teknik sampling yang digunakan adalah *proportionate stratified random sampling* atau teknik penarikan sampel yang dilakukan apabila populasi mempunyai unsur anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Berdasarkan perhitungan teknik sampling diperoleh 50 responden penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Studi kepustakaan
2. Studi Lapangan (observasi, angket)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Analisis Regresi Berganda
2. Uji t
3. Uji F
4. Koefisien Determinasi

HASIL PENELITIAN

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan proses perhitungan yang dilakukan, diperoleh rekapitulasi data dari masing-masing variabel berikut ini:

Tabel 5.1

Tabel Penolong Analisis Regresi Berganda

No Resp	X1	X2	X3	Y	X1 ²	X2 ²	X3 ²	Y ²	X1.Y	X2.Y	X3.Y	X1.X2	X1.X3	X2.X3
1	85	64	73	81	7225	4096	5329	6561	6885	5184	5913	5440	6205	4672
2	66	49	71	61	4356	2401	5041	3721	4026	2989	4331	3234	4686	3479
3	80	61	86	77	6400	3721	7396	5929	6160	4697	6622	4880	6880	5246
4	101	77	97	97	10201	5929	9409	9409	9797	7469	9409	7777	9797	7469
5	99	77	97	97	9801	5929	9409	9409	9603	7469	9409	7623	9603	7469
6	83	64	83	80	6889	4096	6889	6400	6640	5120	6640	5312	6889	5312
7	76	58	73	72	5776	3364	5329	5184	5472	4176	5256	4408	5548	4234
8	85	64	80	80	7225	4096	6400	6400	6800	5120	6400	5440	6800	5120
9	83	62	80	78	6889	3844	6400	6084	6474	4836	6240	5146	6640	4960
10	79	59	80	75	6241	3481	6400	5625	5925	4425	6000	4661	6320	4720
11	81	62	83	78	6561	3844	6889	6084	6318	4836	6474	5022	6723	5146
12	93	72	95	89	8649	5184	9025	7921	8277	6408	8455	6696	8835	6840
13	83	62	81	78	6889	3844	6561	6084	6474	4836	6318	5146	6723	5022
14	79	57	77	75	6241	3249	5929	5625	5925	4275	5775	4503	6083	4389
15	82	59	80	77	6724	3481	6400	5929	6314	4543	6160	4838	6560	4720
16	95	72	89	91	9025	5184	7921	8281	8645	6552	8099	6840	8455	6408
17	87	65	83	84	7569	4225	6889	7056	7308	5460	6972	5655	7221	5395
18	86	66	87	83	7396	4356	7569	6889	7138	5478	7221	5676	7482	5742
19	94	72	88	91	8836	5184	7744	8281	8554	6552	8008	6768	8272	6336
20	88	65	86	84	7744	4225	7396	7056	7392	5460	7224	5720	7568	5590
21	96	71	88	91	9216	5041	7744	8281	8736	6461	8008	6816	8448	6248
22	91	67	77	87	8281	4489	5929	7569	7917	5829	6699	6097	7007	5159
23	76	55	76	73	5776	3025	5776	5329	5548	4015	5548	4180	5776	4180
24	78	55	82	73	6084	3025	6724	5329	5694	4015	5986	4290	6396	4510
25	78	56	80	74	6084	3136	6400	5476	5772	4144	5920	4368	6240	4480
26	85	62	78	80	7225	3844	6084	6400	6800	4960	6240	5270	6630	4836
27	76	55	78	73	5776	3025	6084	5329	5548	4015	5694	4180	5928	4290
28	69	52	77	65	4761	2704	5929	4225	4485	3380	5005	3588	5313	4004
29	75	56	77	70	5625	3136	5929	4900	5250	3920	5390	4200	5775	4312
30	75	55	74	71	5625	3025	5476	5041	5325	3905	5254	4125	5550	4070
31	74	55	76	71	5476	3025	5776	5041	5254	3905	5396	4070	5624	4180
32	76	55	74	71	5776	3025	5476	5041	5396	3905	5254	4180	5624	4070
33	75	55	73	71	5625	3025	5329	5041	5325	3905	5183	4125	5475	4015
34	76	55	73	71	5776	3025	5329	5041	5396	3905	5183	4180	5548	4015
35	75	54	73	70	5625	2916	5329	4900	5250	3780	5110	4050	5475	3942
36	75	55	73	71	5625	3025	5329	5041	5325	3905	5183	4125	5475	4015
37	74	55	81	71	5476	3025	6561	5041	5254	3905	5751	4070	5994	4455
38	72	55	70	71	5184	3025	4900	5041	5112	3905	4970	3960	5040	3850
39	74	58	78	73	5476	3364	6084	5329	5402	4234	5694	4292	5772	4524
40	72	55	71	71	5184	3025	5041	5041	5112	3905	5041	3960	5112	3905
41	85	62	95	80	7225	3844	9025	6400	6800	4960	7600	5270	8075	5890
42	94	70	95	89	8836	4900	9025	7921	8366	6230	8455	6580	8930	6650
43	97	70	92	92	9409	4900	8464	8464	8924	6440	8464	6790	8924	6440
44	85	64	74	80	7225	4096	5476	6400	6800	5120	5920	5440	6290	4736
45	77	58	72	76	5929	3364	5184	5776	5852	4408	5472	4466	5544	4176
46	91	68	81	90	8281	4624	6561	8100	8190	6120	7290	6188	7371	5508
47	75	61	79	74	5625	3721	6241	5476	5550	4514	5846	4575	5925	4819
48	66	61	68	72	4356	3721	4624	5184	4752	4392	4896	4026	4488	4148
49	71	56	81	100	5041	3136	6561	10000	7100	5600	8100	3976	5751	4536
50	79	52	71	68	6241	2704	5041	4624	5372	3536	4828	4108	5609	3692
Σ	4067	3045	4006	3917	334481	187673	323756	310709	321734	241103	316306	250330	328399	245924
Bar	81,34	60,9	80,12	78,34										

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan data-data yang terdapat di dalam tabel penolong analisis regresi berganda tersebut didapatkan nilai untuk masing-masing skor deviasi sebagai berikut:

Tabel 5.2
Skor Deviasi Analisis Regresi Berganda

Deviasi	Skor Deviasi
$\sum X_1^2$	3671,2
$\sum X_2^2$	2232,5
$\sum X_3^2$	2795,3
$\sum Y^2$	3851,2
$\sum X_1 Y$	3125,2
$\sum X_2 Y$	2557,7
$\sum X_3 Y$	2476
$\sum X_1 X_2$	2649,7
$\sum X_1 X_3$	2551
$\sum X_2 X_3$	1958,6

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan skor deviasi tersebut maka dilanjutkan dengan melakukan perhitungan persamaan simultan untuk mencari koefisiensi regresi a , b_1 , b_2 , dan b_3 . Sehingga diperoleh koefisiensi untuk persamaan regresi $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$ yaitu: $Y = 0,04 + 0,809 X_1 + 0,146 X_2 + 0,046 X_3$. Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Faktor Kompetensi Perencana (X_1), Faktor Data (X_2), serta Faktor Anggaran (X_3) mempunyai arah koefisiensi yang bertanda positif terhadap efektivitas perencanaan (Y).
2. Koefisien kompetensi perencana memberikan nilai sebesar 0,809 yang berarti bahwa jika faktor kompetensi perencana semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka efektivitas perencanaan akan mengalami peningkatan.
3. Koefisien data memberikan nilai sebesar 0,146 yang berarti bahwa jika faktor kompetensi perencana semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka efektivitas perencanaan akan mengalami peningkatan.

Koefisien Anggaran memberikan nilai sebesar 0,046 yang berarti bahwa jika faktor kompetensi perencana semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka efektivitas perencanaan akan mengalami peningkatan.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Untuk mengetahui besaran pengaruh secara parsial antara Kompetensi Perencana (X_1) terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam (Y), Data (X_2) terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam (Y), serta Anggaran (X_3) terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam (Y) dilakukan perhitungan korelasi untuk masing-masing pengaruh tersebut dengan menggunakan rumus *Pearson Product Moment*

dan dilanjutkan dengan rumus uji t. Adapun hasil perhitungan masing-masing pengaruh tersebut yaitu:

Tabel 5.3
Hasil Perhitungan Nilai r_{hitung} dan t_{hitung}

Pengaruh Secara Parsial	Nilai r_{hitung}	Nilai t_{hitung}	Nilai t_{tabel}
Pengaruh X1 terhadap Y	0,83 (r_1)	10,27	2,01
Pengaruh X2 terhadap Y	0,87 (r_2)	12,31	
Pengaruh X3 terhadap Y	0,75 (r_3)	7,88	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Uji F

Sebelum melakukan perhitungan uji F maka terlebih dahulu dihitung nilai korelasi secara simultan (R) untuk mengetahui besaran nilai antara variabel kompetensi perencana, data, serta anggaran terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang. Adapun perhitungan yang dilakukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 R_{X_1X_2X_3Y} &= \sqrt{\frac{b_1 \cdot \sum X_1Y + b_2 \cdot \sum X_2Y + b_3 \cdot \sum X_3Y}{\sum Y^2}} \\
 &= \sqrt{\frac{(0,809 \times 3125,2) + (0,146 \times 2557,7) + (0,046 \times 2476)}{3851,2}} \\
 &= \sqrt{\frac{2528,2868 + 373,4242 + 113,896}{3851,2}} \\
 &= \sqrt{\frac{3015,607}{3851,2}} \\
 &= \sqrt{0,783} \\
 &= 0,88
 \end{aligned}$$

Selanjutnya untuk mengkaji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama maka diuji dengan menggunakan Uji F. Hasil perhitungan secara simultan diperoleh hasil sebagai berikut ini:

$$\begin{aligned}
 F_{hitung} &= \frac{(R)^2 (n-m-1)}{m (1-R^2)} \\
 &= \frac{(0,88)^2 (50-3-1)}{3 (1-(0,88)^2)} \\
 &= \frac{35,42}{0,69} \\
 &= 51,33
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 51,33 sedangkan nilai untuk F_{tabel} untuk $F_{(0,05)(11,3)}$ sebesar 2,81. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $51,33 > 2,81$ yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Kompetensi Perencana, Data, serta Anggaran terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sumedang.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan nilai R yang telah diperoleh sebesar 0,88 maka selanjutnya dilakukan koefisien determinasi untuk mengetahui kontribusi yang dimunculkan secara simultan antara Kompetensi Perencana, Data, serta Anggaran terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sumedang. Adapun perhitungan yang dilakukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} KD &= (R)^2 \times 100 \% \\ &= (0,88)^2 \times 100 \% \\ &= 77,44 \% \end{aligned}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi perencana, data, serta anggaran mempengaruhi efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang sebanyak 77,44 %, sedangkan sisanya 22,56 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Perencana Terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sumedang

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh antara kompetensi perencana terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam. Melalui perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 10,27 dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 2,01. Dengan Demikian secara statistik membuktikan bahwa kompetensi perencana berpengaruh positif terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana. Artinya, bahwa terdapat pengaruh antara variabel kompetensi perencana terhadap efektivitas penanggulan bencana alam di Kabupaten Sumedang.

Pengaruh Data Terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sumedang

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh antara data terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam. Melalui perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 12,31 dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan

dengan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 2,01. Dengan Demikian secara statistik membuktikan bahwa data berpengaruh positif terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana. Artinya, bahwa terdapat pengaruh antara variabel data terhadap efektivitas penanggulan bencana alam di Kabupaten Sumedang.

Pengaruh Anggaran Terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sumedang

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh antara anggaran terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam. Melalui perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7,88 dimana nilai tersebut lebuah besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 2,01. Dengan Demikian secara statistik membuktikan bahwa anggaran berpengaruh positif terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana. Artinya, bahwa terdapat pengaruh antara variabel anggaran terhadap efektivitas penanggulan bencana alam di Kabupaten Sumedang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan yaitu kompetensi perencana, data, dan anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam. Masing-masing faktor memiliki nilai t_{hitung} sebagai berikut 10,27; 12,31; dan 7,88 dimana nilai t_{hitung} tersebut lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,01).

Selain itu, secara stimultan faktor kompetensi perencana, data, serta anggaran memiliki pengaruh terhadap efektivitas perencanaan penanggulangan bencana alam. Hasil pengujian menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 51,33 sedangkan nilai untuk F_{tabel} untuk $F_{(0,05)(11,3)}$ sebesar 2,81. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara stimultan antara Kompetensi Perencana, Data, serta Anggaran terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sumedang.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, khususnya perencanaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumedang, maka peneliti memberikan beberapa saran beriku ini:

1. Meningkatkan kompetensi perencana melalui kegiatan/pendidikan/BIMTEK mengenai penanggulangan bencana yang dilakukan secara periodik.
2. Melakukan evaluasi bencana alam masa lalu.
3. Membuat proyeksi selama periode perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdi, Didi. 2015. *Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko*. [online]. Tersedia: <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/viewFile/60/57>. Diakses tanggal 8 Juni 2017.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik. *Ringkasan Telaahan Sistem Terpadu Penanggulangan Bencana di Indonesia (Kebijakan, Strategi, dan Operasi)*. [online]. Tersedia: http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/14057/3930. Diakses tanggal 6 Juni 2017.
- Ghozali, Saydam. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Iskandar, Jusman. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Puspa.
- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Sumedang: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2000. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Klaten: Intan Pariwara.
- Kardono, Priyadi dan Sridewanto Edi P. 2010. *Penginderaan Jauh untuk Penanggulangan Bencana*. *Journal Dialog Penanggulangan Bencana*. Volume 1, No. 2.
- Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Jakarta: Alfabeta.
- Robinson, Tarigan. *Perencanaan Pembangunan Wilayah (Edisi Revisi)*. 2015. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjafrizal. 2011. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses dan Studi Komparatif*. Jakarta: Caps.

MENGUKUR DAMPAK STIMULUS PEMASARAN DAN STIMULUS LAINNYA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN RAJUTAN BINONG JATI BANDUNG

Thia Ekawati Liansyah^a

Fauzan Aziz^b

^{a,b}Program Studi S1 Administrasi Bisnis, Universitas Sangga Buana YPKP

Bandung, Indonesia

Abstrak

Kurangnya daya serap produk rajutan Binong Jati di sekitar Kota Bandung karena distribusi produk rajutan lebih dominan ke luar Kota Bandung seperti Jakarta, Solo, Semarang hingga ke Kalimantan. Penjualan produk rajutan Binong Jati di Kota Bandung hanya sekitar 0,05% atau hanya 561 transaksi dari total 1.123.200 transaksi pada tahun 2017. Untuk meningkatkan volume penjualan perlu memperhatikan perilaku konsumen, dimana terdapat Stimuli Pemasaran yang meliputi produk dan pelayanan, harga, distribusi dan promosi serta pengaruh Stimuli Lainnya yang meliputi ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Stimuli Pemasaran dan Stimuli Lainnya terhadap Keputusan Pembelian konsumen Sentra Rajut Binong Jati di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan regresi linier berganda. Teknik sampling yang digunakan dengan pengambilan sampel simple random sampling. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel Stimuli Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian konsumen rajutan Binong Jati sebesar 75,4%. Pengaruh variabel Stimuli Lainnya terhadap Keputusan Pembelian konsumen rajutan Binong Jati sebesar 75,7%. Secara simultan, terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari Stimuli Pemasaran (X1) dan Stimuli Lainnya (X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y) konsumen rajutan Binong Jati sebesar 74,5%. Stimuli Pemasaran dan Stimuli Lainnya secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Rajutan Binong Jati. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi maupun evaluasi terhadap volume penjualan produk rajutan Binong Jati di Kota Bandung dan untuk penelitian selanjutnya.

Kata kunci: Stimuli Pemasaran, Stimuli Lainnya, Keputusan Pembelian

1. PENDAHULUAN

Kota Bandung yang dikenal sebagai pusat fashion, juga memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan industri pakaian. Salah satunya adalah pakaian rajutan yang diproduksi oleh para pengrajin usaha kecil menengah (UKM) di Sentra Rajut Binong Jati Bandung. Sentra Rajut Binong Jati Bandung merupakan salah satu industri kecil yang cukup potensial dan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian di kota Bandung. Minat beli yang dirasakan konsumen tidak terlepas dari kualitas yang ada pada produk yang telah di berikan produsen kepada konsumen. Pemasaran merupakan salah satu faktor penting dalam proses kegiatan perusahaan, dimana kegiatan pemasaran secara langsung mengarahkan pada pencapaian tujuan perusahaan yang salah satunya adalah peningkatan volume penjualan yang ujung-ujungnya memperoleh sejumlah laba yang optimal, sehingga dapat dikatakan bahwa laba diperoleh suatu perusahaan merupakan pencerminan dari keberhasilan aktivitas pemasaran perusahaan itu sendiri.

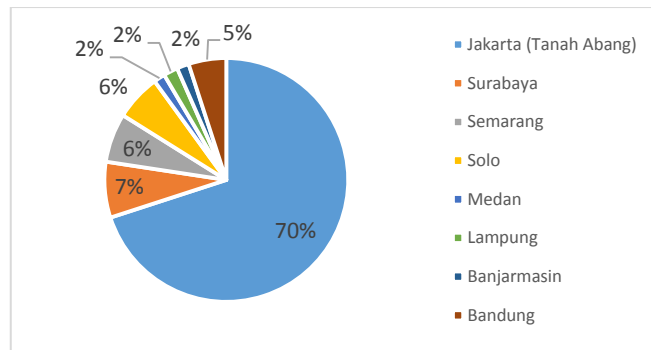
Salah satu upaya yang ditempuh oleh perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan adalah perlunya memperhatikan perilaku konsumen, di dalamnya terdapat Stimulus Pemasaran yang meliputi produk dan pelayanan, harga, distribusi dan promosi serta Stimulus Lainnya yang meliputi ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Semua kegiatan produksi dilakukan di rumah-rumah warga (*home industry*). Sepanjang 5 kilometer, terdapat sekurang-kurangnya 180 *home industry* yang masih aktif. Berikut daftar jumlah pelaku usaha dan penjualan sentra rajut binong jati:

Tabel 1.1

Jumlah Pelaku Usaha dan Penjualan Sentra Rajut Binong Jati

Tahun	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Penjualan (dalam lusin)
2013	300	1.872.000
2014	270	1.684.800
2015	200	1.248.000
2016	120	748.800
2017	180	1.123.200

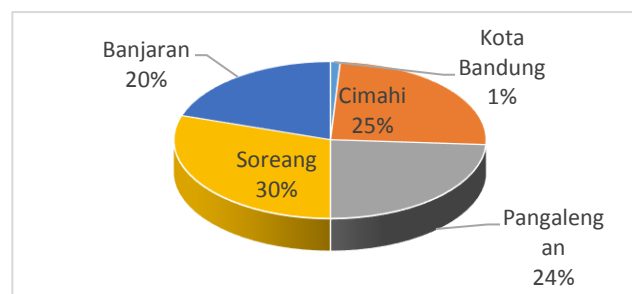
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 penjualan dan pelaku usaha sentra rajut binong jati mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sejumlah 1.123.200 lusin yang tersebar ke berbagai daerah. Berikut daftar distribusi penjualan produk rajutan Binong Jati pada tahun 2017:



Gambar 1.1

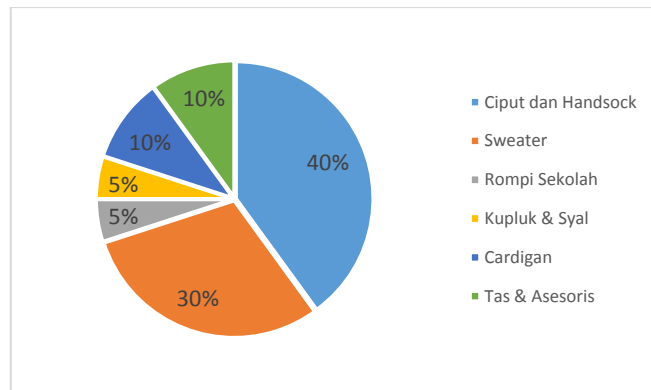
Daftar Distribusi Produk Rajutan

Distribusi penjualan produk rajutan Binong Jati lebih dominan terserap di Jakarta pasar Tanah Abang sebesar 70%, sedangkan untuk Bandung sendiri hanya berkisar 5% dari penjualan tahunan. Penyebarannya seperti ke Lembang, Soreang, Cimahi, Pangalengan, Banjaran dan Kota Bandung. Rinciannya seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Distribusi di Bandung

Pada gambar 1.5 diatas dapat dilihat bahwa penyerapan di Kota Bandung sangat minoritas, berbeda dengan di luar Kota Bandung khususnya di Tanah Abang yang mampu menyerap hingga 70% produksi rajutan Binong Jati. Beragam produk rajutan yang mampu dihasilkan di tahun 2017 terlihat pada gambar berikut :



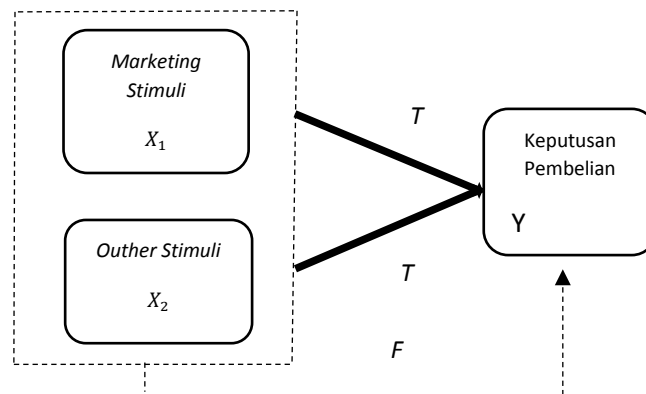
Gambar 1.3
Produk Rajutan yang dihasilkan pada tahun 2017

Untuk membuat 1 lusin sweater atau jaket rajutan membutuhkan 3-5 kg benang dengan jenis benang yang berbeda yaitu *catton*, *acrylic*, *spandek*, *annisa* dan masih banyak lagi, bahan baku diperoleh langsung dari PT Kahatex atau dari agen-agen benang yang sudah ada di Binong Jati sendiri.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan observasi peneliti membuat kerangka pemikiran untuk memberikan alur atau arah penulisan karya penelitian. Kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada skema berikut:

Pengaruh Stimulus Pemasaran (X_1) dan Stimulus Lainnya (X_2) terhadap Keputusan Pembelian (Y)



Gambar 1.4
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

X_1 : Variabel Independen, Stimulus Pemasaran

X_2 : Variabel Independen, Stimulus Lainnya

Y : Variabel Dependen, Keputusan Pembelian

F : Uji F (Pengujian Simultan)

T_1, T_2 : Uji T (Pengujian Parsial)

→ : Pengaruh masing-masing X_1 dan X_2 terhadap Y

→→ : Pengaruh X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y

Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:96) :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (rumusan masalah sama dengan identifikasi masalah dalam penelitian)”.

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan teoritis dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian bahwa:

H_1 : Stimulus Pemasaran berpegaruh positif terhadap Keputusan Pembelian.

H_2 : Stimulus Lainnya berpegaruh positif terhadap Keputusan Pembelian.

H_3 : Stimulus Pemasaran dan Stimulus Lainnya berpegaruh secara simultan terhadap Keputusan Pembelian

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:2): “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa metode penelitian menggunakan cara ilmiah yang berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verivikatif. Sugiono (2017) menyatakan bahwa deskriptif adalah judul penelitian yang bermaksud menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017) Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh penulis melalui kuisioner kepada konsumen Sentra Rajut Binong Jati. Kuesioner atau angket, dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis dalam bentuk pertanyaan tertutup kepada responden untuk menjawab, artinya responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan oleh penulis.

Menurut Sugiyono (2017) Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, data diperoleh penulis dari dokumen-dokumen Koperasi Industri Rajut Binong Jati (KIRBI), peraturan pemerintah dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang *Stimulus Pemasaran* dan keputusan konsumen.

Studi Kepustakaan dengan cara *library research* maupun *internet research* untuk menambah wawasan dan informasi tentang masalah yang dikaji, yang dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder atau data pendukung yang berfungsi sebagai tinjauan pustaka guna mendukung data-data primer yang diperoleh dari objek penelitian serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Ruang Lingkup Penelitian

Dalam buku Sugiyono (2017), (Donald & Pamela, 2003) menyatakan “Kami memberikan definisi bahwa, penelitian bisnis merupakan cara memperoleh informasi yang sistematis yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah manajerial”. Dalam pengertian ini hasil penelitian digunakan untuk memecahkan masalah manajerial yaitu yang terkait dengan masalah pengelolaan bisnis.

Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui keunggulan produk UKM Binong Jati yang terutama bagaimana pandangan konsumen, dalam hal ini masyarakat Kota Bandung terhadap produk-produk rajutan Binong Jati dan bagaimana rangsangan pemasaran yang diterima masyarakat hingga pada akhirnya memunculkan keputusan pembelian terhadap produk ini. Ruang lingkup penelitian ini menggunakan dua jenis Variabel, yaitu :

- a. Variabel Bebas atau Variabel Independen (X)
Dalam hal ini dapat identifikasikan yang menjadi variabel bebas (X) adalah “*Stimuli*”. *Stimuli* yang akan dibahas mencakup *Stimulus Pemasaran* (X1) dan *Stimulus Lainnya* (X2).
- b. Variabel Terikat atau Variabel Dependen (Y)
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah “Keputusan Pembelian”.

Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:232) Analisis deskriptif adalah “suatu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Uji Asumsi Klasik

Mengingat alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, maka untuk memenuhi syarat yang ditentukan, perlu dilakukan pengujian beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji kolmogrov smirnov adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Probabilitas nilai signifikansi $> 0,05$ berarti data residual berdistribusi normal.
- b. Jika nilai Probabilitas nilai signifikansi $< 0,05$ berarti data residual tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem multikolinieritas. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menguji multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Menurut (Santoso, 2012) “Apabila nilai VIF lebih tinggi dari 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas”.

Rumus VIF sebagai berikut :

$$VIF = \frac{1}{(1-Ri^2)} \quad (1)$$

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model ini adalah:

- a. Jika nilai tolerance $> 5\%$ dan nilai VIF < 5 , maka tidak ada multikolinieritas.
- b. Jika nilai tolerance $< 5\%$ dan nilai VIF > 5 , maka ada multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu Heteroskedastisitas cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Menurut (Latan & Ghozali, 2012), dasar pengambilan keputusan ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi yakni sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut (Santoso, 2012) untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (D-W). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut:

- a. Bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b. Bila nilai D-W terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Bila nilai D-W terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji Validitas dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan variabel *Stimuli* (X), dan keputusan pembelian (Y). Uji Validitas instrumen dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pengujian validitas isi dengan analisis item, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor butir instrumen dengan skor total.

Menurut (Sugiyono, 2017) “Teknik Korelasi untuk menentukan validitas item sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan, dan item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula”. Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila koefisien korelasi $r=0,361$, jadi apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,361 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan “Tidak Valid”. Rumus korelasi pearson product moment (Sugiyono 2017:276) dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}} \quad (2)$$

Dimana :

r = koefisien korelasi pearson

xy = jumlah perkalian variabel x dan y

x = jumlah nilai variabel x

y = jumlah nilai variabel y

x² = jumlah pangkat dua nilai variabel x

y² = jumlah pangkat dua nilai variabel y

n = banyaknya sampel

nilai r hitung yang telah diperoleh dari perhitungan diatas selanjutnya dibandingkan dengan r kritis(0,361) dengan ketentuan sebagai berikut :

jika r hitung > r kritis maka item tersebut valid

jika r hitung < r kritis maka item tersebut tidak valid

Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2017:212) Uji reliabilitas kuesioner dilakukan dengan teknik belah dua (split half), untuk keperluan itu maka butir-butir kuesioner dibelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kuesioner ganjil dan kelompok kuesioner genap, lalu skor data tiap kelompok itu disusun

sendiri dan selanjutnya skor total antara kelompok ganjil dan genap dicari korelasinya. Berikut adalah cara kerja rumus *Spearman Brown* :

$$r_i = \frac{2r_b}{1+r_b} \quad (3)$$

Dimana :

r_i = Reliabilitas internal seluruh instrumen

r_b = Korelasi *product moment* antara belahan pertama dan kedua

Indikator pengukuran reliabilitas yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut :

Jika alpha atau r hitung :

0,8 – 1,0 = Reliabilitas baik

0,6 – 0,799 = Reliabilitas diterima

Teknik Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis linier berganda dilakukan dengan uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji t, dan uji f. Adapun persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 \quad (4)$$

Dimana :

Y = *Keputusan Pembelian*

A = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi

X_1 = *Stimulus Pemasaran*

X_2 = *Stimulus Lainnya*

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2012:97).

Sedangkan rumus untuk menghitung koefisien determinasi menurut Sugiyono (2017) adalah sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\% \quad (5)$$

Keterangan :

Kd = koefisien determinasi

r^2 = koefisien korelasi yang dikuadratkan

Pengujian Secara Parsial (Uji T)

Uji T dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen.

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah :

- a. Jika $t_{hitung} = t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b. Jika $t_{hitung} \neq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Selain itu juga uji t tersebut dapat pula dilihat dari besarnya probabilitas value (p value) dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi $\alpha = 5\%$).

Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Jika p value $< 0,05$ maka H_0 ditolak
- b. Jika p value $> 0,05$ maka H_0 tidak berhasil ditolak.

Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2012:98), uji F digunakan untuk menentukan apakah secara serendak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik atau terikat”apakah variabel independen adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)} \quad (6)$$

Dimana :

R^2 = koefisien determinasi

K = jumlah variabel independen

n = jumlah sampel

Kriteria Pengujian :

- a. Apabila nilai F hitung \leq tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa secara simultan variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

- b. Apabila nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa secara simultan variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

3. HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Berikut ini gambaran karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan hoby.

Tabel 3.1
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Perempuan	107	45,9
Laki-laki	126	54,1
Total	233	100

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa responden perempuan sebanyak 107 orang (45,9%) sedangkan laki-laki 126 orang (54,1%). Dengan demikian, responden cenderung laki-laki.

Tabel 3.2
Usia Responden

Usia	Frekuensi (f)	Persentase (%)
15 - 20 Tahun	22	9,4
21 - 30 Tahun	115	49,4
31 - 40 Tahun	69	29,6
> 40 Tahun	27	11,6
Total	233	100

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa responden yang berusia 15 - 20 tahun sebanyak 22 orang (9,4%), berusia 21 - 30 tahun sebanyak 115 orang (49,4%), berusia 31 - 40 tahun sebanyak 69 orang (29,6%) dan berusia > 40 tahun sebanyak 27 orang (11,6%). Dengan demikian, responden cenderung berusia 21 - 30 tahun.

Tabel 3.3

Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (f)	Persentase (%)
SMA	95	40,8
D3	56	24,0
S1	68	29,2
S2	12	5,2
S3	2	0,9
Total	233	100

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa responden yang berpendidikan SMA sebanyak 95 orang (40,8%), D3 sebanyak 56 orang (24,0%), S1 sebanyak 68 orang (29,2%), S2 sebanyak 12 orang (5,2%), dan S3 yaitu 2 orang (0,9%). Dengan demikian, responden cenderung berpendidikan SMA.

Tabel 3.4

Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Pelajar	6	2,6
Mahasiswa	61	26,2
PNS	7	3,0
Karyawan Swasta	159	68,2
Wirausaha	0	0,0
Total	233	100

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa responden pelajar 6 orang (2,6%), mahasiswa 61 orang (26,2%), PNS yaitu 7 orang (3,0%), karyawan swasta 159 orang (68,2%) dan tidak seorangpun responden wirausaha. Maka dari itu responden bekerja sebagai karyawan swasta.

Tabel 3.5

Hoby Responden

Hoby	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Shopping	27	11,6
Traveling	48	20,6
Membaca	36	15,5
Olahraga	46	19,7
Kuliner	35	15,0
Lain-lain	41	17,6
Total	233	100

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa responden yang memiliki hoby shopping sebanyak 27 orang (11,6%), traveling 48 orang (20,6%), membaca 36 orang (15,5%), olahraga 46 orang (19,7%), kuliner 35 orang (15,0%) dan lain-lain 41 orang (17,6%).

Hasil Analisis Deskriptif

Untuk memudahkan penulis dalam menginterpretasikan data penelitian, dibuat klasifikasi data penelitian yang menggunakan distribusi frekuensi dengan interval yang sama. Data penelitian ini diklasifikasikan ke dalam lima kategori). Untuk mencari kategori, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- Nilai maksimum = Skor tertinggi x Jumlah pertanyaan x Responden
- Nilai minimum = Skor terendah x Jumlah pertanyaan x Responden
- Interval = Nilai maksimum – Nilai minimum
- Jarak interval = Interval : Jumlah kategori

Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi

Gambar 3.1

Jarak Interval pada Garis Kontinum

Gambaran Stimulus Pemasaran

Berikut ini hasil perhitungan untuk kategori variabel *Stimulus Pemasaran* dalam kuesioner penelitian.

$$\begin{aligned}\text{Nilai maksimum} &= 5 \times 13 \times 233 \\ &= 15145\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai minimum} &= 1 \times 13 \times 233 \\ &= 3029\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Interval} &= \text{Nilai maksimum} - \text{Nilai minimum} \\ &= 15145 - 3029 \\ &= 12116\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jarak interval} &= \text{Interval} : \text{Jumlah kategori} \\ &= 12116 : 5 = 2423,2\end{aligned}$$

Berikut ini hasil perhitungan jawaban responden mengenai Stimulus Pemasaran:

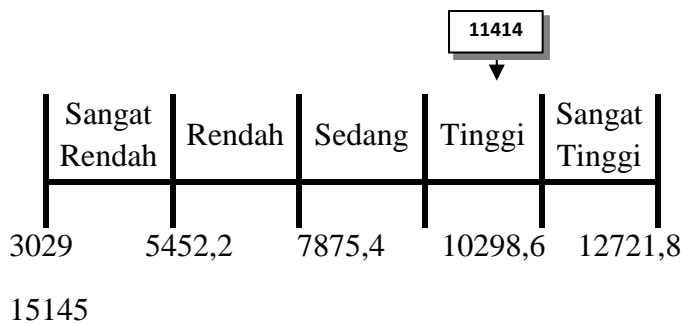
Tabel 3.6

Skor jawaban variabel Stimulus Pemasaran

No.	Bobot Jawaban					Skor
	5	4	3	2	1	
Faktor Produk dan Jasa						
N1	38	94	80	19	2	846
N2	39	76	90	26	2	823
N3	52	95	71	14	1	882
N4	44	80	89	19	1	846
Total						3.397
Faktor Harga						
N5	48	98	69	16	2	873
N6	33	95	95	9	1	849
N7	42	110	68	9	4	876

Total						2.598
Faktor Distribusi						
N8	41	84	92	15	1	848
N9	54	110	55	12	2	901
N10	44	110	72	7	0	890
Total						2.639
Faktor Komunikator/Promosi						
N11	59	119	50	5	0	931
N12	80	91	54	8	0	942
N13	53	116	50	14	0	907
Total						2.780
Skor Total						11414

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa faktor harga merupakan faktor terendah dengan total skor 2.598. Untuk variabel Stimulus Pemasaran diketahui bahwa penilaian responden mendapatkan skor aktual 11414 pada kategori tinggi. Persentase yang diperoleh adalah $11414 / (5 \times 13 \times 233) \times 100\% = 11414 / 15145 \times 100\% = 75,4\%$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini.



Gambar 3.2
Kategori variabel Stimulus Pemasaran

Gambaran Stimulus Lainnya

Berikut ini hasil perhitungan untuk kategori variabel Stimulus Lainnya dalam kuesioner penelitian.

$$\text{Nilai maksimum} = 5 \times 8 \times 233 = 9320$$

$$\text{Nilai minimum} = 1 \times 8 \times 23 = 1864$$

Interval = Nilai maksimum – Nilai minimum
 = 9320 – 1864
 = 7456

Jarak interval = Interval : Jumlah kategori
 = 7456 : 5
 = 1491,2

Berikut ini hasil perhitungan jawaban responden mengenai Stimulus Lainnya.

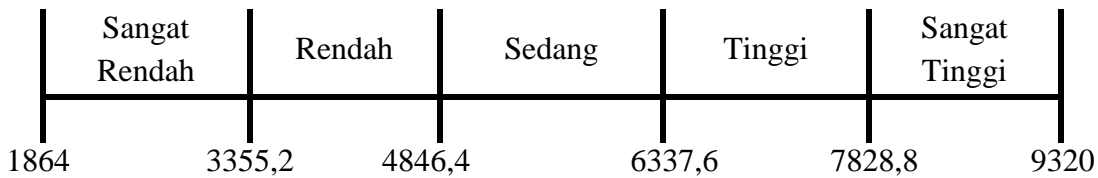
Tabel 3.7

Skor jawaban variabel Stimulus Lainnya

No.	Bobot Jawaban					Skor
	5	4	3	2	1	
Faktor Ekonomi						
N14	61	101	63	8	0	914
Faktor Teknologi						
N15	60	95	58	16	4	890
N16	53	89	73	15	3	873
Total						1.763
Faktor Politik						
N17	56	110	64	3	0	918
Faktor Budaya						
N18	57	106	58	12	0	907
N19	44	108	64	16	1	877
N20	41	61	86	36	9	788
N21	52	92	83	6	0	889
Total						3.461
Skor Total						7056

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa faktor ekonomi merupakan faktor terendah di variabel stimulus lainnya. Untuk skor total variabel *Stimulus Lainnya* diketahui bahwa penilaian responden

mendapatkan skor aktual 7056 pada kategori tinggi. Persentase yang diperoleh adalah $7056 / (5 \times 8 \times 233) \times 100\% = 7056 / 9320 \times 100\% = 75,7\%$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini.



Gambar 3.3

Kategori variabel Stimulus Lainnya

Gambaran keputusan pembelian

Berikut ini hasil perhitungan untuk kategori variabel keputusan pembelian dalam kuesioner penelitian.

$$\text{Nilai maksimum} = 5 \times 6 \times 233 = 6990$$

$$\text{Nilai minimum} = 1 \times 6 \times 233 = 1398$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \text{Nilai maksimum} - \text{Nilai minimum} \\ &= 6990 - 1398 = 5592 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak interval} &= \text{Interval} : \text{Jumlah kategori} \\ &= 5592 : 5 \\ &= 1118,4 \end{aligned}$$

Berikut ini hasil perhitungan jawaban responden mengenai keputusan pembelian.

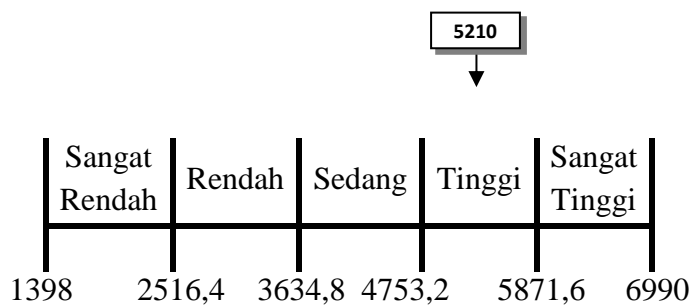
Tabel 3.8

Skor jawaban variabel keputusan pembelian

No.	Bobot Jawaban					Skor
	5	4	3	2	1	
Pengenalan Kebutuhan						
N22	56	102	59	16	0	897
Pencarian informasi						
N23	48	63	91	27	4	823

Evaluasi berbagai alternatif						
N24	44	102	61	24	2	861
Keputusan pembelian						
N25	41	103	78	11	0	873
Perilaku pasca pembelian						
N26	41	125	56	11	0	895
N27	37	106	73	16	1	861
Total						1.756
Skor Total						5210

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa skor terendah adalah faktor pencarian informasi dengan skor 823. Dan untuk skor total variabel keputusan pembelian diketahui bahwa penilaian responden mendapatkan skor aktual 5210 pada kategori tinggi. Persentase yang diperoleh adalah $5210 / (5 \times 6 \times 233) \times 100\% = 5210 / 6990 \times 100\% = 74,5\%$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini:



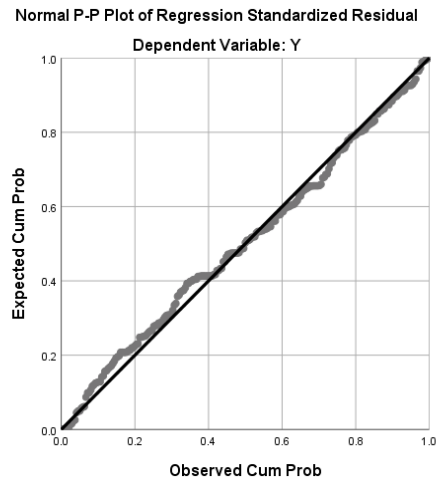
Gambar 3.4

Kategori variabel Keputusan Pembelian

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada penelitian ini, untuk mendeteksi apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan menggunakan *normal probability plot*. Suatu model regresi memiliki data berdistribusi normal apabila sebaran datanya terletak disekitar garis diagonal pada *normal probability plot* yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Berikut ini hasil analisis uji normalitas data.



Gambar 3.5 Normalitas Data

Berdasarkan grafik normalitas data, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai untuk prediksi variabel keputusan pembelian berdasarkan masukan variabel *Stimulus Pemasaran* dan *Stimulus Lainnya*. Data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal sehingga memenuhi persyaratan analisis regresi linier berganda.

Berikut ini hasil uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 3.9

Hasil uji normalitas data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		233
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.77912813
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.048
	Negative	-.054
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

-
- a. Test distribution is Normal.
 - b. Calculated from data.
 - c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas data, terlihat nilai residual memiliki nilai signifikan sebesar $0,200 > 0,05$ artinya data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas sudah terpenuhi untuk analisis regresi linier berganda.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas yang digunakan adalah dengan menghitung tolerance dan VIF. Dari hasil perhitungan komputer dengan program SPSS 25.0 diperoleh nilai *Tolerance* (terlampir) untuk masing-masing tahapan penelitian, peneliti kemukakan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Rekapitulasi Nilai Tolerance dan Nilai VIF untuk Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

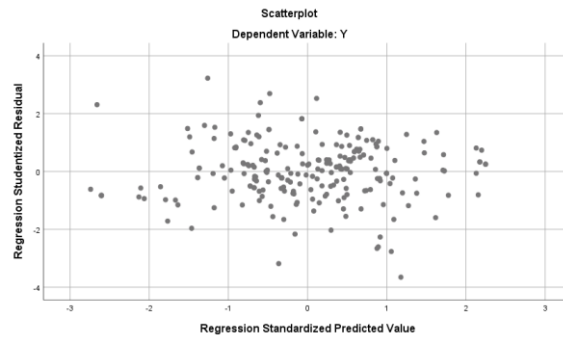
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	0,460	2,176
X2	0,460	2,176

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka diambil keputusan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat multikolinearitas antar variabel dan memenuhi persyaratan untuk analisis regresi linier berganda.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas menggunakan SPSS 25.0.



Gambar 3.6
Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di atas memperlihatkan bahwa data terpencah di sekitar angka 0 (0 pada sumbu Y), dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Dengan demikian, data tersebut dapat dikatakan bersifat homoskedastisitas/ tidak terjadi heteroskedastisitas dan memenuhi persyaratan untuk analisis regresi linier berganda.

Uji Autokorelasi

Berikut ini hasil uji autokorelasi menggunakan SPSS 25.0.

Tabel 3.11

Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,562

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,562 yang berada di antara -2 sampai +2 artinya tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian, data sudah memenuhi persyaratan untuk analisis regresi linier berganda.

Uji hipotesis pengaruh Stimulus Pemasaran dan Stimulus Lainnya terhadap keputusan pembelian

Uji t pengaruh secara parsial Stimulus Pemasaran dan Stimulus Lainnya terhadap keputusan pembelian

Dengan bantuan pengolahan komputer berdasarkan perhitungan SPSS 25.0 maka diperoleh nilai t hitung untuk pengujian hipotesis secara parsial sebagai berikut.

Tabel 3.12

Pengaruh secara parsial Stimulus Pemasaran dan Stimulus Lainnya terhadap keputusan pembelian
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,078	1,316		1,579	0,116
X1	0,207	0,036	0,387	5,824	0,000
X2	0,338	0,056	0,398	5,998	0,000

a. Dependent Variable: Y

Hasil analisis uji regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 2,078 + 0,207X_1 + 0,338X_2 + e$$

Persamaan regresi di atas artinya:

- Jika X1 dan X2 bernilai nol maka Y bernilai 2,078.
- Jika X1 meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan Y sebesar 0,207 dengan asumsi X2 bernilai konstan.
- Jika X2 meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan Y sebesar 0,338 dengan asumsi X1 bernilai konstan.

Berdasarkan tabel di atas untuk uji hipotesis secara parsial digunakan nilai t_{hitung} dibandingkan dengan nilai t_{tabel} .

1. Pengaruh Stimulus Pemasaran terhadap keputusan pembelian

Dengan bantuan pengolahan komputer berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh t_{hitung} sebesar 5,824. Sedangkan harga kritis nilai t_{tabel} pada α (0,05) dan $df = n-k = 233-3 = 230$ sebesar 1,970. Dengan demikian t_{hitung} (5,824) > t_{tabel} (1,970) atau Sig. (0,000) < α (0,05), artinya H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Stimulus Pemasaran terhadap keputusan pembelian.

2. Pengaruh Stimulus Lainnya terhadap keputusan pembelian

Dengan bantuan pengolahan komputer berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh t_{hitung} sebesar 5,998. Sedangkan harga kritis nilai t_{tabel} pada α (0,05) dan $df = n-k = 233-3 = 230$ sebesar 1,970. Dengan demikian t_{hitung} (5,998) > t_{tabel} (1,970) atau Sig. (0,000) < α (0,05), artinya H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh *Stimulus Lainnya* terhadap keputusan pembelian.

Uji F pengaruh secara simultan Stimulus Pemasaran dan Stimulus Lainnya terhadap keputusan pembelian

Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *Stimulus Pemasaran* dan *Stimulus Lainnya* terhadap keputusan pembelian dianalisis menggunakan uji F dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.13

Hasil perhitungan uji F pengaruh secara simultan Stimulus Pemasaran dan Stimulus Lainnya terhadap keputusan pembelian

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2055,677	2	1027,838	131,931	,000 ^b
Residual	1791,864	23	7,791		
Total	3847,541	25			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 131,931 sedangkan nilai F tabel dengan $df_1 = 2$, $df_2 = 233 - 2 - 1 = 230$ dan $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 3,035. Dengan demikian, $F_{hitung} (131,931) > F_{tabel} (3,035)$ atau $Sig. (0,000) < \alpha (0,05)$ maka H_0 ditolak artinya ada pengaruh secara simultan (bersama-sama) *Stimulus Pemasaran* dan *Stimulus Lainnya* terhadap keputusan pembelian.

Koefisien determinasi pengaruh Stimulus Pemasaran dan Stimulus Lainnya terhadap keputusan pembelian

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besar pengaruh secara simultan *Stimulus Pemasaran* dan *Stimulus Lainnya* terhadap keputusan pembelian dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3.14

Hasil perhitungan koefisien determinasi pengaruh *Stimulus Pemasaran* dan *Stimulus Lainnya* terhadap keputusan pembelian

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,731 ^a	0,534	0,530	2,79119

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi berganda antara *Stimulus Pemasaran* dan *Stimulus Lainnya* dengan keputusan pembelian sebesar 0,731 sehingga diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 53,4% ($0,731^2 \times 100\%$). Dengan demikian koefisien determinasinya sebesar 53,4% yang berarti keputusan pembelian sebesar 53,4% dipengaruhi oleh *Stimulus Pemasaran* dan *Stimulus Lainnya* sedangkan sisanya 46,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4. Kesimpulan

Berdasarkan perolehan data primer dari penyebaran kuesioner, maka dilakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui konsistensi jawaban responden dari waktu ke waktu, serta pengujian validitas untuk menyatakan sah atau tidaknya kuesioner. Hasil pengujian reliabilitas dan validitas dari data kuisisioner yang didistribusikan kepada konsumen Sentra Rrajut Binong Jati di Kota Bandung, menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan reliabel dan valid.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Stimulus Pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Rajutan Binong Jati. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi t_{hitung} sebesar 5,824. Sedangkan harga kritis nilai t_{tabel} pada α (0,05) dan $df = n-k = 233-3 = 230$ sebesar 1,970. Dengan demikian t_{hitung} (5,824) $>$ t_{tabel} (1,970) atau Sig. (0,000) $<$ α (0,05). **Hipotesis didukung.**
2. Stimulus Lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Rajutan Binong Jati. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi t_{hitung} sebesar 5,998. Sedangkan harga kritis nilai t_{tabel} pada α (0,05) dan $df = n-k = 233-3 = 230$ sebesar 1,970. Dengan demikian t_{hitung} (5,998) $>$ t_{tabel} (1,970) atau Sig. (0,000) $<$ α (0,05). **Hipotesis didukung.**

Stimulus Pemasaran dan Stimulus Lainnya secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Rajutan Binong Jati. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 131,931 sedangkan nilai F tabel dengan df 1 = 2, df 2 = $233 - 2 - 1 = 230$ dan $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 3,035. Dengan demikian, F hitung (131,931) $>$ F tabel (3,035) atau Sig. (0,000) $<$ α (0,05).

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Donald, R. C., & Pamela, S. S. (2003). *Business research methods*. Tata Mac Graw Hills, New Delhi.
- Kotler, P., & Amstrong, G. (2012). *Principles of Marketing Global 14th edition*. New Jersey: Prentice.
- Kotler, P., Keller, K. L., Koshy, A., & Jha, M. (2012). Analyzing consumer markets. *Marketing Management*, 173.
- Latan, H., & Ghozali, I. (2012). *Partial Least Square: Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Santoso, S. (2012). *Analisis SEM Menggunakan Amos*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. JAKARTA: ALFABETA.

Jurnal:

- Beato, M. C., & Pramudiana, Y. (2015). Pengaruh Stimulus Pemasaran Dan Non Stimulus Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Produk Indihome Di Pontianak. *eProceedings of Management*, 2(3).
- Danibrata, A. (2011). Pengaruh Integrated Marketing Communication Terhadap Brand Equity Pada Sebuah Bank Pemerintah di Jakarta. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 13(1), 21–38.
- Gigih Erlik Budiharja, R. (n.d.). Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua Di Kota Pati. *Jurnal STIE Semarang*, 8(2).
- Lin, N.-H., & Lin, B.-S. (2007). The effect of brand image and product knowledge on purchase intention moderated by price discount. *Journal of International Management Studies*, 2(2), 121–132.
- MUANAS, A. (2014). PENGARUH PRODUK, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL DI PT. BUANA INDOMOBIL TRADA SURABAYA.
- Rianto Situmorang, J. (n.d.). Analisis Faktor Stimuli Pemasaran dalam Keputusan Pembelian Sepeda Motor Baru oleh Konsumen di Kota Jakarta. *Research Reports in the Humanities and Social Sciences*, 2.

Situs Internet:

- Indonesia, U. R. (2014). UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN.
- OJK. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>

Dokumen Koperasi:

- KIRBI. (2017). *Data Koprasi Industri Rajutan Binong Jati*. Bandung.

BIAYA OPERASI DAN DISTRIBUSI PETIKEMAS DOMESTIK TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA DI BJTI PORT

Oleh: **Indriana Kristiawati**

indriana.k@stiamak.ac.id

STIA DAN MANAJEMEN KEPELABUHAN BARUNAWATI SURABAYA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara biaya operasi dan saluran distribusi terhadap produktivitas kerja pada sektor bongkar muat petikemas dengan rumusan masalah : 1) Apakah biaya operasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja ; 2) Apakah distribusi petikemas domestik berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja ; 3) Apakah biaya operasi dan distribusi petikemas domestik secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan tehnik analisis linear berganda dan mengambil sampel dengan cara slovin sebanyak 67 orang (N=67)

Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Variabel Biaya Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Produktivitas Kerja, artinya bila ada peningkatan biaya operasi belum tentu diikuti dengan peningkatan produktivitas kerja ; 2) Variabel Distribusi Petikemas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Produktivitas Kerja, artinya jika terdapat peningkatan pada distribusi petikemas maka akan terjadi peningkatan pula pada produktivitas kerja ; 3) Variabel Biaya Operasi dan Distribusi Petikemas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Produktivitas Kerja, artinya bila biaya operasi dan distribusi petikemas terjadi peningkatan maka produktivitas kerja mengalami peningkatan juga.

Kata Kunci : Biaya Operasi, Distribusi Petikemas, Produktivitas Kerja

ABSTRACT

This study aims to determine the relationship between operating costs and distribution channels to work productivity in the container loading and unloading sector problem: 1) Does operating costs have a significant effect on work productivity; 2) Does domestic container distribution have a significant effect on work productivity; 3) Do the operating costs and distribution of domestic containers simultaneously have a significant effect on work productivity. This type of research is quantitative research that uses multiple linear analysis techniques and takes samples by means of slovin as many as 67 people (N = 67).

The results of the study state that: 1) Operating Cost Variables have no significant effect on Work Productivity variables, meaning that if there is an increase in operating costs not necessarily followed by an increase in work productivity; 2) Container Distribution Variables have a positive and significant effect on Work Productivity variables, meaning that if there is an increase in container

distribution there will also be an increase in work productivity; 3) Variable Operating Costs and Distribution of Container together have a positive and significant effect on Work Productivity variables, meaning that if the container operating and distribution costs increase, the work productivity has increased as well.

Keywords: Operating Costs, Container Distribution, Work Productivity

PENDAHULUAN

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan, dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi (UU 17/2008 tentang Pelayaran). Salah satu operator pelabuhan yang merupakan anak perusahaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III adalah PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia Port (PT. BJTI Port), yang memulai aktivitas sebagai *port terminal operator* terhitung sejak awal Januari 2002. Pendirian PT. BJTI dilakukan melalui *spin off* dari salah satu unit bisnis PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang Pelabuhan Tanjung Perak yang bernama Usaha Terminal Serbaguna (USTER) dengan fokus usaha pelayanan jasa *cargo and container handling* pada terminal konvensional. PT. BJTI Port harus melakukan penyediaan dan pemeliharaan kelayakan fasilitas pelabuhan, melayani sesuai standar pemerintah, menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, memelihara kelestarian lingkungan, memenuhi kewajiban sesuai konsensi dalam perjanjian dan mematuhi ketentuan perundang-undangan. Pelayanan jasa pelabuhan membutuhkan kecepatan, peningkatan produktivitas bongkar muat, dan memiliki daya saing. PT. BJTI Port selama ini telah melayani kegiatan bongkar muat barang dan petikemas baik internasional maupun domestik meliputi petikemas dan non-petikemas. Namun sejak tahun 2012 PT. BJTI Port sudah tidak melayani kegiatan petikemas internasional lagi dan pada tahun 2014 juga sudah tidak melayani kegiatan non-petikemas (curah) hingga saat sekarang ini, yang hanya berfokus pada pelayanan bongkar muat kontainer domestik saja.

Dalam melaksanakan usahanya, layaknya perusahaan pada umumnya, PT. BJTI Port selalu melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap biaya operasi, distribusi produk dan produktivitas kerja perusahaan, agar perusahaan bisa berjalan lancar dan mampu meningkatkan keuntungan secara wajar sesuai arah kebijakan yang diambilnya. Untuk itu ketiga komponen pokok tersebut, biaya operasi, distribusi produk dan produktivitas kerja menjadi satu kesatuan didalam rangka mencapai tujuan utama perusahaan.

Biaya operasi lebih merujuk pada pada biaya dasar sementara biaya operasional merujuk pada biaya dasar dan segenap biaya yang menunjangnya. Hal lain yang terkait dengan biaya operasi adalah distribusi produk, dalam hal ini PT. BJTI Port memiliki produk pelayanan bongkar muat kontainer selaku pelaku usaha yang menjadi operator pelabuhan dengan kata lain PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia harus memperhatikan juga distribusi produknya yaitu distribusi petikemas domestik.

Adapun Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. BJTI Port mencatat biaya operasi per-Triwulannya pada tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1. Biaya Operasi Per-Triwulan Tahun 2015 – 2016 PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia Port

	TAHUN	
	2015	2016
Triwulan 1	156.782.953	191.455.305
Triwulan 2	186.166.822	222.695.570
Triwulan 3	175.701.606	211.739.210
Triwulan 4	184.953.920	221.901.692
Total	703.605.361	847.791.777

Sumber : Divisi Keuangan PT. BJTI Port

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa biaya operasi pada tahun 2015 di triwulan I sebesar 156.782.953, di triwulan II sebesar 186.166.822, di triwulan III sebesar 175.701.606 dan di triwulan IV sebesar 184.953.920. Pada tahun 2016 tercatat biaya operasi di triwulan I sebesar 191.455.305, di triwulan II sebesar 222.695.570, di triwulan III sebesar 211.739.210 dan di triwulan IV sebesar 221.901.692. Dari biaya operasi per-triwulan I sd IV pada tahun 2015 mengalami naik turun, begitupula di triwulan I sd IV pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan dan penurunan, namun apabila dilihat dari total biaya operasi pada tahun 2015 sebesar 703.605.361 dibandingkan dengan total biaya operasi pada tahun 2016 sebesar 847.791.777 terjadi peningkatan sebesar 144.186.416 atau sebesar 20,49%.

Tabel 2. Kegiatan Distribusi Lapangan Dan Bongkar Muat Kapal

Per-Triwulan Tahun 2015 – 2016 PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia Port

	T A H U N 2015		TAHUN 2016	
	Lapangan (CY)	Kapal (TL)	Lapangan (CY)	Kapal (TL)
Triwulan 1	41.368	248.411	54.394	264.410
Triwulan 2	67.412	293.557	78.446	296.387
Triwulan 3	59.364	282.285	58.877	271.713
Triwulan 4	61.970	304.868	74.933	315.949
Total	230.114	1.129.141	266.650	1.148.459

Sumber : Divisi Operasional PT. BJTI Port

Dari tabel di atas tercatat kegiatan distribusi lapangan pada tahun 2015 di triwulan I sebesar 41.368 TEUs, di triwulan II sebesar 67.412 TEUs, di triwulan III sebesar 59.364 TEUs, dan di triwulan IV sebesar 61.970 TEUs. Pada tahun 2016 tercatat distribusi di triwulan I sebesar 54.394 TEUs, di triwulan II sebesar 78.446 TEUs, di triwulan III sebesar 58.877 TEUs, dan di triwulan IV sebesar 74.933 TEUs. Apabila dilihat dari total distribusi kegiatan lapangan (CY) pada tahun 2015 sebesar 230.114 TEUs dibandingkan dengan total distribusi kegiatan lapangan (CY) pada tahun 2016 sebesar 266.650 TEUs terjadi peningkatan sebesar 36.536 TEUs atau sebesar 15,87%.

Untuk distribusi bongkar muat kapal tercatat pada 2015 di triwulan I sebesar 248.411 TEUs, di triwulan II sebesar 293.557 TEUs, di triwulan III sebesar 282.285 TEUs dan pada triwulan IV sebesar 304.868 TEUs. Sedangkan pada tahun 2016 di triwulan I sebesar 264.410 TEUs, di triwulan II sebesar 296.387 TEUs, di triwulan III sebesar 271.713 TEUs dan pada triwulan IV sebesar 315.949 TEUs.

Apabila dilihat dari total kegiatan produksi bongkar muat pada tahun 2015 sebesar 1.129.141 TEUs dibandingkan dengan total kegiatan produksi bongkar muat pada tahun 2016 sebesar 1.148.459 TEUs terjadi peningkatan sebesar 19.318 TEUs atau sebesar 1,71%.

Dari ketiga variabel di atas terjadi perbedaan trend kenaikan pada masing-masing variabel yaitu pada biaya operasi dari tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 20,49%, pada distribusi lapangan (CY) dari tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 15,87% sedangkan pada kegiatan distribusi bongkar muat kapal dari tahun 2015 ke tahun 2016 hanya terjadi kenaikan sebesar 1,71% saja, Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Apakah biaya operasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja ?(2)Apakah distribusi petikemas domestik berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja ?(3) Apakah biaya operasi dan distribusi petikemas domestik secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja ?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh biaya operasi terhadap produktivitas kerja (2) Untuk mengetahui pengaruh distribusi petikemas domestik terhadap produktivitas kerja. (3)Untuk mengetahui apakah biaya operasi dan distribusi petikemas domestik secara bersamaan berpengaruh terhadap produktivitas kerja

TINJAUAN TEORITIS

1. Manajemen Operasi

Pengertian Manajemen Produksi dan Operasi menurut Assauri (2008:12), mengatakan bahwa: “Manajemen Produksi dan Operasi yaitu kegiatan yang mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat dan sumber daya dana serta bahan, secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan (*utility*) sesuatu barang atau jasa”. Sedangkan menurut Handoko (2000:3) “Manajemen produksi dan operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal, penggunaan sumber daya-sumber daya (atau sering disebut faktor-faktor produksi), tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah dan sebagainya dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi adalah suatu desain operasi dan perbaikan system produksi serta perubahan dari sumber daya yang dimiliki perusahaan (meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan input manajemen) menjadi *output* berupa barang atau jasa yang diinginkan.

2. Biaya Operasi

Dalam menjalankan aktifitasnya, suatu perusahaan akan mengeluarkan berbagai jenis biaya diantaranya adalah biaya bahan, upah langsung dan biaya overhead dimana ketiga biaya ini disebut biaya produksi. Biaya lainnya untuk kelancaran penjualan atau pemasaran dan administrasi biaya operasional. Biaya dapat diartikan sebagai biaya perolehan, harga pokok atau juga dapat diartikan sebagai semua pengorbanan mulai dari bahan baku kemudian barang dalam proses sampai barang tersebut bisa dijual. Pengertian biaya ini akan kabur bila dibandingkan dengan ongkos (*expense*), dimana kedua pengertian ini sering digunakan secara rancu.

a. Pengertian Perencanaan Dan Pengawasan Biaya Operasi

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dimasa yang akan datang untuk menghadapi berbagai ketidakpastian dan alternatif yang mungkin terjadi. Sedangkan tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan sesuai dengan interuksi-interuksi yang ditetapkan. Tahap berikutnya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan-tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun pada waktu yang akan datang.

b. Indikator Biaya operasi

Indikator yang digunakan untuk mengukur biaya operasi menurut Kuswadi (2008:76) diantaranya sebagai berikut :

1. Harga pokok penjualan adalah beban atau biaya perolehan barang yang terdiri atas harga pembelian barang dan semua biaya yang dikeluarkan hingga barang siap dijual.
2. Biaya umum dan administrasi adalah semua biaya atau pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan kegiatan umum dan administrasi di luar biaya penjualan.

Biaya penjualan adalah semua biaya yang terjadi di bagian pemasaran dalam rangka menjual produk/jasa.

3. Distribusi Petikemas Domestik

Petikemas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan secara harfiah yang terdiri dari dua kata yaitu peti dan kemas. Peti adalah suatu kotak berbentuk geometrik yang terbuat dari bahan-bahan alam (kayu, besi, baja, dll). Sedangkan kemas merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pengepakan atau kemasan. Sehingga petikemas atau yang dikenal dengan *container* adalah suatu kotak besar berbentuk empat persegi panjang terbuat dari bahan campuran baja dan tembaga atau bahan lainnya (aluminium, kayu/*fiber glass*) yang tahan terhadap cuaca.

Distribusi Petikemas

Distribusi petikemas mencakup beberapa daerah dikawasan Indonesia Timur. Sebagian besar wilayah ini merupakan wilayah dengan geografis yang berupa dataran tinggi dan pegunungan. Hal itulah yang menyebabkan truk petikemas tidak dapat melalui akses jalan tersebut dan lebih memilih menggunakan truk yang berkapasitas lebih kecil

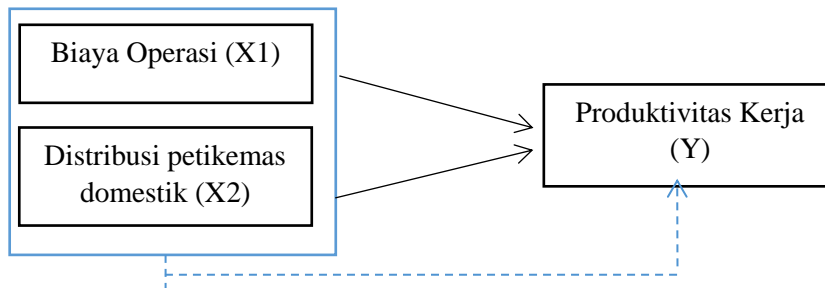
4. Produktivitas Kerja

Produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental yang selalu memiliki pandangan bahwa cara kerja yang dilakukan sekarang harus lebih baik dari cara kerja yang lalu dan hasil yang dicapai untuk ke depan harus lebih banyak atau lebih baik dari yang diperoleh sekarang. Sikap kemudian kemudian membuat seseorang selalu mencari perbaikan dan peningkatan. Secara konseptual, produktivitas dianggap sebagai pemanfaatan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang terdiri dari berbagai faktor yaitu tenaga kerja, tanah dan modal termasuk mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, tenaga listrik dan kemajuan teknologi.

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada tinjauan teori sehingga dapat digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut:

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1.

Kerangka Berfikir

- Parsial
- Simultan

Hipotesis

Adapun yang menjadi hipotesa penelitian sebagai berikut :

- H1. Biaya operasi diduga berpengaruh terhadap produktivitas kerja di PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia
- H2. Distribusi petikemas domestik diduga berpengaruh terhadap produktivitas kerja di PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia
- H3. Biaya operasi dan distribusi petikemas domestik, diduga secara beramaan berpengaruh terhadap produktivitas kerja di PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang digunakan dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah kausal. Penelitian kausal menurut Silalahi (2009:33) adalah “penelitian yang meneliti hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian kausal akan dijelaskan pengaruh perubahan variasi nilai dalam satu atau lebih variabel lain. Artinya, apakah perubahan nilai dalam suatu variabel menyebabkan perubahan nilai dalam variabel lain.”.

Populasi Dan Teknik Sampling Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai operasional PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Port bagian keuangan dan *Manajer On Duty (MOD)* & stafnya, terdiri dari Foreman, Plannership, dan Checker yang berjumlah 80 orang. Pengambilan sampel biasanya dilakukan untuk menyimpulkan sesuatu dari sebuah populasi, sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang teliti. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tehnik slovin, (dalam Riduwan, 2008 : 65) dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = sampel

N = populasi

e = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05.

Karena populasi penelitian berjumlah 80 orang dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5% maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah :

$n = N / (1 + N e^2) \Leftrightarrow 80 / (1 + 80 \times 0,05^2) = 66,66 \gg$ dibulatkan menjadi 67 responden.

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama yang diteliti yaitu:

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : biaya operasi (X1) dan distribusi petikemas domestik (X2)
2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : produktivitas kerja (Y)

Indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Adapun indikator biaya operasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Biaya Pegawai
- 2) Biaya Operasional
- 3) Biaya Pemeliharaan

B. Distribusi Petikemas adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengoptimalkan arus kelancaran bongkar muat di lapangan penumpukan / CY untuk lebih menunjang kegiatan bongkar muat secara langsung. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur distribusi petikemas ialah :

- 1) Keluar masuknya kontainer di lapangan / CY
- 2) Lamanya masa timbun kontainer di lapangan
- 3) Daya tampung dan realisasi pemakaian lapangan / CY

C. Produktivitas kerja menurut Dewi dan Aeni (2012:93) merupakan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau sebagai pembanding antara *input* dan *output*. Indikator yang digunakan untuk mengukur produktivitas antara lain :

- 1) Hasil kerja pegawai

- 2) kualitas kerja pegawai
- 3) Ketepatan dan kecepatan kerja pegawai

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini :

1. Data primer, merupakan data langsung yang diperoleh dari sumber penelitian baik dari hasil penyebaran kuisisioner maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian. Data primer ini akan dihitung dan dianalisa hasilnya dengan berbagai instrumen penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya
2. Data sekunder, merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber yang secara tidak langsung dengan obyek penelitian seperti data tentang sejarah perusahaan dan berbagai literatur yang mendukung penulisan hasil penelitian ini yang dapat diperoleh dari studi pustaka

Teknik Pengumpulan Data

Instrumen atau alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuisisioner (angket). Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen

1. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara mengutip berbagai pendapat ahli atau penulis buku dari berbagai literatur yang mendukung materi penulisan laporan penelitian ini.

2. Penyebaran kuisisioner (angket)

Adapun cara penyebaran kuisisioner pada responden penelitian ini, yaitu karyawan bagian bongkar muat sebagai berikut : (1) Membagikan kuisisioner kepada responden (2) Peneliti memberikan penjelasan dan membimbing responden tentang cara pengisian kuisisioner (3) Kuisisioner yang telah diisi oleh responden dikumpulkan, diberi skor dan kemudian ditabulasi

3. Wawancara

langkah-langkah teknik pengumpulan data dengan wawancara sebagai berikut :

- a) Merumuskan tujuan wawancara
- b) Membuat kisi-kisi dan pedoman wawancara
- c) Menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan
- d) Melaksanakan wawancara

4. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mendokumentasikan, mencatat dan mengutip beberapa pernyataan yang berkaitan dengan berbagai data yang ada di perusahaan dan yang menunjang penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Karakteristik Responden

a. Data Responden Penelitian Berdasarkan Usia

Tabel 3. Data Responden Penelitian Berdasarkan Usia Tahun 2018

Klasifikasi Usia	JUMLAH ORANG	%
20 Tahun sd 25 Tahun	10 Orang	14,92%
26 Tahun sd 30 Tahun	15 Orang	22,38%
31 Tahun sd 35 Tahun	25 Orang	37,32%
Diatas Usia 35 Tahun	17 Orang	25,38%
Total	67 Orang	100%

Sumber : PT BJTI Port

b. Data Responden Penelitian Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4. Data Responden Penelitian Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	%
SMA	7 Orang	10,44%
DIPLOMA	35 Orang	52,24%
STRATA 1	25 Orang	37,32%
Total	67 Orang	100%

Sumber : PT BJTI Port

c. Data Responden Penelitian Berdasarkan Pengalaman Kerja

Tabel 5. Data Responden Penelitian Berdasarkan Pengalaman Kerja Tahun 2018

Pengalaman di Tempat Lain	JUMLAH ORANG	%
Tidak Pernah	15 Orang	22,38%
1 Kali Pengalaman	37 Orang	55,23%
2 Kali Pengalaman	10 Orang	14,93%
Lebih dari 2 Kali Pengalaman	5 Orang	7,46%
Total	67 Orang	100%

Sumber : PT BJTI Port

d. Data Responden Penelitian Berdasarkan Masa Kerja

Tabel 6. Data Responden Penelitian Berdasarkan Masa Kerja Tahun 2018

Masa Kerja	JUMLAH ORANG	%
1 Tahun sd 5 Tahun	15 Orang	22,38%
6 Tahun sd 10 Tahun	20 Orang	29,85%
11 Tahun sd 15 Tahun	22 Orang	32,84%
Diatas 15 Tahun	10 Orang	14,93%
Total	67 Orang	100%

Sumber : PT BJTI Port

e. Data Responden Penelitian Berdasarkan Jam Kerja

Tabel 7. Data Responden Penelitian Berdasarkan Jam Kerja Tahun 2018

	Hari Ke 1	Hari Ke 2	Hari Ke 3	Hari Ke 4	Hari Ke 5	Hari Ke 6	Hari Ke 7	Hari Ke 8
Shift 1 (08.00- 16.00)	Grup A	Grup A	Grup B	Grup B	Grup C	Grup C	Grup D	Grup D
Shift 2 (16.00- 24.00)	Grup D	Grup D	Grup A	Grup A	Grup B	Grup B	Grup C	Grup C
Shift 2 (00.00- 08.00)	Grup C	Grup C	Grup D	Grup D	Grup A	Grup A	Grup B	Grup B
OFF (libur)	Grup B	Grup B	Grup C	Grup C	Grup D	Grup D	Grup A	Grup A

Sumber : PT BJTI Port

2. Uji Hipotesis

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	BI.OP	D.PK.DOM	PROD.PK
N	67	67	67
Normal Parameters ^a	Mean	13.1642	12.9851
	Std. Deviation	1.55307	1.62828
Most Extreme Absolute Differences		.182	.168
	Positive	.131	.108
	Negative	-.182	-.168
Kolmogorov-Smirnov Z	1.490	1.376	1.555
Asymp. Sig. (2-tailed)	.034	.045	.026

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data diolah

Hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel biaya operasional (X1), variabel distribusi peti kemas domestik dan variabel produktivitas bongkar muat (Y) masing-masing sebesar 0,034, 0,045, dan 0,026 > 0,025. (Trihendradi, 2011). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan data penelitian terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 9. Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.265	1.164		1.946	.056					
BI.OP	.095	.110	.088	.859	.394	.539	.229	.154	.583	1.352
D.PK.D OM	.732	.103	.728	7.137	.000	.741	.631	.531	.692	1.445

a. Dependent Variable: PROD.PK

Dari tabel di atas dapat diringkas sebagai berikut :

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Biaya Operasi	0,583	1,352	Tidak ada masalah multikolinearitas
Distribusi Petikemas	0,692	1,445	Tidak ada masalah multikolinearitas

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 10. maka dapat diketahui bahwa nilai tolerance Biaya Operasi adalah sebesar 0,584 dengan VIF 1,352 sedangkan untuk Distribusi Petikemas nilai tolerance sebesar 0,692 dengan VIF 5,007. Hasil tersebut menunjukkan nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka variabel penelitian dianggap bebas dari gejala multikolinieritas. Sebagaimana hasil analisis di atas, dapat dinyatakan bahwa variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan tidak mengalami gangguan multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 11. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. Change	
1	.788 ^a	.621	.609	1.09137	.621	52.371	2	64	.000	1.802

a. Predictors: (Constant), D.PK.DOM, BI.OP

b. Dependent Variable: PROD.PK

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 11. maka dapat dilihat nilai Durbin Watson diperoleh = 1,802, nilai ini dibandingkan dengan nilai statistik Durbin Watson (tabel) menggunakan nilai signifikansi 5%. Jumlah sampel 67 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2). Berdasarkan tabel Durbin Watson 65 dengan signifikansi 5% diperoleh nilai dl= 1,538 dan du= 1,665. Nilai DW 1,802 lebih besar dari batas atas (du) yaitu 1,665 dan kurang dari 4 – du = 4 – 1,665 =2,335, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif dan negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 12. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.747	.698		2.501	.015
	VAR00001	-.064	.057	-.166	-1.121	.266
	VAR00002	.004	.056	.011	.075	.941

a. Dependent Variable: RES_2

Dari tabel di atas dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t hitung	p-value	Sig	Kesimpulan
Biaya Operasi	1,121	p>0,05	0,266	Tdk ada masalah heteroskedastisitas
Distribusi Petikemas	0,075	p>0,05	0,941	Tdk ada masalah heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, sehingga memenuhi persyaratan dalam analisis regresi.

5. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh perbedaan dari suatu variabel terhadap variabel lainnya, dalam hal ini adalah variabel biaya operasi dan distribusi petikemas terhadap produktivitas kerja sebagai variabel intervening dengan rumusan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan

Y = Produktivitas kerja

X1 = Biaya Operasi

X2 = Distribusi petikemas domestik

β_0 = Konstanta

$\beta_{1,2}$ = Koefisien regresi

e = Nilai eror

Berdasarkan analisis diperoleh hasil analisis sebagai berikut :

Tabel 14. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.265	1.164		1.946	.056					
BI.OP	.095	.110	.088	.859	.394	.539	.229	.154	.583	1.352
D.PK.D OM	.732	.103	.728	7.137	.000	.741	.631	.531	.692	1.445

a. Dependent Variable:
PROD.PK

Berdasarkan tabel.14 diperoleh persamaan regrasi sebagai berikut :

$$Y = 2,265 + 0,095 X_1 + 0,732 X_2 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 2,265 artinya jika variabel independen dianggap konstan, maka produktivitas kerja yang dihasilkan sebesar 2,265 point.
- Koefisien regresi biaya operasi (X1) sebesar 0,095, artinya jika biaya operasi mengalami peningkatan sebesar 1 point akan menaikkan produktivitas kerja sebesar 0,095 point dan sebaliknya.
- Koefisien regresi distribusi petikemas (X2) sebesar 0,732, artinya jika distribusi petikemas mengalami peningkatan sebesar 1 point akan menaikkan produktivitas kerja sebesar 0,732 point dan sebaliknya.

6. Uji Ketepatan Model (Goodness Of Fit Test)

1. Koefisien determinasi (Adjusted R²)

Tabel 15. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.788 ^a	.621	.609	1.09137	.621	52.371	2	64	.000	1.802

a. Predictors: (Constant), D.PK.DOM, BI.OP

Dari hasil uji tersebut, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (Adjusted R Square) yang diperoleh sebesar 0,609. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Biaya Operasi dan Distribusi Petikemas dapat menjelaskan peningkatan Produktivitas Kerja sebesar 60,90 %. Sedangkan sisanya 39,10% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model analisis penelitian ini.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 16. ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	124.756	2	62.378	52.371	.000 ^a
	Residual	76.229	64	1.191		
	Total	200.985	66			

a. Predictors: (Constant), D.PK.DOM, BI.OP

b. Dependent Variable: PROD.PK

Berdasarkan tabel 16. maka dapat dilihat hasil Fhitung menunjukkan nilai sebesar 52,371 lebih besar dari Ftabel sebesar 3,142 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel Biaya Operasi dan Distribusi Petikemas terhadap Produktivitas Kerja atau bisa juga dikatakan ada pengaruh secara simultan antara variabel Biaya Operasi dan Distribusi Petikemas terhadap Produktivitas Kerja.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan analisis diperoleh hasil analisis sebagai berikut :

Tabel 17. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.265	1.164		1.946	.056					
BI.OP	.095	.110	.088	.859	.394	.539	.229	.154	.583	1.352
D.PK.DOM	.732	.103	.728	7.137	.000	.741	.631	.531	.692	1.445

a. Dependent Variable:
PROD.PK

Dari data di atas, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut ini :

- a. Hasil t hitung Biaya Operasi (X1) sebesar 0.859 sedangkan t tabel = 1,997, maka nilai t hitung < t tabel. Sementara nilai signifikansi t hitung variabel Biaya Operasi (X1) sebesar 0,397, artinya > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti Biaya Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja (Y).
- b. Hasil t hitung Distribusi Petikemas (X2) sebesar 7,137 sedangkan t tabel = 1,997, maka nilai t hitung > t tabel. Sementara nilai signifikansi t hitung variabel Distribusi Petikemas (X2) sebesar 0,000, artinya < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti Distribusi Petikemas berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja (Y).

Pembahasan

1. Pengaruh Biaya Operasi Terhadap Produktivitas Kerja

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa t hitung Biaya Operasi (X_1) sebesar 0.859 sedangkan t tabel = 1,997, maka nilai t hitung $<$ t tabel. Sementara nilai signifikansi t hitung variabel Biaya Operasi (X_1) sebesar 0,397, artinya $>$ 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti Biaya Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja (Y).

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winarso (2014) yang berjudul “Analisis Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas PT. Industri Telekomunikasi Indonesia” yang menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh pada produktivitas yang berdampak pula pada profit perusahaan. Bila biaya operasional menurun akan berdampak pada menurunnya hasil produktivitas, dan berimbas pada menurunnya profit perusahaan. Sebaliknya bila biaya operasional meningkat, akan meningkatkan pula hasil produktivitas dan berimbas pada naiknya profit perusahaan.

Kondisi yang terjadi di PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia Port yaitu adanya peningkatan biaya operasi dikarenakan faktor-faktor yang tidak secara langsung menunjang produktivitas kerja atau dikarenakan menghadapi kendala kegiatan sehingga meskipun terjadi peningkatan biaya operasi namun tidak meningkatkan produktivitas kerja. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan biaya operasi itu adalah :

- 1) Adanya waiting time akibat kapal terlambat sandar dan atau berlabuh.
- 2) Adanya idle time akibat kerusakan alat bongkar muat, menunggu armada pelayaran yang terbatas, dan menunggu petikemas dari lokasi yang jauh.
- 3) Adanya pembatalan gang kerja buruh namun perusahaan harus tetap membayar tenaga kerja bongkar muat (TKBM)
- 4) Turun gerimis atau hujan yang menyebabkan perusahaan harus membayar uang lembur sebagai kompensasi cuaca gerimis atau hujan
- 5) Kesalahan pengaturan atau penataan petikemas yang mengakibatkan banyaknya kegiatan shifting (bongkar ulang) yang berdampak pada waiting time dan penggunaan bahan bakar alat bongkar muat

2. Pengaruh Distribusi Petikemas Terhadap Produktivitas Kerja

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa t hitung Distribusi Petikemas (X_2) sebesar 7,137 sedangkan t tabel = 1,997, maka nilai t hitung $>$ t tabel. Sementara nilai signifikansi t hitung variabel Distribusi Petikemas (X_2) sebesar 0,000, artinya $<$ 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Distribusi Petikemas berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja (Y).

Hal ini sesuai seperti apa yang dijelaskan oleh Firmansyah Kurniadai (2010) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Biaya Promosi Dan Distribusi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan, dimana diungkapkan bahwa peningkatan pendistribusian produk sudah pasti akan meningkatkan produktivitas kerja, terutama bagian produksi dan pemasaran. Adapun kondisi yang terjadi di PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Port yang berkaitan dengan peningkatan distribusi adalah :

- 1) Pemberlakuan tingkatan tarif Masa Timbun petikemas di lapangan (Container Yard) yang berdampak pada perencanaan dan kegiatan pelayaran untuk segera mempersingkat masa timbun petikemasnya sehingga siklus/pendistribusian petikemas di lapangan menjadi lebih cepat
- 2) Pemberlakuan syarat 75% petikemas wajib timbun agar kapal bisa sandar berdampak pada pengoptimalan lahan (space) kosong
- 3) Pemberlakuan syarat wajib timbun bagi petikemas berpendingin (frozen food) lebih mengoptimalkan lapngan rifer dalam menanmpung petikemas berpendingin

Untuk hubungan simultan variabel biaya operasi dan variabel distribusi petikemas yang secara bersama-sama berpengaruh signifikan pada produktivitas kerja bongkar muat bisa dibuktikan pada hasil uji F diperoleh Fhitung menunjukkan nilai sebesar 52,371 lebih besar dari Ftabel sebesar 3,142 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, artinya jika biaya operasi dan distribusi petikemas terjadi peningkatan maka produktivitas kerja bisa bongkar muat mengalami peningkatan juga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Variabel Biaya Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Produktivitas Kerja, artinya apabila terjadi peningkatan terhadap biaya operasi tidak serta merta dapat meningkatkan produktivitas kerja.
2. Variabel Distribusi Petikemas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Produktivitas Kerja, artinya jika terdapat peningkatan pada Distribusi Petikemas maka Produktivitas Kerja akan meningkat.
3. Variabel Biaya Operasi dan Distribusi Petikemas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Produktivitas Kerja dikarenakan pada hasil uji F diperoleh nilai Fhitung menunjukkan nilai sebesar 52,371 lebih besar dari Ftabel sebesar 3,142. Artinya jika Biaya Operasi dan Distribusi Petikemas terjadi peningkatan maka Produktivitas Kerja bisa mengalami peningkatan juga

Saran

Berikut ini adalah saran-saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian:

1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan maka perusahaan sebaiknya menggunakan metode pelatihan yang tepat pada karyawan. Dengan metode pelatihan yang tepat karyawan dapat dengan mudah memahami isi dari materi-materi pelatihan sehingga lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan
2. Perusahaan harus lebih cermat dalam melakukan perencanaan kegiatan untuk menekan biaya operasi tanpa harus berdampak pada menurunnya produktivitas kerja bongkar muat
3. Perhitungan untuk perencanaan biaya operasi hendaknya mempertimbangkan pendistribusian petikemas dan hasil produkstivitas kerja bongkar muat sehingga tidak terjadi overall biaya operasi
4. Perusahaan juga harus tegas dalam pelaksanaan aturan pendistribusian petikemas, terutama tentang aturan kekurangan armada pelayaran dalam kegiatan bongkar maka pelayaran harus

menerima apabila kontainer bongkarannya ditimbun terlebih dahulu di lapangan (Container Yard) guna memperlancar kegiatan bongkar muat

5. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan ada yang akan meneliti tentang bagaimana distribusi petikemas bisa dioptimalkan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bagi perusahaan, bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja semata

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Anugrah Saputra, 2014, *Pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian kependuan divisi pandu bandar utama pada PT IPC Pelabuhan Indonesia (Cabang Tanjung Priok)* Skripsi : Universitas Airlangga. Surabaya
- Assauri, Sofjan 2008, *Manajemen Produksi Dan Operasi*. Earlangga, Jakarta
- Carter, William K dan Usry, Mitton F. 2008. *Akuntansi Biaya II*. Edisi 14. Jakarta:Salemba Empat
- Gunawan, Rudi, Sya'ad Afifuddin. 2008. *Analisis Determinan Volume Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Belawan*. Jurnal MEPA Ekonomi, Volume 2, No. 2.
- Isyandi, B, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Global*. Pekanbaru, Unri Press.
- Hansen dan Mowen, 2009. *Akutansi Manajemen*, Edisi Kedelapan, Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Harahap, Sofyan Syafri 2010 *.Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Cet 11. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Herjanto, Eddy, 2008. *Manajemen Operasi*, Edisi Ketiga, Jakarta : Grasindo
- Handoko, T. Hani, 2008, *Manajemen Daya Personalia dan Sumber Manusia*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, 2010. *Organisasi Dan Motivasi*. Bumi Aksara : Jakarta
- Henry Simamora, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Ketiga. Jogjakarta: STIE YKPN
- Heizer, Jay and Render, Barry, 2001, *Operation Management*, Sixth Edition, New Jersey, Prentice Hall International
- Kotler, Philip. 2008. *Manajemen Pemasaran*, Edisi 12 Jilid 2. Jakarta : Indeks
- Ravianto, J, 2010, *Produktivitas dan Pengukuran*, Earlangga, Jakarta
- Riduwan dan Lestari, 1997, *Dasar-Dasar Statistika*, Alfabeta, Bandung
- Supriyono, 2010, *Analisis Kinerja Terminal Peti Kemas Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya*. Skripsi : Universitas Diponegoro. Semarang
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Bisnis*, cetakan ke-16, Bandung, Alfabeta
- Suprihanto, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Universitas Terbuka, Karunia, Jakarta
- Dewi, I. P., & Aeni, N. (2012). *Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Pegawai Pada Rutan Klas 1 di Bandar Lampung*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 2, No. 2 (85-95) Oktober 2012, 85-95.
- Jusuf, Jopie. 2008. *Analisis Kredit Untuk Account Officer*. Cetakan ke 8. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuswadi. 2008. *Memahami Rasio-Rasio Keuangan Bagi Orang Awam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. ISBN. 979-20-9356-7.
- Leblebici, D. (2012). *Impact of workplace quality on employee's productivity: case study of a bank in Turkey*. Journal of Business Economics and Finance, 1(1), 38-49.

- Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Margono, 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Nafarin, M, 2008. *Penganggaran Perusahaan*, Cetakan Kedua. Jakarta : Salemba Empat
- Nasution dan Marlina. 2013. *Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih pada Bank Swasta Nasional yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia Periode 2009-2011*. Universitas Sumatera Utara.
- Nasron, & Astuti, T. B. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja (Studi pada Karyawan Bagian Produksi PT Mazuvo Indo)* . Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Vol 1, No 1, 2012.
- Nawawi, 2011. *Administrasi Personel untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*. Haji Masagung, Jakarta.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Riduan dan Tita Lestari, 2009. *Dasar – Dasar Statistika*, Bandung : Alfabeta
- Saputra. (2014). *Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Buran Nusa Respati di Kecamatan Anggana Kabupaten Kukar*. Vol. 2, No. 3. 2014. ISSN. 2338-3651
- Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sekaran, U. (2011). *Research Methods for Business A Skill Building Approach*. 3th Ed. Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Warren, Reeve, dan Fees. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Edisi Dua Puluh Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Wijaya dan Nugroho. 2012. *Model Manajemen Inventori Peti Kemas Non-Standard untuk Pelayaran Domestik*. Vol. 1, September 2012. ISSN. 2301-9271
- Winardi, 2010. *Manajemen Prilaku Organisasi*, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana
- Widi Winarso, 2014. *Jurnal penelitian, Pengaruh Biaya Operasional terhadap Profitabilitas (ROA)*.
- Yulianto dan Setiono. 2013. *Efektifitas Bongkar Muat Petikemas Terhadap Kelancaran Arus Barang PT. Nilam Port Terminal Indonesia (NPTI) Cabang Tanjung Perak Surabaya*. Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan. Vol. 4, No. 1, September 2013.
- Yuwono, S., Sukarno, E., & Ichsan, M. (2008). *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK

Oleh: Muhammad Hilman Fikri

Mahasiswa Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: fikrihilman2017@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan mengenai bagaimana paradigma pelayanan di Indonesia terus berkembang dari old public administration ke arah new public service. Terus berkembangnya teknologi informasi turut mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk e-government dan terwujudnya smart city yang mengintegrasikan berbagai sektor untuk memudahkan masyarakat. Tulisan ini juga memaparkan bagaimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Serang berusaha meningkatkan pelayanan dengan menerapkan e-government di lembaga mereka meski hasilnya belum optimal.

Kata kunci: E-government, smart city, pelayanan masyarakat.

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, dibarengi dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap informasi, menciptakan tuntutan pelayanan di pemerintahan serba cepat. Selama ini, sudah rahasia umum jika pelayanan yang didapatkan masyarakat berbelit-belit dengan prosedur yang tidak jelas. Belum kemudian masih adanya pungutan liar yang dilakukan oknum birokrasi. Akhirnya yang terjadi seperti hukum rimba. Siapa yang punya uang, dia yang cepat mendapatkan pelayanan. Yang tidak punya uang, ya salah sendiri. Muncul kemudian ketidakpuasan di sana sini dibarengi dengan ketidakpercayaan kepada pemerintah.

Mau tidak mau, pemerintah harus melakukan langkah dan terobosan agar kredibilitas tidak tergerus. Bandul paradigma pun bergerak. Old public administration yang selama ini digenggam erat pemerintah dengan menjadikan aparatur dan birokrasi sentral, sedikit demi sedikit berubah. Birokrat yang selama ini mengutamakan laporan dan loyalitas kepada pimpinan sedikit demi sedikit mengalami perubahan menuju arah baru yang disebut new public service (Widyani, 2017). Birokrat adalah pelayan masyarakat. Dengan arahan dari pimpinan, masyarakat harus diberikan pelayanan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian muncul kembali keluhan mulai dari alur pelayanan yang berbelit, wajah masam para aparatur, hingga pungutan liar yang mencekik.

Electronic government merupakan salah satu terobosan dari perubahan paradigma tersebut. Di Indonesia, di tahun 2003, diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Instruksi presiden ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam organisasi pemerintah guna penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif dan efisien. E-government diharapkan dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi, serta terbentuknya jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan berbagai instansi pemerintah dapat bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses informasi dan proses layanan. Sejak saat itu berbagai organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mulai bergerak dalam memanfaatkan TIK untuk mengimplementasikan e-government di daerahnya.

Pengembangan e-government juga dilakukan untuk menghadapi perkembangan internasional dimana transaksi perdagangan tradisional makin terdisrupsi oleh teknologi informasi dan aplikasi yang canggih. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Semakin ke sini, penerapan e-government semakin menggeliat. Berbagai aplikasi pelayanan ditelurkan untuk memudahkan masyarakat. Di tahun 2017, pemerintah kemudian menerbitkan buku panduan penyusunan masterplan smartcity bertajuk Gerakan Menuju 100 Smart City oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Gerakan Menuju 100 Smart City adalah program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan yang bertujuan untuk membimbing pemerintahan kota/kabupaten dalam menyusun smart city masterplan. Harapannya, pemerintah kota/kabupaten bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasi potensi yang ada di masing-masing daerah. Untuk memilih 24 kota/kabupaten di tahap pertama Gerakan Menuju 100 Smart City ini, pemerintah pusat memperhitungkan berbagai parameter. Contohnya adalah Kemampuan Keuangan Daerah (KKD), Daftar Kota/Kabupaten Berkinerja Tinggi, Indeks Kota Berkelanjutan, serta Indeks Kota Hijau.

Smart City menjadi bagian dari pengembangan e-government dengan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di wilayah tersebut. Smart City di definisikan sebagai penggunaan teknologi komputasi cerdas untuk mengintegrasikan komponen-komponen penting dari infrastruktur dan layanan kota, seperti administrasi kota, pendidikan, kesehatan, keselamatan publik, real estate, transportasi dan keperluan kota lainnya, dimana penggunaan keseluruhannya harus dilakukan secara cerdas, saling berhubungan dan efisien (Washburn dalam Shinta, 2017).

Salah satu digitalisasi pelayanan di antaranya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang. Selama ini, pelayanan kependudukan dikenal sangat ribet di masyarakat. Untuk membuat kartu tanda penduduk (KTP), masyarakat harus mendapatkan rekomendasi dari ketua RT, kepala desa, kecamatan, baru kemudian antre di dinas kependudukan dan catatan sipil dengan melampirkan kartu keluarga. Setelah kebijakan penerbitan KTP elektronik di tahun 2014 diberlakukan, tahapan yang dilakukan masyarakat untuk membuat KTP menjadi lebih ribet. Salah satunya dengan terlebih dahulu melakukan perekaman. Prosesnya tidak seperti semudah yang dibayangkan. Masyarakat harus antre berjam-jam untuk melakukan rekam sidik jari, retina, foto, dan tanda tangan. Antrean terjadi karena proses tersebut memerlukan waktu. Belum kemudian jika ada kendala seperti sidik jari tak terbaca, atau server tiba-tiba ngadat.

Selain melayani pembuatan KTP elektronik, dinas kependudukan dan catatan sipil juga melayani pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran, serta akta kematian. Di akhir 2017 lalu, Disdukcapil Kabupaten Serang meluncurkan program Pelayanan Satu Hari Jadi berupa pendaftaran pelayanan secara online di alamat <http://pelayanan-disdukcapil-serangkab.web.id/pelayanan/bantuan>. Tulisan ini akan mengulas lebih lanjut bagaimana perkembangan di masyarakat dengan adanya pelayanan berbasis web tersebut.

2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan E-government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang?
- b. Apa yang menjadi tujuan dan manfaat penerapan E-government?
- c. Apa saja kendala atau penghalang yang dialami dalam penerapan E-government?
- d. Bagaimana pemecahan masalah yang dialami tersebut?

3. Tujuan

Tujuan makalah secara umum adalah untuk menemukan gambaran secara deskriptif mengenai proses pelayanan berbasis online yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Pengertian E-Government

Dalam teori pembentukan negara, negara hadir dari kesepakatan-kesepakatan masyarakat yang membutuhkan adanya pelayanan. Ketika manusia masih terpecah menjadi individu-individu dalam jumlah sedikit, mereka masih bisa mengurus dirinya masing-masing. Lama kelamaan kemudian terjadi interaksi antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak manusia, akan semakin rumit hubungan tersebut. Oleh karena itu, ditunjuklah sekelompok orang untuk mengurus dan mengatur mereka. Sebagai gantinya, individu-individu yang kemudian berkumpul menjadi masyarakat itu membayarkan uang pelayanan dalam bentuk pajak. (Dwipayana, 2012).

Sayangnya, perkembangan belakangan menjadi berbeda. Posisi negara menjadi lebih dominan darimana keinginan masyarakat itu sendiri. Masyarakat kini cenderung yang mengemis kepada negara untuk mendapatkan pelayanan. Padahal jika kita kembali ke konsep awal, negara adalah pelayan bagi masyarakat yang dibayar melalui pajak serta pengelolaan sumber daya alam. E-government menjadi cara bagi pemerintah untuk menepis berbagai anggapan buruk yang dituduhkan. Nurhakim (2014) menyebut bahwa e-government adalah implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur berbelit-belit dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan e-government ini.

Sementara itu, Gronlund dalam Irawan (2013) mengatakan bahwa e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan unit lain dari pemerintah. Teknologi yang digunakan ini dapat melayani sebuah keragaman yang berbeda yaitu pemberian pelayanan pada warga negara yang lebih baik, meningkatkan interaksi dengan dunia bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses terhadap informasi, atau manajemen pemerintah yang lebih efisien. Hasil yang didapat yaitu korupsi yang berkurang, transparansi yang meningkat, kenyamanan yang lebih besar, peningkatan penerimaan negara, dan/atau pengurangan biaya.

Mustopadidjaja dalam Habibullah (2010) menuturkan bahwa e-government diperuntukkan ke dalam: (a) pemerintah yang menggunakan teknologi, khususnya aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan delivery/layanan pemerintah kepada masyarakat kepada masyarakat, partner bisnis, pegawai, dan pemerintah lainnya; (b) suatu proses reformasi di dalam cara pemerintah bekerja, berbagai informasi dan memberikan layanan kepada internal dan eksternal klien bagi keuntungan baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku bisnis; dan (c) pemanfaatan teknologi informasi seperti wide area network (WAN), internet, world wide web, komputer oleh instansi pemerintah untuk menjangkau masyarakat, bisnis dan cabang-cabang pemerintah lainnya untuk: memperbaiki layanan kepada masyarakat, memperbaiki layanan kepada dunia bisnis dan industri, memberdayakan masyarakat melalui akses kepada pengetahuan dan informasi, dan membuat pemerintah bekerja lebih efisien dan efektif.

E-government juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan WEB (jaringan), komunikasi internet, dan dalam kasus tertentu merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan atau dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara. Dari rumusan pengertian tersebut di atas jelas bahwa e-government merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mencapai tujuan antara lain: (1) meningkatkan efisiensi pemerintahan; (2) memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik; (3) memberikan akses informasi kepada publik secara luas; dan (4) menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggungjawab dan transparan kepada masyarakat.

Richardus Eko Indrajit (2006) dalam bukunya *Electronic Government in Action* menuturkan bahwa problem kesiapan untuk menerapkan prinsip-prinsip e-government bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi masalah bersama seluruh komunitas di dalam domain pemerintahan yang dimaksud, yaitu masyarakat, para pelaku bisnis, komunitas organisasi, dan lain sebagainya. Tanda-tanda adanya kesiapan biasanya berasal dari terdapatnya pemimpin atau leader dari pemerintahan yang memperlihatkan political will untuk mempromosikan pengimplementasian e-government. Pemimpin ini tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep belaka, tetapi harus pula menjadi motivator ulung di dalam fase implementasi. Hal kedua yang menunjukkan adanya kesiapan untuk ke arah penerapan e-government adalah adanya suatu kebijakan atau nuansa keinginan dan kesepakatan dari kalangan pemerintah dan stakeholder-nya untuk saling membagi dan tukar-menukar informasi dalam penyelenggaraan aktivitas kegiatan sehari-hari. Nampak sekilas bahwa hal ini sangat sederhana, namun pada tingkatan operasional tidak semudah yang diduga karena masalah menyimpan informasi

untuk diri sendiri dan tidak ingin membaginya dengan pihak lain telah membudaya di dalam diri birokrat.

Ia melanjutkan, dengan adanya pemimpin dan kebijakan di atas, maka paling tidak ada dua prasyarat awal yang telah dipenuhi oleh sebuah komunitas yang telah bersiap diri untuk mengimplementasikan konsep e-government. Di samping kedua hal tersebut, ada sejumlah faktor penentu yang patut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah daerah untuk menerapkan e-government, yaitu:

- **Infrastruktur Telekomunikasi**
Dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan e-government. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang dapat menunjang target atau prioritas pengembangan e-government yang telah disepakati. Namun secara pragmatis, harus pula dipertimbangkan potensi dan kemampuan atau status pengembangan infrastruktur telekomunikasi di lokasi terkait. Untuk daerah yang masih memiliki infrastruktur yang teramat sangat minim, adalah baik dipikirkan pola kerjasama dengan sejumlah pihak swasta guna mengundang mereka berinvestasi di daerah terkait.
- **Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah**
Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan memperlihatkan sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan konsep e-government. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali lembaga internasional yang telah memberikan bantuan dana pinjaman atau hibah untuk membeli sejumlah teknologi perangkat keras bagi pemerintah, namun instrumen tersebut tidak dipergunakan secara maksimal dan banyak yang tidak dirawat sehingga sudah dalam kondisi rusak.
- **Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah**
Yang akan menjadi pemain utama atau subyek di dalam inisiatif e-government pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi performa penerapan e-government. Semakin tinggi tingkat information technology literacy SDM di pemerintah, semakin siap mereka dalam menerapkan konsep e-government.
- **Ketersediaan Dana dan Anggaran**
Sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif e-government yang akan diterapkan, membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya. Pemerintah daerah tertentu harus memiliki jaringan yang cukup terhadap berbagai sumber dana yang ada dan memiliki otoritas untuk menganggarkannya. Harap diperhatikan bahwa dana yang dibutuhkan tidak sekedar untuk investasi belaka, namun perlu pula dianggarkan untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan di kemudian hari.
- **Perangkat Hukum**
Karena konsep e-government sangat terkait erat dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data/informasi dari satu pihak ke pihak lain, masalah keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual misalnya akan merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang atau

peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah harus memiliki perangkat hukum yang dapat menjamin terciptanya mekanisme e-government yang kondusif.

- **Perubahan Paradigma**

Pada hakekatnya, penerapan e-government adalah merupakan suatu proyek change management yang membutuhkan adanya keinginan untuk merubah paradigma dan cara berfikir. Perubahan paradigma ini akan bermuara pada dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk merubah cara kerja, bersikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Jika para pimpinan dan karyawan di pemerintahan tidak mau berubah, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum siap untuk menerapkan konsep e-government.

2. New Public Service

Sri Yuliani (2007) menyebutkan bahwa pelayanan kepada masyarakat dalam new public service tidak semata-mata menitikberatkan para birokrat. Lebih jauh dari itu, pemerintah dan para birokrat melakukan berbagai inovasi bekerjasama dengan berbagai elemen agar pelayanan di masyarakat dapat berjalan dengan baik. Ini mengandung makna bahwa karakter dan nilai yang terkandung dalam pelayanan publik harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Di samping itu, pelayanan publik model baru harus bersifat nondiskriminatif sebagaimana dasar teoritis yang digunakan, yakni teori demokrasi yang menjamin adanya persamaan di antara warga negara, tanpa membedakan asal usul warga negara, kesukuan, ras, etnik, agama, dan latar belakang kepartaian. Ini berarti setiap warga negara diperlakukan sama ketika berhadapan dengan birokrasi publik untuk menerima pelayanan sepanjang syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi. Responsif menjadi kata yang sangat digarisbawahi di sini. Bagaimana cara menciptakan responsif ini? Di era teknologi informasi yang terus berkembang pesat, pengertian responsif bukan hanya petugas sigap untuk memberikan pelayanan kepada warga. Tetapi juga ada sistem yang berjalan yang dia bisa digunakan kapan saja dan dimana saja. Di sinilah kemudian inovasi teknologi berbicara. Bagaimana saat ini semua pelayanan bisa berjalan 24 jam dengan sistem aplikasi yang bisa diakses melalui ponsel atau smartphone, atau bisa diakses via komputer di internet, tanpa petugas harus berjaga melek selama 24 jam. Yang penting masyarakat bisa mendapatkan pelayanan semudah-mudahnya.

2.1 Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Pengertian pelayanan menurut American Marketing Association seperti dikutip dari Hardiyansyah (2011) pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya juga mungkin tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Istilah lain yang sejenis dengan pelayanan itu adalah pengabdian dan pengayoman. Dari seorang administrator diharapkan akan tercermin sifat-sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum, dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil. Administrator lebih

menekankan pada mendahulukan kepentingan masyarakat umum dan memberikan service kepada masyarakat ketimbang kepentingan sendiri.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Bab I pasal 1 ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Mengikuti definisi di atas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik atau jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ihsanudin, 2014).

Membangun sebuah pelayanan yang berkualitas memang bukanlah hal yang mudah, karena akan ditemui banyak tantangan dan kendala yang harus disikapi positif demi pengembangan pelayanan selanjutnya. Tantangan dan kendala ini wajar terjadi mengingat banyaknya komponen-komponen penunjang pengelolaan pelayanan selanjutnya. Tantangan dan kendala ini wajar terjadi mengingat banyaknya komponen-komponen penunjang pengelolaan pelayanan publik. Dalam buku Penyusunan Standar Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2003: 24-27) disebutkan bahwa tantangan dan kendala yang mendasar dalam pelayanan publik adalah:

1. Kontak antara pelanggan dengan penyedia pelayanan
2. Variasi pelayanan
3. Para petugas pelayanan
4. Struktur organisasi
5. Informasi
6. Kepekaan permintaan dan penawaran
7. Prosedur
8. Ketidakpercayaan publik kepada kualitas pelayanan

Umumnya yang sering muncul di mata publik adalah pelayanan yang diberikan para petugas pelayanan. Petugas pelayanan merupakan ujung tombak terdepan yang berhadapan langsung dengan publik. Itu sebabnya, sebagai petugas terdepan harus memiliki profesionalisme, bagaimana cara memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pertanyaan pokok yang harus dijawab dan berkaitan dengan petugas atau pekerja yang terlibat dalam pelayanan antara orang lain; (1). Berapa banyak orang yang diperlukan? (2). Bagaimana perbandingan antara pegawai yang langsung berhadapan dengan pelanggan dan pegawai yang bekerja di belakang layar? (3). Apa saja keterampilan yang harus dimiliki? Dan (4). Bagaimana perilaku yang diharapkan dari pegawai tersebut kepada pelanggan?

Lovelock dan Wright dalam Hardiansyah (2011:44) mengungkapkan bahwa ada empat fungsi inti yang harus dipahami penyedia layanan jasa yaitu:

1. Memahami persepsi masyarakat yang senantiasa berubah tentang nilai dan kualitas jasa atau produk.
2. Memahami kemampuan sumber daya dalam menyediakan pelayanan.
3. Memahami arah pengembangan lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas yang diinginkan masyarakat terwujud.
4. Memahami fungsi lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas jasa produk tercapai dan kebutuhan setiap stakeholders terpenuhi.

Untuk mengetahui kepuasan pelanggan, dapat dilakukan melalui survei pelanggan yang didasarkan pada dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang berkaitan erat dengan kebutuhan pelanggan. Bagaimana mengukur kualitas pelayanan yang diberikan penyelenggara pelayanan, sesungguhnya banyak dimensi-dimensi yang dirancang para ahli yang dapat diadopsi atau sebagai alat pemandu bagi aparatur. Dimensi-dimensi kualitas pelayanan jasa menurut para ahli tidak hanya satu, tapi berbagai macam. Menurut Vanlooy masih dalam Hardiyansyah (2011:45) suatu model dimensi kualitas jasa yang ideal baru memenuhi beberapa syarat apabila:

1. Dimensi harus bersifat satuan yang komprehensif, artinya dapat menjelaskan karakteristik secara menyeluruh mengenai persepsi terhadap kualitas karena adanya perbedaan dari masing-masing dimensi yang diusulkan.
2. Model juga harus bersifat universal, artinya masing-masing dimensi harus bersifat umum dan valid untuk berbagai spektrum bidang jasa.
3. Masing-masing dimensi dalam model yang diajukan haruslah bersifat bebas.
4. Sebaiknya jumlah dimensi dibatasi.

Dengan demikian, untuk dapat menilai sejauhmana mutu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah, memang tidak bisa dihindari, bahkan menjadi tolok ukur kualitas pelayanan tersebut dapat ditelaah dari kriteria dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik. Menurut Zeithaml dalam Hardiyansyah (2011:46), kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi yaitu tangible (berwujud), reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Masing-masing dimensi memiliki indikator sebagai berikut:

Untuk dimensi tangible terdiri atas indikator:

1. Penampilan petugas dalam melayani pelanggan
2. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan
3. Kemudahan dalam proses pelayanan
4. Kedisiplinan petugas dalam melakukan pelayanan
5. Kemudahan ases pelanggan dalam permohonan pelayanan
6. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan

Untuk dimensi reliabiliy terdiri atas indikator:

1. Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan
2. Memiliki standar pelayanan yang jelas
3. Kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan
4. Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan

Untuk dimensi responsiveness terdiri atas indikator:

1. Merespons setiap pelanggan atau pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan
2. Petugas melakukan pelayanan dengan cepat
3. Petugas melakukan pelayanan dengan tepat
4. Petugas melakukan pelayanan dengan cermat
5. Petugas melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat
6. Semua keluhan pelanggan direspons oleh petugas

Dimensi assurance terdiri atas indikator:

1. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan
2. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan
3. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan
4. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan

Untuk dimensi empathy terdiri atas indikator:

1. Mendahulukan kepentingan pemohon atau pelanggan
2. Petugas melayani dengan ramah
3. Petugas melayani dengan sikap sopan santun
4. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif
5. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan

Lima dimensi pelayanan publik tersebut menurut Zeithaml dapat dikembangkan menjadi 10 dimensi berikut ini:

1. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi.
2. Reliable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.
3. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan.
4. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan.
5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi.
6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat.
7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya dan risiko.
8. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan.

9. Communication, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.
10. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

Menurut De Vreye dalam Intan Dwi Andyaningrum (2017), dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, ada tujuh dimensi dan indikator yang harus diperhatikan:

1. Self esteem (harga diri) dengan indikator: pengembangan prinsip pelayanan, menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya menetapkan tugas pelayanan yang futuris, dan berpedoman pada kesuksesan hari esok lebih baik dari hari ini.
2. Exceed expectation (memenuhi harapan), dengan indikator penyesuaian standar pelayanan, pemahaman terhadap keinginan pelanggan, dan pelayanan sesuai harapan petugas.
3. Recovery (pembenahan), dengan indikator: menganggap keluhan merupakan peluang, bukan masalah: mengatasi keluhan pelanggan, mengumpulkan informasi tentang keinginan pelanggan, uji coba standar pelayanan dan mendengar keluhan pelanggan.
4. Vision (pandangan ke depan), dengan indikator: perencanaan ideal di masa depan, memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
5. Improve (perbaikan), dengan indikator: perbaikan secara terus menerus, menyesuaikan dengan perubahan, mengikutsertakan bawahan dalam penyusunan rencana, investasi yang bersifat nonmaterial, penciptaan lingkungan yang kondusif, dan penciptaan standar yang responsif.
6. Care (perhatian), dengan indikator menyusun sistem pelayanan yang memuaskan pelanggan, menjaga kualitas, menerapkan standar pelayanan yang tepat, dan uji coba standar pelayanan.
7. Empower (pemberdayaan), dengan indikator: memberdayakan karyawan/bawahan, belajar dari pengalaman, memberikan rangsangan, pengakuan dan penghargaan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Gesperz dalam Hardiyansyah (2011:51). Gesperz menyebutkan ada beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam peningkatan kualitas pelayanan, yaitu:

1. Ketepatan waktu pelayanan.
2. Akurasi pelayanan yang berkaitan dengan reliabilitas.
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.
4. Tanggung jawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan maupun penanganan keluhan.
5. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung.
6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan.
7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi.
8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas atau penanganan permintaan khusus.
9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang, kemudahan, dan informasi.

10. Atribut yaitu pendukung pelayanan lainnya seperti kebersihan lingkungan, pendingin udara, fasilitas ruang tunggu, dan sebagainya.

Menurut Brown dalam Hamdani (2015) bahwa di mata masyarakat kualitas pelayanan meliputi ukuran-ukuran sebagai berikut:

1. Reliability, yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.
2. Assurance yaitu pengetahuan dan kemampuannya untuk meyakinkan.
3. Empathy yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat.
4. Tangible yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan serta penampilan pribadi.

Selanjutnya, Lovelock mengemukakan lima prinsip yang harus diperhatikan bagi penyelenggaraan pelayanan publik, yang meliputi:

1. Tangible seperti kemampuan fisik, peralatan, personil, dan komunitas material.
2. Reliable yakni kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dapat tepat dan memiliki keajegan.
3. Responsiveness yakni rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan.
4. Assurance yakni pengetahuan, perilaku, dan kemampuan pegawai.
5. Empathy yakni perhatian perorangan kepada pelanggan.

Dimensi-dimensi pelayanan publik yang dikemukakan oleh Lovelock di atas tidak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Zeithaml dkk. Pendapat lain dikemukakan oleh Salim & Woodward dalam Dwiyanto (2015). Menurutnya, dimensi kualitas pelayanan publik terdiri dari economy, efficiency, effectiveness, dan equity.

1. Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya yang sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.
4. Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek pemerataan.

Sementara menurut Lavinne dalam Dwiyanto (2015), dimensi kualitas pelayanan terdiri atas:

1. Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan pelanggan.
2. Responsibility atau tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian nyata penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

3. Penerapan Layanan Online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang

Sejak akhir 2017, Disdukcapil Kabupaten Serang, Provinsi Banten, mulai menerapkan pelayanan online. Sistem ini diberlakukan tentunya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi kemudian jika mengingat kontur geografis Kabupaten Serang yang sangat luas. Jumlah kecamatan di Kabupaten Serang mencapai 29 kecamatan. Paling barat ada Kecamatan Cinangka, Puloampel yang berjarak lebih dari 20 kilometer ke kantor disdukcapil. Kemudian di wilayah paling timur ada Kecamatan Jawilan yang mencapai 20 kilometer lebih ke kantor disdukcapil. Atau di wilayah paling selatan ada Kecamatan Tunjung Teja yang juga mencapai jarak sekitar 20 kilometer. Kantor Disdukcapil Kabupaten Serang sendiri berada di jalan Serang-Cilegon, Kagungan Kota Serang.

Jadi kalau ada masyarakat yang hendak mengurus KTP dari Kecamatan Jawilan, maka ia harus menempuh jarak lebih dari 20 kilometer. Belum tentu hari itu berkas administrasi kependudukan yang diinginkan jadi. Tapi ongkos yang keluar kan sudah pasti. Jika menggunakan angkutan, minimal Rp20 ribu keluar untuk sekali jalan. Di kantor disdukcapil, masyarakat secara otomatis harus menunggu lama. Berangkat pagi, pulang petang. Tentu harus keluar dana untuk makan, minum, parkir, dan lain sebagainya. Jika kita kalkulasikan, warga yang datang ke kantor disdukcapil untuk mengurus berkas administrasi kependudukan harus keluar dana sekitar Rp50 ribu sampai Rp100 ribu.

Dengan adanya sistem pelayanan online yang diselenggarakan disdukcapil, maka masyarakat tidak perlu langsung datang ke kantor disdukcapil. Dia cukup mengakses web http://pelayanan-disdukcapil-serangkab.web.id/pelayanan/pelapor/login_or_register. Masyarakat yang mendaftar untuk membuat KTP elektronik mengisi nomor induk kependudukan dalam KTP, atau bila belum memiliki, bisa mendaftar melalui nomor kartu keluarga. Selain KTP elektronik juga ada pelayanan pembuatan akta kelahiran dan akta kematian. Pembuatan akta kelahiran dan akta kematian juga cukup mudah. Tinggal memasukan nomor induk kependudukan, mengisi dan mengunggah data yang diperlukan. Setelah diverifikasi, masyarakat akan dihubungi petugas baik melalui sms/pesan teks atau email.

Setelah itu, masyarakat tinggal datang ke kantor disdukcapil sesuai dengan konfirmasi dari petugas. Langkah yang dilakukan disdukcapil ini sangat efisien bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor disdukcapil, yang bila pun datang, belum tentu hari itu keperluan administrasi kependudukan langsung jadi.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang Asep Saepudin mengatakan bahwa semenjak diluncurkan di tahun 2017, sampai saat ini sudah ada puluhan ribu warga yang mengakses melalui <http://pelayanan-disdukcapil-serangkab.web.id>. Untuk pembuatan akta kelahiran dan akta kematian, disdukcapil menjamin bisa satu hari jadi. Sebelum-sebelumnya, pembuatan akta kelahiran harus menunggu waktu yang sangat lama. Di awal 2017, kata Asep, warga yang membuat akta kelahiran harus menunggu minimal tiga bulan. Inovasi pelayanan yang diberikan pihaknya, adalah komitmen Disdukcapil Kabupaten Serang untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Meski demikian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh disdukcapil. Hal ini yang salah satunya kemudian membuat disdukcapil memutuskan untuk menghentikan pelayanan secara online pembuatan KTP elektronik. Konsep pelayanan via online, kata Asep, menekankan administrasi kependudukan bisa satu hari jadi. Tetapi KTP elektronik ternyata tidak bisa dilakukan demikian. Ada dua penyebab. Pertama, soal keterbatasan alat perekaman KTP elektronik di kantor disdukcapil dan di kantor kecamatan. Yang kedua, KTP elektronik tidak bisa serta merta dicetak tanpa melalui proses

penunggalan data di server pusat Kementerian Dalam Negeri. Antusiasme warga sejak sistem online diberlakukan sangat tinggi. Di tiga bulan pertama pemberlakuan, warga yang mendaftar KTP elektronik dan akta kelahiran atau kematian mencapai 5.000 pendaftar. Masalahnya di tahapan pembuatan KTP elektronik, warga harus melakukan perekaman data terlebih dahulu. Dan tahapan ini tidak bisa dilakukan sekaligus kepada seluruh pendaftar karena keterbatasan alat. Oleh karena itu maka, waktu yang dibutuhkan oleh warga untuk membuat KTP elektronik tetap memakan waktu meski saat ini dari sisi biaya bisa lebih ditekan. Oleh karena itu, pelayanan pembuatan KTP elektronik di website Disdukcapil Kabupaten Serang memberlakukan sistem buka tutup. Ada kalanya dibuka, ada kalanya ditutup. Berbeda dengan pelayanan akta kelahiran. Kelahiran bayi tidak sebanyak jumlah warga yang membuat KTP elektronik. Sehingga target pelayanan melalui sistem online satu hari jadi bisa terpenuhi.

Beberapa tantangan lain yang dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Serang adalah server yang dimiliki bukan server mandiri yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Server di disdukcapil adalah server dengan sistem numpang bayar bandwidth sehingga rentan untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, tenaga ahli di bidang teknologi informasi yang dimiliki disdukcapil terbatas. Hanya ada satu orang yang mengurus sistem online tersebut, dan itu pun dia nyambi menyelesaikan pekerjaan yang lain. Sehingga kemudian jika orang tersebut dipindahtugaskan, bisa jadi sistem onlinenya terganggu.

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi informasi tidak bisa dihindari. Dia menjadi disruptif bagi mereka yang tidak mau beradaptasi, termasuk pemerintah. Pemerintah harus mengadaptasikan diri dengan perkembangan lingkungan ada. Merombak dan mencari inovasi-inovasi agar tuntutan masyarakat bisa terpenuhi. Apalagi, ke depan generasi yang dihadapi adalah generasi milenial yang setiap hari terbiasa serta otomatis dan menggunakan pemanfaatan barang berbasis online.

Langkah yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang dengan mulai menerapkan sistem pelayanan online sudah tepat dilakukan. Ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat.

Meski demikian, ke depan sistem layanan ini harus terus ditingkatkan dan diperbaharui menjadi sistem pelayanan yang profesional, akuntabel, dan memiliki ketahanan yang baik dari sisi datanya. Sehingga kemudian kepuasan masyarakat akan pelayanan prima dari pemerintah bisa terpenuhi.

REFERENSI

- Andyaningrum, Intan Dwi. 2017. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 5 No.2, Agustus 2017.
- Dwipayana, Ari. 1999. Antara Leviathan dan Hukum Ikan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 3 No. 2, November 1999.
- Dwiyanto, Agus. 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Gramedia: Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Esabella, Shinta. 2016. *Menuju Konsep Smart City*. Universitas Teknologi Sumbawa.
- Fernanda, Desi. 2003. Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2 No.2, Oktober 2003.
- Habibullah, Achmad. 2010. Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis* Vol 23, Nomor 3, Desember 2010.
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Gavamedia: Yogyakarta.
- Indrajit, Eko. 2007. *Electronic Government in Action Strategi Implementasi di Berbagai Negara*. Aptikom: Jakarta.
- Nurhakim, Satya. 2014. Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 11 No. 3, Desember 2014.
- Sri Widayani, Ida Putu Ayu. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik dalam Pelayanan Publik. *Sintesa Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 8 No. 2, 2017.
- Yuliani, Sri. 2007. New Public Service: Mewujudkan Birokrasi yang Pro-citizen. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS* Vol. 3 No. 1, 2007.

